



# STATISTIK 60<sup>Tahun</sup> INDONESIA MERDEKA



BPS

STATISTIK 60 TAHUN INDONESIA MERDEKA

2005

BPS Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

<http://www.bps.go.id>

ISBN 979-724-328-1



9 789797 243289

BPS

Badan Pusat Statistik  
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710  
Telp: (021) 3842508, 3841195, 3810291-5  
Fax.: 3863740, E-mail: bpsHQ@bps.go.id  
Homepage: <http://www.bps.go.id>





K. B. O. K. L. A. M. A. S. I. I.  
kami bangsa Indonesia dengan  
Indonesia.  
Hal-hal yang mengenai p...  
selenggarakan dengan tjara...  
singkat dan ringkas.





...  
... dan ini merupakan kemerdekaan  
... ndahan kemerdekaan d.l.l., di-  
... aksama dan dalam tempo yang se-  
... Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05-  
... tag nama bangsa Indonesia.  
Soekarno/Hatta.  
Soekarno.  
Hatta.







STATISTIK  
60<sup>Tahun</sup> INDONESIA  
MERDEKA

<http://www.bps.go.id>









**STATISTIK 60 TAHUN INDONESIA MERDEKA**  
**STATISTICS OF 60<sup>th</sup> INDONESIA INDEPENDENCE**

**ISBN : 979-724-328-1**

**No. Publikasi / Publication Number : 03200.0501**

**Katalog BPS / BPS Catalogue : 1187**

**Ukuran Buku / Book Size : 19 cm x 27 cm**

**Jumlah Halaman / Total Pages : 390 Halaman / Pages**

**Naskah / Manuscript :**

**Badan Pusat Statistik**

*BPS-Statistics Indonesia*

**Penyunting / Editor :**

**Tim Penyusun**

**Gambar Kulit / Cover Design :**

**Direktorat Diseminasi Statistik**

*Subdirectorate of Statistical Publication*

**Gambar dan Foto oleh/ Picture and photos by :**

**Direktorat Diseminasi Statistik**

*Directorate of Statistical Dissemination*

**Diterbitkan oleh/ Published by :**

**Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia**

*BPS - Statistics Indonesia*

**Dicetak oleh/ Printed by :**

**CV. Dharmaputra**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

*May be cited with reference to the source*



**TIM PENYUSUN BUKU  
STATISTIK 60 TAHUN INDONESIA MERDEKA**

**Pengarah**

Choiril Maksum, Subagio Dwijosumono,  
Muljono Moeah, Rusman Heriawan, Slamet Sutomo, Pietojo

**Nara Sumber**

Suharno, Arizal Ahnaf, Wynandin Imawan, Ardief Achmad,  
Joseph Rasmuli Tarigan, Ali Rosidi, Nursinah Amal Uray, Supriyanto,  
Abdul Rachman, Sunaryo Urip, Salvatore Happy Harjo, Sihar Lumbantobing,  
Agus Suherman, Djamal, Murdianto, Gema Purwana, Karsidik,  
Indrarto Hadijanto, Mudjihandoko, Satwiko Darmesto

**Tim Penyusun**

**Penanggung Jawab**

Sihar Lumbantobing

**Wakil Penanggung Jawab**

Abdul Rachman

**Pemimpin Pelaksana**

Gema Purwana

**Wakil Pemimpin Pelaksana**

Sulistio Pambudi Utomo, Suwantoro

**Penyunting**

Mohammad Ari Nugraha, Bana Bodri,  
Dinarsih, Yomin Tofri, Titi Kanti Lestari, Heru Margono,  
Johanes de Brito Priyono, Sri Andayani,  
Suparwati, Pramadya

**Penyusun Naskah**

*Bidang Kewilayahan: Dudy S. Sulaiman, Rodin*  
*Bidang Kependudukan: Tati Irwati, Aan Sujannah*  
*Bidang Kesejahteraan Rakyat: Meity Trisnowati, Hilmiah*  
*Bidang Pertanian: Suhariyanto, Hasnizar Nasution, Sigit Purnomo*  
*Bidang Industri: Suryamin, Sri Julia Indriati, Dedy Waluyadi, Hanif Yahya*  
*Bidang Organisasi dan Kegiatan BPS: Agus Soebeno, Nanang Triono Basuki*  
*Bidang Neraca/Pendapatan Nasional: Yomin Tofri, Emil Azman Sulthani*  
*Bidang Perdagangan dan Jasa: W.S. Dantes Simbolon, Sutono*  
*Bidang Keuangan dan Harga: Sri Kusumowati, Muljono*  
*Bidang Analisis Statistik: Gantjang Amannullah*  
*Bidang Ketahanan Sosial: Johny Anwar*

**Pelaksana Teknis**

Ulah Triwibowo, Andrean, Thomas Wunang Tjahjo, Edi Junaidi,  
Sri Mulyono, Hari Nugroho, Bambang Windujati, Awang Pramila, Armed Jahja, Muhidin





*Enam puluh tahun telah berlalu  
Kehidupan telah kita lalui bersama  
Ada suka, ada duka  
Kami catat, kami rekam  
Kami persembahkan untukmu  
Indonesia*

“Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka”

*Jakarta, Agustus 2005*















**Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
*Presiden Republik Indonesia*







**Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla**  
*Wakil Presiden Republik Indonesia*



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	xix
<b>Kata Pengantar</b>	xxi
<b>Keterangan Notasi</b>	xxiii
<b>Pendahuluan</b>	
Perkembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan	2
Perkembangan Sosial dan Kesejahteraan Penduduk	8
Perkembangan Ekonomi	14
<b>Perkembangan Sosial dan Kesejahteraan Penduduk</b>	
Penduduk	24
Tenaga Kerja	34
Kesehatan	42
Pendidikan dan Sosial Budaya	48
Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga	54
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan	60
Perumahan	66
Lingkungan Hidup	72
<b>Perkembangan Ekonomi</b>	
Pertumbuhan Ekonomi	92
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106
Pertambangan	128
Industri Pengolahan	138
Energi	148
Konstruksi	156
Perdagangan	162
Transportasi	174
Pos dan Telekomunikasi	184
Pariwisata	192
Keuangan dan Harga	204
Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	224
Neraca Nasional	236
<b>Lampiran</b>	248





## KATA PENGANTAR

Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kesatuan dan persatuannya di tengah-tengah dinamika kehidupan bangsa-bangsa di dunia, di antaranya ada yang mengalami peperangan, pertentangan antarsuku, bahkan terbagi menjadi beberapa negara baru. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa dengan segala upaya, kerja keras, dan kearifan seluruh komponen bangsa, saat ini masyarakat Indonesia sudah dapat merasakan dan mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan pada saat kemerdekaannya enam puluh tahun yang lalu.

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan diseminasi data statistik untuk bermacam kepentingan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60 ini mempersembahkan suatu publikasi khusus dengan judul “Statistik 60 Tahun Indonesia merdeka”.

Buku ini dirancang agar dapat memberikan gambaran kemajuan di berbagai sektor yang telah dicapai bangsa Indonesia melalui beragam data dan informasi statistik yang dihimpun oleh BPS sejak Indonesia merdeka. Untuk dapat melihat pasang-surut perkembangan yang terjadi sesudah kemerdekaan hingga saat ini, maka dalam buku ini diupayakan pula menyajikan seri data dalam kurun waktu tersebut sesuai dengan ketersediaan data. Dengan demikian diharapkan informasi ini bermanfaat pula sebagai dokumentasi historis bagi generasi yang akan datang. Di samping itu, untuk dapat melihat kiprah BPS dalam urusan statistik, maka dalam buku ini dipaparkan pula mengenai organisasi dan kegiatan-kegiatan BPS selama ini.

Pembuatan buku ini merupakan hasil kerja sama antara unit-unit organisasi teknis di BPS dengan tim penyusun yang dibentuk khusus untuk maksud ini. Untuk itu kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak dari rancangan awal hingga pencetakan akhir buku ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik mengenai buku ini dan juga mengenai BPS akan kami terima dengan senang hati.

Jakarta, 17 Agustus 2005

Kepala Badan Pusat Statistik



**Dr. Choiril Maksum**





<http://www.bps.go.id>

**Keterangan Notasi**

Data tidak tersedia	: ts
Data dapat diabaikan	: 0
Data tidak mungkin tersedia	: -
Angka sementara	: *)
Angka sangat sementara	: **)
Angka Perkiraan	: e)

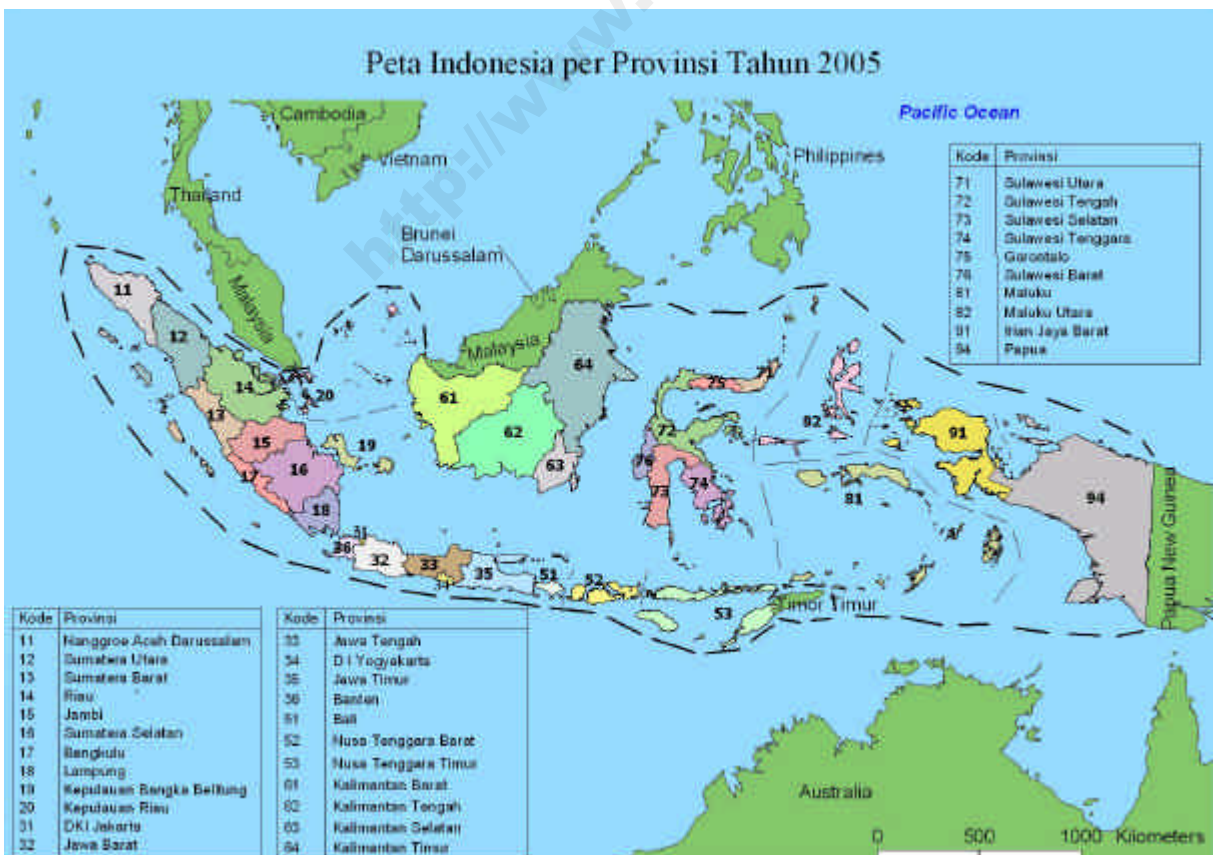




## Indonesia dalam Peta Dunia



## Peta Indonesia per Provinsi Tahun 2005





STATISTIK  
60 Tahun INDONESIA  
MERDEKA





# **PERKEMBANGAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**



## 1.1 PERKEMBANGAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

### RINGKASAN

Indonesia terletak antara 94°58'21" Bujur Timur dan 141°00'00" Bujur Timur, 06°04'30" Lintang Utara dan 11°00'36" Lintang Selatan. Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia dibagi menurut jenjang pemerintahan: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Perkembangan wilayah administrasi pemerintahan tersebut sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat atas pelayanan administrasi dan peningkatan kesejahteraan.

Kurun waktu pemerintahan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga masa, yaitu: Masa Orde Lama (1955 – 1965), Masa Orde Baru (1966 – 1998), dan Masa Orde Reformasi (1999 sampai dengan sekarang). Jumlah wilayah administrasi pemerintahan mengalami perkembangan untuk setiap masa sehubungan dengan perubahan sosial politik pada era tersebut.

Pada Tahun 1955 jumlah provinsi hanya terdiri dari 10, tetapi pada akhir Masa Orde Lama (1965), jumlah provinsi berkembang menjadi 25. Pada Masa Orde Baru sempat bertambah menjadi 27 provinsi, tetapi di awal Masa Reformasi (1999), jumlah provinsi berkurang menjadi 26. Hal ini disebabkan karena Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari Republik Indonesia, setelah adanya jajak pendapat rakyat Timor Timur. Jumlah provinsi berubah menjadi 33 pada Tahun 2005 seiring dengan era reformasi berkembang di daerah.

Pola perubahan jumlah wilayah pemerintahan administrasi di Indonesia adalah relatif tetap di awal Masa Orde Lama, tetapi sedikit ada pemekaran terjadi pada Masa Orde Baru, kemudian, pemekaran besar-besaran terjadi pada Masa Orde Reformasi. Hal ini tercermin dalam jumlah wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Hampir 30 persen pertambahan jumlah kabupaten/kota terjadi di era Orde Reformasi, sedangkan pertambahan jumlah kecamatan sudah terjadi sejak Masa Orde Baru dan Orde Reformasi, masing-masing sekitar 30 persen. Perubahan menyolok untuk wilayah desa terjadi di akhir Orde Baru yaitu sekitar hampir 50 persen.

### SUMMARY

*Indonesia is located between 94°58'21" and 141°00'00" east longitude and from 06°04'30" north to 11°00'36" south latitude. The Republic of Indonesia is administratively divided into province, regencies/municipalities, subdistricts, and villages. The developments of the administrative activities parallel with the improvement in administrative services and welfare.*

*The era of Indonesian government can be divided into three famous period: the Old Order (1955–1965), the New Order (1966–1998), and the Reformation Order (1999–now). The total number of administrative regions immediately increased as the social politics changed.*

*In 1955, it was only 10 provinces, however, in the end of the Old Order era the total number of province became 25. During the New Order, it had increased to 27 provinces, but in the beginning of Reformation era, one province was separated from the Republic. It was attributable to the people vote to ask for an independent country. In the beginning of 2005, the province in Indonesia was 33 after a lot of regions asked for their greater autonomy to govern their regions.*

*The pattern of total number of government administration in Indonesia was relatively stable in the beginning of the Old Order, however, there were few new regions in the era of the New Order, then, more new regions were constructed to make the government more efficient during the Reformation era. Almost 30 percent of new regencies/municipalities were constructed which was never happened in the previous era. It was also about 30 percent of new sub districts developed in the New Order and Reformation Order. The incredible differences of villages total number had happened in the beginning of the New Order era, about 50 percent new villages were constructed.*

### 1.1.1 Pendahuluan

Republik Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia ditinjau dari luas wilayah, jumlah pulau, dan jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 wilayah Indonesia terletak dari 94°58'21" Bujur Timur sampai 141°00'00" Bujur Timur, dan dari 06°04'30" Lintang Utara sampai 11°00'36" Lintang Selatan, sehingga Indonesia dibagi dalam tiga wilayah waktu yakni Waktu Indonesia Timur (WIT), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Barat (WIB). Kepulauan Indonesia berada di daerah Khatulistiwa sehingga mempunyai iklim tropis, terdapat dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Disamping itu Indonesia juga terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Karena dikelilingi lautan dan laut yang besar dan luasnya perairan di dalamnya menyebabkan Indonesia daerah tropis yang banyak hujan. Kepulauan Indonesia merupakan bagian dari gugusan gunung berapi Mediteranian (Sumatera, Jawa, Sunda Kecil sampai ke Banda) dan Circum Pasific, sehingga banyak gunung berapi yang masih aktif menjadikan rawan gempa dan letusan gunung berapi. Salah satu akibatnya adalah Bencana Alam Nasional gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara.

Geografis Indonesia membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dan membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1.888 km, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 5.193.252 km<sup>2</sup> yang terdiri 1.890.754 km<sup>2</sup> luas daratan dan 3.302.498 km<sup>2</sup> luas lautan, dengan panjang garis pantai 108.000 km. Berdasarkan hasil survei LAPAN dan LIPI menunjukkan bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 18.110 buah, yang besar (dari barat ke timur) adalah Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pulau Bali yang terkenal terletak di sebelah timur Jawa.

Negara kesatuan yang berbentuk republik ini pada tahun 2005 terdiri dari 33 provinsi, 349 kabupaten, 91 kota, 5.227 kecamatan, dan 69.868 desa/kelurahan.

Sekitar 60 persen dari 220 juta penduduknya terkonsentrasi di pulau Jawa. merupakan salah satu negara yang sangat beragam suku bangsanya dengan ratusan kelompok etnis yang masing-masing mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda.

Secara garis besar, sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi sembilan zaman, yaitu Zaman Prasejarah, Zaman Kerajaan Hindu-Budha, Zaman Kerajaan Islam, Zaman Penjajahan, Zaman Kebangkitan Nasional, Zaman Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan, Zaman Orde Lama, Zaman Orde Baru, dan Zaman Orde Reformasi.

Pada Zaman Prasejarah, kepulauan Indonesia dihuni oleh Bangsa Austronesia dari Myanmar, Muangthai, dan Malaka. Mulai abad ke-9 SM, Indonesia menerima pengaruh dari Hindia Muka, baik di bidang ekonomi, politik, agama, maupun kebudayaan. Saudagar dari Sri Lanka dan India berdatangan untuk berdagang sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Budha dan Hindu. Sekitar 400 tahun sebelum Masehi, Indonesia telah didominasi oleh penganut Budha dan Hindu, yang kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Budha dan Hindu. Sekitar tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Syailendra di Jawa Tengah yang berbasis Budha dengan peninggalan Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon, merupakan kerajaan utama di wilayah Indonesia. Akhir Abad XIII di Jawa Timur mulai berkembang Kerajaan Majapahit yang besar dan berbasis Hindu. Pada sekitar tahun 1400 Masehi, Agama Islam menyebar dari Malaka dan pusat-pusat perdagangan pantai ke Indonesia. Kerajaan yang berbasis Islam pertama di Indonesia adalah Samudera Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa.

### 1.1.2 Masa Penjajahan

Zaman Penjajahan dimulai ketika ekspedisi Portugis dibawah Alfonso d' Albuquerque merebut kota Malaka untuk menguasai jalur perdagangan Selat Malaka pada tahun 1511, dan Maluku pada tahun 1522. Selanjutnya mulai membangun pelabuhan-pelabuhan perdagangan di Indonesia. Ekspedisi Belanda di bawah pimpinan

Cornelis de Houtman, yang datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596, berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1606, Spanyol pada tahun 1663 dan Inggris tahun 1667. Mulai tahun 1602, kongsi dagang Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), mulai menguasai dan mengontrol penuh lalu lintas perdagangan di Indonesia, dan secara politik Belanda juga telah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1619 Belanda di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon Coen menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa dan membangun kota pelabuhan yang diberi nama Kota Batavia (Jakarta sekarang). Pada tahun 1799, VOC menyerahkan seluruh kekuasaan atas kontrol perdagangan dan politik kepada Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1811, Kerajaan Inggris mengambil alih kekuasaan Kerajaan Belanda di Indonesia pada saat terjadinya peperangan Napoleon di Eropa. Namun, pada tahun 1816, kembali Belanda menguasai Indonesia. Pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai melebarkan kekuasaannya ke pulau-pulau lain selain Sumatera dan Jawa. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh kepulauan Indonesia kecuali Timor Portugis.

Dengan diilhami kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Korea pada tahun 1912, mulai bangkit pergerakan nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1942-1945, saat Perang Dunia II, Jepang berhasil merebut kekuasaan atas Belanda, dan menduduki Indonesia sampai dengan tahun 1945.

### 1.1.3 Masa Kemerdekaan

#### a. Orde Lama (1945-1965)

Pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika masih dalam pendudukan Jepang yang sudah menyerah kepada Sekutu, atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia tentu saja tidak diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pada tahun 1949 Pemerintah Hindia Belanda mengakui

**Tabel 1.1.1**  
**Wilayah Administrasi pada Masa Orde Lama (1955–1965)**

Tahun	Jumlah Wilayah Administrasi					Luas Wilayah
	Provinsi	Kabupaten	Kotapraja	Kecamatan	Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1955	10	164	38	2 103	47 151	1 904 345
1956	16	163	42	2 513	47 305	1 904 345
1957	19	170	42	2 826	47 305	1 904 345
1958	21	170	42	2 826	47 305	1 904 345
1959	21	170	42	2 936	47 305	1 904 345
1960	22	209	47	2 950	47 305	1 904 345
1961	22	214	47	2 950	47 305	1 904 345
1962	22	214	47	2 854	47 305	1 904 345
1963	22	228	53	3 119	43 765	1 904 345
1964	25	228	53	3 119	43 765	1 904 345
1965	25	228	53	3 119	43 765	1 904 345

kemerdekaan Indonesia. Wilayah administrasi pemerintahan pada awal negara Indonesia 1950-an ditata dengan susunan Daerah Swatantra Tingkat I (= Daswati I = provinsi), Karesidenan, Daerah Swatantra Tingkat II (= Daswati II = kabupaten/kotapraja), Kawedanaan (= distrik), Onderdistrik (= kecamatan), dan desa. Dari Pemilihan Umum tahun 1955, diperoleh catatan terdapat 10 provinsi, 164 kabupaten, 38 kotapraja, 2.103 kecamatan, dan 47.151 desa. Pada akhir Orde Lama (1965) terdapat tambahan 15 provinsi, 64 kabupaten, 15 kotapraja, 1.016 kecamatan, dan sebaliknya terjadi penurunan jumlah desa sebanyak 3.386 akibat adanya penggabungan sejumlah desa. Dengan demikian pada tahun 1965 jumlah wilayah administrasi pemerintahan menjadi 25 provinsi, 228 kabupaten/kotapraja, 3.119 kecamatan, dan 43.765 desa. Tahun 1961, Soekarno memperkenalkan program pembangunannya dengan sebutan Pembangunan Semesta Berencana. Pada tahun 1963, Indonesia memegang kontrol atas wilayah Irian Barat sekarang disebut Papua, hal ini sesuai dengan hasil jajak pendapat rakyat Irian Barat pada tahun 1968. Pada tahun 1965 telah terjadi tragedi nasional berdarah G30S yang diikuti penghancuran organisasi dan anggota Partai Komunis Indonesia.



**Tabel 1.1.2**  
**Wilayah Administrasi pada Masa Orde Baru**

Tahun	Jumlah Wilayah Administrasi				
	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1966	25	228	53	3 119	43 824
1967	25	228	53	3 119	43 824
1968	25	230	54	3 119	43 824
1969	26	228	54	3 173	47 127
1970	26	233	54	3 160	47 278
1971	26	233	54	3 160	47 278
1972	26	233	54	3 117	45 685
1973	26	233	54	3 117	45 685
1974	26	233	54	3 117	55 685
1975	26	233	54	3 197	55 685
1976	27	246	54	3 270	65 034
1977	27	246	54	3 348	65 183
1978	27	246	54	3 349	65 372
1979	27	246	54	3 349	65 372
1980	27	246	54	3 349	65 372
1981	27	246	54	3 349	65 372
1982	27	246	54	3 349	65 372
1983	27	246	54	3 517	66 154
1984	27	246	55	3 539	67 534
1985	27	246	55	3 539	67 534
1986	27	246	55	3 542	67 949
1987	27	246	55	3 586	65 517
1988	27	241	55	3 601	66 979
1989	27	241	55	3 601	66 979
1990	27	241	55	3 625	67 033
1991	27	242	56	3 639	62 061
1992	27	243	60	3 639	65 554
1993	27	243	60	3 639	65 554
1994	27	243	60	3 839	65 198
1995	27	243	62	3 844	65 852
1996	27	243	63	4 022	66 158
1997	27	249	65	4 028	66 545
1998	27	249	65	4 028	67 925

### b. Orde Baru (1966-1998)

Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun membawa orientasi baru. Di era Orde Baru ini, tahun 1976, atas permintaan rakyat Timor Timur yang pro integrasi dengan Indonesia wilayah Timor Timur secara resmi masuk Indonesia sebagai salah satu provinsi. Selama Orde Baru perubahan yang menyangkut wilayah administrasi pemerintahan adalah penghapusan karesidenan dan kawedanaan, dan adanya kelurahan di perkotaan. Juga terjadi penambahan jumlah desa/kelurahan yang sangat besar sebanyak 24.160 desa/kelurahan. Di samping itu terjadi juga penambahan 2 provinsi, 21 kabupaten, 12 kota, dan 909 kecamatan. Tahun 1998, terjadi krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti mundurnya Presiden Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

### c. Orde Reformasi (1999-Sekarang)

Mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI, Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden RI. Tahun 1999, sesuai dengan hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia menjadi Negara Timor Leste.

Dari hasil Pemilu tahun 1999 yang merupakan Pemilu pertama pada Orde Reformasi, Abdurrachman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru sampai tahun 2002. Selanjutnya, Megawati Soekarno Putri yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden diangkat menjadi Presiden RI. Pada tahun 2004, sesuai hasil pemilihan umum, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, wilayah administrasi pun berkembang dengan pesat. Awal Orde Reformasi (1999) jumlah provinsi ada 26, sekarang menjadi 33 provinsi, kabupaten/kota dari 268 menjadi 440 kabupaten/kota pada tahun 2005, kecamatan dari 4.044 menjadi 5.277 kecamatan. Jumlah desa/kelurahan relatif stabil, hanya ada sedikit penurunan jumlah, karena adanya perubahan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari desa/kelurahan menjadi nagari.

**Tabel 1.1.3**  
**Wilayah Administrasi pada Masa Orde Reformasi**

Tahun	Jumlah Wilayah Administrasi					Luas Wilayah
	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1999	26	268	73	4 044	69 065	1 922 570
2000	26	268	73	4 049	69 050	1 922 570
2001	30	268	85	4 424	68 819	1 890 754
2002	30	302	89	4 918	70 460	1 890 754
2003	30	349	91	4 994	70 921	1 890 754
2004	33	349	91	5 155	69 474	1 991 232
2005	33	349	91	5 277	69 868	1 860 360



STATISTIK  
60 Tahun **INDONESIA**  
MERDEKA





## **PERKEMBANGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK**

---

## 1.2 PERKEMBANGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK

### RINGKASAN

Selama 60 tahun Indonesia merdeka, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat dari 73,3 juta pada tahun 1945 menjadi 219,2 juta tahun 2005. Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan juga meningkat secara signifikan dari 14,9 persen tahun 1945 menjadi 48,3 persen tahun 2005. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja juga meningkat selama tiga dekade terakhir. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 63,3 persen tahun 1976 menjadi 67,5 persen tahun 2004. Akan tetapi peningkatan ini tidak diikuti oleh peningkatan tingkat kesempatan kerja, sebaliknya peningkatan kesempatan kerja menurun secara perlahan dari 98,3 persen tahun 1980 menjadi 90,1 persen tahun 2004. Peningkatan juga terjadi dibidang pendidikan. Jumlah penduduk yang buta huruf menurun dengan pesat, dari 57,1 persen pada tahun 1961 menjadi 8,5 persen tahun 2004.

### SUMMARY

*After 60 years of independence, total population of Indonesia increased from 73.3 million in 1945 to 219.2 million in 2005. The percentage of population living in urban areas also significantly increased from 14.9 percent in 1945 to 48.3 percent in 2005. In line with increasing in total population, the number of labor force also increased during the last three decades. Labor force participation rate increased from 63.3 percent in 1976 to 67.5 percent in 2004. However, increased in labor force participation rate was not followed by increased in employment rate. Conversely, the employment rate were gradually decreased from 98.3 percent in 1980 to 90.1 percent in 2004. In education sector, the illiteracy rate dropped from 57.1 percent in 1961 to only 8.5 percent in 2004.*



Kependudukan adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian pemerintah di dalam proses pembangunan selama 60 tahun Indonesia merdeka. Hal yang diperhatikan dalam bidang kependudukan mencakup kuantitas penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk dan angkatan kerja, serta kualitas penduduk seperti pendidikan dan kesehatan. Jumlah penduduk perlu diperhatikan karena selain sebagai subyek, penduduk juga merupakan obyek bagi pembangunan. Penduduk Indonesia yang pada tahun 1945 hanya berjumlah 73,3 juta telah bertambah menjadi tiga kali lipat yaitu menjadi 219,2 juta pada tahun 2005. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 1945-2005 adalah 1,8 persen.

Selain pertumbuhan, persebaran penduduk juga merupakan hal yang diperhatikan pemerintah karena persebaran penduduk yang tidak merata dapat menjadi masalah. Dalam hal persebaran penduduk, selama 60 tahun merdeka tidak terjadi perubahan yang berarti. Pulau Jawa yang luasnya kurang dari 7 persen luas daratan Indonesia tetap dihuni oleh sekitar 60 persen penduduk Indonesia selama periode 1961-2005. Kondisi ini mengakibatkan beban pulau Jawa dalam menampung penduduk relatif lebih berat daripada pulau-pulau lainnya di Indonesia. Masalah lain adalah semakin meningkatnya persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (urban) selama empat dekade terakhir. Penyebab peningkatan ini bisa karena pertumbuhan alami, perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi), dan perubahan status desa dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan (reklasifikasi). Jika pada tahun 1961 persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan adalah 14,9 persen, pada tahun 2005 meningkat menjadi 48,3 persen.

Bertambahnya jumlah penduduk berakibat juga pada bertambahnya jumlah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang merupakan indikator yang menunjukkan pasokan tenaga kerja meningkat dari 63,3 persen pada 1976 menjadi 67,5 persen pada tahun 2004. Meningkatnya jumlah angkatan kerja perlu

diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, akan tetapi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan indikator penyerapan tenaga kerja menurun secara perlahan dari 98,3 persen pada tahun 1980 menjadi 90,1 persen pada tahun 2004.

Selama 60 tahun merdeka, kesejahteraan rakyat Indonesia juga telah meningkat. Peningkatan kesejahteraan rakyat ini tercermin dari meningkatnya beberapa kondisi seperti kesehatan dan gizi, pendidikan dan kebudayaan, pengeluaran dan pola konsumsi, penurunan kemiskinan dan distribusi pendapatan serta dari keadaan perumahan dan lingkungan hidup. Kondisi kesehatan penduduk Indonesia mengalami peningkatan selama satu dekade terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang memanfaatkan rumah sakit, dokter praktek serta dokter dan bidan sebagai penolong persalinan secara relatif. Di samping kesehatan, peningkatan kesejahteraan juga bisa dilihat dari peningkatan gizi anak-anak dibawah umur lima tahun (balita). Selama 60 tahun merdeka, balita yang berstatus gizi baik meningkat dari 55,5 persen pada tahun 1992 menjadi 67,9 persen pada tahun 2003.

Di bidang pendidikan juga terjadi peningkatan. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf selama empat dekade terakhir. Jika pada tahun 1961 lebih dari separuh (57,1 persen) penduduk Indonesia masih buta huruf, maka pada tahun 2004 jumlah penduduk yang buta huruf menurun menjadi hanya 8,5 persen dari seluruh penduduk. Di samping itu, pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun keatas juga mengalami peningkatan. Peningkatan yang berarti terjadi pada tingkat SD, SLTP dan SLTA, sementara untuk tingkat di atas SLTA hasilnya belum memuaskan.

Perubahan pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu bidang yang dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat. Persentase pengeluaran untuk makanan berbanding terbalik dengan pendapatan. Jadi secara umum persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun jika pendapatan meningkat, sebaliknya persentase

pengeluaran untuk bukan makanan meningkat jika pendapatan meningkat. Selama empat dekade terakhir terjadi penurunan pengeluaran rumahtangga untuk makanan, dari 79,8 persen dari total pengeluaran pada tahun 1964 menjadi 54,6 persen pada tahun 2004.

Bidang lain yang dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Selama periode 1970-1996 penduduk miskin Indonesia telah menurun, dari 70 juta orang (60 persen dari seluruh penduduk) pada tahun 1970 menjadi hanya 22,5 juta (11,3 persen) pada tahun 1996. Akan tetapi krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat kembali secara drastis.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 menjadi 49,5 juta (24,2 persen). Walaupun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin selama periode 1998-2004, tetapi jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2004

masih sekitar 36,2 juta orang (16,7 persen).

Di bidang perumahan, peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari peningkatan penggunaan listrik sebagai alat penerangan, penggunaan air leding sebagai sumber air minum yang bersih, penggunaan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik, dan peningkatan bangunan tempat tinggal yang berlantai bukan tanah.

Selama 60 tahun Indonesia merdeka, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN meningkat dari 6,1 persen tahun 1971 menjadi 86,6 persen tahun 2004. Akan tetapi persentase rumah tangga yang menggunakan air leding hanya meningkat dari 6,3 persen tahun 1971 menjadi 18 persen tahun 2004. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik meningkat dari 7,8 persen tahun 1971 menjadi 36,4 persen tahun 2004. Persentase rumah tangga yang telah menempati rumah berlantai bukan tanah meningkat dari 43,2 persen tahun 1971 menjadi 84,9 persen tahun 2004.











## **PERKEMBANGAN EKONOMI**

## 1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI

### RINGKASAN

Perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada tahun 1950 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru mencapai Rp 84,0 miliar dan telah meningkat menjadi Rp 2 303 031,5 miliar pada tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 1960 tercatat 2 persen/tahun dan meningkat di atas 6 persen/tahun pada periode 1984-1993. Dari tahun 2000-2004, perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata 4,6 persen pertahun setelah mengalami penurunan 13,1 persen pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Perkembangan produksi pertanian, pertambangan, industri, dan sektor-sektor lainnya juga menampakkan hal yang positif. Swasembada beras tercapai pada tahun 1984 dan 2004 dimana produksi padi pada tahun itu masing-masing mencapai 38,1 juta ton dan 54,1 juta ton. Sektor pertambangan utamanya minyak dan gas bumi pernah berperan dalam pembentukan ekonomi Indonesia pada periode 1980-1990. Namun demikian, sejak awal 1990an perannya terhadap perekonomian Indonesia mulai menurun, sedangkan sektor industri mulai memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian Indonesia. Nilai ekspor dan Impor Indonesia juga tumbuh pesat. Pada tahun 2004 ekspor dan impor Indonesia masing-masing mencapai US\$ 71 584,6 juta dan US\$ 46 524,5 juta. Tingkat inflasi Indonesia yang pernah tercatat cukup tinggi pada periode 1958-1968 dapat dikendalikan dengan baik kecuali pada tahun 1998, dimana inflasi Indonesia akibat krisis ekonomi mencapai 77,6 persen/tahun. Sejak tahun 2001 rata-rata tingkat inflasi cenderung dibawah 10 persen per tahun.

### SUMMARY

*After the independence, Indonesian economy has developed interestingly. In 1950 GDP Indonesia recorded at Rp 84,0 billion and reached Rp 2 303 031,5 billion in 2004. The economic growth in 1960 was 2 percent per annum and increased, on average, over 6 percent between 1984-1993. In 2000-2004, the Indonesian economy grew at the rate of 4.6 percent per year after dropped 13.1 percent in 1998 due to the Asian crisis that hit Indonesia. Agriculture, mining, manufacturing and other sectors also recorded astonishing growths. Indonesia reached self sufficient production for paddy in 1984 and 2004 where the production of rice in those years were 38.1 million ton and 54.1 million ton respectively. The mining sector was the major contribution in Indonesian economy from the beginning of 1980 until in the middle of 1990s. However, in the beginning of 1990s the share of this sector to Indonesian economy has decreased. In the same time the contribution of manufacturing sector to Indonesian economy has increased. Exports and Imports also increased very high. In 2004, the value of Indonesia exports and imports were US\$ 71,584.6 million and US\$ 46,524.5 million respectively. Indonesia has experienced hyper inflation from 1958-1968. However, in 1991 and afterward Indonesia were able to manage the inflation. With the exception of 1998, where the inflation reached 77.63 percent per year, the inflation tends to be below 10 percent per year.*

Perkembangan ekonomi dihitung berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Setelah kemerdekaan, PDB baru mulai diestimasi pada tahun 1950, kemudian pada tahun 1960 PDB dihitung secara seri. Besarnya PDB pada tahun 1950 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 84,0 milyar. Pada beberapa tahun berikutnya kenaikan inflasi begitu besar sehingga mempengaruhi nilai PDB atas berlaku yang meningkat drastis dari Rp 470,1 milyar pada tahun 1961 menjadi Rp 23.710,0 milyar pada tahun 1965.

Pada tahun 1968, mulainya periode pembangunan ekonomi dengan program pembangunan lima tahun (Pelita), nilai nominal PDB mencapai Rp 2.096,7 milyar dan meningkat menjadi Rp 6.753,4 milyar pada akhir Pelita I. Kemajuan ekonomi tersebut berlanjut sampai akhir program Pelita yaitu tahun 1998 yang menghasilkan PDB sebesar Rp. 955 753,5 miliar dan selanjutnya pada tahun 2004, mencapai Rp 2 303 031,5 miliar.

Untuk menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil, PDB diestimasi dengan menggunakan harga konstan. Berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 1960, laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 1961 sampai dengan 1965 sangat rendah, yaitu hanya sekitar 2 persen per tahun. Masa Orde Baru ditandai pertumbuhan ekonomi membaik dan mencapai 5 persen per tahun antara tahun 1966 -1968. Selama Pelita I (1969-1973) rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 7 persen per tahun. Berikutnya pada Pelita II dan Pelita III (1974-1983) perekonomian nasional semakin membaik dan mampu tumbuh lebih dari 6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi pada Pelita IV dan Pelita V (1984 -1993) secara rata-rata masih diatas 6 persen. Pertumbuhan ekonomi selama Pelita V ini berlanjut hingga 4 tahun awal Pelita VI, tahun 1994 sampai dengan 1997 yaitu tumbuh secara rata-rata, yang mencapai 7,1 persen per tahunnya.

Pada pertengahan 1997, Indonesia seperti negara lainnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dihantam oleh krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga pada tahun 1998 terjadi penurunan perkembangan ekonomi seperti yang digambarkan oleh

PDB yaitu menurun sebesar 13,1 persen dibandingkan tahun 1997. Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi tersebut mulai bisa dikendalikan dan PDB pada tahun tersebut tumbuh sebesar 0,8 persen, pertumbuhan tersebut terus membaik pada tahun 2000 yaitu sebesar 4,9 persen. Pada tahun 2001 sampai dengan 2004, dengan perhitungan PDB berdasarkan tahun dasar 2000, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 4,6 persen. Pada triwulan I tahun 2005 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2004 (*year on year*) PDB tumbuh sebesar 6,4 persen.

### 1.3.1. Perkembangan Produksi

#### a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sejak awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang oleh sektor pertanian. Akan tetapi sejak tahun 1991, struktur perekonomian Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Meskipun demikian, sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi.

Untuk mendapatkan data yang lengkap secara nasional, telah dilakukan Sensus Pertanian (ST) setiap 10 tahun sekali sejak tahun 1963. Dari hasil Sensus Pertanian (ST) yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dapat disimpulkan bahwa selama empat dekade terakhir menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian meningkat pesat. Namun rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian pengguna lahan di Indonesia menurun dari 1,1 hektar pada tahun 1963 menjadi 0,8 hektar pada tahun 2003. Jumlah rumah tangga petani gurem juga meningkat pesat dari 5,3 juta rumahtangga pada tahun 1963 menjadi 13,2 juta rumahtangga pada tahun 2003.

Produksi padi dari tahun 1973-2004 pada umumnya meningkat. Produksi padi tahun 2004 tercatat 54,08 juta ton, merupakan swasembada ke dua yang dicapai Indonesia setelah swasembada tahun 1984 dimana produksi saat itu mencapai 38,1 juta ton. Produksi padi di Indonesia didominasi oleh padi sawah dengan sumbangan sekitar 90 persen.



Produksi tanaman sayuran yaitu bawang merah, cabe dan kentang terus meningkat walaupun relatif kecil yaitu sekitar 5,1 persen per tahun. Tanaman buah-buahan yang potensial dan memberikan kontribusi besar terhadap total produksi buah-buahan nasional adalah jeruk, mangga, pisang, pepaya, nenas dan salak. Tanaman hias yang potensial adalah anggrek, mawar dan sedap malam, sedangkan tanaman biofarmaka (tanaman obat) yang paling potensi adalah jahe, laos/lengkuas dan kunyit.

Dari tahun 1983, 1993 dan 2003 jumlah rumah tangga peternak dan populasi ternak rata-rata mengalami penurunan kecuali populasi babi dan kambing/domba meningkat. Sementara produksi daging, telur dan susu dari tahun 1969-2004 pada umumnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1998 menunjukkan penurunan yang tajam, akan tetapi mulai tahun 2000 kembali meningkat. Hal ini diduga merupakan dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak akhir 1997.

Perkembangan produksi perkebunan selama periode 1973-2003 terus meningkat. Pada periode 1998-2003 peningkatan yang cukup besar terjadi pada tanaman kelapa sawit (65,5 persen) dan kopi (33,4 persen), sementara tanaman lainnya meningkat sekitar 0,8–27,6 persen. Pada tahun 2004 diperkirakan produksi tanaman perkebunan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003 sekitar 1,0 sampai 23,6 persen

Kayu bulat sebagai produksi utama hasil hutan cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi pada periode 1983/1984–1988/1989 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Selanjutnya sampai dengan tahun 2003 produksi kayu bulat terus menurun. Produksi kayu gergajian menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat selama periode 1978-2004. Produksi kayu lapis mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 1978-1983/1984. Kemudian terjadi penurunan pada dua periode berikutnya dan diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2004. Sub sektor perikanan merupakan salah satu andalan dalam menghasilkan devisa, oleh karena itu terus diupayakan peningkatan produksinya. Indikator

keberhasilan pembangunan di sub sektor ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dari tahun ke tahun.

#### **b. Pertambangan**

Sektor pertambangan merupakan sektor yang cukup berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini sumbangan sektor ini (terutama dari sektor pertambangan migas) dalam pembentukan PDB mencapai rata-rata 9 persen per tahun. Dalam kurun waktu 25 tahun ini (1980-2004) penemuan cadangan dan pengembangan lahan migas dan non migas terus terjadi. Walaupun demikian hasil eksploitasi cadangan migas yang ada semakin menipis. Hal ini ditunjukkan oleh produksi minyak mentah yang secara rata-rata turun 1,2 persen per tahun pada periode tersebut. Pada periode yang sama produksi kondensat dan gas bumi berfluktuasi dengan kecenderungan menaik dimana rata-rata kenaikan masing-masing mencapai 1,2 persen dan 6,7 persen per tahun.

Pada periode yang sama selain aspal, produksi pertambangan non migas lainnya menunjukkan peningkatan. Komoditi pertambangan non migas yang paling tinggi peningkatannya adalah emas, kemudian diikuti oleh produksi batubara, perak dan tembaga dengan masing-rata rata-rata pertumbuhan mencapai 32,2 persen, 30,9 persen, 23,1 persen dan 13,7 persen per tahun.

Seperti halnya sektor industri pengolahan atau konstruksi, sektor pertambangan juga cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selama periode 1980-2004 jumlah pekerja tetap di sektor ini memperlihatkan kecenderungan menaik. Pada tahun 1980 terdapat pekerja tetap 50,6 ribu orang kemudian naik menjadi 70,6 ribu orang pada tahun 2004 atau secara rata-rata naik sebesar 1,4 persen per tahun. Sedangkan pekerja harian yang terlibat di sektor ini pada periode yang sama cenderung menurun rata-rata sebesar 0,1 persen per tahun.

#### **c. Industri Pengolahan**

Peranan industri pengolahan dalam perekonomian



nasional telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Industri besar dan sedang meskipun dari segi jumlah perusahaan relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri kecil dan kerajinan rumah tangga namun dalam penyerapan tenaga kerja telah memberikan kontribusi yang cukup berarti.

Dalam kurun waktu hampir 30 tahun industri besar dan sedang telah banyak mengalami perkembangan mulai dari industri yang berorientasi tenaga kerja hingga ke industri yang berorientasi padat modal bahkan ke padat teknologi. Dalam kurun waktu tersebut jumlah perusahaan industri besar dan sedang meningkat lebih dari dua kali, yaitu dari 8.926 perusahaan pada tahun 1975 menjadi 20.370 perusahaan pada tahun 2004, atau naik dengan laju pertumbuhan sebesar 2,9 persen per tahun. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar dari tahun 1975 telah meningkat lebih dari 4 kali hingga tahun 2004. Industri makanan/minuman, tekstil serta pakaian jadi, merupakan jumlah perusahaan terbesar dibandingkan dengan golongan pokok-golongan pokok industri lainnya

#### d. Energi

Perkembangan kegiatan sektor usaha ketenagalistrikan, gas dan air bersih selama kurun waktu 60 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan peningkatan yang berarti. Kapasitas daya terpasang, produksi tenaga listrik maupun besarnya listrik yang dijual/didistribusikan, mengalami peningkatan. Besarnya rata-rata pertumbuhan dari daya terpasang adalah 8,7 persen per tahun, produksi tenaga listrik 9,9 persen per tahun dan listrik yang dijual mencapai 10,0 persen per tahun.

Sementara pada kegiatan usaha gas yang dalam hal ini gas kota, produksi dan produktivitas pekerja juga meningkat pesat. Produksi gas kota yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,4 persen per tahun sedangkan produktivitas pekerja naik rata-rata 18,6 persen per tahun.

Kegiatan penyediaan air bersih juga mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan air bersih yang disalurkan adalah sebesar 7,6 persen

per tahun dengan tingkat produktivitas pekerja mengalami pertumbuhan rata-rata 1,1 persen per tahun.

Pemakaian energi primer selama kurun waktu 1995-2004 mencapai 6.485,1 juta Setara Barel Minyak (SBM) atau rata-rata naik 5,9 persen per tahun. Jenis energi primer yang paling banyak dipakai adalah minyak bumi yang mencapai 55,3 persen, kemudian gas bumi, batubara, tenaga air dan panas bumi. Sedangkan pada pemakaian energi final yang mencapai total 4.203,5 juta SBM, jenis bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi final yang paling banyak dipakai yakni mencapai 71,5 persen, kemudian berturut-turut adalah listrik, gas bumi, batubara dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Dilihat dari sisi pengguna energi final, sektor industri dan transportasi adalah sektor yang terbesar mengkonsumsi energi, lebih besar dibandingkan dengan sektor rumah tangga.

#### e. Konstruksi

Periode ekspansi sektor konstruksi terjadi hingga sebelum krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, sedang periode kontraksi berlangsung setelah krisis ekonomi hingga tahun 2000. Puncak dari kegiatan konstruksi terbesar tersebut terjadi antara tahun 1995 dan 1996.

Bangkitnya kembali sektor konstruksi juga terlihat jelas dengan bermunculannya kembali perusahaan konstruksi. Rata-rata pertumbuhan perusahaan konstruksi per tahun selama lima tahun terakhir sebesar 13,2 persen. Penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi terutama tenaga kerja lapangan/harian lepas cukup signifikan dan merupakan solusi jitu untuk mengurangi pengangguran. Pertumbuhan besarnya tenaga kerja tetap dan harian lepas selama lima tahun terakhir masing-masing sebesar 8,3 persen dan 4,1 persen per tahun.

#### f. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama kurun waktu 1969-2004 terus mengalami peningkatan kecuali tahun 1998, 2002 dan 2003, dengan rata-rata pertumbuhan 13,2 persen.

Jumlah wisman pada akhir tahun 2004 mencapai 5.321.165 orang, di mana sebagian besar wisman berasal dari Asia dan Pasifik. Sementara itu rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia, yang merupakan sumber devisa negara, juga mengalami fluktuasi naik turun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,9 persen selama periode 1984-2004.

Jumlah hotel berbintang dan non bintang di Indonesia terus bertambah dengan rata-rata pertumbuhan (1981-2004) sebesar 5,9 persen untuk hotel berbintang dan 3,8 persen untuk hotel non bintang. Kemajuan industri perhotelan diindikasikan dengan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan lama menginap tamu hotel. Selama periode 1986-2004 TPK hotel berbintang berkisar antara 40-60 persen, sedangkan hotel non bintang antara 28-34 persen.

#### g. Transportasi

Pada tahun 1998, jumlah kendaraan sebanyak 17,6 juta unit dan lima tahun kemudian menjadi 26,7 juta unit atau naik 7,7 persen per tahun. Dari sejumlah itu, yang terbanyak adalah kendaraan jenis sepeda motor yaitu 12,6 juta unit pada tahun 1998 dan 20,0 juta unit tahun 2003 atau naik 8,8 persen per tahun. Sementara itu, penumpang kereta api mencapai 170 juta orang pada tahun 1998 dan lima tahun kemudian (2003) turun menjadi 155 juta orang atau rata-rata turun 0,5 persen.

Selama PJP I jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut meningkat rata-rata 13,9 persen setiap tahunnya. Tetapi, memasuki 5 tahun pertama PJP II (1998) banyaknya penumpang angkutan laut sebesar 12,8 juta orang atau menurun sebesar 6,2 persen per tahun dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, jumlah penumpang angkutan udara baik tujuan domestik maupun internasional cenderung meningkat.

Secara rata-rata total penumpang yang diangkut melalui angkutan udara 17,9 persen. Namun, memasuki 5 tahun pertama PJP II, tahun 1998 saat krisis melanda Indonesia jumlah penumpang domestik turun 43,2 persen. Memasuki tahun 2000 mulai menunjukkan

kenaikan, terutama sejak adanya perang tarif.

Jumlah SST Induk sejak tahun 1968 terus meningkat, bahkan dari tahun 1993 terjadi peningkatan yang cukup tajam. Hal yang sama terjadi pada produksi telepon yang terus meningkat. Sementara produk teleks terus turun tajam, bahkan sejak tahun 2001 teleks ke luar negeri tidak diproduksi lagi. Produksi telegram sejak 1994 baik untuk domestik maupun luar negeri terus menurun bahkan sejak 2001 produk telegram tujuan luar negeri sudah tidak diproduksi lagi.

#### h. Keuangan

Total realisasi penerimaan pemerintah selama Pelita I sampai Pelita VI mengalami kenaikan dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 604,9 triliun, demikian pula dengan total pengeluaran meningkat dari Rp 3,0 triliun menjadi Rp 599,9 triliun.

Pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) tiap tahun beberapa kali mengalami penurunan. Selama periode 1994-2004 pertumbuhan triwulanan terjadi tujuh kali penurunan, penurunan terendah terjadi pada triwulan I tahun 1995 yaitu Rp 466 triliun sedangkan penurunan terbesar terjadi pada triwulan I tahun 2001 sebesar Rp 13.811 triliun.

Neraca pembayaran Indonesia selama periode 1990-1996 selalu mengalami surplus, tetapi sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997 neraca pembayaran mengalami defisit sebesar US\$ 2.459 juta. Pada tahun 1999 dengan mulai membaiknya perekonomian Indonesia, neraca pembayaran kembali membaik. Dampak dari krisis ekonomi suku bunga deposito berjangka pada bank persero melonjak cukup tinggi, pada tahun 1998 suku bunga deposito 1 bulan mencapai 51,8 per tahun sedangkan 3 bulan mencapai 39,4 persen per tahun.

### 1.3.2. Perdagangan Luar Negeri

#### a. Ekspor

Hingga tahun 2004 ekspor mencapai US\$ 71.584,6 juta, meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 1945 yang sebesar US\$ 491 juta. Tahun 1968 sebesar

US\$ 730,7 juta dan tahun 1984 sebesar US\$ 19.218,5 juta. Ekspor migas mengalami peningkatan sejak tahun 1973 sebesar US\$ 1.608,7 juta menjadi US\$ 16.140,7 juta pada tahun 1983, akan tetapi pada tahun 1993 turun menjadi US\$ 9.745,4 juta dan pada tahun 2004 meningkat kembali hingga mencapai mencapai US\$ 15.645,3 juta. Singapura bersama-sama dengan Jepang dan Amerika Serikat menjadi negara mitra dagang utama.

Pada tahun 1994 ketiga negara ini mendominasi 52,2 persen tujuan ekspor Indonesia. Sampai tahun 2004, peranan ketiganya mengalami penurunan sehingga mencapai 42,9 persen. Belawan dan Dumai merupakan pelabuhan utama sampai awal tahun 80-an (45 persen dari volume ekspor). Tahun 2004, pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak memberikan peningkatan kontribusi menjadi 33,1 persen

Komoditas utama hasil bumi adalah rempah-rempah, teh, kopi, karet, dan tembakau merupakan mata dagangan ekspor yang penting sejak pada awal kemerdekaan. Namun sejak duapuluh tahun terakhir ekspor nasional lebih diarahkan pada barang nonmigas khususnya hasil industri. Nilai ekspor hasil industri meningkat dari US\$ 3.141,4 juta pada tahun 1983 menjadi US\$ 48.677,3 juta pada tahun 2004.

#### **b. Impor**

Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2004 sekarang terjadi peningkatan nilai impor yang luar biasa yaitu dari US\$ 594,9 juta menjadi US\$ 46.524,5 juta atau meningkat sekitar delapan puluh kali lipat. Bila dilihat dari perkembangannya, kecuali dari tahun 1955 ke tahun 1960, nilai impor terus meningkat hingga tahun 1996 yang mencapai US\$ 42.928,5 juta, kemudian sejak tahun tersebut mengalami sedikit fluktuasi dengan nilai terendah sekitar US\$ 24,0 milyar di tahun 1999 dan meningkat tajam pada tahun 2004.

Impor nonmigas dari tahun ke tahun selalu lebih besar daripada impor migas. Peranan nonmigas terbesar terjadi di awal Pelita I tahun 1968 yaitu sebesar 99,1 persen dan terendah sebesar 74,8 persen di tahun 2004.

### **1.3.3. Harga-harga**

#### **a. Perkembangan Inflasi**

Selama tahun 1995-2004, inflasi tahunan cukup bervariasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 77,63 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu 2,01 persen. Tingginya inflasi di tahun 1998 disebabkan oleh adanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi yang menerpa Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk menyebabkan pemerintah pada saat itu tidak mampu mengendalikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak tahun 2001, inflasi terus menurun dan cenderung di bawah 10 persen (2 digit).

Inflasi tahun 1969-1994 umumnya cukup terkendali. Selama 26 tahun, hanya 9 tahun terjadi inflasi yang lebih dari 10 persen yaitu di tahun 1972-1977, tahun 1979, 1980, dan 1983. Usaha pengendalian harga kebutuhan masyarakat yang dilakukan Pemerintah sangat berhasil. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, inflasi turun drastis menjadi hanya 9,89 persen di awal Pelita I (tahun 1969).

Periode 1958-1968 ditandai oleh inflasi sangat tajam (*hyper inflation*). Dalam sebagian tahun dari periode itu, inflasi mencapai 3 digit. Kenaikan harga-harga terjadi secara menyeluruh dan sangat tinggi. Misalnya pada tahun 1965 dan 1966 inflasi sebesar 594,44 persen dan 635,35 persen. Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 mulai menurun menjadi 112,17 persen dan 85,10 persen. Selama periode 1951-1957 inflasi fluktuatif. Inflasi nasional tertinggi terjadi pada tahun 1957 yakni sebesar 42,2 persen, dan terendah di tahun 1952 sebesar -1,72 persen. Inflasi tinggi juga terjadi pada tahun 1951 (34,88 persen) dan di periode Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 (23,88 persen).

#### **b. Harga Perdagangan Besar**

Selama periode 1971-2004, Kenaikan indeks HPB umum tertinggi terjadi pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi yaitu sebesar 105,3 persen. Pada saat krisis ekonomi tersebut, Kelompok komoditas yang

mengalami kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok komoditas ekspor dan impor yaitu sebesar 182,8 persen dan 120,8 persen dibandingkan dengan tahun 1997.

Sementara itu, Indeks Harga Perdagangan Besar bahan bangunan/ konstruksi umum pada periode 1971-2004 cenderung mengalami kenaikan dan puncaknya terjadi pada tahun 1998 dimana krisis ekonomi terjadi yang mengalami kenaikan sebesar 64,5 persen.

### c. Nilai Tukar Petani

Selama periode 1987-2004, Nilai Tukar Petani (NTP) di empat belas provinsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berfluktuasi terutama dalam periode 1997-2004. Secara umum, angka NTP di 14 provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalsel, Sulut dan Sulsel) sampai keadaan tahun 1993 berkisar pada angka 100 yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan relatif atau daya beli masyarakat petani selama periode tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan tahun dasar 1993. Nilai Tukar Petani (NTP) yang terendah di pulau Jawa selama periode 1976-2004 terjadi pada tahun 1999 yaitu NTP Jawa Tengah yang hanya mencapai angka 91,5. Angka NTP yang terendah dan di bawah angka 100 terjadi pada tahun 1993 di Provinsi Jawa Timur sebesar 94,3 dan NTP Jawa Barat sebesar 94,8. Pada periode yang sama, angka NTP tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu pada NTP Jawa timur sebesar 151,0 dan NTP Jawa Tengah sebesar 154,3.

Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, NTP Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian besar propinsi di pulau Sumatera mengalami penurunan. Namun tidak demikian halnya dengan provinsi lainnya, bahkan cenderung angka NTP mengalami kenaikan yang relatif cukup berarti.

### 1.3.4 Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil termasuk usaha rumahtangga dan

usaha menengah tidak berbadan hukum/usaha terdapat di semua sektor ekonomi, pengumpulan datanya dilakukan secara terpadu dari seluruh sektor ekonomi selain sektor pertanian melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) sejak tahun 1998.

Pada tahun 1998 tercatat 14,1 juta usaha dan tahun 2003 menjadi 15,8 juta usaha atau tumbuh 12,2 persen. Provinsi DI Yogyakarta mempunyai pertumbuhan usaha tertinggi sebesar 54,3 persen yaitu dari 304,6 ribu usaha menjadi 469,9 ribu usaha. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah usaha angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 35,6 persen.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap pada tahun 1998 sebanyak 26,0 juta pekerja dan pada tahun 2003 menjadi 29,0 juta pekerja atau tumbuh 11,6 persen. Pertumbuhan pekerja tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 65,1 persen, yaitu dari 556,7 ribu pekerja menjadi 919,4 ribu pekerja.

Konsentrasi usaha tidak berbadan hukum/usaha pada tahun 2003 terbesar adalah propinsi Jawa Timur sebanyak 3,3 juta usaha dengan menyerap tenaga kerja 5,7 juta, kemudian Jawa Barat sebanyak 3,2 juta usaha tenaga kerja 5,5 juta dan Jawa Tengah sebanyak 3,1 juta usaha dengan tenaga kerja 5,6 juta pekerja.

Umumnya usaha tidak berbadan hukum bergerak di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebanyak 9,2 juta usaha (58,5 persen) dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 16,8 juta jiwa (57,9 persen).

Nilai omset/pendapatan yang dihasilkan usaha tidak berbadan hukum pada tahun 1999 sebesar Rp 185,4 milyar dan pada tahun 2003 sebesar Rp 503,3 milyar atau tumbuh 171,5 persen. Pada tahun 2003 kontribusi terbesar berasal dari propinsi DKI Jakarta sebanyak Rp 88,0 milyar (17,5 persen).

Lapangan usaha yang memiliki nilai omset/pendapatan tertinggi adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi, pada tahun 2003 nilainya mencapai Rp 318,4 milyar (63,3 persen) diikuti usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebesar Rp 86,2 milyar (17,1 persen).













**PENDUDUK**



---

## 2.1 PENDUDUK

### RINGKASAN

Dalam enam dekade terakhir penduduk Indonesia bertambah tiga kali lipat, yaitu dari 73,3 juta pada tahun 1945 menjadi 219,2 juta pada tahun 2005. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,3 persen untuk periode lima tahun terakhir (2000-2005).

Sebahagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dalam enam dekade terakhir, 65,0 persen pada tahun 1945 menjadi 58,8 persen pada tahun 2005. Oleh karena itu, sampai dengan sekarang Pulau Jawa masih merupakan pulau yang terpadat dengan kepadatan penduduk 1.001 orang per kilometer persegi. Persentase penduduk tinggal di daerah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam empat dekade terakhir, yaitu 14,9 persen pada tahun 1961 menjadi 48,3 persen pada tahun 2005.

Penurunan rata-rata laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) turun dari 5,6 anak lahir hidup per wanita pada periode 1967-1970 menjadi 2,3 anak lahir hidup per wanita pada periode 2000-2005. Angka Kematian Bayi (AKB) turun dari 145 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1971 menjadi 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Sejalan dengan penurunan AKB, rata-rata Angka Harapan Hidup pada waktu lahir meningkat dari 45,7 tahun menjadi 69 tahun untuk waktu yang sama.

Struktur penduduk juga mengalami perubahan. Persentase penduduk usia 0-14 tahun terus mengalami penurunan, sebaliknya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas terus mengalami kenaikan. Persentase wanita berstatus kawin yang sedang memakai alat/cara keluarga berencana (KB) telah mencapai 60,3 persen pada tahun 2003.

### SUMMARY

*During the last six decades, total population of Indonesia has been tripled from 73.3 million in 1945 to 219.2 million in 2005. Annual population growth has reached 1.3 percent in the last five years period (2000-2005).*

*More than half of Indonesia's population live in Java Island. This condition has not changed much in the last six decades, 65.0 percent in 1945 and 58.8 percent in 2005. Therefore, until now Java Island is the most densely island in Indonesia with population density 1,001 per square kilometers. The percentage of population living in urban areas increased quite significant in the last four decades, which is from 14.9 percent in 1961 to 48.3 percent in 2005.*

*Decreasing in annual population growth was followed by decreasing in the level of fertility and mortality. Total Fertility Rate (TFR) decreased from 5.6 live births per women in 1967-1970 period to 2.3 live births in 2000-2005 period. Infant mortality rate (IMR) decreased from 145 deaths per 1,000 live births in 1971 to 32 deaths per 1,000 live births in 2005. As IMR decreased, expectation of life at birth increased from 45.7 years to 69 years for the same period.*

*Population age structure has changed in the last six decades. The percentage of population aged 0-14 years is continually decreasing, on the other hand the percentage of population aged 15 years and over is continually increasing. The percentage of married women currently using contraceptive methods has reached 60.3 percent in 2003.*

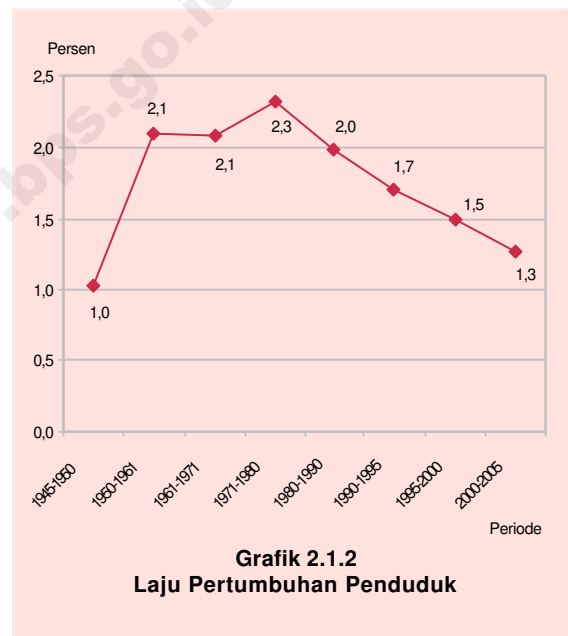
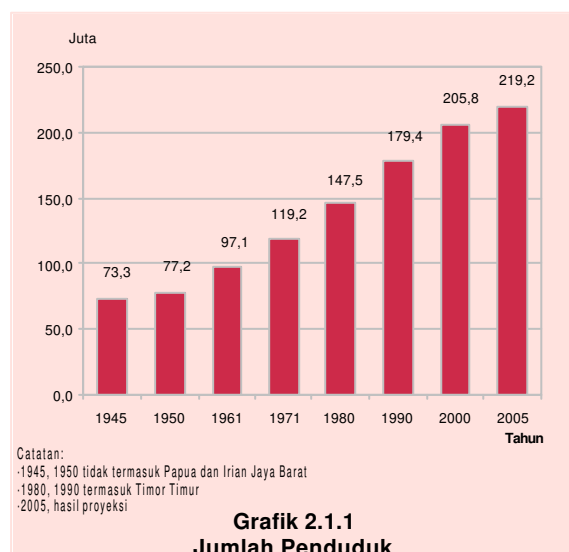
### 2.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam enam dekade terakhir jumlah penduduk Indonesia sudah bertambah sebanyak tiga kali lipat, yaitu dari 73,3 juta tahun 1945 menjadi 219,2 juta tahun 2005, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,8 persen. Laju pertumbuhan penduduk sepanjang enam dekade terakhir tidak merata. Dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1971, laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan, sedangkan untuk kurun waktu setelah tahun 1971, laju pertumbuhan penduduk mulai mengalami penurunan.

Laju pertumbuhan penduduk untuk periode 1945-1950 adalah yang terendah sepanjang enam dekade terakhir ini, yaitu 1,0 persen per tahun. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu ini terutama disebabkan oleh tingginya tingkat kematian dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat karena langkanya fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Sejalan dengan penurunan tingkat mortalitas, walaupun masih relatif tinggi, laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan sampai dengan periode 1971-1980. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk ini berhubungan dengan masih tingginya tingkat fertilitas. Laju pertumbuhan penduduk mulai menurun pada periode 1980-1990 dan terus menurun. Laju pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 1990 dan tahun 2000 adalah sebesar 1,5 persen. Untuk

periode 2000-2005 laju pertumbuhan penduduk per tahun diproyeksikan sebesar 1,3 persen.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk per tahun pada tiga dekade terakhir berhubungan dengan penurunan tingkat fertilitas. Penurunan tingkat fertilitas ini merupakan dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Program KB mulai dicanangkan pada tahun 1971. Pada awalnya program KB hanya mencakup Pulau Jawa dan Bali, baru pada tahun delapan puluhan program KB mencakup seluruh provinsi. Oleh karena itu, pengaruh program KB dalam penurunan tingkat fertilitas baru terlihat pada tahun delapan puluhan, begitu juga penurunan laju pertumbuhan penduduk.



### 2.1.2 Kepadatan Penduduk

Pola persebaran penduduk Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Enam dekade setelah kemerdekaan, Pulau Jawa masih merupakan pulau terpadat. Pada tahun 2005 diperkirakan 58,8 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa yang luasnya kurang dari 7 persen luas daratan Indonesia. Dalam 45 tahun, persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa hanya mengalami sedikit

penurunan yaitu, 65,0 persen pada tahun 1961 menjadi 58,8 persen pada tahun 2005. Sebaliknya, persentase penduduk yang tinggal di luar Pulau Jawa meningkat dari 35,0 persen menjadi 41,7 persen dalam kurun waktu yang sama.

Penurunan persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa berhubungan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang mengalami penurunan secara signifikan dalam empat dekade terakhir. Penurunan laju pertumbuhan tersebut berhubungan dengan perubahan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang terjadi dalam kurun waktu yang sama.

Tingkat fertilitas di semua provinsi di Pulau Jawa, yang dalam hal ini diwakili oleh Angka Kelahiran Total (TFR), telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada periode akhir tahun 60an, TFR provinsi di Pulau Jawa masih berkisar antara 4,8 sampai dengan 6,3 anak lahir hidup per wanita. Hasil Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa empat dari enam provinsi di Pulau Jawa sudah mencapai *replacement level* (Net Replacement Ratio=1) atau TFR=2,1. Ini berarti bahwa jumlah kelahiran di provinsi ini sudah stabil atau akan terus mengalami penurunan.

Hal yang sama juga terjadi pada tingkat mortalitas. Angka Kematian Bayi (AKB) provinsi di Pulau Jawa pada akhir tahun enam puluhan masih berkisar antara

100 sampai dengan 170 kematian anak di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hasil Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi untuk provinsi di Pulau Jawa telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan AKB berkisar antara 25 dan 66 kematian anak di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran. Perubahan tingkat kematian bayi ini juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk.

Dalam tiga dekade terakhir, pola migrasi provinsi di Pulau Jawa mengalami perubahan. Hasil Sensus penduduk 1980 menunjukkan bahwa hanya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan provinsi pengirim migran, lainnya adalah penerima migran. Namun data Sensus Penduduk 2000 menunjukkan terjadinya sedikit pergeseran dalam pola migrasi di provinsi di Pulau Jawa. Pada tahun 2000, DKI Jakarta bukan lagi sebagai provinsi penerima migran, tetapi provinsi pengirim migran.

Ketimpangan persebaran penduduk antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa mempunyai dampak terhadap kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa jauh lebih tinggi dari kepadatan penduduk di Luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 1961 adalah 476 orang per km<sup>2</sup>, dibandingkan hanya 19 orang per km<sup>2</sup> untuk luar Jawa, dan pada tahun 2005, diproyeksikan masing-masing menjadi 1,001 dan 55 orang per km<sup>2</sup>.

Ketimpangan dalam kepadatan penduduk ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang selama masih terjadi ketimpangan program pembangunan antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa selain menyebabkan perbedaan kecepatan perubahan parameter demografi juga menjadi daya tarik penduduk untuk datang ke Pulau Jawa.

### 2.1.3 Penduduk Perkotaan

Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (urbanisasi) secara konsisten mengalami kenaikan selama empat dekade terakhir. Persentase

**Tabel 2.1.1**  
**Persentase dan Kepadatan Penduduk di Jawa dan Luar Jawa**

Tahun	Persentase penduduk		Kepadatan (orang/km <sup>2</sup> )		
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1961 <sup>1</sup>	65,0	35,0	476	19	51
1971 <sup>1</sup>	63,8	36,2	576	24	62
1980 <sup>1</sup>	61,9	38,1	690	31	77
1990 <sup>1</sup>	60,0	40,0	814	40	93
1995 <sup>2</sup>	59,1	40,9	868	45	102
2000 <sup>1</sup>	58,8	41,2	951	48	109
2005 <sup>3</sup>	58,8	41,7	1 001	55	116

Catatan :

<sup>1</sup> Sensus Penduduk

<sup>2</sup> Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

<sup>3</sup> Proyeksi



penduduk daerah perkotaan mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat antara tahun 1961 dan tahun 2000, yaitu dari 14,9 persen menjadi 42,4 persen. Tingkat urbanisasi diperkirakan akan terus mengalami kenaikan di masa yang akan datang sejalan dengan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan. Diperkirakan pada tahun 2005, tingkat urbanisasi mencapai 48,3 persen.

Pertumbuhan penduduk perkotaan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan alami, perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi (perubahan status desa dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan). Pertumbuhan alami adalah selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian di daerah perkotaan yang mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk daerah perkotaan. Oleh karena itu, pertumbuhan alami sangat dipengaruhi oleh tingkat fertilitas dan mortalitas di daerah perkotaan tersebut. Migrasi penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan tentunya akan menambah jumlah penduduk perkotaan. Ketidakseimbangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan menyebabkan arus perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Di daerah perkotaan tingkat upah

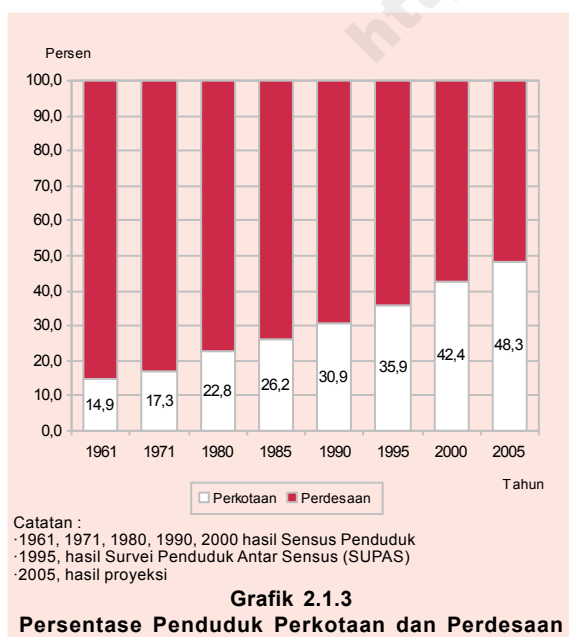
pekerja di berbagai sektor ekonomi lebih tinggi. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain di daerah perkotaan lebih banyak. Perubahan status desa dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan terus terjadi sejalan dengan kecepatan pembangunan yang terjadi di desa tersebut. Penentuan status desa sebagai daerah perkotaan tergantung dari tiga faktor: persentase rumah tangga nonpertanian, kepadatan penduduk, dan akses terhadap fasilitas perkotaan.

## 2.1.4 Fertilitas, Mortalitas, dan Prevalensi Keluarga Berencana

### a. Tingkat Fertilitas

Perkembangan tingkat fertilitas hanya bisa dilihat dalam kurun waktu empat dekade terakhir. Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data yang ada. Untuk pertama kalinya data mengenai fertilitas dikumpulkan pada Sensus Penduduk 1971. Data fertilitas yang dikumpulkan melalui Sensus Penduduk 1971 mengindikasikan tingkat fertilitas periode 1967-1970. Tingkat kelahiran, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh Angka Kelahiran Total (TFR), pada periode ini masih sangat tinggi yaitu 5,6 anak per wanita. Ini berarti, pada periode 1967-1970 secara rata-rata jumlah anak lahir hidup per wanita adalah antara 5 dan 6 orang selama masa reproduksinya (umur 15-49 tahun).

Salah satu program pemerintah untuk menurunkan tingkat fertilitas adalah Program Keluarga Berencana (KB). Program KB pertama kali dicanangkan pada Pelita I (1969/1970-1974/1974). Pada saat pertama kali dicanangkan, program KB hanya mencakup 5 provinsi di Jawa dan Bali. Pada Pelita II (1974/1975-1978/1979) program KB diperluas ke sepuluh provinsi di Luar provinsi Jawa Bali. Ke sepuluh provinsi tersebut adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pada Pelita berikutnya program KB diperluas untuk mencakup provinsi lainnya.



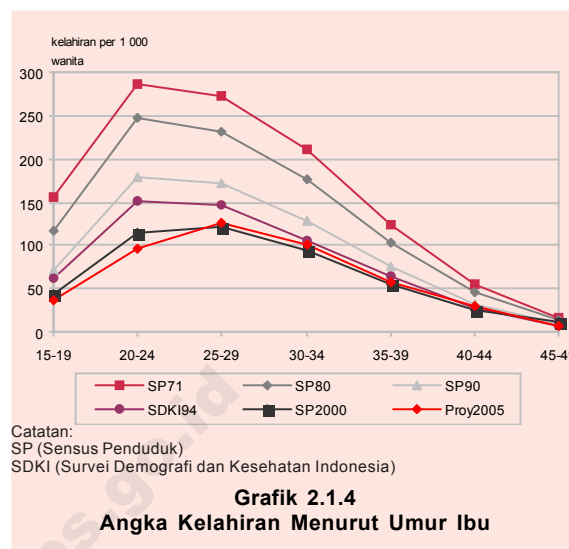
Sejalan dengan pencanangan program KB, tingkat fertilitas berangsur-angsur menurun. Hanya terjadi sedikit penurunan tingkat fertilitas antara periode 1967-1970 dan 1971-1975 serta antara periode 1971-1975 dan 1976-1979. Hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan masih terbatasnya cakupan dari program KB. Namun begitu, penurunan tingkat fertilitas mengalami peningkatan antara periode 1976-1979 dan 1981-1984, dan penurunan tertinggi terjadi antara periode 1981-1984 dan 1986-1989, ketika program KB telah mencakup semua provinsi. Pada periode 1986-1989, TFR telah mencapai 3,3 anak lahir hidup per wanita atau separo dari tingkat fertilitas periode 1967-1970. Setelah periode 1986-1989, kecepatan penurunan tingkat fertilitas mengalami sedikit penurunan, dan akan terus terjadi sampai dengan periode 1996-1999. Secara teori hal ini biasa terjadi. Penurunan tingkat fertilitas dari 6 anak lahir hidup per wanita sampai dengan 3 anak lahir hidup per wanita memerlukan waktu lebih pendek dari pada menurunkan tingkat fertilitas dari 3 anak lahir hidup per wanita ke 2 anak lahir hidup per wanita. Tingkat fertilitas periode 2000-2005 diperkirakan hanya mengalami sedikit penurunan. TFR periode 2000-2005 diperkirakan 2,3 anak lahir hidup per wanita. Target pemerintah dalam hal tingkat kelahiran adalah menurunkan TFR sampai dengan 2,1 anak lahir hidup per wanita pada tahun 2015. Jadi diharapkan *replacement level* tercapai pada tahun 2015.

**Tabel 2.1.2**  
**Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu dan Angka Kelahiran Total**

Tahun	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (per 1.000 Wanita)							Angka Kelahiran Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1967-70 <sup>1)</sup>	155	286	273	211	124	55	17	5,61
1971-75 <sup>2)</sup>	127	265	256	199	118	57	18	5,20
1976-79 <sup>1)</sup>	116	248	232	177	104	46	13	4,67
1981-84 <sup>2)</sup>	95	220	206	154	89	37	10	4,06
1986-89 <sup>1)</sup>	71	179	171	129	75	31	9	3,33
1991-94 <sup>2)</sup>	61	151	146	105	63	27	8	2,80
1996-99 <sup>1)</sup>	44	114	122	95	56	26	12	2,34
2000-05 <sup>3)</sup>	36	97	127	101	58	30	7	2,28

Catatan:  
<sup>1)</sup> Sensus Penduduk  
<sup>2)</sup> Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)  
<sup>3)</sup> Proyeksi

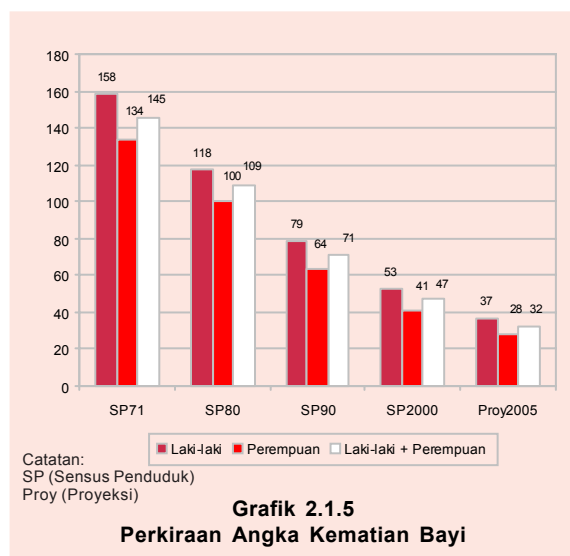
Dalam kurun waktu empat dekade terakhir, selain terjadi penurunan tingkat fertilitas juga terjadi perubahan pola fertilitas antar kelompok umur ibu. Sampai dengan periode 1991-1994, tingkat fertilitas tertinggi ada pada wanita kelompok umur 20-24.



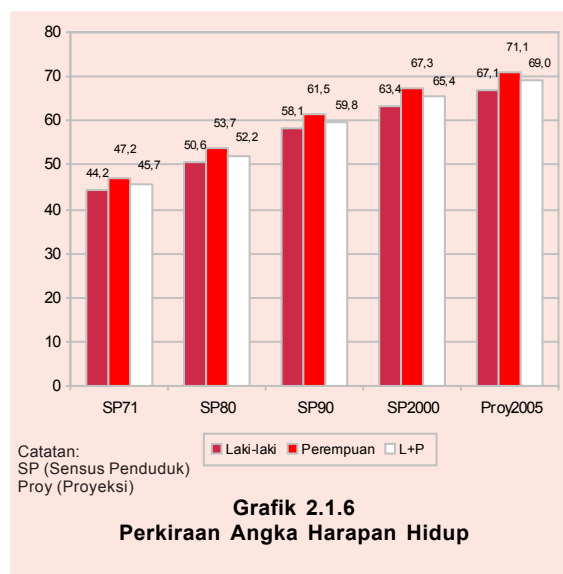
**b. Tingkat Mortalitas**

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Data yang disajikan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan hasil proyeksi untuk tahun 2005. AKB berdasarkan hasil sensus penduduk dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung, sehingga AKB yang dihasilkan bukan menggambarkan keadaan pada tahun sensus tetapi keadaan 4 tahun sebelum tahun sensus. Selama hampir 35 tahun terakhir, AKB mengalami penurunan secara konsisten. AKB hasil Sensus Penduduk 2000 adalah sepertiga dari AKB hasil Sensus Penduduk 1971, masing-masing 47 dan 145 kematian di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran. Untuk tahun 2005, AKB diperkirakan sebesar 32 per 1.000 kelahiran atau terjadi penurunan sebesar 77,9 persen selama 34 tahun terakhir atau 2,3 persen per tahun. Salah satu target dari *Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goal/MDGs)* adalah menurunkan AKB pada tahun 2015 sebanyak dua pertiga dari angka tahun 1990.

Jadi, untuk Indonesia target AKB untuk tahun 2015 adalah 20 kematian di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran. AKB untuk laki-laki selalu lebih tinggi dari perempuan. Sebagai contoh, AKB laki-laki tahun 2005 adalah 37 kematian di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran, dibandingkan dengan 28 kematian di bawah satu tahun per 1000 kelahiran untuk perempuan.



Pola kenaikan rata-rata angka harapan hidup waktu lahir sejalan dengan pola penurunan AKB. Rata-rata angka harapan hidup terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1967, rata-rata angka harapan hidup waktu lahir adalah 45,7 tahun, meningkat secara signifikan menjadi 65,4 tahun pada tahun 1996. Dengan kata lain telah terjadi peningkatan angka harapan hidup sebesar 43,1 persen dalam kurun waktu 1967-1996 atau 1,5 persen per tahun. Rata-rata angka harapan hidup waktu lahir untuk tahun 2005 diperkirakan mencapai 69 tahun. Sama dengan AKB, terlihat adanya perbedaan rata-rata angka harapan hidup waktu lahir antara bayi perempuan dan laki-laki. Rata-rata angka harapan hidup waktu lahir bayi perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan bayi laki-laki. Sebagai contoh, rata-rata angka harapan hidup waktu lahir bayi perempuan tahun 2005 adalah 71,1 tahun dibandingkan dengan 67,1 tahun untuk bayi laki-laki.



Penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas yang terjadi selama empat dekade terakhir mempengaruhi susunan umur penduduk. Persentase penduduk umur 0-14 tahun turun dari 44,0 persen pada tahun 1971 menjadi 28,3 persen pada tahun 2005. Sebaliknya, penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun keatas) meningkat sebesar 13,2 persen dan 2,5 persen dalam periode waktu yang sama.

Terjadinya perubahan susunan umur ini cukup menguntungkan, karena rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu perbandingan penduduk berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk yang berumur 15-64 tahun turun dari 86,9

Tabel 2.1.3  
Persentase Umur Penduduk

Tahun	Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1971 <sup>1)</sup>	44,0	53,5	2,5	100,0
1980 <sup>1)</sup>	40,9	55,8	3,3	100,0
1990 <sup>1)</sup>	36,5	59,6	3,9	100,0
2000 <sup>1)</sup>	30,7	64,6	4,7	100,0
2005 <sup>2)</sup>	28,3	66,7	5,0	100,0

Catatan:  
SP (Sensus Penduduk)  
Proy (Proyeksi)



persen pada tahun 1971 menjadi 49,9 persen pada tahun 2005. Meskipun demikian, besarnya jumlah penduduk usia produktif (15-64) di masa sekarang nantinya akan menjadi beban di masa depan, karena jumlah penduduk lanjut usia akan terus meningkat di masa mendatang.

**c. Tingkat Prevalensi Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Tingkat pemakaian kontrasepsi (*Prevalensi Rate*) merupakan salah satu ukuran yang dapat dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan program KB. Program pelaksanaan KB di Indonesia dimulai secara gratis, dilanjutkan dengan program lingkaran biru dan lingkaran emas yang mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar guna mendapatkan jasa pelayanan keluarga berencana. Program lingkaran biru dan lingkaran emas yang mulai dikampanyekan pada tahun 1987 di kota-kota besar seperti, Jakarta, Surabaya dan Bandung, pada akhirnya menyebar sampai ke seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sejak pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1970-an, jumlah pasangan usia subur yang memakai alat/cara KB terus bertambah. Dalam kurun waktu 1985-2003, tingkat pemakaian alat/cara KB meningkat terus. Pada tahun 1985, hanya sekitar 38,6 persen wanita kawin yang menggunakan alat/cara KB, pada tahun 2003 telah mencapai 60,3 persen.

Dari pasangan usia subur yang menggunakan alat/cara KB, ternyata pil, spiral dan suntikan masih menjadi alat/cara yang paling banyak digunakan.

**Tabel 2.1.4**  
**Persentase Wanita Berstatus Kawin menurut Cara KB yang Dipakai**

Cara KB yang dipakai	SUPAS85	SPI87	SDKI91	SDKI94	SDKI97	SDKI02-03
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pil	15,4	16,1	14,8	17,1	15,4	13,2
AKDR/Spiral/IUD	11,9	13,2	13,3	10,3	8,1	6,2
Suntikan	7,4	9,4	11,7	15,2	21,1	27,8
Kondom	0,7	1,6	0,8	0,9	0,7	0,9
Susuk KB/Norplan	-	0,4	3,1	4,9	6,0	4,3
Sterilasi wanita/Tubektomi	1,2	3,1	2,7	3,1	3,0	3,7
Sterilisasi pria/Vasektomi	0,4	0,2	0,6	0,7	0,4	0,4
Pantang berkala	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,6
Sanggama terputus	-	1,3	0,7	0,8	0,8	1,5
Lainnya	1,6 <sup>1)</sup>	1,2	0,9	0,8	0,8	0,5
Jumlah	38,6	47,7	49,7	54,7	57,4	60,3

<sup>1)</sup> Termasuk norplant/susuk KB, pantang berkala dan sanggama terputus  
Catatan:  
SP = Sensus Penduduk, SUPAS = Survei Penduduk Antar Sensus,  
SDKI = Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Tabel 2.1.4 memperlihatkan bahwa terjadi sedikit pergeseran pola pemakaian alat/cara KB, dimana persentase wanita kawin yang memakai pil dan spiral mengalami penurunan, sebaliknya persentase wanita kawin yang memakai suntikan mengalami kenaikan.

Pada tahun 1985, 15,4 persen wanita kawin menggunakan alat/cara KB pil, persentase ini menurun menjadi 13,2 persen pada tahun 2003. Persentase wanita kawin yang menggunakan alat/cara KB spiral juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 1985 ke tahun 2003, yaitu dari 11,9 persen menjadi 6,2 persen. Sebaliknya, persentase wanita kawin yang menggunakan alat/cara KB suntikan pada periode yang sama mengalami kenaikan, yaitu dari 7,4 persen menjadi 27,8 persen.











**TENAGA KERJA**

---

## 2.2 TENAGA KERJA

### RINGKASAN

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, jumlah dan persentase penduduk usia kerja (PUK) di Indonesia dari tahun 1976 hingga 2004 selalu bertambah. Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (Angkatan Kerja) juga mengalami kenaikan hingga 104,0 juta penduduk pada tahun 2004, dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 108,2 juta jiwa.

Dengan tidak tersedianya kesempatan kerja yang mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja tersebut, angka pengangguran mengalami peningkatan yang besar, terutama sejak tahun 1997, yaitu pada saat krisis ekonomi. Selama empat tahun terakhir angka pengangguran bertambah sekitar 4 persen, yaitu dari 6,1 pada tahun 2000 dan mencapai 9,9 persen pada tahun 2004, dimana peningkatan pengangguran terjadi pada laki-laki.

Jika dilihat dari jumlah jam kerja, maka dari sejumlah penduduk usia kerja yang bekerja tersebut, terdapat 28,1 juta orang yang bekerja kurang dari 35 jam (setengah pengangguran) pada tahun 1997. Angka setengah pengangguran tersebut naik sebesar 2,7 persen pada tahun 2004.

Pada umumnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi sektor pertanian. Penyerapan ini umumnya stabil terhadap penduduk usia menengah, yaitu umur 35-59. Sementara kelompok usia muda cenderung mengalami penurunan. Namun dari sisi pendidikan, persentase penduduk bekerja yang berpendidikan rendah cenderung mengalami peningkatan yang besar dari tahun ke tahun.

### SUMMARY

*In line with the high population growth, number and percentage of Working Age Population in Indonesia shown an increase since 1976 to 2004. In consequence of its, Working Age Population who economically active experienced became to 104.0 million people in 2004, and it was predicted to be 108.2 million people in 2005.*

*Unavailability of job opportunities which do not match with the labour force growth will affect of increasing of the unemployment rate. This happened especially since the 1997 economic crisis. In the last four years, unemployment rate rose of about 4 percent, from 6.1 in 2000 to 9.9 percent in 2004, which was dominated by male workers.*

*Based on the working hours, there were 28.1 million people among working people, who worked less than 35 hours (underemployment) in 1997. Those number increased by 2.7 percent in year 2004.*

*Generally the labour absorbtion in Indonesia was dominated by agricultural sector. This absorbtion was generally stagnant among young working people. While based on the highest education attained, the percentage of working people who attained a low level education tended to show a significant decrease from year to year.*

## 2.2.1 Aktivitas Penduduk

### a. Penduduk Usia Kerja

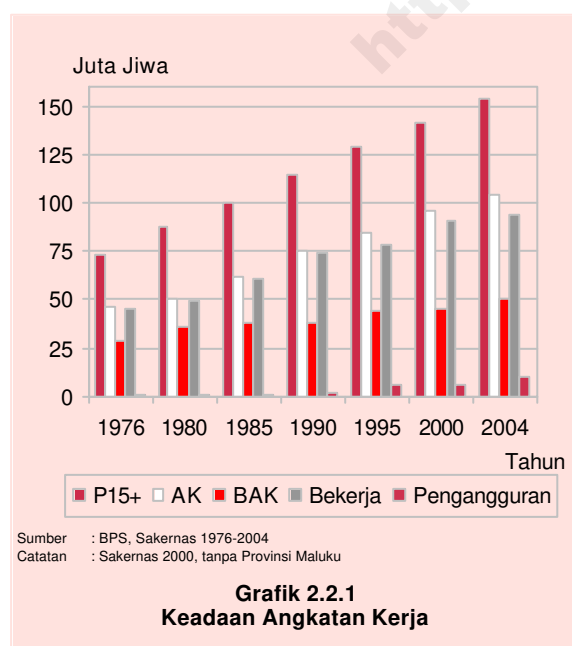
Penduduk usia kerja (PUK) yang digunakan sebagai batasan di Indonesia adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Selama periode 1976 sampai 2004 jumlah penduduk usia kerja selalu bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk pada umumnya. Pada tahun 1976 penduduk usia kerja berjumlah 73,1 juta jiwa atau 58,0 persen dari total penduduk Indonesia, dan pada tahun 2004 sudah mencapai 153,9 juta jiwa atau 71,1 persen. PUK perempuan selalu lebih besar sekitar 0,9 persen dari PUK laki-laki. Jika dilihat secara keseluruhan, tampak setiap tahun penduduk usia kerja bertambah sekitar 2,0 juta sampai 4,7 juta orang atau sekitar 0,3 persen sampai 1,4 persen pertahun.

### b. Angkatan Kerja

Seiring dengan penambahan jumlah PUK selama periode 1976-2004, jumlah angkatan kerja (AK) juga meningkat.

Tahun 1976 angkatan kerja di Indonesia berjumlah 46,3 juta orang dan tahun 2004 sebesar 104,0 juta, terdiri dari 63,4 persen laki laki dan 36,6 persen perempuan,



dan diperkirakan tahun 2005 angkatan kerja akan mencapai 108,2 juta jiwa.

### c. Tingkat Pengangguran

Komposisi angkatan kerja pada tahun 2004 terdiri dari 93,7 juta orang yang bekerja (90,1 persen) dan 10,2 juta orang pengangguran (9,9 persen), sedangkan tahun 1976 komposisinya 45,3 juta yang bekerja dan 1,0 juta pengangguran.

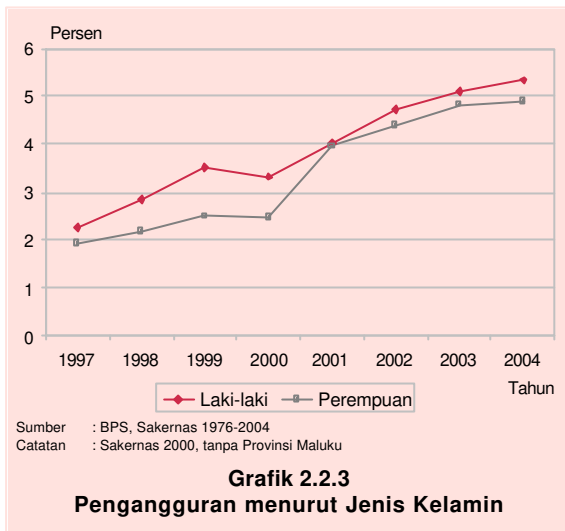


Angka pengangguran mengalami kenaikan yang cukup besar sejak tahun 1990, sebagai akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja yang ada. Persentase angka pengangguran sejak tahun 1997 (4,7 persen) atau pasca krisis moneter bertambah lebih cepat menjadi 6,1 persen pada tahun 2000 dan selama empat tahun kemudian bertambah sekitar 4,0 persen.

### d. Bukan Angkatan Kerja

Penduduk berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan dapat dibagi menjadi penduduk **angkatan kerja** (*economically active*) dan penduduk yang **bukan angkatan kerja** (*not economically active*). Pada tahun 1976 jumlah bukan angkatan kerja 26,8 juta atau sebesar 36,6 persen dari total PUK, sedangkan pada tahun 2004 bukan angkatan kerja sebesar 50,0 juta atau 32,4 persen dari total PUK.





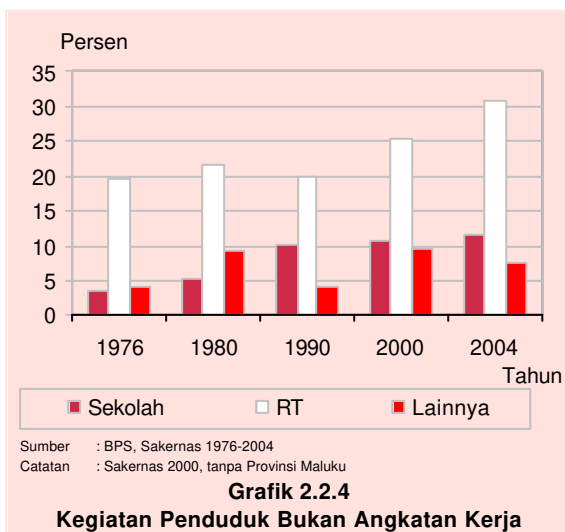
Sementara penduduk bukan angkatan kerja setiap tahun mengalami penurunan rata rata sebesar 5,0 sampai 0,2 persen setiap tahun. Dimana komposisi terbesar ada pada, kegiatan mengurus rumah tangga yaitu di atas 55 persen.

## 2.2.2 Angkatan Kerja

### a. Penduduk Usia Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara atau wilayah.

Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari **pasokan tenaga kerja** (*labor supply*) yang tersedia

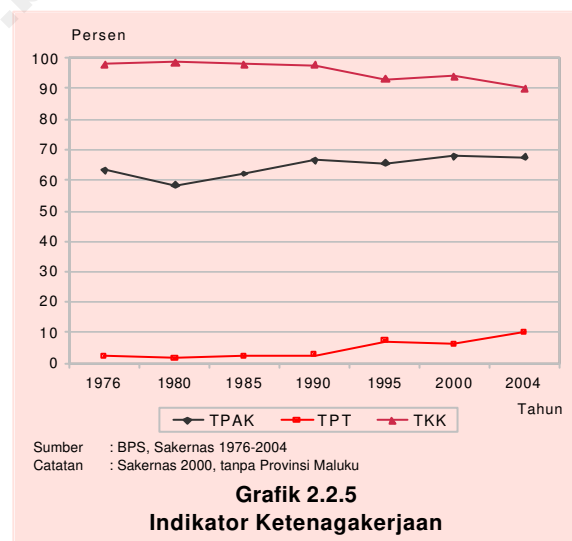


untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja memberikan dampak terhadap pertumbuhan angkatan kerja.

Pada kurun waktu 1976–2004 TPAK bergerak dari 63,3 persen menjadi 67,5 persen. TPAK laki-laki (86,0 persen) masih jauh lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan (49,2 persen).

### b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya, terutama sejak tahun 1990 sampai 2004 TPT mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu semula dari 2,5 persen menjadi 9,9 persen. Menurut jenis kelamin, TPT perempuan (12,9 persen) lebih tinggi dibanding TPT laki-laki (8,1 persen), keadaan ini berlawanan dengan TPAKnya.

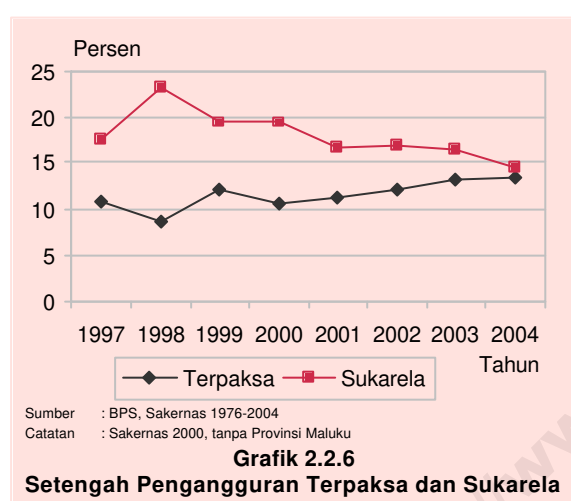


### c. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan indikasi dari persentase tenaga kerja yang terserap dalam pasar kerja. TKK berfluktuasi dari tahun 1976 sampai tahun 1995. TKK tahun 2000 sebesar 93,9 persen bergerak turun perlahan-lahan menjadi 90,1 pada tahun 2004.

#### d. Setengah Pengangguran

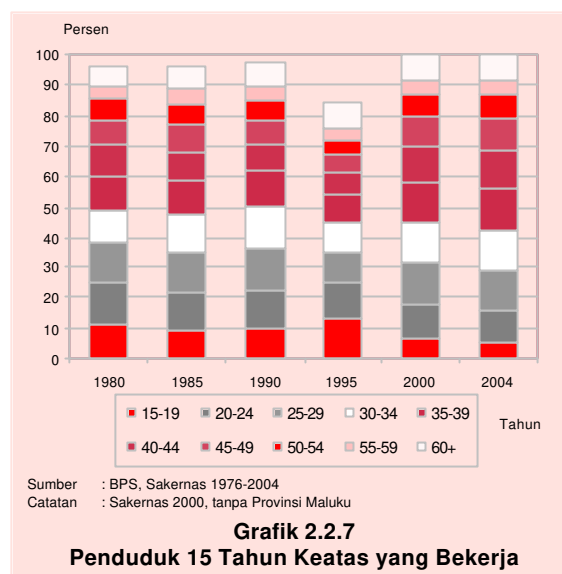
Kalau dilihat pada tahun 1997 jumlah setengah pengangguran terpaksa mencapai 10,7 juta orang dan setengah pengangguran sukarela sebesar 17,4 juta orang. Pada tahun 2004 angka setengah pengangguran terpaksa sudah mencapai 13,4 juta orang, sebaliknya secara absolut jumlah setengah pengangguran sukarela berkurang menjadi 14,5 juta orang. Jadi selama tahun 1997–2004 angka setengah pengangguran terpaksa naik sebesar 2,7 persen sedangkan angka setengah pengangguran sukarela turun sebesar 2,9 persen.



### 2.2.3 Penduduk yang Bekerja

#### a. Kelompok Usia Muda yang Bekerja

Dilihat dari struktur umur, persentase penduduk yang bekerja pada kelompok umur 15-24 atau usia muda antara tahun 1996 dan 2004 mengalami penurunan dari 19,8 menjadi 16,0 persen pada tahun 2004. Penurunan persentase ini menunjukkan adanya kesempatan bagi penduduk usia muda yang bekerja untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Persentase penduduk yang bekerja usia 25-34 tampak stabil pada kisaran 27 persen, sedangkan pada kelompok umur 35-54 persentasenya sedikit mengalami kenaikan dari sekitar 42,5 persen (32 juta) menjadi 44,4 persen (44 juta). Persentase penduduk yang bekerja pada kelompok umur 55-59 juga stabil, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kelompok umur 60 ke atas

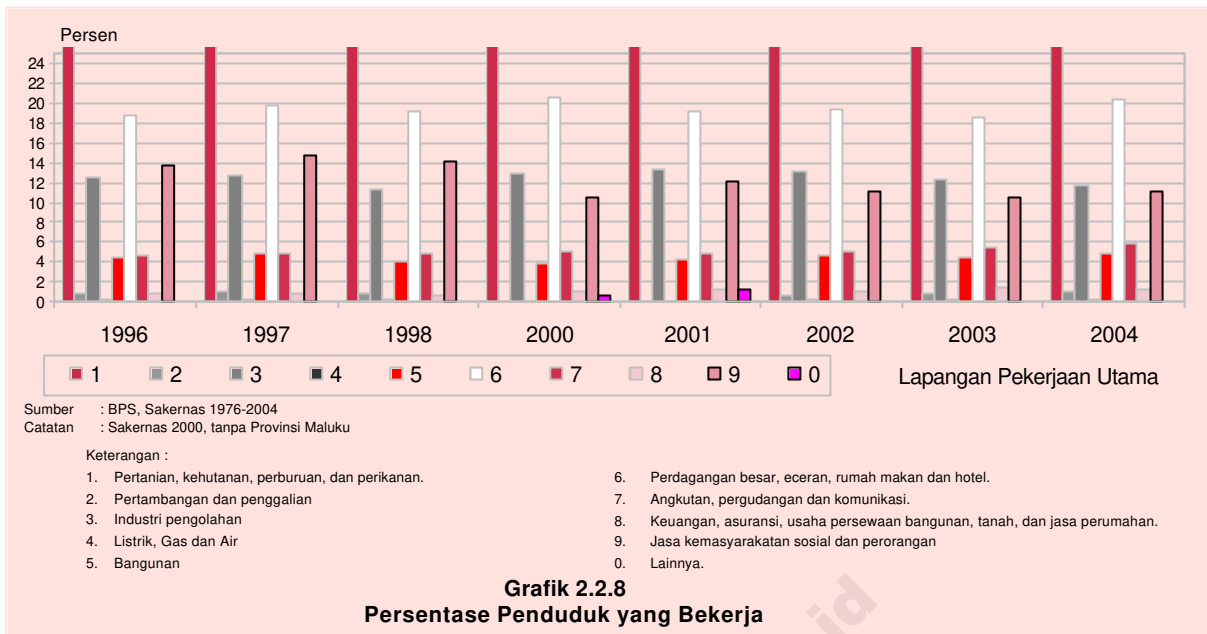


mempunyai persentase yang setiap tahun meningkat selama periode 1996–2004 dari 6,5 persen menjadi 8,2 persen.

#### b. Penyerapan Tenaga Kerja

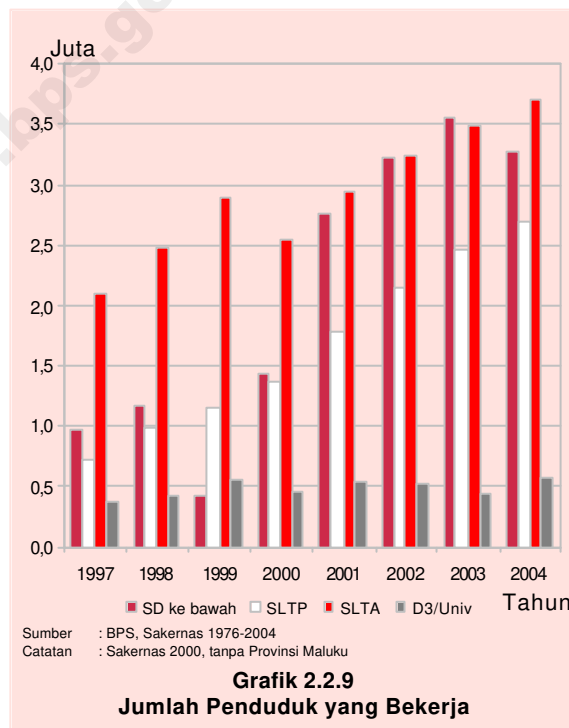
Walaupun sektor pertanian (kode 1) sampai sekarang merupakan sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, namun persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian tahun 2004 sekitar 43 persen (40,6 Juta orang), walaupun sektor pertanian ini antara tahun 1996-1997 sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2003 persentasenya mengalami kenaikan kembali.

Sektor Perdagangan (kode 6) adalah sektor terbesar kedua setelah pertanian, yang mempunyai persentase sebesar 20,4 persen (19,1 juta orang) sedangkan sektor ketiga terbesar adalah sektor industri pengolahan (kode 3), dimana persentase penduduk yang bekerja di sektor ini tahun 2004 sebesar 11,8 persen (11,1 juta) orang. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor pilihan dalam penyerapan tenaga kerja, walaupun terjadi juga sedikit kenaikan di sektor bangunan (kode 5), angkutan (kode 7) dan keuangan (kode 8). Sedangkan sektor Pertambangan (kode 2), Listrik (kode 4), Jasa (kode 9) dan sektor lainnya (kode 0) cukup tampak stabil.



**c. Tingkat Pendidikan Pekerja**

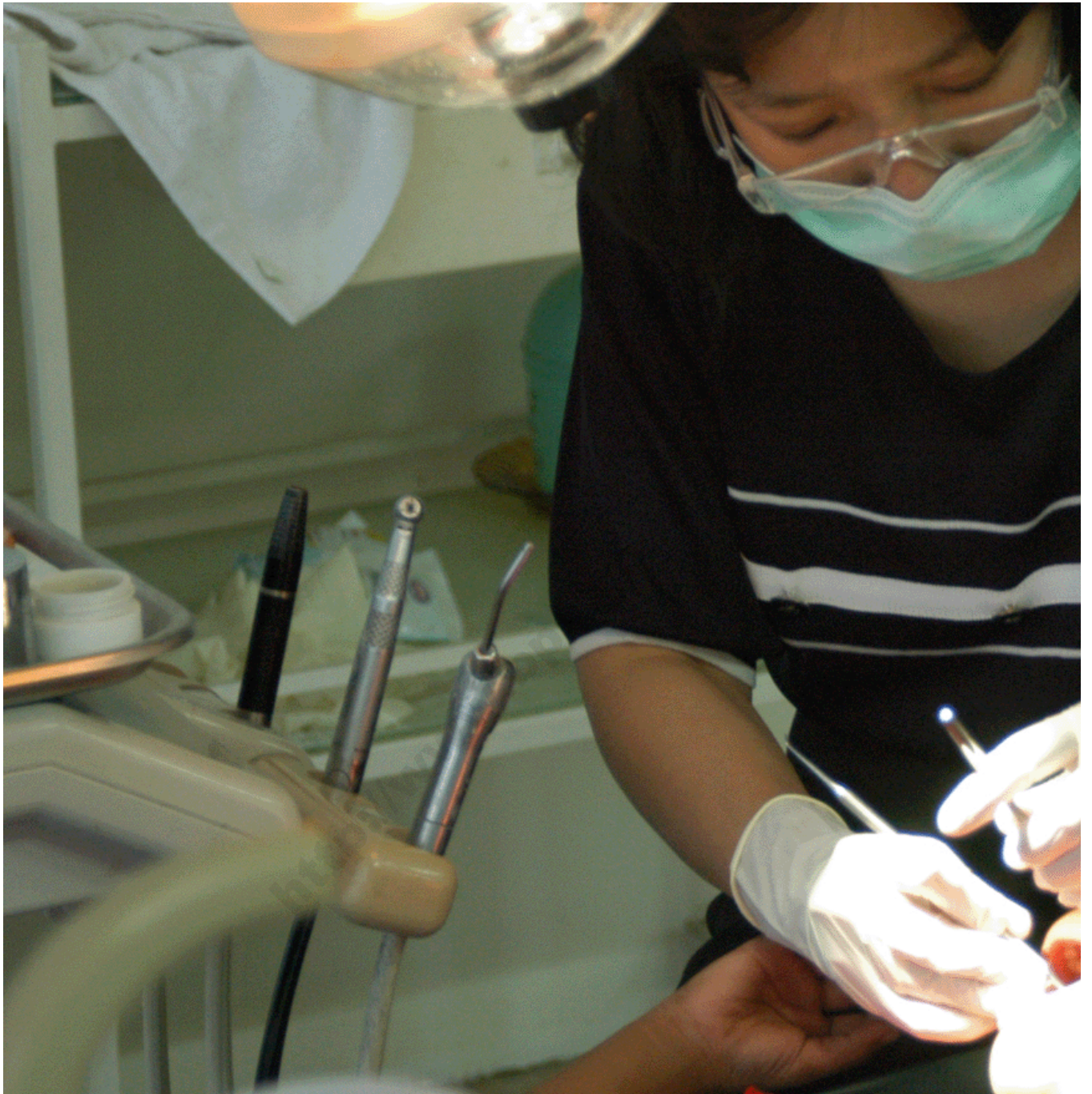
Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan meningkatnya lowongan kerja baru menyebabkan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka makin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya. SDM yang berkualitas diharapkan lebih produktif dan mampu menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah (tidak sekolah, belum tamat SD dan tamat SD) mengalami penurunan sebesar 11,8 persen. Pergeseran yang terjadi pada periode 1996-2004 ini terus menurun proporsinya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Sementara penduduk bekerja yang mempunyai pendidikan tertinggi SLTP, SLTA dan SLTA ke atas (Diploma dan Universitas) masing-masing mengalami kenaikan 7,1 persen, 2,6 persen 2,3 persen untuk periode 1996 sampai 2004.















**KESEHATAN DAN GIZI**



---

## 2.3 KESEHATAN DAN GIZI

### RINGKASAN

Sesuai dengan tujuan program pembangunan kesehatan dan gizi yaitu menciptakan keadaan sehat dan sejahtera bagi setiap penduduk, kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami peningkatan selama 60 tahun sejak kemerdekaan. Beberapa indikator kesehatan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pembangunan seperti tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, penolong persalinan dan status gizi balita.

Penggunaan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan selama periode 1992-2004. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan dokter praktek, dari 27,4 persen pada tahun 1992 menjadi 33,7 persen pada tahun 2004. Sebagai salah satu dampaknya, persentase balita yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga medis juga meningkat dari 38,5 persen pada tahun 1992 menjadi 71,5 persen pada tahun 2004.

Kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan dan gizi juga mengalami peningkatan. Persentase balita yang berstatus gizi baik meningkat dari 55,5 persen pada tahun 1992 menjadi 67,9 persen pada tahun 2003. Terdapat indikasi bahwa status gizi balita di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Pada tahun 2003, balita dengan status gizi baik di perkotaan sebesar 71,3 persen, sementara di perdesaan sebesar 65,7 persen.

### SUMMARY

*One of the national development goals in health and nutrition sector is to create healthy living condition in order to increase social welfare status. Indonesia had achieved magnificent results in increasing the quality of human resources during the 60 years after the Indonesian independence. Some health indicators were used to evaluate the progress of development program, such as use of modern health facilities, birth attendant and under-five nutritional status.*

*The use of health facilities increased during 1992-2004 period. This was indicated by the increase in the percentage of population who seek health treatments in hospital and to medical doctor, from 27.4 percent in 1992 to 33.7 percent in 2004. The impact is that, the percentage of under-five years old population who used midwives and other paramedic as birth attendant during their delivery process also increased from 38.5 percent in 1992 to 71.5 percent in 2004.*

*People's awareness of the importance of health and nutrition also increased during this period. Percentage of population under-five years old with good nutritional status increased from 55.5 percent in 1992 to 67.9 percent in 2003. It was indicated that the nutritional status in urban areas was better than that in rural areas. In 2003, the percentage of under-five population with normal nutritional status in urban area was 71.3 percent, while in rural area was 65.7 percent.*

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dinyatakan bahwa arah kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial antara lain meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, memelihara dan meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan SDM.

Kondisi kesehatan dan gizi merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang berhubungan satu sama lain. Gizi yang baik menjadi kondisi awal yang dapat menentukan status kesehatan. Indikator derajat kesehatan penduduk dapat dilihat antara lain dari tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, penolong persalinan balita dan status gizi balita.

### 2.3.1 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu di antaranya adalah kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

Fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah Puskesmas. Persentasenya mencapai lebih dari 30 persen selama kurun waktu tahun 1992 s.d 2004, dengan persentase tertinggi tahun 1996 sebesar 44,6 persen. Selama kurun waktu tahun 1992-2004 penggunaan fasilitas rumah sakit dan dokter praktek juga mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 1992, penduduk yang memanfaatkan rumah sakit dan

dokter praktek untuk berobat adalah sebesar 27,4 persen, pada tahun 2004 sudah mencapai 33,7 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan 'lainnya' (berobat ke dukun/tabib/sinse) semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pemanfaatan fasilitas kesehatan modern semakin meningkat.

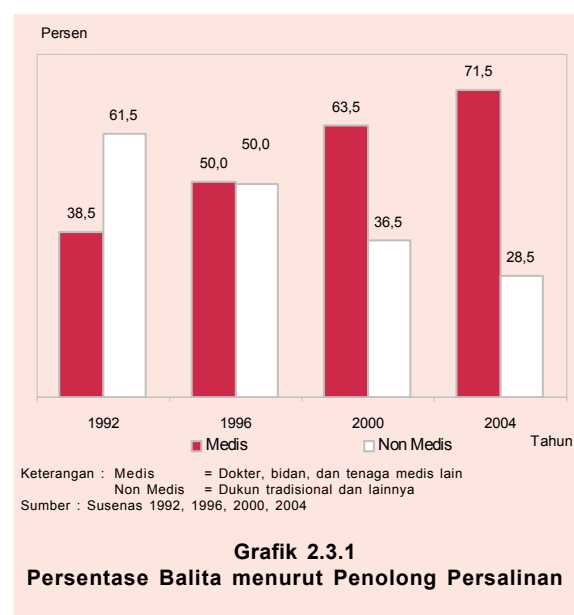
### 2.3.2 Penolong Persalinan

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan balita selain kesehatan ibu adalah penolong persalinan. Data komposisi penolong persalinan bayi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesehatan ibu dan anak serta kualitas pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili dan lainnya.

Pada tahun 1992 lebih dari 60 persen proses persalinan balita adalah oleh dukun dan lainnya. Perkembangan dalam 12 tahun terakhir (1992-2004) menunjukkan kecenderungan yang positif, di mana persalinan balita yang ditolong oleh bidan dan tenaga medis lain meningkat dengan tajam dari 32,6 persen

**Tabel 2.3.1**  
Persentase Penduduk menurut Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan	1992	1996	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah sakit	8,0	7,5	9,2	9,3
Dokter praktek	19,4	18,8	24,9	24,4
Puskesmas	37,8	44,6	32,6	37,3
Klinik	4,8	4,0	3,2	3,9
Petugas kesehatan	19,5	18,3	21,1	18,5
Lainnya	10,4	6,8	8,8	6,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0



**Grafik 2.3.1**  
Persentase Balita menurut Penolong Persalinan

**Tabel 2.3.2**  
**Persentase Balita menurut Penolong Persalinan**

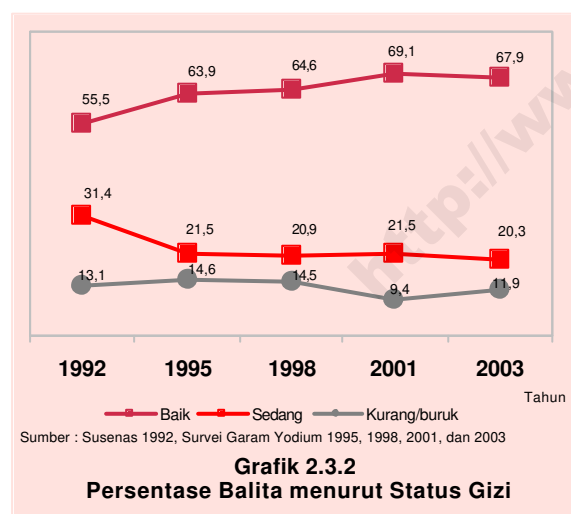
Penolong persalinan (1)	1992 (2)	1996 (3)	2000 (4)	2004 (5)
Dokter	5,9	6,8	8,0	9,8
Bidan dan tenaga medis lain	32,6	43,2	55,5	61,7
Dukun tradisional	58,5	47,3	34,4	26,3
Lainnya	3,0	2,7	2,1	2,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Susenas 1992, 1996, 2000, dan 2004

pada tahun 1992 menjadi 61,7 persen pada tahun 2004. Meskipun masih relatif kecil, persalinan oleh dokter juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 5,9 persen tahun 1992 menjadi hampir 10 persen tahun 2004.

### 2.3.3 Status Gizi Balita

Status gizi balita di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, seperti ditunjukkan oleh peningkatan yang berarti pada banyaknya balita yang berstatus gizi baik, yaitu dari 55,5 persen pada tahun



1992 menjadi 69,1 persen pada tahun 2001, walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2003 menjadi 67,9 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 11 persen balita bergizi kurang/buruk pada tahun 2003 yang memerlukan perhatian khusus.

Selain itu secara umum diperoleh indikasi bahwa status gizi balita yang tinggal di daerah perkotaan umumnya lebih baik dibandingkan balita yang tinggal di daerah perdesaan. Kondisi ini juga merupakan cerminan dari perbedaan tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi serta ketersediaan pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Data pada kurun waktu 1992-2003 memperlihatkan bahwa persentase balita berstatus gizi baik di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan.

**Tabel 2.3.3**  
**Persentase Balita menurut Status Gizi**

Status gizi	1992 (1)	1995 (2)	1998 (3)	2001 (4)	2003 (5)
<b>Baik</b>					
Perkotaan	65,0	67,7	69,5	72,6	71,3
Perdesaan	53,9	60,7	62,2	66,8	65,7
<b>Sedang</b>					
Perkotaan	27,3	24,0	18,9	19,4	18,4
Perdesaan	35,3	27,2	21,9	23,0	21,5
<b>Kurang/buruk</b>					
Perkotaan	7,7	8,2	11,6	8,0	10,3
Perdesaan	10,8	12,1	15,9	10,3	12,9

Sumber : Susenas 1992, Survei Garam Yodium 1995, 1998, 2001, dan 2003









STATISTIK  
60 Tahun INDONESIA  
MERDEKA





## **PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA**



## 2.4 PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA

### RINGKASAN

Sebagai dampak keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, selama kurun waktu 1961-2004 persentase penduduk buta huruf mengalami penurunan dari 57,1 persen pada tahun 1961 menjadi hanya 8,5 persen pada tahun 2004. Selain penurunan secara umum, ditinjau dari isu gender juga terjadi penurunan kesenjangan buta huruf dari sisi gender dari tahun ke tahun, terutama pada penduduk usia muda (10-24 tahun). Keberhasilan yang lain adalah, persentase pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas umumnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang berarti terjadi pada tingkat SD dan SLTP, sementara untuk tingkat SLTA ke atas hasilnya belum memuaskan.

Dalam kurun waktu 1961-2004, secara keseluruhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengalami peningkatan yang cukup berarti terutama pada kelompok penduduk usia 7-12 tahun. Angka partisipasi sekolah menurun sejalan dengan naiknya kelompok umur penduduk. Secara umum APS daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, yang dapat menunjukkan bahwa taraf pendidikan penduduk perkotaan lebih baik dibanding perdesaan.

Selama 60 tahun Indonesia merdeka, pola perilaku penduduk dalam memanfaatkan media cetak maupun elektronik menunjukkan perubahan. Selama kurun waktu 1984-2003 persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton televisi mengalami kenaikan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan peningkatan angka persentase yang cukup besar setiap tahunnya. Di sisi lain, persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar/majalah mengalami kenaikan antara tahun 1984-1994, tetapi justru mengalami penurunan yang cukup besar antara 1994-2000. Penyebab penurunan persentase penduduk yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar/majalah diduga antara lain karena beralihnya pendengar radio dan pembaca surat kabar/majalah ke media televisi. Namun penurunan tersebut juga diduga sebagai dampak krisis ekonomi 1997.

### SUMMARY

*As the impact of the success on education development, during 1961-2004 period, the percentage of illiterate people decreased significantly, from 57.1 percent in 1961 to only 8.5 percent in 2004. Significant decrease in illiteracy rate also occurred by gender (gender gap), especially for young people aged 10 to 24 years. Another achievement is that the percentage of population aged 10 years and over by education attainment increased during this period. Significant increase occurred for primary and junior high school, while the achievement is less desirable for senior high school and higher level.*

*During the period of 1961-2004, the school participation rate (APS) increased significantly, especially for 7-12 years of age group. The APS decreased as the age group increased. The APS in urban area tended to be higher than that in rural area, which indicated that the education level of urban people is better than that of rural people.*

*During the 60 years of Indonesian independence, the behavioral pattern of people in accessing mass media show a change. The percentage of people aged 10 years and over who watched television increased sharply during the period of 1984 to 2003, which was indicated by the high increase in its yearly percentage rate. The percentage of people aged 10 years and over who listened to the radio and read newspaper/magazine increased during the year 1984-1994 period, but decreased significantly during 1994-2000 period. The people's preference of accessing information through television over the radio and newspaper/magazine was predicted as one the reason in this decrease. Moreover, the effect of 1997 economic crisis is suspected to have a contribution on this decline.*

Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas SDM suatu bangsa. Upaya percepatan peningkatan pendidikan penduduk mulai dilaksanakan pemerintah pada tahun 1973/1974, yaitu dengan menyebarkan pembangunan sekolah dasar (SD) ke seluruh pelosok negeri melalui program SD inpres. Pada pertengahan tahun 1980-an pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun (tingkat SD), diteruskan dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun (tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)) pada pertengahan tahun 1990-an. Dengan program ini seluruh penduduk Indonesia (khususnya anak usia sekolah) diharapkan mempunyai pendidikan minimal tamat SLTP. Secara umum, upaya pembangunan bidang pendidikan telah menunjukkan hasil yang berarti, seperti ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut:

### 2.4.1 Tingkat Buta Huruf

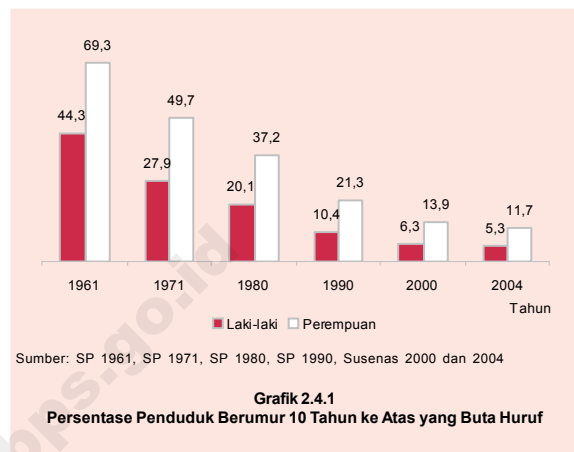
Selama kurun waktu 1961-2004 persentase penduduk buta huruf mengalami penurunan yang berarti, yaitu dari 57,1 persen pada tahun 1961 menjadi 8,5 persen pada tahun 2004. Persentase buta huruf pada penduduk usia muda (10-24 tahun) pada tahun 2004 relatif sudah sangat rendah, yaitu sekitar 1-2 persen pada setiap kelompok umurnya, sebaliknya pada kelompok usia 45 tahun ke atas masih tinggi, yaitu sekitar 25 persen (Tabel 2.4.1).

Dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 1961 persentase penduduk yang buta huruf baik laki-laki maupun perempuan cukup tinggi, yaitu mencapai 44,3 persen untuk laki-laki dan sebesar 69,3 persen untuk perempuan. Selama 4 dekade (antara 1961-2004) telah terjadi penurunan yang berarti, pada tahun 2004 penduduk laki-laki yang buta huruf hanya tinggal 5,3 persen dan perempuan 11,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut selain terjadi penurunan persentase penduduk yang buta huruf juga terjadi penurunan kesenjangan buta huruf ditinjau dari isu gender (Grafik 2.4.1 dan Tabel 2.4.1). Bahkan pada kelompok umur 10 s.d. 24 tahun, kesenjangan gender penduduk yang buta huruf relatif sangat kecil, dengan

**Tabel 2.4.1**  
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf**

Kelompok Umur	1961	1971	1980	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-14	30,4	18,8	10,0	2,4	1,2	1,1
15-19	35,6	17,8	13,0	2,6	1,3	1,2
20-24	45,8	22,8	16,3	5,2	1,9	1,4
25-34	59,2	38,1	22,2	11,0	3,8	2,3
35-44	66,6	53,2	38,0	18,4	9,4	6,9
45+	82,0	68,8	60,2	42,6	28,5	24,9

Sumber: SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, Susenas 2000 dan 2004



Sumber: SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, Susenas 2000 dan 2004

**Grafik 2.4.1**  
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf**

perbedaan di bawah 1 persen.

Penurunan tingkat buta huruf dari tahun 1961 sampai 2004, terjadi berjenjang pada setiap dekade sesuai dengan program yang dilaksanakan pemerintah. Pada dekade 1961-1971 terjadi penurunan persentase sebesar 18,0 persen, yang diduga antara lain karena pada dekade tersebut terdapat program pemberantasan buta huruf. Pada dekade berikutnya 1971-1980 dan 1980-1990 juga terjadi perubahan yang cukup berarti yaitu masing-masing sebesar 10,3 persen dan 12,9 persen, sebagai hasil dari upaya percepatan peningkatan pendidikan, khususnya melalui program wajib belajar.

**Tabel 2.4.2**  
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf**

Jenis Kelamin	1961	1971	1980	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	44,3	27,9	20,2	10,4	6,3	5,3
Perempuan	69,3	49,7	37,2	21,3	13,8	11,7
L + P	57,1	39,1	28,8	15,9	10,1	8,5

Sumber: SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, Susenas 2000 dan 2004

### 2.4.2 Pendidikan yang Ditamatkan

Pola dan distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendidikan penduduk yang semakin baik.

Persentase penduduk yang tamat SD atau di atasnya pada tahun 1961 adalah sebesar 15,5 persen, diantaranya yang minimal tamat SLTP sebesar 3,1 persen, dan minimal tamat SLTA kurang dari 1 persen. Pada tahun 2004, penduduk yang tamat SD atau di atasnya telah mencapai lebih dari 70 persen, di antaranya yang minimal tamat SLTP hampir mencapai 40 persen, dan minimal tamat SLTA lebih dari 20 persen.

**Tabel 2.4.3**  
Persentase Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas

Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	1961	1971	1980	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tidak/belum pernah sekolah</b>	<b>64,8</b>	<b>40,4</b>	<b>27,6</b>	<b>16,3</b>	<b>9,7</b>	<b>7,9</b>
Perkotaan	42,0	22,3	14,3	8,2	5,3	4,5
Perdesaan	69,1	44,3	31,6	20,0	13,0	10,6
<b>Belum Tamat SD</b>	<b>19,7</b>	<b>33,2</b>	<b>41,0</b>	<b>31,5</b>	<b>24,2</b>	<b>21,5</b>
Perkotaan	20,4	29,5	32,0	22,2	16,8	15,9
Perdesaan	19,5	34,1	43,7	35,8	29,8	25,8
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>12,4</b>	<b>19,6</b>	<b>20,6</b>	<b>30,4</b>	<b>32,4</b>	<b>32,3</b>
Perkotaan	25,5	27,0	26,3	28,7	27,5	25,8
Perdesaan	10,0	18,0	18,9	31,1	36,2	37,3
<b>SLTP</b>	<b>2,4</b>	<b>4,4</b>	<b>6,0</b>	<b>10,7</b>	<b>15,3</b>	<b>17,6</b>
Perkotaan	8,7	12,3	14,1	17,5	19,2	19,9
Perdesaan	1,2	2,7	3,5	7,5	12,3	15,8
<b>SLTA</b>	<b>0,6</b>	<b>2,0</b>	<b>4,4</b>	<b>10,0</b>	<b>15,2</b>	<b>17,1</b>
Perkotaan	2,9	7,4	11,7	20,1	25,2	27,4
Perdesaan	0,2	0,9	2,1	5,2	7,7	9,1
<b>Di atas SLTA</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>
Perkotaan	0,5	1,5	1,6	3,2	6,0	6,4
Perdesaan	0,0	0,1	0,1	0,4	1,0	1,4

Sumber: SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, Susenas 2000 dan 2004

Sementara itu, bila dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk yang minimal tamat SLTP pada tahun 1980 di daerah perkotaan adalah sebesar 27,4 persen, sedangkan di perdesaan hanya sebesar 5,7 persen. Selama 2 dekade (1980-2004) terjadi peningkatan yang sangat berarti pada persentase penduduk yang tamat SLTP atau di atasnya baik di perkotaan (26,3 persen) maupun di perdesaan (20,6 persen). Pada tahun 2004 penduduk perkotaan yang minimal tamat SLTP sebesar 53,7 persen sedangkan di perdesaan adalah sebesar 26,3 persen.

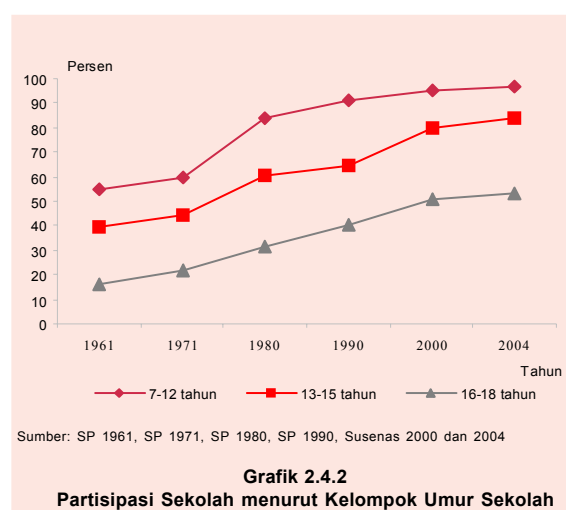
### 2.4.3 Partisipasi Sekolah

Keberhasilan program pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan upaya memperluas akses masyarakat pada pendidikan, salah satunya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah.

**Tabel 2.4.4**  
Angka Partisipasi Sekolah

Usia Sekolah	Tipe Daerah	1961	1971	1980	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7-12	Perkotaan	74,5	73,0	91,7	95,1	97,3	97,7
	Perdesaan	51,5	57,4	81,4	90,0	94,4	96,1
13-15	Perkotaan	67,9	63,2	78,1	79,4	88,3	89,6
	Perdesaan	33,4	40,0	54,9	58,2	73,8	79,3
16-18	Perkotaan	38,6	41,4	53,2	59,2	66,7	66,8
	Perdesaan	10,9	16,1	23,0	30,1	38,4	43,0

Sumber: SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, Susenas 2000 dan 2004



Sumber: SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, Susenas 2000 dan 2004



Pada kurun waktu tahun 1961-2004, APS penduduk usia SD (7-12 tahun), usia SLTP (13-15 tahun), dan usia SLTA (16-18 tahun) menunjukkan peningkatan. Hal ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Walaupun di daerah perkotaan persentase penduduk yang bersekolah untuk semua kelompok usia sekolah lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, akan tetapi khusus kelompok usia SD dan SLTP, APS di perdesaan tumbuh lebih cepat, sehingga pada tahun 2004 APS usia SD telah hampir sama antara perkotaan dan perdesaan (97,7 persen berbanding 96,1 persen), dan perbedaan APS usia SLTP semakin mengecil dibandingkan keadaan tahun 1961. Gambaran ini mencerminkan keberhasilan dari program-program pendidikan yang telah diluncurkan pemerintah.

### 2.4.4 Sosial Budaya

Tingkat partisipasi penduduk untuk memperoleh informasi dari media televisi cukup tinggi seiring dengan perkembangan teknologi di bidang elektronik dan informasi. Hasil Susenas menunjukkan kegiatan menonton televisi mengalami kenaikan yang berarti dalam 2 dekade terakhir, yaitu dari 44,5 persen pada tahun 1984 menjadi 84,9 persen pada tahun 2003.

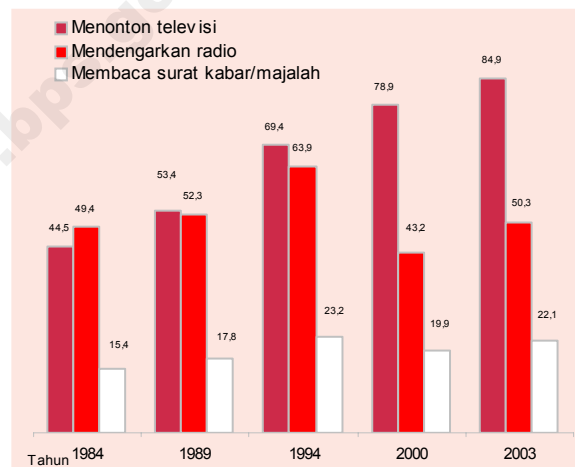
Kegiatan mendengarkan radio dan membaca surat kabar/majalah menunjukkan kenaikan antara tahun 1984 hingga 1994, namun mengalami penurunan yang cukup besar antara tahun 1994-2000. Antara tahun 2000-2003 kegiatan mendengarkan radio dan membaca surat kabar/majalah meningkat kembali, meskipun demikian kondisi

tahun 2003 masih lebih rendah dibandingkan keadaan tahun 1994. Penurunan persentase penduduk yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar/majalah barangkali diantaranya disebabkan beralihnya pendengar radio dan pembaca surat kabar/majalah ke media televisi.

**Tabel 2.4.5**  
**Persentase Kegiatan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas**

Kegiatan Sosial Budaya	1984	1989	1994	2000	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Menonton televisi</b>					
Perkotaan	77,4	81,7	88,9	89,5	94,2
Perdesaan	34,1	42,8	58,8	70,9	78,1
<b>Mendengarkan radio</b>					
Perkotaan	54,2	60,5	69,9	46,4	54,6
Perdesaan	47,8	49,2	60,6	40,8	47,1
<b>Membaca surat kabar/majalah</b>					
Perkotaan	37,8	39,9	43,9	33,6	36,7

Sumber : Susenas Modul Sosial Budaya 1984, 1989, 1994, 2000 dan 2003



Sumber : Susenas Modul Sosial Budaya 1984, 1989, 1994, 2000 dan 2003

**Grafik 2.4.3**  
**Persentase Kegiatan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas**







## **PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA**



---

## 2.5 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

### RINGKASAN

Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah perubahan pola konsumsi penduduk. Menurut hukum ekonomi bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, selama 60 tahun sejak kemerdekaan terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk dari makanan ke nonmakanan. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan menunjukkan penurunan, dari 69,5 persen dari total pengeluaran pada tahun 1980 menjadi 54,6 persen pada tahun 2004.

Secara umum angka ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 sudah jauh melebihi tingkat ketersediaan pangan nasional yang disyaratkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi ke VI (1998). Widyakarya Pangan dan Gizi mensyaratkan angka kecukupan energi rata-rata pada tingkat ketersediaan sebesar 2.550 kkal/orang/hari dan kecukupan protein sebesar 55 gram/orang/hari. Selama kurun waktu tersebut, angka ketersediaan kalori sudah mencapai sekitar 3.000 kkal/orang/hari dan ketersediaan protein mencapai sekitar 70-75 gram per kapita per hari.

### SUMMARY

*One indicator of welfare improvement is the change in consumption pattern. Based on economic theory, given the taste, the percentage of expenditure for food consumption will decreased as income increased. This pattern also occur in Indonesia, during 60 years of independence, the consumption pattern of the Indonesian population shifted gradually. The percentage of expenditure for food decreased from 69.5 percent of total income in 1980 to 54.6 percent in 2004.*

*In general, the availability of calorie and protein per capita per day during 1998-2003 far exceeded the national average need as recommended by the Sixth Panel on Food and Nutrition (1998). During that period, the average availability of calorie reached 3,000 kcal per capita per day, while the average availability of protein reached 70-75 gram per capita per day.*

### 2.5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah perubahan pola konsumsi penduduk. Menurut hukum ekonomi bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan (Ernest Engel, 1857). Dengan demikian secara umum semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang persentase pengeluaran untuk makanan.

Sasaran pembangunan di bidang pangan adalah penyediaan pangan yang cukup dengan mutu gizi yang baik. Salah satu barometer yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah meningkatnya pendapatan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi pangan dengan gizi yang lebih baik.

Pada tahun 1980 hampir 70 persen pengeluaran penduduk digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Persentasenya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun, dan menjadi 54,6 persen pada tahun 2004. Selama periode tersebut juga terjadi perubahan pola konsumsi makanan penduduk dengan meningkatnya persentase pengeluaran untuk makanan jadi dan menurunnya persentase pengeluaran untuk makanan pokok.

Pengeluaran untuk makanan pokok mengalami penurunan yang berarti yaitu dari 36,9 persen tahun 1980 menjadi 18,7 persen tahun 2004, sebaliknya pengeluaran untuk makanan jadi meningkat dari 6,6 persen tahun 1980 menjadi 18,8 persen pada tahun 2004. Demikian pula pengeluaran untuk makanan berprotein tinggi (susu, dan telur) mengalami peningkatan dari 17,6 persen tahun 1980 menjadi 20,1 persen pada tahun 2004. Gambaran ini memperlihatkan pergeseran pola konsumsi makanan penduduk sebagai cerminan modernisasi, sekaligus perubahan tingkat kesejahteraan.

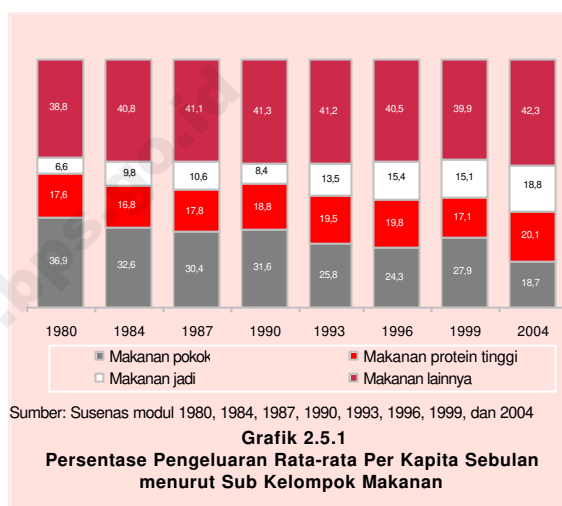
### 2.5.2 Ketersediaan Kalori, Protein, dan Lemak

Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah berupaya

**Tabel 2.5.1**  
**Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan**  
**Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan**

Jenis pengeluaran	1980	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Makanan	69,3	63,2	61,3	60,4	56,9	55,3	62,9	54,6
Bukan makanan	30,7	36,8	38,7	39,6	43,2	44,7	37,1	45,4
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Susenas modul 1980, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, dan 2004



Sumber: Susenas modul 1980, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, dan 2004

mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Mantapnya ketahanan pangan dicerminkan dengan tercapainya kecukupan ketersediaan rata-rata energi dan protein.

Ketersediaan kalori, protein, dan lemak yang siap dikonsumsi oleh penduduk selama kurun waktu 1968 – 2002 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1968 ketersediaan kalori tercatat sebanyak 2.035 kkal, protein sebanyak 43,0 gram, dan lemak sebanyak 29,1 gram per kapita per hari. Angka ini mengalami penambahan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2002 mencapai 2.962 kkal untuk kalori, 74,8 gram protein, dan 67,4 gram lemak per kapita per hari. Menurut angka sementara tahun 2003, ketersediaan kalori meningkat lagi menjadi 3.061 kkal per kapita per hari, demikian

**Tabel 2.5.2**  
**Ketersediaan Kalori, Protein, dan Lemak Per Kapita Per Hari**

Tahun	Kalori (kkal)	Protein (gram)	Lemak (gram)
(1)	(2)	(3)	(4)
1968	2 035	43,0	29,1
1969	2 134	44,2	28,3
1970	2 097	44,9	27,3
1971	2 070	44,0	28,1
1972	2 052	43,5	29,1
1973	2 247	45,9	31,0
1974	2 248	45,8	35,0
1975	2 150	45,2	33,2
1976	2 117	41,8	30,6
1977	2 186	42,8	32,6
1978	2 255	45,4	34,5
1979	2 330	46,4	34,3
1980	2 489	49,4	40,5
1981	2 542	49,3	44,7
1982	2 502	48,0	39,6
1983	2565	53,0	40,5
1984	2 516	52,8	47,7
1985	2 519	52,7	46,1
1986	2 660	58,2	50,0
1987	2 580	55,3	50,0
1988	2 712	60,0	52,5
1989	2 640	56,8	53,8
1990	2 781	61,8	59,1
1991	2 790	63,4	59,1
1992	2 968	67,9	67,3
1993	2 899	66,0	65,3
1994	2 879	66,8	56,8
1995	3 133	79,9	73,1
1996	3 234	82,2	71,8
1997	2 939	76,1	55,1
1998	3 021	72,0	73,5
1999	3 120	80,5	60,0
2000	2 974	74,8	61,7
2001	2 991	70,8	73,1
2002	2 962	74,8	67,4
2003 *)	3 061	74,9	74,3

Catatan :

- Sejak tahun 1995 menggunakan komposisi zat gizi bahan makanan 1995
- Sejak tahun 1999 data industri sudah disempurnakan dengan menggunakan Tabel I – O

Sumber : Publikasi Neraca Bahan Makanan

juga dengan ketersediaan protein dan lemak masing-masing meningkat menjadi 74,9 gram dan 74,3 gram per kapita per hari.

Secara umum angka ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 sudah jauh melebihi tingkat ketersediaan pangan nasional yang disyaratkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi ke VI (1998). Angka kecukupan energi rata-rata pada tingkat ketersediaan sebesar 2.550 kkal per orang per hari, sementara kecukupan protein sebesar 55 gram/orang/hari. Selama kurun waktu tersebut, angka ketersediaan kalori sudah mencapai sekitar tiga ribuan kkal dan ketersediaan protein mencapai sekitar 70–75 gram.













## **KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN**



---

## 2.6 KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

### RINGKASAN

Selama lebih dari tiga dekade terakhir, jumlah penduduk miskin telah banyak berkurang. Dalam periode 1970-1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dengan cepat dari 70 juta orang (60,0 persen) menjadi 22 juta orang (11,3 persen). Akan tetapi, pada saat krisis ekonomi terjadi pada pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin meningkat kembali. Pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 49,5 juta orang (24,2 persen).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan telah menurunkan jumlah penduduk miskin selama periode 1998-2004. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih 36,2 juta orang (16,7 persen). Dari segi distribusi pendapatan, masih terlihat adanya ketidakmerataan walaupun masih tergolong rendah. Indeks Gini di Indonesia turun dari 0,4 pada tahun 1976 menjadi 0,3 pada tahun 2004.

### SUMMARY

*During the last three decades, the number of poor people sharply decreased from 70 million people (60.0 percent) to 22 million (11.3 percent). However, the economic crisis which started in mid 1997, had dramatically increased the number of poor people. In 1998, the number of poor people were 49.5 million (24.2 percent).*

*Various poverty alleviation programmes have decreased the number of poor people during 1998-2004. In 2004, the number of poor people in Indonesia were still 36.2 million (16.7 percent). Income Inequality, although in low level, still occurs in Indonesia. In 2004, the Gini index were 0.3, dropped from 0.4 in 1976.*

Pada saat ini, upaya penanggulangan kemiskinan kembali menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tekad pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara cepat hingga tahun 2009 mendatang. Upaya tersebut berkaitan pula dengan agenda pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015. Salah satu sasaran MDGs adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan dunia.

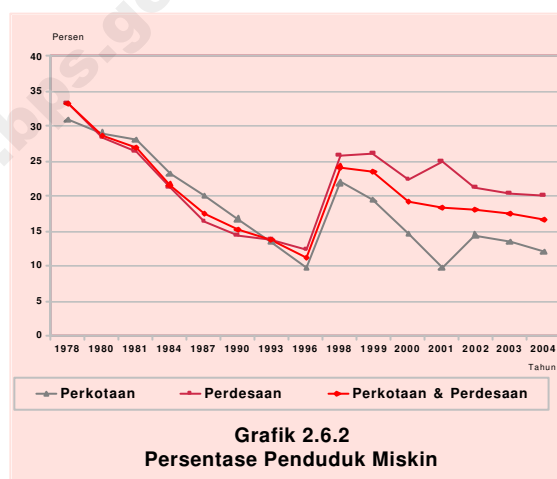
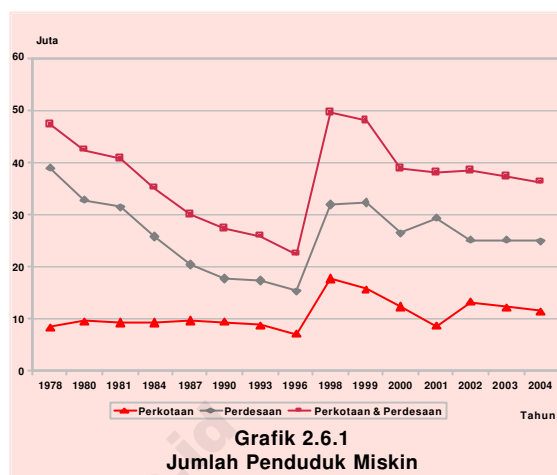
### 2.6.1 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun secara cepat selama periode 1970-1996. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 70 juta orang pada tahun 1970 (sekitar 60 persen dari seluruh penduduk). Jumlah penduduk miskin tersebut menurun hingga mencapai 22,5 juta orang pada tahun 1996, atau sekitar 11,34 persen dari seluruh penduduk.

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Krisis ekonomi meningkatkan kembali jumlah penduduk miskin Indonesia secara drastis.

Pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta orang, atau sekitar 24,2 persen dari seluruh penduduk. Dampak krisis ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin masih terasa hingga saat ini. Meskipun mengalami penurunan selama

periode 1998 -2004, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 36,2 juta orang, atau sekitar 16,7 persen dari seluruh penduduk.



Tabel 2.6.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan dan Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan dan Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1970	ts	ts	70,0	-	-	60,00
1976	10,0	44,2	54,2	38,79	40,37	40,08
1978	8,3	38,9	47,2	30,84	33,38	33,31
1980	9,5	32,8	42,3	29,04	28,42	28,56
1981	9,3	31,3	40,6	28,06	26,49	26,85
1984	9,3	25,7	35,0	23,14	21,18	21,64
1987	9,7	20,3	30,0	20,14	16,44	17,42
1990	9,4	17,8	27,2	16,75	14,33	15,08
1993	8,7	17,2	25,9	13,45	13,79	13,67
1996	7,2	15,3	22,5	9,71	12,30	11,34
1998	17,6	31,9	49,5	21,92	25,72	24,23
1999	15,6	32,3	47,9	19,41	26,03	23,43
2000	12,3	26,4	38,7	14,60	22,38	19,14
2001	8,6	29,3	37,9	9,76	24,84	18,41
2002	13,3	25,1	38,4	14,46	21,10	18,20
2003	12,2	25,1	37,3	13,57	20,23	17,42
2004	11,4	24,8	36,2	12,13	20,11	16,66

### 2.6.2 Distribusi Pendapatan

Untuk mengukur pemerataan pendapatan, Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

- Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah.
- Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah.
- Kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Ketidakmerataan sebaran pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk

**Tabel 2.6.2**  
**Persentase Perkembangan Distribusi Pendapatan**

Tahun	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan dan Perdesaan		
	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1976	19,6	37,5	43,0	21,2	38,8	40,0	19,6	38,0	42,5
1978	17,4	36,4	46,2	19,9	38,2	41,9	18,1	36,5	45,3
1980	18,7	37,8	43,5	21,2	39,0	39,8	19,6	38,2	42,3
1981	20,8	37,2	42,0	22,8	39,4	37,8	20,4	37,5	42,1
1984	20,6	38,3	41,1	22,4	38,8	37,8	20,8	37,3	42,0
1987	21,5	38,0	40,5	24,3	39,3	36,5	20,9	37,5	41,7
1990	19,7	37,7	42,7	24,4	39,2	36,4	21,3	36,8	41,9
1993	20,5	37,3	42,3	25,1	38,4	36,5	20,3	36,9	42,8
1996	19,0	36,9	44,0	23,2	39,0	37,8	20,3	35,1	44,7
1998	20,6	36,8	42,5	24,4	39,4	36,2	21,5	36,9	41,5
1999	20,5	37,7	41,7	24,6	39,5	35,9	21,5	37,4	41,2
2002	20,3	38,3	41,4	25,8	38,0	36,2	20,9	36,9	42,2
2003	20,2	39,0	40,7	25,6	39,4	35,1	20,6	37,1	42,3
2004	21,2	38,8	40,0	24,7	40,0	35,3	20,8	37,1	42,1

Catatan : <sup>1)</sup> dihitung berdasarkan data pengeluaran

berpendapatan rendah. Kriteria yang digunakan adalah:

- Kurang dari 12 persen, disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan “tinggi”.
- Antara 12 hingga 17 persen, disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan “sedang”.
- Lebih dari 17 persen, disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan “rendah”.

Penghitungan distribusi pendapatan dan indeks Gini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting berkaitan dengan kemiskinan. Pada dasarnya, distribusi pendapatan menunjukkan ukuran kemiskinan relatif. Proses pemerataan pendapatan di Indonesia selama periode 1976-2004 dapat dikatakan berhasil dengan baik. Pada tahun 1976, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah (menurut kriteria Bank Dunia) telah memperoleh 19,6 persen dari pendapatan. Pada tahun 2004, kelompok tersebut dapat menikmati 20,8 persen dari pendapatan.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, keadaan distribusi pendapatan selama periode dimaksud termasuk dalam tingkat ketidakmerataan “rendah”. Keadaan seperti itu

terlihat pula pada distribusi pendapatan di daerah perkotaan dan perdesaan. Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, tampaknya tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia

Keadaan yang sama ditunjukkan oleh perkembangan indeks Gini. Pada tahun 1976, indeks Gini di Indonesia sebesar 0,34. Sedangkan pada tahun 2004, indeks tersebut mencapai 0,32. Indeks tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di Indonesia, tetapi dalam kategori yang masih rendah. Selama periode tersebut, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang termasuk kategori rendah terjadi pula di daerah perkotaan dan perdesaan. Meskipun demikian, terlihat bahwa distribusi pendapatan di daerah perdesaan lebih baik dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, tampaknya tidak berdampak buruk terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Indeks Gini justru menurun dari 0,35 pada tahun 1996 menjadi 0,32 pada tahun 1998. Penurunan indeks Gini pada periode tersebut terjadi pula di daerah perkotaan dan perdesaan. Selama periode 1998-2004 terlihat bahwa indeks Gini,



baik daerah perkotaan, perdesaan, maupun secara keseluruhan, menunjukkan perkembangan yang relatif stabil.

1)

**Tabel 2.6.3**  
**Persentase Perkembangan Indeks Gini**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1976	0,35	0,31	0,34
1978	0,38	0,34	0,38
1980	0,36	0,31	0,34
1981	0,33	0,29	0,33
1984	0,32	0,28	0,33
1987	0,32	0,26	0,32
1990	0,34	0,25	0,32
1993	0,33	0,26	0,34
1996	0,36	0,27	0,35
1998	0,33	0,26	0,32
1999	0,33	0,24	0,31
2002	0,33	0,25	0,32
2003	0,32	0,24	0,32
2004	0,31	0,25	0,32

Catatan : <sup>1)</sup> Dihitung berdasarkan data pengeluaran







# PERUMAHAN



---

## 2.7 PERUMAHAN

### RINGKASAN

Capaian dalam 60 tahun Indonesia merdeka di sektor perumahan dan lingkungan diantaranya adalah; Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN meningkat dari 6,1 persen tahun 1971 menjadi 86,6 persen pada tahun 2004, persentase rumah tangga yang menggunakan air leding hanya meningkat dari 6,3 persen pada tahun 1971 menjadi 18,0 persen pada tahun 2004, dan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik meningkat dari 7,8 persen tahun 1971 menjadi 36,4 persen tahun 2004, dan persentase rumah tangga yang telah menempati rumah berlantai bukan tanah, meningkat dari 43,2 persen tahun 1971 menjadi 84,9 persen pada tahun 2004.

### SUMMARY

*The achievements in housing and environment sectors, after the 60 years of independence are as follows; The percentage of households who used state electricity (PLN) as source of lighting increased from 6.1 percent in 1971 to 86.6 percent in 2004, the percentage of households who used safe pipe water increased slightly from 6.3 percent in 1971 to 18.0 percent in 2004, the percentage of households who used closet with septic tank increased from 7.8 percent in 1971 to 36.4 percent in 2004, and the percentage of households who lived in house with unearh floor area increased from 43.2 percent in 1971 to 84.9 percent in 2004.*

Perumahan merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping pangan dan sandang. Di dalam rumahlah manusia berlindung dari panas, hujan, dan ancaman keamanan serta mengenal lingkungannya. Oleh karena itu, rumah bukan hanya sekedar sarana pelengkap kehidupan, tetapi lebih sebagai tempat proses bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Kondisi dan fasilitas rumah tempat tinggal dalam banyak hal mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin baik kondisi dan fasilitas rumah yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Indikatornya antara lain adalah pemakaian listrik sebagai sumber penerangan, air leding sebagai sumber air minum, jamban sendiri dengan tangki septik, dan lantai bukan tanah.

Listrik merupakan indikator perumahan yang penting terutama sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Penyediaan listrik mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama sejak adanya program listrik masuk desa. Pada tahun 1971 baru 6,1 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN, pada tahun 2004 jumlahnya telah mencapai 86,6 persen.

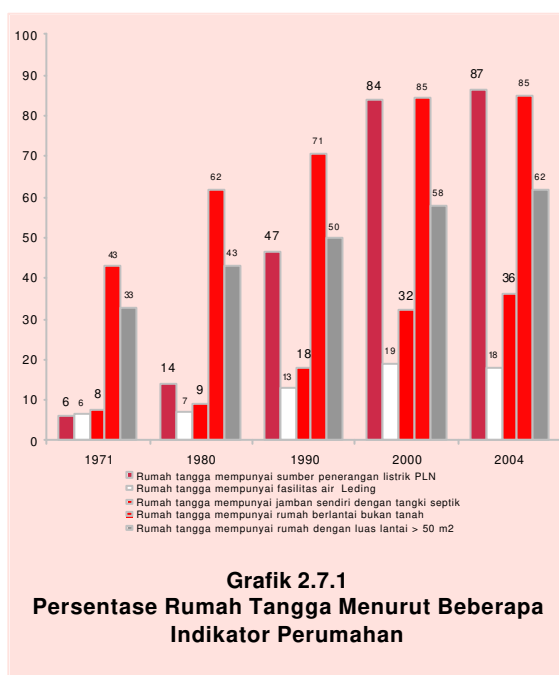
Ketersediaan sumber air bersih merupakan salah satu syarat penting rumah sehat. Air leding sebagai salah satu indikator sumber air bersih, penggunaannya mengalami perkembangan relatif lambat, yaitu dari 6,3 persen pada tahun 1971 menjadi 18,0 persen pada tahun 2004. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun fasilitas air minum leding hanya bertambah sekitar 11,7 persen.

Fasilitas jamban dan jenis lantai rumah juga merupakan indikator kesejahteraan rakyat. Jamban yang baik dari segi kesehatan adalah jamban yang menggunakan tangki septik. Di Indonesia rumah tangga yang mempunyai dan menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu dari 7,8 persen pada tahun 1971 menjadi 36,4 persen pada tahun 2004.

Ditinjau dari sisi kesehatan, rumah berlantai bukan tanah merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tahun 2004, di Indonesia sekitar 85 persen rumah tangga telah menempati rumah berlantai bukan tanah, yang berarti terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1971 (43,2 %). Selain itu, tempat tinggal yang sehat juga ditentukan oleh luas lantai yang sesuai dengan jumlah penghuninya. Persentase rumah tangga yang mempunyai luas lantai lebih dari 50 m<sup>2</sup> mengalami peningkatan selama kurun waktu 1971-2004, yaitu dari 32,7 persen pada tahun 1971

**Tabel 2.7.1**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan**

Indikator	1971	1980	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah tangga mempunyai sumber penerangan listrik PLN	6,1	14,2	46,8	84,0	86,6
Rumah tangga mempunyai fasilitas air minum leding	6,3	7,0	12,9	19,2	18,0
Rumah tangga mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik	7,8 <sup>a)</sup>	8,9	17,9	32,1	36,4
Rumah tangga mempunyai rumah berlantai bukan tanah	43,2	61,9 <sup>a)</sup>	70,8 <sup>a)</sup>	84,5	84,9



menjadi 61,9 persen pada tahun 2004. Dengan demikian semakin sedikit rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 m<sup>2</sup>.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak dan dinding permanen. Pada tahun 1993 rumah tangga di Indonesia yang tinggal dirumah dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) sebanyak 90,1 persen, pada tahun 2003 persentase ini meningkat menjadi 95,0 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan dinding permanen pada tahun 2003 sebanyak 85,8 persen yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan keadaan tahun 1993 sebesar 72,3 persen.

Tabel 2.7.2  
Persentase Rumah Tangga menurut beberapa Indikator Perumahan lainnya

Tahun	Indikator perumahan	
	Atap layak	Dinding permanen
(1)	(2)	(3)
1993	90,1	72,3
1996	91,5	79,0
1997	92,7	81,1
1998	93,3	81,9
1999	93,8	82,7
2000	94,7	84,1
2001	94,4	83,1
2002	95,3	84,3
2003	95,0	85,8









STATISTIK  
60 Tahun **INDONESIA**  
MERDEKA





## LINGKUNGAN HIDUP



## 2.8 LINGKUNGAN HIDUP

### RINGKASAN

Selama 60 tahun Indonesia Merdeka, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan pesat yang berarti pula terjadinya kenaikan jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah rumah tangga berdampak pada kebutuhan lahan untuk tempat tinggal termasuk fasilitasnya. Kenaikan jumlah penduduk juga berdampak negatif pada pencemaran udara, karena peningkatan jumlah penduduk ini diiringi pula dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang merupakan ancaman bagi tingkat polusi udara. Selain itu peningkatan jumlah penduduk ini juga memicu meningkatnya tingkat kriminalitas.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (1993–2003) luas lahan yang sementara tidak diusahakan berkurang, sementara konversi lahan produktif menjadi lahan terbangun terus membesar. Bila pada tahun 1993 luas lahan yang sementara tidak diusahakan sebesar 66.978.973,1 ha, maka pada tahun 2003 menjadi 26.339.753,1 ha. Pada tahun 2003, perubahan penggunaan lahan sawah, menjadi bukan lahan pertanian, peruntukan terbesar adalah untuk perumahan, yang sebesar 161.798,3 ha. Pada tahun yang sama luas lahan sawah yang berubah penggunaannya menjadi lahan bukan sawah sebesar 676.013,4 ha, sementara pembentukan sawah baru hanya sebesar 49.066,3 ha. Dari total luas perubahan hutan yang sebesar 1.297.070,3 ha, peruntukan terbesar adalah untuk lahan pertanian bukan sawah, yang sebesar 720.350,8 ha. (Statistik Potensi Desa 1993, 2000, dan 2003).

Dari tahun 1992 sampai tahun 2004, persentase rumah tangga yang air minumnya bersumber dari air bersih, meningkat dari 63,0 persen menjadi 78,8 persen. Ini berarti pemanfaatan sumber daya air meningkat, namun di sisi lain stok air menjadi berkurang.

Di antara sumber polusi udara yang ada, penyumbang terbesar polusi udara di perkotaan adalah dari kegiatan transportasi (sumber bergerak) yang sebesar 66,4 persen. Dalam kurun waktu 1973 sampai 2003, sepeda motor adalah penyumbang terbesar polusi udara berupa emisi hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen oksida maupun sulfur oksida. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menjadi ancaman yang sangat serius bagi udara yang bersih.

Dalam kurun waktu 1983 sampai 2003, persentase desa dengan status perkotaan (urban), meningkat dari 6,2 persen menjadi 17,4 persen. Seiring dengan itu persentase desa yang jalan utamanya terbuat dari aspal meningkat cukup pesat, dari 17,1 persen pada tahun 1976 menjadi 52,5 persen pada tahun 2003. Sementara itu, persentase jumlah desa yang mendapat fasilitas listrik dari PLN meningkat pesat dari 12,8 persen pada tahun 1976, menjadi 81,1 persen pada tahun 2003. Ini mengisyaratkan pesatnya pertumbuhan daerah perkotaan memberi dorongan yang kuat terhadap eksploitasi sumber daya mineral dan energi.

Dalam kurun waktu 1976 sampai 2003, perkembangan jumlah tindak pidana (*crime total*) tampak berfluktuasi, yang paling tinggi terjadi pada tahun 1979, yaitu sebesar 234,6 ribu kasus, sementara paling rendah terjadi pada tahun 1997, yaitu sebesar 142,7 ribu kasus. Sejak 1997 pola jumlah tindak pidana menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu yang sama tingkat kejahatan (*crime rate*) juga berfluktuasi, paling tinggi terjadi pada tahun 1979, yaitu sebesar 162 jiwa per 100.000 penduduk, sementara paling rendah terjadi pada tahun 1997, yaitu sebesar 72 jiwa per 100.000 penduduk. Sejak 1997 pola ancaman penduduk terkena tindak pidana juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini terlihat dari menyempitnya selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). Selang waktu kejadian kejahatan juga berfluktuasi di mana waktu terpendek terjadi pada tahun 1979, yaitu setiap 2 menit 14 detik terjadi satu tindak pidana, dan waktu terpanjang dari periode tersebut terjadi pada tahun 1997 di mana kejadian tindak pidana berselang sekitar 3 menit 40 detik.

### SUMMARY

*During sixty years Independence, the number of households increased as the population number risen fastly. The increasing of households number affected, the housing needs including the facilities. Meanwhile, the increasing of population number have negative effect on air pollution. As it triggered the number of vehicles on the streets which was a threat to the air pollution. Furthermore, it also triggered the crime rate.*

*For the last ten years (1993-2003) temporary follow land areas had increased, while conversion of productive land to plough land kept increasing. The temporary follow land areas had decreased from 66,978,973.1 ha in 1993 to 26,339,753.1 ha in 2003. The main conversion of paddy field to nonagriculture land in 2003 was for settlement, which was 161,798.3 ha out of 676,013.4 ha. Meanwhile, the formation of paddy field was only 49,066.3 ha at the same year. Furthermore about 720,350.8 ha of non paddy field was transformed out of 1,297,070.3 ha from forestry area (Village Potential Statistics 1993, 2000 and 2003).*

*During the period of 1992-2004, the percentage of households that used clean water for their drinking habits increased from 63.0 percent to 78.8 percent. It meant the utilization of water resources to supply clean water increased, on the other hand the water stocks decreased.*

*According to a study, transportation was the main contributor of air pollution (66.4 percent). In the period of 1973-2003, motorcycles were the most contributor of air pollution in terms of hydrocarbon, carbon monoxides, nitrogen oxides and sulfur oxides emission.*

*During the period of 1983-2003, the percentage of village defined as urban area increased from 6.2 percent to 17.4 percent. Meanwhile, the percentage of village which its main road was paved, increased from 17.1 percent in 1976 to 52.6 percent in 2003. And the percentage of village having electricity power from 'PLN' also increased significantly from 12.8 percent in 1976 to 81.1 percent in 2003. The growth of urban areas pushed a strong motivation to exploit minerals and energy resources.*

*During the period of 1976-2003, the growth of total crimes fluctuated. The highest crime was in 1979, it reached 234.6 thousand cases. While the lowest crime was in 1997, it was reached 142.7 cases. Since 1997, the pattern of crime numbers showed an increasing trend. At the same period the crime rate fluctuated. The highest rate was in 1979 (162 per 100,000 population) and the lowest rate was in 1997 (72 per 100,000 population). Since 1997, the crime clock pattern also fluctuated with an increasing trend. The largest crime clock was in 1997, occurred every 3 minutes 40 seconds. While the shortest crime clock was in 1979, where a crime occurred every 2 minutes 14 seconds.*

## 2.8.1 Lahan

### a. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Kebutuhan akan pangan, perumahan, pakaian, air, bahan bakar dan semua aktivitas manusia tidak lepas dari lahan. Untuk melihat kondisi sumber daya lahan di Indonesia, Statistik Potensi Desa (Podes), yang dikumpulkan setiap tiga tahun, menyajikan data lahan menurut penggunaannya dalam dua katagori, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Data Podes secara umum memperlihatkan bahwa lahan sawah terus menunjukkan peningkatan. Bila tahun 1993 digunakan sebagai tahun dasar, maka persentase peningkatan luas lahan sawah pada tahun 2000 sebesar 7,9 persen dan terus meningkat menjadi 21,8 persen pada tahun 2003. Peningkatan ini terjadi baik pada lahan sawah yang berpengairan maupun lahan sawah yang tidak berpengairan. (Tabel 2.8.1).

Tidak seperti penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan bukan sawah secara total menunjukkan penurunan. Pada tahun 2000, pesentase luas lahan bukan sawah turun sebesar 0,4 persen dan

terus menunjukkan penurunan hingga sebesar 9,7 persen pada tahun 2003. Namun demikian, bila dilihat lebih teliti, penurunan luas lahan bukan sawah hanya terjadi pada kelompok lainnya (rawa-rawa, kuburan atau lahan tandus) serta lahan yang sementara tidak diusahakan. Sedangkan lahan bukan sawah seperti ladang, perkebunan, hutan rakyat, serta perumahan, tetap menunjukkan peningkatan. Ini berarti pertumbuhan penduduk, yang lambat atau cepat tetap akan membutuhkan lahan, demikian juga dengan peningkatan penggunaan lahan bukan sawah.

### b. Perubahan Penggunaan Lahan

Fenomena perubahan penggunaan lahan sangat erat hubungannya dengan dinamika pertumbuhan penduduk. Luas lahan yang relatif tetap, dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan intervensi kebijakan maupun teknologi untuk dapat memanfaatkan lahan seoptimal mungkin.

Perubahan penggunaan lahan sawah dan lahan hutan menjadi lahan selain sawah dan hutan selama kurun waktu tiga tahun menjelang tahun 2003 untuk

**Tabel 2.8.1**  
**Penggunaan Lahan (Ha) dan Persentase Perubahannya**

Klasifikasi Penggunaan Lahan	1993	2000	2003	Persentase Perubahan	
				1993-2000	1993-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sawah Berpengairan	4 644 903,3	5 067 178,9	6 173 975,5	32,92	9,09
Sawah Tak Berpengairan	3 613 423,4	3 971 958,5	4 167 902,5	15,34	9,92
Sementara Tak Diusahakan	1 934 144,5	1 954 355,0	2 072 232,3	7,14	1,04
<b>Lahan Sawah</b>	<b>10 192 471,3</b>	<b>10 993 492,4</b>	<b>12 414 110,3</b>	<b>21,80</b>	<b>7,86</b>
Ladang/Huma/Tegal/Tambak	16 212 142,8	19 825 252,0	23 947 465,2	47,71	22,29
Perkebunan	13 642 118,0	20 275 288,0	23 000 365,9	68,60	48,62
Hutan Rakyat	15 638 236,7	2 989 942,0	39 807 362,6	154,55	91,19
Perumahan/Pemukiman	5 170 489,3	5 688 572,0	8 874 394,8	71,64	10,02
Bangunan Lainnya	-	979 894	1 547 261,9	-	-
Lainnya	64 422 568,8	73 281 170,6	40 849 765,5	-36,59	13,75
Sementara Tak Diusahakan	66 978 973,1	31 314 389,0	26 339 753,1	-60,67	-53,25
<b>Lahan Bukan Sawah</b>	<b>182 064 528,7</b>	<b>181 263 507,6</b>	<b>164 366 359,0</b>	<b>-9,72</b>	<b>-0,44</b>

Sumber: Statistik Podes 1993, 2000, dan 2003

**Tabel 2.8.2**  
**Luas Perubahan Lahan Sawah (ha)**

Daerah	Perubahan Lahan Sawah, menjadi					Total Luas Lahan Sawah yang Berubah
	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Perumahan	Industri	Perusahaan/Perkantoran	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	28 098,0	25 155,4	7 265,8	4 452,5	3 711,9	68 683,6
Perdesaan	317 425,9	136 642,9	19 873,6	43 619,4	89 768,6	607 329,8
Perkotaan + Perdesaan	345 523,3	161 798,3	27 139,4	48 071,9	93 480,5	676 013,4

Sumber: Statistik PODES 2003

daerah perkotaan dan perdesaan, disajikan pada Tabel 2.8.2 dan Tabel 2.8.3

Di Indonesia, dari total luas perubahan lahan sawah dalam tiga tahun terakhir menjelang tahun 2003, perubahan lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah adalah yang terbesar (345.523,3 ha). Selanjutnya diikuti perubahan lahan sawah menjadi perumahan (161.798,3 ha), dan dari lahan sawah menjadi lahan lainnya (93.480,5 ha). Perubahan lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah tetap menunjukkan angka terbesar baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Ada perbedaan perubahan yang cukup signifikan bila dibandingkan besarnya perubahan penggunaan lahan sawah antara daerah perkotaan dan perdesaan. Secara keseluruhan hal ini disebabkan daerah dengan status perdesaan memang jauh lebih banyak dari pada daerah dengan status perkotaan, dan sawah pada umumnya berada di daerah perdesaan. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, perubahan dari lahan sawah

menjadi perumahan menempati urutan kedua terbesar (Tabel 2.8.2). Kondisi ini mencerminkan kebutuhan perumahan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk.

Perubahan penggunaan lahan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi lahan, di antaranya kondisi fisik lahan. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan dalam hal kapasitas produksi, kualitas lingkungan, dan tingkat kelestarian dari sumber daya lahan nasional. Perubahan hutan, misalnya, dapat menyebabkan berkurangnya luas resapan air, erosi, terganggunya kelestarian habitat baik flora maupun fauna, serta ancaman banjir dan tanah longsor. Serangkaian kegiatan seperti pembabatan, pembakaran hutan, atau yang sedang marak sekarang ini seperti *illegal logging* merupakan aktivitas manusia yang mendorong terjadinya perubahan kawasan hutan. Hutan yang dimaksudkan di sini mencakup hutan secara keseluruhan, termasuk hutan kota.

**Tabel 2.8.3**  
**Luas Perubahan Hutan (Ha)**

Daerah	Perubahan Hutan, menjadi						Total Luas Lahan Hutan yang Berubah
	Sawah	Perumahan	Industri	Perusahaan/Perkantoran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	1 765,3	5 784,5	1 612,1	3 099,1	10 904,3	1 590,3	24 755,6
Perdesaan	47 301,0	34 933,3	207 001,4	56 622,0	709 446,5	217 010,5	1 272 314,7
Perkotaan + Perdesaan	49 066,3	40 717,8	208 613,5	59 721,1	720 350,8	218 600,8	1 297 070,3

Sumber: Statistik PODES 2003



Selama tiga tahun terakhir menjelang tahun 2003, perubahan penggunaan hutan terbesar di Indonesia adalah dari hutan menjadi lahan pertanian bukan sawah (720.350,8 ha). Berikutnya adalah perubahan hutan menjadi lahan lainnya, seperti rawa-rawa, jalan, serta lahan kritis (218.600,8 ha). Dan terakhir adalah perubahan hutan menjadi lahan industri (208.613,5 ha) (Tabel 2.8.3). Perlu menjadi catatan tersendiri di sini, bahwa urutan terbesar kedua adalah perubahan dari hutan menjadi “Lainnya”, yang di antaranya adalah berubah menjadi lahan kritis. Apabila ternyata porsi lahan kritis ini besar, kondisi ini merupakan indikasi terjadinya kerusakan pada lingkungan alam, yang akibatnya sudah mulai dirasakan yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi di tanah air.

Tabel 2.8.2 memperlihatkan total luas sawah yang berubah penggunaannya adalah sebesar 676.013,4 ha. Sedangkan dari Tabel 2.8.3 dapat dilihat bahwa pembentukan sawah baru hanya seluas 49.066,3 ha. Ini berarti selama kurun waktu tiga tahun menjelang tahun 2003 telah terjadi pengurangan lahan sawah seluas 626.947,1 ha. Apakah kondisi ini yang di antaranya telah memaksa pemerintah untuk melakukan impor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan beras dalam negeri? Untuk itu perlu pengamatan lebih seksama.

### 2.8.2 Air

Air merupakan sumberdaya vital bagi kehidupan manusia, karena duapertiga dari bumi ini terdiri dari air, demikian juga dengan tubuh manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Oleh karena itu ketersediaan air bagi kehidupan di suatu wilayah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Di dalam rumah, air tidak hanya bermanfaat untuk memasak dan minum, tetapi juga untuk mandi dan mencuci. Sedangkan di luar rumah, air merupakan prasarana alam yang bermanfaat untuk berbagai hal dalam kehidupan seperti transportasi, pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah, perikanan, industri, rekreasi dan fasilitas leding.

#### a. Ketersediaan dan Pemakaian Air

Masyarakat seringkali beranggapan bahwa persediaan air dalam keadaan tak terhingga, karena air dapat terus menerus terbentuk melalui tahap daur hidrologi, walaupun sebenarnya hanya sebagian kecil saja air yang dapat digunakan setiap saat. Anggapan salah ini berakibat pada perilaku mereka di dalam menggunakan air seenaknya saja yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan air yang tidak memikirkan daya dukung dan konservasi air akan mengakibatkan makin menurunnya kualitas dan kuantitas air.

Air yang berada di wilayah Indonesia sebenarnya ada sekitar 6 persen dari total air yang ada di dunia. Walaupun air yang ada cukup banyak namun pada musim kemarau sering terjadi kekeringan, hal ini disebabkan pertambahan penduduk yang semakin banyak dan juga disebabkan oleh pengelolaan ataupun pemakaian air yang kurang bijaksana.

Secara umum ketersediaan air di Indonesia sekitar 690,3 milyar m<sup>3</sup>, sedangkan ketersediaan air pada musim kemarau sekitar 483,1 milyar m<sup>3</sup>. Kebutuhan pada tahun 2003 diperkirakan hanya 66,4 milyar m<sup>3</sup>, dan pada tahun 2020 sekitar 75,6 milyar m<sup>3</sup>. Apabila dirinci menurut pulau ternyata pulau Jawa dan Bali sudah mengalami defisit atau kekurangan air. Ketersediaan air di Pulau Jawa dan Bali hanya sekitar 25,3 milyar m<sup>3</sup> sedangkan kebutuhan air pada tahun 2003 sudah mencapai 38,4 milyar m<sup>3</sup>, defisit air ini diperkirakan sudah terjadi sejak tahun 1995. Kekurangan air ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang meningkat, berkembangnya lahan pertanian khususnya sawah, meluasnya lahan industri dan sebagainya, yang banyak terjadi di Pulau Jawa.

Di lain pihak luas hutan, yang berguna menahan air, di Pulau Jawa semakin tahun semakin menurun dan diperkirakan tinggal 15 persen dari luas pulau.

Air tersebut kebanyakan dipergunakan untuk kebutuhan domestik dan industri. Kebutuhan untuk pertanian pada tahun 2000 hanya sebesar 91,5 juta m<sup>3</sup>

dan diperkirakan pada tahun 2015 mencapai 117 juta m<sup>3</sup>, sedangkan kebutuhan untuk industri pada tahun 1998 sekitar 6,5 milyar m<sup>3</sup>.

#### b. Air Bersih

Penggunaan air di rumahtangga, terutama untuk air minum, harus diperhatikan kebersihannya. Apabila air yang diminum tidak bersih, akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang dimaksud air bersih di sini adalah air yang berasal dari air kemasan, leding, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung.

Air permukaan seperti air sungai, danau, waduk, dan bendungan mudah tercemar dari sisa pembuangan limbah baik dari industri, pertanian maupun rumah tangga. Air tanah pun bisa tercemar apabila sumber airnya tidak memenuhi syarat kesehatan seperti sumur yang dekat dengan pembuangan sampah/kotoran. Pada tahun 1992 persentase rumah tangga yang air minumnya berasal dari sumur dan jarak sumur ke tempat penampungan tinja kurang dari 10 m ada sekitar 43,3 persen dan pada tahun 2004 menurun menjadi 28,9 persen.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, pada tahun 1992 ada sekitar 63,0 persen rumah tangga yang sumber air minumnya

diperkirakan bersumber dari air bersih. Dari hasil Susenas tersebut penggunaan air bersih setiap tahunnya selalu bertambah, dan pada tahun 2004 sudah mencapai 78,8 persen.

Kebutuhan air masyarakat biasanya dipenuhi dengan berbagai cara, baik mengolah atau mengambil sendiri dari alam maupun membeli dari perusahaan/penyedia air. Salah satu perusahaan penyedia air adalah Perusahaan Air Minum (PAM)/ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pada tahun 1982, PAM menyalurkan air sebanyak 412 juta m<sup>3</sup>, sedangkan yang disalurkan ke pelanggan nonniaga (yaitu rumah tangga dan instansi) sekitar 68,3 persen dan pada tahun 2001 sudah mencapai 1.835 juta m<sup>3</sup> atau sekitar 75,8 persen. Menurut Susenas jumlah penduduk pada tahun 1982 baru mencapai 154,6 juta, dan pada tahun 2001 sudah mencapai 201,7 juta. Sehingga diperkirakan bahwa penggunaan air khususnya leding pada tahun 1982 mencapai sekitar 2,7 m<sup>3</sup> per tahun dan pada tahun 2001 mencapai 9,1 m<sup>3</sup> per tahun.

Meningkatnya pemakaian air leding ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin hari semakin sadar bahwa air yang diminum adalah air yang harus bebas dari kotoran dan kuman dan di sisi lain pemerintah

**Tabel 2.8.4**  
**Neraca Air Musim Kemarau Menurut Pulau, 2003**

Pulau	Ketersediaan (milyar m <sup>3</sup> )	Kebutuhan (milyar m <sup>3</sup> )	
		2003	Proyeksi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	96,2	11,6	13,3
Jawa & Bali	25,3	38,4	44,1
Kalimantan	167,0	2,9	3,5
Nusa Tenggara	4,2	4,3	4,7
Sulawesi	14,4	9,0	9,7
Maluku	12,4	0,1	0,1
Papua	163,6	0,1	0,2
<b>Indonesia</b>	<b>483,1</b>	<b>66,4</b>	<b>75,6</b>

Sumber: KLH 2003, Status Lingkungan Hidup Indonesia 2003



**Grafik 2.8.1**  
**Persentase Rumah Tangga yang**  
**Air Minumnya dari Air Bersih**

daerah dituntut untuk menyediakan sarana tersebut.

### 2.8.3 Udara

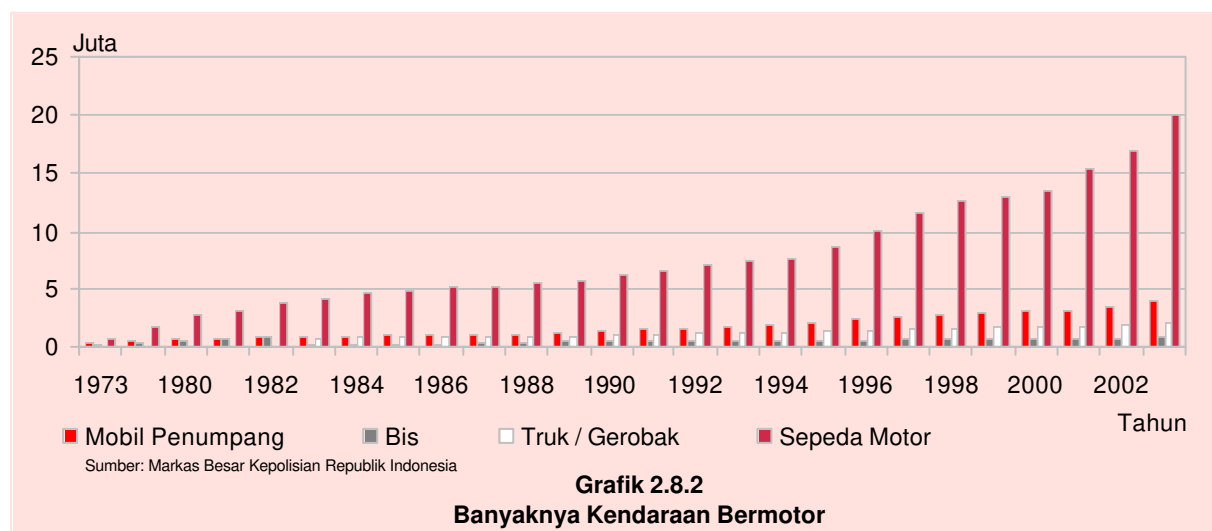
#### a. Perkembangan Polusi Udara

Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara sehingga berakibat pada kesehatan manusia yang menghirupnya. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pencemaran udara adalah semakin meningkatnya populasi penduduk di suatu tempat, terutama di kota-kota besar. Kegiatan penduduk dalam bertransportasi, industri, pembukaan lahan dengan pembakaran, dan pembakaran sampah menjadi sumber pencemaran udara, dan transportasi merupakan sumber utama dari polusi tersebut.

Pada umumnya, keterpurukan kualitas udara yang disebabkan oleh aktivitas transportasi ini diakibatkan oleh kurang/tidak terawatnya kendaraan yang beroperasi di jalan, dalam pengertian bahwa emisi gas buang yang dikeluarkannya melebihi batas ambang emisi yang ditoleransi, serta adanya kemacetan di titik-titik tertentu yang menghasilkan konsentrasi *pollutant materials* di titik-titik tersebut menjadi tinggi dan membuat udara sekitarnya terpolusi. Udara yang terkontaminasi akan menyebabkan orang menderita kerusakan paru-paru dan penyakit pernafasan lainnya. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selama kurun waktu 1973-2003 terus bertambah, yaitu dari 1.194.334

pada tahun 1973 menjadi 26.706.705 pada tahun 2003. Perkembangan yang paling pesat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor tersebut didominasi oleh sepeda motor (Lihat Grafik.2.8.2). Keadaan ini semakin memperburuk kualitas udara di kota-kota besar, khususnya Jakarta yang paling banyak menelan polusi udara. Apalagi bila kebanyakan dari kendaraan yang beroperasi tersebut tidak berada dalam kondisi yang baik atau layak jalan. Selain itu juga sebagian besar bahan bakar yang digunakan masih mengandung timbal (Pb). Para pengendara kebanyakan enggan membeli bensin tanpa timbal, karena harganya jauh lebih mahal. Sementara itu, kendaraan dengan berbahan bakar gas jumlahnya sangat sedikit dan di layani oleh unit pengisian bahan bakar yang juga tidak banyak.

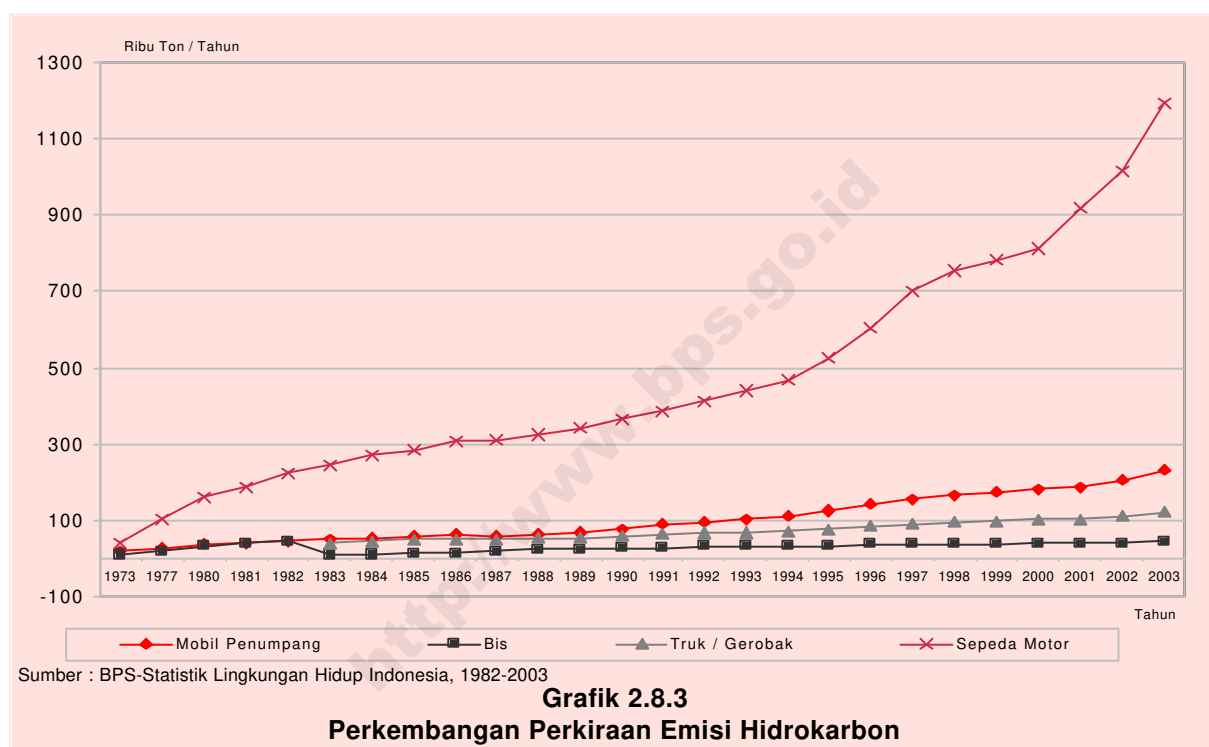
Bank Dunia memperkirakan 70 persen pencemaran udara di kota-kota besar berasal dari penguapan bahan bakar dan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Emisi atau bahan pencemaran yang dikeluarkan menyebabkan gangguan kesehatan bahkan merusak organ tubuh. Ada enam kelompok polutan udara yang paling penting, yaitu sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO<sub>2</sub>), hidrokarbon (HC), partikulat, dan oksidan fotokimia. Namun karena keterbatasan data, tulisan ini hanya menerangkan empat kelompok polutan udara saja, yaitu sulfur oksida (SO<sub>x</sub>), hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).





Dampak negatif yang didapatkan adalah tingginya tingkat polusi udara lingkungan kita, sebagai hasil emisi gas buang kendaraan bermotor. Dilihat dari sumbernya, pencemaran udara terbesar memang berasal dari asap pembuangan kendaraan bermotor. Hasil dari berbagai observasi menyebutkan, kontribusi pencemaran udara dari transportasi mencapai 66,4 persen dari total pencemaran, sementara kegiatan industri menyumbang 18,9 persen, permukiman 11,1persen dan kegiatan persampahan 3,7 persen<sup>1</sup>.

Dari keempat jenis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, bis, truk dan sepeda motor, emisi HC dari sepeda motor menempati urutan tertinggi yaitu di tahun 1973 adalah sebesar 42.760,0 ton/tahun dan 1.195.785,9 ton/tahun di tahun 2003. Emisi dari sepeda motor tersebut menyumbang lebih dari 50 persen dari total emisi setiap tahunnya. Di tahun tahun 1973 emisi hidrokarbon yang berasal dari sepeda motor sebesar 59,8 persen, sedangkan di tahun 2003 meningkat pesat menjadi 74,8 persen.



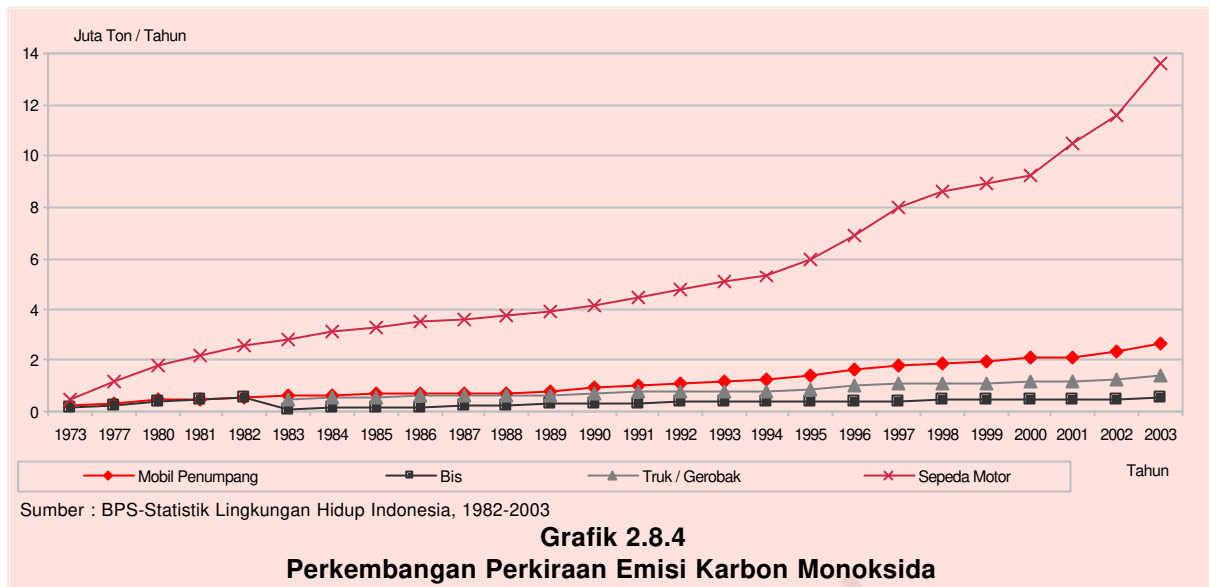
#### b. Hidrokarbon

Hidrokarbon (HC) adalah bahan pencemar berasal dari emisi kendaraan bermotor. Bahan pencemar HC dalam jumlah kecil dapat menimbulkan gangguan berpikir, gerakan otot dan gangguan jantung. Menurut data SLHI tahun 1973-2003 (Grafik 2.8.3) besarnya emisi HC setiap tahun meningkat, dari 71.492,8 ton/tahun di tahun 1973 menjadi 1.598.663,4 ton/tahun di tahun 2003.

<sup>1</sup> Teguh Kurniawan, Peneliti Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS). 'Manajemen Transportasi dan Kualitas Udara'. Jakarta, Juni 2003.

#### c. Karbon Monoksida

Karbon monoksida (CO) merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor. Penyebarannya di udara lebih terpusat pada daerah sumber timbulnya pencemaran tersebut. Oleh karena itu, CO merupakan masalah di kota-kota besar, di mana ruangan udara dibatasi oleh jalan-jalan dan gedung-gedung. Bahan pencemar CO pada manusia akan menimbulkan efek sistemik karena meracuni tubuh dengan cara mengikat haemoglobin yang sangat vital untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Bila otak



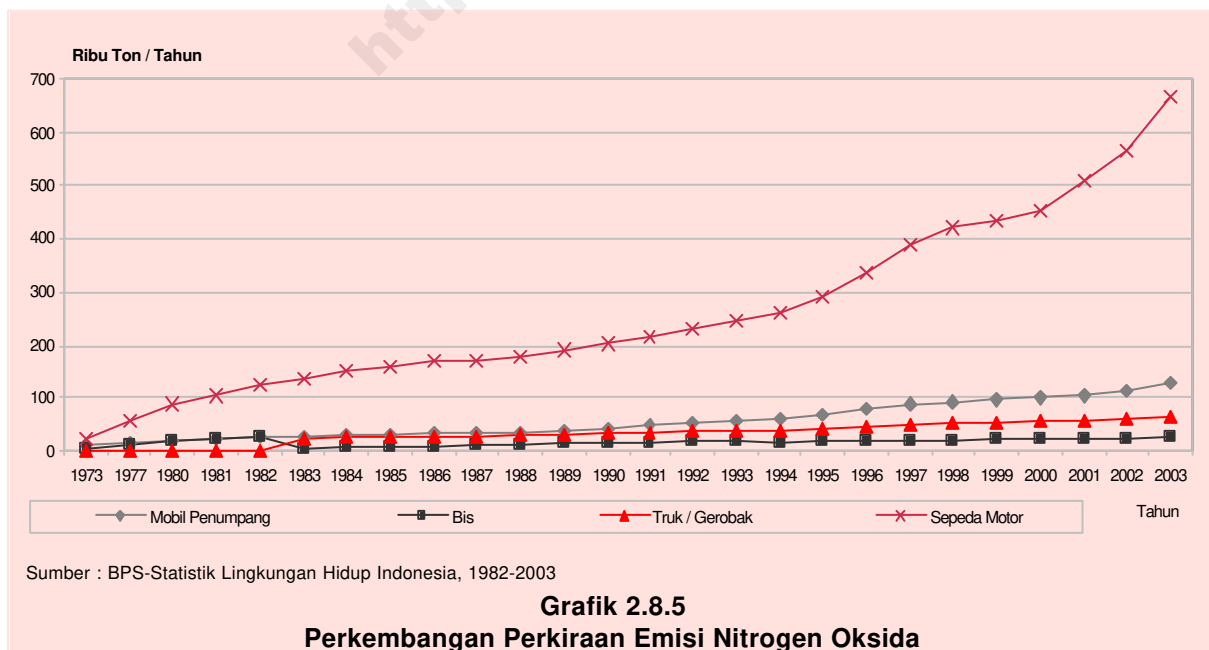
kekurangan oksigen dapat menimbulkan kematian.

Perkiraan besarnya emisi CO yang berasal dari kendaraan bermotor tahun 1973-2003 selalu mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor setiap tahunnya, yaitu dari 816.064,5 pada tahun 1973 menjadi 18.248.157,4 pada tahun 2003. Perkembangan paling pesat didominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 60 persen di tahun 1973 dan 75 persen di tahun

2003 dari keseluruhan perkiraan emisi kendaraan bermotor per tahun.

#### d. Nitrogen Oksida

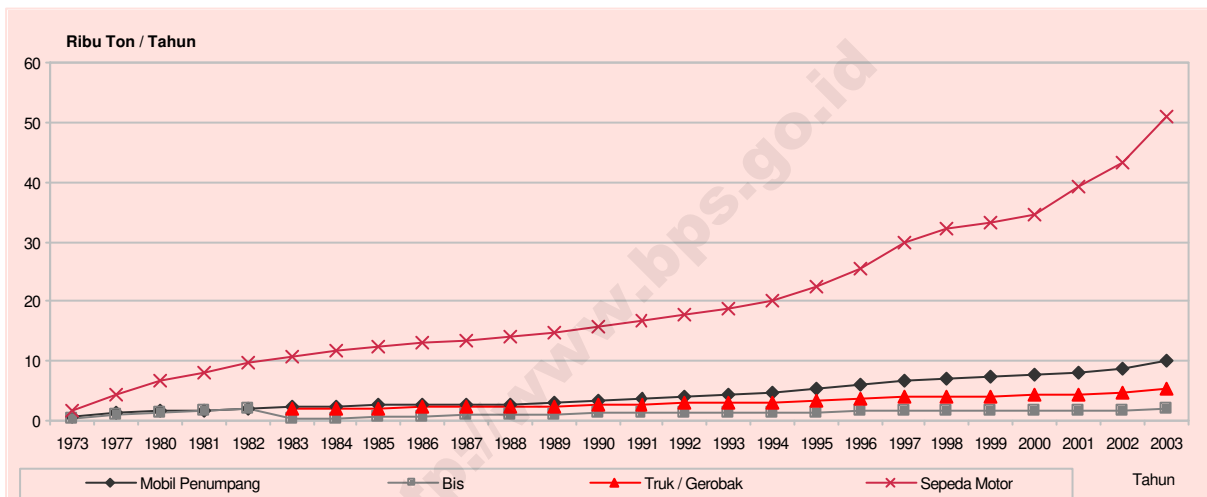
Pencemar nitrogen oksida ( $\text{NO}_x$ ) bisa berasal dari kendaraan bermotor atau industri. Sektor transportasi di perkotaan merupakan penyumbang terbesar pencemar  $\text{NO}_x$  yaitu 69 persen dan diikuti oleh industri dan rumah tangga. Bahan pencemar ini menyebabkan iritasi saluran pernafasan, bronkitis, dan juga dapat



memicu serangan asma. Pada Grafik 2.8.5 dapat dilihat besarnya perkiraan emisi  $\text{NO}_x$  dari kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu 1973-2003, yaitu dari 39.669,8 ton/tahun di tahun 1973 meningkat menjadi 887.063,2 ton di tahun 2003. Dari keempat jenis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, bis, truk dan sepeda motor, emisi  $\text{NO}_x$  dari sepeda motor masih menempati urutan tertinggi yaitu di tahun 1973 adalah sebesar 23.726,6 ton/tahun atau 59,8 persen dan 564.726,1 ton/tahun atau 74,8 persen di tahun 2003, sedangkan sisanya didominasi oleh mobil, truk, dan bis.

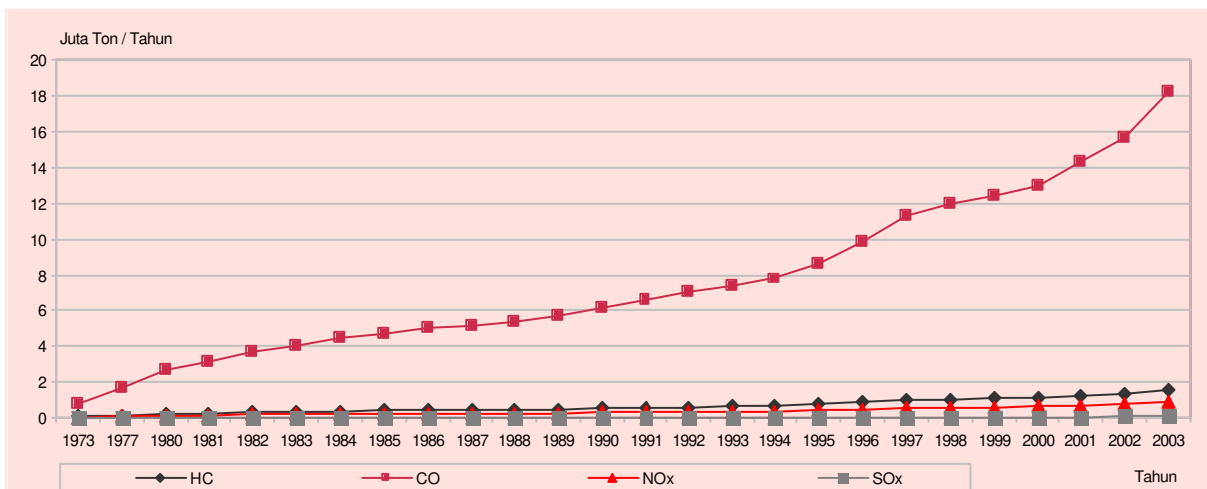
**e. Sulfur Oksida (SO<sub>x</sub>)**

Sulfur oksida (SO<sub>x</sub>) adalah gas yang tidak berwarna, memedihkan mata (*irritating*), mudah larut dalam air dan reaktif. Gas ini dibentuk pada saat bahan bakar yang mengandung sulfur (minyak, batu bara) dibakar terutama dari kegiatan industri. SO<sub>x</sub> dapat mematikan dan menghambat pertumbuhan pepohonan, hasil produksi pertanian dapat merosot, hutan-hutan menjadi kurang produktif sehingga akan mengurangi peranan hutan sebagai tempat rekreasi dan keindahan. Pada manusia dapat menimbulkan efek iritasi pada saluran nafas sehingga menimbulkan gejala batuk dan



Sumber : BPS-Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 1982-2003

**Grafik 2.8.6**  
**Perkembangan Perkiraan Emisi Sulfur Oksida**



Sumber : BPS-Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 1982-2003

**Grafik 2.8.7**  
**Perkembangan Perkiraan Emisi HC, CO, NO<sub>x</sub>, dan SO<sub>x</sub>**



sesak nafas. Perkiraan besarnya emisi SO<sub>x</sub> yang berasal dari kendaraan bermotor menurut data SLHI 1973-2003 juga mengalami kenaikan, sama halnya dengan emisi NO<sub>x</sub>, HC, dan CO. Pada Grafik 2.8.6 dapat dilihat bahwa perkiraan emisi SO<sub>x</sub> dari kendaraan bermotor pada tahun 1973 sebesar 3.051,5 ton/tahun, dan sepeda motor juga masih sebagai penyumbang terbesar untuk emisi ini, yaitu sekitar 59,0 persen, diikuti mobil penumpang sebesar 25,7 persen dan sisanya truk dan bis. Pada tahun 2003 emisi ini meningkat menjadi 68.235,6 ton/tahun, di mana urutan terbesar penyumbang emisi ini dari kendaraan bermotor yang pertama adalah sepeda motor (74,8 persen), kedua mobil penumpang (14,6 persen), serta sisanya truk (7,7 persen) dan bis (3,0 persen).

Perkembangan emisi HC, CO, NO<sub>x</sub>, dan SO<sub>x</sub> di Indonesia dari tahun 1973-2003 selalu mengalami peningkatan, emisi CO, NO<sub>x</sub>, dan SO<sub>x</sub> mengalami peningkatan yang hampir sama, sedangkan emisi HC yang dihasilkan dari kendaraan bermotor masih jauh di bawah emisi yang lainnya (lihat Grafik 2.8.7).

#### 2.8.4 Kawasan Konservasi Darat dan Laut

Ungkapan *no forest means no future* sangatlah relevan untuk digaungkan sepanjang masa, terlebih lagi negara Indonesia merupakan kawasan berhutan basah tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sekaligus merupakan paru-paru dunia<sup>2</sup>. Hutan tropis Indonesia merupakan 10 persen dari hutan tropis dunia dan 40-50 persen hutan tropis Asia. Di dalamnya terdapat sekitar 4.000 spesies pohon. Hutan tropika Indonesia juga merupakan habitat bagi 500 spesies mamalia (100 di antaranya endemik) dan 1.500 spesies burung (IUCN 1992)<sup>3</sup>. Oleh karena itu konservasi sumberdaya hutan merupakan hal yang sangat penting.

Dengan fungsinya sebagai penyedia bahan baku, sumber plasma nutfah dan sistem penunjang kehidupan

yang tidak tergantikan. Misalnya sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbondioksida melalui proses fotosintesis, penyerap polutan, pemelihara keseimbangan siklus hidrologi dan stabilitas iklim.

Dengan fungsi tersebut tidaklah mengherankan bila negara-negara industri maju berkepentingan terhadap pemeliharaan dan konservasi berbagai jenis hutan, keanekaragaman hayati dan ekosistem dari kepunahan dengan bantuan keuangan dan dukungan pengelolaan untuk membantu negara tuan rumah dalam rangka menjaga keutuhan lokasi warisan dunia tersebut. Karena hutan merupakan *national heritage for the global benefit*, Indonesia yang dianugerahi hutan luas dengan keanekaragaman hayati tinggi memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai sumber plasma nutfah dan sistem penunjang kehidupan, tidak saja bagi rakyat Indonesia tetapi juga bagi kepentingan dunia.

UNESCO sejak 1972 telah menetapkan lokasi *World Heritage* atau perjanjian konservasi yang merupakan hasil dari *World Heritage Convention (WHC)* dan sudah diratifikasi oleh 160 negara termasuk Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penunjukan lokasi WHC yang tersebar di seluruh dunia dilakukan berdasarkan nilai-nilai budaya yang menonjol, keindahan alam yang unik/khas atau kepentingan ekologis dari suatu lokasi. Kawasan konservasi yang telah ditetapkan Indonesia sampai dengan tahun 2003 seluas 25.910.410 ha yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman nasional.

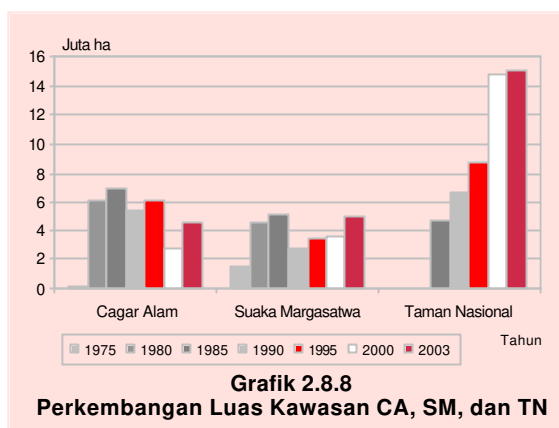
Pembangunan kawasan konservasi di Indonesia dapat dianggap dimulai oleh Dr. Koorders, (1863-1919) pendiri dan ketua pertama dari *Nederlandsh Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda). Walaupun sebelum pendirian perkumpulan itu ada beberapa kegiatan perlindungan alam, tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan kesadaran penuh. Mishra (1994) menyatakan bahwa kawasan konservasi pertama di

<sup>2</sup> Indeks Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Index) tinggi dalam Paine, J.R. 1997. *Status, Trends and Future Scenarios for Forest Conservation Including Protected Areas in The Asia-Pacific Region*.

<sup>3</sup> IUCN. 1992. *Protected Areas of the World: A review of National System*. Volume I

Indonesia didirikan tahun 684 atas permintaan Raja Sriwijaya. Pendirian cagar alam tersebut merupakan tindakan yang berdiri sendiri, bukan sebagai hasil dari rancangan umum mengenai perlindungan alam.

Selama pendudukan Jepang (1942-1945) usaha pelestarian alam hampir tidak ada. Akan tetapi, secara kebetulan Suaka Alam Bromo tetap terjaga, karena kawasan tersebut mempunyai nilai ritual Agama Budha yang banyak dianut orang Jepang.

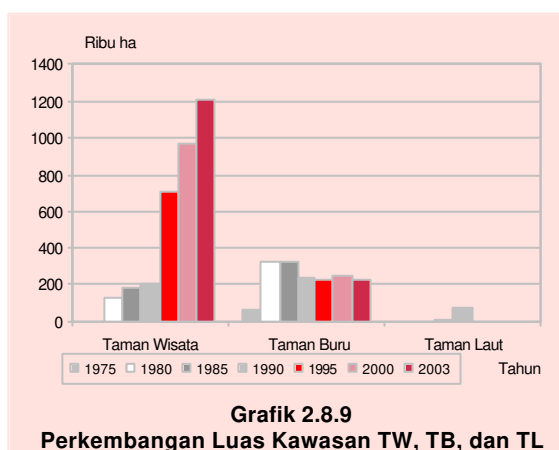


**Tabel 2.8.5**  
Perkembangan Kawasan Konservasi Daratan dan Laut

Tahun	Cagar Alam		Suaka Margasatwa		Taman Wisata		Taman Buru		Taman Laut		Taman Nasional	
	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1975	118	148 422	25	1 490 714	10	756	25	64 050	1	1 000	-	-
1980-81	162	6 204 041	56	4 489 258	35	133 954	56	325 921	3	4 600	-	-
1985-86	180	6 908 480	69	5 009 977	55	178 730	69	326 291	5	8 600	19	4 665 326
1990-91	164	5 394 498	45	2 716 488 <sup>*</sup> )	56	203 480	45	233 673	7	72 930	25	6 725 665
1995-96	178	6 086 664	48	3 356 571	83	706 095	48	226 043	-	-	33	8 717 471
2000	173	2 673 503	50	3 615 305	93	973 064	50	247 393	-	-	40	14 733 698
2003	223	4 479 954	69	4 946 886	122	1 207 812	69	225 993	-	-	41	15 049 765

Catatan: \*) Tidak termasuk suaka margasatwa laut

Dalam zaman kemerdekaan, kegiatan perlindungan dan pengawetan alam mulai mengalami kemajuan sejak tahun 1954 (Dephut 1986b). Grafik 2.8.8 menunjukkan bahwa, walaupun pembangunan kawasan konservasi telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, penambahan luas kawasan konservasi terjadi secara nyata mulai tahun 1970-an. Sepuluh tahun menjelang dan setelah kemerdekaan, kemungkinan Pemerintah Penjajahan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia lebih disibukkan oleh masalah-masalah pergolakan politik, sehingga pembangunan kawasan konservasi



**Tabel 2.8.6**  
Pertambahan dan Luas Kawasan Konservasi, Kurun Waktu Pra Kemerdekaan – 2003, (Ha)

Luas	<1920	1920-1929	1930-1939	1940-1949	1950-1959	1960-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertambahan	563,7	13.780	4.444	590,5	158,7	10 jt	4 jt	7 jt	3 jt
Kumulatif	563,7	14.344	18.787	19.378	19.537	11 jt	15 jt	22 jt	25 jt

kurang mendapat perhatian.

Dalam tiga dekade terakhir (mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1999), terutama sejak diterapkannya sistem Pembangunan Lima Tahun (Pelita), luas kawasan konservasi yang ditetapkan meningkat dengan pesat. Selain luasnya yang meningkat pesat, jenis kawasan konservasi pun semakin beragam. Dalam tahun 1970-an mulai ditetapkan taman buru (TB Semidang Bukit Kabu di Bengkulu, 1973) dan taman wisata laut (TWL Banda, 1977).

Dalam tahun 1980-an mulai ditetapkan taman nasional darat (TND Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, 1980), suaka margasatwa laut (SML Pulau Semama di Kaltim, 1982), cagar alam laut (CAL Pulau Sangiang di Jawa Barat/sekarang Banten, 1985), taman hutan raya (Tahura Dr. Muhammad Hatta, di Sumatera Barat, 1986), dan taman nasional laut (TNL Kepulauan Karimun Jawa di Jawa Tengah, 1988).

Suatu hal yang menyolok, mulai tahun 1980-an, adalah berkembangnya konsep taman nasional yang memiliki areal yang luas dan mengintegrasikan aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan (rekreasi). Perkembangan taman nasional ini dipengaruhi oleh penyelenggaraan Kongres Taman Nasional Sedunia ke 3 Tahun 1982 di Bali. Sejak itu luas taman nasional di Indonesia berkembang pesat hingga mencapai 14.815.976,2 ha dan menjadi bagian terbesar (65,7 persen) dari kawasan konservasi. Grafik 2.8.8 dan Grafik 2.8.9 menunjukkan perkembangan luas kawasan

konservasi yang pesat sampai dengan tahun 2003. Tabel 2.8.6 menyajikan perkembangan luas dan pertambahannya sejak pra kemerdekaan sampai dengan tahun 2003.

### 2.8.5 Pertambangan

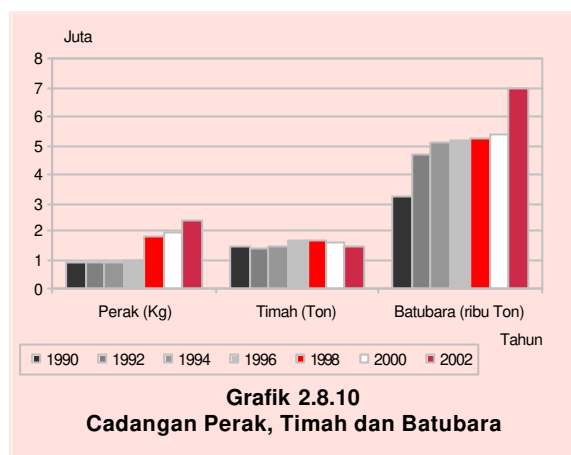
Sumber daya mineral seperti minyak bumi, gas, barang galian dan tambang lainnya merupakan salah satu wujud fisik dari sumber daya alam selain sumber daya biologi (hewan dan tumbuh-tumbuhan), sumber daya yang mengalir (air yang mengalir, angin, samudra, dan ombak) dan sumber daya statis (air, udara, tanah). Di antara keempat jenis sumber daya alam tersebut dapat dibedakan lagi menurut sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui mempunyai sifat selalu tersedia terus-menerus tanpa mengenal batas waktu, dimanfaatkan atau tidak, meliputi tumbuh-tumbuhan, binatang, hutan, air, sinar matahari. Pemanfaatan sumber daya ini haruslah mengikuti kaidah kelestarian yang berkelanjutan sehingga keseimbangan secara alamiah tetap terjaga. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai sifat volume fisiknya tersedia secara tetap yang tidak ada campur tangan manusia dalam pengadaannya dan terjadi oleh proses alamiah yang memerlukan waktu ribuan tahun. Sumber daya ini meliputi barang-barang mineral dan fosil seperti minyak bumi, batubara, gas alam dan barang-barang

**Tabel 2.8.7**  
**Cadangan Minyak Bumi, Gas Alam, Mineral, 1990 s/d 2002**

Tahun	Minyak Bumi Juta Bareil	Gas Alam Ribuan MMSCF	Batu Bara Juta Ton	Bauksit Ton	Timah Ton	Emas Kg	Perak Kg	Nikel Ribuan Ton
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1990	10.648,0	115 134,0	3 221,6	8 661 901,0	1 420 970,4	81 102,1	886 003,0	-
1992	10.414,0	114 241,0	4 722,0	6 449 344,0	1 379 900,4	80 924,6	882 797,9	-
1994	9.098,0	123 576,0	5 085,8	102 400 123,0	1 437 236,8	79 634,0	869 271,1	840 261,3
1996	9.092,0	137 794,0	5 170,1	117 507 276,0	1 625 534,0	90 001,5	944 401,4	845 258,3
1998	9.826,0	158 272,0	5 250,7	126 128 146,0	1 631 685,0	168 177,4	1 768 139,7	904 563,5
2000	9.753,4	168 168,0	5 391,1	135 843 433,0	1 598 713,0	176 701,2	1 902 784,7	976 082,5
2002	9.726,5	174 111,0	6 976,7	159 477 397,0	1 481 150,0	207 122,2	2 379 097,1	977 640,9

Sumber: Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 1990-2002





galian.

Sumber daya alam tersebut setiap saat terjadi perubahan volume karena berbagai sebab, misalnya karena dimanfaatkan oleh manusia, perubahan alamiah dan bencana alam. Ketersediaan sumber daya alam berupa mineral dapat diketahui dan diperkirakan melalui kegiatan eksplorasi namun sebagian belum bisa diperkirakan karena belum diketemukan. Sumber daya mineral yang sudah ditemukan bisa ditambang dan digali untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi bila akan mendatangkan keuntungan. Dengan demikian cadangan sumber daya mineral akan selalu berubah setiap waktu tergantung dari pengurangan akibat penambangan dan penambahan akibat penemuan cadangan baru (diketahui).

Keadaan perkembangan cadangan minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya dalam kurun waktu 1990-2002, disajikan pada Tabel 2.8.7. Pada tabel tersebut terlihat cadangan beberapa jenis mineral tampak naik turun, hal tersebut diakibatkan oleh tingkat produksi dan volume penemuan cadangan baru yang kadang tidak selalu berimbang. Jika tingkat produksi tetap atau meningkat tetapi tidak ditemukan cadangan baru maka volume cadangan total akan menurun pada tahun berikutnya. Sebaliknya bila tingkat produksi tetap atau berkurang namun terjadi penemuan cadangan baru yang lebih besar dari tingkat produksi maka volume total cadangan akan naik.

### 2.8.6 Pengelolaan Lingkungan Dalam Satuan Wilayah Administrasi Terkecil

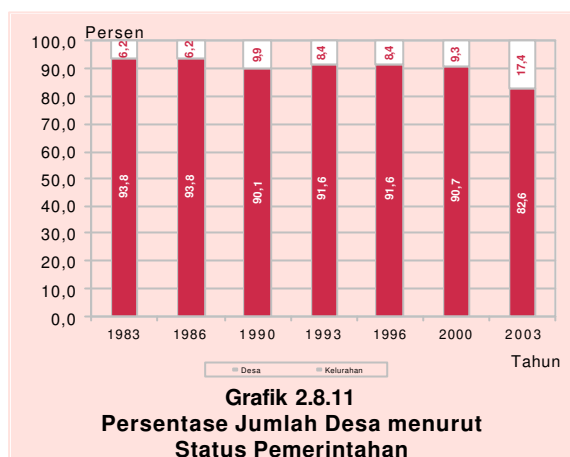
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Unit Permukiman Transmigrasi/ Permukiman Masyarakat Suku Terasing (UPT/PMST).

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Fasilitas Desa terdiri atas fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Fasilitas sosial antara lain terdiri atas lapangan/fasilitas sepak bola, pondok pesantren, sekolah luar biasa, gugus depan pramuka, dan panti asuhan/wreda/cacat. Fasilitas ekonomi antara lain terdiri atas lalu lintas darat, jalan darat yang dapat dilalui kendaraan roda empat, jalan utama darat berupa jalan aspal, listrik PLN, dan Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu.

#### a. Perubahan Status Desa Perdesaan menjadi Desa Perkotaan

Selama 60 tahun Indonesia merdeka telah terjadi perubahan yang cukup besar yang menyangkut berbagai ciri kependudukan, salah satunya adalah perubahan dari desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Perubahan ini membawa berbagai macam konsekuensi baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di bidang ekonomi, perubahan ini diharapkan dapat mempercepat putaran roda ekonomi di suatu wilayah, namun di bidang sosial dan lingkungan, mungkin justru merubah perilaku masyarakat yang semula bermodal sosial saat menjadi rentan dan semata peduli terhadap lingkungan



sekitarnya, menjadi abai terhadap lingkungan. Umumnya perubahan ini terjadi setelah bangsa Indonesia dapat mengadakan pembangunan secara teratur.

Tahapan pembangunan telah dapat mengubah beberapa daerah dengan status desa perdesaan menjadi daerah dengan status desa perkotaan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai desa perkotaan, sebuah desa harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) kepadatan penduduknya 5.000 orang per km<sup>2</sup> atau lebih; (b) kurang dari 25 persen dari rumah tangga berusaha terutama dalam bidang pertanian; dan (c) memiliki lebih dari 8 sarana perkotaan. Perubahan ini perlu mendapat perhatian agar dapat diketahui dari waktu ke waktu, sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai dan dampak yang timbul selama masa pembangunan yang telah dilaksanakan.

Grafik 2.8.11 menyajikan persentase jumlah desa menurut status pemerintahan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2003, berdasarkan hasil pengumpulan data Statistik Potensi Desa. Jumlah desa perdesaan yang berubah menjadi desa perkotaan dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah, perubahan ini merupakan akibat dari perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah di mana kota bersangkutan berada. Sampai dengan tahun 2003, jumlah desa perdesaan sudah mencapai 56.842 desa (82,6 persen) dan desa perkotaan (kelurahan) ada sebanyak 11.974 kelurahan (17,4 persen). Untuk desa perkotaan terjadi peningkatan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 sekitar 9,2 persen.

## b. Kepadatan Penduduk

Data persebaran penduduk akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan ukuran kepadatan suatu daerah. Hal ini penting sebab suatu daerah dengan jumlah penduduk yang besar belum tentu dirasakan padat apabila memiliki wilayah yang luas. Tabel 2.8.8 menyajikan kepadatan penduduk pada 6 kota-kota besar di Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971 sampai dengan tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa angka kepadatan ini dari dekade ke dekade cenderung memperlihatkan kenaikan.

Pada tahun 2000, Kota Bandung adalah yang tertinggi tingkat kepadatannya dibandingkan dengan 5 kota lainnya, yaitu mencapai 12,7 ribu orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah adalah Kota Semarang yang hanya sebesar 3,6 ribu orang per km<sup>2</sup>.

Secara umum kepadatan penduduk sepanjang tahun 1971-2000 cenderung menunjukkan peningkatan namun demikian selama sepuluh tahun terakhir peningkatannya relatif kecil dibandingkan yang terjadi pada tiga dasawarsa sebelumnya. Meski diakui akselerasi penurunan laju pertumbuhan penduduk selama dua dekade terakhir relatif cepat, namun karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi, mengakibatkan munculnya permasalahan sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan, permukiman, kesehatan

**Tabel 2.8.8**  
Kepadatan Penduduk 6 Kota Besar di Indonesia  
1971 – 2000 (Jiwa/km<sup>2</sup>)

Kota	1971	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jakarta	6 873	9 831	12 485	12 643
Bandung	14 823	18 055	12 248	12 711
Semarang	1 633	2 593	3 159	3 610
Surabaya	8 593	10 047	10 126	7 966
Medan	12 462	5 204	6 531	7 167
Makasar	2 473	4 031	5 375	6 211
<b>Indonesia</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>93</b>	<b>109</b>

Sumber: Sensus Penduduk 1971-2000

lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyediaan lapangan pekerjaan, dan lainnya memerlukan penanganan tersendiri yang lebih bersifat spesifik lokal.

Salah satu dampak negatif dari tingginya kepadatan penduduk, dapat dilihat dari banyaknya areal kumuh (*slum area*) di beberapa wilayah. Berdasarkan data Statistik Potensi Desa sampai dengan tahun 2003 ada sebanyak 4.089 desa yang memiliki permukiman kumuh (Tabel 2.8.9).

Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kualitas kesehatan perumahan maupun lingkungan. Akibatnya derajat kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut menjadi rendah. Penduduk yang paling berisiko tinggi untuk terserang penyakit adalah penduduk anak-anak dan lansia. Anak-anak yang tinggal di permukiman kumuh, akan mudah terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), diare, penyakit kulit dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP). Ini berarti diperlukan investasi yang besar untuk memberdayakan masyarakat kumuh perkotaan, agar kualitas penduduk dapat terus ditingkatkan.

### c. Keberadaan Fasilitas Desa

Jumlah desa dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah, dapat lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya, ini disebabkan adanya pemekaran atau penggabungan

**Tabel 2.8.9**  
**Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Permukiman Kumuh, 1996-2003**

Tahun	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1996	3 653	1 233	4 886
2000	2 503	1 354	3 858
2003	2 315	1 774	4 089

Sumber: Statistik Potensi Desa 1996-200

wilayah. Pemekaran terjadi karena pemecahan desa/kelurahan sebagai akibat berkembangnya penduduk beserta fasilitasnya, sehingga perlu dibentuk desa/kelurahan baru. Hal ini biasa terjadi di berbagai kota besar.

#### i). Ketersediaan Fasilitas Sosial di Desa

Secara umum jumlah desa yang mempunyai fasilitas sosial, dari tahun ke tahun selalu bertambah. Jumlah desa yang mempunyai fasilitas lapangan sepak bola meningkat dari 38,2 persen pada tahun 1980 menjadi 58,0 persen pada tahun 2003.

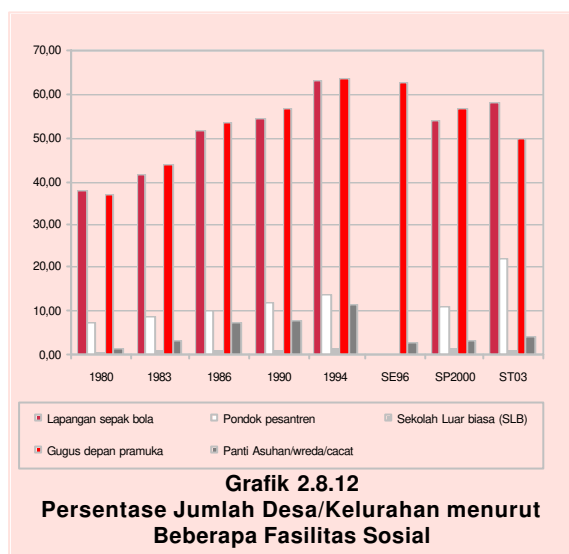
Demikian juga jumlah desa yang memiliki pondok pesantren mengalami perkembangan dari 7,3 persen pada tahun 1980 menjadi 22,2 persen pada tahun 2003. Selanjutnya, perkembangan yang juga pesat ditunjukkan oleh banyaknya desa yang memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB), Gugus Depan Pramuka (Gudep) dan Panti Asuhan/Wreda/Cacat.

**Tabel 2.8.10**  
**Persentase Jumlah Desa/Kelurahan menurut Beberapa Fasilitas Sosial, 1980 – 2003**

Fasilitas Sosial	1980	1983	1986	1990	1993	1994	SE96	SP00	ST03
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lapangan Sepak Bola	38,19	41,57	51,89	54,24	60,86	63,24	-	53,94	57,95
Pondok Pesantren	7,26	8,84	10,12	11,80	13,01	13,50	-	10,81	22,22
Sekolah Luar Biasa (SLB)	0,58	0,70	0,83	1,07	1,08	1,18	-	1,26	1,01
Gugus Depan Pramuka	36,94	44,04	53,35	56,88	61,59	63,80	62,47	56,72	49,87
Panti Asuhan/Wreda/Cacat	1,41	3,12	7,22	7,89	10,68	11,60	2,73	3,25	3,91

Sumber : Podes – SP 1980, Podes – ST 1983, Podes – SE 86, Podes – SP 1990, Podes – ST 1993 dan Podes inti 1994. SE 96, Podes – SP 2000, Podes – ST 2003





## ii). Ketersediaan Fasilitas Ekonomi di Desa

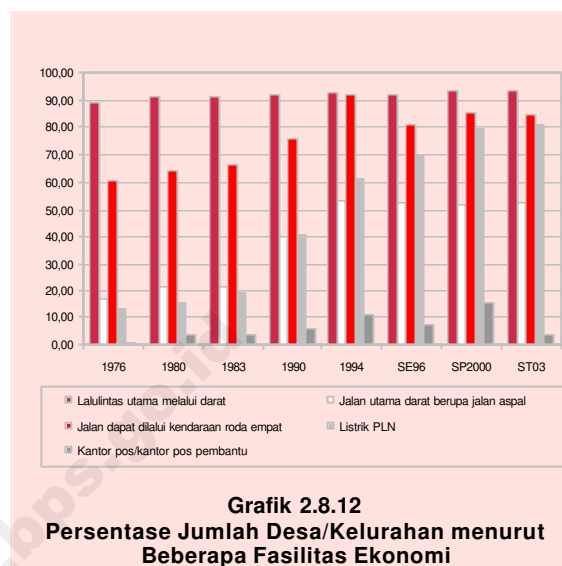
Seperti halnya fasilitas sosial, penyediaan fasilitas ekonomi juga menunjukkan peningkatan. Salah satu fasilitas ekonomi adalah lalu lintas angkutan, yang merupakan fasilitas ekonomi kunci yang mempengaruhi pesat tidaknya pembangunan di suatu daerah, termasuk desa.

Lalu lintas angkutan utama desa-desa di Indonesia masih beragam, umumnya melalui darat atau air. Kebijakan pembangunan antara daerah yang berdekatan selama ini ditekankan pada lalu lintas darat, oleh karena itu fasilitas yang dipilih di sini adalah angkutan darat.

Secara keseluruhan persentase desa yang memanfaatkan darat sebagai lalulintas utama mengalami

peningkatan, yaitu dari 88,8 persen pada tahun 1976 menjadi 93,7 persen pada tahun 2003.

Seiring dengan itu, persentase jumlah desa yang jalan utamanya terbuat dari aspal terus mengalami peningkatan yang pesat, dari 17,1 persen pada tahun 1976 menjadi 52,5 pada tahun 2003. Demikian juga



perkembangan jumlah desa yang mempunyai jalan utama darat dan dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang tahun meningkat dari 60,7 persen pada tahun 1976 menjadi 84,8 persen pada tahun 2003.

Fasilitas infrastruktur lain yang sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tersedianya listrik. Persentase jumlah desa yang mendapat fasilitas listrik yang berasal dari PLN meningkat pesat dari 12,8

**Tabel 2.8.11**  
Persentase Jumlah Desa/Kelurahan menurut Beberapa Fasilitas Ekonomi, 1976 – 2003

Fasilitas Ekonomi	1976	1980	1983	1990	1994	SE96	SP00	ST03
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lalu lintas Utama melalui darat	88,84	91,10	91,35	91,93	92,57	92,25	93,35	93,72
Jalan utama darat berupa jalan aspal	17,14	21,14	21,51	39,88	53,57	52,86	51,73	52,47
Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat	60,71	64,54	66,72	75,77	91,94	81,25	85,22	84,85
Listrik PLN	12,80	15,45	19,02	41,00	61,14	70,22	79,87	81,08
Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu	1,03	3,73	3,75	5,69	7,33*)	7,38	7,04	6,83

Sumber : Fasdes-1976, : Podes – SP 1980, Podes – ST 1983, Podes – SE 86, Podes – SP 1990, dan Podes inti 1994. SE 96, Podes – SP 2000, Podes – ST 2003  
\*) Podes-SE1993

persen pada tahun 1976 menjadi 81,1 persen pada tahun 2003. Peningkatan tersebut selain disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi di bidang perlistrikan juga disebabkan oleh tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang terus bertambah.

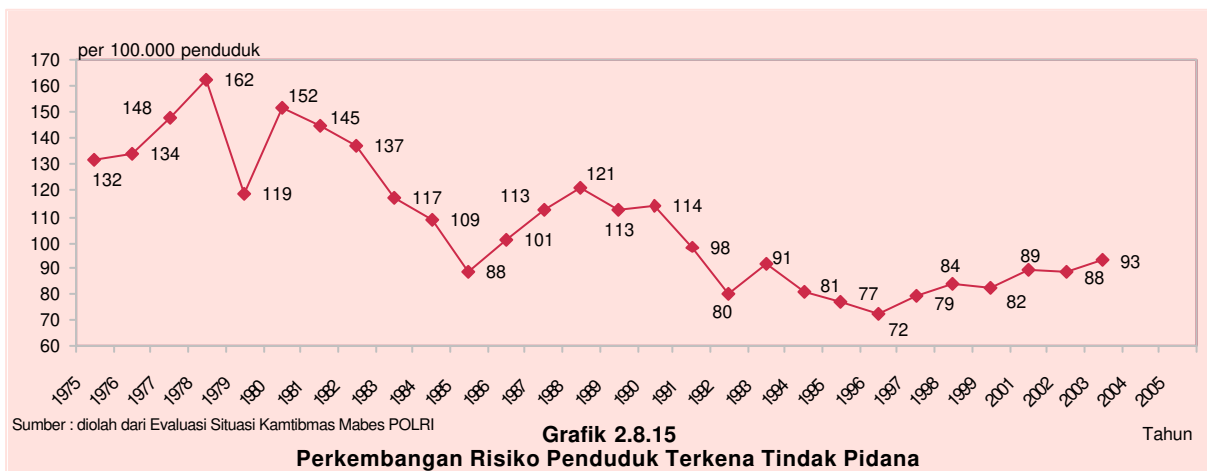
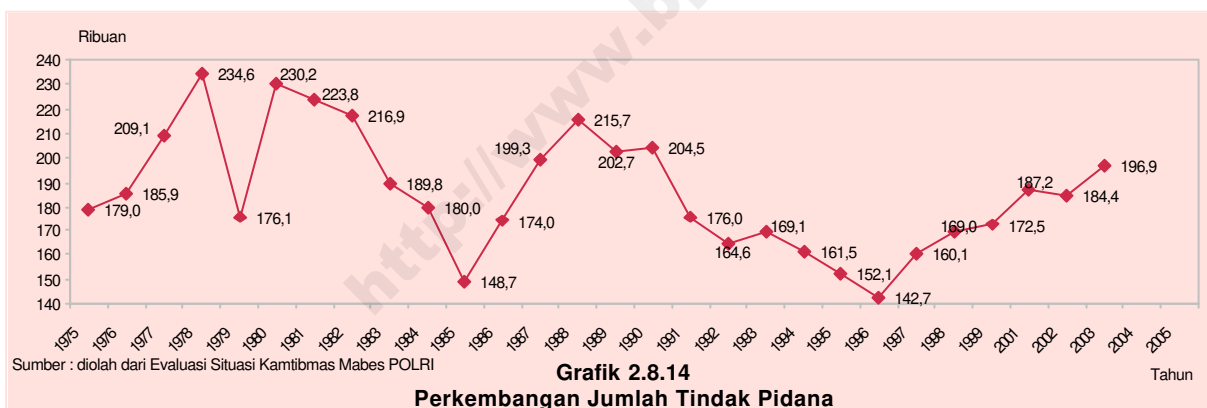
Penunjang perkembangan perekonomian yang tidak kalah penting adalah tersedianya Kantor Pos yang berguna sebagai salah satu sarana penghubung komunikasi antardesa/wilayah. Banyaknya desa yang mempunyai Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu meningkat dari 1,0 persen pada tahun 1976 menjadi 6.8 persen pada tahun 2003.

**2.8.7 Situasi Keamanan**

Situasi keamanan selama 28 tahun terakhir sejak 1976 tergambar dari perkembangan jumlah tindak pidana (*crime total*), risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) dan selang waktu terjadi tindak pidana

(*crime clock*). Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, jumlah kasus tindak pidana selama 28 tahun terakhir terdapat dua penggalan waktu yang memiliki pola kecenderungan berbeda. Penggalan waktu yang dimaksud adalah penggalan pada kurun 1976-1997 dan kurun setelah 1997. Pada kurun 1976-1997 meskipun menunjukkan nilai yang fluktuatif akan tetapi mengindikasikan kecenderungan menurun. Jumlah tindak pidana selama 28 tahun terakhir paling tinggi 234,6 ribu kasus yang terjadi pada tahun 1979, sementara titik terendah sebesar 142,7 ribu kasus yang terjadi pada tahun 1997. Setelah tahun 1997 pola jumlah tindak pidana menunjukkan kecenderungan meningkat (Grafik 2.8.14).

Kecenderungan penurunan tindak kriminal pada periode 1976 - 1997, diperjelas dengan pola angka risiko penduduk terkena tindak pidana. Pada tahun 1976 dari 100.000 penduduk sebanyak 132 jiwa berisiko terkena tindak pidana. Seperti halnya pada jumlah tindak



kriminal, risiko penduduk terkena tindak pidana paling tinggi terjadi pada tahun 1979 yaitu sebesar 162 jiwa. Angka tersebut menurun pada tahun-tahun berikutnya dan selama kurun 1976 – 2003 mencapai titik terendah pada tahun 1997 yaitu 72 jiwa per 100.000 penduduk. Akan tetapi seperti terlihat pada Grafik 2.8.15, setelah 1997 risiko penduduk terkena tindak pidana berkecenderungan meningkat.

Grafik 2.8.16 menampilkan perkembangan selang waktu terjadi tindak pidana. Secara umum Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada periode 1976-1997 berkecenderungan selang terjadi suatu tindak pidana semakin lama, sebaliknya setelah tahun 1997 selang waktu terjadi suatu tindak pidana semakin pendek. Seperti tampak pada Grafik 2.8.16, selama kurun 28 tahun, waktu terpendek terjadi tindak pidana dialami pada tahun 1979. Pada tahun tersebut setiap 2 menit 14 detik terjadi satu tindak pidana. Sedangkan waktu terlama pada periode tersebut terjadi pada tahun 1997, yaitu kejadian tindak pidana berselang sekitar 3 menit 40 detik. Akan tetapi, setelah tahun 2000 waktu kejadian tindak pidana telah mulai pada kisaran kurang dari 3 menit dan terakhir pada tahun 2003 menjadi sekitar 2 menit 40 detik. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian, karena dalam setiap 2 menit 40 detik ada kemungkinan terjadi tindak pidana. Dari ketiga indikator tindak pidana di atas tampak adanya perubahan kecenderungan terjadi pada tahun 1997 sebagai titik balik. Masih segar dalam

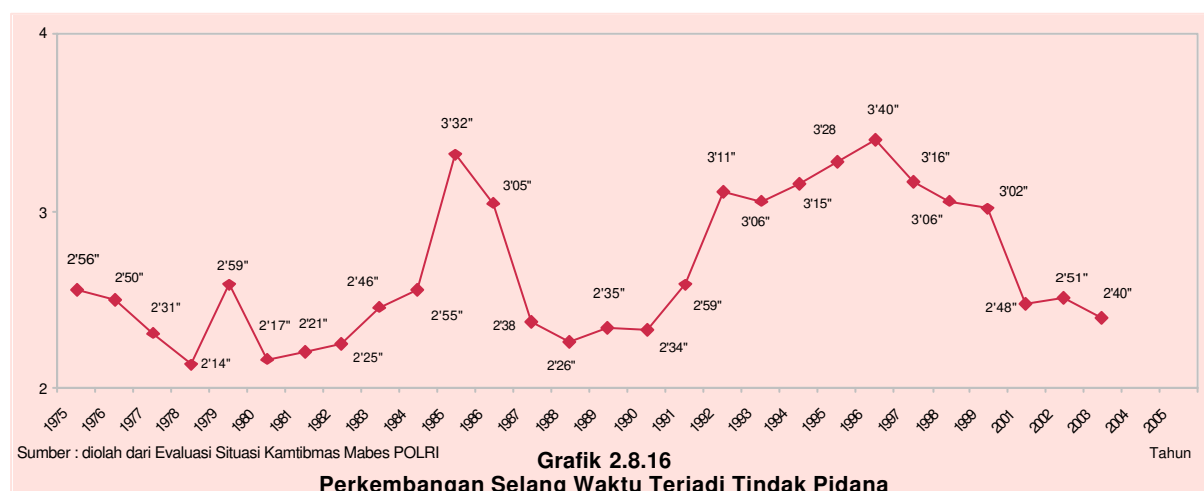
**Tabel 2.8.12**  
**Jenis Tindak Pidana Menonjol, 2002 - 2003**

Jenis Tindak Pidana	2002	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencurian dengan pemberatan	51 118	44 659	43 307
Pencurian kendaraan bermotor	29 403	26 016	22 275
Pencurian dengan kekerasan	11 242	9 427	8 257
Penganiayaan berat	11 590	11 229	12 124
Kebakaran	2 163	2 630	2 435
Pembunuhan	2 163	1 687	1 635
Perkosaan	1 300	1 549	1 900
Kenakalan remaja	142	102	61
Uang palsu	288	237	166
Narkotika	5 540	6 624	7 434

Sumber: Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002- 2003

ingatan Bangsa Indonesia bahwa tahun tersebut merupakan permulaan terjadinya krisis multi dimensi yang diawali dengan krisis moneter.

Tulisan ini tidak mengungkap keterkaitan antara peristiwa tersebut dengan kejadian tindak pidana. Namun, apabila dikaji tentang jenis tindak pidana yang dikategorikan menonjol menurut POLRI, maka terlihat bahwa jenis tindak pidana yang dominan adalah tindak pidana dengan sasaran harta benda, jiwa, dan kehormatan seperti: pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan (Tabel 2.8.12). Selain itu beberapa jenis tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat juga masuk pada kategori tindak pidana menonjol seperti: jenis tindak pidana narkotika, uang palsu dan kenakalan remaja.











## **PERTUMBUHAN EKONOMI**

## 3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

### RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan kenaikan PDB harga konstan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan PDB sejak Kemerdekaan mengalami pasang surut. Kemunduran ekonomi yang paling parah terjadi adalah pada tahun 1965 dan 1998. Sejak tahun 2001 pertumbuhan ekonomi sudah kelihatan menaik dan terus meningkat sampai dengan tahun 2004. Bahkan tiga bulan pertama (triwulan I) tahun 2005 dibandingkan triwulan I tahun 2004 PDB sudah tumbuh sebesar 6,4 persen.

Sampai tahun 1990 PDB secara sektoral paling besar dihasilkan oleh sektor pertanian, mulai tahun 1991 sektor industri pengolahan sudah menggantikan pertanian sebagai yang paling besar. Sejak tahun 2000 urutan sektor ekonomi terbesar adalah Industri pengolahan, Perdagangan-Hotel-Restoran dan Pertanian.

Kontribusi terbesar dari pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada periode 1960-1968, sedangkan kontribusi terbesar dari konsumsi pemerintah terjadi pada masa *oil boom* (1976-1981). Kontribusi terbesar dari pembentukan modal tetap bruto terjadi pada periode 1986-1989.

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2004 sudah mencapai 2.303,0 triliun rupiah dan 3 bulan pertama tahun 2005 sudah mencapai 639,7 triliun rupiah.

### SUMMARY

*Economic growth is indicated by the increase in GDP at constant price.*

*The economic growth since the independence were fluctuative. The most severe contractions happened in 1965 and 1998. Since 2001 the economic growth were accelerated and keep increasing to 2004. Furthermore, in the first quarter of 2005, it has increased 6.4 percent compared to the first quarter of 2004.*

*Until 1990, agriculture sector had role as the largest industry in GDP, however since 1991 it was replaced by the manufacturing industry. Since 2000, the largest contributors were manufacturing, trade-hotel-restaurant and agriculture.*

*The highest contribution of households consumption expenditure occurred during 1960-1968, while the highest contribution of government expenditure occurred during the oil boom (1976-1981). The highest contribution of gross domestic fixed capital formation occurred during 1986-1989.*

*GDP at current market price in 2004 was 2,303.0 trillion rupiahs and for the first 3 month of 2005 it reached 639.7 trillion rupiahs.*



### 3.1.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto

Perkembangan ekonomi dihitung berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDB lazim disajikan menurut lapangan usaha (sektoral) dan menurut komponen penggunaan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Angka laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data PDB atas dasar harga konstan. Untuk menghitung laju pertumbuhan riil dalam satu kurun waktu lazimnya digunakan tahun dasar yang sama. Angka kontribusi PDB menurut sektor atau jenis penggunaan dihitung atas dasar harga berlaku.

Jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan satuan per kapita pada penghitungan PDB dan sejenisnya adalah keadaan penduduk pada pertengahan tahun.

Agregat-agregat ekonomi makro yang diturunkan dari neraca nasional terdiri atas neraca PDB, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan Neraca Arus Dana (NAD). Tapi pembahasan mengenai SNSE dan NAD akan dicantumkan dalam seksi Neraca Nasional. Pembahasan perkembangan ekonomi atau PDB akan ditekankan pada analisis menurut lapangan usaha dan komponen penggunaan. Di samping itu, untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara dari satu periode ke periode lainnya dapat dilihat melalui besaran dan perkembangan PDB.

Jika PDB ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun diperoleh rata-rata produk yang dihasilkan atau pendapatan yang dibayarkan per penduduk negara tersebut. Rata-rata ini disebut sebagai nilai PDB per kapita.

#### a. PDB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh

unit-unit seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu negara pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun atau tiga bulanan).

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha meliputi sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, dan jasa-jasa.

Setelah kemerdekaan, PDB baru mulai diestimasi pada tahun 1950. kemudian pada tahun 1960 PDB dihitung secara seri ke depan dengan menggunakan metode yang lebih baik dan cakupan data yang lebih lengkap. Besarnya PDB pada tahun 1950 atas dasar harga berlaku sebesar 84,0 miliar rupiah. Pada beberapa tahun berikutnya kenaikan inflasi begitu besar sehingga mempengaruhi nilai PDB atas berlaku yang meningkat drastis dari 470,1 miliar rupiah pada tahun 1961 menjadi 23.710,0 miliar rupiah pada tahun 1965.

Pada tahun 1966 nilai rupiah mengalami pemotongan dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1,- sehingga mempengaruhi besaran PDB yang secara absolut mengecil dari tahun sebelumnya menjadi 315,9 miliar rupiah. Dalam situasi ekonomi yang masih diliputi oleh proses peralihan tersebut, tampak bahwa besaran PDB mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini sejalan dengan perencanaan pembangunan ekonomi terencana dan bertahap.

Pada tahun 1968 yang merupakan tahun terakhir periode peralihan, nilai nominal PDB mencapai 2.096,7 miliar rupiah. Lima tahun kemudian kemajuan perekonomian menunjukkan perbaikan mengesankan. Pada tahun 1973 saat akhir Pelita I, PDB meningkat menjadi 6.753,4 miliar rupiah. Sektor pertambangan mengalami masa emas (*booming*) sebagai akibat melonjaknya harga minyak di pasaran internasional. Sektor industri dan sektor lainnya meningkat tajam sebagai dampak positif dari penerapan berbagai kebijakan terutama di bidang moneter dan fiskal. Kemajuan ekonomi tersebut menghasilkan besaran PDB nominal pada akhir Pelita V, tahun 1993, sebesar 329.775,9 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 1998, PDB

nominal mencapai 955.735,5 miliar rupiah. Pada tahun 2000, nilai PDB mencapai 1.264.918,7 miliar rupiah dan tahun 2004 sudah mencapai 2.032.824,9 miliar rupiah.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDB harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan tingkat harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan secara nyata pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDB diestimasi dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan perekonomian setiap tahun atau selama periode tertentu.

Penggunaan tahun dasar untuk penyajian PDB atas dasar harga konstan sejak kemerdekaan RI telah mengalami lima kali perubahan, yaitu harga pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993 dan 2000. Berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 1960, laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 1961 sampai dengan 1965 sangat rendah, yaitu hanya sekitar 2 persen per tahun. Rendahnya tingkat pertumbuhan ini sangat erat kaitannya dengan situasi politik dalam negeri yang tidak stabil. Masa rehabilitasi perekonomian Indonesia yang dimulai oleh Orde Baru telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi antara tahun 1966 – 1968 mulai menunjukkan angka yang membaik, yaitu sekitar 5 persen per tahun. Kemudian setelah perencanaan ekonomi secara terarah dilaksanakan melalui program Pelita, pertumbuhan ekonomi semakin cerah. Selama Pelita I (1969-1973) rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 7 persen per tahun. Berikutnya pada Pelita II dan Pelita III (1974-1983) perekonomian Indonesia semakin membaik sebagai hasil dari program-program Pelita sebelumnya. Keberhasilan Revolusi Hijau di sektor pertanian menjadi salah satu dasar yang mendorong pertumbuhan sektor

lainnya. Hal ini diiringi dengan membaiknya harga minyak bumi, sehingga meningkatkan penerimaan pemerintah yang pada gilirannya mendorong investasi yang mantap untuk sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun di pihak lain, kondisi perekonomian nasional tidak bisa dipisahkan dari keadaan ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Dalam keadaan demikian perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh lebih dari 6 persen per tahun.

Pada Pelita IV (1984-1988) masa bonanza minyak mulai sirna, dan pertumbuhan sektor hulu lainnya mulai melambat. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, beberapa kebijakan ekonomi diluncurkan melalui paket-paket deregulasi seperti deregulasi perbankan dan deregulasi ekspor dan impor. Selama Pelita V (1989-1993) tatanan ekonomi semakin diperbaiki melalui berbagai kebijakan ekonomi lanjutan. Utamanya investasi dipacu lebih cepat dan pola produksi diarahkan ke pasar luar negeri dengan cara mendorong tingkat efisiensi sektor swasta. Hasilnya pertumbuhan ekonomi pada 1984-1993 secara rata-rata masih bisa tumbuh di atas 6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi selama Pelita V ini berlanjut hingga 4 tahun awal Pelita VI, tahun 1994 sampai dengan 1997 yaitu tumbuh secara rata-rata, yang mencapai 7,1 persen per tahunnya.

Pada pertengahan 1997, Indonesia seperti negara lainnya dikawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dihantam oleh krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga pada tahun 1998 terjadi penurunan perkembangan ekonomi seperti yang digambarkan oleh PDB yaitu menurun sebesar minus 13,13 persen dibandingkan tahun 1997. Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi tersebut mulai bisa dikendalikan dan PDB pada tahun tersebut tumbuh sebesar 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut terus membaik pada tahun 2000 yaitu sebesar 4,9 persen. Pada tahun 2001 sampai dengan 2004, dengan perhitungan PDB berdasarkan tahun dasar 2000, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 4,6 persen. Pada triwulan I tahun 2005 dibandingkan

**Tabel 3.1.1**  
**Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	1968	1973 <sup>2)</sup>	1978	1983 <sup>2)</sup>	1988	1993	1998	2000	2004**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian	1 069,3	2 710,0	6 706,0	17 764,7	34 277,9	58 963,4	172 827,6	216 831,4	354 435,3
Pertambangan dan Penggalian	87,1	831,0	3 869,2	16 107,4	17 161,8	31 497,3	120 328,6	167 692,2	196 892,4
Industri Pengolahan	178,6	560,0	2 184,7	9 896,4	26 252,4	73 556,4	238 897,0	385 597,9	652 729,5
Lainnya <sup>1)</sup>	761,7	2 652,4	9 207,5	33 854,3	64 412,7	165 758,8	423 700,3	619 648,8	1 098 974,3
PDB	2 096,7	6 753,4	21 967,4	77 622,8	142 104,8	329 775,9	955 753,5	1 389 770,3	2 303 031,5

Catatan: <sup>1)</sup> Lainnya terdiri dari sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, dan jasa-jasa.  
<sup>2)</sup> Dilakukan penyempurnaan penghitungan bersamaan dengan penggeseran tahun dasar.

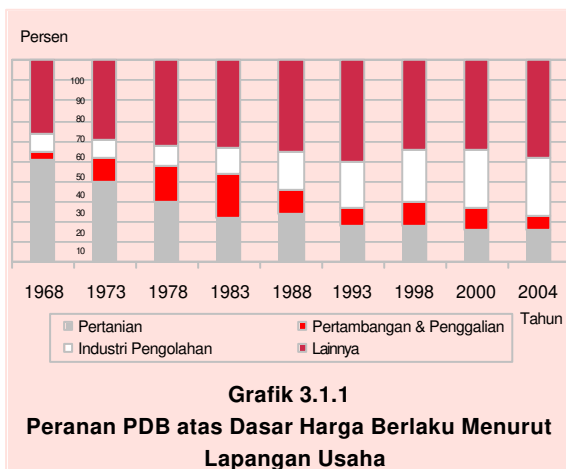
triwulan I tahun 2004 (*year on year*) PDB tumbuh sebesar 6,4 persen.

Bila pertumbuhan ekonomi dilihat dari tiga sektor utama, maka pertumbuhan tersebut dihasilkan oleh sektor yang bervariasi. Sektor hulu, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan, tumbuh relatif tetap. Sedangkan sektor industri pengolahan dan hilir pada awalnya lambat kemudian meningkat dengan pesat selama PJP I. Pertumbuhan sektoral ini akan jelas perkembangannya dengan membuat periodisasi berdasarkan pengelompokan orde (sistem) ekonomi dan tahap-tahap perencanaan pembangunan ekonomi.

Selama periode tahun 1961–1965, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,4 persen per tahun, sektor pertambangan sebesar 2,2 persen, sektor industri pengolahan sebesar 1,9 persen. Pada masa peralihan

sistem ekonomi antara tahun 1966 sampai dengan 1968, pertumbuhan sektoral mulai menunjukkan angka semakin baik, sektor pertanian mulai meningkat dengan besaran 4,4 persen dan sektor pertambangan melaju dengan tingkat 13,7 persen. Sektor pertanian meningkat sebagai akibat dari awal pemanfaatan lahan yang mulai lebih efektif sedang sektor pertambangan meningkat berkat penemuan-penemuan sumber-sumber minyak baru. Sektor industri pengolahan meningkat sebesar 4,7 persen, masih rendah dari yang diharapkan oleh karena kapasitas produksi masih dalam jumlah yang terbatas. Sektor lainnya juga meningkat sebesar 5,3 persen sebagai akibat lemahnya sektor hulu.

Selama Pelita I sampai dengan Pelita V yang merupakan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), apabila dilakukan penyeragaman tahun dasar 1983=100, menghasilkan rata-rata pertumbuhan PDB



**Tabel 3.1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi (PDB) (persen)**

Periode/ Tahun	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Lainnya <sup>1)</sup>	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1961-1965	1,4	2,2	1,9	3,0	2,0
1966-1968	4,4	13,7	4,7	5,3	5,0
1969-1973	3,5	17,2	9,2	10,3	7,3
1974-1983	3,6	1,7	11,7	9,1	6,7
1984-1993	3,3	2,0	11,6	7,0	6,1
1994-1997	2,3	5,2	10,0	7,7	7,1
1998	-1,3	-2,8	-11,4	-19,2	-13,1
1999	2,2	-1,6	3,9	-0,8	0,8
2000	1,9	5,5	6,0	5,3	4,9
2001-2004	3,9	-1,0	5,0	5,9	4,6

Catatan :<sup>1)</sup> Lainnya terdiri dari sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, dan jasa-jasa.



sebesar 6,8 persen per tahun. Secara sektoral, rata-rata pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan kenaikan sebesar 4,4 persen per tahun, sedangkan sektor pertanian lebih lambat yaitu sebesar 3,6 persen per tahun. Dengan strategi dasar atas pembangunan sektor industri barang impor pada tahap awal dengan penekanan pada industri ringan kemudian diikuti dengan ekspansi di industri dasar seperti semen, besi baja, dan pupuk menyebabkan sektor-sektor lainnya dapat meningkat dengan pesat. Kemudian dengan strategi promosi ekspor menghasilkan pertumbuhan sektor industri sebesar 8,6 persen. Keberhasilan sektor industri ini sebagai pertanda atas keberhasilan strategi dasar kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu itu.

### c. Struktur Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sektor yang mengalami pertumbuhan cepat dan disertai dengan harga yang meningkat tajam akan menggeser peranan sektor yang menunjukkan pertumbuhan dan harga yang meningkat lambat dalam perekonomian.

Pada tahun 1960 sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 53,9 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,7 persen, sektor industri pengolahan 8,4 persen, dan sektor lainnya sebesar 34,0 persen. Pada tahun 1965, peranan sektor pertanian meningkat menjadi 58,8 persen dan turun kembali pada tahun 1966 menjadi 53,3 persen.

Pada masa pra program Pelita, struktur perekonomian didominasi sektor pertanian. Pada tahun 1968 sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 51,0 persen, sektor pertambangan 4,2 persen, sektor industri 8,5 persen, dan sektor lainnya 36,3 persen. Lima tahun kemudian sektor pertanian, walaupun masih mendominasi struktur ekonomi, peranannya semakin kecil, Pada akhir Pelita I tersebut sektor pertanian

menyumbang 40,1 persen terhadap besaran PDB, kemudian disusul sektor pertambangan sebesar 12,3 persen, sektor industri pengolahan 9,6 persen, dan sektor lainnya 38,0 persen. Pola struktur ini selama kurang lebih dua pelita berikutnya masih serupa walaupun peranan setiap sektor menunjukkan angka yang semakin berimbang.

Pada akhir Pelita III sektor pertanian hanya menyumbang 22,9 persen terhadap PDB harga berlaku, Dilain pihak peranan sektor pertambangan kemudian meningkat kembali menjadi 20,8 persen sebagai akibat atas membaiknya harga minyak mentah di pasar internasional. Sektor industri pengolahan dan sektor lainnya juga mengalami kenaikan kontribusi sebagai dampak atas kesinambungan investasi yang mantap dan dipacu oleh tingkat permintaan yang tetap tinggi atas kedua sektor tersebut. Kontribusi kedua sektor ini masing-masing adalah 12,8 persen dan sektor lainnya 43,6 persen.

Pada tahun 1991, pola perekonomian mengalami perubahan struktur ekonomi yang mencolok. Keberhasilan perbaikan ekonomi di sektor pengolahan menyebabkan dominasi sektoral berganti dari sektor pertanian (19,7 persen) ke sektor industri pengolahan (21,0 persen). Hingga pada akhir Pelita V (1993) penurunan komoditi pertanian, utamanya padi, menyebabkan sektor pertanian hanya berperan 17,9 persen terhadap pembentukan PDB harga berlaku. Di pihak lain, ekspansi pada hampir semua komoditi industri menyebabkan sektor industri pengolahan menyumbang 22,3 persen terhadap PDB. Pada sektor pertambangan dan penggalian peranan minyak bumi tetap memegang kendali. Hal ini tercermin walaupun terdapat kemajuan pada beberapa komoditas lain seperti gas bumi, emas, nikel, batu bara, dan barang galian, namun dengan penurunan harga komoditas minyak bumi menyebabkan peranan sektor ini tetap menurun kembali menjadi 9,6 persen pada tahun 1993. Sektor lainnya yang merupakan kumpulan dari tujuh sektor-sektor lainnya menyumbang 50,3 persen. Ketujuh sektor ini mengalami peningkatan yang mengesankan

sehingga kontribusinya meningkat secara perlahan-lahan.

Pada tahun pertama Pelita VI (1994) kontribusi terbesar masih dipegang oleh sektor industri pengolahan, yaitu 23,9 persen, terutama akibat dibukanya kelonggaran investasi di sektor industri. Sebaliknya pangsa sektor pertanian dan pertambangan terus mengalami penurunan berturut-turut sebesar 17,4 persen dan 8,3 persen. Akhirnya pada masa reformasi yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, pergeseran itu semakin cenderung ke sektor Industri Pengolahan yaitu 27,8 persen pada tahun 2000 menjadi 28,3 persen pada tahun 2004, sedangkan sektor lainnya semakin mengecil. Sektor Pertanian pada tahun 2000 turun menjadi 15,6 persen dan turun lagi menjadi hanya 15,4 persen pada tahun 2004; sektor pertambangan dan penggalian, sempat naik di tahun 2000 yaitu menjadi 12,1 persen tapi turun lagi menjadi 8,6 persen pada tahun 2004. Sedangkan sektor lainnya turun menjadi 44,6 persen pada tahun 2000 dan 47,7 persen pada tahun 2004.

**Tabel 3.1.3**  
**Distribusi Persentase PDB atas Dasar Harga Berlaku**  
**menurut Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	1968	1973	1978	1983	1988	1993	1998	2000	2004**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian	51,0	40,1	30,5	22,9	24,1	17,9	17,4	15,6	15,4
Pertambangan dan penggalian	4,2	12,3	17,6	20,8	12,1	9,6	8,3	12,1	8,6
Industri pengolahan	8,5	9,6	10,0	12,8	18,5	22,3	23,9	27,8	28,3
Lainnya <sup>1)</sup>	36,3	38,0	41,9	43,6	45,3	50,3	50,3	44,6	47,7
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: <sup>1)</sup> Lainnya terdiri atas sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, dan jasa-jasa

### 3.1.2 Perkembangan Ekonomi Menurut Komponen Penggunaan

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Penggunaan

Pertumbuhan ekonomi selain yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB menurut sektor ekonomi dapat juga ditunjukkan oleh pertumbuhan menurut komponen penggunaan PDB. Pertumbuhan ekonomi menurut komponen penggunaan PDB ini juga menunjukkan angka yang bervariasi. Keanekaragaman angka

pertumbuhan ini juga sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tahapan dan kebijakan ini sangat dipengaruhi pula oleh kejadian dan peristiwa yang juga terjadi di dalam perekonomian dunia pada umumnya dan kejadian dan peristiwa yang juga terjadi di dalam negeri. Mulai dari masa orde lama, masa transisi, masa awal perencanaan pembangunan lima tahun (Pelita), masa keemasan migas (*oil boom*), *recovery* dari *oil boom* menjadi *non oil boom*, masa *non oil boom*, sampai kepada masa krisis moneter dunia yang mengakibatkan terjadinya krisis multi dimensi perekonomian Indonesia dan akhirnya pada masa pemulihan perekonomian atau *recovery* kedua.

Pada masa orde lama tahun 1960-1968 pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga masih cukup tinggi mulai sebesar 7,8 persen tahun 1961 menjadi 9,1 persen tahun 1968, kecuali tahun 1963 dan 1966 pertumbuhan ini negatif masing-masing sebesar 4,0 dan 1,5 persen. Tingginya pertumbuhan ini didorong pula dengan penggunaan konsumsi makanan yang begitu mahal pada waktu itu. Begitu juga dengan pengeluaran konsumsi pemerintah pertumbuhannya juga cukup tinggi, terbesar tahun 1966 senilai 39,0 persen, kecuali tahun 1961, 1962, 1965 dan 1967 pertumbuhannya negatif. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa itu belum adanya perencanaan yang komprehensif dan baik dari pemerintah. Pembentukan modal juga mengalami pertumbuhan yang amat tinggi pada waktu ini. Mulai tahun 1961 sebesar 43,7 persen dan tahun 1968 sebesar 22,3 persen. Pembentukan Modal ini secara umum masih didominasi oleh pembentukan modal milik pemerintah. Sementara ekspor dan impor barang dan jasa pertumbuhannya juga cukup tinggi, tetapi sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1962, 1963, 1965 dan 1966 dengan pertumbuhan ekspor semakin tinggi dibandingkan dengan impor.

Tahun 1969-1975 pada masa awal pelaksanaan Pelita pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga berada dibawah 7 persen, kecuali tahun 1974 sebesar 13,8 persen. Terlihat di sini bahwa penyediaan dan

permintaan barang dan jasa sudah mulai agak membaik seiring dengan membaiknya iklim perekonomian. Pengeluaran konsumsi pemerintah seiring dengan peran yang sangat dominan dari pemerintah pada masa itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan mencapai angka 36,5 dan 30,3 persen pada tahun 1973 dan 1975, tetapi juga bertumbuh negatif pada tahun 1972 sebesar 1,9 persen. Pertumbuhan pembentukan modal pada tahun-tahun ini mencapai di atas 15 persen, tertinggi tahun 1970 sebesar 33,0 persen dan terendah 14,6 persen tahun 1975. Pembentukan modal ini masih di dominasi oleh modal milik pemerintah. Begitu pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa berada di atas 9 persen, kecuali pertumbuhan ekspor tahun 1974 dan 1975 masing-masing sebesar 3,6 dan -9,8 persen, dan impor tahun 1975 sebesar 7,9 persen.

Pada masa harga minyak di pasaran dunia mulai naik tahun 1976 dan mencapai puncaknya tahun 1981 pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga juga cukup tinggi dari sebesar 6,2 persen tahun 1976 menjadi 16,7 persen tahun 1981. Begitu pula dengan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah berada diatas 10 persen, tertinggi sebesar 16,5 persen tahun 1977, kecuali tahun 1976, dan 1982 masing-masing

sebesar 7,3 dan 8,2 persen. Pertumbuhan pembentukan modal selama periode ini juga cukup tinggi, yaitu berada di atas 11 persen, kecuali tahun 1976 dan 1979. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini didominasi oleh investasi pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana, yang sebagian besar berasal dari hasil ekspor migas. Hal ini dapat dimengerti karena tabungan domestik dan sumber dana luar negeri pada waktu itu masih relatif rendah. Pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa pada masa keemasan migas ini juga cukup tinggi.

Pertumbuhan ekspor tertinggi tahun 1977 sebesar 22,4 persen, tetapi pada waktu mendekati habisnya masa keemasan migas ini mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 5,6; 2,4 dan 13,9 persen berturut-turut tahun 1980-1982. Dilain pihak pertumbuhan impor barang dan jasa masih berada diatas 15 persen, kecuali tahun 1976 dan 1982.

Pada masa transisi yaitu masa ketergantungan ekonomi terhadap migas menjadi non migas tahun 1982-1985 pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah mulai melambat yaitu dibawah 4 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah masih tumbuh sebesar 7,6 persen tahun 1985. Begitu juga

**Tabel 3.1.4**  
**Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)**

No.	Jenis Penggunaan (1)	1968 (2)	1973 2) (3)	1978 (4)	1983 2) (5)	1988 (6)	1993 2) (7)	1998 (8)	2000 2) (9)	2004 **) (10)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1 854,4	4 732,0	14 408,8	47 063,0	81 045,3	192 958,4	647 823,6	856 796,3	1 532 388,3
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	156,4	716,0	2 658,9	8 077,3	12 755,8	29 756,7	54 415,9	90 779,7	187 774,1
3.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	184,6	1 208,0	4 670,7	19 467,9	36 802,6	86 667,3	243 043,4	275 881,2	483 440,7
4.	Perubahan Stok	--	--	--	2 793,5	8 006,9	10 545,5	-82 716,1	20 137,9	7 834,7
5.	Ekspor Barang dan Jasa	227,9	1 189,0	4 787,8	19 847,0	34 665,6	88 230,9	506 244,8	569 490,3	711 777,8
6.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	326,6	1 240,0	4 558,8	19 625,9	31 171,4	78 383,0	413 058,1	423 317,9	620 184,2
7.	PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 096,7	6 605,0	21 967,4	77 622,8	142 104,8	329 775,8	955 753,5	1 389 769,5	2 303 031,4
8.	Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	- 28,8	- 227,0	- 852,1	-3 283,1	-6 921,7	-12 552,6	-53 893,7	-92 161,8	-79 048,8
9.	PRODUK NASIONAL BRUTO	2 067,9	6 378,0	21 115,3	74 339,7	135 183,1	317 223,2	901 859,8	1 297 607,7	2 223 982,6
10.	Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	94,0	328,0	1 028,9	2 450,8	9 032,7	21 128,1	6 480,5	-37 820,3	62 534,0
11.	Dikurangi Penyusutan	131,0	436,0	1 427,9	3 881,1	7 105,4	16 488,8	47 787,7	69 488,5	115 151,6
12.	PENDAPATAN NASIONAL	1 842,9	5 614,0	18 658,5	68 007,8	119 045,0	279 606,3	847 591,6	1 265 939,5	2 046 297,0

Catatan:

1) Termasuk perubahan stok

2) Dilakukan penyempurnaan penghitungan bersamaan dengan penggeseran tahun dasar.



**Tabel 3.1.5**  
**Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)**

No.	Jenis Penggunaan	1968 <sup>2)</sup>	1973 <sup>3)</sup>	1978	1983 <sup>4)</sup>	1988	1993 <sup>5)</sup>	1998	2000 <sup>6)</sup>	2004 <sup>7)</sup>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(7)	(9)	(10)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	416,7	4 790,7	6 955,1	47 063,0	54 225,0	192 958,4	260 022,7	856 798,3	1 003 809,0
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	40,6	716,0	1 156,1	8 077,3	9 924,3	29 756,7	26 827,9	90 779,7	123 768,1
3.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	40,6 <sup>1)</sup>	1 208,0 <sup>1)</sup>	2 332,9 <sup>1)</sup>	19 467,9	25 200,9	86 667,3	93 604,7	275 881,2	359 604,4
4.	Perubahan Stok	-	-	-	2 793,5	1 119,9	10 545,5	-6 386,9	20 138,6	50 974,6
5.	Ekspor Barang dan Jasa	61,3	1 354,3	1 776,3	19 847,0	26 015,5	88 230,9	134 707,2	569 490,3	664 463,3
6.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	62,3	1 315,6	2 749,2	19 625,9	16 504,2	78 383,0	132 400,7	423 317,9	542 040,6
7.	PRODUK DOMESTIK BRUTO	496,9	6 753,4	9 471,2	77 622,8	99 981,4	329 775,8	376 374,9	1 389 770,2	1 660 578,8
8.	Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	- 4,2	- 245,7	- 513,8	-3 283,1	-3 481,7	-12 552,6	-27 965,4	-92 133,2	-80 468,1
9.	PRODUK NASIONAL BRUTO	492,7	6 507,7	8 957,4	74 339,7	96 499,7	317 223,2	348 409,5	1 297 637,0	1 580 110,7
10.	Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	30,3	328,0	460,0	2 450,8	6 356,1	21 128,1	1 858,9	-37 741,1	46 040,6
11.	Dikurangi Penyusutan	29,3	439,0	615,6	3 881,1	4 996,2	16 488,8	18 818,7	69 488,5	83 028,9
12.	PENDAPATAN NASIONAL	433,1	5 740,7	7 881,8	68 007,8	85 147,4	279 606,3	327 371,9	1 265 889,6	1 451 041,1

Catatan : <sup>1)</sup> Termasuk perubahan stok

<sup>2)</sup> Menggunakan tahun dasar 1960

<sup>3)</sup> Menggunakan tahun dasar 1973

<sup>4)</sup> Menggunakan tahun dasar 1983

<sup>5)</sup> Menggunakan tahun dasar 1993

<sup>6)</sup> Menggunakan tahun dasar 2000

dengan pertumbuhan PMTB juga mulai lambat, bahkan tahun 1984 pertumbuhannya negatif sebesar 6,0 persen. Pemerintah mulai mendorong investasi dari pihak swasta untuk menggantikan sumber dari penerimaan migas. Pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa juga mengalami perubahan yang drastis, ekspor turun -13,9 persen dan -7,8 persen tahun 1985 yang tidak lagi bertumpu dari migas. Sebaliknya impor juga tumbuh negatif 7,5 persen tahun 1984.

Pada tahun 1986-1989 masa *recovery* atau pemulihan kembali kepada keadaan *oil boom*, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, mulai naik kembali. Tahun 1989 pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,2 persen, dan pengeluaran pemerintah sebesar 10,5 persen, walaupun sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 persen tahun 1987. Pertumbuhan PMTB pada masa ini juga semakin lama semakin meningkat dari 9,2 persen tahun 1986 menjadi 13,4 persen tahun 1989. Pertumbuhan PMTB swasta masih tetap tinggi pada periode ini, terutama investasi di bidang nonmigas. Ekspor dan impor barang dan jasa

pada waktu ini juga menyamai pertumbuhan semasa periode *oil boom* yaitu masing-masing sebesar 10,4 persen dan 13,4 persen tahun 1989. Periode ditandai dengan kontribusi ekspor nonmigas semakin meningkat dibandingkan nonmigas.

Periode tahun 1990-1996 disebut juga dengan fase *non oil boom*. Peranan nonmigas sangat dominan dibandingkan dengan migas. Pada masa ini pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1990 dan 1995 mencapai sebesar 9,9 dan 12,6 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah tidak secepat pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga, karena sudah semakin berperannya swasta pada waktu itu. Tahun 1991 dan 1992 masing-masing sebesar 7,0 dan 5,8 persen pada puncaknya dan semakin menurun pada tahun-tahun selanjutnya. PMTB pertumbuhannya juga semakin tinggi, 14,6 persen pada tahun 1990, kemudian sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya, lalu meningkat lagi pada tahun 1994-1996 diatas 13 persen. Pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa pada waktu ini juga cukup tinggi, tetapi pertumbuhan impor lebih besar dari ekspor.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik dan

**Tabel 3.1.6**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan**

No.	Jenis Penggunaan	1968	1973 <sup>2)</sup>	1978	1983 <sup>2)</sup>	1988	1993 <sup>2)</sup>	1998	2000 <sup>2)</sup>	2004 <sup>2)</sup>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	88,4	71,6	65,59	60,6	57,0	58,5	67,8	61,7	66,5
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,5	10,8	12,10	10,4	9,0	9,0	5,7	6,5	8,2
3.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,8	18,3	21,3	25,1	25,9	26,3	25,4	19,9	21,0
4.	Perubahan Stok	--	--	--	3,6	5,6	3,2	- 8,7	1,5	0,3
5.	Ekspor Barang dan Jasa	10,9	18,0	21,8	25,6	24,4	26,8	53,0	41,0	30,9
6.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	15,6	18,8	20,8	25,3	21,9	23,8	43,2	30,5	26,9
7.	PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

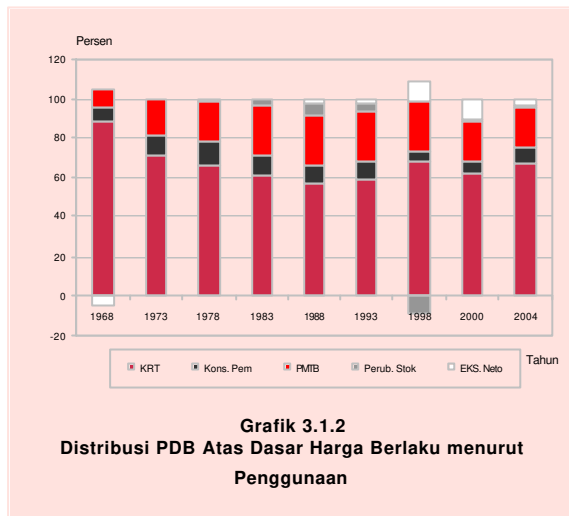
Catatan : 1) Termasuk perubahan stok

2) Dilakukan penyempurnaan penghitungan bersamaan dengan penggeseran tahun dasar.

sosial tahun 1998, merupakan krisis ekonomi terparah yang pernah dialami oleh Indonesia. Pertumbuhan semua komponen PDB penggunaan utamanya tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh negati 6,2 persen walaupun tahun 1997 sempat tumbuh sebesar 7,8 persen dan 3,1 persen tahun 1999. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga tumbuh negatif 15,4 persen, yang pada tahun 1997 dan 1999 juga hanya tumbuh 0,1 dan 0,7 persen. PMTB mengalami pertumbuhan negatif tidak hanya pada tahun 1998 tetapi juga pada tahun 1999 masing-masing sebesar 33,0 dan 16,7 persen. Padahal tahun 1997 masih tumbuh sebesar 8,6 persen. Hanya ekspor barang dan jasa yang masih tumbuh positif karena didorong oleh terdepresiasi mata uang rupiah terhadap US dolar, sebesar 11,2 persen. Tahun 1997 ekspor barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,8 persen, tetapi tahun 1999 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 31,8 persen. Sementara impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 dan 1999 masing-masing sebesar 5,3 dan 38,3 persen, tetapi tahun sebelumnya tahun 1997 masih tumbuh positif 14,7 persen.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga

pada masa *recovery* kedua dan kebangkitan kembali perekonomian Indonesia tahun 2000-2004 bertumbuh sebesar 3-4 persen. Mulai tahun 2000 sampai dengan 2004 angkanya semakin naik, 3,1 persen tahun 2000 menjadi 4,9 persen tahun 2004. Sampai dengan triwulan I 2005 tumbuh sebesar 3,2 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi semakin mengecil bila dibandingkan antar tahun 2000-2004. Sebesar 6,5 persen tahun 2000 menjadi 2,0 persen tahun 2004. Triwulan I 2005 bertumbuh negatif 8,5 persen, dikarenakan belum normalnya pencairan anggaran pemerintah sampai saat itu. PMTB bertumbuh cukup bagus mulai sebesar 14,2 persen tahun 2000 menjadi 15,7 persen tahun 2004. Hal ini mengindikasikan sudah mulai kembali Bergeraknya roda investasi yang pada masa sebelumnya sewaktu krisis ekonomi sempat mandek dan berhenti. Pada triwulan I 2005 PMTB pertumbuhannya sebesar 15,0 persen terhadap triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa juga semakin membaik, walaupun sempat mengalami stagnasi dan pertumbuhan negatif tahun 2001 dan 2002 sebesar 0,6 dan 1,2, tetapi kemudian memberikan pertumbuhan yang tinggi tahun 2000 sebesar 26,5 persen dan 8,5 persen tahun 2004. Tahun 2005 triwulan I tumbuh sebesar 13,4 persen. Begitu pula dengan impor barang



dan jasa memberikan pertumbuhan sebesar 21,1 persen tahun 2000 serta menjadi 25,0 persen tahun 2004, tetapi sempat bertumbuh negatif sebesar 4,3 persen tahun 2002. Pada triwulan I 2005 sebesar 15,4 persen.

#### b. Struktur Perekonomian Menurut Komponen Penggunaan

Pada masa 1960-1968 lebih banyak digunakan untuk pengeluaran konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah masing-masing tertinggi 96,0 persen tahun 1966 dan 11,8 tahun 1961. Sedangkan persentase terendah masing-masing tahun 1960 sebesar 79,8 persen dan 5,6 persen tahun 1965. Sementara investasi atau PMTB yang terjadi tertinggi sebesar 12,1 persen tahun 1964 dan terendah tahun 1966 sebesar 4,5 persen. Untuk ekspor dan impor barang dan jasa kontribusi ekspor tertinggi terjadi pada tahun 1960 sebesar 13,3 persen dan terendah sebesar 5,3 persen tahun 1965 serta kontribusi impor tertinggi terjadi tahun 1966 sebesar 22,1 persen dan terendah sebesar 5,7 persen tahun 1965.

Pada awal pelaksanaan Pelita 1969-1975 kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga mulai menurun dibandingkan dengan pada masa Orde Lama. Dari sebesar 86,8 persen tahun 1969 menjadi 69,2 persen tahun 1975. Begitu pula dengan pengeluaran konsumsi pemerintah mulai stabil pada angka tertinggi sebesar 10,8 persen tahun 1973 dan terendah tahun 1969 sebesar

7,3 persen. Tetapi terjadi lonjakan yang besar terhadap kontribusi PMTB dari 13,70 tahun 1970 yang merupakan persentase terendah menjadi 20,3 persen tahun 1975. Kontribusi ekspor barang dan jasa juga meningkat dari 9,0 persen tahun 1969 (terendah) menjadi 29,0 tahun 1974 (tertinggi). Begitu juga dengan impor barang dan jasa dari yang terendah sebesar 14,8 persen tahun 1969 menjadi 22,0 tertinggi tahun 1975.

Pada masa *oil boom* tahun 1976-1981 kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga semakin menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yaitu terendah sebesar 60,5 persen tahun 1980 dan tertinggi sebesar 67,7 persen tahun 1976. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode ini terbesar 12,1 persen tahun 1978 dan terkecil 10,3 persen tahun 1976. Kontribusi PMTB juga naik dari yang terendah 20,1 persen tahun 1977 menjadi 21,4 persen tertinggi tahun 1981. Kontribusi ekspor barang dan jasa juga naik dari terkecil sebesar 21,8 tahun 1978 menjadi tertinggi sebesar 30,5 persen tahun 1980. Begitu juga dengan impor sebesar 20,1 persen tahun 1977 yang merupakan persentase terendah menjadi 25,6 persentase tertinggi tahun 1981.

Tahun 1982-1985 masa transisi dari migas ke nonmigas kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga semakin menurun dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Dari tertinggi sebesar 69,9 persen tahun 1982 menjadi terendah 59,0 persen tahun 1985. Distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah cukup stabil pada 10,2 persen terendah tahun 1984 menjadi 11,2 persen tertinggi tahun 1985. PMTB kontribusinya juga bertambah dari tertinggi tahun 1983 sebesar 25,1 persen dan terendah tahun 1984 sebesar 22,4 persen. Ekspor dan impor barang dan jasa kontribusinya tertinggi masing-masing sebesar 25,6 tahun 1984 dan 25,3 persen tahun 1983. Dan terendah masing-masing sebesar 22,2 dan 20,5 persen tahun 1985.

Tahun 1986-1989 masa pemulihan dari masa ketergantungan dari migas kepada nonmigas, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga semakin kecil yaitu dari sebesar 61,7 persen tahun 1986



yang merupakan persentase tertinggi menjadi 53,1 persen tahun 1989 sebagai persentase terendah. Begitu juga dengan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah juga semakin kecil dari 11,2 persen (tertinggi) tahun 1986 dan sebesar 9,0 persen (terendah) tahun 1988. PMTB kontribusinya semakin naik dari 24,1 persen tahun 1986 terendah menjadi 27,3 persen tahun 1989 tertinggi. Kontribusi ekspor dan impor barang dan jasa sedikit bertambah dari 19,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 25,5 persen tahun 1989 tertinggi untuk ekspor, serta dari 20,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 23,1 persen tertinggi untuk impor, walaupun sempat menurun sedikit tahun 1988 sebesar 21,5 persen.

Masa ketergantungan terhadap nonmigas tahun 1990-1996 kontribusi pengeluaran rumah tangga agak sedikit naik, walaupun pada tahun 1990-1993 sempat turun sedikit, yaitu dari yang terendah sebesar 52,3 persen tahun 1992 menjadi 62,4 persen tahun 1996. Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah semakin kecil, dari yang tertinggi sebesar 9,9 persen tahun 1993 menjadi terendah 7,6 persen tahun 1996. Sementara kontribusi PMTB semakin naik dari yang terendah sebesar 25,9 persen tahun 1993 menjadi yang tertinggi sebesar 29,6 persen tahun 1996. Begitu juga dengan ekspor secara perlahan juga menunjukkan perubahan kontribusi yang berkurang dari yang tertinggi sebesar 29,4 persen tahun 1992 menjadi yang terendah sebesar 25,8 persen tahun 1996. Begitu juga dengan kontribusi impor dari yang tertinggi sebesar 27,1 persen tahun 1992 menjadi terendah sebesar 25,4 persen tahun 1994.

Pada masa krisis perekonomian tahun 1997-1999 persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB semakin naik yaitu dari 61,8 persen tahun

1997 menjadi 76,2 persen tahun 1999. Persentase pengeluaran pemerintah juga begitu dari 6,8 persen tahun 1997 menjadi 5,7 persen tahun 1998, tetapi naik kembali sebesar 6,6 persen tahun 1999. Pembentukan modal tetap bruto memberikan persentase yang semakin turun dari 28,3 persen tahun 1997 menjadi 20,6 persen tahun 1999. Sebaliknya ekspor dan impor barang dan jasa terutama pada tahun 1998 persentasenya sempat naik tinggi dari 27,9 tahun 1997 menjadi 53,0 persen serta dari 28,1 tahun 1997 menjadi 43,2 persen. Tahun 1999 persentase keduanya menurun kembali masing-masing sebesar 35,5 dan 28,5 persen.

Tahun 2000-2004 dalam masa pemulihan ekonomi kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga naik kembali dari 61,7 persen tahun 2000 menjadi 66,5 persen tahun 2004. Triwulan I 2005 persentase ini sebesar 65,1 persen. Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah yang sempat menurun tahun-tahun sebelumnya pada masa pemulihan ekonomi ini agak naik sedikit dari sebesar 6,5 persen tahun 2000 menjadi 8,2 persen tahun 2004. Pada triwulan I 2005 kontribusi ini sebesar 6,6 persen. PMTB kontribusinya masih belum sebesar masa-masa sebelum pemulihan ekonomi yang biasanya di atas 20 persen, yaitu dari 19,9 persen tahun 2000 menjadi 21,0 persen, bahkan tahun 2003 hanya sebesar 18,9 persen. Triwulan I 2005 kontribusi PMTB sebesar 21,4 persen. Kontribusi ekspor barang dan jasa yang tadinya sebesar 41,0 persen tahun 2000 menurun menjadi 30,9 persen. Triwulan I 2005 kontribusinya sebesar 31,59 persen. Begitu pula dengan kontribusi impor barang dan jasa juga menurun dari 30,5 persen tahun 2000 menjadi 26,9 persen tahun 2004. Pada triwulan I 2005 persentase ini sebesar 27,6 persen.











# **PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN**

## 3.2 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

### RINGKASAN

Dari hasil Sensus Pertanian selama empat dekade terakhir diketahui bahwa jumlah rumah tangga pertanian meningkat pesat. Namun rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian pengguna lahan di Indonesia menurun dari 1,1 hektar pada tahun 1963 menjadi 0,8 hektar pada tahun 2003. Jumlah rumah tangga petani gurem juga meningkat pesat dari 5,3 juta rumah tangga pada tahun 1963 menjadi 13,2 pada tahun 2003. Produksi padi dari tahun 1973-2004 pada umumnya meningkat. Produksi padi tahun 2004 tercatat 54,1 juta ton, merupakan swasembada ke dua yang dicapai Indonesia setelah swasembada tahun 1984 dimana produksi saat itu mencapai 38,1 juta ton. Produksi padi di Indonesia didominasi oleh padi sawah dengan sumbangan sekitar 90 persen. Produksi jagung, kedelai dan kacang tanah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, sedangkan produksi ubi kayu dan ubi jalar dari tahun 1968-2004 berfluktuasi, kadang-kadang menurun dan adakalanya meningkat dengan tajam.

Produksi tanaman sayuran yaitu bawang merah, cabe dan kentang terus meningkat walaupun relatif kecil yaitu sekitar 5,1 persen per tahun. Tanaman buah-buahan yang potensial dan memberikan kontribusi besar terhadap total produksi buah-buahan nasional adalah jeruk, mangga, pisang, pepaya, nenas dan salak. Tanaman hias yang potensial adalah anggrek, mawar dan sedap malam, sedangkan tanaman biofarmaka (tanaman obat) yang paling potensi adalah jahe, laos/lengkoas dan kunyit.

Dari tahun 1983, 1993 dan 2003 populasi ternak dan jumlah rumah tangga peternak, rata-rata mengalami penurunan kecuali populasi babi dan kambing/domba meningkat. Sementara produksi daging, telur dan susu dari tahun 1969-2004 pada umumnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1998 menunjukkan penurunan yang tajam. Hal ini diduga merupakan dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak akhir 1997, akan tetapi mulai tahun 2000 kembali meningkat.

Perkembangan produksi perkebunan selama periode 1973-2003 terus meningkat. Pada periode 1998-2003 peningkatan yang cukup besar terjadi pada tanaman kelapa sawit (65,5 persen) dan kopi (33,4 persen), sementara tanaman lainnya meningkat sekitar 0,8 – 27,6 persen. Pada tahun 2004 diperkirakan produksi tanaman perkebunan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003 sekitar 1,0 sampai 23,6 persen

Kayu bulat sebagai produksi utama hasil hutan cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi pada periode 1983/1984-1988/1989 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Selanjutnya sampai dengan tahun 2003 produksi kayu bulat terus menurun. Produksi kayu gergajian yang merupakan produksi turunan dari kayu bulat atau biasa disebut kayu olahan menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat selama periode 1978-2004.

### SUMMARY

*During the 60 years of Indonesian independence, economic structure of Indonesia has shifted from agriculture to industry. Nevertheless, agriculture still plays an important role in the development of Indonesia economy.*

*In the last 4 decades, the numbers of agriculture households are doubled, in line with population growth, where in 1963 the numbers of agriculture households are 12.2 million, become 24.9 million in 2003. On the other hand, average of land occupied by agriculture household is decrease from 1.1 ha in 1963 to 0.8 ha in 2003. Meanwhile the numbers of landless are increase significantly from 5.3 million in 1963 to 13.2 million in 2003.*

*In the period of 1973-2004 productions of paddy are increase. In 2004 the productions of paddy are 54.1 million tons, and it is the second self sufficient paddy productions, after the first in 1984, where the paddy productions are 38.1 million tons. Paddy productions are dominated by paddy from paddy fields. Productions of maize, soybean, and peanut are also increase, while in the period of 1968-2004, productions of cassava and sweet potatoes are fluctuated. Shallots, chili, and potatoes are prominently vegetables products, while fruits products which give significant contribution to total fruits products are orange, mango, banana, papaya, pineapple, and zallaca. Flowers plant products are dominated by orchid, rose, and tuberose, while ginger, galingale, and turmeric are the main products of medicine plants.*

*Since 1983 to 2003, livestock population and livestock household are decrease except for pig, goat, and sheep. Production of meats, eggs, and milk are increase except for the condition in 1998 as an impact of economic crisis in 1997.*

*In general the productions of estate crops are increase in the period of 1973-2003, and oil palm is significantly increase by 65.5 percent in the period of 1998-2003.*

*Production of logs, sawn wood, and plywood tend to decrease in the period of 1978-1983, but its increase in 1983/1984-1988/1989. As an archipelago, production of fish in the period of 1968-2002 is still dominated by marine fisheries, which in 2002, is more than 75 percent.*

### 3.2.1 Perkembangan Rumah Tangga Pertanian dan Luas Lahan yang Dikuasai

#### a. Rumah Tangga Pertanian

Selama 4 dekade terakhir, jumlah rumah tangga pertanian meningkat pesat yaitu dari 12,2 juta pada tahun 1963 menjadi 24,9 juta pada tahun 2003 atau meningkat sekitar 103,2 persen. Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian terjadi baik di Jawa maupun di Luar Jawa. Di Jawa naik dari 7,9 juta pada tahun 1963 menjadi 13,6 juta pada tahun 2003 atau meningkat 71,2 persen, sedangkan di Luar Jawa naik dari 4,3 juta pada tahun 1963 menjadi 11,3 juta pada tahun 2003 atau meningkat 162,4 persen dalam periode yang sama.

Laju pertumbuhan jumlah rumah tangga pertanian

**Tabel 3.2.1**  
Rumah Tangga Pertanian dan Laju Pertumbuhannya

Tahun	Jawa		Luar Jawa		Indonesia	
	Rumah Tangga Pertanian (ribu)	Laju Pertumbuhan (%)	Rumah Tangga Pertanian (ribu)	Laju Pertumbuhan (%)	Rumah Tangga Pertanian (ribu)	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1963	7 935	-	4 301 <sup>1)</sup>	-	12 236 <sup>2)</sup>	-
1973	8 664	0,9	5 709 <sup>1)</sup>	2,9	14 373 <sup>2)</sup>	1,6
1983	11 568	2,9	7 937	3,4	19 505	3,1
1993	11 672	0,1	9 160	1,4	20 832	0,7
2003	13 583	1,5	11 286	2,1	24 869	1,8

Keterangan : 1) Tanpa Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya  
2) Tanpa Irian jaya



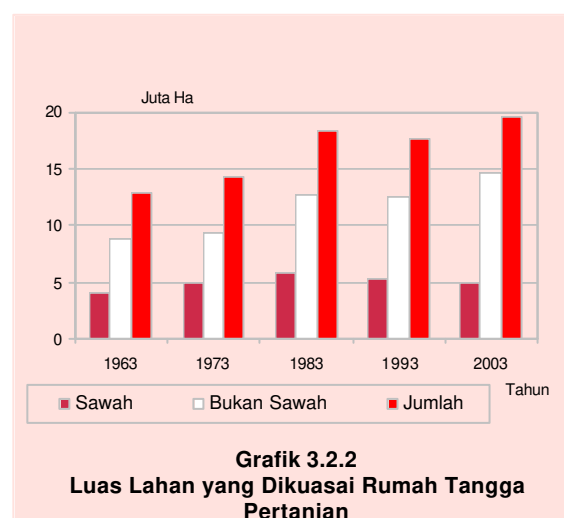
per tahun antar Sensus Pertanian (ST) nampak bervariasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode ST73 -ST83 dengan pertumbuhan per tahun mencapai 3,1 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada periode ST83-ST93 yang hanya tumbuh 0,7 persen per tahun.

#### b. Luas Lahan yang Dikuasai

Selama periode 1963-1983 luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga pertanian pengguna lahan meningkat dari 12,9 juta hektar menjadi 18,3 juta hektar atau meningkat 42 persen lebih. Dalam periode 1983-1993 luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga

**Tabel 3.2.2**  
Luas dan Penggunaan Lahan yang dikuasai Rumah Tangga Pertanian dan Laju Pertumbuhannya

Tahun	Sawah		Bukan Sawah		Jumlah	
	Lahan Pertanian (ribu ha)	Laju Pertumbuhan (%)	Lahan Pertanian (ribu ha)	Laju Pertumbuhan (%)	Lahan Pertanian (ribu ha)	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1963	4 075	-	8 809	-	12 884	-
1973	4 840	1,7	9 328	0,6	14 168	0,9
1983	5 717	1,7	12 533	3,1	18 350	2,6
1993	5 248	-0,8	12 417	-0,2	17 665	-0,4
2003	5 023	-0,4	14 551	1,7	19 674	1,1





pertanian mengalami penurunan.

Luas lahan tahun 1993 mengalami penurunan sekitar 0,7 juta hektar dibandingkan dengan tahun 1983. Tahun 1993-2003 luas lahan kembali mengalami kenaikan sekitar 2,0 juta hektar. Dilihat dari jenis lahannya, luas lahan sawah yang dikuasai menurun pada periode 1983-2003. Penurunan luas lahan sawah ini menunjukkan adanya alih fungsi (konversi) lahan sawah menjadi lahan bukan sawah selama 20 tahun terakhir.

**c. Rata-rata Luas Penguasaan Lahan**

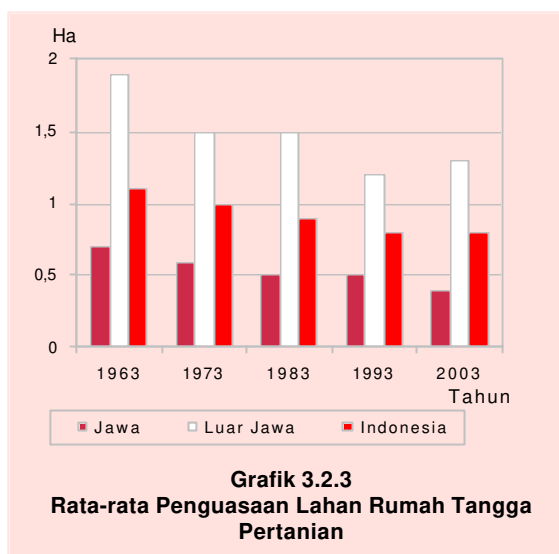
Rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian pengguna lahan di Indonesia pada 1963 sebesar 1,1 hektar, sedangkan pada 2003 menurun menjadi 0,8 hektar. Penurunan rata-rata penguasaan

**Tabel 3.2.3**  
**Rata-rata Penguasaan Lahan Rumah Tangga Pertanian**

Tahun	Jawa		Luar Jawa		Indonesia	
	Lahan Yang Dikuasai (hektar)	Naik/ Turun (%)	Lahan Yang Dikuasai (hektar)	Naik/ Turun (%)	Lahan Yang Dikuasai (hektar)	Naik/ Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1963	0,7	-	1,9	-	1,1	-
1973	0,6	-14,3	1,5	-21,0	1,0	-9,1
1983	0,5	-16,7	1,5	0,0	0,9	-10,0
1993	0,5	0,0	1,2	-20,0	0,8	-11,1
2003	0,4	-20,0	1,3	8,3	0,8	0,0

lahan per rumah tangga ini terjadi baik di Jawa maupun Luar Jawa.

Data hasil ST73, ST83 dan ST93 menunjukkan bahwa secara nasional terjadi penurunan rata-rata luas lahan yang dikuasai berturut-turut 9,1 persen; 10,0 persen dan 11,1 persen. Data hasil ST03 menunjukkan tidak terjadi penurunan secara nasional, tetapi terjadi penurunan di Jawa 20,0 persen dan sebaliknya di Luar Jawa naik 8,3 persen.



**d. Rumah Tangga Petani Gurem**

Rumahtangga petani gurem adalah rumahtangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Menurut hasil Sensus Pertanian, jumlah rumah tangga petani gurem terus mengalami peningkatan dari tahun 1963, 1973, 1983, 1993 dan 2003. Rumah tangga petani gurem pada tahun 1963 berjumlah 5,3 juta rumah tangga, pada tahun 1973 naik menjadi 6,6 juta rumah tangga. Jumlah tersebut terus bertambah yaitu dari 9,5 juta rumah tangga pada tahun 1983 menjadi 10,9 juta rumah tangga pada tahun 1993 dan 13,2 juta rumah tangga pada tahun 2003. Kenaikan

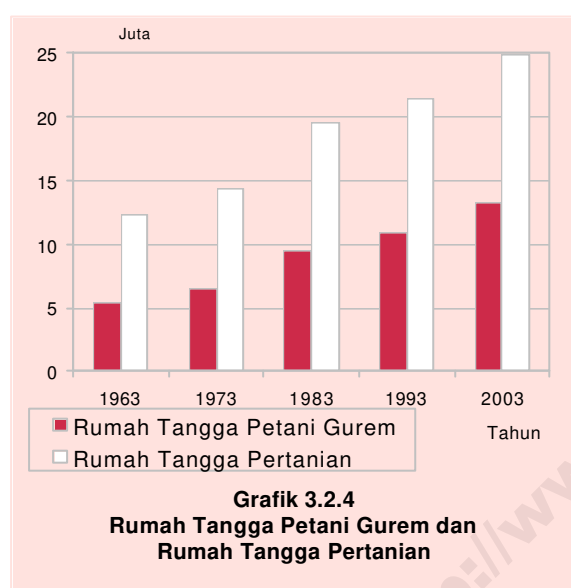
**Tabel 3.2.4**  
**Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Petani Gurem**

Tahun	Rumah Tangga Pertanian (ribu)	Rumah Tangga Petani Gurem	
		Jumlah (ribu)	Persen tase
(1)	(2)	(3)	(4)
1963	12 236 <sup>1)</sup>	5 332 <sup>1)</sup>	43,6
1973	14 373 <sup>2)</sup>	6 561 <sup>2)</sup>	45,6
1983	19 505	9 536	48,9
1993	21 482	10 906	50,8
2003	24 869	13 253	53,3

Keterangan : <sup>1)</sup> Tanpa Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya  
<sup>2)</sup> Tanpa Timor Timur dan Irian Jaya

paling mencolok terjadi pada tahun 1983, yaitu naik sekitar 45,3 persen terhadap tahun 1973.

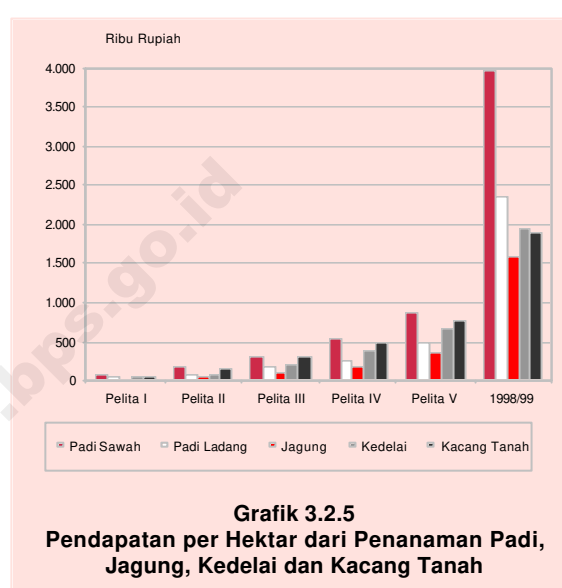
Apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pertanian secara keseluruhan, persentase rumah tangga petani gurem terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1963, persentase tersebut sebesar 43,6 persen, meningkat menjadi 45,6 persen pada tahun 1973. Sedangkan untuk tahun 1983, 1993 dan 2003 persentase tersebut masing-masing 48,9 persen; 50,8 persen dan 53,3 persen.



### 3.2.2 Perkembangan Pendapatan Per Hektar

#### a. Tanaman Padi, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai

Perkembangan pendapatan petani per hektar dari budidaya tanaman padi, jagung, kedelai dan kacang tanah dari Pelita I sampai Pelita V pada pembangunan jangka panjang tahap I (PJP I) dan tahun 1994-1998/1999 menunjukkan perkembangan yang positif.



Tabel 3.2.5 Rata-rata Pendapatan dari Penanaman Padi, Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah (000 Rp)

Periode	Padi Sawah		Padi Ladang		Jagung		Kedelai		Kacang Tanah	
	Pendapatan	Naik/Turun (%)	Pendapatan	Naik/Turun (%)	Pendapatan	Naik/Turun (%)	Pendapatan	Naik/Turun (%)	Pendapatan	Naik/Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelita I	68,6	-	34,5	-	14,7	-	34,3	-	35,1	-
Pelita II	160,8	134,4	78,2	126,7	46,0	212,9	88,9	159,2	144,7	312,3
Pelita III	315,4	96,1	154,0	96,9	102,4	122,6	196,4	120,9	313,2	116,4
Pelita IV	531,9	68,6	245,9	59,7	186,8	82,4	360,4	83,5	470,7	50,3
Pelita V	864,5	62,5	493,8	100,8	350,4	87,6	653,1	81,2	761,8	61,8
1994	1 073,9	24,2	574,9	16,4	436,0	24,4	764,6	17,1	835,5	9,7
1995	1 360,6	26,7	721,3	25,5	533,2	22,3	821,7	7,5	989,6	18,4
1996	1 440,3	5,9	824,9	14,4	707,9	32,8	924,8	12,5	1 128,0	14,0
1998-1999	3 963,7	175,2	2 360,8	186,2	1 587,0	124,2	1 953,9	111,3	1 888,2	67,4

Keterangan : Data tahun 1997 tidak tersedia

Bila dilihat besarnya pendapatan per hektar selama periode tersebut, budidaya tanaman padi sawah secara absolut memberikan pendapatan per hektar yang paling besar dibandingkan dengan tanaman lainnya. Pendapatan per hektar yang paling kecil adalah budidaya tanaman jagung.

**b. Tanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar**

Pendapatan per hektar dari budidaya tanaman ubi kayu dan ubi jalar dari Pelita I sampai Pelita V dan tahun 1994-1998/1999 terus menunjukkan kenaikan. Namun demikian sampai tahun 1996, kecenderungan besarnya persentase kenaikannya semakin kecil. Kemudian baru tahun 1998/1999 terjadi kenaikan yang cukup besar, terutama untuk ubi jalar. Secara absolut besarnya pendapatan per hektar ubi jalar nampak lebih tinggi dibanding dengan ubi kayu.

**Tabel 3.2.6**  
Rata-rata Pendapatan dari Penanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar (000 Rp)

Periode	Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Pendapatan	Naik/Turun (%)	Pendapatan	Naik/Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelita I	51,0	-	46,4	-
Pelita II	138,6	171,8	139,5	200,6
Pelita III	277,4	100,1	310,0	122,2
Pelita IV	428,0	54,3	519,7	67,6
Pelita V	754,8	76,4	875,3	68,4
1994	921,4	22,1	1 248,1	42,6
1995	1 511,8	64,1	1 775,5	42,3
1996	1 813,3	19,9	2 011,4	13,3
1998-1999	2 371,5	30,8	3 443,8	71,2

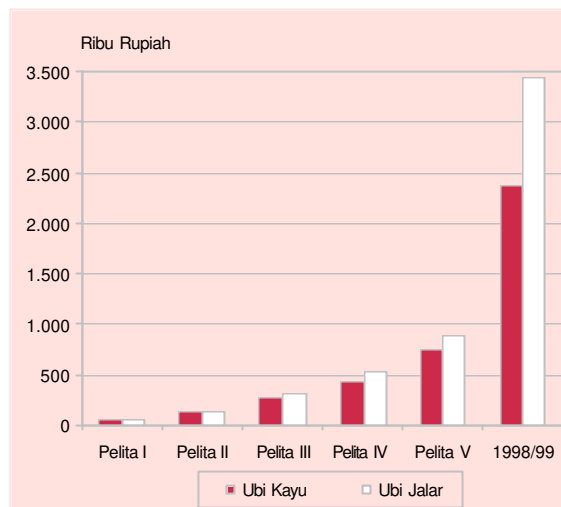
Keterangan : Data tahun 1997 tidak tersedia

**3.2.3 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan**

**a. Tanaman Padi**

**i). Produksi**

Produksi padi dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2004 untuk periode lima tahunan pada umumnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 1978 lebih



**Grafik 3.2.6**  
Pendapatan per Hektar dari Penanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar

rendah dari tahun 1973. Produksi padi sawah pada tahun 1993 (akhir Pelita V) mencapai 45,6 juta ton atau meningkat 16,0 persen dibanding tahun 1988 (akhir Pelita IV). Sedangkan produksi padi ladang pada tahun 1993 meningkat 8,3 persen dibandingkan tahun 1988 atau meningkat dari 2,4 juta ton menjadi 2,6 juta ton. Sementara itu pada tahun 2004 menunjukkan bahwa produksi padi mencapai angka 54,1 juta ton, atau meningkat 3,7 persen dari produksi tahun sebelumnya. Produksi padi tahun 2004 merupakan swasembada kedua yang dicapai Indonesia setelah swasembada

**Tabel 3.2.7**  
Produksi Padi

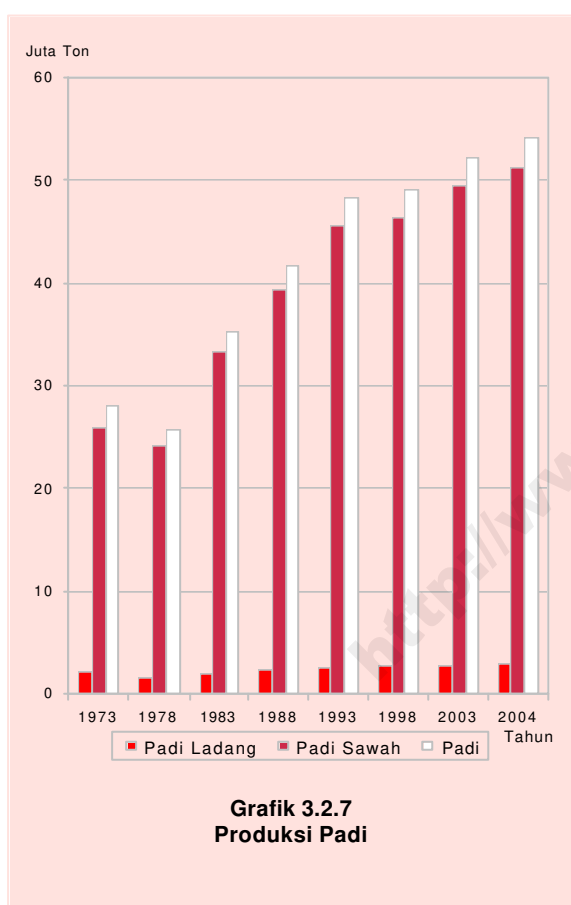
Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang		Padi	
	Produksi (Juta Ton GKG)	Naik/Turun (%)	Produksi (Juta ton GKG)	Naik/Turun (%)	Produksi (Juta ton GKG)	Naik/Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1973	25,9	-	2,2	-	28,1	-
1978	24,2	-6,6	1,6	-27,3	25,8	-8,2
1983	33,3	37,6	2,0	25,0	35,3	36,8
1988	39,3	18,0	2,4	20,0	41,7	18,1
1993	45,6	16,0	2,6	8,3	48,2	15,6
1998	46,5	2,0	2,7	3,8	49,2	2,1
2003	49,4	6,2	2,7	0,0	52,1	5,9
2004	51,2	3,7	2,9	4,3	54,1	3,7

Keterangan : GKG = Gabah Kering Giling



tahun 1984 dan produksi saat itu mencapai 38,1 juta ton.

Dilihat dari persentase kenaikan produksi setiap lima tahunan, nampak bahwa pada tahun 1983 menunjukkan persentase kenaikan tertinggi yaitu mencapai 36,8 persen, sedangkan persentase kenaikan terendah pada tahun 1998 yaitu hanya 2,1 persen. Secara persentase, produksi padi di Indonesia didominasi oleh produksi padi sawah dengan sumbangan sekitar 90 persen lebih.



**ii). Luas Panen**

Luas panen padi dari tahun 1973 sampai 2004, untuk periode lima tahunan umumnya meningkat terus kecuali pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 2,1 persen, penurunan terjadi pada luas panen padi sawah sebesar 0,8 persen dan luas panen padi ladang 12,8 persen. Penurunan luas panen padi ladang tidak hanya

**Tabel 3.2.8**  
**Luas Panen Padi**

Tahun	Padi Sawah*)		Padi Ladang		Padi	
	Luas Panen (Ribu Ha)	Naik/Turun (%)	Luas Panen (Ribu Ha)	Naik/Turun (%)	Luas Panen (Ribu Ha)	Naik/Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1973	7 064	-	1 340	-	8 404	-
1978	7 698	9,0	1 231	-8,1	8 929	6,2
1983	7 987	3,8	1 176	-4,5	9 163	2,6
1988	8 925	11,7	1 213	3,1	10 138	10,6
1993	9 807	9,9	1 206	-0,6	11 013	8,6
1998	10 476	6,8	1 255	4,1	11 731	6,5
2003	10 395	-0,8	1 094	-12,8	11 489	-2,1
2004	10 799	3,9	1 123	2,7	11 923	3,8

Keterangan : \*) Luas Bersih

terjadi pada tahun 2003, akan tetapi terjadi pula pada periode tahun 1978, 1983, 1993 sebesar 8,1 persen; 4,5 persen dan 0,6 persen.

Secara absolut luas panen padi meningkat dari 8,4 juta hektar pada tahun 1973 menjadi 11,9 juta hektar pada tahun 2004. Luas panen padi pada tahun 2004 sekitar 91 persen lebih merupakan luas panen padi sawah yaitu seluas 10,8 juta hektar, sedangkan luas panen padi ladang hanya seluas 1,1 juta hektar.



**b. Tanaman Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah.**

**i). Produksi**

Produksi jagung, kedelai, dan kacang tanah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan produksi terbesar terjadi pada tanaman kedelai, yaitu dari 419,9 ribu ton pada tahun 1968 (awal Pelita I) menjadi 1,3 juta ton pada tahun 1988 (akhir Pelita IV), sedangkan beberapa tahun sampai tahun 2004 cenderung mengalami penurunan. Peningkatan produksi terjadi juga pada tanaman jagung yaitu dari 3,2 juta ton pada awal Pelita I menjadi 6,7 juta ton pada akhir Pelita IV atau meningkat 110,1 persen. Produksi jagung selama kurun waktu 1988-2004 mengalami kenaikan yang cukup besar.

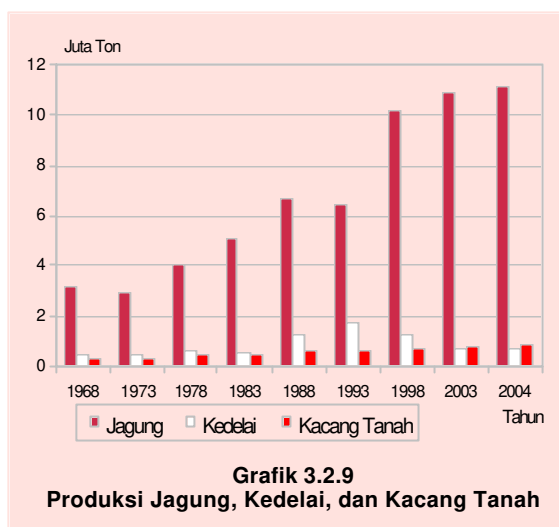
**Tabel 3.2.9**  
**Produksi Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah**

Tahun	Jagung		Kedelai		Kacang Tanah	
	Produksi (RibuTon)	Naik/ Turun (%)	Produksi (Ribu ton)	Naik/ Turun (%)	Produksi (Ribu ton)	Naik/ Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1968	3 166,0	-	419,9	-	286,7	-
1973	2 912,0	-8,0	446,2	6,3	303,5	5,9
1978	4 029,2	38,4	616,6	38,2	445,8	46,9
1983	5 086,9	26,3	536,1	-13,1	460,4	3,3
1988	6 651,9	30,8	1 270,4	137,0	589,3	28,0
1993	6 459,7	-2,9	1 708,5	34,5	638,7	8,4
1998	10 169,5	57,4	1 305,6	-23,6	692,4	8,4
2003	10 886,4	7,0	671,6	-48,6	785,5	13,4
2004	11 225,2	3,1	723,5	7,7	837,5	6,6

Keterangan : Bentuk produksi jagung = pipilan kering; kedelai dan kacang tanah = biji kering

**ii). Luas Panen**

Luas panen tanaman jagung, kedelai dan kacang tanah di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2004 agak berfluktuasi. Luas panen tanaman jagung dalam periode lima tahunan dari tahun 1968-2003 mengalami kenaikan pada tahun 1973, 1988 dan 1998 dan mengalami penurunan pada tahun 1978, 1993, 2003 dan 2004. Luas panen kedelai mengalami kenaikan dalam periode lima tahunan pada tahun 1973, 1988, 1993

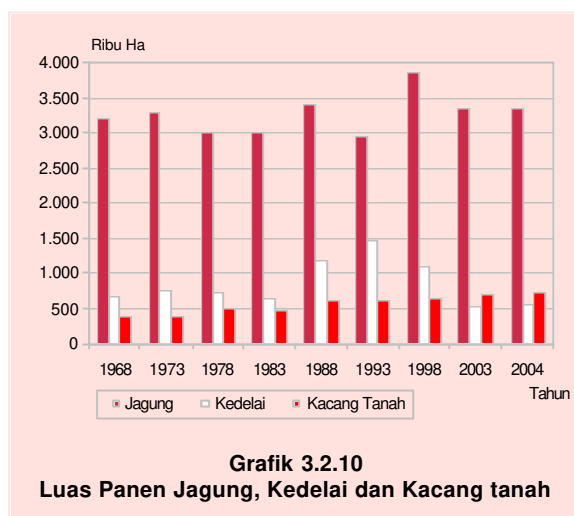


**Grafik 3.2.9**  
**Produksi Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah**

**Tabel 3.2.10**  
**Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah**

Tahun	Jagung		Kedelai		Kacang Tanah	
	Luas Panen (Ribu Ha)	Naik/ Turun (%)	Luas Panen (Ribu Ha)	Naik/ Turun (%)	Luas Panen (Ribu Ha)	Naik/ Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1968	3 220,0	-	676,9	-	394,6	-
1973	3 288,6	2,1	750,5	10,9	407,2	3,2
1978	3 024,6	-8,0	733,1	-2,3	506,4	24,4
1983	3 002,2	-0,7	639,9	-12,7	480,5	-5,1
1988	3 405,8	13,4	1 177,4	84,0	607,6	26,5
1993	2 939,5	-13,7	1 470,2	24,9	624,3	2,7
1998	3 847,8	30,9	1 095,1	-25,5	651,1	4,3
2003	3 358,5	-12,7	526,8	-51,9	683,5	5,0
2004	3 356,9	-0,1	565,2	7,3	723,4	5,8

Secara absolut, luas panen jagung tahun 1968 tercatat 3,2 juta hektar, meningkat menjadi 3,4 juta hektar pada tahun 2004 atau meningkat sekitar 4 persen lebih selama 36 tahun. Luas panen jagung tertinggi dicapai pada tahun 1998 yaitu 3,8 juta hektar. Luas panen kedelai tahun 1968 tercatat 676,9 ribu hektar, menurun menjadi 565,2 ribu hektar tahun 2004. Luas panen kedelai tertinggi dicapai tahun 1993 seluas 1,5 juta hektar.



Sedangkan luas panen kacang tanah tahun 1968 tercatat 394,6 ribu hektar dan cenderung meningkat terus hingga menjadi 723,4 ribu hektar tahun 2004.

### c. Tanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar

#### i). Produksi

Perkembangan produksi ubi kayu dan ubi jalar di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2004 dalam periode lima tahunan berfluktuasi. Kadang-kadang menurun dan adakalanya meningkat dengan tajam. Pada tahun 1968 produksi ubi kayu mencapai 11,4 juta ton, pada tahun 1973 turun menjadi 9,4 juta ton dan meningkat tajam menjadi 12,9 juta ton pada

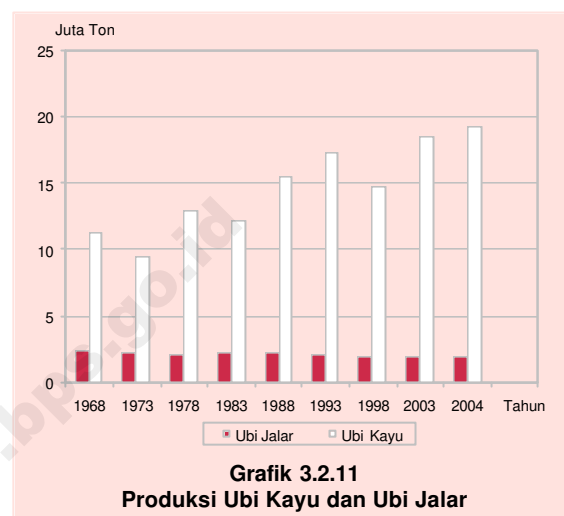
**Tabel 3.2.11**  
Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar (000 Ton)

Periode	Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Produksi	Naik/ Turun (%)	Produksi	Naik/ Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968	11 355,6	-	2 364,3	-
1973	9 399,2	-17,2	2 180,2	-7,8
1978	12 902,0	37,3	2 082,8	-4,5
1983	12 102,7	-6,2	2 213,0	6,3
1988	15 471,1	27,8	2 158,6	-2,5
1993	17 285,4	11,7	2 088,2	-3,3
1998	14 696,2	-15,0	1 935,0	-7,3
2003	18 523,8	26,0	1 991,5	2,9
2004	19 424,7	4,9	1 901,8	-4,5

Keterangan : Bentuk produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah umbi basah

tahun 1978. Pada tahun 2004 produksi ubi kayu mencapai 19,4 juta ton.

Produksi ubi jalar terus menerus menurun kecuali pada tahun 1983 dan 2003 meningkat. Dari 2,4 juta ton pada tahun 1968 turun menjadi 1,9 juta ton pada tahun 2004. Penurunan produksi ini akibat dari berkurangnya luas panen karena petani beralih menanam tanaman lainnya yang lebih menguntungkan, seperti kedelai dan jagung.



#### ii). Luas Panen

Luas panen tanaman ubi kayu selama tahun 1968-2004 dalam periode lima tahunan umumnya mengalami penurunan, sedangkan kenaikan terjadi pada tahun

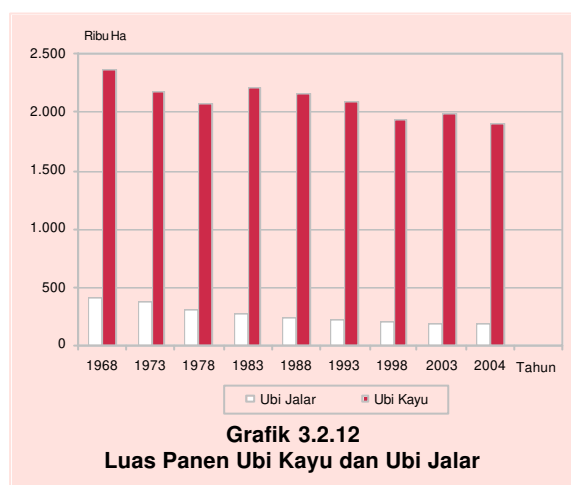
**Tabel 3.2.12**  
Luas Panen Ubi Kayu dan Ubi Jalar (000 Ha)

Periode	Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Luas Panen	Naik/ Turun (%)	Luas Panen	Naik/ Turun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968	1 503,4	-	403,9	-
1973	1 412,9	-6,0	375,1	-7,1
1978	1 382,9	-2,1	300,5	-19,9
1983	1 220,8	-11,7	280,2	-6,8
1988	1 302,6	6,7	247,8	-11,6
1993	1 401,6	7,6	224,1	-9,6
1998	1 205,3	-14,0	202,1	-9,8
2003	1 244,5	3,3	197,5	-2,3
2004	1 255,8	0,9	184,5	-6,5

Keterangan : Bentuk produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah umbi basah



1988,1993 dan 2003. Secara absolut, luas panen tanaman ubi kayu mengalami penurunan dari 1,5 juta hektar pada tahun 1968 menjadi 1,2 juta hektar pada tahun 2004. Sementara itu luas panen tanaman ubi jalar dari tahun 1968 sampai tahun 2004 untuk periode lima tahunan terus mengalami penurunan. Luas panen ubi jalar tahun 1968 seluas 403,9 ribu hektar menurun menjadi 184,5 ribu hektar pada tahun 2004.



### 3.2.4 Perkembangan Tanaman Hortikultura

#### a. Tanaman Bawang Merah, Cabe dan Kentang

Perkembangan sayuran di Indonesia per lima tahun sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 sangat berfluktuasi. Dari seluruh tanaman sayuran yang dilakukan survei sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2004, ada beberapa tanaman sayuran yang cukup potensial untuk dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas di antaranya adalah Bawang Merah, Cabe dan Kentang. Hal ini perlu dilakukan mengingat ketiga jenis sayuran ini menjadi kebutuhan konsumsi harian dari masyarakat maupun industri.

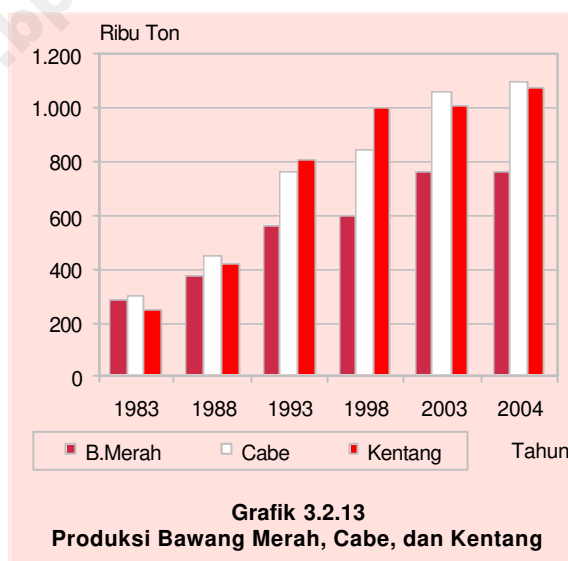
#### i). Produksi

Produksi bawang merah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2004 terus meningkat meskipun peningkatannya tidak terlalu tajam dengan rata-rata kenaikan sekitar 4,8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan maupun pengadaan bawang merah dari tahun ke tahun relatif konstan.

Tabel 3.2.13  
Produksi Bawang Merah, Cabe dan Kentang  
(000 Ton)

Tahun	Bawang Merah	Cabe	Kentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1983	283,8	295,8	250,0
1988	379,4	448,7	418,1
1993	561,3	762,3	809,4
1998	599,3	848,5	998,0
2003	762,8	1 066,7	1 010,0
2004	757,4	1 100,5	1 072,0

Produksi Cabe sejak tahun 1983 sampai tahun 2004 dalam periode lima tahunan menunjukkan peningkatan yang cukup bervariasi. Peningkatan tertinggi sekitar 70 persen yaitu dari 448,7 ribu ton pada tahun 1988 menjadi 762,3 ribu ton pada tahun 1993, selanjutnya produksi terus meningkat hingga mencapai 1,1 juta ton pada tahun 2004.



Produksi Kentang sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan produksi kentang tertinggi terjadi tahun 1993 terhadap tahun 1988 yaitu sebesar 391,3 ribu ton atau naik sekitar 93,6 persen. Angka produksi ini masih meningkat lagi pada tahun 1998 sebesar 188,6 ribu ton dan terus meningkat hingga mencapai 1,1 juta ton pada tahun 2004.

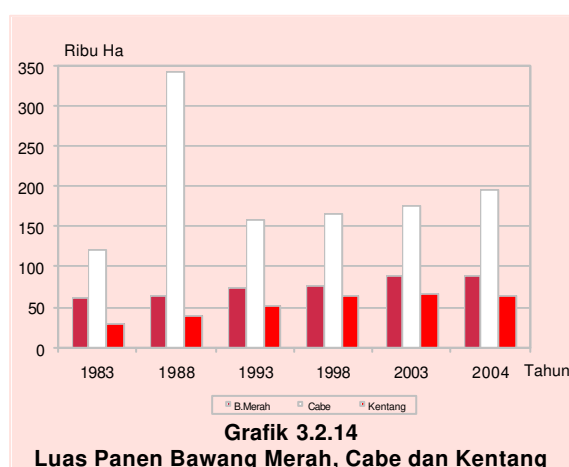
**ii). Luas panen**

Luas panen bawang merah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan antara 2 ribu sampai dengan 12 ribu hektar, dan mencapai 88,7 ribu hektar pada tahun 2004. Peningkatan ini relatif konstan mengingat luas panen yang terjadi dapat disebabkan oleh berubahnya pola tanam di masyarakat karena kemajuan teknologi.

**Tabel 3.2.14**  
**Luas Panen Bawang Merah, Cabe dan Kentang**  
**(000 Ha)**

Tahun	Bawang Merah	Cabe	Kentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1983	61,1	120,4	30,3
1988	63,3	341,0	39,0
1993	74,7	157,5	51,1
1998	76,5	164,9	65,0
2003	88,0	176,3	65,9
2004	88,7	194,6	65,4

Luas panen cabe pada tahun 1983 sebesar 120,4 ribu hektar sedangkan pada tahun 1988 luas panen cabe mencapai 341,0 ribu hektar sehingga ada peningkatan seluas 220,6 ribu hektar. Pada tahun 1993 terjadi penurunan luas panen sebesar 183,5 ribu hektar dari tahun 1988. Tahun 1998 terjadi peningkatan luas panen sebesar 7,4 ribu hektar dan tahun 2003 terjadi peningkatan luas panen sebesar 11,4 ribu hektar. Pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 194,6 ribu ha.



**Grafik 3.2.14**  
**Luas Panen Bawang Merah, Cabe dan Kentang**

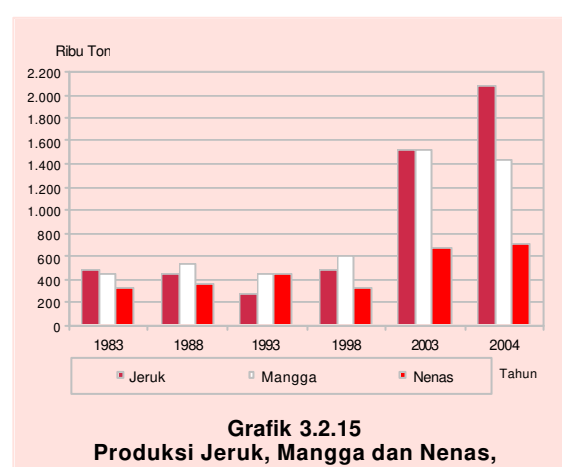
Luas panen kentang sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan yang relatif konstan yaitu sekitar 3,4 persen per tahun dan pada tahun 2004 mencapai 65,4 ribu hektar.

**b. Tanaman Jeruk, Mangga, Nenas, Pepaya, Pisang dan Salak.**

Jenis tanaman buah-buahan yang potensial dan memberikan kontribusi besar terhadap total produksi buah-buahan nasional adalah jeruk, mangga, nenas, pepaya, pisang dan salak. Selama periode lima tahunan 1983-2003 perkembangan produksi jeruk, mangga dan nenas sangat berfluktuasi, sedangkan pada tanaman pepaya, pisang dan salak cenderung meningkat. Sedangkan produksi tahun 2004 jika dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami peningkatan kecuali untuk mangga dan salak.

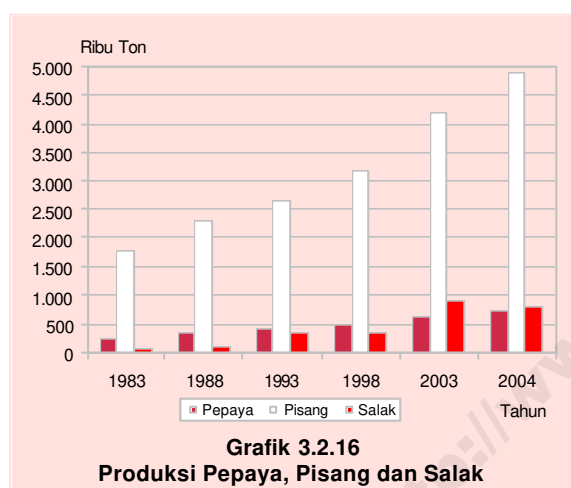
**Tabel 3.2.15**  
**Produksi Jeruk, Mangga, Nenas,**  
**Pepaya, Pisang dan Salak (000 Ton)**

Tahun	Jeruk	Mangga	Nenas	Pepaya	Pisang	Salak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1983	493,0	447,9	323,0	240,5	1 781,5	52,0
1988	444,9	532,0	357,7	346,0	2 308,4	122,9
1993	260,1	458,6	458,9	418,0	2 642,2	348,7
1998	490,9	600,0	327,0	490,0	3 176,7	353,2
2003	1 529,8	1 526,5	677,1	626,7	4 177,2	928,6
2004	2 071,1	1 437,7	709,9	732,6	4 874,4	801,0



**Grafik 3.2.15**  
**Produksi Jeruk, Mangga dan Nenas,**

Produksi jeruk selama periode lima tahunan mengalami penurunan pada periode 1983-1988 dan 1988-1993, kemudian mengalami kenaikan pada periode 1993-1998 dan 1998-2003. Kenaikan terbesar terjadi pada periode 1998-2003 yaitu dari 490,9 ribu ton pada tahun 1998 menjadi sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2003. Perkembangan produksi mangga selama periode lima tahunan 1983-2003 mengalami peningkatan dari periode ke periode kecuali pada periode 1988-1993 mengalami penurunan sebesar 73,4 ribu ton. Begitu juga terhadap produksi nenas mengalami kenaikan dari periode ke periode kecuali untuk periode 1993-1998 yang mengalami penurunan sebesar 131,9 ribu ton.



Produksi pepaya, pisang dan salak selama periode lima tahunan mengalami kenaikan dan kenaikan terbesar untuk ketiga tanaman tersebut terjadi pada periode 1998-2003 masing-masing sebesar 136,7 ribu ton, 1,0 juta ton dan 575,4 ribu ton.

**c. Tanaman Hias dan Biofarmaka**

**i). Tanaman Hias**

Dari sekian banyak tanaman hias yang ada di Indonesia, tanaman yang paling mempunyai potensi jika dilihat dari jumlah produksinya adalah tanaman anggrek, mawar, dan sedap malam.

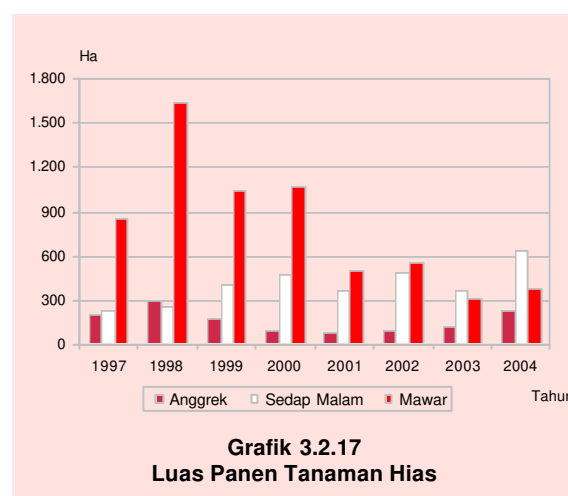
Luas panen tanaman anggrek pada tahun 1997 adalah 198 hektar dengan produksi sebanyak 6,5 juta

tangkai, keadaan ini terus membaik sampai pada tahun 1998, dengan luas panen 293 hektar, akan tetapi pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2001. Mulai tahun 2002 luas panen tanaman anggrek ini perlahan mulai naik kembali, dan pada tahun 2004 mencapai 226 hektar dengan produksi sebanyak 810 juta tangkai.

**Tabel 3.2.16**  
**Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias**

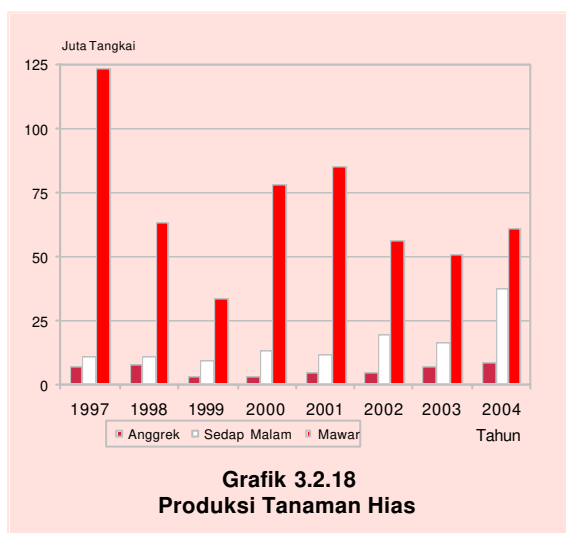
Tahun	Anggrek		Mawar		Sedap Malam	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (000 Tangkai)	Luas Panen (Ha)	Produksi (000 Tangkai)	Luas Panen (Ha)	Produksi (000 Tangkai)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1997	198	6 502	852	123 439	235	10 473
1998	293	7 780	1 646	63 292	260	10 476
1999	172	3 207	1 040	33 594	408	9 360
2000	95	3 261	1 062	78 148	473	13 273
2001	84	4 451	498	84 952	354	11 482
2002	90	4 996	558	55 708	483	19 666
2003	124	6 904	304	50 767	362	16 140
2004	226	8 028	371	61 286	635	37426

Tanaman mawar pada tahun 1997 mempunyai luas panen 852 hektar dengan produksi 123,4 juta tangkai. Pada tahun 1998 luas panen tanaman ini meningkat 100 persen, akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan tingkat produktivitas yang cukup baik, pada tahun ini produktivitas tanaman ini turun jauh dari 14,5 tangkai/m<sup>2</sup> menjadi 3,8 tangkai/m<sup>2</sup>.





Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 baik luas panen maupun produksi cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2004 luas panen naik menjadi 371 hektar, dengan produksi sebanyak 37,4 juta tangkai bunga mawar.



Untuk tanaman sedap malam, kenaikan luas panen yang cukup nyata terjadi pada tahun 1999, yaitu dari 260 hektar pada tahun 1998 menjadi 408 hektar, akan tetapi pada tahun ini terjadi penurunan produksi sebesar 1,1 juta tangkai yang disebabkan turunnya produktivitas. Kemudian sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 luas panen selalu berfluktuasi dengan kisaran antara 70 sampai dengan 100 hektar. Pada tahun 2004 luas panen tanaman sedap malam adalah 635 hektar dengan produksi 37,4 juta tangkai bunga sedap malam.

## ii). Tanaman Biofarmaka

Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil tanaman biofarmaka (tanaman obat) yang cukup besar, akan tetapi dari seluruh tanaman biofarmaka yang ada, tanaman jahe, laos/lengkoas dan kunyit yang paling berpotensi jika dilihat dari banyaknya produksi.

Untuk tanaman jahe, luas panen terus mengalami kenaikan sejak tahun 1997 (3.962 hektar) sampai dengan tahun 2001 (8.509 hektar) walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2000. Akan tetapi kenaikan luas

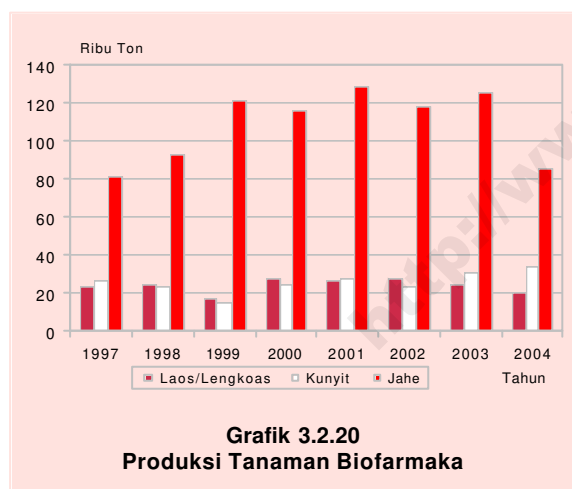
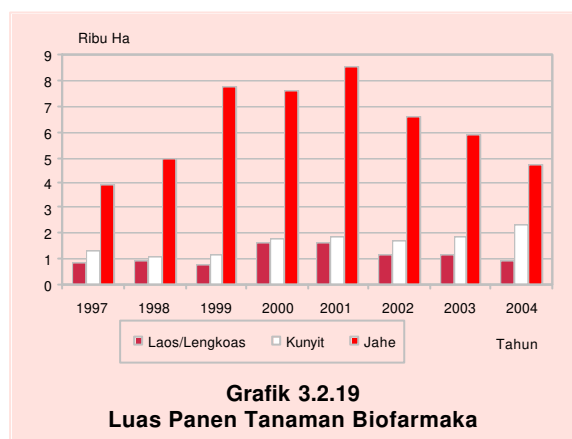
panen tersebut tidak dapat dipertahankan, pada tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup tajam, yaitu sebesar 1.899 hektar sampai pada tahun 2003, luas panen untuk tanaman ini tercatat hanya 5.891 hektar, akan tetapi pada tahun 2004 luas panen turun menjadi 4.698 hektar. Seiring dengan luas panen, produksi tanaman jahe terus naik, dari 81,2 ribu ton pada tahun 1997 hingga mencapai 120,8 ribu ton pada tahun 1999, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2000 dan pada tahun 2002 mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebanyak 994 ton. Akan tetapi sedikit berbeda dengan luas panen, mulai tahun 2002 jumlah produksi tanaman jahe ini mulai merambat naik lagi, dan pada tahun 2004 terjadi penurunan kembali hingga mencapai 85,6 ribu ton.

**Tabel 3.2.17**  
**Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka**

Tahun	Jahe		Laos/Lengkoas		Kunyit	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1997	3 962	81 176	845	23 295	1 294	26 954
1998	4 996	92 968	919	24 701	1 105	23 247
1999	7 727	120 851	788	16 916	1 179	15 363
2000	7 614	115 092	1 619	27 512	1 789	24 813
2001	8 509	128 437	1 596	26 154	1 829	27 195
2002	6 610	118 496	1 148	27 934	1 684	23 993
2003	5 891	125 386	1 142	24 588	1 894	30 707
2004	4 698	85 569	934	19 691	2 315	33 584

Perkembangan luas panen tanaman laos/lengkoas sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 cukup berfluktuasi. Luas panen terbesar untuk tanaman ini adalah pada tahun 2000, yaitu seluas 1.619 hektar yang kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2004 menjadi 934 hektar. Tidak berbeda jauh dengan kondisi luas panen, produksi tanaman laos/lengkoas ini juga mengalami perkembangan yang cukup berfluktuasi. Luas panen terbesar pada tahun 2000 berakibat positif, yaitu mengakibatkan produksi menjadi cukup terdorong naik hingga mencapai 27,5 ribu ton, dan pada tahun 2004 produksi untuk tanaman ini turun kembali menjadi 19,7 ribu ton.

Perkembangan yang terjadi pada tanaman kunyit tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada tanaman laos/lengkoas. Luas panen terbesar terjadi pada tahun 2001 hingga mencapai 1.829 hektar dengan produksi sebanyak 27,2 ribu ton. Pada tahun 2004 luas panen untuk tanaman kunyit naik mencapai 2.315 hektar dengan produksi 33,6 ribu ton.



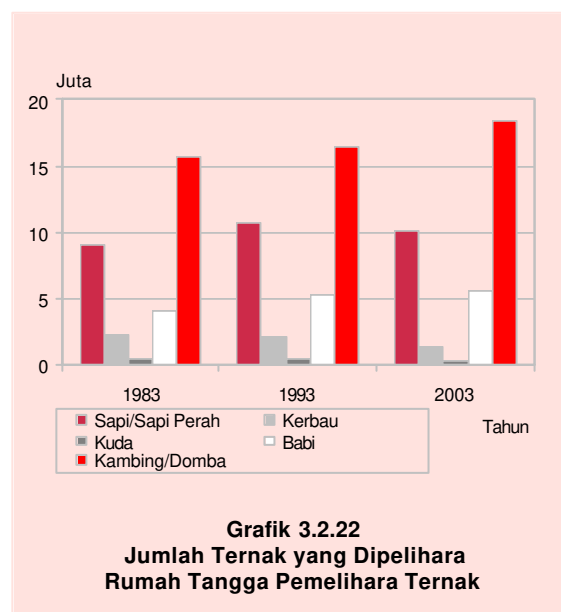
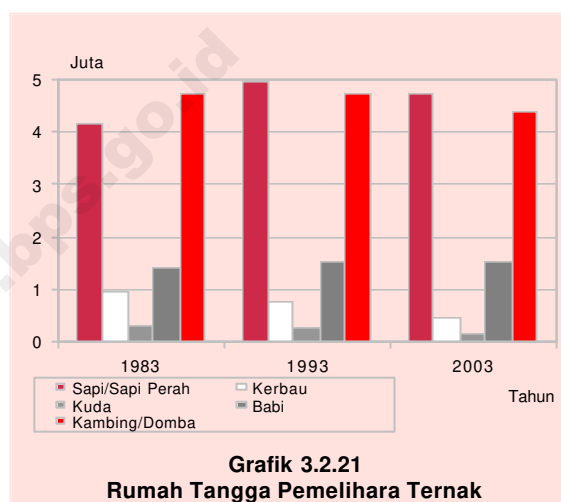
### 3.2.5 Perkembangan Produksi Peternakan

#### a. Rumah Tangga Pemelihara dan Jumlah Ternak

Data populasi ternak yang disajikan merupakan populasi ternak yang dipelihara rumah tangga dan tidak termasuk populasi ternak milik perusahaan. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 1983, 1993, dan 2003 populasi ternak serta jumlah rumah tangga peternak rata-rata mengalami penurunan, kecuali populasi babi dan kambing/domba mengalami kenaikan.

**Tabel 3.2.18**  
Rumah Tangga Pemelihara Ternak dan Jumlah Ternak yang Dikuasai (000)

Jenis Ternak	1983		1993		2003	
	Rumah Tangga	Populasi Ternak	Rumah Tangga	Populasi Ternak	Rumah Tangga	Populasi Ternak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sapi/Sapi Perah	4 157	9 041	4 943	10 757	4 698	10 177
Kerbau	935	2 391	787	2 082	459	1 367
Kuda	302	524	255	480	140	251
Babi	1 403	4 063	1 524	5 270	1 528	5 652
Kambing/Domba	4 723	15 767	4 709	16 351	4 397	18 370



Populasi sapi/sapi perah, kerbau, dan kuda untuk kurun waktu 1993-2003 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,4 persen, 34,3 persen, dan 47,7 persen. Penurunan jumlah rumah tangga pemelihara sapi/sapi perah, kerbau, kuda, dan kambing domba masing-masing sebesar 5,0 persen, 41,7 persen, 45,2 persen, dan 6,6 persen. Sedangkan populasi babi dan kambing/domba mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen dan 12,3 persen dan kenaikan jumlah rumah tangga hanya pada rumah tangga pemelihara babi yaitu sebesar 0,2 persen.

### b. Produksi Daging, Telur, dan Susu

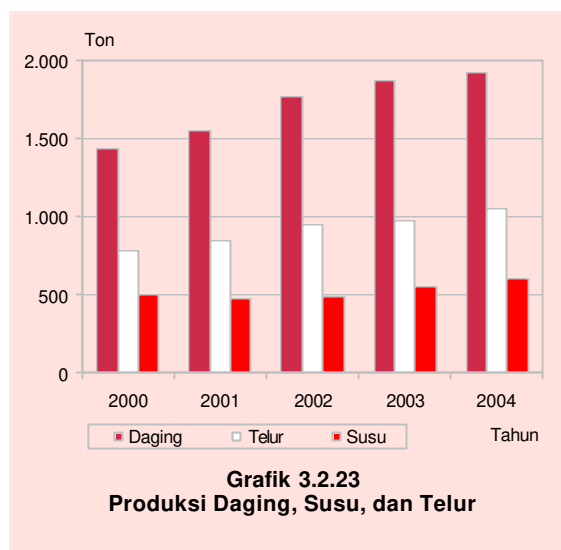
Produksi daging, telur, dan susu sejak tahun 1969 hingga tahun 2004 mengalami fluktuasi. Pada periode 1997-1999 produksi daging, telur dan susu menunjukkan penurunan yang tajam, yang diduga merupakan dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak akhir tahun 1997. Akan tetapi setelah tahun 2000-2004 produksi daging, telur, dan susu kembali mengalami peningkatan.

**Tabel 3.2.19**  
Produksi Daging, Susu, dan Telur

Tahun	Daging (000 Ton)	Telur (000 Ton)	Susu (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	1 445,2	783,3	495,6
2001	1 560,6	850,3	479,9
2002	1 769,8	945,7	493,4
2003	1 871,4	973,6	553,4
2004 <sup>a)</sup>	1 931,4	1 051,4	596,3

Sumber : Ditjen Peternakan

Produksi daging tahun 2000 sampai dengan 2004 setiap tahunnya meningkat masing-masing sebesar 8,0 persen, 13,4 persen, 5,7 persen dan 3,2 persen. Produksi telur tahun 2000 sampai dengan 2004 setiap tahunnya meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,64 persen per tahun. Produksi susu tahun 2001 turun 3,2 persen, dan tahun 2002 kembali naik lagi menjadi 493,4 ton dan pada tahun 2004 naik mencapai 596,3 ton.



### 3.2.6 Tanaman Perkebunan

#### a. Tanaman Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Tebu, Teh, Kopi dan Kakao.

##### i). Luas Tanaman

Periode 1968-1973, luas tanaman umumnya menunjukkan peningkatan berkisar antara 6,4 persen sampai dengan 60,7 persen, kecuali untuk tanaman teh pada periode tersebut luas tanaman menurun sebesar 15,4 persen. Pada periode 1973-1978, luas tanaman karet sedikit mengalami penurunan sebesar 1,5 persen, sedangkan untuk tanaman lainnya umumnya mengalami peningkatan berkisar antara 0,9 persen sampai dengan 66,5 persen. Peningkatan luas tanaman terbesar terjadi pada tanaman kakao yakni dari 15,5 ribu hektar pada tahun 1973 menjadi 25,8 ribu hektar pada tahun 1978. Luas tanaman perkebunan periode lima tahunan dari tahun 1968-2004 dapat dilihat pada Tabel 3.2.20.

Selama periode 1978-1983, luas tanaman umumnya meningkat berkisar antara 9,5 persen sampai 132,2 persen. Peningkatan luas tanaman terbesar masih terjadi pada tanaman kakao yakni dari 25,8 ribu hektar pada tahun 1978 menjadi 59,9 ribu hektar pada tahun 1983 (132,2 persen).



**Tabel 3.2.20**  
**Luas Tanaman Perkebunan (000 Hektar)**

Tahun	Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Tebu	Teh	Kopi	Kakao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1968	2 207,7	119,7	1 595,5	105,5	119,5	339,4	12,9
1973	2 207,9	155,7	2 009,0	169,5	101,1	381,2	15,5
1978	2 312,5	206,6	2 505,6	248,1	102,0	520,6	25,8
1983	2 578,0	405,6	2 946,7	384,4	111,7	815,0	59,9
1988	2 944,3	862,9	3 225,5	365,5	125,2	1 025,9	253,1
1993	3 405,0	1 613,2	3 635,9	425,7	142,6	1 147,6	535,3
1998	3 607,3	3 560,2	3 706,0	377,1	157,1	1 153,4	572,6
2003 <sup>1)</sup>	3 290,4	5 239,2	3 882,6	336,3	152,2	1 381,7	917,6
2004 <sup>e)</sup>	3 262,3	5 291,6	3 886,4	359,6	153,0	1 397,9	926,8

Pada periode 1983-1988, luas tanaman tebu mengalami penurunan sebesar 30,9 persen, sedangkan untuk tanaman yang lainnya umumnya mengalami peningkatan berkisar antara 9,5 persen sampai dengan 322,5 persen. Tanaman kakao kembali mengalami peningkatan luas tanaman yang cukup besar yakni dari 59,9 ribu hektar pada tahun 1983 menjadi 253,1 ribu hektar pada tahun 1988, atau meningkat sebesar 322,5 persen.

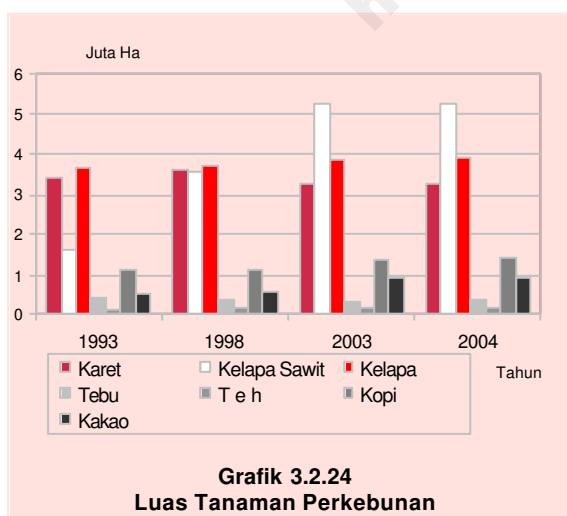
Selama periode 1988-1993, luas tanaman umumnya meningkat berkisar antara 11,9 persen sampai 111,5 persen. Peningkatan luas tanaman terbesar masih terjadi pada tanaman kakao yakni dari 253,1 ribu hektar pada

tahun 1988 menjadi 535,3 ribu hektar pada tahun 1993 (111,5 persen).

Pada periode 1993-1998, luas tanaman tebu kembali mengalami penurunan sebesar 11,4 persen, sedangkan untuk tanaman yang lainnya umumnya mengalami peningkatan berkisar antara 0,5 persen sampai dengan 120,7 persen. Jika pada periode sebelumnya tanaman kakao memiliki peningkatan luas tanaman terbesar, maka pada periode ini peningkatan terbesar terjadi pada tanaman kelapa sawit yakni dari 1.613,2 ribu hektar pada tahun 1993 menjadi 3.560,2 ribu hektar pada tahun 1998 atau meningkat sebesar 120,7 persen.

Jika pada periode-periode sebelumnya umumnya luas tanaman meningkat, pada periode 1998-2003 beberapa tanaman mengalami penurunan luas yaitu karet (8,8 persen), teh (3,1 persen) dan tebu (10,8 persen), sementara untuk tanaman kopi, kakao, kelapa sawit dan kelapa masing-masing meningkat sebesar 19,8 persen, 60,3 persen, 47,2 persen dan 4,8 persen.

Pada tahun 2004 diperkirakan luas tanaman tidak banyak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatan luas hanya berkisar 0,1 persen sampai dengan 6,9 persen yaitu untuk tanaman kelapa, teh, kakao, kelapa sawit, kopi dan tebu, sedangkan untuk tanaman karet mengalami penurunan sebesar 0,9 persen.



**Tabel 3.2.21**  
**Produksi Tanaman Perkebunan (000 Ton)**

Tahun	Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Tebu	Teh	Kopi	Kakao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1968	755,6	181,4	1 132,7	725,1	75,8	157,3	1,2
1973	844,3	270	1 279,9	914,9	67,6	150,2	1,8
1978	885,0	525,0	1 578,2	1 497,0	92,1	222,7	5,5
1983	1 007,0	983,0	1 607,6	1 619,5	110,3	305,6	19,6
1988	1 173,3	1 713,3	2 144,0	2 004,1	133,8	391,1	79,3
1993	1 475,4	3 421,4	2 605,9	2 329,8	165,0	438,9	258,1
1998	1 661,9	5 930,4	2 778,1	1 488,3	166,8	514,5	448,9
2003 <sup>1)</sup>	1 792,3	9 817,2	3 229,3	1 634,6	168,1	686,3	572,6
2004 <sup>e)</sup>	1 851,2	10 308,1	3 261,5	2 020,0	175,7	700,0	601,3

## ii). Produksi

Periode 1968-1973, produksi teh dan kopi masing-masing mengalami penurunan sebesar 10,8 persen dan 4,5 persen, sedangkan tanaman lainnya mengalami peningkatan berkisar antara 11,7 persen sampai dengan 50,0 persen.

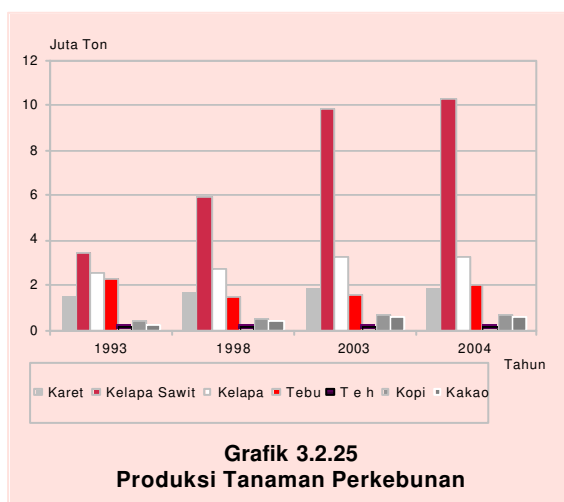
Pada periode 1973-1978, umumnya produksi mengalami peningkatan berkisar antara 4,8 persen sampai dengan 205,6 persen. Peningkatan produksi terbesar terjadi pada tanaman kakao yakni dari 1,8 ribu ton pada tahun 1973 menjadi 5,5 ribu ton pada tahun 1978, atau meningkat sebesar 205,6 persen.

Selama periode 1978-1983, produksi umumnya meningkat berkisar antara 1,9 persen sampai 256,4 persen. Peningkatan produksi terbesar masih terjadi

pada tanaman kakao yakni dari 5,5 ribu ton pada tahun 1978 menjadi 19,6 ribu ton pada tahun 1983 (256,4 persen). Pada periode 1983-1988, produksi juga mengalami peningkatan berkisar antara 16,5 persen sampai dengan 304,6 persen. Tanaman kakao kembali mengalami peningkatan produksi yang cukup besar yakni dari 19,6 ribu ton pada tahun 1983 menjadi 79,3 ribu ton pada tahun 1988, atau meningkat sebesar 304,6 persen.

Selama periode 1988-1993, produksi umumnya meningkat berkisar antara 12,2 persen sampai 225,5 persen. Peningkatan produksi terbesar masih terjadi pada tanaman kakao yakni dari 79,3 ribu ton pada tahun 1988 menjadi 258,1 ribu ton pada tahun 1993 (225,5 persen). Pada periode 1993-1998, produksi tanaman tebu kembali mengalami penurunan sebesar 36,1 persen, sedangkan untuk tanaman yang lainnya umumnya mengalami peningkatan berkisar antara 1,1 persen sampai dengan 73,9 persen. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tanaman kakao dan kelapa sawit, masing-masing sebesar 73,9 persen dan 73,3 persen.

Pada periode 1998-2003 tanaman yang mengalami peningkatan produksi yang cukup besar yaitu kelapa sawit (65,5 persen) dan kopi (33,4 persen), sementara itu untuk tanaman teh, karet, tebu, kelapa dan kakao meningkat berkisar antara 0,8 persen sampai dengan 27,6 persen.



Pada tahun 2004 produksi diperkirakan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003. Untuk karet produksi meningkat 3,3 persen dari 1.792,3 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 1.851,2 ribu ton pada tahun 2004. Produksi teh meningkat dari 168,1 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 175,7 ribu ton pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 4,5 persen. Produksi kakao dan kelapa sawit meningkat sekitar 5 persen yaitu untuk kakao dari 572,6 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 601,3 ribu ton pada tahun 2004, sedangkan produksi kelapa sawit dari 9.817,2 ribu ton (tahun 2003) menjadi 10.308,1 ribu ton (tahun 2004). Produksi kopi dan kelapa hanya sedikit mengalami peningkatan yakni masing-masing 2,0 persen dan 1,0 persen, sedangkan untuk tebu meningkat cukup besar yakni dari 1.634,6 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 2.020,0 ribu ton pada tahun 2004 atau meningkat 23,6 persen.

### b. Karet Remah

Karet remah adalah suatu usaha industri pengolahan karet yang melakukan kegiatan mengubah bahan baku karet menjadi karet remah dalam Standart Karet Nasional (*Standart Indonesian Rubber*).

**Tabel 3.2.22**  
Jumlah Perusahaan, Pekerja, dan Produksi Karet Remah.

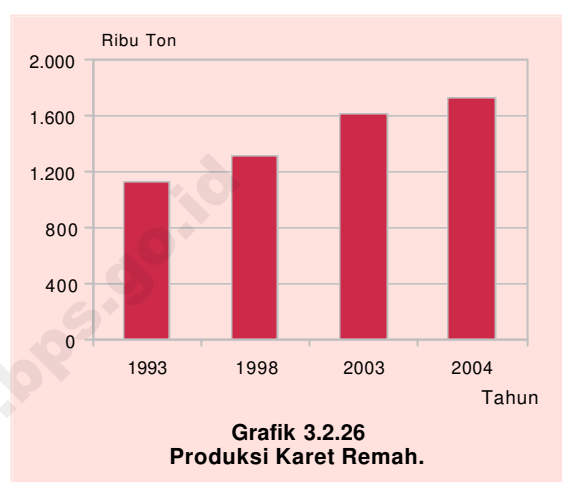
Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pekerja	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1993	100	22 153	1 121 998
1998	96	21 830	1 315 870
2003 <sup>1)</sup>	87	25 474	1 608 166
2004 <sup>1)</sup>	88	28 472	1 733 998

Keterangan :<sup>1)</sup> Tidak Termasuk NAD

Jumlah industri karet remah dan jumlah pekerjanya selama periode 1993-2004 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Jumlah industri karet remah pada tahun 1993 adalah 100 buah dengan jumlah pekerja 22.153 orang. Pada tahun 2004, jumlah industri tersebut menurun 12 persen sehingga menjadi 88 buah, salah satu penyebabnya adalah tidak memasukkan data Provinsi NAD. Sementara jumlah pekerja meningkat

menjadi 28.472 orang. Meskipun jumlah industri karet remah tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, ternyata produksinya menunjukkan kenaikan yang menggembirakan.

Jumlah produksi pada tahun 1993 sebesar 1.121.998 ton melonjak menjadi 1.733.998 ton pada tahun 2004. Jenis produksi terbesar yang dihasilkan oleh industri karet remah pada tahun 2004 adalah SIR20 (94,3 persen), sementara sisanya adalah SIR3CV, SIR3L, SIR3WF, SIR5, dan SIR10.



### 3.2.7 Produksi Perikanan

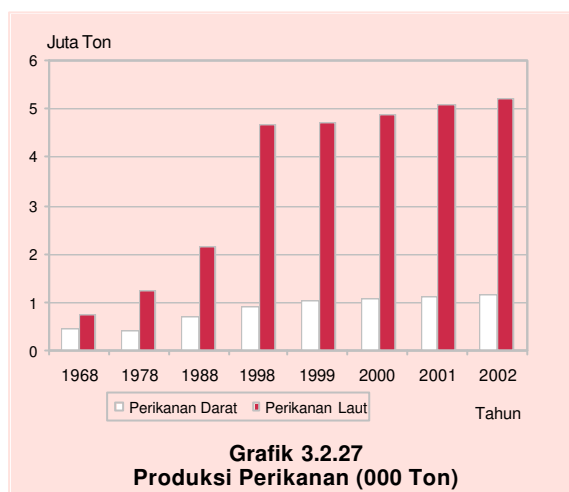
Komoditas perikanan merupakan salah satu andalan dalam menghasilkan devisa. Oleh karena itu produksi dari sektor ini diupayakan peningkatannya dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.2.23**  
Produksi Perikanan (000 Ton)

Tahun	Perikanan Laut	Perikanan Laut	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1968	723	437	1 160
1978	1 227	420	1 647
1988	2 170	712	2 882
1998	4 654	930	5 584
1999	4 728	1 046	5 774
2000	4 888	1 081	5 969
2001	5 091	1 125	6 216
2002	5 233	1 160	6 393

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perairan





Indikator keberhasilan pembangunan pada sub sektor perikanan dapat terlihat dari peningkatan produksi yang menunjukkan perubahan yang cukup signifikan tahun demi tahun.

Produksi perikanan meningkat dari 1.160 ribu ton pada tahun 1968, meningkat menjadi 6.393 ribu ton pada tahun 2002. Produksi perikanan tersebut didominasi oleh produksi perikanan laut dengan sumbangan lebih dari 75 persen dan sisanya dari perikanan darat. Bila dilihat perkembangan produksi perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu dari 3,6 juta ton pada tahun 1997 menjadi 4,7 juta ton pada tahun 1998 dan meningkat terus hingga mencapai 5,2 juta ton pada tahun 2002. Sedangkan produksi perikanan darat dari tahun ke tahun meningkat, Penurunan hanya terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Produksi perikanan darat pada tahun 1998 hanya 0,9 juta ton naik menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2002.

### 3.2.8 Subsektor Kehutanan

#### a. Perkembangan Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Lapis

Perkembangan produksi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis selama periode 1978-2004 berfluktuasi, seperti terlihat pada Tabel 3.2.24. Kayu bulat, sebagai produksi utama hasil hutan, cenderung menurun dari

waktu ke waktu. Tetapi pada kurun waktu 1983/1984-1988/1989 mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu dari 15.208,6 ribu m<sup>3</sup> menjadi 28.485,0 ribu m<sup>3</sup> atau meningkat sebesar 87,3 persen. Selanjutnya sampai dengan tahun 2003, produksi kayu bulat terus menurun hingga menjadi 10.086,2 ribu m<sup>3</sup>. Pada tahun 2004

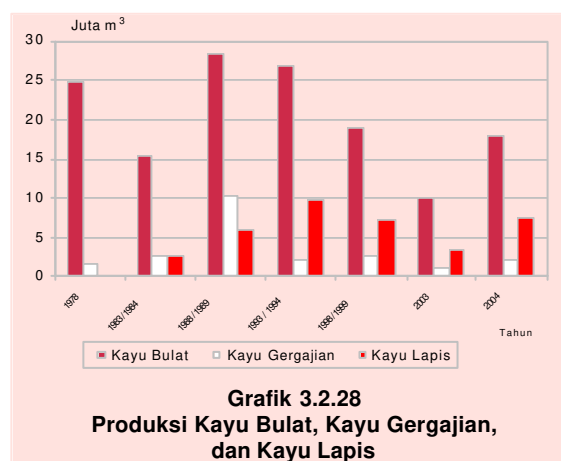
**Tabel 3.2.24**  
**Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian, dan Kayu Lapis (000 m<sup>3</sup>)**

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis
(1)	(2)	(3)	(4)
1978	24 742,9	1 512,7	168,1
1983-1984	15 208,6	2 710,7	2 605,1
1988-1989	28 485,0	10 237,5	6 026,7
1993-1994	26 848,0	2 244,0	9 924,0
1998-1999	19 026,9	2 707,2	7 154,7
2003	10 086,2	1 134,5	3 295,5
2004	18 050,6	2 176,5	7 523,3

Sumber : Departemen Kehutanan

diperkirakan produksi kayu bulat meningkat sebesar 78,9 persen dibandingkan tahun 2003.

Produksi kayu gergajian yang merupakan produksi turunan dari kayu bulat atau biasa disebut kayu olahan menunjukkan perkembangan yang sebaliknya, yaitu cenderung meningkat. Peningkatan produksi yang sangat tajam terjadi pada periode 1983/1984-1988/1989 sebesar 277,7 persen, yaitu dari 2.710,7 ribu m<sup>3</sup> menjadi 10.237,5 ribu m<sup>3</sup>. Kemudian terjadi penurunan lebih dari separuhnya (78,1 persen) pada 5 tahun berikutnya



menjadi 2.244,0 ribu m<sup>3</sup>. Selanjutnya pada tahun 2004 produksi kayu gergajian diperkirakan menjadi 2.176,5 ribu m<sup>3</sup> atau meningkat sebesar 91,8 persen dari tahun 2003.

Seperti halnya kayu gergajian, kayu lapis juga merupakan kayu olahan. Selama 3 periode mengalami peningkatan, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada periode 1978 – 1983/1984, yaitu dari 168,1 ribu m<sup>3</sup> menjadi 2.605,1 ribu m<sup>3</sup>. Kemudian terjadi penurunan selama 2 periode berikutnya, masing-masing sebesar 27,9 persen dan 53,9 persen sehingga produksi pada tahun 2003 menjadi 3.295,5 ribu m<sup>3</sup>. Pada tahun 2004 produksi kayu lapis diperkirakan akan mencapai 7.523,3 ribu m<sup>3</sup> atau meningkat sebesar 128,3 persen dibandingkan tahun 2003.

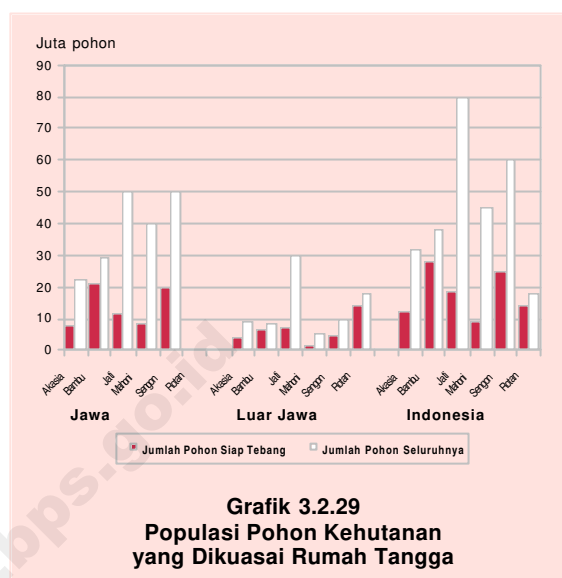
**b. Potensi Tanaman Kehutanan**

Dari hasil pendaftaran rumah tangga (*Listing*) Sensus Pertanian 2003 (ST03) diperoleh gambaran tentang potensi tanaman kehutanan (hutan rakyat) di Indonesia. Tabel 3.2.25 menyajikan data populasi pohon dan jumlah pohon yang siap tebang dari 6 jenis tanaman kehutanan (Akasia, Bambu, Jati, Mahoni, Sengon, Rotan) yang merupakan sebagian dari jumlah jenis tanaman hasil *listing* ST03. Pohon siap tebang adalah pohon yang telah cukup umur untuk ditebang meskipun belum ditebang dengan alasan untuk meningkatkan nilai ekonomis.

**Tabel 3.2.25**  
**Populasi Pohon Kehutanan yang Dikuasai Rumah Tangga, 2003 (000)**

Jenis Pohon	Jawa		Luar Jawa		Indonesia	
	Jumlah Pohon	Jumlah Pohon Siap Tebang	Jumlah Pohon	Jumlah Pohon Siap Potong	Jumlah Pohon	Jumlah Pohon Siap Potong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Akasia	22 611,1	7 730,4	9 409,0	4 339,3	32 020,1	12 069,7
Bambu	29 139,4	21 161,5	8 786,9	6 721,8	37 926,3	27 883,3
Jati	50 119,6	11 506,9	29 592,9	6 939,1	79 712,5	18 446,0
Mahoni	39 990,7	8 323,1	5 268,8	1 174,1	45 259,5	9 497,2
Sengon	50 075,5	19 579,7	9 758,8	5 033,5	59 834,3	24 613,2
Rotan	21,4	15,8	17 762,3	14 462,1	17 783,7	14 477,9

Populasi pohon tanaman kehutanan yang paling banyak dikuasai/ditanam oleh rumah tangga adalah tanaman jati yaitu mencapai 79,7 juta pohon, kemudian pada urutan berikutnya berturut-turut adalah Sengon (59,8 juta), Mahoni (45,3 juta), Bambu (37,9 juta), Akasia (32,0 juta) dan Rotan (17,8 juta rumpun).



Dari 6 Jenis tanaman kehutanan yang dikuasai rumah tangga, 5 jenis tanaman di antaranya, yaitu Akasia, Bambu, Jati, Mahoni dan Sengon masing-masing lebih banyak ditanam di Jawa, berkisar antara 62,9 persen sampai 88,36 persen dari total populasi pohon di Indonesia, sedangkan sisanya ditanam di luar Jawa. Sementara tanaman Rotan hampir seluruhnya (99,9 persen) ditanam di luar Jawa dan sebagian kecil sisanya ditanam di Jawa.

Persentase jumlah pohon yang siap tebang terhadap total pohon seluruhnya untuk tanaman Akasia, Jati, Mahoni dan Sengon berkisar antara 23,1 persen sampai 41,1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi dari keempat jenis tanaman tersebut sebagian besar masih berumur muda. Sedangkan tanaman Bambu dan Rotan, persentase jumlah rumpun siap tebang terhadap total rumpun seluruhnya masing-masing mencapai sebesar 73,5 persen dan 81,4 persen.













**PERTAMBANGAN**

## 3.3 PERTAMBANGAN

### RINGKASAN

Sektor pertambangan merupakan sektor yang cukup berperan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini sumbangan sektor ini (terutama dari sub sektor pertambangan migas) dalam pembentukan PDB mencapai rata-rata 9 persen per tahun. Dalam kurun waktu 25 tahun (1980-2004) penemuan cadangan dan pengembangan lahan migas dan non migas terus terjadi sehingga jumlah investor asing yang berminat juga semakin bertambah.

Walaupun demikian, hasil eksploitasi menurun karena cadangan migas yang ada semakin menipis. Selain itu, akibat krisis ekonomi, beberapa investor asing tidak meneruskan kontraknya. Hal ini ditunjukkan oleh produksi minyak mentah yang secara rata-rata turun 1,2 persen per tahun pada periode tersebut. Pada periode yang sama produksi kondensat dan gas bumi berfluktuasi dengan kecenderungan menaik dimana rata-rata kenaikan masing-masing mencapai 1,2 persen dan 6,7 persen per tahun.

Pada periode yang sama selain aspal, produksi pertambangan nonmigas lainnya menunjukkan peningkatan. Komoditi pertambangan nonmigas yang paling tinggi peningkatannya adalah emas, kemudian diikuti oleh produksi batubara, perak, dan tembaga dengan masing-masing rata-rata pertumbuhan mencapai 32,2 persen, 30,9 persen, 23,1 persen, dan 13,7 persen per tahun.

Seperti halnya sektor industri pengolahan atau konstruksi, sektor pertambangan juga cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selama periode 1980-2004 jumlah pekerja tetap di sektor ini memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,4 persen per tahun. Sedangkan pekerja harian yang terlibat di sektor ini pada periode yang sama cenderung menurun rata-rata sebesar 0,1 persen per tahun.

### SUMMARY

*Mining sector played an important role in Indonesian economic development. During the last five years, this sector (mainly in oil and gas mining) had contributed in average for about 9 percent per year in GDP. In 25 years (1980-2004) reserved discovery and field development of oil and gas and mineral kept happening, and the number of foreign investors had also increased. Nevertheless, the oil and gas production had averagely reduced because of natural causes and discontinuation of exploitation contract by some foreign investors. During 25 years, the crude oil production had decreased 1.2 percent per year averagely. Meanwhile, the condensate and natural gas production fluctuated and tend to increase in average for about 1.2 and 6.7 percent per year respectively.*

*At the same period, excluding asphalt, other minerals production, tend to increase. The highest increasing showed by gold production and followed by coal, silver, and copper ore. Their growths reached 32.2, 30.9, 23.1, and 13.7 percent per year respectively.*

*As in non-oil manufacturing and construction sector, the mining sector also absorbed the large amount of labor force. The permanent workers continued to increase by 1.4 percent per year in average during 1980-2004. Meanwhile, daily workers involved in this sector decreased by 0.1 percent per year during the same period.*



Perkembangan aktivitas ekonomi sektor pertambangan dari tahun ke tahun pada umumnya masih merupakan bagian dari kelanjutan usaha tahun-tahun sebelumnya. Penemuan cadangan dan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi masih terus terjadi. Jumlah perusahaan asing yang bekerja atas dasar kontrak di bidang minyak dan gas bumi kian bertambah. Hal yang sama berlaku juga di bidang pertambangan emas dan batubara serta beberapa mineral lainnya.

Di bidang energi pemerintah saat ini berupaya untuk meningkatkan langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi serta pengembangan sumber energi lain.

Sektor pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu minyak dan gas bumi (migas), dan nonminyak dan gas bumi (nonmigas). Data yang disajikan dalam ulasan ini adalah data hasil survei yang dilakukan BPS yang mencakup pertambangan golongan A dan golongan B, dan tidak termasuk pertambangan golongan C (bahan galian industri).

### 3.3.1 Perkembangan Produksi

#### a. Minyak dan Gas Bumi

Di Indonesia migas dihasilkan oleh Pertamina dan sejumlah perusahaan asing yang bekerja sebagai kontraktor. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dibagi dua, yaitu kontrak karya dan kontrak bagi hasil.

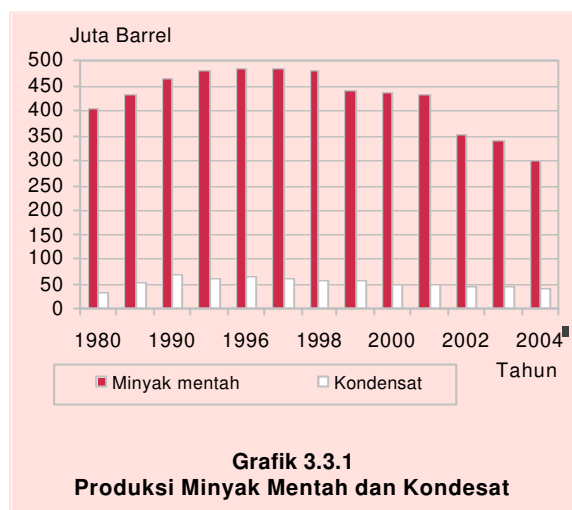
Dalam kurun waktu sekitar 25 tahun (1980-2004), jumlah produksi minyak mentah Indonesia menurun dari 404,8 juta barel pada tahun 1980 menjadi 301,9 juta barel pada tahun 2004, atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,2 persen per tahun. Hal ini disebabkan semakin menipisnya cadangan migas yang telah dieksploitasi. Bila dilihat lebih rinci dalam periode lima tahunan, yaitu antara tahun 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, dan 2000-2004 maka produksi minyak mentah pada periode 1980-1985 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,3 persen per tahun yaitu dari 404,8 juta barel pada tahun 1980 menjadi 431,1 juta barel pada

**Tabel 3.3.1**  
**Jumlah Produksi Migas**

Tahun	Minyak Mentah (Juta Barel)	Kondensat (Juta Barel)	Gas Bumi (Miliar Mscf)
(1)	(2)	(3)	(4)
1980	404,8	31,0	781,6
1985	431,1	52,5	1 579,8
1990	464,3	66,1	2 158,6
1995	478,2	58,5	2 966,8
1996	485,6	63,1	3 164,0
1997	484,3	59,4	3 166,0
1998	480,1	54,8	2 978,8
1999	440,5	54,2	3 068,3
2000	434,4	50,0	2 845,5
2001	432,6	47,5	3 762,8
2002	351,9	45,4	2 279,4
2003	339,1	44,6	2 131,9
2004 <sup>a</sup>	301,9	41,2	1 946,4
Pertumbuhan (%)			
1980-1985	1,3	11,1	19,1
1985-1990	1,5	4,7	6,4
1990-1995	0,6	-2,7	6,6
1995-2000	-1,9	-3,1	-0,8
2000-2004	-8,7	-4,7	-9,1

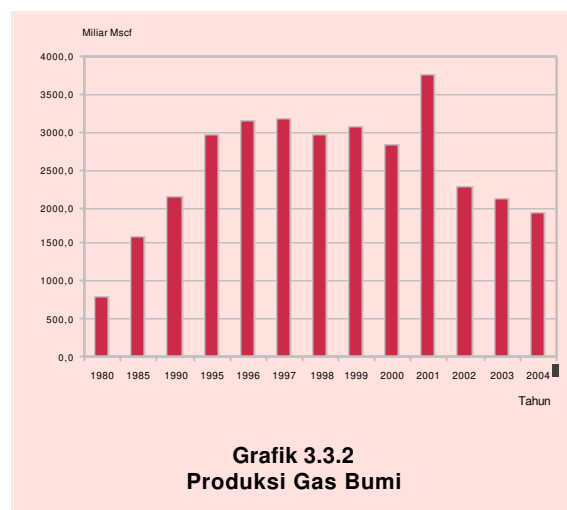
tahun 1985. Kenaikan produksi masih terus terjadi pada periode berikutnya, 1985-1990 dan 1990-1995, masing-masing dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,5 persen dan 0,6 persen per tahun. Produksi minyak mentah kemudian menurun pada periode 1995-2000 dan 2000-2004, yaitu tercatat produksi pada tahun 1995, 2000, dan 2004 masing-masing sebesar 478,2 juta barel, 434,4 juta barel, dan 301,9 juta barel. Dengan kata lain tingkat penurunan pada periode tersebut masing-masing sebesar 1,9 persen dan 8,7 persen per tahun. Penurunan produksi ini selain disebabkan oleh menipisnya cadangan migas juga disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga beberapa investor asing tidak meneruskan kontraknya.

Pada periode 1980-2004, produksi kondensat memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun 1980 sampai dengan 1990, kemudian secara fluktuatif menunjukkan penurunan. Secara umum pada periode tersebut produksi kondensat naik dengan rata-rata



kenaikan sebesar 1,2 persen per tahun. Kenaikan produksi kondensat yang tajam terjadi pada periode 1980-1985, yaitu dari sebesar 31,0 juta barel pada tahun 1980 meningkat menjadi 52,5 juta barel pada tahun 1985 atau terjadi kenaikan secara rata-rata sebesar 11,1 persen per tahun. Pada periode 1985-1990 produksi kondensat masih mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,7 persen per tahun. Kemudian pada periode berikutnya, 1990-1995, 1995-2000, dan 2000-2004, produksi kondensat menurun dengan rata-rata penurunan 2,7 persen, 3,1 persen, dan 4,7 persen per tahun.

Dalam kurun waktu yang sama gas bumi meningkat lebih dari dua kali, yaitu dari 781,6 juta Mscf pada tahun 1980 menjadi 1.946,4 juta Mscf pada tahun 2004 atau naik secara rata-rata sebesar 6,7 persen per tahun. Secara rinci dapat dilihat dalam periode lima tahunan yaitu dari tahun 1980-1985 terjadi kenaikan yang sangat mencolok dari 781,6 juta Mscf tahun 1980 menjadi 1.579,8 juta Mscf pada tahun 1985 atau naik secara rata-rata 19,1 persen per tahun. Pada periode 1985-1990 dan 1990-1995 juga terjadi kenaikan masing-masing dengan rata-rata sebesar 6,4 persen dan 6,6 persen per tahun. Pada periode selanjutnya, 1995-2000 dan 2000-2004 produksi gas bumi mengalami penurunan dengan tingkat penurunan masing-masing sebesar 0,8 persen dan 9,1 persen tahun.



#### b. Nonminyak dan Gas Bumi

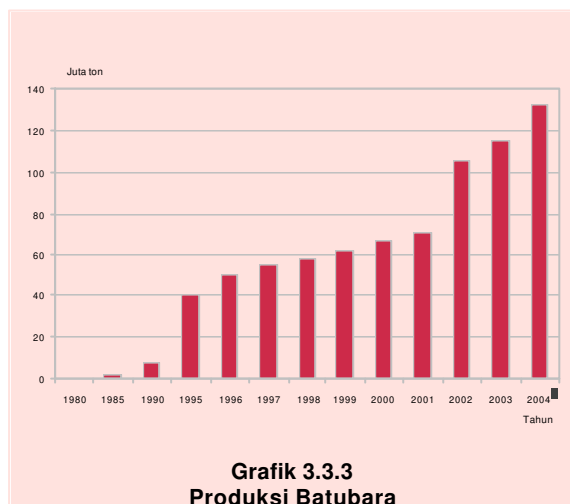
Dalam kurun waktu sekitar 25 tahun secara umum produksi pertambangan nonmigas meningkat cukup cepat kecuali untuk komoditi aspal. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya perusahaan yang bergerak dalam penambangan bahan tambang mineral strategis, baik dalam bentuk kerja sama kontrak karya maupun kontrak bagi hasil. Bila melihat laju produksi mineral, krisis ekonomi tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada sub sektor pertambangan nonmigas.

Hasil batubara selama tahun 2004 sebesar 132.256,5 ribu ton, sedangkan pada tahun 1980 baru mencapai 207,6 ribu ton, dapat dikatakan mengalami kenaikan yang sangat mencolok. Pada kurun waktu 1980-2004 pertumbuhan produksi batubara sebesar 30,9 persen per tahun. Produksi batubara pada tahun 1980 sebesar 207,6 ribu ton meningkat menjadi 1.861,3 ribu ton pada tahun 1985 atau menjadi hampir sembilan kali lipat. Pada periode 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, dan 2000-2004 terjadi kenaikan terus menerus. Hal ini disebabkan permintaan akan komoditas ini yang juga terus meningkat.

Dewasa ini penambangan bauksit dilaksanakan oleh unit penambangan bauksit PT Aneka Tambang (Persero) dengan cara tambang terbuka. Bauksit Bintan dikenal untuk pertama kali pada tahun 1925. Bauksit yang dihasilkan selama kurun waktu 1980-2004

mencapai 952,4 ribu ton pada tahun 1980 dan 1,3 juta ton pada tahun 2004, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,4 persen per tahun.

Hasil bijih nikel pada tahun 1980 yaitu 1,0 juta ton meningkat menjadi 2,1 juta ton pada tahun 2004 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,1 persen per tahun.



**Grafik 3.3.3**  
**Produksi Batubara**

Penambangan emas dilakukan oleh unit pertambangan emas Cikotok yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten Selatan, Jawa Barat. Emas di daerah Banten Selatan sudah diketahui semenjak tahun 1930-an. Emas yang dihasilkan selama tahun 1980-2004 mengalami peningkatan yang sangat mencolok yaitu dari 175,5 kg menjadi 142,9 ton, atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 32,2 persen per tahun.

Perak yang dihasilkan dalam kurun waktu 1980-2004 mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu pada tahun 1980 baru sebesar 1,8 ton tetapi pada tahun 2004 sudah menjadi 262,9 ton atau naik rata-rata per tahun sebesar 23,1 persen.

Produksi batu granit sebesar 838,6 ribu ton pada tahun 1980 meningkat menjadi 2.354,8 ribu ton pada tahun 2004 atau dapat dikatakan naik rata-rata sebesar 4,4 persen per tahun.

Produksi mangan mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu dari 1,8 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 23 ribu ton pada tahun 2004 atau mengalami

**Tabel 3.3.2**  
**Jumlah Produksi Nonmigas**

Tahun	Aspal (ribu ton)	Batubara (ribu ton)	Bauksit (ribu ton)	Bijih nikel (ribu ton)	Emas (Kg)	Perak (Kg)	Granit (ribu ton)	Mangan (ribu ton)	Pasir Besi (ribu ton)	Tembaga (ribu ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1980	168,0	207,6	952,4	1 004,5	175,5	1 780,5	838,6	1,8	42,3	133,7
1985	450,6	1 861,3	830,5	961,9	234,4	2 123,2	1 420,8	33,3	130,9	197,3
1990	0,0	8 020,3	1 205,7	2 179,1	486,8	1 973,2	2 254,3	4,6	151,7	437,3
1995	27,9	39 935,6	899,0	2 513,4	64 032,0	275 567,0	5 386,3	0,6	366,1	1 516,6
1996	95,2	50 332,0	842,0	3 426,9	83 564,0	255 404,0	4 827,1	0,0	425,1	1 758,9
1997	115,3	55 982,0	808,7	2 830,0	86 928,0	249 392,0	8 824,1	0,9	516,4	1 817,9
1998	40,2	58 504,7	1 055,6	2 736,6	123 862,0	383 191,0	9 662,6	0,9	510,0	2 640,0
1999	18,0	62 108,2	1 116,3	2 798,4	127 768,0	361 377,0	8 720,2	38,5	502,2	2 724,4
2000	8,7	67 105,7	1 150,8	2 434,6	109 612,0	310 430,0	5 941,4	30,2	420,4	3 270,3
2001	1,0	71 073,0	1 237,0	2 473,8	148 528,0	333 561,0	3 976,3	24,9	440,6	2 418,1
2002	1,0	105 539,3	1 283,5	2 120,6	140 206,0	281 903,0	3 975,4	28,3	378,6	2 851,2
2003	0,4	114 610,1	1 262,6	2 395,4	141 019,2	285 205,3	3 059,6	25,5	245,4	2 894,8
2004 <sup>1)</sup>	0,2	132 256,5	1 330,8	2 095,5	142 907,3	262 935,0	2 354,8	23,0	189,6	2 939,0
Pertumbuhan (%)										
1980-1985	21,8	55,1	-2,7	-0,9	6,0	3,6	11,1	79,2	25,4	8,1
1985-1990	-70,4 <sup>1)</sup>	33,9	7,7	17,8	15,7	-1,5	9,7	-32,7	3,0	17,3
1990-1995	-38,9 <sup>2)</sup>	37,9	-5,7	2,9	165,3	168,5	19,0	-33,5	19,3	28,2
1995-2000	-20,8	10,9	5,1	-0,6	11,4	2,4	2,0	119,0	2,8	16,6
2000-2004	-61,1	18,5	3,7	-3,7	6,9	-4,1	-20,7	-6,6	-18,1	-2,6

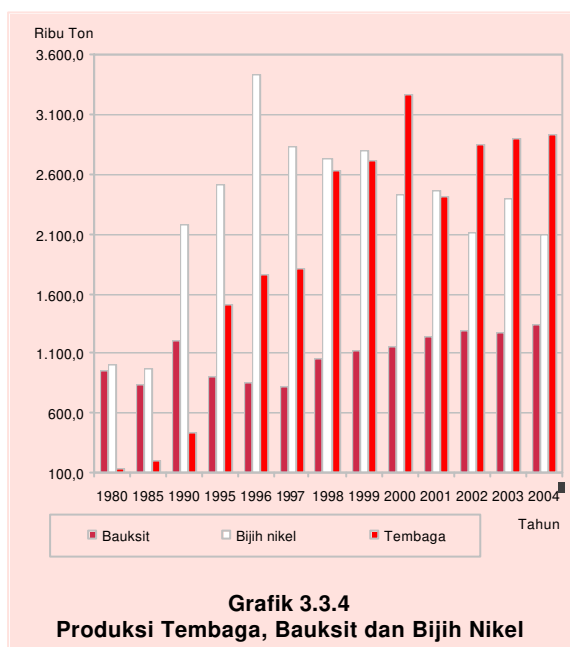
Keterangan :

1) untuk periode 1985-1988

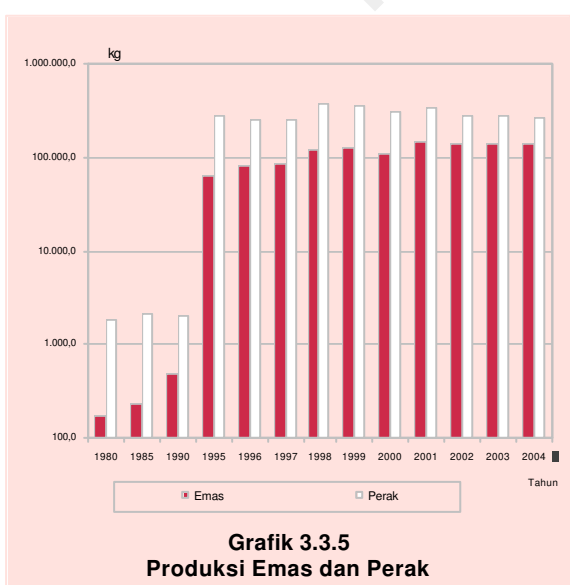
2) untuk periode 1991-1995



kenaikan rata-rata per tahun sebesar 11,2 persen dalam kurun waktu 1980-2004.



Rata-rata peningkatan produksi pasir besi dalam kurun waktu 1980-2004 tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 6,5 persen per tahun bila dibandingkan dengan peningkatan dalam kurun waktu 1980-1994 yaitu 16,7 persen per tahun. Pada tahun 1980 produksinya hanya 42,3 ribu ton naik menjadi 361,5 ribu ton pada tahun 1994 kemudian turun menjadi 189,6 ribu ton pada tahun 2004.



Produksi tembaga dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 1980 produksi tembaga hanya 133,7 ribu ton sedangkan tahun 2004 mencapai 2.939 ribu ton atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 13,7 persen.

Perkembangan produksi timah juga mengalami peningkatan cukup besar yaitu dari 25,3 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 73,1 ribu ton pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun 4,5 persen.

Berbeda dengan komoditas tambang mineral lainnya, aspal yang dihasilkan pada tahun 2004 sangat kecil sekali yaitu hanya 0,2 ribu ton dibandingkan tahun 1980 sebesar 168,0 ribu ton atau mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 24,5 persen per tahun. Hal ini disebabkan karena semakin menipisnya cadangan aspal di Indonesia. Pada tahun 1989 dan 1990 tidak ada produksi aspal. Hal ini disebabkan oleh pemasaran aspal tidak menggemirakan dan masih banyak stok aspal yang belum terjual. Kegiatan yang ada hanyalah melayani pengiriman/penjualan kepada beberapa konsumen.

### 3.3.2 Perkembangan Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan pertambangan baik migas maupun nonmigas dalam kurun waktu sekitar 25 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini terjadi baik pada tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap atau pekerja harian. Namun untuk tenaga kerja tidak tetap untuk subsektor nonmigas pada tahun 2003 dan 2004 mengalami sedikit penurunan.

Pada tahun 1980 jumlah tenaga kerja tetap sub sektor pertambangan migas sebanyak 21,5 ribu orang dan pada tahun 2004 menjadi 25,4 ribu orang atau mengalami sedikit peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,7 persen. Seperti halnya tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap atau pekerja harian juga mengalami sedikit peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,6 persen, yaitu dari 1,1 juta orang-hari pada

**Tabel 3.3.3**  
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Migas dan Nonmigas  
(ribu orang)

Tahun	Migas		Nonmigas		Jumlah	
	Pekerja Tetap	Pekerja Harian	Pekerja Tetap	Pekerja Harian	Pekerja Tetap	Pekerja Harian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1980	21,5	1 062,5	29,1	1 116,6	50,6	2 179,1
1985	60,0	676,0	45,7	1 439,5	105,7	2 115,5
1990	33,5	1 561,3	36,4	1 182,9	69,9	2 744,2
1995	26,6	1 689,6	43,1	1 925,6	69,7	3 615,2
1996	25,1	1 431,1	41,9	1 637,7	67,0	3 068,8
1997	17,1	1 208,5	42,8	1 977,0	59,9	3 185,5
1998	18,8	1 927,7	46,3	2 297,1	65,1	4 224,8
1999	15,7	2 052,1	46,2	1 486,5	61,9	3 538,6
2000	17,5	2 424,7	39,2	1 802,7	56,7	4 227,4
2001	21,3	3 328,1	41,5	2 347,2	62,8	5 675,3
2002	22,2	1 458,8	45,6	1 184,6	67,8	2 643,4
2003	23,1	1 360,6	45,4	1 003,9	68,5	2 364,5
2004	25,4	1 227,8	45,2	910,1	70,6	2 137,9

tahun 1980 menjadi 1,23 juta orang-hari pada tahun 2004.

Untuk perusahaan nonmigas jumlah tenaga kerja tetap yang dapat diserap sebanyak 45,2 ribu orang pada tahun 2004, sedangkan pada tahun 1980 sebanyak 29,1 ribu orang yang berarti mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,85 persen. Untuk tenaga kerja harian meningkat dari 1,1 juta orang-hari pada tahun 1980 menjadi 1,7 juta orang-hari dibanding pada tahun 1994 atau meningkat sebesar 3,16 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2004 turun menjadi 0,9 juta orang hari atau turun sebesar 0,83 persen per tahun dalam kurun waktu 1980-2004.

Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja tetap perusahaan migas dan nonmigas, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen per tahun, yaitu dari 50,6 ribu orang pada tahun 1980 menjadi 70,6 ribu orang pada tahun 2004. Sebaliknya, hal tersebut jika dilihat dari dua titik data, padahal tenaga kerja harian pada tahun 1980 sebanyak 2,2 juta orang-hari dan pada tahun 2004 sedikit menurun menjadi 2,1 juta orang-hari yang berarti turun rata-rata sebesar 0,2 persen per tahun

hampir setiap tahun sejak 1980 selalu mengalami kenaikan kecuali tahun 1985, dan tahun 2004.

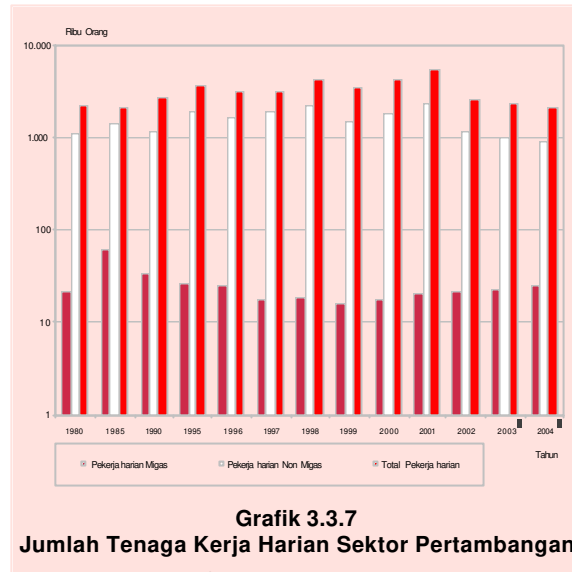
Tahun 1980-1985 jumlah tenaga kerja tetap mengalami kenaikan sebesar 15,9 persen per tahun. Pada tahun 1980 jumlah tenaga kerja tetap adalah sebesar 50,6 ribu orang dan tahun 1985 sebanyak 105,7 ribu orang. Tenaga kerja harian mengalami penurunan sebesar 0,6 persen per tahun yaitu dari 2,2 juta orang-hari pada tahun 1980 menjadi 2,1 juta orang-hari pada tahun 1985. Pada tahun 1990, jumlah tenaga kerja tetap yang diserap turun menjadi 69,9 ribu orang atau turun 7,9 persen per tahun. Sebaliknya, tenaga kerja harian mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan rata-rata 5,3 persen per tahun, yaitu dari 2,1 juta orang-hari pada tahun 1985 menjadi 2,7 juta orang-hari pada tahun 1990.

Tenaga kerja tetap kembali mengalami kenaikan pada periode tahun 1990-1994, yaitu dari 69,9 ribu orang pada tahun 1990 menjadi 72,4 ribu orang pada tahun 1994 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,9 persen per tahun. Tenaga kerja harian mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 2,7 juta orang-hari pada tahun 1990 menjadi 3,6 juta orang-hari pada tahun 1994 atau mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 7,46 persen



**Grafik 3.3.6**  
Jumlah Tenaga Kerja Tetap Sektor Pertambangan

Dalam kurun waktu 1994-2004 tenaga kerja tetap cenderung mengalami penurunan yaitu dari 72,4 ribu orang pada tahun 1994 menjadi 70,6 ribu orang pada tahun 2004 atau mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,3 persen. Sedangkan tenaga kerja harian dalam kurun waktu 1994-2004 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari 3,6 juta orang-hari pada tahun 1994 menjadi 2,1 juta orang-hari pada tahun 2004 atau mengalami penurunan rata-rata per tahun 5,3 persen.















**INDUSTRI PENGOLAHAN**



---

## 3.4 INDUSTRI PENGOLAHAN

### RINGKASAN

Peranan sektor Industri Pengolahan telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari peranan industri tersebut dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Sejak tahun 1991, peranan sektor Industri Pengolahan telah dapat melampaui sektor Pertanian. Peranan industri ini tidak terlepas dari peranan Industri Besar dan Sedang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDB.

Meskipun jumlah perusahaan dalam kelompok Industri Besar dan Sedang relatif sedikit dibandingkan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga, penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada keberadaan tenaga kerja di Indonesia. Bahkan, dalam hal pembentukan PDB dan produktivitas, sektor ini telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor Industri Pengolahan. Sehingga, dalam kurun waktu 30 tahun, industri ini telah banyak mengalami perkembangan aktivitas dari yang berorientasi padat karya menjadi padat modal dan padat teknologi.

### SUMMARY

*Manufacturing Industry is a potential sector in Indonesia Economy. Its contribution to the Gross Domestic Product (GDP) was higher than other sectors. Since 1991, its contribution surpassed Agriculture sector participation. The share of the manufacturing industry in formatting GDP was also supported by the Large and Medium Scale Manufacturing industry to show the power of Industrial sector.*

*In fact, only few establishments was a source of strength to the Large and Medium Scale Manufacturing (LMSM) sector, compared to the Smale Scale and Cottage Industries. Nevertheless, the absorbtion of the total number of workers has significantly declined the unemployment. In addition, LMSM sector contributed the Manufacturing Industry in developing GDP and the productivities. During thirty years period, this sector had shifted their activities from labour intensive to the capital and technological intensive.*

### 3.4.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan

Dalam kurun waktu hampir 30 tahun jumlah perusahaan industri besar dan sedang meningkat lebih dari dua kali, yaitu dari 8.926 perusahaan pada tahun 1975 menjadi 20.370 perusahaan pada tahun 2004, atau naik dengan laju pertumbuhan sebesar 2,9 persen per tahun.

Bila dilihat dari persebarannya jumlah perusahaan industri besar dan sedang dalam kurun waktu tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang mempunyai luas hanya sekitar tujuh persen wilayah Indonesia. Selama periode waktu tersebut, sekitar tiga perempat lebih total usaha industri besar dan sedang berada di Pulau Jawa dan kurang seperempatnya saja yang berada di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1975 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Pulau Jawa mencapai 83,7 persen dari jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang ada di Indonesia. Pada tahun 2004 komposisi jumlah perusahaan tersebut berubah menjadi 81,1 persen ada di Pulau Jawa dan 18,9 persen ada di luar Pulau Jawa.

Secara umum untuk jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang berada di Pulau Jawa naik dari 7,5 ribu perusahaan pada tahun 1975 menjadi 16,5 ribu perusahaan pada tahun 2004 atau naik dengan laju pertumbuhan sebesar 2,8 persen. Sedangkan untuk jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang berada di luar Pulau Jawa pada tahun 1975 ada sebanyak 1.453 perusahaan meningkat menjadi 3.858 perusahaan pada tahun 2004 atau naik dengan laju pertumbuhan



per tahun sebesar 3,4 persen. Sedikit lebih tinggi pertumbuhannya jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah perusahaan di Pulau Jawa.

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 jumlah perusahaan industri besar dan sedang tumbuh sekitar 3,4 persen per tahun dari tahun 1994-1996. Setelah itu hampir semua golongan pokok industri mengalami penurunan, secara nasional rata-rata turun 4,7 persen per tahun dari tahun 1996-1998. Kemudian tumbuh relatif lambat bahkan cenderung sedikit mengalami penurunan hingga tahun 2004. Pada periode 1999-2004 secara nasional rata-rata turun hingga 2,9 persen per tahun.

Perusahaan-perusahaan yang relatif terkena dampak paling berpengaruh karena adanya krisis ekonomi adalah industri alat angkatan (golongan pokok industri 35), industri mesin listrik (golongan pokok industri 31), industri barang dari logam (golongan pokok industri 28), industri galian bukan logam

**Tabel 3.4.1**  
**Sebaran Perusahaan Industri Besar dan Sedang**

Pulau	1975	1979	1986	1991	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004 <sup>e)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Jawa	7 473 (83,7)	9 363 (81,5)	13 745 (79,1)	16 800 (79,5)	20 736 (80,8)	18 815 (80,8)	18 898 (80,7)	17 841 (80,8)	17 465 (81,0)	16 607 (81,7)	16 512 (81,1)
Luar Jawa	1 453 (16,3)	2 119 (18,5)	3 638 (20,9)	4 342 (20,5)	4 913 (19,2)	4 474 (19,2)	4 533 (19,3)	4 231 (19,2)	4 107 (19,0)	3 717 (18,3)	3 858 (18,9)
Indonesia	8 926 (100,0)	11 482 (100,0)	17 383 (100,0)	21 142 (100,0)	25 649 (100,0)	23 289 (100,0)	23 431 (100,0)	22 072 (100,0)	21 572 (100,0)	20 324 (100,0)	20 370 (100,0)

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase



(golongan pokok industri 26), industri penerbitan dan percetakan (golongan pokok industri 22), industri kulit (golongan pokok industri 19), industri pakaian jadi (golongan pokok industri 18), dan industri tekstil (golongan pokok industri 17). Dalam kurun waktu 1996-1998 golongan pokok-golongan pokok industri

**Tabel 3.4.2**  
**Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang**

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	Pertumbuhan dalam %					
		1975 - 1979	1979 - 1984	1984 - 1989	1989 - 1994	1994 - 1999	1999 - 2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Makanan & Minuman	5,7	6,4	3,1	2,6	-0,1	-2,2
16	Tembakau	1,9	3,1	-0,1	-3,4	-1,4	-3,7
17	Tekstil	1,1	0,2	-2,7	2,7	-1,8	-1,7
18	Pakaian Jadi	9,0	15,6	11,0	7,4	-1,0	-5,0
19	Kulit	7,0	9,8	10,7	10,0	-1,9	-4,3
20	Kayu & Anyaman	9,4	8,9	8,7	3,5	-1,1	-4,7
21	Kertas	7,8	5,8	6,4	10,4	2,0	-2,8
22	Penerbitan & Percetakan	6,5	6,2	2,6	2,3	-1,6	-1,9
23	Batu Bara & Pengilangan	.	43,1	18,5	26,3	6,6	-7,5
24	Kimia	6,6	5,5	5,6	3,1	-1,5	-2,3
25	Karet	8,2	7,1	2,8	2,6	3,8	-0,9
26	Galian Bukan Logam	6,0	11,3	2,3	5,3	-1,2	-4,8
27	Logam Dasar	10,3	6,8	7,3	7,8	3,8	0,0
28	Barang Dari Logam	6,7	5,5	2,6	7,7	1,6	-2,6
29	Mesin Dan Perlengkapannya	6,3	5,7	8,6	7,2	2,2	1,5
30	Mesin Dan Peralatan Kantor	.	.	.	0,0	11,8	7,4
31	Mesin Listrik	7,5	7,2	0,8	6,9	0,9	-2,7
32	Radio, Televisi & Komunikasi	14,9	12,5	33,0	14,7	2,3	-3,7
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	7,1	3,1	8,5	5,9	0,4	2,0
34	Kendaraan Bermotor	17,8	13,5	28,0	4,3	-2,4	2,6
35	Alat Angkutan	8,5	3,8	1,5	3,4	-0,3	-3,3
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	9,6	10,2	15,3	12,6	2,1	-3,7
37	Daur Ulang	24,6	10,8	86,2	6,0	-16,5	2,5
	<b>Jumlah</b>	5,2	6,2	4,3	4,5	-0,2	-2,9

tersebut rata-rata turun hingga di atas 7 persen per tahun, bahkan untuk golongan pokok industri 35

**Tabel 3.4.3**  
**Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang**

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	1975	1979	1984	1989	1994	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 <sup>e</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Makanan & Minuman	2 076	2 744	3 749	4 370	4 967	5 276	4 972	4 935	4 838	4 678	4 611	4 412	4 419
16	Tembakau	952	1 044	1 213	1 210	1 017	1 022	941	948	952	855	831	789	785
17	Tekstil	2 148	2 264	2 285	1 996	2 278	2 394	2 062	2 079	2 075	1 954	1 919	1 848	1 912
18	Pakaian Jadi	325	501	1 033	1 744	2 493	2 702	2 284	2 370	2 354	2 152	2 058	1 882	1 835
19	Kulit	115	161	257	428	689	730	612	625	615	581	555	511	502
20	Kayu & Anyaman	463	724	1 110	1 687	2 006	2 030	1 856	1 897	1 902	1 764	1 674	1 449	1 493
21	Kertas	84	122	162	221	362	406	404	399	408	386	375	375	346
22	Penerbitan & Percetakan	288	394	531	603	676	734	629	624	622	594	576	545	568
23	Batu Bara & Pengilangan	.	*	6	14	45	64	61	62	64	54	53	54	42
24	Kimia	437	601	786	1 030	1 200	1 119	1 103	1 114	1 114	1 057	1 029	1 005	991
25	Karet	468	693	977	1 119	1 273	1 559	1 475	1 531	1 517	1 487	1 481	1 422	1 462
26	Galian Bukan Logam	624	834	1 426	1 597	2 069	2 342	1 991	1 952	1 974	1 673	1 641	1 517	1 528
27	Logam Dasar	41	67	93	132	192	218	228	231	232	219	215	210	231
28	Barang Dari Logam	306	424	553	628	911	1 130	956	984	979	949	949	896	864
29	Mesin Dan Perlengkapannya	110	149	197	298	421	465	463	470	465	459	422	389	507
30	Mesin Dan Peralatan Kantor	.	.	.	4	4	4	7	7	11	12	9	8	10
31	Mesin Listrik	90	129	183	190	265	353	279	277	266	255	253	247	242
32	Radio, Televisi & Komunikasi	5	10	18	75	149	122	157	167	186	197	204	206	138
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	17	24	28	42	56	62	56	57	55	55	54	49	63
34	Kendaraan Bermotor	15	34	64	220	272	208	228	241	256	248	266	256	274
35	Alat Angkutan	154	232	279	300	354	482	344	349	347	351	349	335	295
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	207	327	532	1 085	1 960	2 172	2 122	2 169	2 136	2 030	1 987	1 856	1 794
37	Daur Ulang	*	3	5	112	150	55	59	61	63	62	61	63	69
	<b>Jumlah</b>	8 926	11 482	15 487	19 105	23 809	25 649	23 289	23 549	23 431	22 072	21 572	20 324	20 370

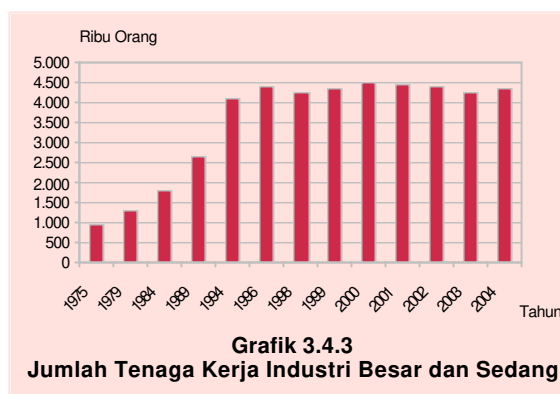


(industri alat angkutan) turun hingga 15,5 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Seri data industri besar dan sedang ini merupakan hasil koreksi dengan menggunakan metode *backcasting* dan didasarkan atas hasil pemutakhiran Direktori 2004.

### 3.4.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Seperti telah disebutkan sebelumnya, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar dan sedang mempunyai peranan yang cukup berarti dalam kurun waktu hampir 30 tahun terhadap total tenaga kerja di industri pengolahan. Dari tahun 1975 hingga tahun 2004 telah meningkat lebih dari 4 kali. Industri makanan/minuman, tekstil serta pakaian jadi, merupakan golongan pokok yang memiliki jumlah perusahaan terbesar dibandingkan dengan golongan pokok-golongan pokok industri lainnya. Perusahaan



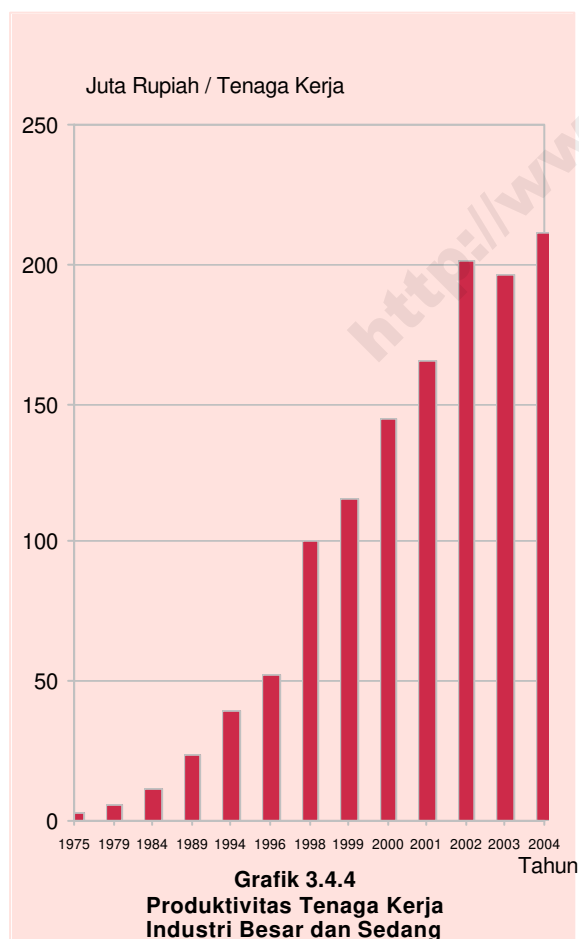
golongan pokok industri ini juga menyerap tenaga kerja paling besar, dan kecenderungan kontribusinya menurun hingga tahun 2004. Pada tahun 1975 ketiga golongan pokok industri tersebut menyerap sekitar 47,8 persen dari total tenaga kerja industri besar dan sedang, dan menurun menjadi 39,3 persen pada tahun 2004. Penurunan kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh ketiga golongan pokok industri di atas disebabkan oleh

**Tabel 3.4.4**  
Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Sedang,  
(ribu orang)

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	1975	1979	1984	1989	1994	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 <sup>e)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Makanan & Minuman	224	259	316	445	553	584	605	593	608	599	642	654	654
16	Tembakau	165	199	226	237	227	231	241	252	252	262	265	266	262
17	Tekstil	198	247	293	342	495	624	581	603	629	616	570	550	618
18	Pakaian Jadi	21	40	110	240	420	441	443	476	511	491	483	448	436
19	Kulit	10	14	21	71	311	334	279	277	276	287	274	244	235
20	Kayu & Anyaman	36	70	202	331	422	425	413	417	404	412	399	352	368
21	Kertas	9	18	26	47	87	102	112	107	114	115	113	120	119
22	Penerbitan & Percetakan	20	26	34	45	61	68	54	55	56	57	56	53	56
23	Batu Bara & Pengilangan	.	.	1	2	5	7	6	6	6	6	6	5	4
24	Kimia	52	78	110	207	302	197	198	202	203	211	207	211	203
25	Karet	61	101	138	195	259	323	310	322	337	344	344	341	351
26	Galian Bukan Logam	36	52	88	125	181	205	172	172	175	171	171	165	167
27	Logam Dasar	5	14	25	36	56	64	61	59	61	61	61	59	57
28	Barang Dari Logam	28	42	53	72	125	157	124	122	122	120	118	108	109
29	Mesin Dan Perlengkapannya	11	15	18	37	66	79	83	84	86	89	78	74	154
30	Mesin Dan Peralatan Kantor	.	.	.	0	1	2	2	3	3	3	3	3	4
31	Mesin Listrik	12	29	36	32	62	84	73	82	78	75	75	76	70
32	Radio, Televisi & Komunikasi	2	5	7	19	66	66	90	117	132	111	111	121	68
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	1	1	2	4	8	12	13	16	15	18	18	17	22
34	Kendaraan Bermotor	4	7	14	35	57	54	43	44	53	56	61	64	67
35	Alat Angkutan	23	33	47	49	65	87	66	66	70	68	71	71	62
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	10	16	31	114	267	257	281	292	292	291	284	269	252
37	Daur Ulang	.	0	0	7	12	2	2	3	3	6	3	3	3
	<b>Jumlah</b>	929	1 267	1 796	2 691	4 108	4 404	4 254	4 369	4 485	4 469	4 412	4 274	4 340

**Tabel 3.4.5**  
**Pertumbuhan Tenaga Kerja Perusahaan**  
**Industri Besar dan Sedang**

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	Pertumbuhan dalam %					
		1975 - 1979	1979 - 1984	1984 - 1989	1989 - 1994	1994 - 1999	1999 - 2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Makanan & Minuman	3,0	4,0	7,1	4,4	1,4	2,0
16	Tembakau	3,8	2,6	0,9	-0,9	2,1	0,8
17	Tekstil	4,5	3,4	3,1	7,7	4,0	0,5
18	Pakaian Jadi	13,8	22,2	16,9	11,8	2,6	-1,8
19	Kulit	6,4	8,6	27,8	34,3	-2,3	-3,3
20	Kayu & Anyaman	14,3	23,6	10,4	5,0	-0,3	-2,4
21	Kertas	14,5	7,0	12,8	13,1	4,1	2,2
22	Penerbitan & Percetakan	5,0	6,0	5,9	6,2	-2,1	0,2
23	Batu Bara & Pengilangan	.	25,3	27,7	20,9	3,4	-6,8
24	Kimia	8,4	7,2	13,4	7,8	-7,8	0,1
25	Karet	10,7	6,5	7,1	5,9	4,5	1,7
26	Galian Bukan Logam	7,8	10,9	7,3	7,7	-1,0	-0,6
27	Logam Dasar	23,0	12,3	7,4	9,3	1,1	-0,6
28	Barang Dari Logam	8,8	4,9	6,2	11,6	-0,5	-2,1
29	Mesin Dan Perlengkapannya	5,9	4,4	15,2	12,3	5,1	12,8
30	Mesin Dan Peralatan Kantor	.	.	.	53,3	17,5	7,4
31	Mesin Listrik	18,9	4,2	-2,4	14,4	5,7	-3,0
32	Radio, Televisi & Komunikasi	15,9	5,5	23,2	28,1	12,1	-10,4
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	17,7	7,6	15,7	18,7	13,3	6,6
34	Kendaraan Bermotor	11,5	14,6	19,9	10,2	-4,8	8,4
35	Alat Angkutan	7,4	7,3	0,9	6,0	0,2	-1,1
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	10,1	13,1	30,1	18,6	1,8	-2,9
37	Daur Ulang	27,5	16,2	110,8	13,1	-26,1	2,3
	<b>Jumlah</b>	6,4	7,2	8,4	8,8	1,2	-0,1



meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh golongan pokok industri lainnya seperti industri tembakau, kulit, kayu & anyaman, industri karet dan industri *furniture* dan pengolahan lainnya.

### 3.4.3 Perkembangan Produktivitas

Produktivitas tenaga kerja industri besar dan sedang meningkat cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari produktivitas tenaga kerja industri pengolahan secara keseluruhan. Pada tahun 1975 produktivitas industri ini sebesar 3,2 juta rupiah per tenaga kerja, meningkat menjadi 211,3 juta rupiah pada tahun 2004 atau naik secara rata-rata sebesar 15,5 persen per tahun.

Dalam kurun waktu 1994-1999 hampir seluruh industri mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Hal tersebut disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang tinggi yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999 serta pengaruh nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika yang terjadi pada waktu itu.

Setelah krisis mulai berlalu pertumbuhan produktivitas tenaga kerja kembali normal. Secara nasional dalam kurun waktu 1999-2004 laju pertumbuhan produktivitas mencapai 12,9 persen lebih

**Tabel 3.4.6**  
**Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja**  
**Perusahaan Industri Besar dan Sedang**

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	Pertumbuhan dalam %					
		1975 - 1979	1979 - 1984	1984 - 1989	1989 - 1994	1994 - 1999	1999 - 2004
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
15	Makanan & Minuman	11,8	15,0	10,9	12,4	26,2	15,3
16	Tembakau	13,6	19,2	14,1	17,3	23,2	8,9
17	Tekstil	15,5	18,4	16,5	11,5	27,6	8,1
18	Pakaian Jadi	19,0	11,7	10,1	10,6	27,4	8,2
19	Kulit	13,8	8,8	8,0	13,5	20,6	14,3
20	Kayu & Anyaman	20,9	12,1	22,0	8,5	18,1	11,5
21	Kertas	14,4	16,4	26,0	8,9	30,6	15,6
22	Penerbitan & Percetakan	16,4	6,9	15,9	14,7	8,4	20,7
23	Batu Bara & Pengilangan	.	24,4	29,6	1,7	26,9	26,1
24	Kimia	19,6	16,5	13,7	13,4	29,4	11,7
25	Karet	-1,1	4,3	14,0	8,5	30,2	2,8
26	Galian Bukan Logam	23,8	13,3	15,0	14,8	16,5	17,1
27	Logam Dasar	29,1	18,7	21,0	4,1	19,5	16,2
28	Barang Dari Logam	10,0	16,5	26,1	4,5	17,5	17,9
29	Mesin dan Perlengkapannya	17,7	15,1	13,3	19,0	20,6	-2,6
30	Mesin dan Peralatan Kantor	.	.	.	27,6	-4,9	12,1
31	Mesin Listrik	15,4	17,2	17,3	12,9	21,6	5,4
32	Radio, Televisi & Komunikasi	-6,6	13,4	6,9	11,6	30,5	14,3
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	17,5	12,3	21,6	13,5	31,4	-2,2
34	Kendaraan Bermotor	15,3	15,7	21,9	12,9	16,2	21,3
35	Alat Angkutan	9,2	17,5	17,8	13,7	32,7	26,9
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	19,2	17,4	13,6	10,1	22,2	8,8
37	Daur Ulang	.	-1,6	4,1	11,2	16,5	24,2
	<b>Jumlah</b>	12,7	14,7	15,5	10,6	24,2	12,9

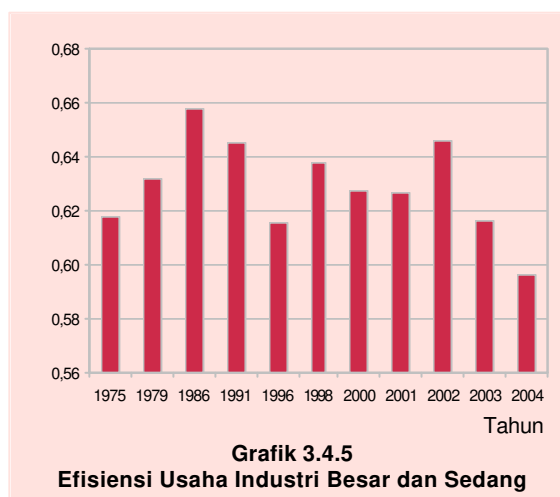
**Tabel 3.4.7**  
**Produktivitas Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Sedang,**  
**(juta rupiah/TK)**

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	1975	1979	1984	1989	1994	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 <sup>e)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Makanan & Minuman	3,9	6,7	13,5	22,7	40,7	55,1	112,3	130,4	155,5	188,5	212,1	248,1	266,0
16	Tembakau	2,4	4,4	10,7	20,7	45,9	62,4	107,2	130,1	140,2	234,0	206,2	204,2	198,8
17	Tekstil	1,5	3,1	7,3	15,6	26,9	37,3	82,3	90,8	101,8	103,4	117,7	133,8	133,7
18	Pakaian Jadi	1,5	3,5	6,1	9,9	16,3	21,8	48,3	54,9	51,9	56,0	59,0	70,5	81,3
19	Kulit	2,5	4,7	7,2	10,6	19,9	22,5	46,3	50,7	56,8	63,7	89,5	85,4	99,0
20	Kayu & Anyaman	1,9	4,8	8,5	22,9	34,4	39,3	72,2	78,9	89,9	98,5	105,8	132,8	135,9
21	Kertas	3,4	6,7	14,2	45,1	69,0	91,5	206,6	262,4	396,8	413,6	586,4	469,7	541,4
22	Penerbitan & Percetakan	3,2	6,8	9,5	19,8	39,4	46,0	65,8	59,0	86,6	98,3	113,1	142,5	150,9
23	Batu Bara & Pengilangan	.	.	9,2	33,6	36,6	47,0	98,7	120,3	237,6	216,2	273,9	341,1	383,8
24	Kimia	3,9	9,5	20,4	38,7	72,6	106,2	224,3	263,7	306,2	386,2	408,3	429,1	459,0
25	Karet	9,3	8,8	10,9	20,9	31,4	40,9	90,6	117,7	106,2	98,4	121,0	132,3	135,2
26	Galian Bukan Logam	1,6	4,7	8,8	17,8	35,4	45,5	69,5	76,1	107,7	136,7	140,5	154,4	167,4
27	Logam Dasar	6,3	22,7	53,6	139,0	170,3	265,0	387,0	415,6	505,0	704,9	874,9	835,4	880,3
28	Barang Dari Logam	3,2	5,2	11,1	35,3	44,0	51,4	91,5	98,4	153,6	106,0	776,6	185,4	224,1
29	Mesin dan Perlengkapannya	2,6	5,9	11,9	22,3	53,2	78,3	136,9	135,7	199,0	282,3	130,1	167,8	118,9
30	Mesin dan Peralatan Kantor	.	.	.	9,5	32,0	73,3	41,2	25,0	195,3	457,9	63,6	29,4	44,1
31	Mesin Listrik	3,6	7,3	16,1	35,7	65,5	125,9	143,3	174,5	296,3	251,7	283,6	226,9	226,9
32	Radio, Televisi & Komunikasi	17,5	12,4	23,2	32,4	56,0	122,4	218,5	212,1	303,5	385,7	311,3	330,0	413,8
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	1,5	3,3	5,9	15,8	29,7	37,8	90,0	116,6	107,4	75,9	72,3	100,7	104,2
34	Kendaraan Bermotor	5,6	11,4	23,7	63,8	116,7	165,8	137,0	246,7	498,3	486,4	800,0	434,3	649,1
35	Alat Angkutan	4,6	7,2	16,1	36,5	69,6	80,0	201,8	285,8	516,8	491,7	454,2	533,5	939,4
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	0,9	2,1	4,7	8,9	14,4	17,6	42,4	39,1	40,7	48,7	60,3	59,8	59,8
37	Daur Ulang	.	7,0	6,4	7,8	13,3	17,0	23,4	28,7	24,3	18,1	96,6	85,1	84,9
	<b>Jumlah</b>	<b>3,2</b>	<b>5,8</b>	<b>11,5</b>	<b>23,7</b>	<b>39,1</b>	<b>52,4</b>	<b>100,2</b>	<b>115,4</b>	<b>144,3</b>	<b>165,2</b>	<b>201,2</b>	<b>196,3</b>	<b>211,3</b>

tinggi dari pada kurun waktu sebelum krisis (1989-1994) yang mencapai sebesar 10,6 persen.

### 3.4.4 Efisiensi Usaha

Efisiensi perusahaan industri besar dan sedang relatif stabil dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 1975 yaitu sebesar 0,62 yang berarti untuk menghasilkan 1 rupiah nilai output diperlukan 0,62 rupiah biaya input. Nilai efisiensi ini kemudian turun pada tahun 2004 menjadi sebesar 0,59. Dalam kurun waktu hampir 30 tahun nilai efisiensi yang paling besar terjadi pada tahun 1989, yaitu sebesar 0,67.





**Tabel 3.4.8**  
**Efisiensi Usaha Industri Besar dan Sedang**

Kode Industri	Golongan Pokok Industri	1975	1979	1984	1989	1994	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Makanan & Minuman	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16	Tembakau	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
17	Tekstil	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
18	Pakaian Jadi	0,7	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
19	Kulit	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
20	Kayu & Anyaman	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21	Kertas	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
22	Penerbitan & Percetakan	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
23	Batu Bara & Pengilangan	.	.	0,7	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
24	Kimia	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
25	Karet	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
26	Galian Bukan Logam	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5
27	Logam Dasar	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
28	Barang Dari Logam	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,6	0,6
29	Mesin Dan Perlengkapannya	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6
30	Mesin Dan Peralatan Kantor	.	.	.	0,5	0,6	0,8	0,4	0,4	0,8	0,6	0,6	0,3	0,4
31	Mesin Listrik	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
32	Radio, Televisi & Komunikasi	0,5	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
33	Alat Kedokteran, Alat Ukur, Jam	0,5	0,5	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	0,7	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7
34	Kendaraan Bermotor	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4
35	Alat Angkutan	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5
36	Furniture & Pengolahan Lainnya	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
37	Daur Ulang	.	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
	<b>Jumlah</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>







STATISTIK  
60 Tahun **INDONESIA**  
MERDEKA





**ENERGI**

## 3.5 ENERGI

### RINGKASAN

Perkembangan kegiatan sektor usaha ketenagalistrikan, gas, dan air bersih selama kurun waktu 60 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan peningkatan yang berarti. Usaha ketenagalistrikan yang dikelola PT PLN (Persero) mengalami peningkatan baik dalam besarnya kapasitas daya terpasang, dan produksi tenaga listrik maupun besarnya listrik yang dijual/didistribusikan. Besarnya rata-rata pertumbuhan dari daya terpasang adalah 8,7 persen/tahun, produksi tenaga listrik 9,9 persen/tahun, dan listrik yang dijual mencapai 10,0 persen/tahun. Sementara pada kegiatan usaha gas yang dalam hal ini gas kota yang dikelola oleh PT PGN (Persero) mengalami pertumbuhan dalam hal produktivitas pekerja yang mencapai 18,6 persen/tahun, sedangkan gas kota yang diproduksi rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 21,4 persen/tahun. Pada kegiatan usaha air bersih yang dikelola baik perusahaan daerah air minum maupun perusahaan swasta lainnya rata-rata pertumbuhan air bersih yang disalurkan adalah sebesar 7,6 persen/tahun dengan tingkat produktivitas pekerja mengalami pertumbuhan rata-rata 1,1 persen/tahun.

Pemakaian energi primer selama kurun waktu 1995-2004 mencapai 6,485,1 juta Setara Barel Minyak (SBM) atau rata-rata naik 5,9 persen/tahun. Jenis energi primer yang paling banyak dipakai adalah minyak bumi yang mencapai 55,3 persen, kemudian gas bumi, batubara, tenaga air, dan panas bumi. Dalam pemakaian energi final yang mencapai total 4,203,5 juta SBM, jenis bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi final yang paling banyak dipakai yakni mencapai 71,5 persen, kemudian berturut-turut adalah listrik, gas bumi, batubara, dan LPG. Dilihat dari sisi pengguna energi final ternyata sektor industri dan transportasi lebih mendominasi dibandingkan dengan sektor rumah tangga.

### SUMMARY

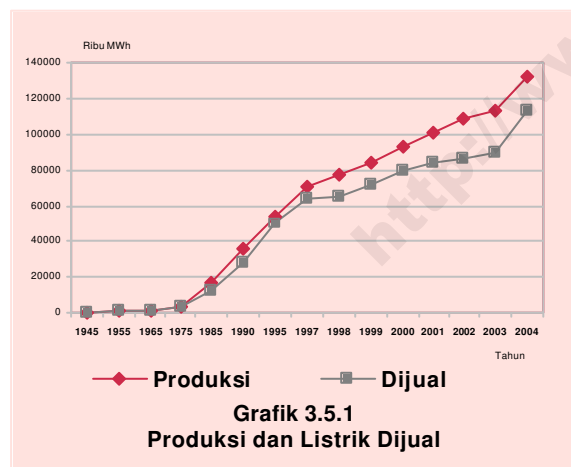
*The electricity produced by state electricity enterprise (PLN) has significantly increased. Installed power capacity, electric power production, and electric power sold increased annually at the rate of 8.7 percent, 9.9 percent and 10.0 percent respectively. Meanwhile, the data of city gas shows that productivity grew, on average, by 18.6 percent per annum, production also increased but at the of 21.4 percent per year. In the case of drinking water, it can be concluded that the production and productivity increased annually by 7.6 percent and 1.1 percent respectively.*

*The use of primary energy in the period of 1995-2004 reached 6,485.1 million equivalence to barrel oil (EBO) and increased by 5.9 percent per annum. The most primary energy used is oil which is accounted for 55.3 percent of the total amount of primary energy and followed by natural gas, coal, and geothermal. Moreover, the total used of final energy was 4,203.5 EBO. 71.5 percent of which was fuel oil. The other final energy used were electricity, geothermal, coal, and liquefied petroleum gas (LPG). It is also shown that manufacturing industry and transportation used the final energy more than that of household sector.*

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami kemajuan yang pesat pada periode 1945 sampai dengan 2004. Statistik listrik, gas, dan air bersih yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data yang telah dikumpulkan dan disusun secara rutin oleh BPS, yang meliputi ketenagalistrikan yang diusahakan oleh PT PLN (Persero), gas kota yang dikelola dan disalurkan oleh PT PGN (Persero) dan air bersih yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Di samping itu ada pula bahasan mengenai informasi energi primer dan energi final yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

### 3.5.1 Perkembangan Ketenagalistrikan

Perkembangan listrik PLN selama kurun waktu 1945-2004 mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan daya terpasang listrik sejak tahun 1945-2004 mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 8,7 persen setiap



tahun. Jika pada saat Indonesia merdeka daya terpasang listrik baru mencapai 158 MW maka pada tahun 2004 daya terpasang listrik PLN telah mencapai 21.204 MW.

Sejalan dengan peningkatan daya terpasang, produksi listrik maupun tenaga listrik yang dijual juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Produksi listrik PLN secara rata-rata meningkat 9,9 persen setiap

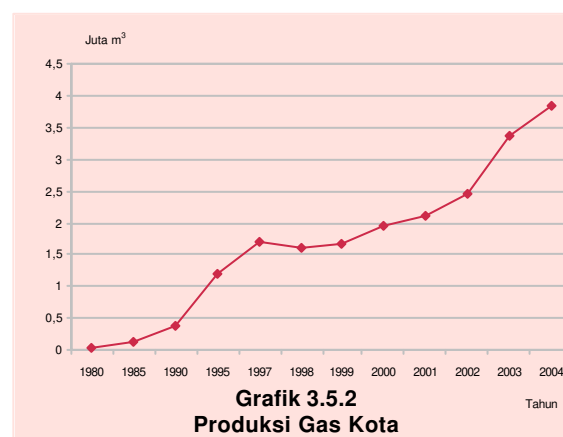
**Tabel 3.5.1**  
**Perkembangan Perusahaan Listrik Negara**

Tahun	Daya Terpasang (MW)	Produksi Listrik (ribu MWh)	Listrik dijual (ribu MWh)
(1)	(2)	(3)	(4)
1945	158	504	403
1955	258	900	720
1965	559	1 513	1 204
1975	1 254	3 770	2 804
1985	5 299	16 245	12 088
1990	9 119	35 087	27 740
1995	14 981	54 597	49 629
1997	17 042	70 660	64 295
1998	20 374	77 263	65 359
1999	20 596	84 378	71 735
2000	20 850	92 821	79 710
2001	21 052	101 630	84 499
2002	21 114	108 362	87 088
2003	21 204	113 020	89 816
2004	21 722	131 878	112 875

tahun, yakni dari 504 ribu MWh pada tahun 1945 menjadi 131.878 ribu MWh pada tahun 2004. Tenaga listrik PLN yang berhasil dijual pada tahun 1945 baru sebesar 403 ribu MWh, sedangkan pada tahun 2004 telah terjual sebanyak 112.875 ribu MWh atau meningkat secara rata-rata sebesar 10,02 persen per tahun.

### 3.5.2 Perkembangan Gas Kota

Data aktivitas ekonomi Gas Kota yang diusahakan oleh PT PGN (Persero) mulai diinventarisasi oleh BPS pada tahun 1980. Berdasarkan data tahun 1980 sampai dengan 2004, aktivitas ekonomi PGN telah mengalami





**Tabel 3.5.2**  
**Perkembangan Perusahaan Gas Negara**

Tahun	Jumlah Pekerja	Gas Kota yang dihasilkan (ribu m <sup>3</sup> )	Produktivitas pekerja (m <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
1980	834	36 867	44 205
1985	912	131 235	143 898
1990	1 155	365 600	316 537
1995	1 293	1 186 022	917 264
1997	1 236	1 692 513	1 369 347
1998	1 331	1 599 683	1 201 866
1999	1 918	1 641 965	856 082
2000	1 834	1 968 257	1 073 204
2001	1 063	2 116 524	1 991 086
2002	1 275	2 458 017	1 927 856
2003	1 529	3 372 739	2 205 846
2004	1 461	3 858 851	2 641 240

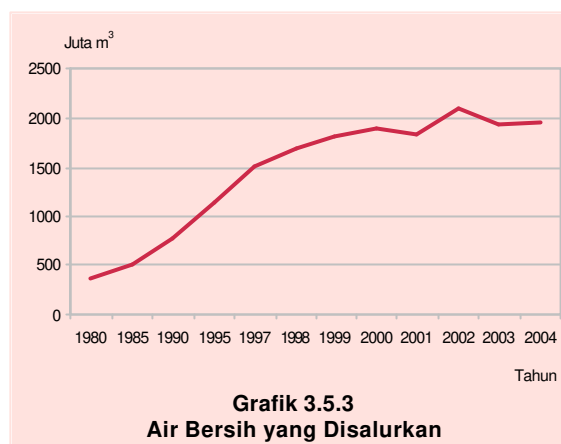
peningkatan, baik yang menyangkut jumlah tenaga kerja, dan gas kota yang dihasilkan, maupun produktivitas per pekerja. Jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 2,4 persen pertahun, yakni dari sebanyak 834 orang pada tahun 1980 menjadi 1.461 orang pada tahun 2004.

Demikian pula halnya dengan gas kota yang dihasilkan PGN, pada periode tahun 1980 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Gas kota yang dihasilkan pada tahun 1980 sebesar 36,9 juta m<sup>3</sup>, pada tahun 2004 menjadi sebesar 3.858,9 juta m<sup>3</sup> atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 21,4 persen setiap tahun. Produktivitas pekerja pada periode tersebut juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yaitu secara rata-rata sebesar 18,9 persen per tahun.

### 3.5.3 Perkembangan Air Bersih

Jumlah perusahaan air minum dari tahun 1980-2004 telah berkembang cukup pesat, dari sebanyak 190 perusahaan pada tahun 1980 menjadi sebanyak 473 perusahaan pada tahun 2004, atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,1 persen per tahun.

Sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan, tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan juga



**Grafik 3.5.3**  
**Air Bersih yang Disalurkan**

mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6,4 persen per tahun. Jika pada tahun 1980 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan air minum sebanyak 10.957 orang, pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang diserap telah mencapai 45.782 orang. Jumlah air minum yang disalurkan kepada para pelanggan PAM selama periode 1980-2004 juga mengalami peningkatan, secara rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun atau meningkat dari 361 juta m<sup>3</sup> pada tahun 1980 menjadi 1.947 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2004.

Pertumbuhan produktivitas pekerja perusahaan air minum juga mengalami kenaikan, meskipun relatif kecil, yaitu sebesar 1,1 persen per tahun. Ini berarti kemampuan setiap pekerja dalam menghasilkan atau memproduksi air minum mengalami peningkatan. Secara

**Tabel 3.5.3**  
**Perkembangan Perusahaan Air Bersih**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pekerja	Air Bersih yang disalurkan (juta m <sup>3</sup> )	Produktivitas Pekerja (m <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	190	10 957	361	32 947
1985	260	16 954	497	29 315
1990	398	26 487	765	28 882
1995	445	35 601	1 158	32 527
1997	510	39 082	1 510	38 637
1998	490	40 958	1 684	41 115
1999	470	41 587	1 808	43 475
2000	457	41 025	1 889	46 045
2001	456	41 620	1 835	44 089
2002	469	44 693	2 095	46 875
2003	470	44 788	1 938	43 271
2004	473	45 782	1 947	42 528

absolut pada tahun 1980 produktivitas per pekerja adalah sebesar 32.947 m<sup>3</sup>, sedangkan untuk tahun 2004 meningkat menjadi sebesar 42.528 m<sup>3</sup>.

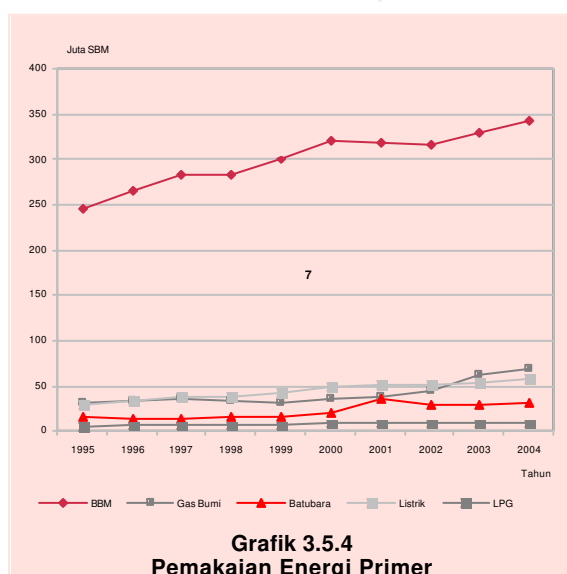
### 3.5.4 Pemakaian Energi Primer

Pada periode 1995-2004, pemakaian seluruh jenis energi primer mencapai 6.485,1 juta Setara Barel Minyak (SBM) atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 5,9 persen per tahun. Dalam periode 1995-2004 terlihat bahwa jenis energi primer yang paling banyak dipakai adalah minyak bumi dengan pemakaian sebanyak 3.586,2 juta SBM atau 55,3 persen. Jenis energi primer

**Tabel 3.5.4**  
Pemakaian Energi Primer (juta SBM)

Tahun	Minyak Bumi	Gas Bumi	Batu bara	Tenaga Air	Panas Bumi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	287,2	133,5	36,3	26,3	3,8	487,1
1996	305,7	146,4	44,6	26,9	4,4	528,0
1997	338,1	147,6	54,8	22,1	5,6	568,2
1998	335,2	150,0	57,3	25,7	7,3	575,4
1999	354,0	168,5	62,5	26,0	7,5	618,5
2000	378,0	166,1	87,4	25,1	9,2	665,8
2001	386,2	164,4	120,9	29,4	11,8	712,7
2002	392,1	169,9	147,8	29,8	11,8	751,4
2003	397,6	161,7	150,8	30,7	23,4	764,2
2004	412,2	165,2	176,6	31,2	28,6	813,9
Jumlah	3 586,2 (55,3)	1 573,4 (24,3)	939,0 (14,5)	273,1 (4,2)	113,4 (1,8)	6 485,1 (100,0)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase



lainnya yang dipakai berturut-turut adalah gas bumi sebesar 24,3 persen, batubara 14,48 persen, tenaga air 4,2 persen, dan panas bumi 1,75 persen.

### 3.5.5 Pemakaian Energi Final

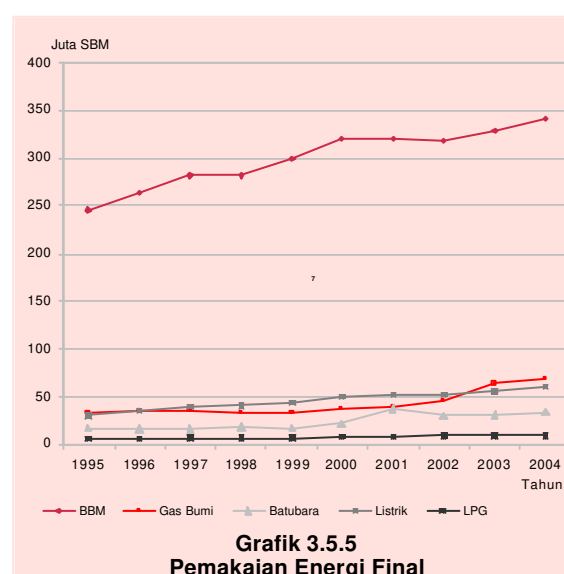
Energi final adalah energi yang siap untuk digunakan oleh konsumen akhir, misalnya listrik, gas bumi, LPG, dan BBM (Bahan Bakar Minyak, seperti minyak tanah, solar, bensin, avgas, avtur, dan minyak bakar).

Pemanfaatan energi final pada periode 1995-2004 mencapai 4.203,5 juta SBM atau secara rata-rata terdapat

**Tabel 3.5.5**  
Pemakaian Energi Final

Tahun	BBM	Gas Bumi	Batu bara	Listrik	LPG	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	245,9	31,9	16,9	30,3	5,4	330,4
1996	264,8	35,1	15,7	34,8	6,1	356,5
1997	282,2	36,4	16,3	39,1	7,0	380,9
1998	282,3	34,1	18,1	40,4	7,0	381,9
1999	299,3	33,8	17,2	43,8	7,5	401,6
2000	321,2	37,0	22,3	49,6	8,3	438,4
2001	320,0	39,0	36,7	51,6	8,3	455,6
2002	317,8	46,0	29,7	52,1	8,8	454,4
2003	329,8	64,0	31,1	55,5	8,8	489,2
2004	342,1	69,8	33,5	59,9	9,3	514,6
Jumlah	3 005,3 (71,5)	427,0 (10,2)	237,6 (5,7)	457,1 (10,9)	76,5 (1,8)	4 203,5 (100,0)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase

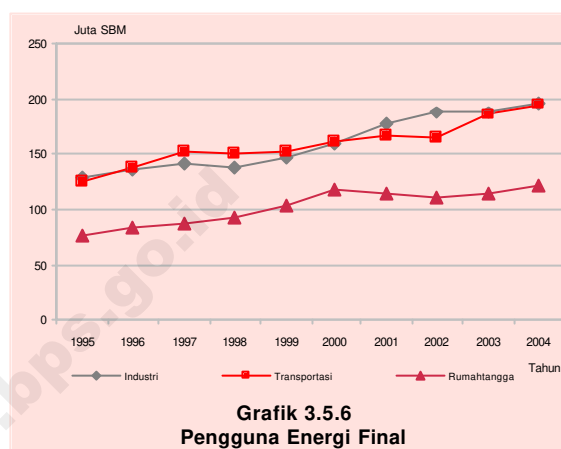


kenaikan sebesar 5,05 persen per tahun. Jenis energi final yang paling banyak dimanfaatkan adalah bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai total 3.005,3 juta SBM atau sekitar 71,5 persen dibandingkan dengan jenis pemanfaatan energi final yang lainnya. Listrik merupakan jenis energi final kedua terbesar yang paling banyak dimanfaatkan yaitu mencapai 457,1 juta SBM atau 10,9 persen, sedangkan urutan berikutnya adalah gas bumi, batubara dan LPG yaitu masing-masing sebesar 427,0 juta SBM (10,2 persen), 237,6 juta SBM (5,7 persen), dan 76,5 juta SBM (1,8 persen).

Dari sisi pengguna energi final, pada periode 1995–2004 terlihat bahwa sektor industri dan transportasi lebih mendominasi dari keseluruhan pemanfaatan energi final. Kedua sektor tersebut memanfaatkan masing-masing adalah 1.597,5 juta SBM atau 37,95 persen untuk sektor industri dan 1.587,8 juta SBM atau 37,72 persen untuk sektor transportasi. Satu sektor pengguna energi final lainnya yakni sektor rumah tangga memanfaatkan sebesar 1.024,1 juta SBM (24,33 persen).

**Tabel 3.5.6**  
**Pengguna Energi Final (juta SBM)**

Tahun	Industri	Transportasi	Rumahtangga	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1995	128,3	124,3	77,5	330,1
1996	135,9	137,4	83,3	356,5
1997	140,6	152,2	88,2	381,0
1998	138	150,8	93,1	381,9
1999	146	151,7	103,8	401,5
2000	159,8	160,8	118,3	438,9
2001	176,2	165,2	113,7	455,1
2002	187,4	164,1	110,4	461,9
2003	188,1	185,9	115,0	489,0
2004	197,3	195,5	120,8	513,6
Jumlah	1 597,5 (37,95)	1 587,8 (37,72)	1 024,1 (24,33)	4 209,4 (100,00)















**KONSTRUKSI**



---

## 3.6 KONSTRUKSI

### RINGKASAN

Keadaan sektor konstruksi di Indonesia menunjukkan peningkatan walaupun dampak krisis ekonomi sangat berpengaruh pada sektor ini di tahun 1999. Pada tahun 1989 perusahaan yang bergerak di sektor ini berjumlah 30.518 dengan 289,5 ribu orang pekerja tetap, sedangkan pada tahun 1999 jumlah perusahaan berkurang menjadi 25.087 dengan pekerja tetap sebanyak 153,6 ribu orang. Namun demikian, pada tahun 2003 jumlah tersebut meningkat menjadi 41.938 perusahaan dengan tenaga kerja 219,2 ribu orang seiring dengan mulai membaiknya ekonomi Indonesia. Bahkan pada tahun 2004 diperkirakan jumlah perusahaan akan mencapai 46.892 dengan pekerja tetap sebanyak 236,6 ribu orang. Nilai konstruksi yang dapat diselesaikan terus meningkat. Pada tahun 1999 nilai konstruksi yang diselesaikan sebesar Rp 14,27 triliun dan meningkat menjadi Rp 16,94 triliun. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat menjadi Rp 24,34 triliun pada tahun 2004.

### SUMMARY

*Construction sector in Indonesia showed a steady increase both in the number of establishment and workers. In 1989, the number of establishment in this sector was 30,518 when permanent workers were 289,5 thousand however, in 1999, it decreased to 25,087 establishments with 153,6 permanent workers. Nevertheless, Although they were affected by the economic crisis, in 2003 this sector seemed to recover from the economic crisis. The number of establishments for this year was 41,938 when permanent workers were 219,2 thousands and are expected to be 46,892 with 236,6 permanent workers by 2004. The value of works completed by this sector also increased over time. In 1999 the value of works completed was Rp 14,27 billion and increased to Rp 16.94 billion in 2003. It is estimated that this number reached Rp 24.34 billion in 2004.*

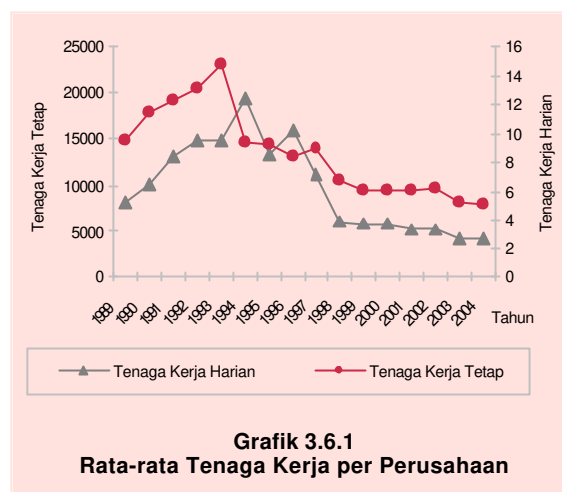
Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga 60 tahun Indonesia merdeka tidak terlepas dari upaya-upaya pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan. Aktivitas dari pembangunan infrastruktur tersebut antara lain berupa pembangunan gedung, pembuatan dan perbaikan prasarana jalan dan jembatan sebagai penghubung antar wilayah, pembangunan irigasi untuk pertanian, pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagai penerangan rumah tangga dan sumber energi vital bagi perusahaan dan pekerjaan lainnya. Hasil pembangunan infrastruktur sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Statistik sektor jasa konstruksi dilaksanakan secara rutin melalui Survei Tahunan Perusahaan Konstruksi dan mencakup perusahaan konstruksi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan usaha tersebut sampai dengan tahun 2004 dapat diukur dari besaran laju pertumbuhan jumlah perusahaan konstruksi, nilai konstruksi yang dihasilkan dan banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap.

Jumlah perusahaan konstruksi sejak tahun 2000

**Tabel 3.6.1**  
**Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Perusahaan Konstruksi**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jenis Tenaga Kerja	
		Pekerja Tetap (ribu orang)	Pekerja Harian (juta orang-hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1989	30 518	289,49	249,76
1990	31 113	356,48	312,20
1991	34 229	418,72	450,14
1992	34 933	456,82	523,06
1993	35 495	522,70	527,95
1994	30 854	288,64	596,25
1995	33 198	307,18	442,75
1996	35 992	301,25	577,29
1997	32 013	289,22	361,44
1998	28 738	192,30	173,61
1999	25 087	153,61	145,81
2000	28 564	172,21	167,44
2001	32 587	198,25	168,69
2002	37 253	229,31	190,67
2003 <sup>a)</sup>	41 938	219,24	175,10
2004 <sup>a)</sup>	46 892	236,64	196,71



sampai dengan 2004, kembali mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan kondisi tahun 1999 yang mengalami penurunan akibat terpuruknya perekonomian Indonesia dan krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara-negara di Asia. Jumlah perusahaan konstruksi pada tahun 2002 adalah sebanyak 37.253 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 41.938 pada tahun 2003, diperkirakan pada tahun 2004 jumlah perusahaan konstruksi tersebut menjadi sebesar 46.892.

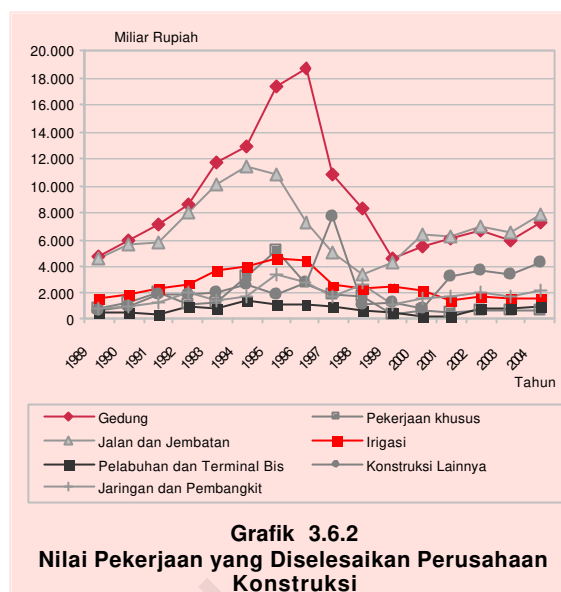
Sumber daya manusia dalam kegiatan konstruksi digolongkan dalam dua kelompok, yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja harian lepas. Data menunjukkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah perusahaan konstruksi. Jumlah perusahaan konstruksi pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 secara rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata pekerja harian per perusahaan sejak tahun 1994 mengalami penurunan, demikian pula dengan rata-rata tenaga kerja tetap per perusahaan mengalami penurunan sejak tahun 1995. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah perusahaan konstruksi semakin bertambah banyak tetapi tidak diikuti oleh besarnya jumlah yang menangani proyek. Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan tingginya tingkat persaingan antara perusahaan jasa konstruksi.

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor jasa konstruksi mulai mengalami kenaikan sejak tahun 1999.

Pada tahun 1997 jumlah tenaga kerja tetap adalah sebanyak 289,22 ribu orang dan jumlah tenaga kerja harian lepas adalah sebanyak 361,44 juta orang-hari. Jumlah tersebut mengalami penurunan secara drastis pada tahun 1998 menjadi 192,30 ribu orang pekerja tetap dan untuk pekerja harian sebanyak 173,61 juta orang-hari. Jumlah usaha/tenaga kerja mulai beranjak naik pada tahun 2000 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2004 diperkirakan terdapat sebanyak 236,64 ribu orang pekerja tetap dan 196,71 juta orang-hari pekerja harian.

Jenis pekerjaan konstruksi dengan nilai terbesar yang diselesaikan adalah pekerjaan pembangunan gedung dan pekerjaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan sejak tahun 2000 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini sekaligus sangat mendukung mobilitas penduduk Indonesia yang semakin hari semakin tinggi.

Tahun 2000 merupakan titik belok bagi usaha konstruksi, nilai konstruksi yang diselesaikan kembali mengalami kenaikan. Nilai konstruksi yang diselesaikan



**Grafik 3.6.2**  
**Nilai Pekerjaan yang Diselesaikan Perusahaan Konstruksi**

sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 1999 nilai konstruksi yang diselesaikan adalah sebesar 14,27 triliun rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan menjadi 16,94 triliun rupiah pada tahun 2000. Diperkirakan pada tahun 2004 nilai tersebut akan mencapai sebesar 24,34 triliun rupiah.

**Tabel 3.6.2**  
**Nilai Pekerjaan yang Diselesaikan Perusahaan Konstruksi**  
**(Milliar Rupiah)**

Tahun	Jenis Pekerjaan							Jumlah
	Gedung	Pekerjaan Khusus	Jalan dan Jembatan	Irigasi	Pelabuhan dan Terminal Bis	Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Jaringan dan Pembangkit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1989	4 763,70	810,70	4 607,80	1 496,80	470,30	549,40	790,90	13 489,60
1990	5 863,90	1 254,60	5 625,60	1 708,50	401,30	855,60	925,40	16 634,90
1991	7 099,00	1 898,00	5 810,20	2 176,00	345,60	1 819,50	1 188,10	20 336,40
1992	8 660,60	1 016,60	8 007,70	2 708,80	883,00	1 827,50	1 928,60	25 032,80
1993	11 751,20	1 202,30	10 055,60	3 635,20	731,20	1 922,30	1 355,40	30 653,20
1994	12 894,10	3 199,32	11 395,25	4 058,39	1 391,30	2 556,80	1 613,72	37 108,88
1995	17 384,91	5 133,62	10 825,06	4 574,01	1 104,99	1 716,07	3 467,35	44 206,02
1996	18 670,45	2 701,99	7 225,90	4 462,66	1 002,97	2 877,73	2 853,81	39 795,51
1997	10 872,22	1 757,79	5 036,07	2 463,27	874,66	7 766,13	1 685,98	30 456,12
1998	8 308,30	1 568,12	3 391,68	2 187,45	630,79	1 004,88	2 607,57	19 698,80
1999	4 588,49	324,65	4 363,38	2 378,70	438,19	1 194,87	981,29	14 269,58
2000	5 533,77	609,14	6 397,99	2 019,79	210,71	721,40	1 451,83	16 944,63
2001	6 027,15	455,59	6 185,98	1 372,30	175,67	3 240,29	1 629,34	19 086,33
2002	6 725,94	592,07	7 001,46	1 558,44	716,80	3 674,82	1 907,82	22 177,36
2003 <sup>1)</sup>	5 919,70	525,27	6 547,82	1 427,47	694,05	3 450,72	1 589,16	20 154,20
2004 <sup>2)</sup>	7 198,00	640,00	7 827,50	1 536,10	870,70	4 228,10	2 041,10	24 341,50













**PERDAGANGAN**



## 3.7 PERDAGANGAN

### RINGKASAN

Hingga tahun 2004 nilai ekspor mencapai US\$ 71.584,6 juta. Meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 1945 sebesar US\$ 491 juta, 1968 sebesar US\$ 730,7 juta, dan tahun 1984 sebesar US\$ 19.218,5 juta. Ekspor migas mengalami peningkatan sejak tahun 1973 sebesar US\$ 1.608,7 juta menjadi US\$ 16.140,7 juta tahun 1983, kemudian turun menjadi US\$ 9.745,4 juta pada tahun 1993 dan pada tahun 2004 naik kembali mencapai US\$ 15.645,3 juta. Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat menjadi negara mitra dagang utama. Pada tahun 1994 ketiga negara ini mendominasi 52,2 persen perdagangan ekspor Indonesia. Sampai tahun 2004, peranan ketiganya mengalami penurunan mencapai 42,9 persen. Kecuali pada periode tahun 1955-1960, nilai impor sejak Indonesia merdeka hingga sekarang mengalami peningkatan yang pesat yaitu dari US\$ 594,9 juta menjadi US\$ 46.524,5 juta di tahun 2004 atau meningkat sekitar delapan puluh kali lipat. Peranan impor nonmigas dari tahun ke tahun selalu lebih besar dari peranan impor migas. Peranan nonmigas terbesar terjadi di tahun 1968 sebesar 99,1 persen dan terendah sebesar 74,8 persen di tahun 2004. Singapura, Jepang, Amerika Serikat dan Cina merupakan mitra dagang impor yang utama. Sampai pada tahun 2004 peranan keempatnya mencapai 33,1 persen.

### SUMMARY

*Up to the year 2004, Indonesian exports had grown significantly to US\$ 71,584.6 million. Compared with the year 1945 for about US\$ 491 million, in 1968 for about US\$ 730.7 million and in 1984 around US\$ 19,218.5 million. Oil and gas exports had increased since 1973 from US\$ 1,608.7 million to US\$ 16,140.7 million in 1983, then it decreased to US\$ 9,745.4 million in 1993 and to US\$ 15,645.3 million in 2004. Singapore, Japan, and United States become the main trading partner countries for Indonesia. In 1994, they dominated 52.2 percent of total Indonesian export. Up to 2004, their contributions had decreased to 42.9 percent. Since Independence day (except in 1955-1960), Indonesian import experienced extraordinary increasing; i.e it increased from US\$ 594.9 million in 1945 to US\$ 46,524.5 million in 2004 or increased by eighty times. The contribution of non oil's gas import was always higher than the contribution of oil and gas import. It's highest contribution happened in early 1968, at 99.1 percent and the lowest at 74.8 percent in 2004. Singapore, Japan, United States and China were the main import trading partner. In 2004, their contributions were 33,1 percent*

Salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia adalah perdagangan luar negeri. Dari kegiatan ekspor diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan, sementara dari kegiatan impor diperoleh bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam pembangunan.

Sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda (sebelum tahun 1945) telah dilakukan pencatatan dan kompilasi data statistik ekspor dan impor secara teratur, karena mengingat pentingnya informasi tentang ekspor dan impor bagi perdagangan kala itu.

Selain statistik ekspor dan impor, dilakukan juga pencatatan statistik perdagangan dalam negeri, untuk melihat peranannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan banyaknya tenaga kerja di sektor perdagangan. Statistik Perdagangan Dalam Negeri

dilakukan berdasarkan survei usaha terintegrasi, sedangkan tenaga kerja di sektor perdagangan tercakup dalam bab yang mengulas tentang tenaga kerja.

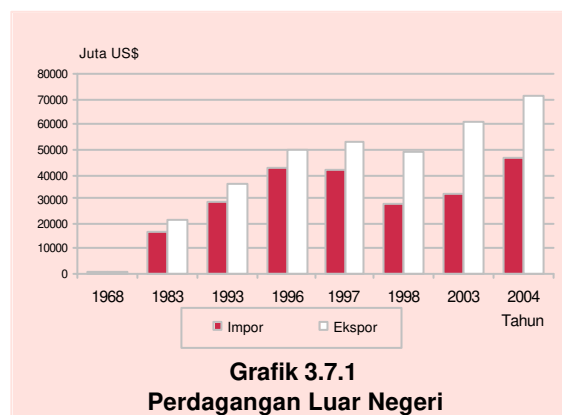
### 3.7.1 Nilai Ekspor dan Impor

Sejak tahun 1968, pemerintah mengupayakan ekspor sebagai sumber devisa utama. Di samping itu ekspor juga diandalkan untuk program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi nasional, khususnya pada tahap konsolidasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, penyelenggaraan hubungan ekonomi luar negeri diselaraskan dengan politik luar negeri yang bebas aktif.

Pada pertengahan tahun 80-an penerimaan devisa dari minyak bumi kelihatan menurun. Pemerintah kemudian menggiatkan ekspor komoditas nonmigas khususnya hasil industri sebagai pemacu ekspor dengan berbagai deregulasi untuk mempermudah tata laksana ekspor. Pada awal tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter. Kondisi ini sangat memukul perdagangan luar negeri Indonesia dengan turunnya nilai ekspor dan impor pada tahun 1998 dan 1999. Dengan berbagai kebijaksanaan di sektor industri dan perdagangan, pemerintah berusaha untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri. Upaya pemerintah dalam memajukan ekspor ini semakin dirasakan hasilnya, hingga pada tahun 2003 nilai ekspor mencapai US\$ 61.058,2 juta, dan pada tahun 2004 mencapai US\$ 71.584,6 juta .

**Tabel 3.7.1**  
**Nilai Perdagangan Luar Negeri Indonesia**  
**(juta dolar AS)**

Tahun (1)	Ekspor (2)	Impor (3)
1945	491,3	594,9
1950	799,7	439,0
1955	945,5	631,1
1960	840,8	577,7
1965	707,7	694,7
1968	730,7	715,8
1973	3 210,8	2 729,1
1978	11 643,2	6 690,4
1983	21 145,9	16 351,8
1988	19 218,5	13 248,5
1993	36 823,0	28 327,8
1994	40 053,4	31 983,5
1995	45 418,0	40 628,7
1996	49 814,8	42 928,5
1997	53 443,6	41 679,8
1998	48 847,6	27 336,9
1999	48 665,5	24 003,3
2000	62 124,0	33 514,8
2001	56 320,9	30 962,1
2002	57 158,8	31 288,9
2003	61 058,2	32 550,7
2004	71 584,6	46 524,5



### 3.7.2 Perkembangan Ekspor

Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1968, nilai ekspor nonmigas mendominasi ekspor nasional. Namun pada tahun 1973 ekspor migas mulai mengalami kenaikan yang sangat berarti, melampaui ekspor nonmigas sehingga mengakibatkan berubahnya struktur ekspor. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun (1973–1987) peranan ekspor migas menjadi komponen penting sebagai penghasil devisa negara.

Penemuan ladang minyak baru, meningkatnya permintaan minyak dunia, serta meningkatnya harga ekspor menyebabkan nilai ekspor secara keseluruhan meningkat dari US\$ 3.210,8 juta pada tahun 1973 menjadi US\$ 11.643,2 juta pada tahun 1978 atau naik hampir empat kali lipat. Walaupun selama empat belas tahun (1973–1987) nilai absolut ekspor nonmigas naik tetapi peranannya terhadap total ekspor terus menurun. Pada tahun 1983 peranan ekspor migas bahkan lebih dari 70 persen, namun mulai tahun 1988 perkembangan ekspor nonmigas meningkat pesat sehingga

**Tabel 3.7.2**  
**Perkembangan Ekspor 1945–2004**  
(juta dolar AS)

Tahun (1)	Nonmigas (2)	Migas (3)	Jumlah (4)
1945	364,7	126,6	491,3
1950	652,6	147,1	799,7
1955	729,7	215,8	945,5
1960	621,4	219,4	840,8
1965	435,7	272	707,7
1968	433,2	297,5	730,7
1973	1 602,1	1 608,7	3 210,8
1978	4 204,7	7 438,5	11 643,2
1983	5 005,2	16 140,7	21 145,9
1988	11 536,9	7 681,6	19 218,5
1993	27 077,6	9 745,4	36 823,0
1994	30,359,8	9 693,6	40 053,4
1995	34 953,6	10 464,4	45 418,0
1996	38 092,9	11 721,8	49 814,7
1997	41 821,1	11 622,5	53 443,6
1998	40 975,5	7 872,2	48 847,7
1999	38 873,2	9 792,3	48 665,5
2000	47 757,4	14 366,6	62 124,0
2001	43 684,6	12 636,3	56 320,9
2002	45 046,1	12 112,7	57 158,8
2003	47 406,8	13 651,4	61 058,2
2004	55 939,3	15 645,3	71 584,6

**Tabel 3.7.3**  
**Perkembangan Ekspor menurut Negara Tujuan Utama**  
(juta US\$)

Tahun (1)	Singapura (2)	Jepang (3)	Australia (4)	Amerika Serikat (5)	Inggris (6)	Jerman (7)	Belanda (8)	Lainnya (9)	Jumlah (10)
1945	120,0	22,6	19,2	96,1	39,0	21,2	70,3	102,9	491,3
1950	260,7	10,8	17,1	136,2	31,7	22,7	202,2	118,3	799,7
1955	183,3	72,7	25,0	222,0	91,4	41,1	149,9	160,1	945,5
1960	193,2	34,3	33,6	196,6	90,9	51,0	2,4	238,8	840,8
1965	5,6	112,2	64,9	159,2	6,0	54,3	92,2	213,3	707,7
1968	118,3	179,5	74,6	118,7	11,4	52,7	52,9	122,6	730,7
1973	341,0	1 707,4	54,9	465,3	32,1	118,7	100,9	390,5	3 210,8
1978	1 241,0	4 565,5	107,0	2 962,2	53,6	226,4	235,4	2252,1	11 643,2
1983	3 127,8	9 678,2	472,5	4 266,7	199,0	252,4	289,2	2860,1	21 145,9
1988	1 653,2	8 018,3	324	3 073,7	348,8	455,5	646,3	4698,7	19 218,5
1993	3 372,0	11 172,2	851,7	5 229,8	1 004,9	1 178,2	1 086,4	12 927,8	36 823,0
1994	4 149,7	10 929,0	705,4	5 828,6	1 038,1	1 263,4	1 323,5	14 815,8	40 053,4
1995	3 766,7	12 288,3	915,2	6 321,7	1 128,6	1 381,6	1 452,4	18 163,5	45 418,0
1996	4 564,6	12 885,2	1 201,5	6 794,7	1 192,9	1 489,0	1 666,6	20 020,2	49 814,8
1997	5 467,9	12 485,0	1 517,4	7 148,1	1 238,1	1 465,7	1 842,4	22 279,0	53 443,6
1998	5 718,3	9 116,0	1 533,5	7 031,0	1 143,1	1 401,3	1 512,3	21 392,1	48 847,6
1999	4 930,5	10 397,2	1 484,8	6 896,5	1 176,1	1 233,9	1 543,6	21 002,9	48 665,5
2000	6 562,4	14 415,2	1 519,4	8 475,4	1 507,9	1 443,1	1 837,4	26 363,2	62 124,0
2001	5 363,8	13 010,2	1 844,9	7 748,7	1 383,1	1 297,0	1 498,2	24 168,6	56 314,6
2002	5 349,1	12 045,1	1 924,4	7 558,6	1 252,4	1 269,9	1 618,4	26 140,9	57 158,8
2003	5 399,7	13 603,5	1 791,6	7 373,6	1 135,8	1 416,8	1 401,5	28 935,7	61 058,2
2004	6 001,2	15 962,1	1 887,4	8 767,3	1 295,3	1 654,6	1 797,5	34 219,2	71 584,6



peranannya menjadi 60,0 persen. Peranan ekspor nonmigas ini terus meningkat menjadi 78,1 persen pada tahun 2004. Nilai ekspor nonmigas naik dari US\$ 11.536,9 juta pada tahun 1988 menjadi US\$ 30.359,8 juta pada tahun 1994 atau naik lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter, sehingga nilai ekspor nonmigas pada tahun tersebut turun menjadi US\$ 40.975,5 juta, kemudian tahun 1999 turun lagi menjadi US\$ 38.873,2 juta. Pada tahun 2000 kegiatan ekspor mulai menunjukkan kenaikan, mencapai US\$ 47.757,4 juta. Pada tahun 2004 nilai ekspor nonmigas mencapai US\$ 55.939,3 juta.

Sebelum tahun 1955, ekspor Indonesia lebih banyak ditujukan ke Singapura dengan nilai pada tahun 1945 mencapai US\$ 120,0 juta. Akan tetapi sejak tahun 1955 mulai ada pergeseran, ekspor Indonesia sebagian besar ditujukan ke Amerika Serikat dengan nilai ekspor pada tahun 1955 sebesar US\$ 222,0 juta, sementara itu ekspor ke Singapura hanya US\$ 183,3 juta. Konfrontasi dengan Singapura, Inggris, dan Malaysia pada tahun 60-an mengakibatkan merosotnya perdagangan ke negara-negara tersebut. Larangan ekspor ke negara-negara

Taiwan, Afrika Selatan, Rhodesia, Israel, dan RRC pada waktu itu mengakibatkan hilangnya kegiatan ekspor dan impor ke negara-negara tersebut. Kemudian pemulihan hubungan dagang dengan Singapura menjadikan negara ini sebagai mitra dagang utama bersama-sama dengan Jepang dan Amerika Serikat.

Pada tahun 1994 ketiga negara ini mendominasi 52,2 persen perdagangan ekspor Indonesia dan ketiganya merupakan negara anggota APEC. Sampai tahun 2004, peranan ketiganya mengalami penurunan mencapai 42,9 persen. Ini menunjukkan bahwa peranan negara lainnya selain ketiga negara utama di atas juga semakin besar, yang mengindikasikan semakin banyaknya negara mitra dagang Indonesia seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan negara-negara di Asia Pasifik.

Pada masa kemerdekaan sampai dengan prapelite, Belawan merupakan pelabuhan utama ekspor berupa hasil perkebunan seperti tembakau, karet, dan minyak sawit. Pelabuhan Pekanbaru/Dumai juga merupakan pelabuhan utama khususnya untuk ekspor minyak bumi sampai awal tahun 80-an. Peranan kedua pelabuhan ini tahun 1973 mencapai 45 persen dari keseluruhan ekspor

**Tabel 3.7.4**  
**Perkembangan Ekspor Indonesia menurut Pelabuhan Utama, (juta US\$)**

Tahun	Tanjung Priok	Tanjung Emas	Tanjung Perak	Belawan	Ujung Pandang	Pekanbaru/Dumai	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1945	34,4	6,4	15,7	78,6	8,5	177,9	169,8	491,3
1950	52,1	10,7	25,5	121,8	10,8	286,0	292,8	799,7
1955	79,5	15,3	36	163,6	21,7	344,7	284,7	945,5
1960	63,0	11,7	18,6	144,2	15,9	306,5	280,9	840,8
1965	41,3	7,8	20,7	129,7	3,6	258,0	246,6	707,7
1968	47,0	10,2	18,5	98,4	4,8	232,4	319,4	730,7
1973	203,0	29,8	64,9	254,8	29,6	1 177,5	1 451,2	3 210,8
1978	1 158,9	55,5	158,5	646,0	55,0	3 682,4	5 886,9	11 643,2
1983	1 871,5	87,6	364,1	736,9	73,2	6 573,8	11 438,8	21 145,9
1988	2 794,7	277,7	935,6	1 418,5	181,6	2 537,8	11 072,6	19 218,5
1993	12 055,6	822,4	3 363,1	2 093,0	252,0	2 625,5	15 611,4	36 823,0
1995	12 808,5	1 012,2	3 464,8	2 662,8	363,5	3 372,7	21 733,5	45 418,0
1996	14 082,5	1 098,7	3 706,1	2 749,9	379,5	3 718,1	24 080,0	49 814,8
1997	15 459,6	1 479,3	3 876,2	2 985,5	338,7	3 492,5	25 811,8	53 443,6
1998	15 170,1	1 452,9	4 497,2	2 393,0	426,5	2 014,4	22 893,5	48 847,6
1999	13 718,1	1 653,1	4 259,9	2 277,0	383,9	3 113,9	23 259,5	48 665,5
2000	18 817,2	1 794,4	5 419,0	1 962,9	337,6	4 209,3	29 583,7	62 124,0
2001	17 564,5	1 640,9	5 507,1	1 896,5	378,8	3 809,3	25 517,4	56 314,6
2002	17 582,6	1 640,8	4 989,2	2 434,0	502,4	3 611,3	26 398,5	57 158,8
2003	17 999,5	1 768,3	5 282,4	2 217,1	332,7	4 006,8	29 451,4	61 058,2
2004	21 696,4	2 001,3	5 974,3	3 648,2	319,2	4 543,8	33 401,4	71 548,6

**Tabel 3.7.5**  
**Perkembangan Ekspor menurut Golongan**  
**(juta US\$)**

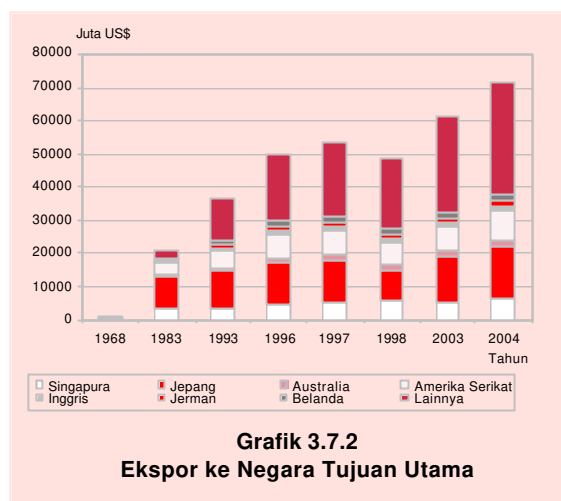
Tahun (1)	Gol A (2)	Gol B (3)	Migas (4)	Jumlah (5)
1968	345,7	87,5	297,5	730,7
1973	711,0	891,1	1 608,7	3 210,8
1978	2 287,2	1 917,5	7 438,5	11 643,2
1983	1 979,1	3 026,1	16 140,7	21 145,9
1993	2 115,9	24 961,7	9 745,4	36 823,0
1996	4 093,5	33 999,4	11 721,8	49 814,7
1997	4 330,6	37 490,5	11 622,5	53 443,6
1998	3 416,9	37 558,6	7 872,2	48 847,7
2003	5 213,4	42 193,4	13 651,4	61 058,2
2004	5 287,9	50 711,4	15 645,3	71 584,6

nasional. Sementara itu pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak memberikan kontribusi 9,3 persen dari total ekspor. Pada tahun 1973, ekspor dari pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak mencapai 8,3 persen dan dalam duapuluh tahun kemudian (1993) meningkat menjadi 28,3 persen. Dan pada tahun 2004 peranannya meningkat lagi menjadi 33,1 persen.

Pelabuhan lainnya selain kedua pelabuhan utama di atas juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Akibat kenaikan harga ekspor minyak mentah di pasaran dunia, peranan ekspor di pelabuhan Pekanbaru/Dumai menjadi 36,7 persen pada tahun 1973. Keadaan yang sama masih terjadi pada tahun 1983, meskipun dengan tingkat kenaikan nilai yang lebih rendah sehingga peranan pelabuhan Pekanbaru/Dumai menjadi 31,1 persen.

Peranan ekspor melalui Tanjung Priok naik terus hingga menjadi 14,5 persen pada tahun 1988. Sebaliknya ekspor melalui pelabuhan Pekanbaru/Dumai turun peranannya dari 31,1 persen pada tahun 1983 menjadi 13,2 persen tahun 1988, dan pada tahun 2004 menjadi 6,4 persen.

Pada tahun 1993, ekspor melalui Tanjung Priok semakin meningkat peranannya hingga menjadi 32,7



persen, sedangkan yang melalui Tanjung Emas dan Tanjung Perak masing-masing naik menjadi 2,2 persen dan 9,1 persen. Sampai dengan tahun 2004 peranan ketiga pelabuhan tersebut masing-masing mencapai 30,3 persen, 2,8 persen, dan 8,3 persen.

Hasil bumi Indonesia merupakan mata dagangan ekspor yang penting sejak sebelum kemerdekaan, bahkan mata dagangan itulah yang menarik penjajah datang ke Indonesia. Komoditas utama hasil bumi adalah rempah-rempah, teh, kopi, karet, dan tembakau. Dengan modal kesuburan alam memungkinkan Indonesia mampu menghasilkan banyak produk sektor pertanian. Ekspor hasil bumi golongan A (karet, kopra, tembakau lembaran, kopi, lada, minyak kelapa sawit, dan biji kelapa sawit) merupakan ekspor utama. Ekspor golongan B adalah ekspor barang selain golongan A. Bila dilihat menurut komoditas, selain ekspor minyak bumi pada tahun 1968, sebagian besar terdiri dari ekspor golongan A yang menyumbang 47,3 persen, sedangkan golongan B hanya 12,0 persen dari total ekspor. Usaha mengalihkan ekspor dari ekspor hasil agraris yang tradisional menjadi ekspor hasil hutan, laut, kerajinan tangan, industri, dan pertambangan memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 1973 peranan ekspor golongan A berkurang menjadi 22,1 persen, sedangkan barang golongan B meningkat menjadi 27,8 persen. Struktur ekspor sejak tahun 1993 mulai berubah dimana ekspor migas dan hasil bumi unggulan (golongan A) semakin kecil, sedangkan ekspor

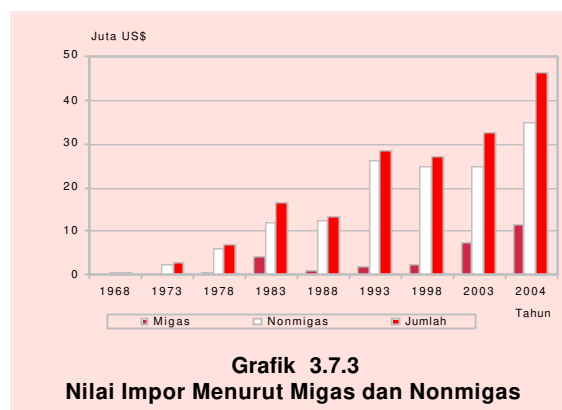
**Tabel 3.7.6**  
**Perkembangan Ekspor Nonmigas**  
**menurut Sektor Ekonomi, (juta US\$)**

Tahun	Hasil Pertanian	Hasil Industri	Hasil Pertambangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1981	1 638,8	2 598,0	202,8
1982	1 297,0	2 390,3	179,1
1983	1 451,1	3 141,4	170,2
1984	1 618,9	3 896,5	184
1985	1 468,8	4 164,8	195,8
1986	1 843,2	4 419,3	246,7
1987	1 665,9	6 666,6	234,9
1988	1 909,1	9 262,0	348,7
1989	1 943,1	11 028,1	503
1990	2 083,2	11 878,5	636
1991	2 281,9	15 067,5	889
1992	2 212,0	19 613,1	1 453,0
1993	2 296,8	23 292,8	1 485,8
1994	2 818,8	25 702,2	1 837,1
1995	2 887,0	29 329,8	2 735,3
1996	2 912,7	32 124,7	3 054,2
1997	2 869,8	35 248,0	3 170,5
1998	3 653,4	34 593,2	2 724,4
1999	2 901,4	33 332,4	2 634,5
2000	2 709,1	42 002,9	3 040,8
2001	2 438,5	37 671,1	3 569,6
2002	2 568,3	38 729,6	3 743,7
2003	2 526,1	40 879,9	3 995,6
2004	2 496,2	48 677,3	4 761,4

golongan B (hasil industri pengolahan) mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2003 ekspor golongan B memberikan kontribusi sebesar 69,1 persen dan golongan A sebesar 8,5 persen.

Dengan semakin tumbuhnya sektor industri domestik yang berorientasi pada ekspor maka diperlukan data statistik ekspor nonmigas menurut sektor ekonomi yaitu ekspor hasil pertanian, hasil industri, dan hasil pertambangan. Oleh karena itu sejak tahun 1981 penyajian data ekspor nonmigas dibedakan menurut ketiga sektor tersebut. Sejak duapuluh tahun terakhir ekspor nasional lebih diarahkan pada barang nonmigas khususnya hasil industri sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor hasil industri dari US\$ 3.141,4 juta pada tahun 1983 menjadi US\$ 48.677,3 juta pada tahun 2004.

Di tahun 1998 dimana krisis ekonomi melanda Indonesia, ekspor sektor pertanian justru meningkat,



**Grafik 3.7.3**  
**Nilai Impor Menurut Migas dan Nonmigas**

sementara di sektor industri sedikit menurun. Hal ini dikarenakan masih lemahnya lini produksi di sektor industri dalam negeri yang sangat terguncang karena krisis moneter. Pada tahun 2000 keadaan mulai membaik, yang ditandai dengan ekspor industri mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 26,0 persen dibanding tahun sebelumnya.

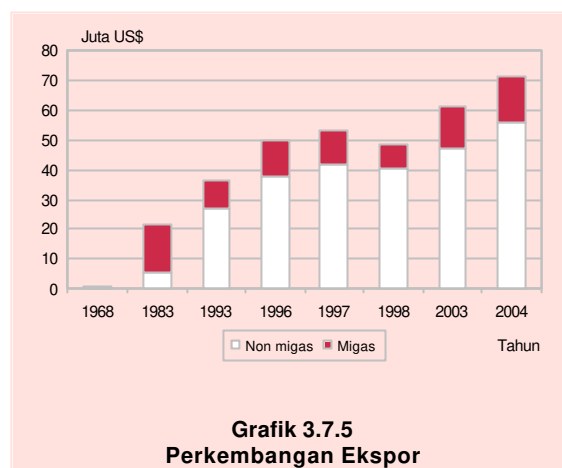
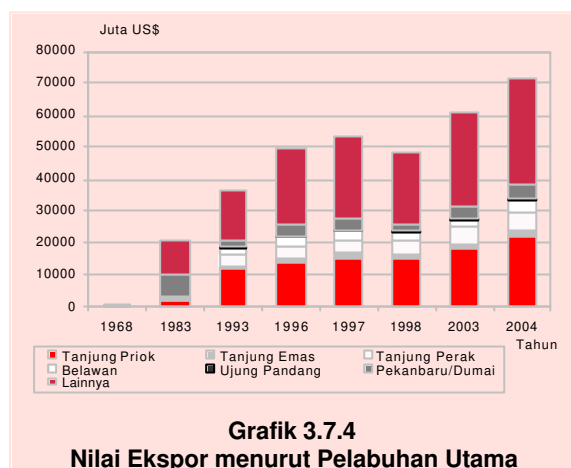
Pada tahun 2004 peranan ekspor nonmigas yang berasal dari sektor pertanian adalah 4,5 persen, pertambangan 8,5 persen dan industri 87,0 persen. Komoditas-komoditas sektor industri yang peranan ekspornya menonjol dan meningkat cukup pesat adalah tekstil dan produk tekstil, kayu olahan (termasuk kayu lapis), barang elektronik, dan barang dari logam tidak mulia dengan peranan masing-masing sebesar 13,8 persen, 5,8 persen, 12,0 persen, dan 7,0 persen.

### 3.7.3 Perkembangan Impor

Nilai impor Indonesia pada tahun 1968 sebesar US\$ 715,8 juta terdiri dari impor migas sebesar US\$ 6,1 juta dan impor nonmigas sebesar US\$ 709,7 juta. Dibandingkan dengan tahun 1945, impor migas menurun 60,13 persen, sedangkan impor nonmigas meningkat 22,45 persen.

Sejak Pelita I hingga tahun 1994, perkembangan impor menunjukkan peningkatan (kecuali pada tahun 1988). Pada akhir Pelita I nilai impor mencapai US\$ 2.729,1 juta, kemudian meningkat terus hingga mencapai titik tertinggi pada akhir Pelita III menjadi US\$ 16.351,8 juta. Pada akhir Pelita IV nilai impor menurun 18,98 persen,





terutama disebabkan menurunnya impor migas sebesar 78,07 persen. Penurunan impor migas ini sejalan dengan peningkatan kemampuan pengolahan kilang minyak di dalam negeri. Sebaliknya impor nonmigas tetap meningkat sebesar 1,09 persen. Kemudian pada akhir Pelita V impor meningkat menjadi sekitar 10 kali dibandingkan pada akhir Pelita I, dengan impor migas naik hampir 50 kali dan impor nonmigas naik hampir 10 kali. Walaupun demikian, peranan impor migas tetap jauh lebih rendah dari peranan impor nonmigas. Hal ini terlihat pula pada awal PJP II tahun 1994 dimana peranan impor migas hanya sebesar 7,4 persen dan peranan impor nonmigas sebesar 92,6 persen. Komoditi nonmigas ini terutama berupa bahan baku/penolong dan barang modal untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Sedangkan nilai impor Indonesia selama sepuluh tahun terakhir relatif fluktuatif. Impor migas cenderung mengalami peningkatan sedangkan impor nonmigas mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga tahun 2003. Pada tahun 2004, nilai impor Indonesia mencapai US\$ 46.524,5 juta terdiri dari impor migas sebesar US\$ 11.732,0 juta dan impor nonmigas sebesar US\$ 34.792,5 juta.

Selama periode tersebut, nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar US\$ 46.524,5 juta sedangkan terendah terjadi di tahun 1999 sebesar US\$ 24.003,3 juta. Sejak dilanda krisis ekonomi, nilai impor Indonesia turun drastis hingga tahun 2001. Namun pada tahun-

tahun berikutnya menunjukkan perbaikan yang berarti dengan adanya upaya pemerintah dalam memberikan stimulus di bidang impor. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2004 kebutuhan impor dapat dicapai pada level realistis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis. Dilihat dari peranannya, impor migas lebih rendah dibandingkan impor nonmigas dengan rata-rata per tahun masing-masing sebesar 15,5 persen dan 84,5 persen. Komoditas nonmigas ini terutama berupa bahan baku/penolong dan barang modal.

Peningkatan pembangunan Indonesia telah ditunjukkan dengan perubahan pola impor. Pada tahun 1945 impor barang konsumsi adalah sebesar 41,4 persen dari keseluruhan nilai impor Indonesia, impor bahan baku/penolong 42,6 persen, dan impor barang modal sebesar 16,0 persen. Menjelang dimulainya Pelita I tahun 1968 impor barang konsumsi mencapai 37,2 persen, impor bahan baku/penolong sebesar 36,3 persen, dan impor barang modal sebesar 26,5 persen.

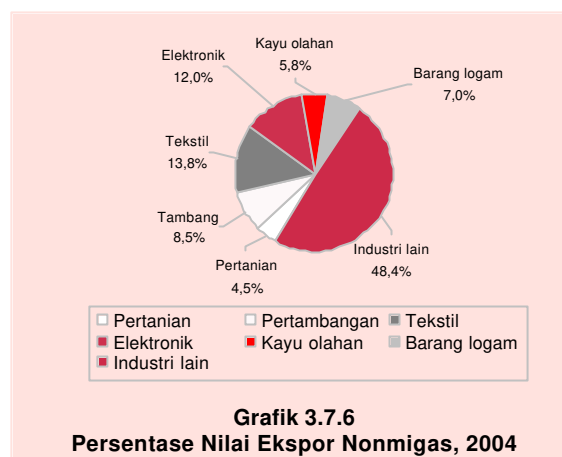
Pada akhir Pelita II tahun 1978, komposisi impor telah berubah dimana impor bahan baku/penolong dan barang modal meningkat masing-masing menjadi 39,8 persen dan 42,3 persen. Sebaliknya impor barang konsumsi menurun menjadi 17,9 persen. Hal ini juga terjadi pada pelita-pelita selanjutnya sampai akhir PJPI dimana impor barang konsumsi makin bertambah kecil, sebaliknya impor bahan baku/penolong dan barang modal makin bertambah besar. Bahkan pada awal PJP II yaitu pada tahun 1994, impor barang konsumsi hanya

**Tabel 3.7.7**  
**Nilai Impor Menurut Migas dan Nonmigas, (juta US\$)**

Tahun	Migas	Nonmigas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1945	15,3	579,6	594,9
1950	31,6	407,4	439
1955	60,1	571	631,1
1960	25,8	551,9	577,7
1965	12,6	682,1	694,7
1968	6,1	709,7	715,8
1973	43,8	2 685,3	2 729,1
1978	579,7	6 110,7	6 690,4
1983	4 144,8	12 207,0	16 351,8
1988	909,0	12 339,5	13 248,5
1993	2 170,6	26 157,2	28 327,8
1994	2 367,4	29 616,1	31 983,5
1995	2 910,8	37 717,9	40 628,7
1996	3 589,6	39 338,9	42 928,5
1997	3 924,1	37 755,7	41 679,8
1998	2 653,7	24 683,2	27 336,9
1999	3 681,1	20 322,2	24 003,3
2000	6 019,5	27 495,3	33 514,8
2001	5 471,8	25 490,3	30 962,1
2002	6 525,8	24 763,1	31 288,9
2003	7 610,9	24 939,8	32 550,7
2004	11 732,0	34 792,5	46 524,5

sebesar 4,5 persen, impor bahan baku/penolong sebesar 72,3 persen, sedangkan impor barang modal sebesar 23,2 persen. Perubahan pola impor ini menggambarkan bahwa kebutuhan barang konsumsi sebagian besar sudah dapat diproduksi di dalam negeri, dan penyediaan impor bahan baku/penolong serta barang modal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan industri dalam negeri.

Sementara itu, perkembangan ekonomi Indonesia pasca krisis ditunjukkan dengan adanya perubahan pola impor dengan diarahkannya perbaikan struktur ekonomi yang masih membutuhkan barang impor dengan tidak mengesampingkan upaya mengurangi ketergantungan impor. Penyediaan impor bahan baku/penolong serta barang modal diutamakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan industri dalam negeri. Sedangkan impor barang konsumsi tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang belum mampu dihasilkan di dalam negeri. Namun demikian, perlu adanya kebijakan lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus memacu



pertumbuhan industri yang mampu menggantikan kontensi impor secara lebih luas dan kompetitif dalam komunitas ekonomi global.

Pada tahun 2004 impor barang konsumsi sebesar 8,1 persen dari keseluruhan nilai impor, atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata perannya selama sepuluh tahun yakni sebesar 7,6 persen. Pada periode yang sama, impor bahan baku/penolong sebesar 77,8 persen sedangkan impor barang modal sebesar 14,0 persen. Sementara itu, rata-rata peranan impor bahan baku/penolong dan impor barang modal masing-masing sebesar 75,3 persen dan 17,1 persen.

Pemasukan barang impor selama 50 tahun sejak kemerdekaan sebagian besar dibongkar melalui lima pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, dan Ujung Pandang. Tanjung Priok menduduki urutan pertama yakni rata-rata per tahun melayani sekitar 47,6 persen dari seluruh nilai barang seluruh Indonesia, disusul oleh Tanjung Perak sebesar 12,6 persen, Belawan sebesar 6,8 persen, Tanjung Emas sebesar 4,5 persen, dan Ujung Pandang sebesar 1,8 persen. Sedangkan impor barang yang dilayani pelabuhan lainnya sebesar 26,5 persen.

Selama sepuluh tahun terakhir, lima pelabuhan bongkar tersebut masih merupakan pelabuhan bongkar utama karena impor Indonesia sebagian besar masih dibongkar di pelabuhan tersebut. Tanjung Priok menduduki urutan pertama dengan rata-rata nilai impor per tahun sebesar US\$ 16.922,7 juta atau sekitar 47,8 persen dari keseluruhan nilai barang Indonesia, disusul

**Tabel 3.7.8**  
**Nilai Impor Menurut Pelabuhan Utama**  
 (juta US\$)

Tahun	Tanjung Priok	Tanjung Perak	Belawan	Tanjung Emas	Ujung Pandang	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1945	213,0	95,0	43,8	44,3	17,0	181,8
1950	202,0	48,7	31,9	21,7	13,4	121,3
1955	315,1	93,3	53,2	41,0	14,7	113,8
1960	251	84,1	46,1	49,4	10,9	136,2
1965	445,9	85,7	36,2	14,3	7,8	104,8
1968	434,5	65,7	76,2	25,7	1,1	112,6
1973	1 363,6	288,4	186,5	115,4	76,7	698,5
1978	3 205,0	750,3	426,5	324,3	145,7	1 838,6
1983	4 991,5	1 958,3	829,4	525,9	677,9	7 368,8
1988	6 526,7	1 493,4	485,6	262,6	117,1	4 363,1
1993	15 339,7	3 162,1	824,2	676,5	153,5	8 171,8
1994	18 714,1	3 355,5	863,3	769,2	183,2	8 098,2
1995	23 313,6	4 859,0	881,7	955,8	159,7	10 458,9
1996	22 524,5	5 354,3	941,4	1 095,2	239,9	12 773,2
1997	19 118,5	6 164,0	897,6	1 290,6	404,2	13 804,9
1998	14 397,6	2 857,0	366,6	902,1	209,5	8 604,1
1999	9 076,3	2 907,1	618,9	805,3	92,1	10 503,6
2000	15 637,2	3 511,1	647,1	916,3	102,2	12 700,9
2001	14 653,4	3 279,7	662,0	878,8	92,3	11 395,9
2002	14 763,7	3 433,5	621,2	735,0	8,0	11 727,5
2003	14 668,4	3 710,1	584,0	778,6	82,5	12 727,1
2004	21 073,7	4 882,4	832,7	998	134,6	18 603,1

oleh Tanjung Perak sebesar US\$ 4.095,8 juta (11,6 persen), Tanjung Emas sebesar US\$ 935,6 juta (2,7 persen), Belawan sebesar US\$ 705,3 juta (2,0 persen), dan Ujung Pandang sebesar US\$ 152,5 juta (0,4 persen). Sedangkan impor barang yang dilayani pelabuhan lainnya mencapai US\$ 12.329,9 juta atau 35,5 persen.

Peranan Tanjung Priok yang menonjol tersebut sejalan dengan fasilitas jasa di pelabuhan ini yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Sebagian besar barang yang dibongkar di Tanjung Priok berupa komoditas nonmigas.

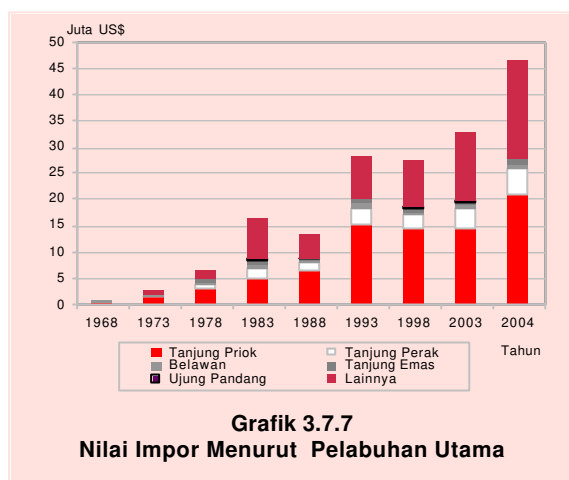
Dilihat dari peranannya pada tahun 2004, sebesar 45,3 persen impor Indonesia dilayani di Pelabuhan Tanjung Priok, disusul oleh Tanjung Perak sebesar 10,5 persen, Tanjung Emas sebesar 2,1 persen, Belawan sebesar 1,8 persen, dan Ujung Pandang sebesar 0,3 persen. Sementara itu barang impor yang dilayani pelabuhan lain tercatat 40,0 persen.

Menurut negara asal, peranan nilai impor Indonesia yang berasal dari Jepang selama 45 tahun terakhir merupakan yang paling besar. Nilai impor dari Jepang pada tahun 1973 mengalami perkembangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan tahun 1968 yaitu naik 402,3 persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan impor dari Inggris sebesar 485,8 persen, Australia 344,3 persen, Amerika Serikat 316,1 persen, Singapura 298,2 persen, Perancis 197,4 persen, Jerman 180,0 persen, dan Belanda sebesar 78,7 persen. Pada Pelita I impor dari Jepang mencapai lebih dari 2,0 miliar dolar AS.

Pada akhir Pelita II, impor Indonesia dari Amerika Serikat menempati urutan kedua setelah Jepang. Namun pada akhir Pelita III, Singapura menduduki urutan kedua, di atas Amerika Serikat.

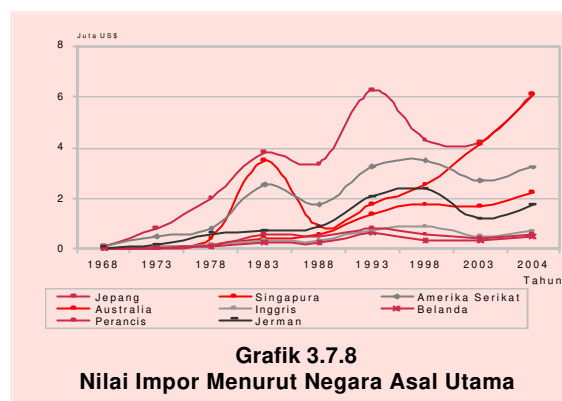
Perkembangan impor dari beberapa negara pada akhir Pelita IV dibandingkan dengan akhir Pelita III ternyata mengalami penurunan, antara lain Singapura turun 74,2 persen, Amerika Serikat turun 31,5 persen,





Perancis turun 21,4 persen, Jepang turun 10,7 persen, dan Inggris turun 6,8 persen.

Sejak terjadinya krisis ekonomi, hubungan perdagangan Indonesia dengan tujuh negara utama asal impor hingga sekarang semakin membaik yang ditandai dengan peranan terbesarnya terhadap nilai impor di tahun 2004. Nilai impor terbesar berasal dari Singapura 6.082,8 juta dolar AS, disusul dari Jepang sebesar US\$ 6.081,6 juta, Australia sebesar US\$ 2.214,9 juta, Jerman sebesar US\$ 1.734,0 juta, Inggris sebesar



US\$ 703,2 juta, Perancis sebesar US\$ 544,2 juta, dan Belanda sebesar US\$ 474,6 juta. Sementara itu, peranan impor terbesar dari Amerika Serikat terjadi di tahun 2000 sebesar US\$ 3.390,3 juta.

Dilihat dari perkembangannya selama sepuluh tahun terakhir, empat negara asal utama menunjukkan rata-rata perkembangan positif yakni Singapura (13,9 persen), Australia (2,9 persen), Jepang (1,7 persen), dan Inggris (1,1 persen). Sedangkan empat negara asal lainnya mengalami rata-rata perkembangan negatif, yakni Amerika Serikat (-2,5 persen), Belanda (-2,68 persen), Jerman (-2,8 persen), dan Perancis (-4,6 persen).

**Tabel 3.7.9**  
**Nilai Impor Menurut Negara Asal Utama, (juta US\$)**

Tahun	Jepang	Singapura	Amerika Serikat	Australia	Inggris	Belanda	Perancis	Jerman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1945	66,7	16,7	92,4	7,6	34,4	64,1	0,0	10,5
1950	44,1	20,3	85,7	3,5	32,7	75,9	0,0	12,7
1955	90,3	9,7	99,8	13,1	36,4	74,0	0,0	64,3
1960	92,8	12,7	89,9	9,0	47,3	17,8	0,0	55,2
1965	159,1	0,0	65,6	3,8	27,3	22,9	10,5	62,1
1968	159,2	33,6	123,2	20,3	17,6	50,7	15,4	70,1
1973	799,7	133,8	512,6	90,2	103,1	90,6	45,8	196,3
1978	2 016,4	453,2	832,2	217,9	207,6	145,7	165,9	594,2
1983	3 793,1	3 464,5	2 533,7	402,3	364,4	257,3	591,1	741,4
1988	3 385,6	895,5	1 735,7	578,4	339,9	258,4	464,8	886,6
1993	6 248,4	1 793,3	3 254,5	1 399,4	782,0	626,0	853,4	2 072,4
1994	7 740,1	1 877,1	3 587,8	1 542,0	710,0	563,7	788,3	2472,7
1995	9 216,8	2 367,5	4 755,9	2 015,5	902,5	842,1	1 063,6	2 819,2
1996	8 504,0	2 875,3	5 059,8	2 535,1	1 117,8	493,0	1 006,0	3 001,4
1997	8 252,3	3 410,9	5 440,9	2 426,7	1 084,4	565,9	1 016,5	2 628,7
1998	4 292,4	2 542,8	3 517,3	1 760,5	920,3	338,4	568,1	2 365,7
1999	2 913,3	2 525,9	2 839,0	1 460,4	511,2	346,7	371,6	1 398,5
2000	5 397,3	3 788,6	3 390,3	1 693,8	557,3	434,4	400,0	1 244,7
2001	4 689,5	3 147,1	3 207,5	1 814,1	643,0	343,8	396,9	1 300,5
2002	4 409,3	4 099,6	2 639,9	1 587,2	657,1	363,7	471,0	1 122,0
2003	4 228,3	4 155,1	2 694,8	1 648,4	463,7	369,6	453,2	1 181,2
2004	6 081,6	6 082,8	3 225,4	2 214,9	703,2	474,6	544,2	1 734,0







## TRANSPORTASI



---

## 3.8 TRANSPORTASI

### RINGKASAN

Selama PJP I, jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan meningkat rata-rata 12,1 persen dan 5,8 persen per tahun. Sementara itu jumlah penumpang dan barang yang diangkut kereta api, jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut dan jumlah penumpang angkutan udara ( baik tujuan domestik maupun internasional) setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar 1,4 persen dan 1,9 persen, 13,9 persen dan 17,9 persen. Pada periode sepuluh tahun berikutnya, untuk data transportasi yang sama masing-masing berubah per tahunnya menjadi 9,5 persen, 8,7 persen, 4,7 persen 0,4 persen, -1,1 persen dan 5,8 persen.

### SUMMARY

*In the first phase of long period development plan (PJP I), number of vehicle and length of road increase average 12.1 percent and 5.8 percent per year. Meanwhile number of train passenger and goods carried by train, number of sea passengers and number of air passenger (both domestic and international passenger) respectively increased per year up to 1.4 percent and 1.9 percent, 13.9 percent and 17.9 percent. For the following ten years period, for the same transportation figures respectively changed per year into 9.5 percent, 8.7 percent, 4.7 percent and 0.4 percent, minus 1.1 percent and 5.8 percent.*

Sejalan dengan kebijaksanaan dalam GBHN, statistik perhubungan diarahkan untuk menyajikan data tentang perhubungan yang dibedakan menjadi perhubungan darat, laut, udara, dan jasa penunjang angkutan. Namun karena berbagai keterbatasan, data mengenai jasa penunjang angkutan tidak dapat disajikan.

Penyajian data yang berhubungan dengan transportasi darat meliputi panjang jalan, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penumpang, dan barang yang diangkut kereta api. Jenis kegiatan transportasi laut adalah bongkar muat barang dan jumlah penumpang yang diangkut oleh angkutan pelayaran melalui pelabuhan laut. Sedangkan untuk jenis kegiatan transportasi udara adalah bongkar muat barang dan jumlah penumpang yang diangkut melalui pelabuhan udara.

### 3.8.1 Transportasi Darat

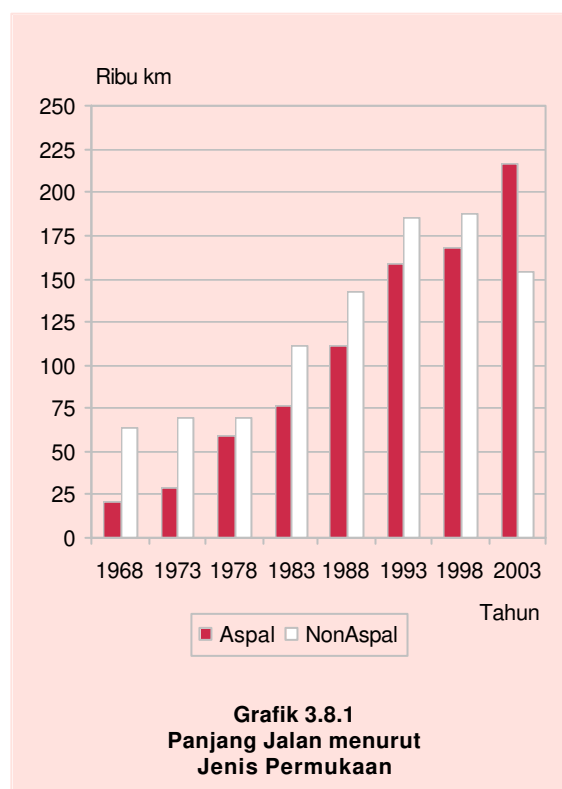
#### a. Panjang Jalan

Pembangunan jalan yang dilakukan memperhatikan keserasiannya dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan yang mendukung pengembangan permukiman, termasuk permukiman transmigrasi, juga dilakukan. Pembangunan jalan bebas hambatan (tol) yang mendukung sistem transportasi cepat, dikembangkan bersama-sama antara pemerintah dan swasta dengan tetap memperhatikan adanya jalan alternatif yang memadai. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting. Dengan adanya jalan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di seluruh Indonesia pada PJP I menunjukkan peningkatan sebesar 5,9 persen per

tahun, yakni dari 84.269 km pada tahun 1968 menjadi 344.892 km pada tahun 1993. Memasuki lima tahun pertama PJP II (1998), panjang jalan menjadi 355.363 km atau naik rata-rata 0,6 persen per tahun. Pada tahun 2003 panjang jalan kembali meningkat menjadi 370.576 km atau naik rata-rata 0,8 persen per tahun.

Dari pelita ke pelita, panjang jalan selalu menunjukkan kenaikan, baik jalan yang diaspal maupun jalan yang tidak diaspal. Panjang jalan diaspal selama PJP I mengalami kenaikan sebesar 138.913 km atau meningkat 8,6 persen per tahun yaitu dari 20.416 km pada tahun 1968 menjadi 159.329 km pada tahun 1993. Sedangkan panjang jalan tidak diaspal, seperti jalan tanah, kerikil, dan lainnya mengalami kenaikan sebesar 121.710 km atau meningkat 4,4 persen per tahun selama lima pelita. Kenaikan panjang jalan diaspal lebih tinggi dari pada kenaikan panjang jalan tidak diaspal. Memasuki lima tahun pertama PJP II (1998) panjang jalan yang diaspal sepanjang 168.072 km dan lima tahun kemudian (2003) menjadi 216.109 km atau naik rata-rata 5,7 persen per tahunnya.



**Tabel 3.8.1**  
**Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan**  
**(km)**

Tahun	Jenis Permukaan		Jumlah
	Diaspal	Tidak Diaspal	
(1)	(2)	(3)	(4)
1968	20 416	63 853	84 269
1973	29 089	68 907	97 996
1978	59 029	69 686	128 715
1983	75 999	112 080	188 079
1988	111 649	143 285	254 934
1993	159 329	185 563	344 892
1998	168 072	187 291	355 363
2003	216 109	154 407	370 576

Sumber: Ditjen Bina Marga, DPU Propinsi, dan DPU Kabupaten/Kota.

#### b. Kendaraan Bermotor

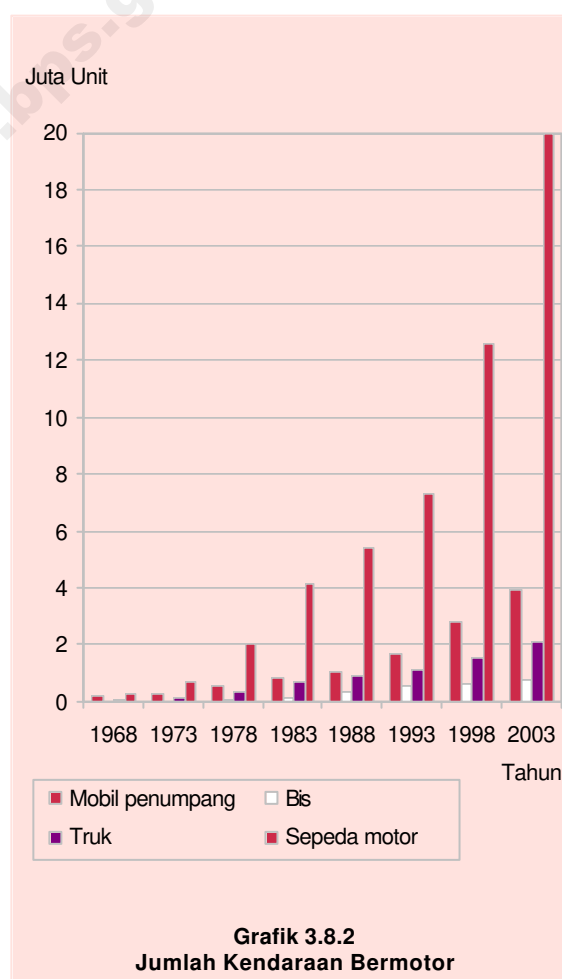
Transportasi penumpang dan barang dalam kota, antar kota, dan antar daerah dibina dan dikembangkan agar mampu berperan dalam meningkatkan kelancaran arus penumpang dan barang, selaras dengan dinamika pembangunan. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan transportasi jalan raya, sehubungan dengan kecanggihan peralatan yang cenderung semakin meningkatkan kecepatan kendaraan, perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sejak dilaksanakannya program Pelita I (tahun 1969/1970) sampai dengan akhir Pelita V (1993/1994) terlihat adanya kemajuan pembangunan yang dicapai dalam segala sektor. Dari sektor perhubungan, khususnya angkutan darat jalan raya, kemajuan ini ditandai dengan bertambahnya panjang jaringan jalan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat bila dibandingkan dengan sebelum program pembangunan lima tahun. Peningkatan ini karena peningkatan pendapatan masyarakat makin besar sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki

kendaraan. Meningkatnya jalan sampai ke pelosok desa memungkinkan berkembangnya perusahaan/usaha angkutan baik penumpang maupun barang.

Kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan/transportasi darat yang memungkinkan arus lalu lintas orang maupun barang antar daerah menjadi lebih cepat. Jumlah kendaraan bermotor selalu menunjukkan kenaikan dari pelita ke pelita. Selama PJP I jumlah kendaraan jenis mobil penumpang, bis, truk dan sepeda motor mengalami kenaikan per tahun masing-masing sebesar 8,9 persen, 14,4 persen, 10,6 persen dan 13,5 persen. Pada lima tahun pertama PJP II (1998) jumlah kendaraan sebanyak 17,6 juta unit dan lima tahun kemudian menjadi 26,7 juta unit atau naik 8,7 persen pertahun. Yang terbanyak adalah kendaraan jenis sepeda motor yaitu 12,6 juta unit pada tahun 1998 dan 20,0 juta unit tahun 2003 atau naik 9,6 persen per tahun.





**Tabel 3.8.2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**(Unit)**

Tahun	Mobil penumpang	Bis	Truk	Sepeda motor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1968	201 743	19 610	92 417	308 404	622 174
1973	306 713	30 036	143 252	714 333	1 194 334
1978	535 442	58 389	336 753	1 990 250	2 920 834
1983	862 424	160 260	717 873	4 135 677	5 876 234
1988	1 073 106	385 731	892 651	5 419 531	7 771 019
1993	1 700 454	568 490	1 160 539	7 355 114	10 784 597
1998	2 769 375	626 680	1 586 721	12 628 991	17 611 767
2003	3 885 228	798 079	2 047 022	19 976 376	26 706 705

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia

### c. Angkutan Kereta Api

Salah satu sarana pelayanan angkutan penumpang dan barang melalui transportasi darat adalah angkutan kereta api yang dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada awal Pelita I jumlah penumpang yang diangkut dengan kereta api sebesar 70 juta orang dan pada akhir Pelita I turun menjadi 29 orang atau turun sebesar 58,6 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya sarana angkutan kereta api yang mengalami kerusakan dan berusia tua sehingga banyak penumpang kereta api lebih memilih bis yang mutu pelayanannya dianggap lebih memadai.

Memasuki Pelita II pembangunan di sektor angkutan kereta api dilanjutkan dengan meningkatkan daya angkut dan penyempurnaan manajemen sebagai alat transportasi masal yang ekonomis dan aman, sehingga pada akhir Pelita II (1977) banyaknya

penumpang kereta api meningkat menjadi 31 juta orang. Menginjak akhir Pelita III (1983) meningkat lagi menjadi 47 juta orang, dan terus meningkat hingga akhir PJP I (1993) yaitu sebesar 98 juta orang, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,4 persen setiap tahunnya. Memasuki lima tahun pertama PJP II (1998) banyaknya penumpang kereta api 170 juta orang dan lima tahun kemudian (2003) turun menjadi 155 juta orang atau rata-rata turun 1,8 persen. Hal ini disebabkan makin berkembangnya sarana angkutan penumpang yang lain.

Untuk pengangkutan barang, jumlah barang yang diangkut dengan kereta api pada awal PJP I sebesar 3,3 juta ton, kemudian meningkat menjadi 5,0 juta ton pada akhir Pelita I. Namun pada tahun 1977 mengalami penurunan 10,7 persen, hal ini disebabkan karena banyak kereta barang yang harus direhabilitasi. Selanjutnya pada tahun 1983 meningkat menjadi 5,4

juta ton dan terus meningkat hingga mencapai 15,7 juta ton pada akhir PJP I. Berarti selama PJP I jumlah barang yang diangkut dengan kereta api mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen setiap tahunnya. Pada lima tahun pertama PJP II (1998) jumlah barang yang diangkut kereta api sebanyak 18,2 juta ton dan lima tahun kemudian (2003) turun menjadi 16,3 juta ton atau rata-rata turun 2,2 persen per tahun.

**Tabel 3.8.3**  
**Jumlah Penumpang dan Barang yang Diangkut Kereta Api**

Tahun	Penumpang Diangkut (juta orang)	Barang Diangkut (ribu ton)
(1)	(2)	(3)
1968	70	3 307
1973	29	5 040
1978	31	4 500
1983	47	5 400
1988	53	10 775
1993	98	15 680
1998	170	18 217
2003	155	16 293

### 3.8.2 Transportasi Laut

#### a. Penumpang Antarpulau

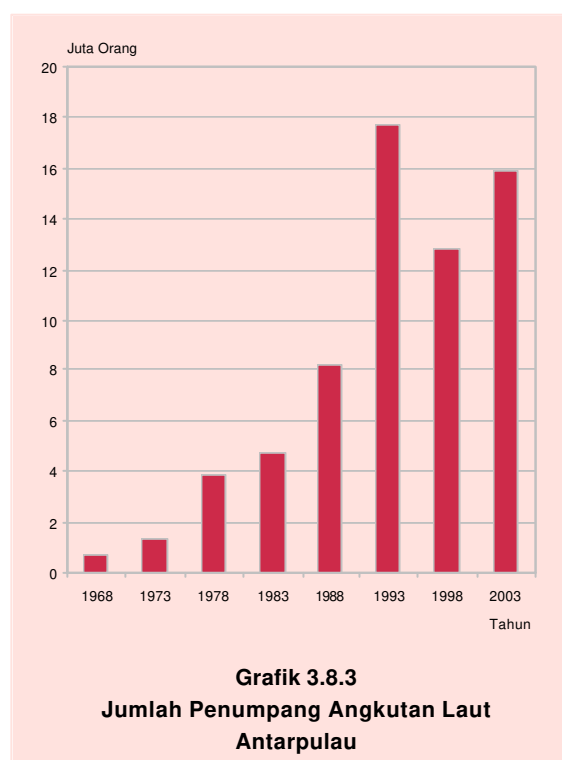
Dari aspek geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang besar maupun kecil. Masing-masing pulau dipisahkan oleh laut maupun selat. Oleh karena itu peranan angkutan laut cukup penting dan strategis sebagai sarana dalam pencapaian pembangunan nasional, guna mewujudkan kesatuan nusantara. Selain itu laut berfungsi pula sebagai urat nadi dalam perekonomian nasional karena merupakan salah satu sarana yang menjamin lancarnya arus barang dan orang.

Pada awal Pelita I banyaknya penumpang yang menggunakan angkutan laut sebesar 0,7 juta orang. Kemudian pada akhir Pelita I naik menjadi 1,4 juta orang

atau naik dua kali lipat dibanding awal Pelita I. Pada akhir Pelita II jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut meningkat menjadi 3,9 juta orang atau naik 183,9 persen dari tahun 1973.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembesituaan armada-armada/kapal laut yang telah tua (*scrapping*) karena mengandung resiko kecelakaan yang tinggi ternyata tidak mempengaruhi laju pertumbuhan penumpang angkutan laut. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan angkutan laut.

Pada akhir PJP I (1993) perkembangan jumlah penumpang antarpulau sudah mencapai 17,7 juta orang. Berarti selama PJP I jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut meningkat rata-rata 13,9 persen setiap tahunnya. Memasuki 5 tahun pertama PJP II (1998) banyaknya penumpang angkutan laut sebesar 12,8 juta orang atau menurun sebesar 6,2 persen per tahunnya dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Sebaliknya, 5 tahun kedua PJP II (2003) jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut meningkat rata-rata 4,4 persen setiap tahunnya.



**Tabel 3.8.4**  
**Jumlah Penumpang Antarpulau yang Diangkut**

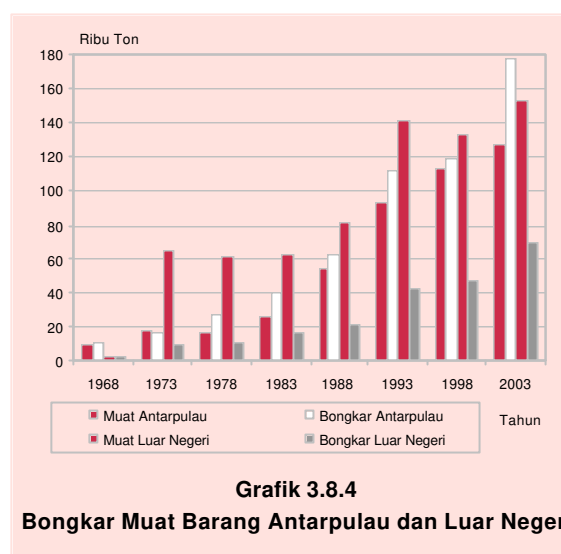
Tahun	Penumpang yang Diangkut (orang)
(1)	(2)
1968	679 726
1973	1 369 015
1978	3 887 250
1983	4 734 543
1988	8 175 913
1993	17 712 144
1998	12 825 097
2003	15 920 580

Sumber: Administrator Pelabuhan

#### b. Bongkar Muat Antarpulau dan Luar Negeri

Pembangunan pelayaran nasional terus ditingkatkan dan diperluas, termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan, sehingga transportasi laut makin mampu berperan mendukung pembangunan nasional dalam mempersatukan seluruh wilayah tanah air. Kemampuan pelayaran samudera nasional juga terus ditingkatkan dengan dukungan pembangunan galangan kapal nasional yang serasi dan efisien, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana agar mampu memenuhi kebutuhan transportasi barang, baik ekspor maupun impor, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam GBHN 1993.

Keadaan akhir Pelita IV dan akhir Pelita V, muat barang di pelabuhan untuk angkutan antarpulau mengalami kenaikan rata-rata pertahun yang sangat berarti yaitu masing-masing mencapai 15,2 persen dan 12,0 persen bila dibandingkan dengan keadaan akhir Pelita sebelumnya. Hal ini diduga karena adanya Paket November (Paknop) tahun 1988 tentang deregulasi angkutan, yang di antaranya adalah membolehkan kapal asing beroperasi di Indonesia dan setiap perusahaan



pelayaran paling sedikit menguasai satu kapal. Selain itu juga karena lahirnya institusi perusahaan bongkar muat barang, baik bongkar barang luar negeri atau antarpulau. Dampak dari Paknop 1988 adalah bahwa muat barang luar negeri pada akhir Pelita IV dan akhir Pelita V mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 5,6 persen dan 11,4 persen. Kenaikan ini terjadi juga untuk bongkar barang dalam negeri atau luar negeri. Pada tahun 1994, bongkar muat barang juga mengalami kenaikan.

**Tabel 3.8.5**  
**Bongkar Muat Barang Antarpulau dan Luar Negeri, (ribu ton)**

Tahun	Antar Pulau		Luar Negeri	
	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968	8 975	9 987	2 910	2 556
1973	17 066	15 912	65 263	9 684
1978	16 129	26 576	60 845	10 841
1983	26 285	40 075	62 402	16 868
1988	53 308	62 925	82 125	21 601
1993	94 000	112 462	140 861	41 973
1998	113 487	119 795	133 700	47 138
2003	127 305	178 154	153 436	69 620

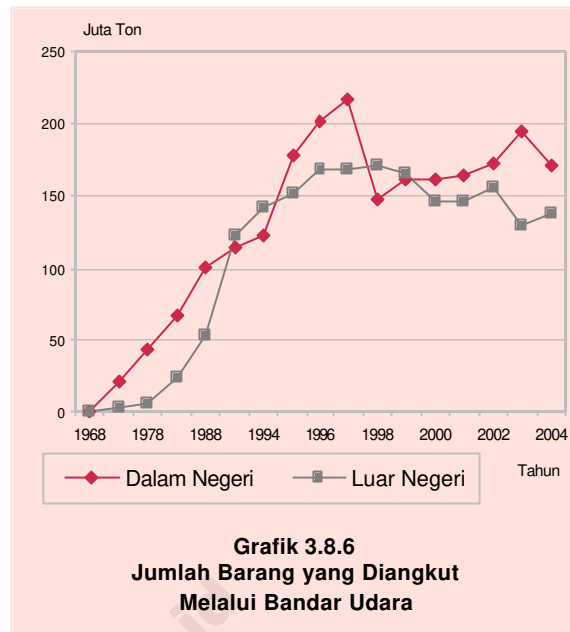
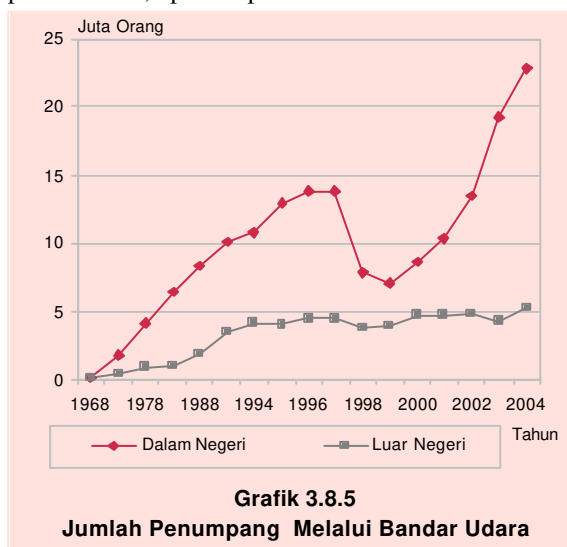
Sumber: Administrator Pelabuhan Laut



### 3.8.3 Transportasi Udara

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. Sebagai akibat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipisahkan oleh perairan yang luas, angkutan udara menjadi semakin penting dan strategis. Disamping dapat menghubungkan antar wilayah, transportasi udara memiliki keunggulan dibanding transportasi yang lain terutama dari segi waktu tempuh yang relatif singkat. Sejak dicanangkannya program pembangunan lima tahun di Indonesia, jumlah bandara mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan meningkatnya lalu lintas penumpang dan barang.

Selama PJP I, jumlah penumpang angkutan udara meningkat rata-rata 17,9 persen per tahun yakni dari 219 ribu orang pada tahun 1968 menjadi 13,6 juta orang pada tahun 1993. Peningkatan terjadi pada penumpang domestik maupun internasional dengan kenaikan masing-masing sebesar 18,4 persen dan 16,8 persen per tahun. Pada PJP II periode 1994-2004, rata-rata kenaikan jumlah penumpang angkutan udara lebih kecil dibandingkan selama PJP I yaitu 5,8 persen per tahun. Kondisi tersebut terjadi pada penumpang domestik dan internasional dengan kenaikan masing-masing 7,7 persen dan 2,3 persen per tahun.



Demikian pula dengan angkutan barang, selama PJP I jumlah barang angkutan udara meningkat rata-rata 28,9 persen per tahun yakni dari 413,2 ton pada tahun 1968 menjadi 237 ribu ton pada tahun 1993. Peningkatan terjadi pada barang domestik maupun luar negeri dengan peningkatan sebesar 26,1 persen dan 35,4 persen per tahun. Pada PJP II periode tahun 1994-2004, rata-rata kenaikan jumlah barang angkutan udara lebih kecil dibandingkan selama PJP I yaitu 1,6 persen per tahun yakni dari 264,9 ribu ton pada tahun 1994 menjadi 309,6 ribu ton pada tahun 2004. Kondisi yang sama terjadi pada barang domestik yaitu sebesar 3,3 persen per tahun, sedangkan untuk barang internasional justru mengalami penurunan sebesar 0,2 persen per tahun.

Meskipun demikian, ketika terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah penumpang udara domestik mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 1998 sebesar 43,2 persen dan menurun lagi sebesar 10,4 persen pada tahun 1999. Kenaikan jumlah penumpang domestik mulai terjadi pada tahun 2000 sebagai dampak tarif penerbangan yang semakin kompetitif. Jumlah penumpang udara domestik kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk penumpang internasional perkembangannya relatif stabil.

**Tabel 3.8.6**  
**Jumlah Penumpang dan Barang yang Berangkat Melalui Bandar Udara**

Tahun	Keberangkatan Dalam Negeri		Keberangkatan Luar Negeri		Jumlah Keberangkatan	
	Penumpang (Ribuan)	Barang (Ton)	Penumpang (Ribuan)	Barang (Ton)	Penumpang (Ribuan)	Barang (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1968	148,4	350,8	70,6	62,4	219,0	413,2
1973	1 800,4	20 075,2	421,6	2 158,2	2 222,0	22 233,4
1978	4 150,6	42 525,9	850,2	6 213,1	5 000,8	48 739,0
1983	6 440,8	66 763,8	1 042,4	23 260,7	7 483,2	90 024,5
1988	8 302,2	101 047,8	1 892,0	51 855,0	10 194,2	152 932,8
1993	10 102,1	114 715,2	3 449,1	122 371,4	13 551,2	237 086,6
1994	10 866,7	123 207,6	4 221,5	141 718,9	15 078,2	264 926,5
1995	12 948,8	177 881,0	4 082,0	151 926,0	17 030,8	32 980,7
1996	13 831,1	201 476,0	4 513,8	169 101,0	18 344,9	37 057,7
1997	13 831,5	216 753,0	4 474,3	168 573,0	18 305,8	38 532,6
1998	7 863,8	147 719,0	3 833,0	170 617,0	11 696,8	31 833,6
1999	7 045,8	161 033,0	3 924,3	165 600,0	10 970,1	32 663,3
2000	8 654,2	161 201,0	4 728,4	146 340,0	13 382,6	30 754,1
2001	10 394,3	164 135,0	4 675,0	147 008,0	15 069,3	31 114,3
2002	13 534,9	172 336,0	4 790,9	156 032,0	18 325,8	32 836,8
2003	19 285,5	194 878,0	4 281,1	130 323,0	23 566,6	32 520,1
2004	22 838,6	171 141,0	5 288,1	138 449,0	28 126,7	30 959,0



STATISTIK  
60 Tahun INDONESIA  
MERDEKA





## **POS DAN TELEKOMUNIKASI**

---

## 3.9 POS DAN TELEKOMUNIKASI

### RINGKASAN

Selama PJP I (1968-1993), rata-rata laju pertumbuhan produksi surat pos pengiriman dalam negeri 6,8 persen dan luar negeri 7,7 persen. Pada akhir Pelita V, tahun 1993 produksi surat pos untuk pengiriman dalam negeri naik 48,7 persen dan tujuan luar negeri 191,5 persen dibanding akhir Pelita IV, tahun 1988. Namun sejak krisis ekonomi, tahun 1998 produksi pos cenderung turun kendati pada tahun 2003 kembali meningkat.

Pada periode yang sama (1968-1993) laju pertumbuhan untuk jumlah Satuan Sambungan Telepon (SST) 10,0 persen dan produksi telepon 5,1 persen. Pada akhir Pelita III dan V masing-masing naik tajam 127,7 persen dan 130,1 dibanding dengan masing-masing akhir pelita sebelumnya.

Produksi telepon dari Pelita I sampai dengan Pelita IV terus mengalami peningkatan. Namun sejak akhir Pelita V, tahun 1993 mengalami penurunan 21,3 persen dibanding pelita sebelumnya, tahun 1988.

Produksi teleks selama PJP I (1968-1993) rata-rata laju pertumbuhannya 20,8 persen untuk pengiriman dalam negeri dan luar negeri 12,7 persen. Sementara produksi telegram dalam negeri dan luar negeri masing-masing tumbuh 2,7 persen dan - 11,7 persen. Sejak tahun 2001 produksi teleks tujuan luar negeri telah ditiadakan atau tidak diproduksi lagi.

Perkembangan pelanggan (*subscriber*) telepon selular tumbuh sangat pesat. Setiap tahun naik di atas 60 persen, bahkan pada tahun 2001 mencapai kenaikan 80,2 persen dari tahun sebelumnya.

### SUMMARY

*In the periods of 1968-1993, mail productions unexceptionally increased, but in the the time of economic crisis, it significantly decreased. Furthermore, at the end of 2003, the mail productions started to gradually increase.*

*The number of telephone connection units has increased since 1968. Even in 1993 it significantly increased as in the case of telephone production. On the contrary, in the same period, telex and telegram had drastically decreased. Therefore, by many more reason, in 2001, international telex productions were discontinued. In the case of telephone production, the number of new telephone continuously increased, however, in 1993 it dramatically decreased, compared to that of 1968.*

*In the case of cellular telephone, the number of subscribers considerably increased. Actually the case that the increase was more than 60 percent annually, furthermore, the increase reached out of 80.2 percent in 2001.*

Pembangunan pos dan telekomunikasi bukan hanya mencakup jangkauan pelayanan dan meningkatkan kerjasama internasional, tetapi juga peningkatan jasa telekomunikasi dan informasi, sehingga arus berita, informasi, dan data berjalan lancar. Jenis kegiatan yang dicakup dalam telekomunikasi adalah satuan sambungan telepon (SST), produksi teleks, dan produksi telegram.

**3.9.1 Perkembangan Produksi Pos dan Giro**

Selama PJP I (1968-1993) produksi pos dan giro menurut jenis pengiriman yang terdiri dari pengiriman dalam negeri dan pengiriman ke luar negeri mengalami peningkatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan masing-masing 6,8 persen dan 7,7 persen. Sementara bila dibandingkan antara Pelita V, tahun 1993 dengan Pelita IV, tahun 1988 baik pengiriman dalam negeri maupun luar negeri meningkat masing-masing 48,7 persen dan 191,5 persen. Namun sejak krisis ekonomi, tahun 1998 terus mengalami penurunan, kendati tahun 2003 menunjukkan peningkatan.

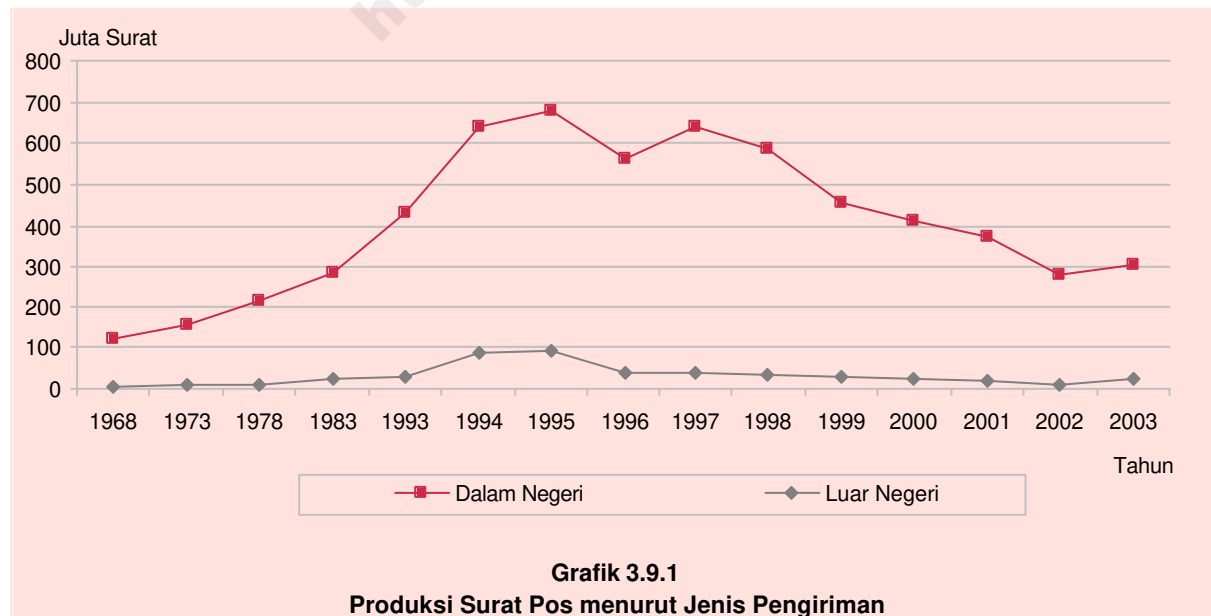
**3.9.2 Perkembangan Satuan Sambungan Telepon Induk dan Produksi Telepon**

Telekomunikasi terus dikembangkan menjadi wahana yang dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi, dan data, baik untuk lingkup

tabel 3.9.1  
Produksi Surat Pos Menurut Jenis Pengiriman  
(Ribu Surat)

Tahun	Pengiriman	
	Dalam Negeri	Luar Negeri
(1)	(2)	(3)
1968	123 198	4 762
1973	155 534	9 416
1978	212 295	11 888
1983	286 966	22 101
1993	429 497	30 106
1994	638 483	87 749
1995	678 830	92 137
1996	562 447	38 985
1997	637 580	41 031
1998	588 133	34 462
1999	455 014	29 895
2000	413 625	25 249
2001	374 534	19 654
2002	283 166	10 895
2003	307 259	23 129

Sumber: Kantor Pusat Pos dan Giro, Bandung



**Grafik 3.9.1**  
Produksi Surat Pos menurut Jenis Pengiriman



nasional maupun internasional, yang lancar, jelas, dan cepat. Hal ini guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selama PJP I (1968-1993), rata-rata laju pertumbuhan Satuan Sambungan telepon (SST) 10,0 persen dan produksi telepon 5,1 persen. Pada akhir Pelita III dan akhir Pelita V jumlah satuan sambungan telepon induk mengalami kenaikan sangat tajam sebesar 127,7 persen, dan 130,1 persen bila dibandingkan dengan keadaan masing-masing akhir Pelita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas telepon sangat dibutuhkan oleh masyarakat, perusahaan swasta dan pemerintah guna menunjang aktivitasnya. Dalam menyongsong era lepas landas PT Telkom telah melakukan pembangunan telekomunikasi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional; yaitu dengan memperlancar arus informasi serta memperluas jangkauan jasa telekomunikasi ke seluruh pelosok tanah air. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi, dan keandalan dalam memberi jasa telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Selama Pelita I, Pelita II, Pelita III dan Pelita IV, produksi telepon meningkat masing-masing sebesar 96,5 persen, 15,6 persen, 18,5 persen dan 62,4 persen. Akan tetapi pada akhir Pelita V mengalami penurunan sebesar 21,3 persen, dibandingkan dengan akhir Pelita IV. Hal ini terjadi karena adanya penurunan dalam



**Grafik 3.9.2**  
Jumlah Satuan Sambungan Telepon Induk

Tabel 3.9.2

Jumlah Satuan Sambungan Telepon Induk dan Produksi Telepon

Tahun	Satuan Sambungan Telepon Induk (unit)	Produksi Telepon (ribu menit)
(1)	(2)	(3)
1968	170 808	26 873
1973	178 029	52 808
1978	220 990	61 048
1983	503 253	72 345
1988	803 287	117 453
1993	1 848 678	92 419
1994	2 439 670	238 834
1995	3 214 404	51 062
1996	4 112 533	26 168
1997 <sup>1)</sup>	5 621 910	42 144
1998	5 022 925	45 905
1999	6 134 912	47 258
2000	6 720 725	52 859
2001	7 275 281	58 389
2002	7 795 698	61 128
2003	8 271 531	66 335

<sup>1)</sup> Sejak Tahun 1997-2003, Satuan Produksi Telepon dalam Juta Pulsa.

pemakaian telepon manual. Baik produksi telepon maupun satuan sambungan telepon dari tahun ke tahun terus meningkat, kecuali pasca krisis, tahun 1998 turun 10,6 persen dari tahun sebelumnya, 1997.

### 3.9.3 Perkembangan Produksi Teleks

Selama PJP I (1968-1993), rata-rata laju pertumbuhan produksi teleks dalam negeri 20,8 persen dan luar negeri 12,7 persen. Produksi teleks dalam negeri pada akhir Pelita III, tahun 1983, mengalami kenaikan yang sangat nyata, yaitu mencapai 837,2 persen, bila dibandingkan dengan akhir Pelita II, tahun 1978. Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu fasilitas teleks adalah fasilitas yang dianggap lebih baik, yang dapat digunakan oleh pelanggan, bila fasilitas lain seperti telegraf. Namun mulai akhir Pelita IV dan V, kenaikan produksi teleks tidak lebih berarti, karena pada masa tersebut terdapat fasilitas yang lebih baik lagi seperti telepon. Ini terjadi pula untuk produksi teleks keluar negeri. Pada akhir Pelita IV dan V, produksi teleks ke luar negeri mengalami penurunan masing-masing

sebesar 9,9 persen dan 62,4 persen bila dibandingkan dengan akhir pelita-pelita sebelumnya. Produksi teleks ini baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami penurunan, bahkan sejak tahun 2001 produksi teleks ke luar negeri telah dihapuskan. Nampaknya, fasilitas penggunaan teleks sebagai alat komunikasi bagi masyarakat sudah semakin tidak populer, karena sudah ada fasilitas telepon yang lebih efisien dan canggih, seperti telepon mobil dan selular dan lainnya. Bila dilihat perkembangan produksi teleks dalam negeri, nampaknya juga akan mengalami nasib yang sama dengan produksi teleks ke luar negeri.

### 3.9.4 Perkembangan Produksi Telegram

Selama PJP I (1968-1993), rata-rata pertumbuhan produksi telegram dalam negeri 2,7 persen dan luar negeri tumbuh - 11,7 persen. Masyarakat, perusahaan swasta, maupun pemerintah masih memerlukan layanan tersebut karena biayanya dianggap relatif murah. Dengan kemajuan teknologi, maka pada akhir Pelita V, produksi telegram dalam bentuk kata baik untuk dalam negeri (DN) maupun luar negeri (LN) mengalami



penurunan masing-masing sebesar 19,5 persen dan 33,9 persen, bila dibandingkan dengan keadaan akhir pelita sebelumnya. Pada akhir Pelita V (tahun 1993), produksi telegram naik 184,03 persen dibandingkan dengan akhir Pelita I (tahun 1973) yakni dari 105.166 ribu kata menjadi 298.704 ribu kata. Namun beberapa

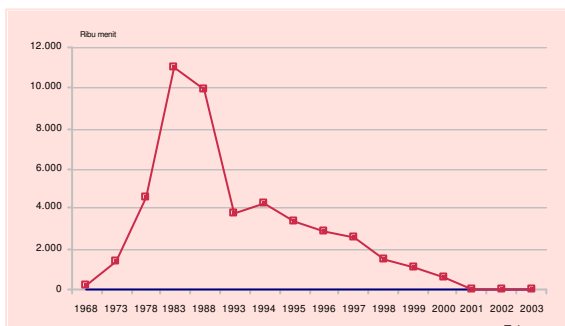
**Tabel 3.9.3**  
**Jumlah Produksi Teleks/Inteleks**

Tahun	Dalam Negeri (Ribu Pulsa)	Luar Negeri (menit)
(1)	(2)	(3)
1968	5 086	187 949
1973	14 078	1 408 893
1978	35 894	4 510 950
1983	336 400	11 013 554
1988	518 409	9 922 001
1993	574 441	3 734 337
1994	502 176	4 273 243
1995	449 010	3 363 140
1996	437 916	2 900 262
1997	355 423	2 515 200
1998	1 257 458	1 520 099
1999	188 431	1 058 515
2000	99 438	593 180
2001	60 217	0
2002	37 594	0
2003	14 731	0

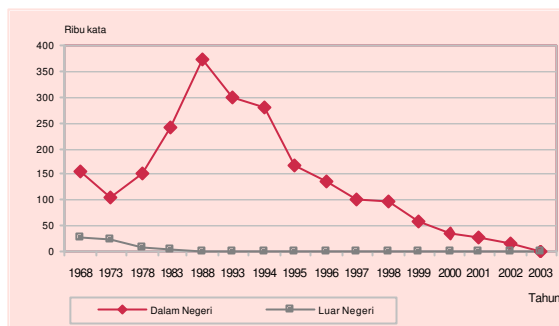
tahun terakhir ini, nasib produksi telegram tidak jauh beda dengan teleks. Produksi telegram dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Bahkan produksi telegram ke luar negeri dari sejak tahun 2001 sudah dihapuskan seperti produksi teleks. Hal ini terjadi karena telah tersedianya fasilitas lain yang dianggap lebih efisien dan lebih canggih. Misalnya telepon seluler yang mulai tahun 1990-an terus berkembang sangat pesat, terutama beberapa tahun terakhir ini.

### 3.9.5 Perkembangan Pelanggan (*Subscriber*) Telepon Seluler

Sejak tahun 1999, jumlah pelanggan (*subscriber*) telepon selular tumbuh sangat pesat, setiap tahun naik di atas 60 persen bahkan pada tahun 2001 meningkat tajam dari tahun sebelumnya mencapai 80,2 persen. Pada tahun 2003, jumlah pelanggan ini telah mencapai 18,6 juta unit. Jumlah pelanggan ini mencakup produk tiga perusahaan yaitu Telkomsel, Indosat dan



**Grafik 3.9.4**  
**Produksi Teleks/Inteleks Luar Negeri**



**Grafik 3.9.5**  
**Jumlah Produksi Telegram**

**Tabel 3.9.4**  
**Jumlah Produksi Telegram**

Tahun	Dalam Negeri (Ribuan Kata)	Luar Negeri (Ribuan Kata)
(1)	(2)	(3)
1968	154 140	26 460
1973	105 166	23 839
1978	150 103	9 682
1983	240 074	3 328
1988	371 268	1 765
1993	298 704	1 167
1994	280 387	1 051
1995	165 221	1 044
1996	136 306	940
1997	102 712	792
1998	98 739	779
1999	56 830	792
2000	35 621	440
2001	26 261	0
2002	16 839	0
2003	4	0

Excelcomindo. Penggunaan jenis telepon seluler ini, berdampak pada alat komunikasi lainnya seperti teleks dan telegram terus mengalami penurunan bahkan sejak tahun 2001 produksinya untuk tujuan luar negeri telah dihapuskan.

**Tabel 3.9.5**  
**Total Pelanggan (Subscriber) pra bayar maupun pasca bayar**

Tahun	Pelanggan <sup>1)</sup> (Unit)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1999	2 149 708	-
2000	3 510 670	63,3
2001	6 395 179	82,2
2002	10 648 144	66,5
2003	18 551 251	74,2

<sup>1)</sup> Jumlah pelanggan ini mencakup produksi tiga perusahaan: Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo









STATISTIK  
60 Tahun **INDONESIA**  
**MERDEKA**





**PARIWISATA**



## 3.10 PARIWISATA

### RINGKASAN

Perkembangan pariwisata Indonesia mengalami masa naik turun. Berbagai peristiwa baik di dalam maupun di luar negeri dalam sepuluh tahun terakhir, seperti, krisis multidimensi (1997), tragedi runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat (2001), yang diikuti oleh tragedi bom Bali (2002), wabah virus SARS (2003), perang Irak (2003), Pemilihan Presiden secara langsung dan tragedi bom Kuningan, Jakarta (2004) telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama kurun waktu 1969-2004 terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 1998, 2002 dan 2003, dengan rata-rata pertumbuhan 13,2 persen. Jumlah wisman pada akhir tahun 2004 mencapai 5.321.165 orang, sementara itu rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia, yang merupakan sumber devisa negara, juga mengalami fluktuasi naik turun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,8 persen selama periode 1984-2004. Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan pada tahun 2004 mencapai US\$ 901,7. Di sisi lain, lama tinggal wisman di Indonesia mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,3 persen selama periode 1969-2004. Lama tinggal wisman terlama terjadi pada tahun 2000 yaitu 12,3 hari, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 9,5 hari pada tahun 2004. Kedatangan wisman tersebut memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dari pariwisata yang terus meningkat sejak tahun 1984 hingga sebelum krisis. Rata-rata pertumbuhan devisa selama periode tersebut adalah 14,1 persen. Devisa tertinggi terjadi pada tahun 1996 sebesar US\$ 6.307,7 juta, dan terus mengalami fluktuasi hingga mencapai US\$ 4.797,9 juta pada tahun 2004. Krisis yang melanda Indonesia ternyata tidak terlalu mempengaruhi perkembangan jumlah akomodasi, walaupun perkembangan setelah krisis tidak sebesar sebelum krisis, begitu juga dengan tingkat penghunian kamar hotel.

### SUMMARY

*The development of Indonesia tourism was fluctuated due to the influence of many factors, both internal and external, such as multidimensional crisis (1997), the bomb tragedy World Trade Center (WTC), USA (2001), that followed by Bali bombing Tragedy (2002), SARS endemy (2003), Iraq Attacked (2003), The Presidential election in Indonesia (2004) and Bomb tragedy in Kuningan, Jakarta (2004). The number of foreign visitors to Indonesia during 1969-2004 keep increasing except in 1998, 2002, and 2003, with the growth of 13.2 percent per year. The number of visitors in 2004 reached 5,321,165 people, meanwhile the average expenditure of foreign visitors during their stay in Indonesia, which is the source of the foreign exchange revenue, also experienced a fluctuation, with the growth of 1.8 percent per year during the period of 1984-2004. The average expenditure per visit in 2004 reached US\$ 901.7. On the other hand, the average length of stay in Indonesia experienced a decreasing of 0.3 percent per year during 1969-2004. The longest stay of the foreigner was in 2000 that was 12.3 days and the shortest was in 2004, i.e 9.5 days. The arrival of those tourist gave contribution to the revenue from tourism that keep increasing since 1984 up to before crisis. The foreign exchange revenue from tourism grew by 14.1 percent per year, where the highest revenue was in 1996 that was US\$ 6,307.7 million, and keep fluctuation until reached US\$ 4,797.9 million in 2004. The crisis in Indonesia had not been given much impact to the expansion of accommodation and occupation rate of the hotel, although the growth after crisis is not.*

Perekonomian dunia saat ini dengan adanya era globalisasi semakin memperketat persaingan antarnegara, terutama dalam sektor perdagangan dan industri. Krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang berlanjut dengan krisis multidimensi membuat ekonomi Indonesia terpuruk pada titik yang sangat rendah. Segala usaha dilakukan untuk dapat segera keluar dari krisis yang berkepanjangan, baik dengan menggali potensi yang dimiliki bangsa Indonesia maupun kerja sama dengan berbagai lembaga baik regional maupun internasional.

Perlahan-lahan Indonesia mulai menata kembali ekonominya. Namun dengan adanya persaingan antarnegara yang semakin terbuka dengan dimulainya era perdagangan bebas dapat mengakibatkan menurunnya nilai ekspor Indonesia, apabila efisiensi sektor industri tidak dapat ditingkatkan. Di samping itu harga komoditas primer di pasaran dunia mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu. Sedangkan ekspor barang industri pengembangannya terbatas karena masih sering dibatasi kuota oleh negara pengimpor.

Di sisi lain kegiatan pariwisata tidak mengalami hambatan seperti komoditas ekspor. Kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang membelanjakan uangnya selama mereka berada di Indonesia akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini konsumsi barang dan jasa oleh wisman sering dikatakan sebagai *invisible export*, sehingga pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa negara akan terus dikembangkan dan diharapkan bisa menjadi sektor andalan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional.

Mengalirnya wisman ke Indonesia dari berbagai negara yang ingin menikmati alam dan budaya bangsa akan membawa berbagai dampak dalam kehidupan bangsa, bukan saja terhadap kelestarian alam, tetapi juga kelestarian budaya bangsa. Sehingga dalam pembangunan kepariwisataan tetap harus dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup.

Kegiatan kepariwisataan tidak hanya mencakup wisman dan wisnus, tetapi juga beberapa kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, seperti hotel, usaha perjalanan wisata, pramuwisata, rumah makan, dan sebagainya.

### 3.10.1 Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 1969 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia baru mencapai 86.100 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 5.321.165 orang pada akhir tahun 2004. Rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman per tahun selama periode tersebut sebesar 13,2 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1971 yang mencapai 38,3 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2003 yang mengalami penurunan sebesar 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang diakibatkan oleh terjadinya bom Bali, Oktober 2002 dan wabah SARS awal 2003.

Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk terus meningkatkan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia, seperti pemberian bebas visa kunjungan singkat untuk beberapa negara. Pada tahun 1990 Indonesia mencanangkan program *Visit Indonesia Year* yang diikuti *Visit ASEAN Year* pada tahun 1991.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, yang diikuti instabilitas politik sampai jatuhnya pemerintah Orde Baru mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia. Pada tahun 1997 jumlah wisman mencapai 5,2 juta orang, turun menjadi 4,6 juta orang pada tahun 1998 atau turun 11,2 persen. Bergulirnya reformasi dan pergantian kepemimpinan nasional memberi harapan

baru sehingga kunjungan wisman juga mulai bangkit dari keterpurukan akibat krisis. Pariwisata Indonesia kembali mengalami tekanan berat sejak tragedi runtuhnya gedung kembar WTC di Amerika Serikat yang diikuti berbagai isu nasional maupun regional, seperti terorisme, perang Irak, wabah SARS, bom Bali, dan bom Marriot di Jakarta. Pelaksanaan Pemilu dan pergantian pemerintahan pada tahun 2004 yang berjalan lancar dan stabilitas keamanan yang membaik berdampak positif terhadap sektor pariwisata. Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tahun 2004 mencapai 5,3 juta orang yang berarti naik 19,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pintu masuk wisman, sebagian besar masih melalui tiga pintu masuk utama, yaitu bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), bandara Ngurah Rai (Denpasar), dan pelabuhan laut Sekupang (Batam).

Pada tahun 2004 jumlah wisman yang datang ke Indonesia paling banyak melalui pintu masuk Sekupang (Batam) jika dibandingkan dengan pintu masuk lainnya. Dari 5,3 juta wisman yang datang, tercatat 29,9 persen melalui pelabuhan laut Sekupang. Bali yang sudah dikenal di luar negeri sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia memiliki bandara udara internasional yang cukup sibuk.

Jumlah wisman yang datang ke Indonesia melalui bandara Ngurah Rai mencapai 28,9 persen dari total kedatangan wisman ke Indonesia, sedangkan yang melalui bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,1 persen. Sisanya 1,8 persen melalui bandara Polonia (Medan) dan 21,2 persen melalui pintu masuk lainnya.

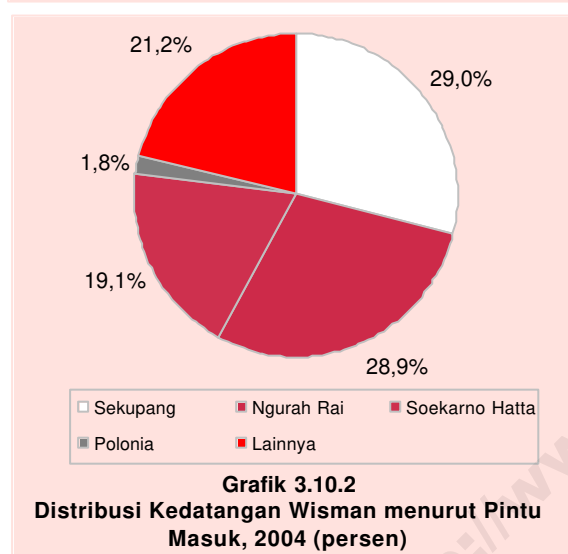
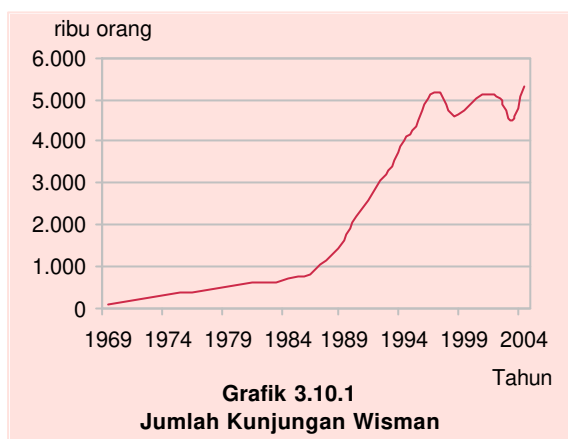
Dengan terus meningkatnya jumlah kedatangan wisman ke Indonesia maka pemerintah membuka beberapa pintu gerbang baru sebagai pintu masuk ke Indonesia.

**Tabel 3.10.1**  
**Kunjungan Wisman ke Indonesia dan**  
**Pertumbuhannya**

Tahun	Jumlah kunjungan (orang)	Pertumbuhan per tahun (persen)
(1)	(2)	(3)
1969	86 100	-
1970	129 319	50,2
1971	178 781	38,2
1972	221 195	23,7
1973	270 303	22,2
1974	313 452	16,0
1975	366 293	16,9
1976	401 237	9,5
1977	433 393	8,0
1978	468 614	8,1
1979	501 430	7,0
1980	566 402	13,0
1981	600 151	6,0
1982	599 863	0,0
1983	640 715	6,8
1984	700 910	9,4
1985	749 351	6,9
1986	825 035	10,1
1987	1 060 347	28,5
1988	1 301 049	22,7
1989	1 625 965	25,0
1990	2 177 566	33,9
1991	2 569 870	18,0
1992	3 064 161	19,2
1993	3 403 138	11,1
1994	4 006 312	17,7
1995	4 324 229	7,9
1996	5 034 472	16,4
1997	5 185 243	3,0
1998	4 606 416	-11,2
1999	4 727 520	2,6
2000	5 064 217	7,1
2001	5 153 620	1,8
2002	5 033 400	-2,3
2003	4 467 021	-11,3
2004	5 321 165 <sup>e)</sup>	19,1
Rata-rata		13,2

Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata





### 3.10.2 Rata-rata pengeluaran Wisman

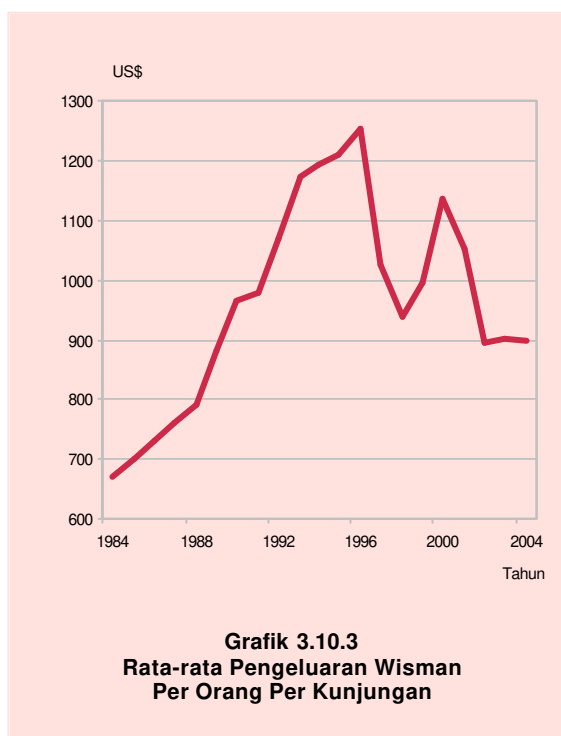
Selain meningkatkan jumlah wisman, diharapkan rata-rata pengeluaran wisman selama berada di Indonesia juga meningkat, sehingga penerimaan devisa dari wisman makin berperan dalam perekonomian Indonesia. Dari hasil “*Passenger Exit Survey*” yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ternyata rata-rata pengeluaran wisman selama berada di Indonesia mengalami fluktuasi naik turun.

Secara keseluruhan (1984-2004), rata-rata kenaikan pengeluaran wisman selama berada di Indonesia adalah sebesar 1,8 persen. Akan tetapi dalam 10 tahun terakhir rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan berada pada kisaran US\$ 1.000 dengan kecenderungan menurun.

**Tabel 3.10.2**  
Rata-rata Pengeluaran Wisman Per Orang Per Kunjungan

Tahun	Rata-rata pengeluaran wisman (US\$)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
1984	669,3	-
1985	699,5	4,5
1986	729,7	4,3
1987	759,8	4,1
1988	790,0	4,0
1989	878,4	11,2
1990	966,8	10,1
1991	981,4	1,5
1992	1 069,9	9,0
1993	1 171,7	9,5
1994	1 194,4	1,9
1995	1 209,1	1,2
1996	1 252,9	3,6
1997	1 026,3	-18,1
1998	940,2	-8,4
1999	996,3	6,0
2000	1 135,2	13,9
2001	1 053,4	-7,2
2002	893,3	-15,2
2003	903,7	1,2
2004	901,7	-0,2
Rata-rata		1,8

Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata



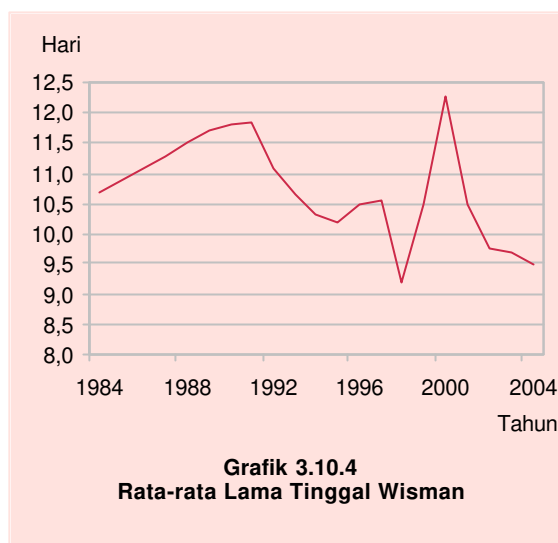
### 3.10.3 Rata-rata Lama Tinggal Wisman

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan devisa yang berasal dari wisatawan mancanegara adalah rata-rata pengeluaran mereka selama berada di Indonesia. Rata-rata lama tinggal selama mereka berada di Indonesia mempengaruhi rata-rata pengeluarannya. Sehingga secara tidak langsung rata-rata lama tinggal akan mempengaruhi penerimaan devisa. Rata-rata lama tinggal pada tahun 1984 adalah 10,7 hari menjadi 9,5 hari pada tahun 2004. Rata-rata lama tinggal wisman terlama terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 12,26 hari, sedang terendah pada tahun 1998 sebesar 9,18 hari. Sejak peristiwa runtuhnya gedung kembar WTC di Amerika Serikat tahun 2001 dan merebaknya isu terorisme global, rata-rata lama tinggal wisman dunia di suatu negara tujuan cenderung menurun, termasuk

**Tabel 3.10.3**  
**Rata-rata Lama Tinggal Wisman**  
(hari)

Tahun	Rata-rata	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
1984	10,7	-
1985	10,9	1,9
1986	11,1	1,8
1987	11,3	1,8
1988	11,5	1,8
1989	11,7	1,7
1990	11,8	0,9
1991	11,8	0,0
1992	11,1	-5,9
1993	10,7	-3,6
1994	10,3	-3,7
1995	10,2	-1,0
1996	10,5	2,9
1997	10,6	1,0
1998	9,2	-13,2
1999	10,5	14,1
2000	12,3	17,1
2001	10,5	-14,6
2002	9,8	-6,7
2003	9,7	-1,0
2004	9,5	-2,1
Rata-rata		-0,3

Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata



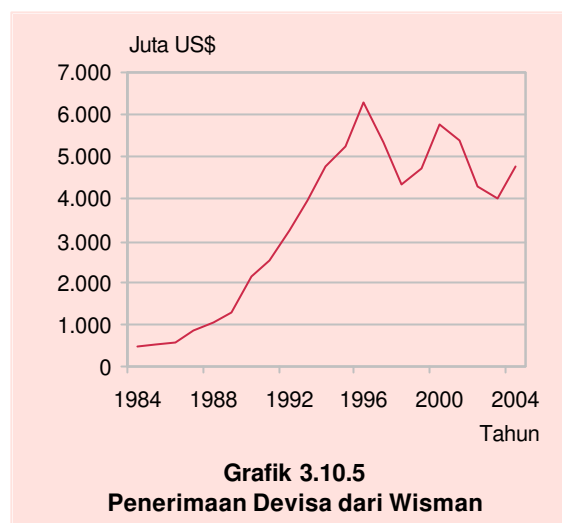
wisman di Indonesia. Pada tahun 2000 rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia mencapai 12,3 hari turun menjadi 10,5 hari pada tahun 2001 dan terus turun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan rata-rata lama tinggal wisman menyebabkan rata-rata jumlah pengeluaran yang dibelanjakan wisman di Indonesia per kunjungan juga menurun.

### 3.10.4 Penerimaan Devisa dari Wisman

Penerimaan devisa dari kedatangan wisman ke Indonesia merupakan salah satu perhatian utama dalam pembangunan sektor pariwisata. Penerimaan devisa dari kedatangan wisman ke Indonesia terus meningkat dari tahun 1984 sampai tahun 1996. Pada tahun 1984 jumlah devisa dari wisman sebesar US\$ 469,1 juta meningkat menjadi US\$ 6.307,7 juta pada tahun 1996 atau naik 13 kali lipat lebih. Namun sejak krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997, penerimaan devisa dari kedatangan wisman mengalami penurunan dan pada tahun berikutnya terus berfluktuasi. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia.

Pada tahun 1997 penerimaan devisa dari kedatangan wisman ke Indonesia sebesar US\$ 5,3 milyar atau turun sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berlanjut pada tahun 1998. Pada tahun

1999 dan 2000 perolehan devisa dari wisman naik, tetapi kembali menurun pada tahun 2001 hingga 2003. Pemilu yang berjalan lancar dan aman serta mulai membaiknya stabilitas sosial politik di Indonesia menggairahkan kembali sektor pariwisata, sehingga pada tahun 2004 penerimaan devisa dari kunjungan wisman mencapai US\$ 4,8 milyar atau meningkat 18,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jumlah ini masih di bawah perolehan devisa pada tahun 1996 yang mencapai US\$ 6,3 milyar.



**Tabel 3.10.4**  
**Penerimaan Devisa dari Wisman**  
(juta dolar AS)

Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
1984	469,1	-
1985	525,3	12,0
1986	590,5	12,4
1987	837,7	41,9
1988	1 027,8	22,7
1989	1 284,5	25,0
1990	2 105,3	63,9
1991	2 522,0	19,8
1992	3 278,2	30,0
1993	3 987,6	21,6
1994	4 785,3	20,0
1995	5 228,3	9,3
1996	6 307,7	20,6
1997	5 321,5	-15,6
1998	4 361,1	-18,0
1999	4 710,2	8,0
2000	5 748,8	22,1
2001	5 396,3	-6,1
2002	4 305,6	-20,2
2003	4 037,0	-6,2
2004	4 797,9	18,8
Rata-rata		14,1

Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

### 3.10.5 Akomodasi

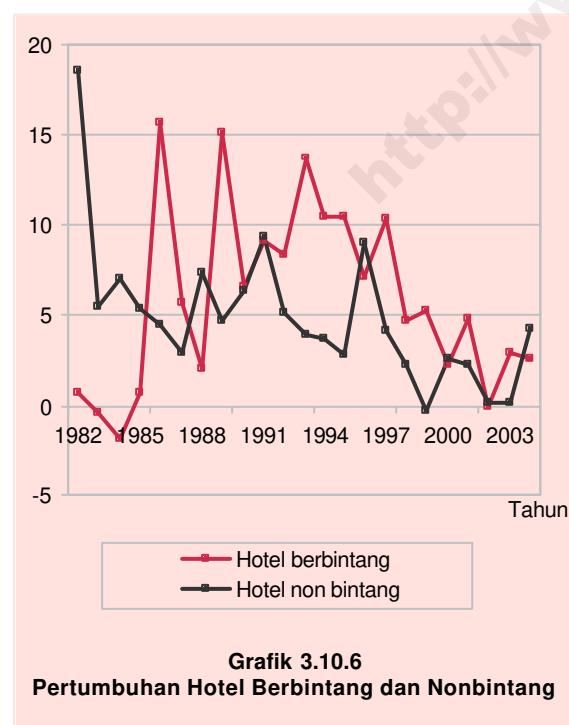
Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman, usaha sarana pariwisata juga mengalami peningkatan. Jumlah akomodasi pada tahun 1981 sebanyak 3.640 usaha yang terdiri dari 276 hotel berbintang dan 3.364 hotel nonbintang dengan jumlah kamar (hotel bintang dan nonbintang) sebanyak 71.591 kamar. Jumlah ini terus bertambah, hingga pada tahun 2004 jumlah akomodasi di seluruh Indonesia mencapai 10.861 usaha yang terdiri dari 1.014 hotel berbintang dan 9.847 nonbintang dengan jumlah kamar keseluruhan menjadi 272.939 kamar.

Rata-rata pertumbuhan jumlah hotel berbintang tahun 1981 sampai dengan 2004 mencapai 5,9 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1986 yang mencapai 15,7 persen, sedangkan terendah pada tahun 1984 di mana mengalami penurunan sebesar 1,8 persen. Hotel nonbintang mengalami rata-rata kenaikan sebesar 4,8 persen setiap tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1982 yang mencapai 18,5 persen dan terendah pada tahun 1999 yang mengalami penurunan 0,3 persen. Krisis yang melanda Indonesia tidak terlalu mempengaruhi perkembangan jumlah akomodasi di Indonesia. Meskipun demikian pertumbuhan usaha akomodasi setelah krisis tidak sebesar pertumbuhan sebelum krisis.



**Tabel 3.10.5**  
**Jumlah Hotel serta Pertumbuhannya**

Tahun	Hotel		Pertumbuhan (persen)	
	Bintang	Nonbintang	Bintang	Nonbintang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1981	276	3 364		
1982	278	3 988	0,7	18,5
1983	277	4 207	-0,4	5,5
1984	272	4 502	-1,8	7,0
1985	274	4 744	0,7	5,4
1986	317	4 957	15,7	4,5
1987	335	5 100	5,7	2,9
1988	342	5 475	2,1	7,4
1989	394	5 731	15,2	4,7
1990	420	6 093	6,6	6,3
1991	458	6 659	9,0	9,3
1992	496	6 998	8,3	5,1
1993	564	7 274	13,7	3,9
1994	623	7 541	10,5	3,7
1995	688	7 751	10,4	2,8
1996	737	8 445	7,1	9,0
1997	813	8 798	10,3	4,2
1998	851	9 002	4,7	2,3
1999	896	8 977	5,3	-0,3
2000	916	9 209	2,2	2,6
2001	960	9 415	4,8	2,2
2002	960	9 433	0,0	0,2
2003	988	9 447	2,9	0,1
2004	1 014	9 847	2,6	4,2
Rata-rata			5,9	4,8



Perkembangan jumlah kamar hotel sejalan dengan perkembangan jumlah akomodasi. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan jumlah kamar hotel tahun 1981 sampai dengan 2004 sebesar 7,6 persen untuk hotel berbintang dan 5,4 persen untuk hotel nonbintang. Rata-rata pertumbuhan per tahun jumlah kamar lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah akomodasi. Pertumbuhan jumlah kamar hotel tertinggi terjadi pada tahun 1991 yang mencapai 21,8 persen dan terendah terjadi pada tahun 1985 yang mengalami penurunan sebesar 0,1 persen. Sedangkan untuk hotel nonbintang pertumbuhan tertinggi sebesar 18,9 persen yang terjadi pada tahun 1982 dan terendah pada tahun 1999 yang mengalami penurunan sebesar 1,6 persen.

Perkembangan jumlah kamar hotel juga tidak terlalu terpengaruh oleh krisis yang melanda Indonesia sebagaimana jumlah akomodasi. Namun setelah krisis pertumbuhannya tidak sepesat seperti sebelum krisis.

Kemajuan industri perhotelan dapat diikuti perkembangannya melalui indikator tingkat penghunian kamar hotel (TPK). Pada periode tahun 1986 sampai 2004 TPK hotel berbintang berkisar antara 40 sampai 60 persen, sedang untuk hotel nonbintang antara 28 sampai 34 persen.

Nilai TPK yang secara umum kurang dari 50 persen menunjukkan jumlah kamar yang terjual (dihuni) setiap tahun tidak ada setengah dari jumlah kamar yang tersedia. Ini dapat disebabkan karena harga kamar hotel yang kurang terjangkau atau pertumbuhan jumlah kamar hotel lebih cepat daripada perkembangan wisatawan yang memanfaatkan jasa akomodasi. Nilai TPK terbesar untuk hotel bintang terjadi pada tahun 1989 yang mencapai 55,7 persen, sedang terendah terjadi tahun 1998 sebesar 38,1 persen. Untuk hotel nonbintang TPK tertinggi terjadi pada tahun 1994 sebesar 33,7 persen, sedangkan terendah pada tahun 1986 sebesar 28,3 persen.

Dampak krisis yang melanda Indonesia sangat berpengaruh terhadap TPK hotel berbintang, sedangkan untuk hotel nonbintang relatif stabil. Hal

**Tabel 3.10.6**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Kamar Hotel**

Tahun	Hotel		Pertumbuhan (persen)	
	Bintang	Non bintang	Bintang	Non bintang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1981	19 637	51 954		
1982	19 998	61 764	1,8	18,9
1983	21 679	63 821	8,4	3,3
1984	21 904	68 355	1,0	7,1
1985	21 878	75 258	-0,1	10,1
1986	25 294	77 348	15,6	2,8
1987	27 314	79 528	8,0	2,8
1988	27 532	86 108	0,8	8,3
1989	31 404	91 231	14,1	5,9
1990	35 677	96 204	13,6	5,5
1991	43 472	106 762	21,8	11,0
1992	47 290	113 079	8,8	5,9
1993	53 134	122 003	12,4	7,9
1994	57 398	126 481	8,0	3,7
1995	67 459	130 626	17,5	3,3
1996	70 931	143 229	5,1	9,6
1997	84 313	149 725	18,9	4,5
1998	90 808	154 323	7,7	3,1
1999	96 716	151 782	6,5	-1,6
2000	97 322	155 662	0,6	2,6
2001	99 346	160 104	2,1	2,9
2002	99 346	160 395	0,0	0,2
2003	101 631	161 838	2,3	0,9
2004	102 390	170 549	0,7	5,4
Rata-rata			7,6	5,4

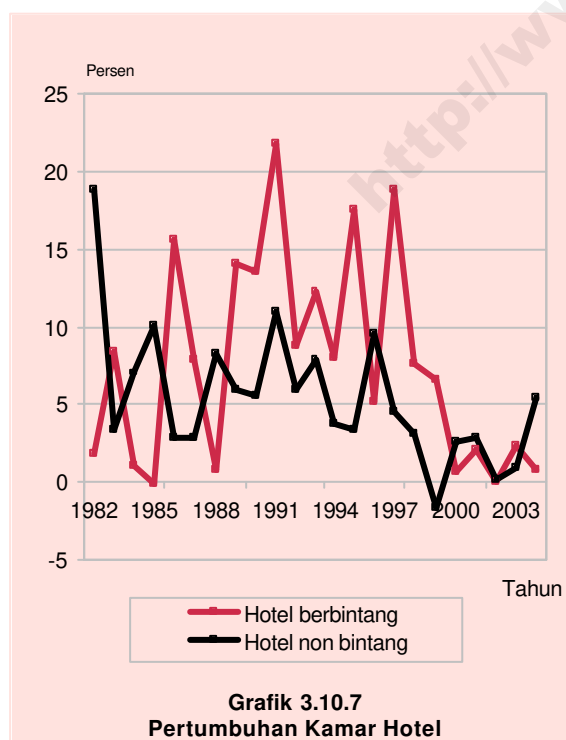
**Tabel 3.10.7**  
**Tingkat Penghunian Kamar (persen)**

Tahun	TPK hotel	
	Bintang	Non bintang
(1)	(2)	(3)
1986	49,3	28,3
1987	48,4	29,6
1988	53,8	31,6
1989	55,7	31,2
1990	55,0	34,1
1991	54,2	33,1
1992	51,4	33,6
1993	51,2	30,3
1994	50,5	33,7
1995	48,0	31,8
1996	49,1	31,5
1997	47,0	30,9
1998	38,1	29,0
1999	42,2	31,0
2000	43,2	31,8
2001	44,8	31,0
2002	44,3	30,6
2003	45,0	29,9
2004 e)	43,3	29,4 e)

ini dapat dimaklumi karena sebagian besar yang menggunakan jasa hotel berbintang adalah wisman, sementara itu wisman yang berkunjung ke Indonesia menurun drastis pada tahun 1998.

Selain tingkat penghunian kamar hotel, rata-rata lama menginap tamu merupakan indikator lain kemajuan usaha akomodasi.

Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang selalu lebih besar dibandingkan rata-rata menginap tamu domestik. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang berada pada kisaran 2,5 sampai 3,6 hari, sedangkan tamu domestik pada kisaran 1,7 sampai 2,1 hari. Sejak krisis rata-rata lama menginap tamu asing meningkat, sedangkan untuk tamu domestik justru menurun. Rata-rata lama menginap tertinggi baik untuk tamu asing maupun domestik terjadi pada tahun 1998 masing-masing 3,6 dan 2,1 hari. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 1995 untuk tamu asing (2,5 hari) dan pada tahun 2004 untuk tamu domestik (1,7 hari).



Untuk hotel nonbintang, rata-rata lama menginap tamu juga tidak jauh berbeda dengan hotel berbintang. Rata-rata lama menginap tamu asing lebih besar dari

pada tamu domestik. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel nonbintang lebih besar dari pada di hotel berbintang, sedangkan tamu domestik sebaliknya.

**Tabel 3.10.8**  
Rata-rata Lama Menginap Tamu pada  
Hotel Berbintang  
(hari)

Tahun	Tamu	
	Asing	Domestik
(1)	(2)	(3)
1986	3,2	2,0
1987	3,1	2,0
1988	3,2	2,1
1989	2,9	2,0
1990	2,9	2,0
1991	2,7	1,9
1992	2,8	1,9
1993	2,7	2,0
1994	2,6	1,9
1995	2,5	1,8
1996	2,8	1,9
1997	2,8	1,9
1998	3,6	2,1
1999	3,1	1,9
2000	3,3	1,8
2001	3,3	1,8
2002	3,1	1,7
2003	3,0	1,7
2004 <sup>e)</sup>	3,0	1,7

**Tabel 3.10.9**  
Rata-rata Lama Menginap Tamu pada  
Hotel Non Bintang,  
(hari)

Tahun	Tamu	
	Asing	Domestik
(1)	(2)	(3)
1986	3,6	1,8
1987	3,0	1,8
1988	2,9	1,8
1989	2,7	1,7
1990	3,1	1,8
1991	3,3	1,7
1992	3,0	1,7
1993	2,8	1,4
1994	3,3	1,5
1995	2,8	1,5
1996	3,0	1,5
1997	3,0	1,5
1998	2,2	1,6
1999	3,5	1,8
2000	3,4	1,4
2001	3,6	1,4
2002	3,8	1,5
2003	3,7	1,3
2004 <sup>e)</sup>	3,1	1,3













## **KEUANGAN DAN HARGA**



## 3.11 KEUANGAN DAN HARGA

### RINGKASAN

Meningkatnya aktivitas pembangunan mempengaruhi besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Disamping itu perkembangan ekonomi juga dapat dilihat melalui keseimbangan neraca pembayaran. Indikasi lainnya adalah kestabilan harga komoditas yang tercermin pada tingkat inflasi dan indeks harga perdagangan besar.

Total realisasi penerimaan Pemerintah Pusat selama Pelita I sampai Pelita VI mengalami kenaikan dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 604,9 triliun, demikian pula dengan total pengeluaran meningkat dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 599,9 triliun.

Pertumbuhan uang beredar tiap tahun selama periode 1994-2004 tidak menentu. Penurunan terendah terjadi pada triwulan I tahun 1995 yaitu Rp 466 triliun, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada triwulan I tahun 2001 sebesar Rp 13.811 triliun.

Neraca pembayaran Indonesia selama periode 1990-1996 selalu mengalami surplus, tetapi sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997 neraca pembayaran mengalami defisit sebesar 2.459 juta dollar AS.

Selama tahun 1995-2004, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 77,6 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu 2,0 persen. Tingginya inflasi di tahun 1998 disebabkan oleh adanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 2001, inflasi terus menurun dan cenderung berada di bawah 10 persen (2 digit).

Selama periode 1971-2004, kenaikan indeks HPB umum tertinggi terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu, indeks HPB naik sebesar 105,3 persen dan kelompok komoditas yang mengalami kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok komoditas ekspor dan impor yang mengalami kenaikan sebesar 182,8 persen dan 120,8 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) cukup berfluktuasi, terutama pada periode 1997-2004. Angka NTP terendah dan dibawah angka 100 terjadi pada tahun 1999.

### SUMMARY

*The development activities affects the amount of government expenditure and income. Furthermore, the economic development can also be reflected through balance of payment. Another indicator is price stability for main commodities represented by inflation rate and whole price index (WPI).*

*During Pelita I – Pelita VII, the realisation of Central government's total revenue increased from Rp 3.1 trillion to Rp 604.9 trillion. Similarly, the realisation of government's total expenditure increased from Rp 3.1 trillion to Rp 599.9 trillion.*

*During 1994-2004, the growth of the 'narrow' money supply (M1) were quite fluctuative. The smallest decrease in money supply occurred in the first quarter of 1995 with Rp 466 trillion, while the largest decrease occurred in the first quarter of 2001 with Rp 13 811 trillion.*

*In the period of 1990-1996, Indonesia's balance of payments always experiencing a surplus. However, due to the economic crisis, Indonesia's balance of payments experienced a deficit by US \$ 2 459 in 1997.*

*During 1995-2004, the annual inflation were quite fluctuative. The highest inflation occur in 1998 with 77.6 percent, and the lowest inflation occurred in 1999 with 2.0 percent. The high inflation in 1998 is mainly caused by financial crisis that, in turn, become economic crisis. However, since 2001 the inflation rate were keep decreasing and tend to stay below the 10 percent (2 digits).*

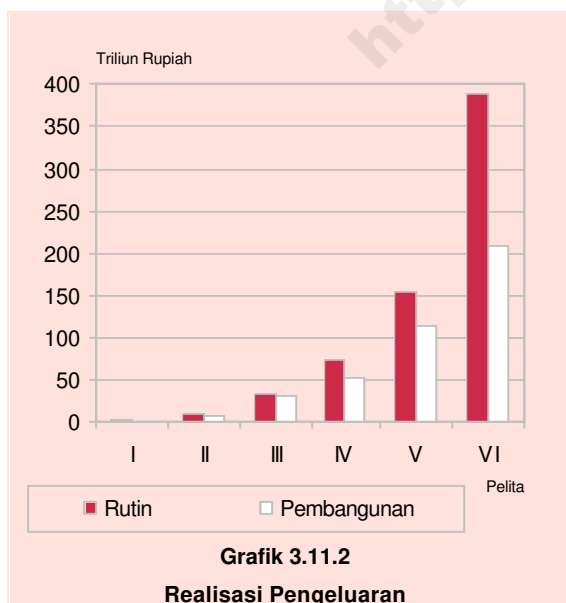
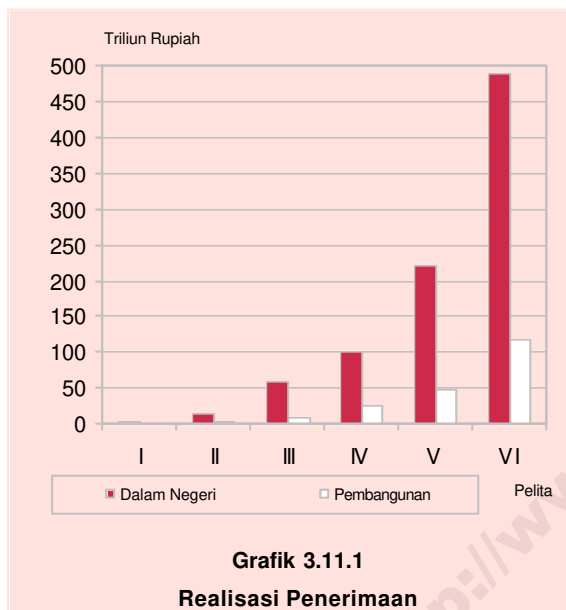
*During 1971-2004, the highest increase in WPI (general) was occur in 1998, when Indonesia faced the economic crisis. At that time, the WPI (general) increased by 105.3 percent, and the source of increase were from export and import commodity groups which increased by 182.8 and 120.8 percent respectively.*

*The Farmer's Terms of Trade (FTT) were quite fluctuated especially during 1997-2004. In Java, the lowest FTT which was below 100 occurred in 1999.*

### 3.11.1 Keuangan

#### a. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Pusat

Total realisasi penerimaan pemerintah pusat selama Pelita VI telah mengalami kenaikan menjadi Rp 604,9 triliun dibanding selama Pelita I sebesar Rp 3,1 triliun. Dari total realisasi penerimaan tersebut, penerimaan yang berasal dari dalam negeri telah mengalami kenaikan menjadi Rp 488,1 triliun dari Rp 2,6 triliun pada periode yang sama.



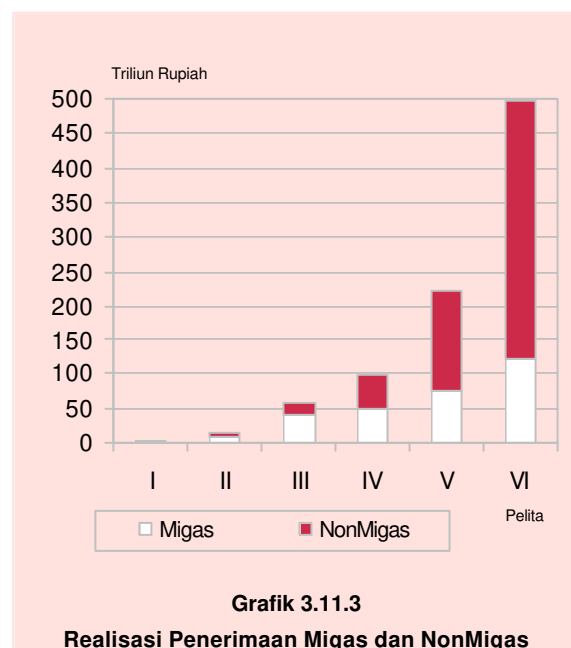
Dari sisi total realisasi pengeluaran pemerintah pusat, selama Pelita VI telah mengalami kenaikan menjadi Rp 599,9 triliun dibanding Rp 3,1 triliun selama Pelita I. Untuk pengeluaran rutin, pada rentang waktu yang sama telah terjadi peningkatan menjadi Rp 389,4 triliun dari Rp 2,0 triliun. Untuk pengeluaran pembangunan sendiri telah mengalami kenaikan menjadi Rp 210,5 triliun dari Rp 1,1 triliun dalam periode yang sama.

Sedangkan penerimaan pembangunan untuk rentang waktu serupa, telah mengalami peningkatan menjadi Rp 116,9 triliun dari Rp 0,6 triliun.

#### b. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri yang Berasal dari Migas dan NonMigas

Penerimaan yang berasal dari migas selama Pelita VI telah mengalami kenaikan menjadi Rp 121,5 triliun dibanding selama Pelita I sebesar Rp 0,8 triliun. Sedangkan untuk nonmigas, pada periode yang sama melonjak menjadi Rp 376,7 triliun dari Rp1,8 triliun.

Peranan penerimaan yang berasal dari nonmigas terhadap total penerimaan dalam negeri mengalami penurunan sejak Pelita I sampai Pelita III, namun sejak



**Tabel 3.11.1**  
**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah**  
**(Miliar Rupiah) <sup>1)</sup>**

Periode	Penerimaan			Pengeluaran		
	Dalam Negeri	Pembangunan	Total	Rutin	Pembangunan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelita I	2 565	555	3 120	1 980	1 081	3 061
Pelita II	14 640	1 674	16 314	8 583	7 479	16 062
Pelita III	57 570	8 003	65 573	33 674	31 754	65 428
Pelita IV	99 401	25 803	125 204	73 405	51 293	124 698
Pelita V	221 255	48 537	269 792	156 404	112 054	268 458
Pelita VI	488 056	116 884	604 940	389 388	210 493	599 881

Catatan : <sup>1)</sup> Angka PAN (Perhitungan Anggaran Negara)  
 Sumber : Departemen Keuangan

Pelita IV terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai posisi tertinggi yaitu 76 persen pada Pelita VI. Sebaliknya, porsi penerimaan yang berasal dari migas terhadap total penerimaan dalam negeri sejak Pelita III sampai Pelita VI terus mengalami penurunan sampai mencapai titik terendah yaitu sebesar 24 persen pada Pelita VI.

### c. Penerimaan Perpajakan

Sejak tahun 2000 pemerintah tidak lagi menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, format dan struktur dalam APBN dirubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Seiring dengan perubahan format dan struktur tersebut, penerimaan dalam negeri tidak lagi terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas (migas) dan penerimaan di luar migas, melainkan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Oleh karena perkembangan penerimaan migas kurang menentu, sejak tahun 1986/1987 penerimaan perpajakan terus diupayakan untuk lebih berperan

karena penerimaan tersebut akan lebih menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Bahkan ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, penerimaan perpajakan sampai batas-batas tertentu masih dapat memberikan peranan dan sumbangan yang sangat berarti dalam mengatasi krisis ekonomi.

Penerimaan dalam negeri sejak tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2004 selalu mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2004 mencapai Rp 407,5 triliun. Sebagian besar penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan, pada tahun 2004 penerimaan pajak sebesar Rp 280,8 triliun atau 68,9 persen dari total penerimaan.

Penerimaan pajak diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan dalam negeri di mana kontribusi terbesarnya berasal dari pajak penghasilan (PPh), dari tahun 1999/2000 sampai tahun 2004 penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 133,3 triliun dibanding tahun 1999/2000 sebesar Rp 72,7 triliun.



**Tabel 3.11.2**  
**Realisasi Penerimaan Dalam Negeri yang**  
**Berasal dari Migas dan NonMigas**  
**(Miliar Rupiah)<sup>1)</sup>**

Periode	Migas		NonMigas		Jumlah	
	Nilai	Persen	Nilai	Persen	Nilai	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelita I	774	30,2	1 792	69,8	2 566	100,0
Pelita II	7 946	54,3	6 694	45,7	14 640	100,0
Pelita III	39 172	40,2	18 397	18,9	97 569	100,0
Pelita IV	49 661	50,0	49 739	50,0	99 400	100,0
Pelita V	74 025	33,5	147 230	66,5	221 255	100,0
Pelita VI	121 542	24,4	376 701	75,6	498 243	100,0

Catatan : <sup>1)</sup> Angka PAN (Perhitungan Anggaran Negara)  
 Sumber : Departemen Keuangan

**Tabel 3.11.3**  
**Realisasi Pendapatan Negara**  
**(Triliun Rupiah)**

Sumber Penerimaan	1999/ 2000 <sup>1)</sup>	2000 <sup>1)</sup>	2001 <sup>1)</sup>	2002 <sup>1)</sup>	2003 <sup>2)</sup>	2004 <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>187,8</b>	<b>205,3</b>	<b>300,6</b>	<b>298,5</b>	<b>340,7</b>	<b>407,5</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>125,9</b>	<b>115,9</b>	<b>185,5</b>	<b>210,1</b>	<b>241,6</b>	<b>280,8</b>
Pajak Dalam Negeri	120,9	108,9	176,0	199,6	230,6	268,1
Pajak Penghasilan	72,7	57,1	94,6	101,9	114,8	133,3
Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	33,1	35,2	55,9	65,2	76,8	87,5
Pajak Bumi & Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	4,1	4,4	6,7	7,8	10,9	14,7
Cukai	10,4	11,3	17,4	23,2	26,4	29,2
Pajak Lainnya	0,6	0,9	1,4	1,5	1,7	3,4
Pajak Perdagangan Internasional	5,0	7,0	9,5	10,5	11	12,7
Bea Masuk	4,2	6,7	9,0	10,3	10,8	12,4
Pajak Ekspor	0,8	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>61,9</b>	<b>89,4</b>	<b>115,1</b>	<b>88,4</b>	<b>99,1</b>	<b>126,7</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	45,5	76,3	85,7	64,8	67,6	92,3
Bagian Laba BUMN	5,4	4,0	8,8	9,8	12,6	9,8
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	11,0	9,1	20,6	13,9	18,9	24,6
<b>Hibah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>187,8</b>	<b>205,3</b>	<b>301,1</b>	<b>298,6</b>	<b>341,1</b>	<b>407,8</b>

Catatan : <sup>1)</sup> Angka PAN (Perhitungan Anggaran Negara)

<sup>2)</sup> Realisasi Januari – 31 Desember Tahun 2000 hanya 9 bulan, dari April s/d Desember 2000

Sumber : Departemen Keuangan

**d. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

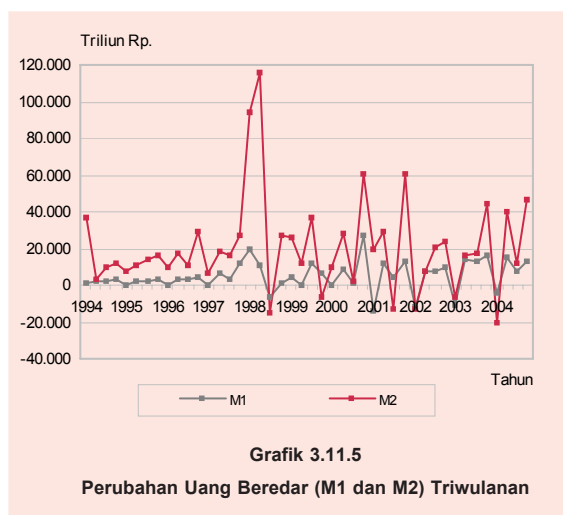
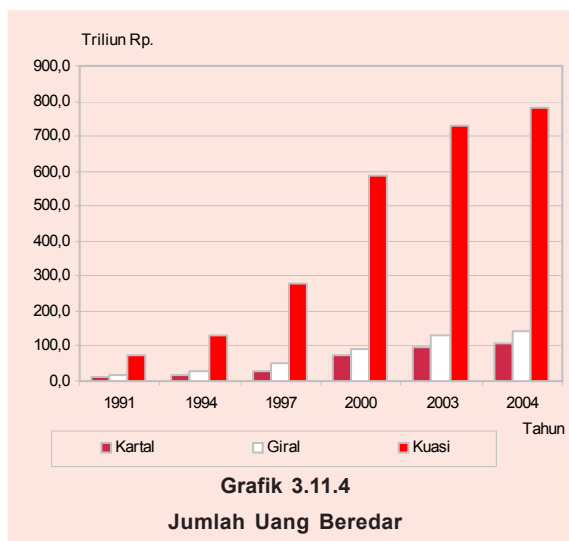
Penerimaan negara bukan pajak bersumber dari penerimaan sumber daya alam (SDA) di mana komponen utamanya adalah penerimaan minyak dan gas alam (migas), selain migas penerimaan SDA kehutanan dan pertambangan umum diharapkan peningkatan penerimaannya semakin baik. Dari tahun 1999/2000 sampai tahun 2004 penerimaan SDA mengalami peningkatan dari Rp 45,5 triliun di tahun 1999/2000 menjadi Rp 92,3 triliun pada tahun 2004.

Penerimaan negara bukan pajak adalah bagian laba BUMN, penerimaan dari sumber ini kurang diharapkan. Dari tahun ke tahun tidak ada pelonjakan yang berarti, pada tahun 2004 penerimaan dari bagian laba BUMN hanya Rp 9,8 triliun lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,6 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak lainnya bersumber dari berbagai pungutan atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pada tahun 2004 penerimaan dari PNBP lainnya mencapai Rp 24,6 triliun lebih besar dari penerimaan bagian laba BUMN.

**e. Jumlah Uang Beredar**

Uang beredar dalam arti sempit (M1) yang terdiri atas uang kartal dan uang giral mengalami pertumbuhan per tahun yang cukup tajam sebesar 28,7 persen pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun



yaitu 23,2 persen pada tahun 1994, kemudian 15,5 persen pada tahun 1995. Pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) tumbuh cukup tinggi pada tahun 2000 yang mencapai 30,1 persen, akan tetapi pada tahun berikutnya terjadi penurunan yang drastis sebesar 9,6 persen pada tahun 2001 dan hanya 8 persen pada tahun 2002. Perkembangan yang berbeda tampak pada laju pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang terdiri dari M1 ditambah uang kuasi. Sepanjang tahun

**Tabel 3.11.4**  
Jumlah Uang Beredar  
(miliar rupiah)

Tahun	Uang kartal	Uang giral	Uang kuasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	9 093,0	14 725,0	60 811,0	84 630,0
1991	9 346,0	16 966,0	72 717,0	99 059,0
1992	11 478,0	17 301,0	90 274,0	119 053,0
1993	14 431,0	22 605,0	108 563,0	145 599,0
1994	18 637,0	26 985,0	128 697,0	174 319,0
1995	20 807,0	31 870,0	169 961,0	222 638,0
1996	22 487,0	41 602,0	224 543,0	288 632,0
1997	28 424,0	49 919,0	277 300,0	355 643,0
1998	41 394,0	59 803,0	476 184,0	577 381,0
1999	58 353,0	66 280,0	521 572,0	646 205,0
2000	72 371,0	89 815,0	584 842,0	747 028,0
2001	76 342,0	101 389,0	666 322,0	844 053,0
2002	80 686,0	111 253,0	691 969,0	883 908,0
2003	94 542,0	129 253,0	731 893,0	955 692,0
2004	109 265,0	144 553,0	779 709,0	1 033 527,0

**Tabel 3.11.5**  
**Perubahan Uang Beredar (M1 dan M2)**  
**Triwulanan, (Triliun Rupiah)**

Tahun	Triwulan	M1	M2
(1)	(2)	(3)	(4)
1994	I	1 416	37 121
	II	1 654	3 500
	III	2 302	9 963
	IV	3 214	11 545
1995	I	- 466	7 189
	II	2 137	10 425
	III	1 936	13 953
	IV	3 696	16 559
1996	I	485	9 855
	II	3 286	16 950
	III	3 236	10 483
	IV	4 405	28 706
1997	I	- 524	5 949
	II	6 385	18 258
	III	3 692	16 235
	IV	12 085	26 569
1998	I	19 927	94 181
	II	11 210	115 961
	III	-6 917	-15 381
	IV	1 366	26 977
1999	I	4 508	25 944
	II	259	12 086
	III	12 160	36 878
	IV	6 509	-6 084
2000	I	30	10 246
	II	9 169	27 884
	III	1 598	2 118
	IV	26 756	60 575
2001	I	-13 811	19 784
	II	11 767	29 628
	III	4 095	-13 336
	IV	13 494	60 949
2002	I	-11 558	-12 642
	II	7 844	7 224
	III	7 774	21 071
	IV	10 148	24 202
2003	I	-10 700	-6 132
	II	13 639	16 437
	III	12 709	17 011
	IV	16 212	44 468
2004	I	-4 713	-20 445
	II	14 640	39 919
	III	7 185	11 640
	IV	12 907	46 721

Sumber : Bank Indonesia

Catatan : M1 : Uang kartal dan uang giral  
M2 : M1 ditambah uang kuasi

1991 sampai dengan 2004, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu 62,3 persen, dan laju pertumbuhan terendah sebesar 4,7 persen terjadi pada tahun 2002.

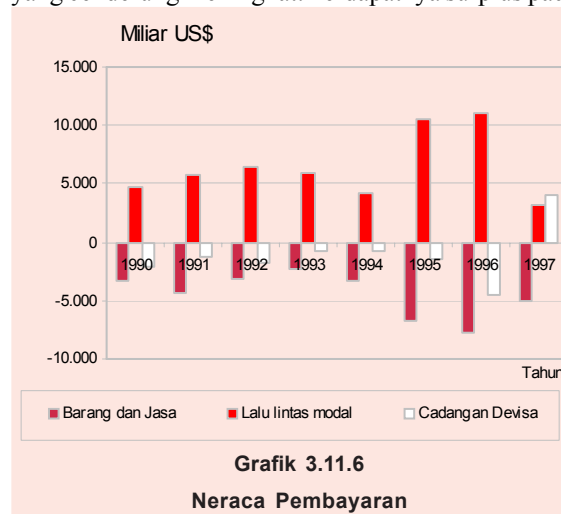
Jumlah uang beredar (M1 yang terdiri atas uang kartal dan uang giral) selama periode 1994-2004 triwulanan terjadi tujuh kali penurunan yaitu Rp 466 triliun pada triwulan I 1995 yang merupakan penurunan terendah sepanjang periode tersebut, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada triwulan I 2001 sebesar Rp 13.811 triliun. Sebaliknya pada periode 1994-2004 terjadi penambahan uang beredar yang cukup berarti pada Triwulan I 1988, Triwulan IV 2000, dan Triwulan IV 2003 yang besarnya berturut-turut Rp 19.927 triliun, Rp 23.756 triliun, dan Rp 16.212 triliun.

Hal yang sama terjadi pada uang beredar dalam arti luas (M2) mengalami penurunan sebanyak enam kali selama periode 1994-2004. Penurunan terendah terjadi pada triwulan IV 1999 sebesar Rp 6.084 triliun dan tertinggi pada triwulan I 2004 sebesar Rp 20.445 triliun, sedangkan dalam hal penambahan M2 yang terendah terjadi pada triwulan III 2000 sebesar Rp 2.118 triliun dan penambahan tertinggi terjadi pada triwulan II 1998 sebesar Rp 115.961 triliun.

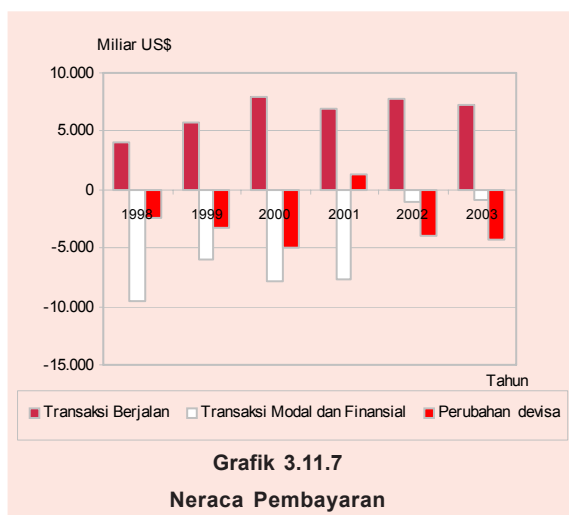
#### f. Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia dalam periode 1990-1996 selalu mengalami surplus. Hal ini disebabkan terjadinya surplus pada transaksi barang-barang dan lalu-lintas modal.

Sementara transaksi jasa-jasa mengalami defisit yang cenderung meningkat. Terdapatnya surplus pada







neraca pembayaran menyebabkan bertambahnya cadangan devisa pada tahun 1996 tercatat sebesar US\$ 4.451 juta .

Sejak tahun 1997 dengan adanya krisis ekonomi neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 2.459 juta . Keadaan perekonomian Indonesia mulai membaik pada tahun 1999 yang tampak pada neraca pembayaran yang mengalami defisit hanya US\$ 161 juta , dan semakin membaik pada tahun 2000 dengan surplus sebesar US\$ 96 juta dan meningkat cukup tajam surplus tersebut sebesar US\$ 6.720 juta pada tahun 2002.

**g. Suku Bunga Deposito**

Suku bunga deposito pada bank persero sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 melonjak cukup tinggi terutama untuk deposito 3 bulan sebesar 20,7 persen per tahun. Pada tahun 1998 suku bunga deposito 1 bulan merupakan suku bunga yang tertinggi mencapai 51,8 persen per tahun diikuti dengan suku bunga deposito 3 bulan sebesar 39,4 persen per tahun.

Pada tahun 1999, suku bunga deposito bank persero sudah mulai menurun, hal ini ditunjukkan pada suku bunga 24 bulan yang tercatat sebesar 17,3 persen per tahun. Suku bunga tersebut terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2000 di mana suku bunga deposito 12 bulan tercatat 14,6 persen per tahun.

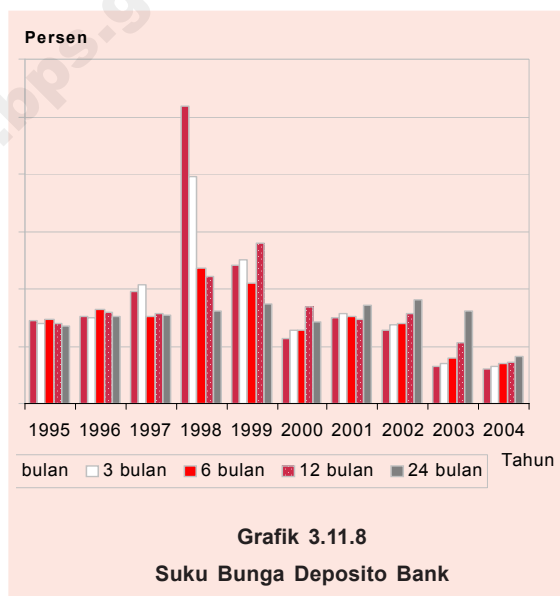
**Tabel 3.11.6**  
**Suku Bunga Deposito Pada Bank Persero <sup>1)</sup>**  
**(persen per tahun)**

Tahun	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	24 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1995	14,4	13,9	14,8	13,9	13,5
1996	15,2	14,9	16,3	16,0	15,2
1997	19,4	20,7	15,3	15,6	15,4
1998	51,8	39,4	23,5	22,2	16,1
1999	24,1	25,0	20,9	27,9	17,3
2000	11,4	12,7	12,8	16,9	14,3
2001	14,9	15,7	15,1	14,6	17,0
2002	12,8	13,7	13,9	15,7	18,1
2003	6,6	7,1	8,0	10,6	16,1
2004	6,1	6,5	7,0	7,2	8,1

Sumber : Bank Indonesia

Catatan : <sup>1)</sup> Rata-rata tertimbang

<sup>2)</sup> Mulai ditetapkan oleh Bank Penyelenggara



Pada Tabel 3.11.7 menunjukkan variasi suku bunga deposito berjangka 3 bulan menurut kelompok bank. Terlihat bahwa suku bunga deposito pada bank persero selalu bergantian dengan bank swasta nasional selalu lebih tinggi daripada kelompok bank lainnya selama tahun 1995-2004. Suku bunga deposito 3 bulan yang tertinggi pada periode 1995-2004 terjadi pada bank swasta nasional tahun 1998 sebesar 41,6 persen per tahun.

**Tabel 3.11.7**  
**Suku Bunga Deposito Berjangka 3 Bulan<sup>1)</sup>**

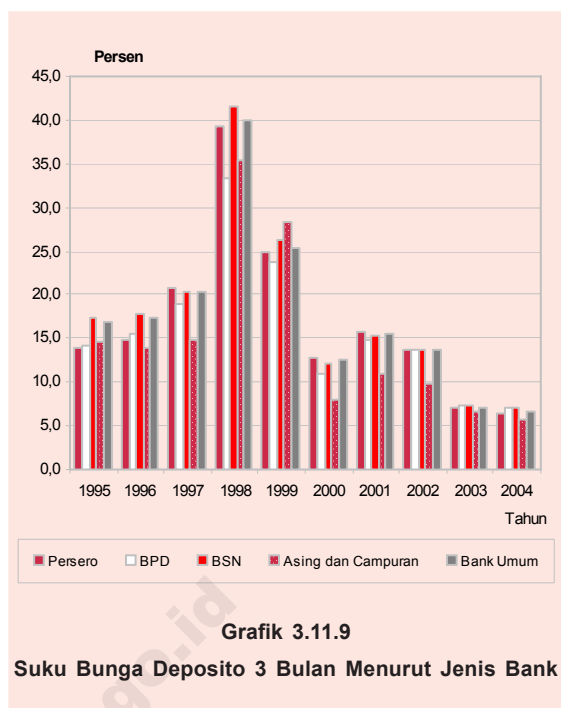
Tahun	Bank Persero	Bank Pemerintah Daerah	Bank Swasta Nasional	Bank Asing dan Campuran	Bank Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1995	13,9	14,2	17,4	14,7	16,8
1996	14,9	15,6	17,8	14,0	17,3
1997	20,7	19,0	20,3	14,9	20,3
1998	39,4	33,4	41,6	35,4	40,0
1999	25,0	23,7	26,2	28,3	25,3
2000	12,7	11,0	12,2	8,1	12,5
2001	15,7	14,8	15,3	10,9	15,5
2002	13,7	13,6	13,8	9,9	13,6
2003	7,1	7,3	7,2	6,7	7,1
2004	6,5	7,1	7,0	5,8	6,7

Sumber : Bank Indonesia

Catatan : <sup>1)</sup> Rata-rata tertimbang

<sup>2)</sup> Suku bunga deposito berjangka hanya diselenggarakan bank-bank pemerintah

<sup>3)</sup> Mulai ditetapkan oleh Bank Penyelenggara



**Tabel 3.11.8**  
**Neraca Pembayaran (juta US\$)**

Tahun	Barang-barang		Jasa-Jasa (Netto)	Lalu lintas modal		Jumlah kol(2) s/d kol(6)	Cadangan Devisa Resmi <sup>1)</sup>	Selisih Perhitungan
	Ekspor	Impor		Pemerintah	Swasta			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1990	26 807	-21 455	-8 592	633	4 113	1 506	-2 099	593
1991	29 635	-24 834	-9 193	1 419	4 410	1 437	-1 207	-230
1992	33 796	-26 774	-10 144	1 112	5 359	3 349	-1 743	-1 606
1993	36 607	-28 376	-10 529	743	5 219	3 664	-741	-2 923
1994	39 497	-31 654	-11 107	717	3 478	931	-806	-125
1995	47 454	-40 921	-13 293	336	10 253	3 829	-1 516	-2 313
1996	50 188	-44 240	-13 749	-522	11 511	3 188	-4 451	1 264
1997	56 297	-46 223	-15 075	2 880	338	-2 459	4 110	-1 651

Sumber : Bank Indonesia

Catatan : <sup>1)</sup> Negatif berarti bertambah dan positif berarti berkurang

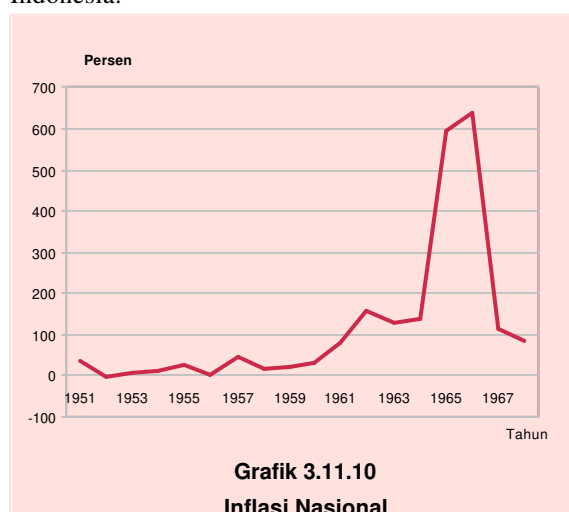
**Tabel 3.11.9**  
**Neraca Pembayaran, (juta US\$)**

Tahun	Transaksi Berjalan				Transaksi Modal dan Finansial					Jumlah investasi	Selisih Perhitungan	Neraca Keseluruhan	Perubahan cadangan devisa <sup>3)</sup>
	Barang Bersih	Jasa-jasa Bersih	Pendapatan Bersih	Transfer Berjalan Bersih	Transaksi Modal	Transaksi Finansial							
						Investasi Langsung	Investasi portofolio	Investasi lainnya <sup>2)</sup>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1998	18 428	-7 101	-8 189	959	-	-241	-1 878	-7 518	-5 540	2 122	-3 418	-2 344	
1999	20 642	-6 973	-8 997	1 109	-	-1 865	-1 792	-2 287	-161	2 080	1 919	-3 294	
2000	25 042	-9 797	-8 443	1 190	-	-4 550	-1 911	-1 435	96	3 822	3 918	-5 042	
2001	22 696	-9 906	-6 936	1 046	-	-2 997	-244	-4 396	-716	714	-3	1 378	
2002	23 513	-9 902	-7 048	1 259	-	145	1 222	-2 469	6 720	-1 691	5 029	-4 023	
2003	23 708	-11 728	-6 217	1 489	-	-597	2 251	-2 604	6 302	-2 648	3 654	-4 257	

### 3.11.2. Harga Konsumen

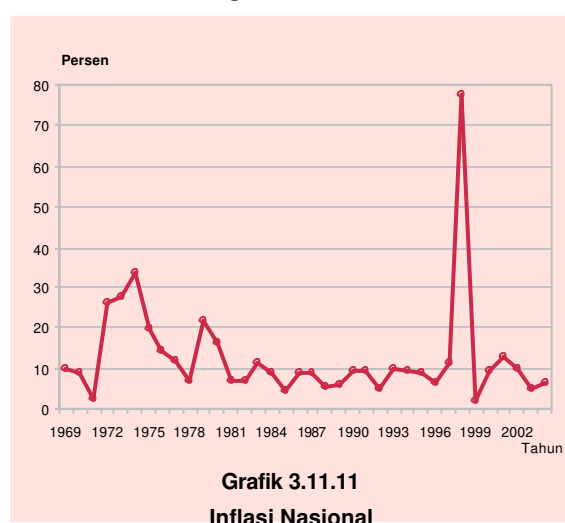
#### a. Perkembangan Inflasi Di Indonesia

Perkembangan inflasi selama tahun 1995-2004, menunjukkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 77,6 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu 2,0 persen. Tingginya inflasi tahun 1998 disebabkan oleh adanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia.



Fundamental ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk saat itu menyebabkan pemerintah tidak mampu mengendalikan harga-harga barang dan jasa yang di konsumsi masyarakat.

Pemerintahan Orde Baru beranggapan bahwa pembangunan ekonomi dimungkinkan apabila stabilitas ekonomi telah dicapai. Oleh karena itu sejak pertengahan tahun 1968, segala potensi dan usaha dikonsentrasikan kepada stabilisasi dan rehabilitasi





ekonomi. Salah satu usaha yang ditempuh adalah pengendalian harga kebutuhan masyarakat banyak. Usaha ini membuahkan hasil yang spektakuler, inflasi turun drastis menjadi hanya 9,9 persen di awal Pelita I, yaitu pada tahun 1969. Sejak tahun 1969 pada umumnya perkembangan harga-harga cukup terkendali hingga tahun 1994. Selama 26 tahun, hanya 9 tahun terjadi inflasi yang lebih dari 10 persen (2 digit) yaitu di tahun 1972 s.d. 1977, tahun 1979, 1980, dan 1983. Inflasi terendah terjadi pada tahun 1971 yaitu 2,5 persen. Pada periode tahun 1984-1994 perkembangan harga-harga sangat terkendali dengan tingkat inflasi 1 digit (di bawah 10 persen). Inflasi terendah dalam periode ini dicapai pada tahun 1985 sebesar 4,3 persen dan tahun 1992 sebesar 4,9 persen.

Selama periode 1951-1957 besarnya inflasi nasional sangat bervariasi, dimulai tahun 1951 sebesar 34,9 persen, kemudian terjadi deflasi di tahun berikutnya sebesar 1,7 persen. Inflasi nasional terbesar selama periode ini dialami tahun 1957 yakni mencapai 42,2 persen, padahal pada tahun 1956 tidak mengalami inflasi atau deflasi dengan kata lain stabil (nol persen). Sedang inflasi tahun 1953 relatif kecil yaitu sebesar 5,3 persen. Selanjutnya sejak tahun 1958 hingga 1968, perekonomian Indonesia makin memburuk, walaupun inflasi pada tahun 1958 adalah 17,8 persen, jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, tetapi kemudian pada tahun berikutnya secara berturut-turut inflasi semakin tinggi.

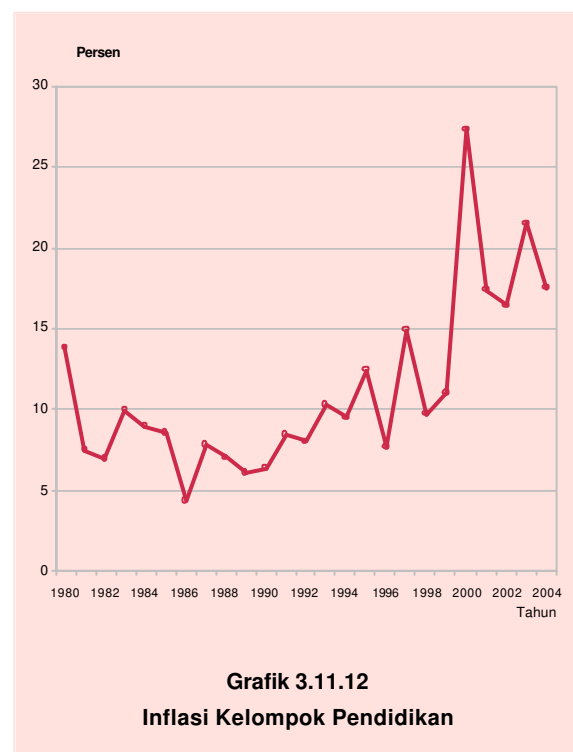
Pada tahun 1959, inflasi 19,4 persen, tahun 1960 naik menjadi 29,5 persen, tahun 1961 melonjak menjadi 76,7 persen. Kemudian pada tahun 1962, 1963, dan 1964 inflasi melonjak lagi menjadi 3 digit yaitu masing-masing 154,4 persen, 128,1 persen, dan 135,1 persen. Perkembangan harga-harga pada waktu itu masih terus berlanjut hingga tahun 1965. Kenaikan harga-harga kelompok makanan, perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa melonjak drastis. Pada tahun 1965 inflasi kelompok makanan mencapai 685,4 persen, kelompok perumahan 567,3 persen, sandang 322,6 persen, dan aneka barang dan jasa 500,3 persen.

Selanjutnya pada tahun 1966 inflasi kelompok makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa semakin tinggi yaitu masing-masing 500,2 persen, 866,3 persen, 854,8 persen, dan 1.128,1 persen. Akibat terjadinya kenaikan harga-harga secara menyeluruh dan sangat tinggi pada tahun 1965 dan 1966 terjadi *hyper* inflasi sebesar 594,4 persen dan 635,4 persen. Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 mulai menurun menjadi 112,2 persen dan 85,1 persen.

#### b. Perkembangan Kelompok Pendidikan

Sebelum IHK 1996=100 sub kelompok pendidikan tergabung dalam kelompok aneka barang dan jasa. Namun demikian setelah penghitungan IHK 1996=100 sub kelompok pendidikan tergabung dalam kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Selama tahun 1980-1990 inflasi sub kelompok pendidikan tertinggi pada tahun 1980 yaitu 13,8 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 1986 yaitu 4,4 persen. Kemudian selama tahun 1991-2004 inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu 27,4 persen dan terendah tahun 1996 yaitu 7,6 persen.



### c. Perkembangan Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan mempunyai peranan yang penting dalam penghitungan inflasi. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah menghasilkan berbagai produk kesehatan yang banyak dikonsumsi/dibeli masyarakat. Sehingga perkembangan harga produk kesehatan sangat mempengaruhi pembentukan inflasi. Seperti halnya kelompok pendidikan, sebelum IHK 1996=100 sub kelompok kesehatan tergabung dalam kelompok aneka barang dan jasa. Namun

demikian setelah penghitungan IHK 1996=100 kelompok kesehatan menjadi kelompok yang terdiri dari sub kelompok jasa kesehatan dan obat-obatan, dan sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetik.

Selama tahun 1980-1990 inflasi kelompok kesehatan tertinggi pada tahun 1980 yaitu 14,6 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 1988 yaitu 2,4 persen. Kemudian selama tahun 1991-2004 inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu 86,1 persen dan terendah tahun 1992 yaitu 3,0 persen.

**Tabel 3.11.10**  
**Perkembangan Inflasi Nasional**

Tahun	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga		Transportasi dan Komunikasi	Umum
						Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	Pendidikan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1998	118,4	94,3	47,5	98,7	86,1	38,0	9,7	55,6	77,6
1999	-5,3	3,6	5,2	6,5	3,9	5,3	11,0	5,2	2,0
2000	4,0	11,1	10,1	10,2	9,6	17,5	27,4	12,7	9,4
2001	12,0	14,5	13,6	8,1	8,9	11,9	17,4	14,2	12,6
2002	9,1	9,2	12,7	2,7	5,6	10,9	16,5	15,5	10,0
2003	-1,7	6,2	9,2	7,1	5,7	11,7	21,5	4,1	5,1
2004	6,4	4,9	7,4	4,9	4,8	10,3	17,5	5,8	6,4

**Tabel 3.11.11**  
**Perkembangan Inflasi Nasional**

Tahun	Makanan	Perumahan	Sandang	Aneka barang dan Jasa			Umum
				Aneka barang dan jasa	Kesehatan	Pendidikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1951	80,0	11,5	-15,6	7,3	ts	ts	34,9
1952	-9,3	0,0	1,3	13,6	ts	ts	-1,7
1953	6,1	2,9	9,1	7,5	ts	ts	5,3
1954	11,5	5,7	34,5	-1,4	ts	ts	11,7
1955	31,0	-1,4	28,3	16,9	ts	ts	23,9
1956	2,6	2,7	-6,2	1,2	ts	ts	0,0
1957	61,5	13,3	11,0	14,3	ts	ts	42,2
1958	10,3	35,3	23,8	35,4	ts	ts	17,8
1959	4,3	18,3	95,7	24,6	ts	ts	19,4
1960	22,8	20,6	56,6	28,4	ts	ts	29,5
1961	123,0	90,2	-0,9	30,8	ts	ts	76,7
1962	129,0	112,8	268,0	219,8	ts	ts	154,4
1963	154,6	59,2	73,6	123,1	ts	ts	128,1
1964	127,8	143,6	163,8	138,0	ts	ts	135,1
1965	685,4	567,3	322,6	500,3	ts	ts	594,4
1966	500,2	866,3	854,8	1128,1	ts	ts	635,4
1967	146,2	148,9	38,7	51,0	ts	ts	112,2
1968	64,7	69,6	157,7	144,6	ts	ts	85,1
1969	8,5	12,3	1,6	17,5	ts	ts	9,9
1970	1,3	48,7	18,6	11,8	ts	ts	8,9
1971	2,2	1,0	2,6	3,6	ts	ts	2,5
1972	44,6	1,5	-0,3	3,6	ts	ts	25,8
1973	28,4	14,9	31,9	26,8	ts	ts	27,3
1974	32,2	22,8	33,2	41,3	ts	ts	33,3
1975	23,4	32,4	9,3	8,3	ts	ts	19,7
1976	13,2	23,5	11,7	15,3	ts	ts	14,2
1977	12,4	13,1	7,3	11,1	ts	ts	11,8
1978	4,4	2,8	8,5	15,8	ts	ts	6,7
1979	22,4	17,0	29,7	18,4	ts	ts	21,8
1980	16,3	18,3	12,7	14,6	14,6	13,8	16,0
1981	8,0	7,7	3,8	5,9	4,1	7,4	7,1
1982	7,3	14,3	3,4	11,8	11,4	6,9	6,7
1983	10,0	12,9	4,3	16,3	10,5	9,9	11,5
1984	6,3	12,8	3,0	10,8	7,6	8,9	8,8
1985	2,1	7,0	3,3	5,2	5,4	8,5	4,3
1986	13,6	4,6	9,5	5,8	9,3	4,4	8,8
1987	11,7	6,0	7,7	8,1	5,6	7,8	8,9
1988	7,8	4,3	3,5	3,1	2,4	7,0	5,5
1989	6,7	6,1	4,7	4,6	5,7	6,1	6,0
1990	7,0	12,4	4,8	11,6	9,2	6,4	9,5
1991	9,7	7,7	5,2	13,2	5,4	8,4	9,5
1992	6,0	4,6	7,2	3,4	3,0	8,0	4,9
1993	5,1	15,5	8,0	9,9	13,8	10,3	9,8
1994	13,9	9,1	6,1	4,9	13,5	9,5	9,2
1995	13,3	5,7	6,5	7,0	7,8	12,4	8,6
1996	6,1	4,7	5,8	9,7	11,0	7,6	6,5
1997	18,5	6,1	7,7	8,1	13,4	14,8	11,1

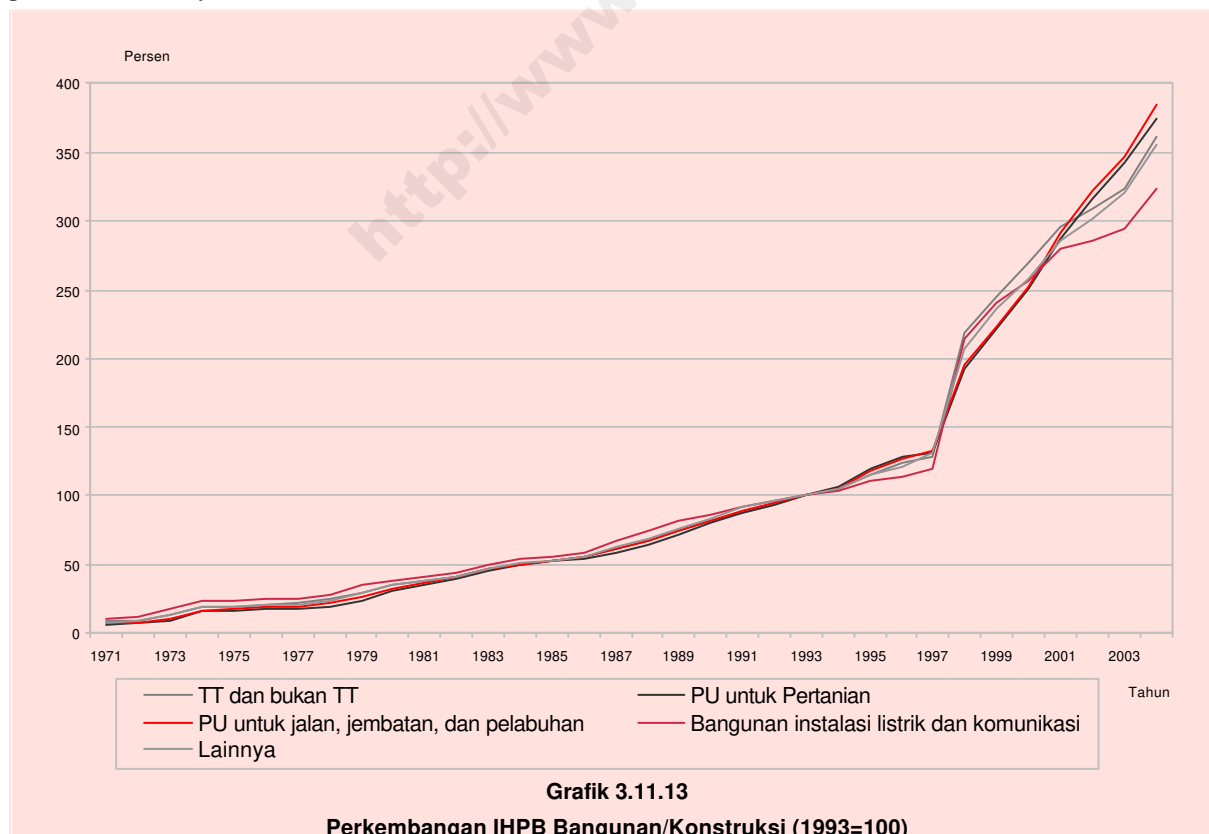


### 3.11.3 Harga Perdagangan Besar

#### a. Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum selama periode tahun 1971-2004 cenderung mengalami kenaikan yang cukup berarti, kecuali pada tahun 1986 mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka IHPB pada periode tersebut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,6 persen setiap tahunnya. Sejak tahun 1972 IHPB sudah mulai mengalami kenaikan meningkat dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1971, kemudian terus meningkat pada tahun 1978 dan selanjutnya meningkat drastis pada tahun 1979. Puncak kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi moneter terjadi yang mencapai kenaikan sebesar 105,3 persen. Setelah krisis ekonomi pada periode 1998-2004, IHPB masih terus cenderung menunjukkan kenaikan yang relatif tinggi, namun pada tahun 2002-2004 kenaikan IHPB cenderung melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

IHPB menurut kelompok komoditas selama periode tahun 1971-2004 secara umum cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 1986 kelompok komoditas yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, dan impor selalu mengalami kenaikan kecuali indeks kelompok ekspor mengalami penurunan pada tahun 1975 dan 1986 masing-masing sebesar 1,8 persen dan 24,7 persen. Kelompok komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi selama periode 1986-2004 terutama pada saat krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998 adalah kelompok komoditas ekspor dan impor yang masing-masing mencapai angka 182,8 persen dan 120,8 persen. Kenaikan indeks seluruh kelompok komoditas IHPB ini pada periode 2002-2004 cenderung menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, bahkan pada tahun 2002 indeks kelompok ekspor dan impor mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,6 persen dan 3,0 persen, yang diikuti oleh penurunan indeks kelompok pertanian pada tahun 2003 sebesar 0,1 persen.



**Tabel 3.11.12**  
**Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia Menurut**  
**Kelompok Komoditas, (1993=100)**

Tahun	Sektor					Umum
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri	Impor	Ekspor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1971	4,1	8,2	7,5	9,4	3,4	5,6
1972	4,8	9,3	8,3	10,3	4,0	6,3
1973	6,5	10,3	11,6	13,1	6,0	8,8
1974	8,9	13,5	14,3	17,2	12,6	13,0
1975	10,4	15,6	15,2	18,7	12,4	13,8
1976	12,9	17,7	17,5	19,4	12,8	15,2
1977	15,1	20,2	19,5	20,3	14,4	16,8
1978	17,0	20,7	21,2	21,9	15,8	18,4
1979	22,3	23,9	27,0	29,0	30,5	26,9
1980	29,4	29,8	29,5	33,3	46,6	35,0
1981	31,6	36,3	35,6	35,9	51,4	38,9
1982	35,1	42,5	39,0	37,7	53,4	41,1
1983	39,8	45,9	46,0	47,3	63,7	49,0
1984	45,0	50,0	49,8	53,6	71,4	54,6
1985	47,0	53,8	52,8	56,5	72,1	56,9
1986	51,1	57,1	56,8	61,0	54,3	56,8
1987	57,8	60,7	74,9	74,8	75,4	69,3
1988	64,9	65,5	71,8	77,3	75,0	73,1
1989	70,3	71,7	76,2	84,4	83,2	79,3
1990	78,0	77,4	80,9	90,5	101,3	87,3
1991	82,2	86,0	89,1	95,0	97,8	91,7
1992	89,5	92,4	94,7	98,2	101,2	96,4
1993	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1994	118,6	108,8	106,4	101,7	100,1	105,4
1995	141,3	121,8	117,7	108,8	113,3	117,4
1996	159,0	135,7	122,0	114,7	129,3	126,6
1997	170,3	141,4	132,0	129,4	147,5	140,4
1998	298,5	173,1	216,7	285,6	417,2	288,3
1999	410,0	213,6	268,1	288,9	365,7	313,6
2000	459,2	236,2	278,0	316,4	461,5	352,8
2001	567,3	274,6	308,6	355,6	520,8	402,8
2002	614,3	307,4	338,8	345,0	497,0	414,0
2003	613,8	328,5	353,8	346,4	505,4	422,5
2004	634,2	344,5	368,8	380,2	591,2	458,7
2005 <sup>1</sup>	663,6	369,4	397,2	417,1	691,8	505,6

<sup>1)</sup> Rata-rata indeks dari bulan Januari - Mei 2005

**Tabel 3.11.13**  
**Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/Konstruksi Menurut Jenis**  
**Konstruksi/Bangunan, (1993=100)**

Tahun	Jenis bangunan					Umum
	Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal	Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian	Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan	Bangunan instalasi listrik dan komunikasi	Bangunan lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1971	8,2	6,1	7,3	9,6	7,7	8,2
1972	9,0	6,7	8,0	11,0	8,5	9,0
1973	13,0	8,9	10,2	17,0	12,5	12,8
1974	18,9	15,4	16,2	23,5	18,5	19,0
1975	19,5	16,3	17,4	23,8	18,8	19,5
1976	20,7	16,8	18,1	24,4	19,6	20,5
1977	22,3	17,7	19,4	25,3	20,9	21,9
1978	24,1	19,4	21,4	27,8	23,2	23,9
1979	29,3	23,7	26,2	34,1	28,9	29,4
1980	34,3	31,0	31,8	38,4	34,1	34,6
1981	37,4	34,5	36,5	40,9	37,6	37,8
1982	41,0	38,5	40,8	43,6	41,2	41,4
1983	46,4	44,9	45,7	50,0	46,7	47,0
1984	49,9	49,0	49,2	53,7	50,2	50,5
1985	52,2	51,7	52,2	55,6	52,7	53,0
1986	55,0	54,1	55,0	58,5	55,7	55,8
1987	60,8	58,3	60,4	67,2	62,2	61,9
1988	66,7	63,8	67,3	74,1	68,6	68,1
1989	74,1	71,4	74,4	80,6	75,6	75,4
1990	80,7	79,8	81,1	85,6	82,4	82,0
1991	87,5	87,5	88,8	91,7	90,6	89,2
1992	92,1	92,5	93,7	95,7	95,1	93,8
1993	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1994	104,8	105,7	104,9	103,2	103,7	105,1
1995	115,2	118,3	117,2	109,5	113,8	115,4
1996	123,0	128,1	125,7	113,0	120,5	122,8
1997	127,6	130,6	131,6	118,4	130,7	128,4
1998	218,6	192,7	195,6	215,0	207,5	211,1
1999	245,4	221,7	223,2	240,0	235,7	238,6
2000	268,9	250,5	251,9	255,8	257,5	262,7
2001	296,0	286,4	291,0	279,1	285,2	292,7
2002	309,1	316,6	321,8	285,0	302,0	310,5
2003	323,6	341,5	346,5	293,7	319,8	327,7
2004	361,1	373,7	383,8	323,2	355,6	364,3
2005 <sup>1</sup>	412,5	423,1	436,1	368,2	404,8	415,2

<sup>1)</sup> Rata-rata indeks dari bulan Januari - Mei 2005



Pada tahun 2004, kelompok komoditas pertanian menunjukkan indeks yang tertinggi yaitu sebesar 634,2, sedangkan indeks terendah terjadi pada kelompok komoditas pertambangan dan penggalian. Pada tahun yang sama, indeks kelompok ekspor mengalami kenaikan tertinggi sebesar 17,0 persen yang diikuti oleh indeks kelompok impor yang mencapai angka 9,8 persen.

#### **b. Perkembangan IHPB Bahan Bangunan/ Konstruksi**

IHPB Umum Bahan Bangunan/Konstruksi selama periode tahun 1971-2004 selalu menunjukkan kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,8 persen setiap tahun. Kenaikan indeks IHPB umum bahan bangunan/konstruksi tertinggi terjadi pada tahun 1974 dan ketika krisis ekonomi terjadi pada 1998 yang masing-masing sebesar 47,7 persen dan 64,5 persen. Setelah krisis ekonomi sampai tahun 2004, IHPB bahan bangunan/konstruksi umum terus mengalami kenaikan namun cenderung melambat kenaikannya terutama pada tahun 2002 - 2003.

IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi dari lima kelompok jenis bangunan selama periode 1971-2004

cenderung menunjukkan kenaikan setiap tahun kecuali indeks kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal pada tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 12,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada periode tahun 1971-1983 indeks seluruh kelompok jenis bangunan mengalami kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1974 pada kelompok bangunan pekerjaan umum untuk pertanian yang mencapai angka 73,4 persen. Kemudian pada periode 1984-2004, kenaikan indeks tertinggi terjadi pada tahun 1998 di mana krisis ekonomi terjadi, adalah pada kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal yang mencapai kenaikan sebesar 120,7 persen yang diikuti oleh kelompok bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi yang mencapai angka 81,6 persen.

Pada tahun 2004, Indeks kelompok bangunan yang tertinggi adalah indeks kelompok Pekerjaan Umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan yang mencapai angka 383,8, dan indeks kelompok yang terendah terjadi pada kelompok jenis Bangunan Instalasi Listrik dan komunikasi yaitu sebesar 323,2.

### 13.11.4. Harga Petani dan Konsumen Pedesaan

#### a. Perkembangan NTP Secara Umum

Selama periode 1987 – 2004, Nilai Tukar Petani (NTP) di empat belas provinsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berfluktuasi terutama dalam periode 1997 - 2004. Secara umum, angka NTP di 14 provinsi sampai keadaan tahun 1993 berkisar pada angka 100 yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan relatif, atau daya beli masyarakat petani selama periode tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan tahun dasar 1993. Angka NTP di bawah 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan relatif petani yang menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun dasar. Kondisi tersebut juga berarti bahwa petani belum dapat menikmati hasil tanaman pertanian yang diusahakan karena kenaikan rata-rata harga tanaman pertanian di pasaran lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan rata-rata harga barang-barang konsumsi rumah tangga maupun untuk porses produksi pertanian.

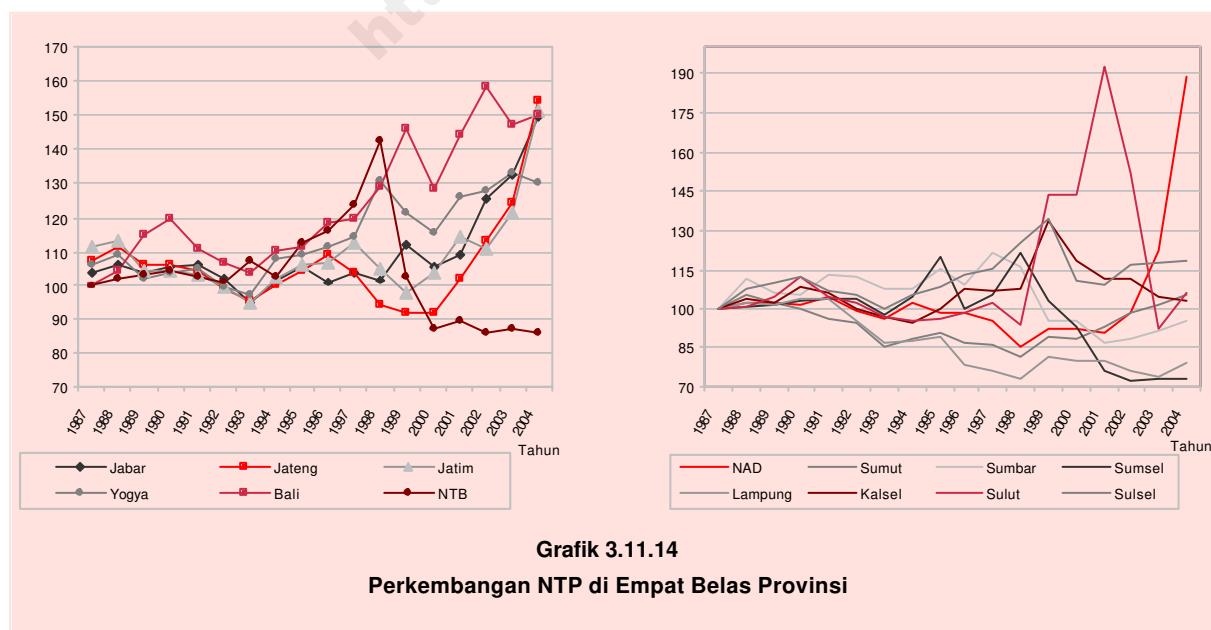
Kecuali provinsi-provinsi di Sumatera, pada tahun 1988-1989, bersamaan terjadi krisis ekonomi di Indonesia, angka tingkat kesejahteraan relatif petani

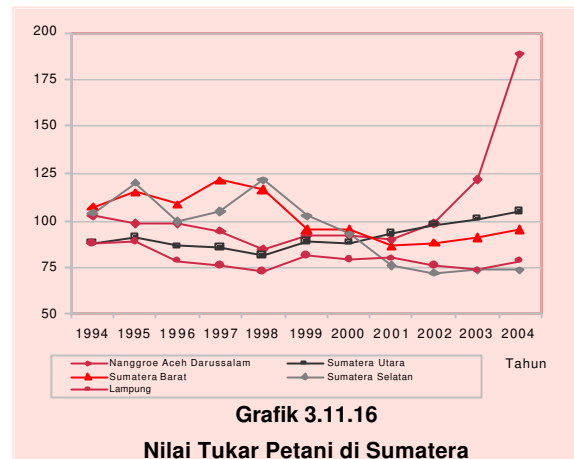
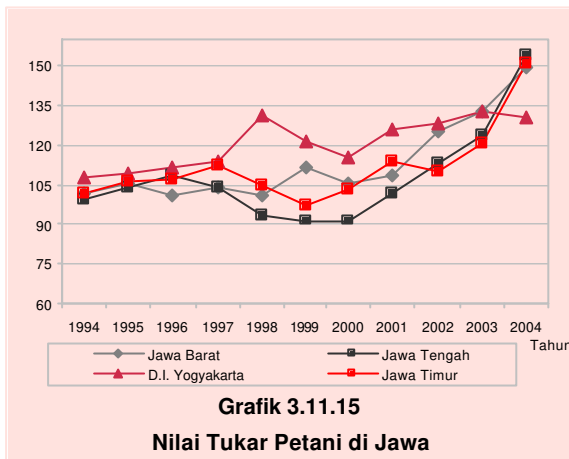
justru menunjukkan perbaikan seperti diperlihatkan indeks nilai tukarnya yang di atas angka 100. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga tahun 2004.

#### b. Perkembangan NTP di Jawa

Pada periode 1994-2004, tingkat daya beli masyarakat petani di Propinsi Jawa Barat dan Yogyakarta menunjukkan peningkatan berarti yang diperlihatkan dengan angka NTP yang selalu di atas angka 100. Namun kondisi tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur karena angka NTP di dua provinsi tersebut menunjukkan perkembangan yang relatif berfluktuasi. Pada tahun 1999, angka NTP di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka paling rendah dan berada di bawah angka 100 yaitu sebesar 97,6. Begitu pula, angka NTP Jawa Tengah berada di bawah angka 100 pada tahun 1994 dan terus berlanjut secara berturut-turut pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

Daya beli masyarakat petani di empat provinsi di pulau Jawa pada tahun 2002 – 2004 mengalami peningkatan berarti yang tunjukkan dengan angka NTP yang berada di atas angka 100. Angka NTP tertinggi terjadi pada tahun 2004 pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebesar 154,3 dan 151,0.





**c. Perkembangan NTP di Pulau Sumatera**

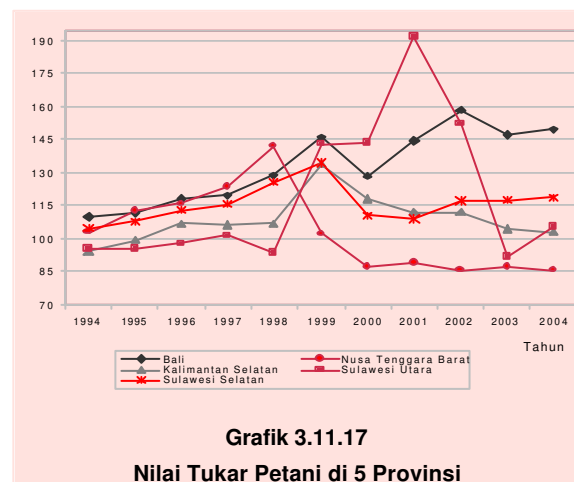
Tingkat kesejahteraan masyarakat petani di Provinsi Lampung pada tahun 1994-2004 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 1993 yang diindikasikan dengan angka NTP di propinsi tersebut selalu berada di bawah angka 100. Angka NTP Propinsi Lampung yang terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu hanya mencapai angka 73,1. Hal yang sama juga dialami oleh sebagian besar provinsi-provinsi di pulau Sumatera seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. NTP kedua propinsi tersebut mengalami kenaikan hingga di atas angka 100 pada tahun 2003 dan 2004. Sementara itu, NTP Sumatera Barat dan Sumatera Selatan sebelum tahun 1998 selalu berada di atas angka 100, namun setelah tahun 1998 angka NTP menurun secara drastis dan berada di bawah angka 100.

192,1. Keadaan yang sama juga dialami oleh NTP di provinsi lainnya yaitu masing-masing secara berturut adalah NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat tertinggi terjadi pada tahun 1998 mencapai angka 142,3; NTP Kalimantan Selatan tahun 1999 sebesar 133,9; dan NTP Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1999 sebesar 134,7.

Pada tahun 2004, NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah angka 100, sedangkan NTP Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan berada di atas angka 100. Secara umum selama periode 1994-2004, NTP lima provinsi tersebut menunjukkan perkembangan yang cenderung di atas angka 100, kecuali NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 1994-1999 menunjukkan perkembangan NTPnya di atas angka 100, namun setelah tahun 1999, angka NTP provinsi tersebut terus mengalami penurunan dan berada di bawah angka 100.

**d. Perkembangan NTP di Provinsi di Luar Pulau Jawa dan Sumatera**

Perkembangan NTP di lima provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan pada periode 1994-2004 bervariasi. NTP Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan pada periode tersebut selalu berada angka 100, sedangkan NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang relatif berfluktuasi. Angka NTP Provinsi Bali tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 158,5, sementara NTP Sulawesi Utara tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai angka











## **USAHA KECIL DAN MENENGAH**

## 3.12 USAHA KECIL DAN MENENGAH

### RINGKASAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) (termasuk usaha rumahtangga) yang terdapat di seluruh sektor ekonomi cukup banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus memiliki kualifikasi jenjang pendidikan tinggi. Selama kurun waktu 1998-2003, jumlah usaha tidak berbadan hukum ini tumbuh 12,2 persen dengan pertumbuhan tertinggi di sektor transportasi (35,6 persen). Penyerapan tenaga kerja di UKM pada periode tersebut tumbuh sebesar 11,58 persen.

Pada periode tersebut penyebaran UKM terpusat di Pulau Jawa dan Bali yang tentu saja menyerap tenaga kerja paling banyak. Pada tahun 2003 konsentrasi usaha tersebut di Pulau Jawa dan Bali mencapai 11,2 juta usaha (71,2 persen), kemudian penyebaran terbesar berikutnya di Pulau Sumatera 2,3 juta usaha (14,8 persen) dan Pulau Kalimantan sebanyak 860,5 ribu usaha (5,4 persen). Penyerapan tenaga kerja di masing-masing pulau sebanyak 20,1 juta jiwa (69,3 persen), 4,6 juta jiwa (6,2 persen). Pada tahun 2003 jumlah UKM paling banyak bergerak di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, kemudian diikuti oleh sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR) serta transportasi masing-masing mencapai 58,5 persen, 16,7 persen dan 13,8 persen, dimana masing-masing sektor menyerap tenaga kerja sebesar 57,9 persen, 21,9 persen dan 9,1 persen.

Pesatnya pertumbuhan jumlah usaha juga diikuti pesatnya pertumbuhan nilai omset yang diperoleh. Pada periode tersebut nilai omset mengalami kenaikan sebesar 171,5 persen dengan kenaikan omset terbesar di Pulau Sumatera (204,4 persen), di Pulau Jawa dan Bali (170,6 persen) dan Pulau Kalimantan (154,8 persen). Pada tahun 2003 kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor perdagangan sebesar Rp 318,4 miliar (63,3 persen), kemudian diikuti sektor IKKR Rp 86,2 miliar (17,1 persen) dan sektor transportasi Rp 51,3 miliar (10,2 persen).

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir (1975-2004), perkembangan jumlah usaha IKKR mengalami pertumbuhan sekitar 2,6 persen per tahun dan sekitar dua pertiga-nya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah usaha dan tenaga kerja IKKR yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 12,5 persen dan 10,5 persen dibandingkan sebelum terjadinya krisis ekonomi.

Produktivitas per pekerja selama periode 1975-2004 menunjukkan trend yang selalu meningkat antar periode. Pada tahun 1975 produktivitas per pekerja hanya sebesar Rp.80.000,-, pada saat terjadinya krisis sebesar Rp.8,3 juta dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 16,5 juta. Peningkatan produktivitas tersebut masih diimbangi dengan peningkatan efisiensi yang wajar. Secara rata-rata efisiensi dari usaha IKKR per tahunnya masih sekitar 65 persen.

### SUMMARY

*The establishments of small scale and medium (ESSM) (cottage industry included) in every economic sector absorb many workers with no need higher education qualification. In period of 1998-2003, the number of these establishments had increased 12.2 percent, which the highest increment occurred in transportation sector (35.6 percent). The growth of workers absorption in these establishments reached 11.8 percent.*

*At the same period, ESSM centered in Java and Bali island which also absorbed many workers. In 2003, about 11.2 million ESSM centered in Java and Bali Island (71.2 percent) then followed by Sumatera Island 2.3 million people ESSM (14.8 percent) and Kalimantan Island 860.5 thousand ESSM (5.4 percent) . ESSM in Java and Bali Island absorbed 20.1 million people (69.3 percent), in Sumatera Island absorbed 4.6 million people (15.7 percent) and in Kalimantan Island absorbed 1.8 million people (6.2 percent). In 2003, most of ESSM were in whole and retail trades, restaurants and accommodation services sector (58.5 percent) and followed by establishment of small scale and cottage industry (SSCI) sector (16.7 percent) and transportation sector (13.8 percent) which each sector absorbed 57.9 percent, 21.9 percent and 9.1 percent .*

*As the growth of number of ESSM increased fast, the growth of the output also increased amazingly. At the same period the growth of output in ESSM was about 171.5 percent, which the highest increment was in Sumatera Island (204.4 percent) followed by Java and Bali Island (170.6 percent) and Kalimantan Island (154.8 percent). In 2003, the highest contribution output was from trade sector which reached 318.4 billion rupiahs (63.3 percent) the followed by SSCI sector 86.2 billion rupiahs (17.1 percent) and transportation sector 51.3 billion rupiahs (10.2 percent)*

*For the last 30 years (1975-2004), the number of establishments of small scale and household industry (SSHI) have increased about 2.6 percent per year. The spreading areas of SSHI in those periods were still mostly concentrated in Jawa Island. The economic crisis attacked Indonesia in 1998 has also big impact to the development of number of establishment and worker of IKKR, that have experienced a decrease about 12.5 percent and 10.5 percent, respectively.*

*In the period of 1975-2004, the productivity of worker has indicated trend that always increase among period. In 1975, the productivity of worker was around 80 thousand rupiahs, in the economic crisis time, it was around 8.3 million rupiahs and in 2004 it was around 16.5 million rupiahs. The increasing of those productivities was still balanced with the increasing of natural efficiency. In average, the efficiency of the SSHI is still about 65 percent per year.*



Usaha kecil dan usaha rumah tangga yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Sehingga secara nasional dari usaha ini banyak sumbangannya terhadap produk domestik bruto.

Informasi mengenai usaha kecil dan menengah diperoleh dari Survei Usaha Terintegrasi (SUSI). Survei ini mempunyai arti yang sangat strategis karena data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat diperlukan untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama usaha kecil dan usaha rumah tangga (bukan usaha yang berbadan hukum/usaha).

### 3.12. Jumlah Usaha menurut Provinsi

Konsentrasi usaha tidak berbadan hukum/usaha di Indonesia pada tahun 2003 terbesar terdapat pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.272.845 usaha, diikuti oleh Jawa Barat sebanyak 3.216.567 usaha dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.080.105 usaha. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya maka perkembangan terbesar terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah yang naik 23,1 persen dibanding tahun 2002, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara yang naik sekitar 20,0 persen. Secara keseluruhan jumlah usaha tidak berbadan hukum tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 0,5 persen dibanding tahun 2002.

Jika ditinjau menurut kepulauan, konsentrasi usaha tidak berbadan hukum di Indonesia pada tahun 2003 terpusat di pulau Jawa dan Bali tercatat sebanyak 11,2 juta usaha atau sekitar 71,2 persen dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20,1 juta jiwa atau sekitar 69,3 persen. Sementara di Pulau Sumatera terdapat sebanyak 2,3 juta usaha atau sekitar 14,8 persen dan menyerap tenaga kerja sebanyak 4,6 juta jiwa atau 15,7 persen. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat sebanyak 860,5 ribu usaha atau sekitar 5,4 persen dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,8 juta jiwa atau 6,2 persen. Sedangkan di Pulau Maluku dan Papua hanya terdapat 151,2 ribu

**Tabel 3.12.1**  
**Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum**

Propinsi	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SUMATERA</b>	2 285 053	2 182 568	2 228 518	2 208 110	2 171 116	2 342 815
01 N A D	301 897	234 345	220 261	220 349	187 996	225 686
02 Sumatera Utara	598 031	580 497	593 615	618 670	636 258	668 567
03 Sumatera Barat	306 736	316 836	337 647	290 697	331 676	333 573
04 Riau	174 648	170 727	176 245	160 115	185 348	199 680
05 Jambi	117 367	128 976	130 029	113 061	138 798	151 929
06 Sumatera Selatan	359 273	353 784	365 484	384 093	260 592	285 052
07 Bengkulu	69 402	69 034	68 073	66 074	73 785	80 850
08 Lampung	357 699	328 369	337 164	355 051	356 663	397 478
<b>JAWA DAN BALI</b>	9 585 713	10 146 345	10 458 538	10 241 863	11 486 879	11 246 304
09 DKI Jakarta	711 020	675 923	719 941	696 963	1 057 765	893 623
10 Jawa Barat	2 901 883	3 035 152	2 969 114	2 886 209	3 059 558	3 216 567
11 Jawa Tengah	2 515 013	2 781 586	2 893 016	2 891 273	3 351 931	3 080 105
12 DI Yogyakarta	304 583	354 285	366 855	404 742	509 176	469 898
13 Jawa Timur	2 879 439	3 012 492	3 199 556	3 074 286	3 118 640	3 272 845
14 Bali	273 775	286 907	310 056	288 390	389 809	313 266
<b>NUSA TENGGARA</b>	433 898	465 348	554 148	475 171	467 571	511 476
15 Nusa Tenggara Barat	286 951	292 679	349 356	296 885	284 845	314 287
16 Nusa Tenggara Timur	146 947	172 669	204 792	178 286	182 726	197 189
<b>KALIMANTAN</b>	700 646	741 054	715 337	712 957	812 960	860 481
17 Kalimantan Barat	160 871	185 281	173 414	164 469	202 409	218 749
18 Kalimantan Tengah	126 696	125 163	115 008	135 565	130 256	132 669
19 Kalimantan Selatan	270 997	279 944	281 903	266 911	315 129	331 644
20 Kalimantan Timur	142 082	150 666	145 012	146 012	165 166	177 419
<b>SULAWESI</b>	912 370	933 509	979 055	849 198	622 011	671 821
21 Sulawesi Utara	224 081	224 606	231 031	219 615	199 181	218 985
22 Sulawesi Tengah	123 161	132 370	138 254	136 659	67 152	82 645
23 Sulawesi Selatan	472 503	476 794	510 590	390 603	268 235	294 036
24 Sulawesi Tenggara	92 625	99 739	99 180	102 321	87 443	76 155
<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	156 591	51 217	44 842	173 346	143 029	151 162
25 Maluku	100 016	-	-	89 520	76 426	91 684
26 Papua	56 575	51 217	44 842	83 826	66 603	59 478
<b>Jumlah</b>	<b>14 074 271</b>	<b>14 520 041</b>	<b>14 980 438</b>	<b>14 660 645</b>	<b>15 703 566</b>	<b>15 784 059</b>

usaha atau hanya 1,0 persen usaha dari seluruh usaha di Indonesia, dengan tenaga kerja sebanyak 303,2 ribu jiwa atau hanya 1,0 persen pekerja dari seluruh jumlah pekerja pada usaha yang tidak berbadan hukum. Dapat dikatakan untuk Kawasan Barat jumlah usahanya sebanyak 13,6 juta atau sekitar 86,1 persen dan



menyerap tenaga kerja sebanyak 24,7 juta jiwa atau sekitar 85,1 persen, sedangkan untuk Kawasan Timur jumlah usahanya sekitar 2,2 juta atau sekitar 13,9 persen dengan tenaga kerja sebanyak 4,3 juta jiwa atau sekitar 14,9 persen.

### 3.12.2 Pertumbuhan Usaha

Sejak tahun 1998 hingga 2003, pertumbuhan jumlah usaha tidak berbadan hukum di Indonesia sebesar 12,2 persen yaitu dari 14,1 juta usaha menjadi 15,8 juta usaha. Dalam periode yang sama propinsi yang mengalami pertumbuhan usaha tertinggi adalah DI Yogyakarta, yaitu dari 304,6 ribu usaha menjadi 469,9 ribu usaha atau tumbuh sebesar 54,3 persen.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dalam periode 1998 hingga 2003 yang mengalami pertumbuhan usaha paling tinggi adalah usaha angkutan dan komunikasi. Dalam periode tersebut usaha ini tumbuh sebesar 35,6 persen yaitu dari 1,60 juta usaha menjadi 2,2 juta usaha. Peningkatan jumlah usaha ini bisa terlihat dengan makin banyaknya usaha angkutan penumpang dengan sepeda motor (ojek), warung telekomunikasi, dan usaha lain yang sejenis.

### 3.12.3 Jumlah Usaha menurut Lapangan Usaha

Dari hasil Survei Usaha Terintegasi Tahun 2003 (SUSI-03) tercatat sebanyak 15,8 juta usaha tidak

berbadan hukum adalah di luar sektor pertanian. Sedangkan tenaga kerja yang terserap dari jumlah usaha tersebut sebanyak 29,0 juta jiwa. Sebagian besar jumlah usaha ini bergerak di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebanyak 9,2 juta atau sekitar 58,5 persen dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 16,8 juta jiwa atau sekitar 57,9 persen. Jumlah usaha terbesar kedua adalah sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga dengan jumlah usaha sebanyak 2,6 juta atau sekitar 16,7 persen dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 6,4 juta jiwa atau sekitar 21,9 persen. Terbesar ketiga adalah sektor angkutan dan komunikasi di mana jumlah usahanya sebanyak 2,2 juta atau sekitar 13,8 persen dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,6 juta jiwa atau sekitar 9,1 persen. Sedangkan yang terkecil adalah sektor pertambangan rakyat dan penggalian, listrik nonPLN, dan konstruksi dengan jumlah usaha sebanyak 253,2 ribu atau sekitar 1,6 persen dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 592,2 ribu jiwa atau sekitar 2,0 persen.

### 3.12.4 Pekerja menurut Provinsi

Penyerapan pekerja pada usaha tidak berbadan hukum/usaha tahun 2003 terbesar terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.693.486 pekerja, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 5.587.594 pekerja dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.456.515 pekerja. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya maka perkembangan pekerja terbesar terjadi pada Provinsi Maluku yang naik sebesar 31,3 persen, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang naik sebesar 21,8 persen dibanding tahun 2002, dan Provinsi Kalimantan Barat yang naik sekitar 16,2 persen. Secara keseluruhan jumlah pekerja pada usaha tidak berbadan hukum tahun 2003 mengalami penurunan sebesar minus 0,1 persen dibanding tahun 2002.

### 3.12.5 Pertumbuhan Pekerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah usaha tidak berbadan hukum dalam kurun 1998 hingga 2003, maka

Tabel 3.12.2

Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum

Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertambangan rakyat dan penggalian, Listrik Non PLN dan Konstruksi	241 470	214 334	248 842	287 657	255 824	253 146
2. Industri Kecil dan Kerajinan	2 189 876	2 514 816	2 598 704	2 538 283	2 728 700	2 641 909
a. Tenaga Kerja 1-4	1 995 934	2 289 252	2 358 616	2 307 562	2 490 118	2 406 058
b. Tenaga Kerja 5-19	193 942	225 564	240 088	230 721	238 582	235 851
3. Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan serta Jasa Akomodasi	8 618 563	8 666 569	8 650 713	8 450 211	9 232 631	9 228 487
4. Angkutan dan komunikasi	1 600 824	1 695 933	1 855 149	1 765 050	1 926 668	2 170 291
5. Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa-jasa	1 423 538	1 428 389	1 627 030	1 619 444	1 559 743	1 490 226
Jumlah	14 074 271	14 520 041	14 980 438	14 660 645	15 703 566	15 784 059

**Tabel 3.12.3**  
**Banyaknya Pekerja pada Usaha**  
**Tidak Berbadan Hukum**

Provinsi	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SUMATERA</b>	4 512 467	4 274 659	4 304 381	4 169 481	4 199 287	4 567 761
01 N.A.D	566 409	423 314	367 346	340 425	330 266	377 957
02 Sumatera Utara	1 145 136	1 099 003	1 123 005	1 212 050	1 210 691	1 348 640
03 Sumatera Barat	660 329	633 437	675 276	593 343	658 082	685 840
04 Riau	378 081	367 482	371 671	288 883	373 307	420 989
05 Jambi	228 978	256 733	257 127	223 125	289 573	297 690
06 Sumatera Selatan	724 776	735 298	739 304	751 337	548 183	570 597
07 Bengkulu	137 625	125 128	132 214	118 701	136 240	153 905
08 Lampung	671 133	634 264	638 334	641 617	652 945	712 143
<b>JAWA DAN BALI</b>	17 306 406	18 231 803	18 839 443	18 667 285	20 817 462	20 129 293
09 DKI Jakarta	1 475 955	1 354 297	1 416 453	1 422 523	2 191 955	1 897 858
10 Jawa Barat	5 114 130	5 178 661	5 330 645	5 299 525	5 265 638	5 456 515
11 Jawa Tengah	4 520 048	5 086 584	5 284 228	5 228 412	6 198 697	5 587 594
12 DI Yogyakarta	556 731	623 776	661 964	744 396	962 661	919 378
13 Jawa Timur	5 106 646	5 422 836	5 569 464	5 492 120	5 456 738	5 693 486
14 Bali	532 896	565 649	576 689	480 309	741 773	574 462
<b>NUSA TENGGARA</b>	818 598	849 930	1 110 595	909 127	878 363	921 739
15 Nusa Tenggara Barat	514 510	499 810	696 722	566 637	523 371	541 786
16 Nusa Tenggara Timur	304 088	350 120	413 873	342 490	354 992	379 953
<b>KALIMANTAN</b>	1 356 565	1 496 588	1 507 297	1 462 591	1 690 586	1 811 355
17 Kalimantan Barat	351 070	403 949	437 630	411 580	483 748	562 181
18 Kalimantan Tengah	263 710	257 779	242 033	278 056	279 123	273 700
19 Kalimantan Selatan	465 590	516 939	481 850	468 561	585 855	597 197
20 Kalimantan Timur	276 195	317 921	345 784	304 394	341 860	378 277
<b>SULAWESI</b>	1 697 103	1 752 840	1 800 091	1 605 868	1 180 762	1 300 310
21 Sulawesi Utara	431 069	414 561	414 273	393 023	390 281	438 356
22 Sulawesi Tengah	232 242	251 276	289 603	294 433	131 797	160 576
23 Sulawesi Selatan	852 221	896 028	904 027	730 051	497 395	546 848
24 Sulawesi Tenggara	181 571	190 975	192 188	188 361	161 289	154 530
<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	329 037	110 038	102 883	390 304	284 212	303 197
25 Maluku	206 332	-	-	186 675	137 476	180 538
26 Papua	122 705	110 038	102 883	203 629	146 736	122 659
<b>Jumlah</b>	<b>26 020 176</b>	<b>26 715 858</b>	<b>27 664 690</b>	<b>27 204 656</b>	<b>29 050 672</b>	<b>29 033 655</b>

banyaknya pekerja yang dapat diserap juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,6 persen yaitu dari 26,0 juta pekerja menjadi 29,0 juta pekerja. Dalam periode yang sama provinsi yang mengalami pertumbuhan pekerja tertinggi juga di DI Yogyakarta, yaitu dari 556,7 ribu pekerja menjadi 919,4 ribu pekerja atau tumbuh sebesar 65,1 persen.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dalam periode 1998 hingga 2003 yang mengalami pertumbuhan pekerja paling tinggi adalah usaha angkutan dan komunikasi. Dalam periode tersebut pekerja pada usaha ini tumbuh sebesar 32,3 persen yaitu dari 2,0 juta pekerja menjadi 2,6 juta pekerja. Peningkatan jumlah pekerja ini sebagai akibat meningkatnya jumlah usaha angkutan dan komunikasi.

### 3.12.6 Pekerja menurut Lapangan Usaha

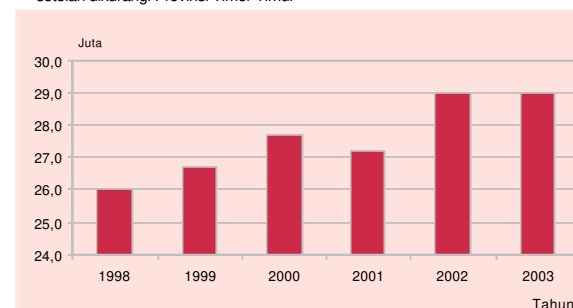
Penyerapan tenaga kerja pada usaha tidak berbadan hukum pada tahun 2003 tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yang menyerap 15,6 juta pekerja atau 57,9 persen diikuti usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 6,4 juta pekerja atau 21,9 persen. Kemudian usaha angkutan dan komunikasi serta usaha lembaga keuangan, real estat, usaha persewaan, dan jasa-jasa masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 2,6 juta pekerja atau sekitar 9,1 persen. Sedangkan lapangan usaha yang terendah dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha pertambangan rakyat dan penggalian, usaha listrik non PLN, dan usaha konstruksi. Dari ketiga lapangan usaha tersebut hanya menyerap 592,3 ribu pekerja atau sekitar 2,0 persen dari tenaga kerja yang bekerja pada usaha tidak berbadan hukum/usaha.

**Tabel 3.12.4**  
**Banyaknya Pekerja pada Usaha yang Tidak**  
**Berbadan Hukum**

Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pertambangan rakyat dan penggalian, Listrik Non PLN dan Konstruksi	655 311	513 027	601 478	699 243	583 457	592 253
2 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga	5 287 418	6 116 269	6 291 441	6 110 058	6 566 232	6 363 565
a.Tenaga Kerja 1-4	3 786 011	4 337 461	4 492 551	4 348 548	4 796 236	4 634 561
b.Tenaga Kerja 5-19	1 501 407	1 778 808	1 799 290	1 761 510	1 767 996	1 729 004
3 Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan serta Jasa Akomodasi	15 626 299	15 523 324	15 735 642	15 417 018	16 834 815	16 800 343
4 Angkutan dan komunikasi	1 993 332	2 109 176	2 281 481	2 184 697	2 342 676	2 634 758
5 Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa-jasa	2 457 816	2 454 062	2 754 648	2 793 640	2 723 492	2 642 736
<b>Jumlah</b>	<b>26 020 176</b>	<b>26 715 858</b>	<b>27 664 690</b>	<b>27 204 656</b>	<b>29 050 672</b>	<b>29 033 655</b>

Penjelasan :

- \* Banyaknya pekerja pada tahun 1998 tidak termasuk Provinsi Timor Timur.
- \* Tenaga Kerja untuk Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga diposisikan setelah dikurangi Provinsi Timor Timur



**Grafik 3.12.2**  
**Banyaknya Pekerja Pada Usaha**  
**Tidak Berbadan Hukum**



### 3.12.7 Omset menurut Provinsi

Omset atau pendapatan usaha tidak berbadan hukum pada tahun 2003 tercatat sebanyak 503,3 miliar rupiah; kontribusi terbesar berasal dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 88,0 miliar rupiah (17,5 persen), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 81,5 miliar rupiah (16,2 persen), dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 79,5 miliar rupiah (15,8 persen). Kontribusi terkecil berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,3 miliar rupiah (0,3 persen).

Dilihat menurut pulau, kontribusi terbesar berasal dari Pulau Jawa dan Bali sebesar 336,2 miliar rupiah (66,8 persen), terbesar kedua adalah Pulau Sumatera sebanyak 104,8 miliar rupiah (20,8 persen), dan terbesar ketiga adalah pulau Kalimantan sebanyak 28,4 milyar rupiah (5,6 persen), sedangkan pulau lainnya di bawah 5 persen.

### 3.12.8 Omset menurut Lapangan Usaha

Besarnya nilai omset/pendapatan pada usaha tidak berbadan hukum pada tahun 2003 sebesar Rp 503,3

miliar dan yang tertinggi adalah lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebesar Rp 318,4 milyar (63,3 persen) diikuti usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebesar Rp 86,2 miliar (17,1 persen). Kemudian urutan berikutnya adalah usaha angkutan dan komunikasi sebesar Rp 51,3 miliar (10,2 persen) dan usaha lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa-jasa sebesar Rp 38,8 miliar (7,7 persen). Sedangkan jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dalam periode 1998 hingga 2003 yang mengalami pertumbuhan nilai omset/pendapatan paling tinggi adalah usaha pertambangan rakyat dan penggalian, listrik non PLN, dan konstruksi. Dalam periode tersebut nilai omset/pendapatan pada usaha ini tumbuh sebesar 204,8 persen yaitu dari 2,8 miliar rupiah menjadi Rp 8,6 miliar.

Lapangan usaha yang terendah dalam memperoleh omset/pendapatan adalah usaha pertambangan rakyat dan penggalian, usaha listrik non PLN, dan usaha konstruksi. Dari ketiga lapangan usaha tersebut hanya memperoleh omset/pendapatan sebesar Rp 8,6 miliar (sekitar 1,7 persen).

**Tabel 3.12.5**  
Omset Usaha yang Tidak Berbadan Hukum menurut Propinsi (Jutaan Rupiah)

Propinsi	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SUMATERA</b>	34 422 755	35 508 708	38 818 331	47 339 374	68 831 108	104 775 354
01 N A D	5 665 320	3 598 954	4 086 961	3 899 499	7 681 901	11 041 241
02 Sumatera Utara	9 412 275	9 847 367	10 728 729	16 895 372	23 744 961	28 995 777
03 Sumatera Barat	5 627 324	5 526 023	6 901 703	6 060 051	10 490 986	12 715 300
04 Riau	4 020 963	4 253 471	4 008 581	3 371 792	6 148 503	23 894 057
05 Jambi	1 335 111	2 196 307	2 118 924	2 404 775	6 310 069	7 551 976
06 Sumatera Selatan	4 296 429	6 113 171	6 354 080	7 616 533	8 241 961	9 505 890
07 Bengkulu	710 172	906 470	901 283	854 267	983 260	1 965 570
08 Lampung	3 355 161	3 066 946	3 718 070	6 437 085	5 229 467	9 105 543
<b>JAWA DAN BALI</b>	124 217 929	146 372 108	180 233 112	201 884 763	251 569 358	336 161 126
09 DKI Jakarta	19 452 179	20 235 867	22 865 817	30 679 024	49 015 508	87 993 965
10 Jawa Barat	37 560 579	45 548 001	55 567 144	60 683 077	65 887 050	81 501 326
11 Jawa Tengah	28 089 433	34 207 819	38 679 348	44 876 833	58 108 347	68 302 173
12 Di Yogyakarta	3 065 177	4 627 992	5 157 360	6 675 538	8 184 108	10 232 289
13 Jawa Timur	31 957 097	36 758 692	52 640 941	54 028 163	59 762 446	79 495 934
14 Bali	4 093 465	4 993 737	5 322 502	4 942 128	10 611 900	8 635 440
<b>NUSA TENGGARA</b>	3 835 990	4 485 219	5 335 424	4 775 606	4 947 855	8 622 261
15 N T B	2 787 227	3 161 790	4 221 352	3 559 357	3 517 134	5 380 666
16 N T T	1 048 763	1 323 429	1 114 072	1 216 249	1 430 721	3 241 596
<b>KALIMANTAN</b>	11 158 710	14 076 951	13 447 640	19 659 915	21 412 990	28 428 375
17 Kal Bar	2 601 546	3 955 165	4 219 235	6 560 739	6 078 642	9 109 172
18 Kal Teng	3 205 918	3 198 553	2 540 489	4 363 326	4 812 731	3 813 461
19 Kal Sel	2 995 373	3 982 373	3 337 037	3 978 618	7 300 010	7 853 781
20 Kal Tim	2 355 873	2 940 861	3 350 878	4 757 233	3 221 607	7 651 960
<b>SULAWESI</b>	9 632 199	10 845 189	11 355 083	11 401 105	14 557 742	20 292 156
21 Sulawesi Utara	2 480 108	2 586 135	2 757 777	3 071 897	5 582 236	7 383 453
22 Sulawesi Tengah	1 297 051	1 602 209	1 544 180	2 215 253	1 580 995	2 611 553
23 Sulawesi Selatan	4 884 931	5 396 469	6 067 927	5 030 528	6 139 669	8 965 179
24 Sulawesi Tenggara	970 110	1 260 376	985 198	1 083 427	1 254 842	1 331 971
<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	2 120 956	942 697	899 361	4 324 992	3 296 816	5 003 802
25 Maluku	1 053 300	-	-	2 377 814	1 769 967	2 830 467
26 Papua	1 067 656	942 697	899 361	1 947 179	1 526 849	2 173 334
<b>Jumlah</b>	185 388 539	212 230 873	250 088 950	289 385 755	364 615 869	503 283 074

**Tabel 3.12.6**  
Omset Usaha yang Tidak Berbadan Hukum menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pertambangan rakyat dan penggalian, Listrik Non PLN dan Konstruksi	2 819 563	3 896 047	4 235 334	6 694 337	6 161 250	8 589 553
2 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga	44 100 439	51 061 393	57 319 260	67 091 358	81 159 686	86 200 068
a. Tenaga Kerja 1-4	22 594 352	26 283 862	28 593 069	32 472 832	39 385 424	48 093 234
b. Tenaga Kerja 5-19	21 506 087	24 777 531	28 726 191	34 618 526	41 774 262	38 106 834
3 Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan serta Jasa Akomodasi	105 274 569	119 433 866	141 482 453	156 531 135	207 137 470	318 446 646
4 Angkutan dan komunikasi	18 151 125	21 033 217	26 196 771	32 084 850	36 658 508	51 283 135
5 Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa-jasa	15 042 842	16 806 350	20 855 132	26 984 076	33 498 955	38 763 673
<b>Jumlah</b>	185 388 539	212 230 873	250 088 950	289 385 755	364 615 869	503 283 074

Penjelasan :  
\* Banyaknya pekerja pada tahun 1998 tidak termasuk Provinsi Timor Timur.  
\* Tenaga Kerja untuk Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga diproposisikan setelah dikurangi Provinsi Timor Timur

### 3.12.9 Pertumbuhan Omset

Tidak seperti pertumbuhan banyaknya usaha, pertumbuhan nilai omset atau pendapatan ternyata tidak seiring dengan meningkatnya jumlah usaha

maupun jumlah pekerja usaha tidak berbadan hukum. Memang dalam kurun 1998 hingga 2003, nilai omset/pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 171,5 persen yaitu dari Rp 185,4 miliar menjadi Rp 503,3 miliar. Dalam periode tersebut propinsi yang mengalami pertumbuhan nilai omset/pendapatan tertinggi adalah Riau, yaitu dari Rp 4,0 miliar menjadi Rp 23,9 miliar atau tumbuh sebesar 494,2 persen.



### 3.12.10 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga

#### a. Perkembangan Jumlah Usaha

Jumlah usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR) pada tahun 1975 tercatat sebanyak 1,3 juta unit usaha. Selama kurun waktu hampir 30 tahun pembangunan, yaitu pada tahun 2004, jumlah usaha tersebut meningkat menjadi 2,7 juta unit usaha atau telah terjadi peningkatan usaha sebesar 108,3 persen pada periode 1975-2004 dengan laju pertumbuhan sekitar 2,6 persen per tahun.

Apabila diamati pertumbuhannya selama periode tersebut telah terjadi pasang surut jumlah usaha IKKR. Pada periode 1986-1991 tercatat sebagai periode yang mempunyai peningkatan jumlah usaha IKKR terbesar hingga mencapai 9,3 persen per tahun sedangkan pada periode 1991-1996 pertumbuhan naik sebesar 3,0 persen per tahun. Periode 1996-1998 terjadi penurunan jumlah usaha yang sangat tajam, yaitu sebesar -12,5 persen per tahun yang disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang dimulai pada medio 1997. Periode 2000-2004 adalah masa *recovery* perekonomian Indonesia dengan berangsur membaiknya keadaan ekonomi yang ditandai bertambahnya jumlah usaha IKKR sebesar 8,8 persen.

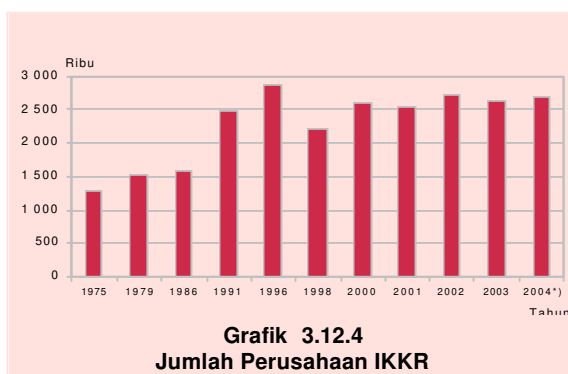
**Tabel 3.12.7**  
**Jumlah Perusahaan IKKR**

Tahun	Perusahaan (unit)	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
1975	1 282 697	
1979	1 530 826	4,5
1986	1 585 870	0,5
1991	2 473 665	9,3
1996	2 867 241	3,0
1998	2 196 899	-12,5
2000	2 598 704	8,8
2001	2 538 283	-2,3
2002	2 728 700	7,5
2003	2 641 909	-3,2
2004*)	2 671 660	1,1

Keterangan

\*) Tahun 1975-1998 termasuk Propinsi Timor Timur

Pasang surut pertumbuhan usaha IKKR terjadi selama periode 2001-2004. Pertumbuhan negatif usaha IKKR pada periode tersebut umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial politik Indonesia yang belum stabil, sehingga gejolak-gejolaknya dirasakan oleh pengusaha IKKR. Sedangkan pertumbuhan positif umumnya disebabkan oleh sifat fleksibilitas usaha IKKR yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.



**b. Persebaran Jumlah Usaha**

Persebaran usaha IKKR dalam kurun waktu hampir 30 tahun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari total wilayah Indonesia. Selama periode waktu tersebut, sekitar dua pertiga bagian dari total usaha IKKR selalu berada di Pulau Jawa dan hanya sepertiganya saja yang berada di luar Jawa. Ketimpangan konsentrasi usaha dengan luas wilayah ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa.

Secara umum jumlah usaha IKKR yang berada di Pulau Jawa mengalami kenaikan dari 868,2 ribu usaha pada tahun 1975 menjadi 2,1 juta usaha pada tahun 2004 atau naik dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 3,0 persen. Sedangkan untuk usaha IKKR yang berada di luar Jawa secara umum meningkat dari 414,5 ribu usaha pada tahun 1975 menjadi 605,2 ribu pada tahun 2004 atau naik dengan laju pertumbuhan sebesar 1,3 persen per tahun.

**c. Penyerapan Tenaga Kerja**

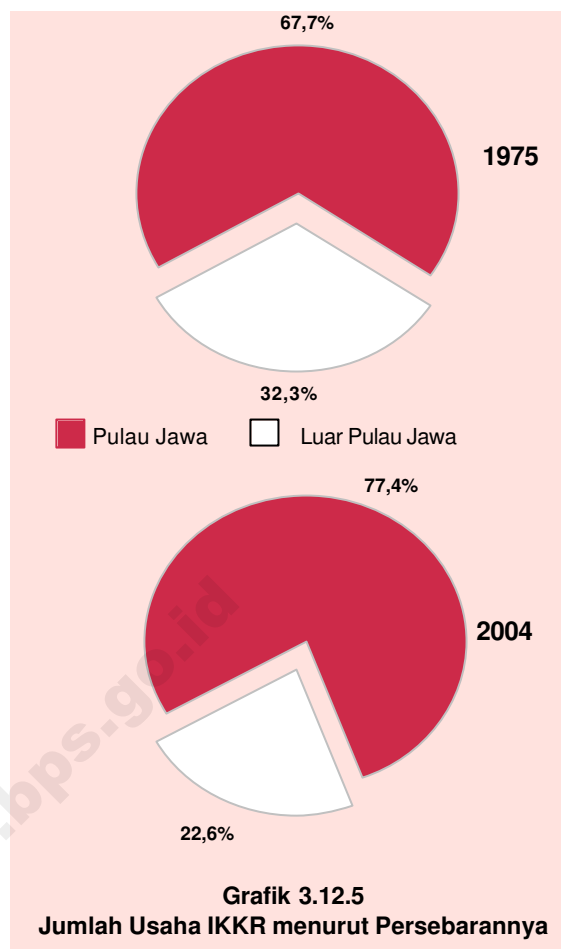
Selama periode 1975-2004 penyerapan tenaga kerja pada usaha IKKR mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari sebesar 4,2 juta orang pada tahun 1975 menjadi 6,5 juta orang pada tahun 2004, atau terjadi peningkatan sebesar 54,3 persen dengan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,5

**Tabel 3.12.8**  
**Jumlah dan Persebaran Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga**

Tahun	Jawa		Luar Jawa		Indonesia	
	Jumlah Usaha	%	Jumlah Usaha	%	Jumlah Usaha	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1975	868 245	67,7	414 452	32,3	1 282 697	100,0
1979	1 036 201	67,7	494 625	32,3	1 530 826	100,0
1986	1 114 751	70,3	471 119	29,7	1 585 870	100,0
1991	1 499 130	60,6	974 535	39,4	2 473 665	100,0
1996	1 837 094	64,1	1 030 147	35,9	2 867 241	100,0
1998	1 401 659	63,8	795 240	36,2	2 196 899	100,0
2000	1 665 014	64,1	933 690	35,9	2 598 704	100,0
2001	1 643 128	64,7	895 155	35,3	2 538 283	100,0
2002	1 845 195	67,6	883 505	32,4	2 728 700	100,0
2003	2 058 721	77,9	583 188	22,1	2 641 909	100,0
2004*)	2 066 414	77,4	605 246	22,6	2 671 660	100,0

Keterangan

\*) Tahun 1975-1998 termasuk Propinsi Timor Timur



persen per tahun.

Dari sekitar 6,5 juta pekerja yang dapat diserap oleh sekitar 2,7 juta usaha pada tahun 2004, setiap usaha rata-rata dapat mempekerjakan sekitar 2 orang pekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha IKKR masih didominasi oleh usaha kerajinan rumah tangga yang mempekerjakan 1-4 orang.

Pada beberapa periode, kenaikan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja berjalan beriringan kecuali pada periode 1975-1979 penyerapan tenaga kerja turun sebesar 3,9 persen per tahun, periode 1979-1986 naik sebesar 0,5 persen per tahun. Puncak penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi pada periode 1996-1998 sebesar 10,5 persen, hal ini sejalan dengan penurunan jumlah unit usaha sebesar 12,5 persen per tahun yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada periode 1998-2000 sebesar 8,9 persen per tahun. Setelah tahun



2001 tersebut pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terus terjadi, meskipun tidak sebesar pada periode 1998-2000.

#### d. Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja

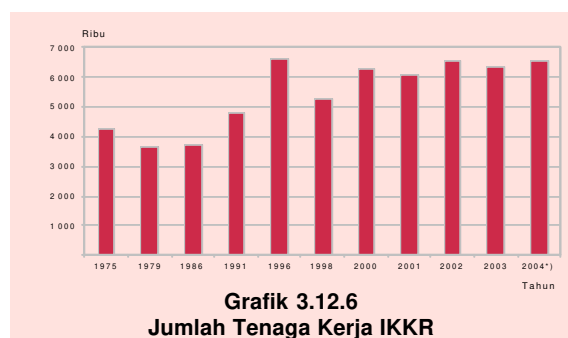
Selama kurun waktu 1975-2004 produktivitas tenaga kerja usaha IKKR menunjukkan peningkatan dari Rp0,1 juta per tenaga kerja pada tahun 1975 naik menjadi Rp 16,5 juta per orang pada tahun 2004 atau naik sebesar 20,2 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan, bahwa kemampuan tenaga kerja sektor industri dalam menghasilkan output meningkat cukup signifikan.

**Tabel 3.12.9**  
Jumlah Tenaga Kerja IKKR

Tahun	Tenaga Kerja (Orang)	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
1975	4 243 096	
1979	3 621 868	-3.9
1986	3 739 810	0.5
1991	4 764 802	4.9
1996	6 613 848	6.8
1998	5 302 198	-10.5
2000	6 291 441	8.9
2001	6 110 058	-2.9
2002	6 566 232	7.5
2003	6 363 565	-3.1
2004*)	6 547 855	2.9

Keterangan

\*) Tahun 1975-1998 termasuk Propinsi Timor Timur



**Grafik 3.12.6**  
Jumlah Tenaga Kerja IKKR

Namun jika diteliti terlihat bahwa produktivitas selama periode 1975-2004 menunjukkan tren yang selalu naik antar periode. Jika periode tersebut dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu, periode sebelum krisis tahun 1975-1996, periode krisis tahun 1998 dan periode pemulihan krisis tahun 2000-2004, maka akan kita dapatkan bahwa selama periode sebelum krisis produktivitas terkecil terjadi pada tahun 1975 yaitu sebesar Rp 0,1 juta per pekerja sedangkan produktivitas terbesar terjadi pada tahun 1996 sebesar Rp 4,1 juta per pekerja. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa pada periode sebelum krisis 1975-1996 terjadi kenaikan produktivitas sebesar 20,6 persen per tahun atau secara nominal terjadi kenaikan produktivitas sebesar Rp 3,9 juta per pekerja.

Pada periode krisis produktivitas per pekerja sebesar Rp 8,3 juta per pekerja. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan produktivitas per pekerja walaupun sedang dalam keadaan krisis. Hal tersebut terjadi dikarenakan naiknya nilai tukar mata uang US dollar.

Pada periode pemulihan krisis ekonomi tahun 2000-2004 produktivitas terkecil terjadi pada tahun 2000, yaitu sebesar Rp 9,1 juta per pekerja. Sedangkan produktivitas terbesar terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar Rp 16,5 juta per pekerja.

#### e. Efisiensi Usaha

Dalam kurun waktu hampir 30 tahun, efisiensi usaha IKKR tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 3.12.5, pada tahun 1975 tingkat efisiensi usaha IKKR sebesar 0,62 dan pada tahun 2004 tingkat effisiensinya menurun sedikit menjadi 0,63.

Selama periode 1975-2004 terlihat bahwa efisiensi usaha IKKR yang terburuk dan terbaik masing-masing terjadi pada periode sebelum krisis yaitu tahun 1986 sebesar 0,70 dan pada tahun 1996 sebesar 0,59. Pada masa krisis efisiensi usaha IKKR sebesar 0,65, sedangkan pada masa pemulihan krisis efisiensi usaha IKKR terburuk terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,68 dan efisiensi terbaik sebesar 0,60 terjadi pada tahun 2001.

**Tabel 3.12.10**  
**Produktivitas Tenaga Kerja IKKR**

Tahun	Produktivitas (Juta Rp/TK)	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
1975	0,1	
1979	0,4	46.6
1986	1,5	21.8
1991	2,1	7.6
1996	4,1	13.9
1998	8,3	43.1
2000	9,1	3.9
2001	11,0	22.0
2002	12,4	12.6
2003	13,6	9.6
2004*)	16,5	21.8

Keterangan

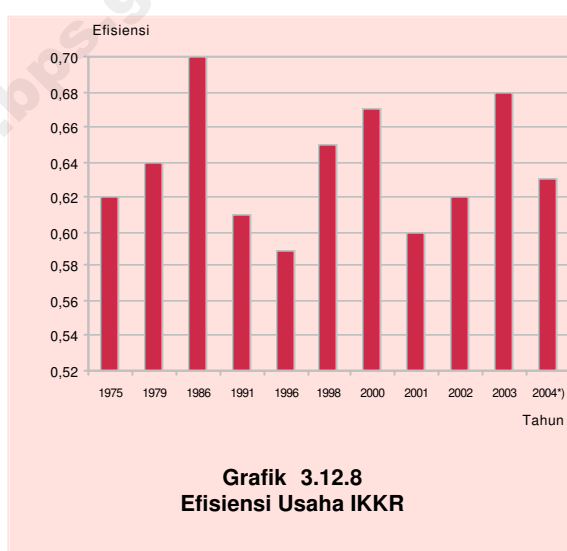
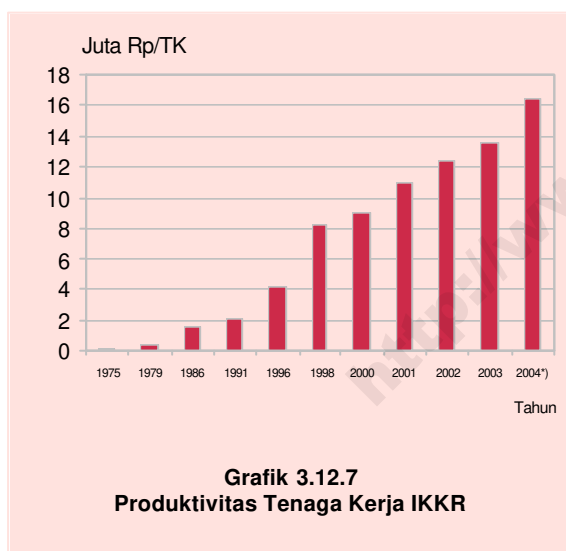
\*) Tahun 1975-1998 termasuk Propinsi Timor Timur

**Tabel 3.12.11**  
**Efisiensi Usaha IKKR**

Tahun	Efisiensi	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
1975	0.62	
1979	0.64	0.8
1986	0.70	1.3
1991	0.61	-2.7
1996	0.59	-0.7
1998	0.65	5.0
2000	0.67	1.5
2001	0.60	-10.4
2002	0.62	3.3
2003	0.68	9.7
2004*)	0.63	-7.3

Keterangan

\*) Tahun 1975-1998 termasuk Propinsi Timor Timur









STATISTIK  
60 Tahun **INDONESIA**  
**MERDEKA**





**NERACA NASIONAL**

## 3.13 NERACA NASIONAL

### RINGKASAN

Pendapatan perkapita menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 1968 pendapatan per kapita hanya sebesar 18,4 ribu rupiah dan melonjak menjadi 10.641,7 ribu rupiah. Sementara itu kesenjangan pendapatan rumah tangga cenderung menurun selama periode 1975-1985 tetapi meningkat pada periode 1985-1990. Pada periode 1995-2000 pemerataan pendapatan semakin membaik. Data triwulanan menunjukkan bahwa pada periode 1988-1997, kecuali triwulan IV tahun 1992, jumlah tabungan lebih kecil daripada pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan pada periode 1998-2003 terjadi sebaliknya. Akan tetapi pada triwulan I tahun 2004 terjadi defisit sebesar 1,8 triliun rupiah. Dari tabel input output dapat disimpulkan bahwa sejak 1971 sampai dengan 2003 telah terjadi peningkatan output yang luar biasa. Jika pada tahun 1971 hanya tercipta output sebesar 7 107,9 miliar rupiah, pada tahun 2003 meningkat menjadi 4.151.187,4 miliar rupiah. Sementara itu permintaan akhir naik dari 4.270,4 miliar rupiah pada tahun 1971 menjadi 2.055.638,0 miliar rupiah pada tahun 2003. Dilihat dari sudut lapangan usaha, sektor industri merupakan penyumbang terbesar baik terhadap pembentukan output maupun permintaan akhir.

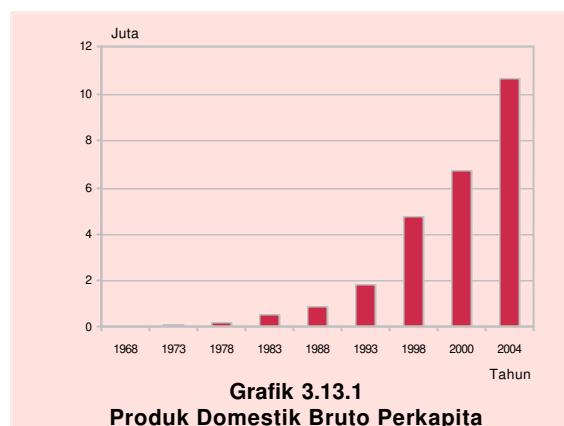
### SUMMARY

*The per capita income increased drastically from 18.4 thousand rupiah in 1968 to 10,641.7 thousand rupiah in 2004. Meanwhile the income gap among households tended to decrease in the period of 1975-1985 and increase in the period of 1985-1990. However, in 1995-2000 it can be shown that income distribution in Indonesia was better than before. The quarterly flow of funds accounts show that there were gaps between saving and gross fixed capital formation. In the period of 1988-1997, with the exception of the fourth quarter of 1992, savings were smaller than gross fixed capital formation. Meanwhile, during the period from 1998 to 2003 it is shown that savings were greater than gross fixed capital formation. However, in the first quarter of 2004, Indonesia experienced deficit for the amount of 1.8 triliun rupiah. The Input-Output table reveals that output increased considerably. In 1971, total output was 7,107.9 billion rupiah, while in 2003 it reached 4,151,187.4 billion rupiah. The final demand also increased remarkably, from 4 270.4 billion rupiah in 1971 to 2,055,638.0 billion rupiah in 2003. It is also noted that manufacturing sector was the main contributor to total output and final demand.*



### 3.13.1 Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan Nasional

Perkembangan beberapa pendapatan per kapita dari tahun 1968 sampai dengan 2004 menunjukkan gambaran yang menggembirakan. Produk domestik bruto (PDB) perkapita atas dasar harga berlaku tahun 1968 sebesar Rp 18,4 ribu, meningkat menjadi Rp 1.758,0 ribu pada tahun 1993. Meningkat lagi menjadi Rp 6.751,6 ribu tahun 2000, seterusnya meningkat lagi menjadi Rp 10.641,7 ribu tahun 2004. Produk nasional bruto (PNB) per kapita atas dasar harga berlaku tahun 1968 sebesar Rp 18,2 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp 1.691,1 ribu pada tahun 1993. Pada tahun 2000 PNB per kapita telah menjadi sebesar Rp 6.303,9 ribu dan tahun 2004 naik menjadi Rp 10.276,5 ribu. Sementara angka Pendapatan Nasional per kapita tahun 1968 sebesar Rp 46.208,4 menjadi Rp 1.490.297,4 rupiah tahun 1993, seterusnya tahun 2000 menjadi sebesar Rp 6.150.024,7 dan berkembang lagi menjadi Rp 9.456.426,3 tahun 2004.



### 3.13.2 Kesenjangan Pendapatan Antar Rumah Tangga

Bagian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kesenjangan antar golongan rumah tangga selama periode 1975-2000 dengan menggunakan kerangka sistem neraca sosial ekonomi (SNSE). Kesenjangan pendapatan rumah tangga adalah perbedaan pendapatan per kapita terendah dengan tertinggi. Rumah tangga dalam kerangka SNSE Indonesia dibedakan menjadi 10 golongan rumah tangga.

**Tabel 3.13.1**  
Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

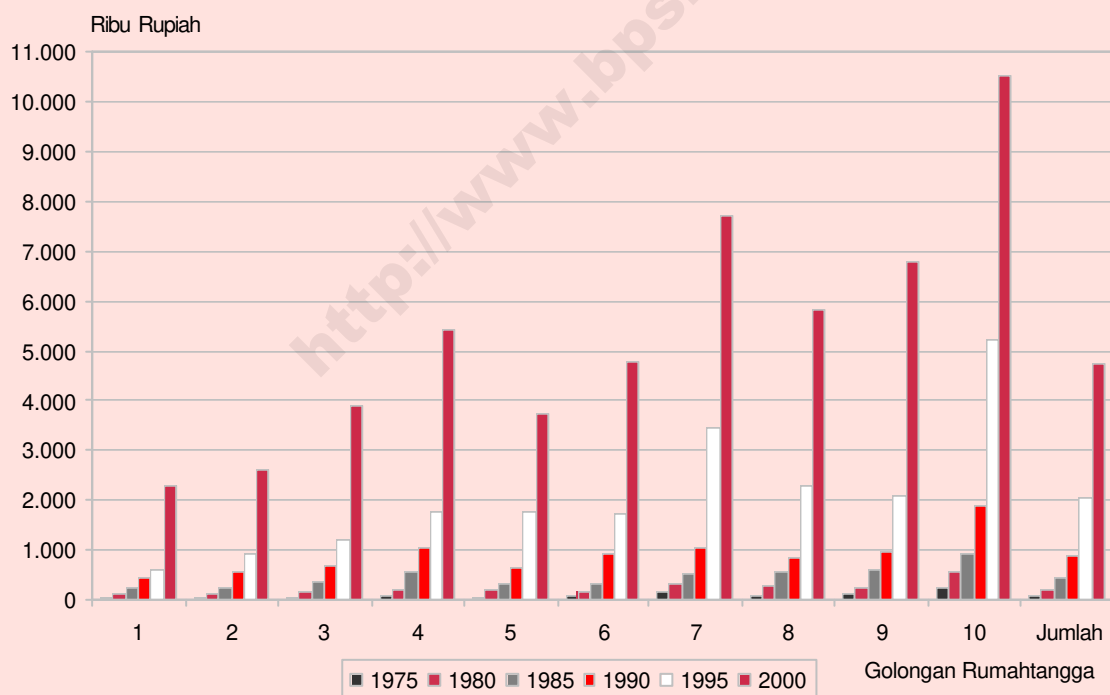
Rincian	1968	1973 <sup>1)</sup>	1978	1983 <sup>1)</sup>	1988	1993 <sup>1)</sup>	1998	2000 <sup>1)</sup>	2004 <sup>1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Produk Domestik Bruto, Miliar Rp.	2 096,7	6 753,4	21 967,4	77 622,8	142 104,8	329 775,9	955 753,5	1 389 769,5	2 303 301,4
2 Produk Domestik Bruto Perkapita, Rp.	18 440,6	54 200,6	156 910,0	497 190,0	829 290,9	1 757 970,4	4 760 842,9	6 751 599,5	10 641 731,6
3 Produk Nasional Bruto, Miliar Rp.	2 067,9	6 507,7	21 115,3	74 339,7	135 183,1	317 223,3	901 859,8	1 297 607,7	2 223 982,6
4 Produk Nasional Bruto Perkapita, Rp.	18 187,3	52 228,7	150 823,6	476 161,1	788 897,4	1 691 054,9	4 492 385,2	6 303 870,9	10 276 466,8
5 Pendapatan Nasional, Miliar Rp.	1 842,9	5 740,7	18 658,5	68 007,8	119 045,0	279 563,4	847 591,6	1 265 939,5	2 046 297,0
6 Pendapatan Nasional Perkapita, Rp.	16 208,4	46 073,0	435 604,0	435 604,0	694 719,2	1 490 297,4	4 222 062,1	6 150 024,7	9 455 426,3

Catatan : <sup>1)</sup> Dilakukan penyempurnaan penghitungan bersamaan dengan penggeseran tahun dasar

**Tabel 3.13.2**  
**Pendapatan<sup>1)</sup> Per Kapita Per Tahun Menurut Golongan Rumah Tangga**

Golongan Rumah Tangga	1975	1980	1985	1990	1995	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga buruh tani	40,1	103,8	247,4	438,4	618,1	2 268,3
Rumah tangga petani gurem (yang memiliki lahan pertanian < 0,5 ha)	43,3	136,4	237,7	566,5	939,7	2 590,2
Rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan pertanian 0,5 -1 ha	57,7	156,0	348,1	683,3	1 205,6	3 884,6
Rumah tangga pegusaha pertanian yang memiliki lahan pertanian > 1 ha	84,8	201,5	567,9	1 053,4	1 765,3	5 449,1
Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di desa	53,5	202,5	316,6	640,4	1 773,0	3 734,5
Bukan angkatan kerja di desa	70,6	152,1	310,9	935,6	1 723,1	4 800,4
Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa	153,0	339,2	530,8	1 048,6	3 444,7	7 708,9
Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di kota	97,8	292,0	554,1	830,4	2 290,4	5 844,7
Bukan angkatan kerja di kota	110,8	245,1	595,0	951,1	2 085,3	6 799,9
Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota	259,7	548,0	906,6	1 882,2	5 244,4	10 512,6
Jumlah	78,4	207,7	427,3	870,7	2 048,2	4 746,9

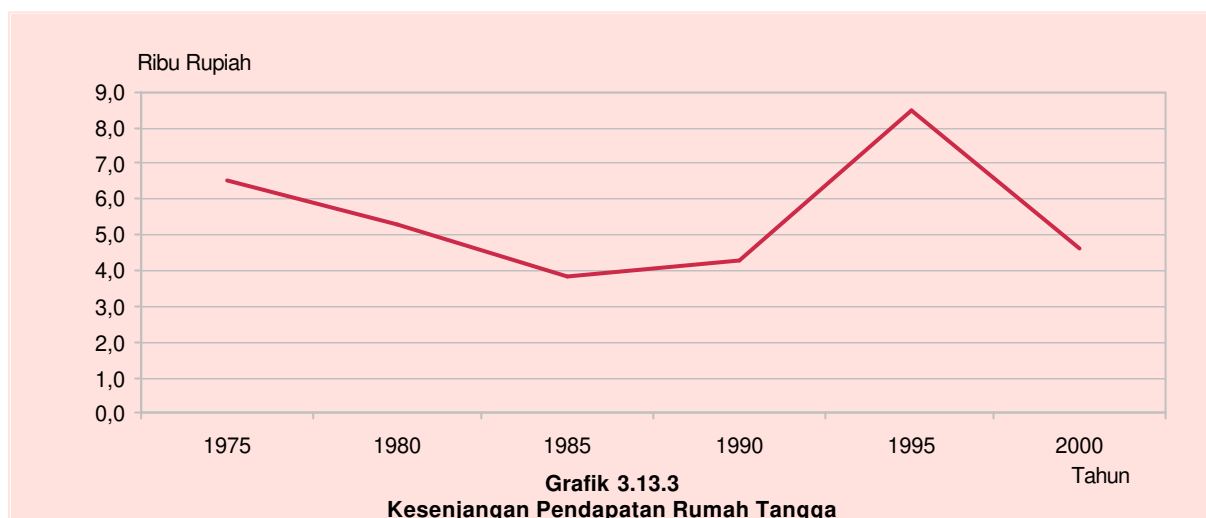
Catatan: <sup>1)</sup> Pendapatan setelah pajak



Golongan Rumah tangga:

- 1: Buruh tani 2: Petani gurem (memiliki lahan < 0,5 ha) 3: Pengusaha pertanian memiliki lahan 0,5-1 ha  
 4: Pengusaha pertanian memiliki lahan > 1 ha 5: Bukan pertanian golongan rendah di desa 6: Bukan angkatan kerja di desa  
 7: Bukan pertanian golongan atas di desa 8: Bukan pertanian golongan rendah di kota 9: Bukan angkatan kerja di kota  
 10: Bukan pertanian golongan atas di kota 11: Jumlah

**Grafik 3.13.2**  
**Pendapatan Per Kapita Menurut Golongan Rumah Tangga**



Kesenjangan pendapatan rumah tangga di Indonesia cenderung turun selama periode tahun 1975-1985, tetapi meningkat selama periode 1985-1995. Pada tahun 1975 perbandingan pendapatan terendah dengan tertinggi adalah Rp 40,1 ribu dibanding Rp 259,7 ribu atau sebesar 1:6,47 dan tahun 1980 sebesar Rp 103,8 ribu dibanding Rp 548,0 ribu atau sebesar 1:5,28. Pada tahun 1985 perbandingan pendapatan terendah dengan tertinggi adalah Rp 247,4 ribu dibanding 906,6 ribu atau sebesar 1:3,81 dan tahun 1990 adalah Rp 438,4 ribu dibanding Rp 1.882,2 ribu atau 1:4,29. Pada tahun 1995 rasio pendapatan terendah dan tertinggi terus bertambah yaitu Rp 618,1 ribu dibanding Rp 5.244,4 ribu atau sebesar 1:8,48. Hal ini mencerminkan kesenjangan pendapatan rumah tangga cenderung meningkat. Akan tetapi, selama periode selanjutnya, yaitu periode tahun 1995-2000, terjadi penurunan rasio tersebut yang mencerminkan semakin membaiknya pemerataan pendapatan. Selama periode tersebut, yaitu pada tahun 2000, perbandingan pendapatan terendah dengan tertinggi adalah Rp 2.268,3 ribu dibanding dengan Rp 10.512,6 ribu atau 1:4,63.

Golongan rumah tangga buruh tani pada tahun 1975, 1980, 1990, 1995 dan 2000, serta rumah tangga petani gurem pada tahun 1985 merupakan golongan rumah tangga dengan pendapatan per kapita terendah. Sedangkan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota pada masing-masing tahun 1975-2000

selalu merupakan golongan rumah tangga dengan pendapatan tertinggi.

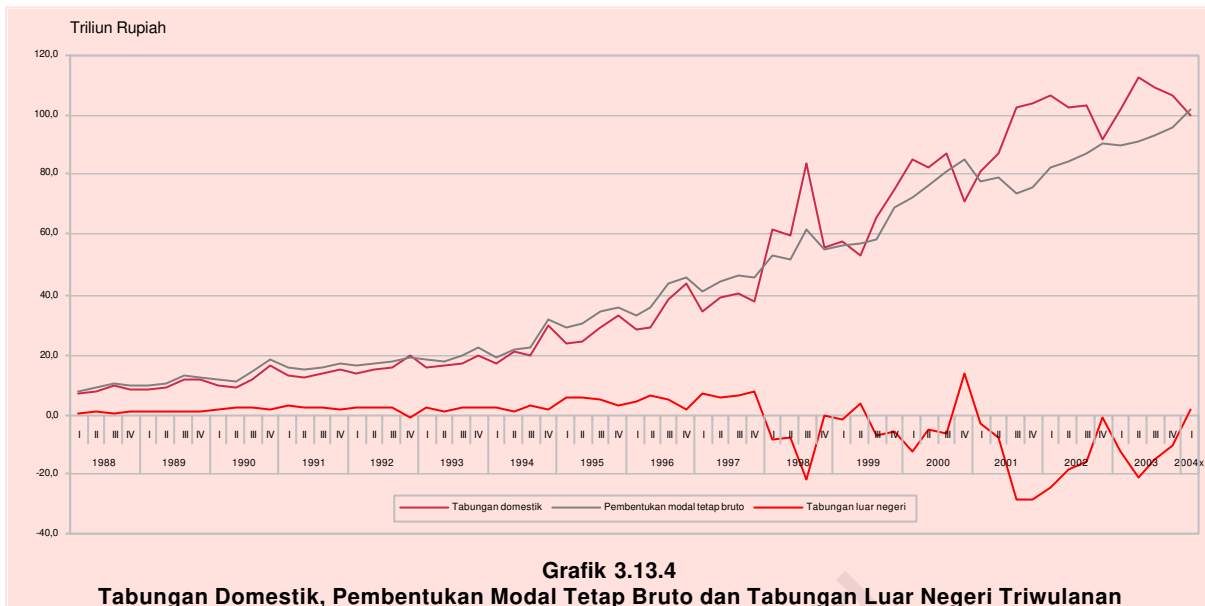
### 3.13.3 Neraca Arus Dana

#### a. Tabungan dan Pembentukan Modal Nasional

Berdasarkan data neraca arus dana (NAD) triwulanan periode 1988-2004 tampaknya ada kesenjangan antara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan tabungan. PMTB mengalami lonjakan yang cukup tajam pada triwulan IV tahun 1990 Rp sebesar 18,4 triliun. Kemudian melonjak lagi pada triwulan IV tahun 1993 sebesar 22,4 triliun dan pada triwulan IV tahun 1994 naik sedikit sebesar Rp 22,7 triliun. Lonjakan yang cukup besar juga terjadi pada triwulan IV tahun 1995 sebesar Rp 35,6 triliun. Kemudian naik lagi menjadi sebesar Rp 45,8 triliun pada triwulan IV tahun 1996. Justru pada triwulan II tahun 1998 pada masa krisis ekonomi PMTB meningkat tajam sebesar Rp 61,6 triliun h, dan naik lagi menjadi Rp 76,5 triliun pada triwulan II tahun 2000. Pada triwulan IV tahun 2000 PMTB mencapai 84,6 triliun rupiah. Sampai triwulan IV 2002 angka ini melonjak lagi menjadi Rp 91,0 triliun, dan mencapai Rp 95,8 triliun pada triwulan IV 2003. Tahun 2004 triwulan I PMTB nasional adalah sebesar Rp 102,0 triliun.

Sementara tabungan pada triwulan IV tahun 1991 mencapai Rp 15,0 triliun. Kemudian naik menjadi Rp 19,9 triliun, dan meningkat lagi menjadi Rp 20,9 triliun pada





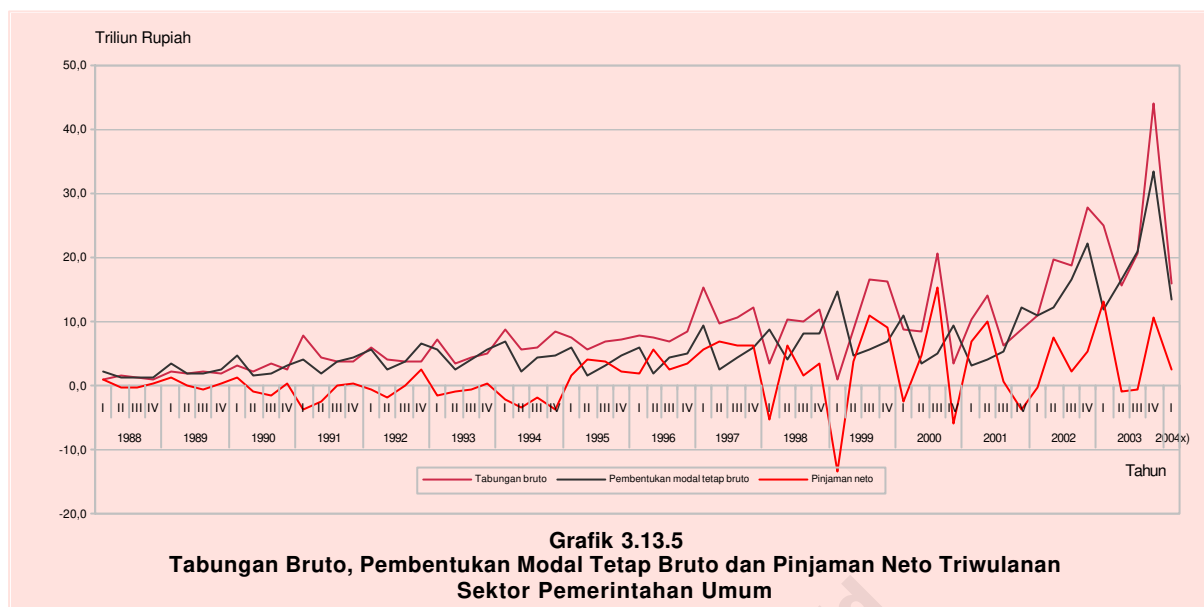
triwulan II tahun 1994. Dari sebesar Rp 23,7 triliun pada triwulan I tahun 1995 meningkat dengan cukup besar pada triwulan IV tahun 1995 sebesar Rp 32,7 triliun. Kemudian naik lagi menjadi sebesar Rp 43,8 triliun pada triwulan IV tahun 1996. Pada triwulan I tahun 1998 saat krisis ekonomi, tabungan meningkat tajam sebesar Rp 61,7 triliun, dan naik lagi sebesar Rp 75,0 triliun pada triwulan IV tahun 1999. Naik lagi sebesar Rp 85,0 triliun pada triwulan I tahun 2000. Sampai triwulan IV 2001 angka ini melonjak lagi menjadi Rp 103,9 triliun, naik lagi menjadi Rp 107,0 triliun pada triwulan I tahun 2002 yang merupakan angka tertinggi. Tahun 2004 triwulan I tabungan nasional adalah sebesar Rp 100,2 triliun.

Kekurangan dana untuk membiayai PMTB ini diperoleh dari pinjaman luar negeri. Secara triwulanan Indonesia mengalami kesenjangan tabungan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997, kecuali pada triwulan IV tahun 1992 mengalami surplus. Mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 kelihatannya tabungan lebih besar dari pada PMTB. Surplus yang cukup besar terjadi pada triwulan III tahun 1998, triwulan III dan IV tahun 2001 masing-masing sebesar Rp 22,0; 28,9 dan 28,5 triliun. Pada tahun 2004 triwulan I terjadi lagi defisit sebesar Rp 1,8 triliun.

#### b. Tabungan dan Pembentukan Modal Pemerintah

Tabungan sektor pemerintah yang cukup tinggi terjadi pada triwulan I tahun 1991 sebesar Rp 7,9 triliun. Kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 8,7 triliun pada triwulan I tahun 1994. Selanjutnya meningkat cukup tajam sebesar Rp 15,3 triliun pada triwulan I tahun 1997, dan meningkat lagi sebesar Rp 20,5 triliun pada triwulan III tahun 2000. Tahun 2002 triwulan IV tabungan pemerintah mencapai Rp 27,7 triliun dan meningkat cukup besar pada triwulan IV tahun 2003 sebesar Rp 44,1 triliun. Tahun 2004 triwulan I tabungan pemerintah baru mencapai Rp 15,9 triliun.

Mulai tahun 1992 triwulan I PMTB pemerintah mencapai sebesar Rp 5,7 triliun yang dari triwulan I tahun 1988 sebesar Rp 2,2 triliun. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp 6,8 triliun tahun 1994 triwulan I dan Rp 9,5 triliun tahun 1997 triwulan I. Meningkat lagi menjadi Rp 14,7 triliun pada triwulan I tahun 1999. Pada triwulan IV tahun 2002 angka ini mencapai sebesar Rp 22,2 triliun dan sebesar Rp 33,3 triliun pada triwulan IV tahun 2003 yang merupakan angka tertinggi. Tahun 2004 triwulan I PMTB pemerintah baru mencapai Rp 13,5 triliun. Secara triwulanan pemerintah mengalami defisit mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 1997, kecuali pada triwulan-triwulan tertentu mengalami



surplus. Mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 pada triwulan-triwulan tertentu mengalami surplus seperti pada triwulan I tahun 1999, 2000 dan 2002, triwulan IV tahun 2000 dan 2001, serta triwulan II dan III tahun 2003. Pada triwulan-triwulan selain yang telah disebutkan mengalami defisit.

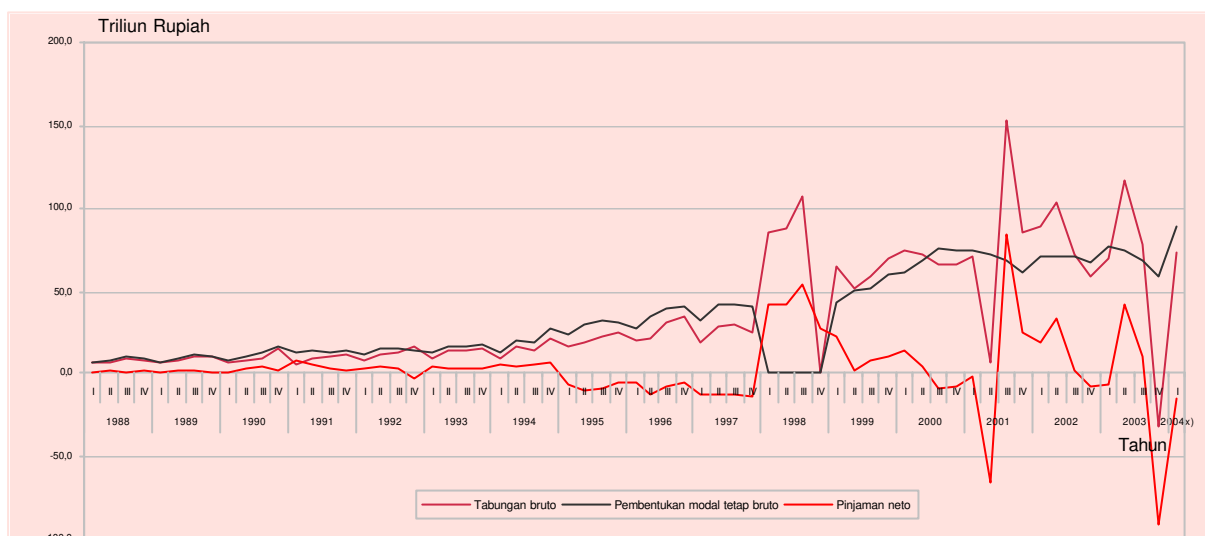
### c. Tabungan dan Pembentukan Modal Sektor Domestik Lainnya.

Tabungan sektor domestik lainnya mencapai Rp 15,0 triliun rupiah pada triwulan IV tahun 1990. Lantas naik menjadi Rp 16,4 triliun pada triwulan IV tahun 1993, serta naik lagi menjadi sebesar Rp 19,3 triliun pada triwulan II tahun 1994. Pada triwulan IV tahun 1995 tabungan ini naik menjadi Rp 24,6 triliun, kemudian naik lagi menjadi Rp 34,2 triliun pada triwulan IV tahun 1996. Terjadi pelonjakan yang cukup tajam pada masa krisis perekonomian tahun 1998 pada triwulan I, II dan III angka ini menjadi Rp 106,8 triliun pada triwulan III. Sampai pada tiwulan III tahun 2001 melonjak menjadi Rp 152,8 triliun yang merupakan angka tertinggi. Tetapi pada tahun 2003 triwulan IV tabungan ini menjadi sebesar Rp 32,2 triliun, artinya pada tahun itu

pengeluaran di sektor domestik lainnya lebih besar dari pada pendapatannya. Tahun 2004 tabungan sektor domestik lainnya adalah sebesar Rp 73,1 triliun .

PMTB sektor domestik lainnya meningkat sebesar Rp 11,1 triliun pada triwulan III tahun 1989 dari sebesar Rp 5,5 triliun pada triwulan I tahun 1988. Kemudian meningkat sebesar Rp 15,0 triliun pada triwulan IV tahun 1990. Seterusnya menjadi Rp 19,3 triliun pada triwulan II tahun 1994. Pada triwulan IV tahun 1996 menjadi Rp 39,9 triliun, dan menjadi Rp 53,1 triliun tahun 1998 triwulan III. Kemudian pada tahun 2000 triwulan III menjadi Rp 75,7 triliun, serta meningkat lagi menjadi Rp 77,6 triliun pada triwulan I tahun 2003. Pada tahun 2004 PMTB ini sebesar Rp 88,7 triliun.

Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1997 terjadi defisit tabungan di sektor domestik lainnya ini, kecuali pada triwulan I tahun 1988, tahun 1998 dan 1999 terjadi surplus yang cukup besar sampai dengan triwulan II tahun 2000. Kemudian defisit lagi, kecuali pada triwulan II dan IV tahun 2001, triwulan I, II dan III tahun 2002, serta triwulan II dan III tahun 2003. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2003 triwulan III sebesar Rp 91,6 triliun. Sementara tahun 2004 terjadi defisit sebesar Rp 15,6 triliun .



Grafik 3.13.6

Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lainnya

### 3.13.4 Tabel Input Output

BPS mulai merintis penyusunan Tabel I-O Indonesia pertama kali tahun 1971 dan kemudian secara berkala disusun Tabel I-O untuk tahun 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 dan selain itu juga disusun Tabel I-O updating untuk tahun 1998 dan 2003.

Tabel I-O secara berkesinambungan dipublikasikan dalam tiga ukuran klasifikasi, yaitu 19 sektor, 66 sektor dan 175 sektor. Tabel I-O disusun terdiri atas dasar harga produsen dan harga pembeli, sementara dari sifatnya tabel I-O juga disusun ada yang bersifat kompetitif dan nonkompetitif. Dalam tabel I-O kompetitif komponen input antara yang berasal dari impor digabung dengan input antara yang berasal dari produksi domestik. Sedang yang nonkompetitif nilai dalam input antara hanya yang berasal dari produksi domestik. Ulasan berikut berdasarkan Tabel I-O atas dasar harga produsen yang bersifat kompetitif.

#### a. Perkembangan Jumlah dan Struktur Input dan Output

Pada tabel I-O input sama dengan output, baik secara total maupun menurut sektor. Matriks antara (*intermediate matrix*) bila dibaca menurut kolom maka

diartikan sebagai input antara, sedang bila dibaca menurut baris maka diartikan sebagai permintaan antara, secara total atau keseluruhan jumlahnya akan sama, tapi dirinci menurut sektor bisa berbeda. Begitupun pula dengan dengan input primer secara total akan sama pula dengan permintaan akhir, tapi bila dilihat menurut sektor akan berbeda.

Pada tahun 1971 jumlah input atau output baru sekitar 7 107,9 miliar rupiah, terdiri dari input antara atau permintaan antara sebesar 2 837,5 miliar rupiah dan input primer atau permintaan akhir sebesar 4 270,4 miliar rupiah atau dalam persentase masing-masing adalah 39,9 persen dan 60,1 persen.

Seiring dengan perkembangan ekonomi jumlah input ini terus membesar yaitu menjadi Rp 21 516,61 miliar pada tahun 1975 dan akhirnya pada tahun 2003 mencapai Rp 4 151 187,4 miliar.

Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang habis digunakan dalam proses produksi. Komponen input antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang dapat berupa hasil produksi dalam negeri atau impor. Sedang input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi antara lain berupa tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Wujud



**Tabel 3.13.1**  
**Perkembangan Jumlah Input-output menurut Struktur (Miliar Rupiah)**

Tahun	Input Antara / Output antara	Input Primer/ Permintaan akhir	Total Input/ Total Output
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	2 837,50	4 270,40	7 107,90
1975	7 822,40	13 694,20	21 516,60
1980	27 975,30	48 330,10	76 305,30
1985	68 777,30	97 645,90	166 423,20
1990	160 518,50	207 801,30	368 319,80
1993	268 477,90	323 383,70	591 861,60
1995	458 366,00	535 564,80	993 930,80
1998	751 125,60	1 029 717,80	1 780 843,40
2000	1 334 599,50	1 366 500,30	2 701 099,80
2003	2 095 549,40	2 055 638,00	4 151 187,40

dari input primer adalah upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal dan pajak tak langsung dikurangi subsidi.

Permintaan antara menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektornya sendiri serta sektor lainnya. Sedangkan permintaan akhir merupakan permintaan atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, investasi atau pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok ekspor serta dikurangi impor.

Begitu juga dengan struktur input, dengan berkembangnya kegiatan ekonomi mengakibatkan semakin besarnya proporsi sektor sekunder dan tersier terhadap ekonomi secara keseluruhan maka input antara semakin naik proporsinya. Bila tahun 1971 input antara baru sekitar 39,9 persen terhadap jumlah input maka pada tahun 2003 proporsinya sudah menjadi 50,5 persen.

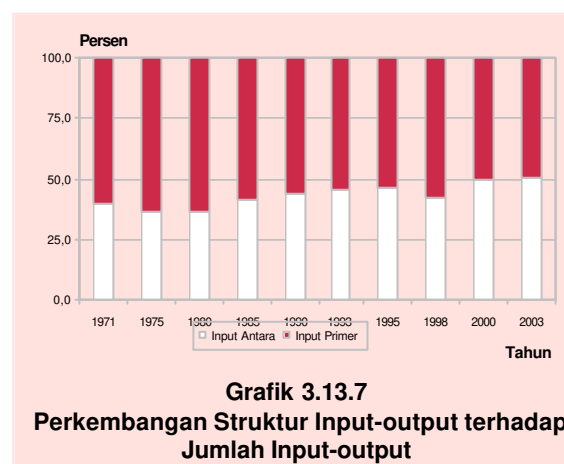
#### **b. Perkembangan Input Primer Menurut Komponennya.**

Input primer yang menjadi komponen dasar Produk Domestik Bruto (PDB) terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal dan pajak tak langsung dikurangi subsidi dari tahun 1971 sampai

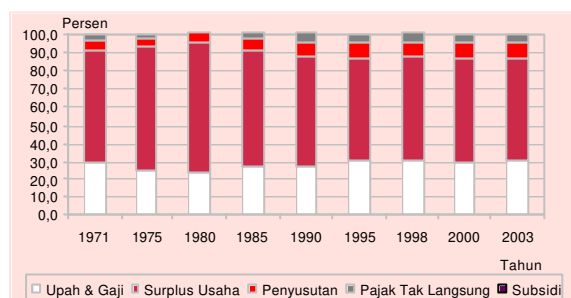
dengan 2003 ditandai dengan semakin mengecilnya proporsi surplus usaha atau membesarnya komponen lainnya sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut. Tapi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 proporsinya kelihatan stabil atau tidak banyak mengalami perubahan.

Komponen upah dan gaji pada tahun 1971 sekitar 29,2 persen terhadap total input primer, pada tahun 1975 turun menjadi 24,9 persen, setelah itu menaik terus menjadi sekitar 30 persen pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2003. Komponen berikutnya yaitu surplus usaha yang juga merupakan komponen terbesar pada input primer, pada tahun 1971 andilnya bagiannya sekitar 62,4 persen, pada tahun 1975 dan 1980 menaik menjadi 68,1 persen dan 71,2 persen, tapi setelah itu menurun terus hingga akhirnya pada tahun 2003 tinggal 55,8 persen.

Komponen ketiga yaitu penyusutan, pada tahun 1971 diperkirakan sekitar 5,3 persen, kemudian setiap tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2003 sudah mencapai 9,1 persen. Komponen pajak tak langsung pada tahun 1971 andilnya sekitar 3,1 persen, pada tahun 1975 sampai dengan 1985 sebesar sekitar 2



sampai 3 persen, pada 1990 sampai dengan tahun 2003 meningkat lagi menjadi sekitar 5 persen. Komponen subsidi sebagai yang terkecil dan menjadi faktor pengurang pada input primer, paling besar terjadi pada tahun 1980 yaitu minus 3,1 persen, selain tersebut selalu dibawah minus 1 persen.



**Tabel 3.13.8**  
**Struktur Perkembangan Input Primer**  
**menurut Komponennya**

### c. Jumlah dan Struktur Input Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000

Jumlah input pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 4 151 187,4 miliar, terdiri dari input antara sebesar Rp 2 059 549,4 miliar atau sebesar 50,5 persen dan sisanya dari input primer sebesar Rp 2 055 638,0 miliar atau sebesar 49,5 persen. Berdasarkan Tabel I-O 19 sektor, input terbesar berasal dari sektor industri pengolahan lainnya (9) yaitu sebesar Rp 639 300,8 miliar, diikuti oleh sektor industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau (8) sebesar Rp 302 600,8 miliar, kemudian sektor perdagangan (13) sebesar Rp 300 385,5 miliar, sedangkan sektor lainnya dibawah Rp 300 000 miliar. Selain sektor kegiatan yang tak jelas batasannya (19) sektor terkecil adalah sektor kehutanan yaitu sebesar Rp 20 039,0 miliar.

Sementara menurut jumlah input antara ada sedikit perbedaan yaitu urutan tiga besar adalah sektor industri pengolahan lainnya masih diikuti oleh sektor industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau tapi yang ketiganya adalah sektor bangunan (12), masing-masing secara berurutan adalah Rp 420 045,8 miliar, Rp 200 787,4 miliar dan 151.103,7 miliar, sedangkan sektor perdagangan menempati urutan ke empat terbesar yaitu sebesar Rp 114. 297,6 miliar. Sektor terkecil dalam input antara tetap yaitu selain sektor kegiatan yang tak jelas batasannya adalah sektor kehutanan yaitu sebesar Rp 4 055,7 miliar.

Bila dilihat dari besarnya input primer maka urutan terbesarnya berbeda lagi, yang terbesar tetap sektor industri pengolahan lainnya diikuti oleh sektor

perdagangan dan sektor pertambangan dan penggalian masing-masing secara berurutan adalah Rp 219 255,1 miliar, Rp 186 187,9 miliar dan Rp 167 692,2 miliar. Sementara yang terkecilnya selain sektor kegiatan yang tak jelas batasannya adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar Rp 8 393,7 miliar.

Sektor atau lapangan usaha yang memberikan memberikan input primer atau menghasilkan nilai tambah terbesar secara persentase terhadap jumlah inputnya masing-masing sektor adalah sektor tanaman bahan makan lainnya (2) yaitu sebesar 90,4 persen diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 85,2 persen dan ke tiga terbesar adalah sektor padi yaitu sebesar 83,6 persen. Sedangkan yang terkecil secara persentase dalam membentuk nilai tambah adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 27,4 persen.

### d. Jumlah dan Alokasi Output Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000

Dari total Output sebesar Rp 2 701 099,8 miliar pada tahun 2000, alokasi output untuk permintaan antara mencapai Rp 1 334 599,5 miliar dan untuk memenuhi permintaan akhir sebesar Rp 1 366 500,3 miliar.

Menurut sektor atau lapangan usaha, output yang terbesar pada tahun 2000 sama seperti jumlah input yaitu adalah sektor industri pengolahan lainnya (9) yaitu sebesar Rp 639 300,8 miliar. Begitu juga untuk permintaan antara dan permintaan akhir yang terbesar tetap dari industri pengolahan lainnya masing-masing yaitu sebesar Rp 230 631,8 miliar dan Rp 408 669,1 miliar. Sektor terbesar kedua permintaan antaranya adalah sektor perdagangan dan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, masing-masing yaitu sebesar Rp 178 801,0 miliar dan Rp 117 399,1 miliar.

Sedangkan menurut permintaan akhir sektor terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau dan setelah itu diikuti oleh sektor bangunan, masing-masing yaitu sebesar Rp 219 927,5 miliar dan Rp 208 389,9 miliar.

Hal yang menarik disini adalah permintaan akhir

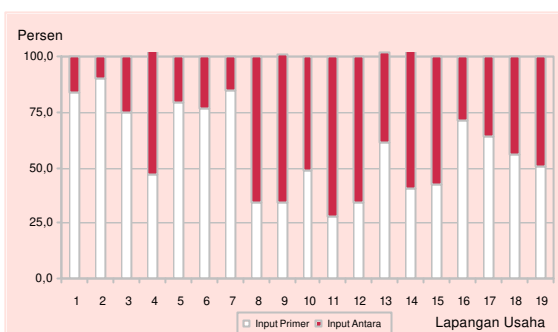
**Tabel 3.13.4**  
**Jumlah Input Menurut Jenis Input dan Menurut**  
**Lapangan Usaha Tahun 2000**  
**(Miliar Rupiah)**

Kode	Sektor/Lapangan Usaha	Input Antara	Input Primer	Total Input
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi	9 342,2	47 507,9	56 850,1
2	Tanaman bahan makanan lainnya	6 679,2	62 584,3	69 263,5
3	Tanaman pertanian lainnya	12 484,1	36 647,6	49 131,7
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	38 625,7	34 645,1	73 270,8
5	Kehutanan	4 055,7	15 983,3	20 039,0
6	Perikanan	9 168,2	29 712,8	38 881,0
7	Pertambangan dan penggalian	29 123,0	167 692,2	196 815,2
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	200 787,4	101 813,4	302 600,8
9	Industri lainnya	420 045,8	219 255,1	639 300,8
10	Pengilangan minyak bumi	56 269,8	54 279,9	110 549,7
11	Listrik, gas dan air bersih	22 244,0	8 393,7	30 637,7
12	Bangunan	151 103,7	76 573,4	227 677,1
13	Perdagangan	114 297,6	186 187,9	300 485,5
14	Restoran dan hotel	56 246,5	39 482,3	95 728,8
15	Pengangkutan dan komunikasi	86 260,0	65 012,1	151 272,2
16	Lembaga Keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan	45 890,8	115 463,1	161 353,9
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	25 049,4	44 499,0	69 548,4
18	Jasa-jasa	46 447,4	60 266,4	106 713,8
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	479,3	500,9	980,2

untuk sektor yang tidak jelas batasannya yaitu sebesar minus Rp502,3 miliar maksudnya adalah penjualan barang bekas oleh rumah tangga, jadi uangnya bukan keluar tapi masuk.

Struktur permintaan antara terbesar selain sektor kegiatan yang tidak jelas batasannya yaitu sektor tanaman padi (97,5 persen). Sebagaimana diketahui padi ini harus diolah dulu menjadi beras agar bisa dikonsumsi. Berikutnya adalah sektor kehutanan yaitu sebesar 84,2 persen.

Sedangkan permintaan akhir terbesar adalah sektor pemerintahan umum dan pertahanan yaitu sebesar 96,8 persen, diikuti oleh sektor bangunan yaitu sebesar 91,5 persen. Sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk sektor kegiatan yang tidak jelas batasannya adalah minus 82,3 persen, hal ini merupakan penjualan barang bekas oleh rumah tangga

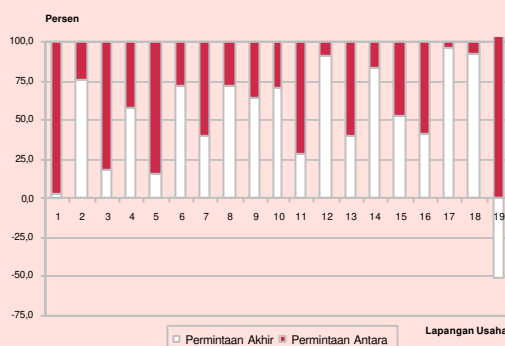


Keterangan : Kode Lihat Tabel 3.13.4

**Grafik 3.13.9**  
**Struktur Input Menurut Jenis Input dan Menurut**  
**Lapangan Usaha Tahun 2000**

**Tabel 3.13.5**  
**Jumlah Alokasi Output Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2000 (Miliar Rupiah)**

Kode	Sektor/Lapangan Usaha	Permintaan Antara	Permintaan Akhir	Total Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi	55 451,1	1 399,0	56 850,1
2	Tanaman bahan makanan lainnya	16 320,5	52 943,0	69 263,5
3	Tanaman pertanian lainnya	39 824,1	9 307,6	49 131,7
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	30 587,6	42 683,2	73 270,8
5	Kehutanan	16 884,9	3 154,1	20 039,0
6	Perikanan	10 685,4	28 195,6	38 881,0
7	Pertambangan dan penggalian	117 399,1	79 416,0	196 815,2
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	82 673,3	219 927,5	302 600,8
9	Industri lainnya	230 631,8	408 669,1	639 300,8
10	Pengilangan minyak bumi	31 778,4	78 771,3	110 549,7
11	Listrik, gas dan air bersih	21 948,1	8 689,6	30 637,7
12	Bangunan	19 287,2	208 389,9	227 677,1
13	Perdagangan	178 801,0	121 684,5	300 485,5
14	Restoran dan hotel	15 986,4	79 742,3	95 728,8
15	Pengangkutan dan komunikasi	70 529,1	80 743,1	151 272,2
16	Lembaga Keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan	94 228,7	67 125,3	161 353,9
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	2 221,4	67 326,9	69 548,4
18	Jasa-jasa	8 310,7	98 403,1	106 713,8
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	1 482,5	- 502,3	980,2



**Grafik 3.13.10**  
**Struktur Permintaan Antara dan Permintaan Akhir**  
**terhadap Jumlah Output Tahun 2000**





**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN**  
**ORGANISASI DAN AKTIVITAS BPS**

## ORGANISASI DAN AKTIVITAS BPS

### KELEMBAGAAN

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan.

### Visi

Terwujudnya informasi statistik yang terpercaya sebagai tulang punggung informasi nasional dan daerah.

### Misi

- Menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

### Tugas

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

- pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

- penyelenggaraan statistik dasar;
- koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
- pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
- penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

### Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi, BPS mempunyai kewenangan:

- penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- penetapan sistem informasi di bidangnya;
- penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
  - penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

### Susunan Organisasi

Susunan organisasi BPS terdiri dari:

- Kepala;
- Sekretaris Utama;
- Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- Deputi Bidang Statistik Sosial;
- Deputi Bidang Statistik Ekonomi;
- Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- Inspektorat.



### Perwakilan BPS di Daerah

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa untuk menjamin kemandirian dan obyektivitas BPS dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis statistik dasar, BPS mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal.

Dewasa ini kantor Perwakilan BPS di daerah dari 33 provinsi, sudah ada 30 BPS provinsi dan 3 BPS provinsi masih dalam proses pembentukan. Sedangkan untuk kantor BPS kabupaten/kota dari 440 kabupaten/kota, sudah ada 353 BPS kabupaten/kota dan 87 BPS kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan.

Hasil kegiatan statistik dasar yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPS di daerah selain disampaikan ke BPS juga disajikan dalam bentuk publikasi daerah untuk kepentingan perencanaan daerah setempat yaitu publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) Provinsi, DDA Kabupaten/Kota, DDA Kecamatan, dan berbagai publikasi indikator sosial dan ekonomi.

### Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang statistik, Pemerintah telah menerbitkan Keppres Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BPS.

Pembinaan teknis akademik STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STIS secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala BPS. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Ilmu Statistik yang ada sebelumnya diintegrasikan ke dalam STIS.

### Sumber Daya Manusia

Pegawai BPS yang ada di tingkat Pusat dan Daerah per Juli 2005 sebanyak 11.559 yang terdiri dari 555 golongan IV, 8.178 golongan III, 2.795 golongan II, dan 31 golongan I. Dari tingkat pendidikan pegawai BPS sebanyak 179 SD, 150 SMP, 6.431 SLA, 528 DIII, 3.954 S1, 296 S2, dan 21 S3.

### Perangkat Lunak Kelembagaan

Dalam menjalankan tugasnya, BPS didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan kelembagaan BPS merupakan Lembaga Pemerintah NonDepartemen, mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja BPS.

Perangkat lunak kelembagaan BPS dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- c. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
- d. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
- e. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
- f. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
- g. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- h. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

### KERJA SAMA DAN KOORDINASI STATISTIK

Kemudahan memperoleh informasi menjadikan BPS lebih dikenal oleh masyarakat baik dalam negeri maupun masyarakat internasional. BPS sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan

statistik pada skala nasional maupun daerah dan mempunyai aparat vertikal di daerah, menjadi tumpuan berbagai pihak untuk menggalang kerja sama dan berkoordinasi di bidang kegiatan statistik. Pihak-pihak yang menggalang kerja sama dan berkoordinasi tidak terbatas pada lembaga pemerintah dan masyarakat umum di dalam negeri, namun juga lembaga pemerintah dan masyarakat internasional. Kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas BPS, baik dalam hal sumber daya manusia, alih teknologi, maupun peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

#### **Kerja sama Pelaksanaan Kegiatan Statistik**

Kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan statistik meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan pertukaran statistik. Dengan kerja sama tersebut mempunyai dampak positif sehingga terjadi keterpaduan metode, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran serta menghindari adanya duplikasi pengumpulan data. Berbagai kerja sama telah berlanjut, sehingga kegiatan kerja sama ini menjadi kegiatan berkala baik bulanan, triwulanan maupun tahunan sekaligus dengan pengkajian dan analisisnya serta meningkatkan penggunaan catatan administrasi dari instansi lain. Pertemuan berkala diadakan guna penyempurnaan dan pengembangan data statistik antara lain melalui rapat interdepartemental.

#### **Kerjasama Pembinaan Staf/Karyawan**

Pembinaan staf/karyawan merupakan program BPS yang terus menerus dilaksanakan baik untuk BPS sendiri, instansi lain, maupun masyarakat luas secara langsung maupun tidak langsung. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik (Pusdiklat) BPS merupakan sarana utama untuk dapat menghasilkan tenaga yang terdidik di bidang statistik. Pusdiklat BPS telah mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain guna meningkatkan kemampuan staf/karyawan di bidang statistik. Untuk BPS sendiri peningkatan

kemampuan tidak hanya diperoleh dari Pusdiklat tersebut, namun masih dibutuhkan kerjasama dengan instansi, universitas, lembaga pendidikan tinggi lainnya, serta lembaga internasional di dalam dan di luar negeri.

#### **Koordinasi Statistik**

Dengan terkoordinasinya informasi statistik membuka jalan untuk koordinasi berbagai kegiatan statistik termasuk keterpaduan metode, konsep, definisi, klasifikasinya, dan ukuran-ukuran. Kebutuhan data statistik yang semakin luas, akurat, dan tepat waktu merupakan tantangan bagi BPS untuk terus menerus berupaya meningkatkan fungsi koordinasi di bidang statistik dengan berbagai instansi/lembaga yang terkait. BPS sebagai pusat informasi statistik diharapkan mampu melaksanakan :

- penyerasian perencanaan kegiatan statistik;
- keterpaduan penyediaan kerangka sampel dan penggunaan metode sampling;
- penggunaan metode pencacahan yang tepat guna;
- penggunaan teknik pengolahan yang mutakhir;
- pembakuan konsep, definisi, dan klasifikasi;
- penyesuaian dan persiapan data.

#### **SEJARAH KELEMBAGAAN BPS**

##### **Masa Pemerintahan Hindia Belanda**

Lembaga yang menangani kegiatan statistik didirikan pada bulan Februari 1920 oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (*Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel*) di Bogor dengan tugas mengolah dan mempublikasikan data statistik.

Pada tanggal 24 September 1924, pusat kegiatan statistik ini dipindahkan ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor voor de Statistiek* (CKS). Kegiatannya diutamakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Produk perundang-undangan pada masa ini adalah *Volkstelling Ordonnantie* 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang mengatur sensus penduduk dan *Statistiek Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Nomor 508) tentang

kegiatan perstatistikan. Pada tahun 1930 lembaga ini mengerjakan suatu kegiatan monumental, yaitu sensus penduduk yang pertama dilakukan di Indonesia.

### Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa Pemerintah Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1942-1945, mereka mengaktifkan kembali kegiatan statistik yang terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang/militer. Kantor Statistik di masa Pemerintahan Jepang ini bernaung di bawah Gubernur Militer (*Gunseikanbu*) dengan nama *Shomubu Chosasisu Gunseikanbu*.

### Masa Kemerdekaan Periode 1945 - 1965

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kegiatan statistik tidak lagi di bawah *Shomubu Chosasisu Gunseikanbu* tetapi diganti dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kemakmuran Nomor 219/S.C. tanggal 12 Juni 1950, KAPPURI diubah namanya menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) yang kegiatannya berada di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44 tanggal 1 Maret 1952, KPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M, tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian, yaitu *Afdeling A* merupakan Bagian Riset dan *Afdeling B* merupakan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha. Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dengan tanggung jawab dan wewenangnya berada di bawah Perdana Menteri.

Pada tahun 1960, telah diundangkan dua undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai pengganti *Volkstelling Ordonnantie* 1930 (*Staatsblad* 1930 Nomor 128) dan UU Nomor 7 Tahun

1960 tentang Statistik yang diundangkan pada tanggal 26 September 1960 sebagai pengganti *Statistiek Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1934 Nomor 508).

Sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958, tanggal 16 Januari 1958 tentang pemberian tugas kepada BPS untuk menyelenggarakan pekerjaan persiapan sensus penduduk, maka berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960, BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama setelah kemerdekaan yang dilaksanakan pada tahun 1961.

Dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 1961 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1960, di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur dan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kantor Bupati/Walikota. Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk.

Untuk lebih meningkatkan peran BPS, Pemerintah melalui Keppres Nomor 47 Tahun 1964 menetapkan Susunan dan Organisasi BPS yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 1964. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965, tanggal 19 Februari 1965, bahwa Bagian Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Cabang BPS dengan nama Kantor Sensus dan Statistik Daerah.

### Periode 1966 - 1997

Memasuki tahun 1966 untuk menunjang tugas BPS seperti sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi, Pemerintah mengundang tiga buah Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian yang diundangkan pada tanggal 21 Januari 1983, dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 1985.

Pemerintah telah mengundang PP Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi BPS pada tanggal 29 Mei 1968 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS pada

tanggal 20 Pebruari 1980. Dua belas tahun kemudian PP Nomor 6 Tahun 1980 disempurnakan dengan PP Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 1992. Sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 2 Tahun 1992 ini, ditetapkan Keppres Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 1992.

Dengan perkembangan akan kebutuhan data statistik yang pesat, maka UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang diundangkan pada tanggal 19 Mei 1997. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

### Periode 1998 - 2005

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 16 Tahun 1997, Pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik pada tanggal 26 Mei 1999, yang merupakan pengganti dari PP Nomor 21 Tahun 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983, dan PP Nomor 29 Tahun 1985. Nomenklatur kelembagaan disesuaikan dari Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Keppres Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Keppres yang mengatur organisasi BPS diganti dengan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen dan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen.

Kemudian Keppres Nomor 166 Tahun 2000 diganti dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Begitu juga dengan Keppres Nomor 178 Tahun 2000 diganti dengan Keppres Nomor 110 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005.

Sebagai pelaksanaan Keppres tersebut diterbitkan Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah yang lebih rinci.

### KEGIATAN PENGUMPULAN DATA Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Semasa pemerintahan Hindia Belanda kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh *Centraal Kantoor Voor de Statistiek* (CKS) terutama ditujukan untuk melayani kepentingan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan statistik dititikberatkan pada pengelolaan statistik perdagangan internasional yang bertumpu pada statistik ekspor dan impor, statistik perdagangan antarpulau, dan statistik perkebunan besar yang disertai dengan statistik tentang upah buruh. Kegiatan statistik lain yang dilaksanakan antara



lain statistik kendaraan bermotor, statistik koperasi bumi putra, statistik pertanian rakyat, statistik pelelangan ikan, statistik harga dan indeks, statistik sewa rumah, statistik pajak, statistik kerajinan dan industri, statistik pendidikan, statistik demografi, dan statistik kriminalitas.

Pada tahun 1930 CKS melaksanakan sensus penduduk yang pertama. Sensus penduduk ini belum dapat dikategorikan sebagai suatu sensus dalam arti modern, karena pencacahan hanya diadakan di Pulau Jawa dan tidak dilakukan secara serentak. Kuesioner yang digunakan masih sangat sederhana dengan pengolahan secara manual.

### Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang, CKS atau KPS diganti namanya menjadi *Chosaisitsu Gunseikanbu*. Kegiatan statistik masa ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan militer guna menghadapi Perang Dunia II. Suasana perang pada masa itu sangat mempengaruhi kegiatan statistik, sehingga berbagai pengumpulan data statistik tidak dapat dilakukan dengan baik.

### Masa Kemerdekaan Periode 1945 - 1965

Setelah kemerdekaan, sistem statistik yang digunakan KPS masih mengadopsi sistem kolonial Hindia Belanda meskipun dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Statistik yang mendapat prioritas adalah statistik ekspor dan impor, statistik perdagangan antarpulau, serta statistik perkebunan besar dan upah buruhnya. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik tersebut dihimpun dalam data perekonomian yang disebut statistik *konjungtur*.

Statistik produksi padi dan palawija masih berdasar pada uji petik panen yang dilaksanakan di petak percobaan yang permanen. Statistik industri yang menggunakan *mailing system* mempunyai tingkat *nonrespons* yang tinggi, karena banyak perusahaan yang enggan membantu mengisi kuesioner yang dikirim kepada mereka. Data statistik kependudukan hanya berdasarkan dari hasil sensus penduduk tahun 1930 dilengkapi dengan hasil laporan semesteran registrasi

penduduk yang berasal dari catatan administrasi di desa/kelurahan. Sedangkan data statistik lainnya sepenuhnya berasal dari data sekunder.

Pada tahun 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS). Pada masa ini BPS mulai melakukan pembaruan sistem statistik yang dikembangkan dengan diperkenalkannya teknik statistik modern dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Untuk mengembangkan berbagai metode dan teknik statistik untuk pertama kalinya BPS mendapat bantuan dari PBB berupa tenaga ahli dan sarana penunjang. Tujuan kegiatan statistik tidak lagi untuk keperluan pemerintah semata, namun juga untuk kebutuhan dunia usaha dan masyarakat umum.

Penghitungan statistik pendapatan nasional telah diperkenalkan sejak tahun 1960, meskipun dengan format yang sederhana dan mutu data yang belum memadai, BPS telah berhasil menyusun angka statistik pendapatan nasional secara berkala setiap tahun.

Pada masa ini mulai diperkenalkan sensus modern yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu Sensus Penduduk 1961. Dalam sensus penduduk tersebut, untuk pertama kali desa/kelurahan di Indonesia dikelompokkan menurut daerah kota (*urban*) dan desa (*rural*). Setiap desa/kelurahan dibagi menjadi unit pencacahan (*enumeration unit*) yang disebut "*Primary Sampling Unit (PSU)*" yang selanjutnya disebut blok sensus.

Sensus Penduduk 1961 juga telah menerapkan pendekatan gabungan antara konsep sensus *de jure* dan sensus *de facto* dengan harapan hasilnya akan mendekati kondisi sebenarnya. Namun dalam pelaksanaan banyak kendala yang dihadapi karena keadaan perekonomian yang kurang baik, sehingga hasil sensus tidak dapat diolah seluruhnya. Dari semula direncanakan 10 persen dokumen hasil pencacahan, karakteristik rinci akan diolah BPS dengan mesin pengolah dan sisanya diolah di Kantor Sensus dan Statistik Daerah di provinsi secara manual. Namun dengan keterbatasan dana, publikasi angka sementara hanya didasarkan pada satu persen sampel.

Pada tahun 1963 dilaksanakan sensus pertanian untuk pertama kali sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan data statistik di sektor pertanian yang lengkap dan menyeluruh dengan sasaran utama perusahaan pertanian dan rumah tangga pertanian. Selain menjadi *bench mark* hasil sensus pertanian juga dimanfaatkan sebagai kerangka sampel berbagai survei pertanian dan sensus pertanian berikutnya. Dalam rangka Sensus Pertanian 1963, berhasil dibuat sketsa peta statistik yang berupa sketsa peta kabupaten/kota dan kecamatan. Sketsa peta kabupaten/kota memuat batas-batas kecamatan, sedangkan sketsa peta kecamatan memuat batas-batas desa/kelurahan.

Statistik pertanian mengalami perubahan total terutama dalam penghitungan produksi padi dan palawija. Apabila sebelumnya penghitungan hasil per hektar dilakukan melalui panen pada petak baku permanen, maka pada periode ini diperkenalkan cara baru dengan mengambil sampel ubinan yang dipilih secara acak dari petak-petak tanaman yang akan dipanen. Pada tahun 1963 dilakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian untuk memperbaiki dan mengembangkan statistik perusahaan peternakan dan perikanan.

Pada tahun 1963, BPS memperkenalkan suatu survei tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang kemudian dikenal dengan nama Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Keterangan inti yang dikumpulkan pada survei ini adalah tentang ciri-ciri demografi, sehingga perkembangan karakteristik ini sejak Sensus Penduduk 1961 dapat diikuti. Keterangan pokok lainnya yang dikumpulkan adalah mengenai pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga di samping tentang keadaan sosial lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan data statistik industri yang mutakhir dan lengkap, maka pada tahun 1964 dilaksanakan sensus industri dengan menggunakan kerangka hasil bentukan Sensus Penduduk 1961. Metode pencacahan dilakukan dengan cara mengirim petugas untuk wawancara langsung. Metode pencacahan yang digunakan pada sensus industri ini

diadopsi untuk melaksanakan survei-survei industri selanjutnya.

### Periode 1966–1973

Dalam periode ini penghitungan indeks harga disempurnakan dengan menggunakan diagram timbangan yang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1966. Penyempurnaan dan pengembangan berbagai kegiatan statistik untuk meningkatkan mutu data yang dihasilkan serta mempercepat proses pengolahan terus dikembangkan. Pada tahun 1971 untuk kedua kalinya setelah kemerdekaan dilaksanakan sensus penduduk. Dalam persiapan Sensus Penduduk 1971, dilakukan kembali penggambaran sketsa peta seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1963. Pembuatan sketsa peta wilayah yang dilakukan pada tahun 1971 tidak hanya dibuat sampai pada tingkat desa, namun sudah dapat dibuat sampai pada tingkat blok sensus (daerah pencacahan).

Hasil Sensus Penduduk 1971 ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan sensus sebelumnya, baik dari kualitas data maupun kecepatan penyajian datanya. Selain sebagai *bench mark* data statistik sosial dan kependudukan hasil sensus penduduk ini juga dimanfaatkan sebagai kerangka sampel untuk kegiatan sensus maupun survei.

Pada tahun 1973 dilaksanakan sensus pertanian yang merupakan sensus pertanian ke dua setelah kemerdekaan. Berbagai penyempurnaan dilakukan berdasarkan pengalaman sensus sebelumnya baik dari rancangan kuesioner, konsep, definisi, ukuran-ukuran, maupun metode pencacahannya namun keterbandingan dengan data hasil Sensus Pertanian 1963 tetap dijaga. Hasil sensus ini selain digunakan sebagai kerangka sampel dalam kegiatan survei-survei pertanian, juga digunakan sebagai acuan dasar dalam perencanaan maupun evaluasi hasil kegiatan statistik pertanian.

Statistik sosial yang semula sebagian besar didasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan oleh instansi lain mulai dibenahi dengan memperbaiki

metode pengumpulan data di instansi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971 maupun Susenas, maka statistik sosial memiliki data dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Pada tahun 1969 BPS bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan statistik tanaman perkebunan, terutama yang menyangkut statistik perusahaan perkebunan. Selain teknik ubinan untuk menghitung produksi tanaman padi dan palawija, statistik pertanian lainnya juga disempurnakan dan dikembangkan seperti statistik hortikultura, statistik peternakan dan perunggasan, serta statistik perikanan.

Penyempurnaan dan pengembangan statistik industri juga dilakukan untuk statistik pertambangan, statistik energi, dan statistik konstruksi. Namun kegiatan ini masih terbatas pada statistik yang menyangkut perusahaan-perusahaan yang berskala besar.

Jenis statistik yang juga disempurnakan dan dikembangkan adalah statistik harga yang mencakup harga produsen, harga perdagangan besar, dan harga konsumen. Penyempurnaan statistik harga konsumen terutama untuk mendukung percepatan penghitungan tingkat inflasi. Sistem pengolahan data untuk ekspor dan impor disempurnakan, agar informasi mengenai perdagangan luar negeri dapat disajikan setiap bulan. Statistik perhubungan, jasa, dan keuangan juga disempurnakan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data yang semakin meningkat.

Penghitungan pendapatan nasional sudah semakin baik dengan melibatkan cakupan data yang lebih luas dan lengkap serta pemilihan metode penghitungan yang lebih tepat. Demikian pula dengan penghitungan pendapatan regional, beberapa provinsi telah berhasil melakukan kerja sama dengan Bappeda dan universitas setempat.

### **Periode 1974-1979**

Sejalan dengan titik berat pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang diletakkan pada bidang ekonomi, perbaikan dan perluasan berbagai statistik

ekonomi terus dilanjutkan di samping statistik sosial dan kependudukan. Untuk pengembangan berbagai metode dan teknik statistik, BPS kembali mendapat bantuan yang cukup besar dari PBB.

Untuk melihat peranan sektor industri dalam perekonomian, maka untuk kedua kalinya pada tahun 1974 dilaksanakan sensus industri. Sensus ini mencakup seluruh kegiatan sektor industri baik yang berskala besar, sedang, kecil, maupun industri/kerajinan rumah tangga. Merujuk pada pengalaman Sensus Industri 1964, maka berbagai perbaikan dan penyempurnaan dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas data yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan sensus ini dilakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan perusahaan dan usaha.

Dalam selang waktu sensus penduduk yang berjarak sepuluh tahun, diyakini akan terjadi perubahan pola kependudukan karena adanya berbagai kebijakan pada tahun-tahun antara dua sensus. Untuk menyempurnakan data kependudukan ini dan menjembatani antara dua sensus, pada tahun 1975 untuk pertama kalinya dilaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) yang sampelnya lebih kecil dari sensus penduduk tetapi lebih besar dari survei biasa. Hasil Supas 1975 digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan jumlah penduduk menurut berbagai karakteristik sehingga dapat digunakan untuk memperbarui data kependudukan yang dihasilkan dari sensus penduduk sebelumnya, termasuk penyempurnaan berbagai proyeksi yang berkaitan dengan angka penduduk.

Secara bertahap penyempurnaan dan pengembangan statistik tetap dilakukan, antara lain di bidang statistik sosial, pertanian, pertambangan, energi, harga produsen, harga perdagangan besar, ekspor dan impor, perhubungan, jasa, dan jasa keuangan. Di bidang statistik pertanian, pada tahun 1975 dilakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Departemen Pertanian, dalam rangka menyempurnakan dan mengembangkan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura, baik untuk statistik perusahaan maupun usaha rumah tangga.

Di bidang statistik makro, penghitungan pendapatan regional telah berhasil dilaksanakan di seluruh provinsi, sehingga mampu mendukung perumusan kebijaksanaan di tingkat daerah. Demikian juga untuk pertama kalinya Tabel Input-Output Indonesia 1971 berhasil disusun, sehingga memperkaya informasi yang bersifat lintas sektoral.

Untuk pertama kalinya pada tahun 1976 dilaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyediaan informasi dan karakteristik yang lebih luas mengenai angkatan kerja di Indonesia. Selain dari itu pada tahun 1977, untuk pertama kalinya juga dilaksanakan sensus konstruksi. Dari hasil sensus ini dapat diketahui peranan sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional maupun ciri-ciri perusahaan/usaha yang bergerak di bidang konstruksi.

Diagram timbangan untuk penghitungan Indeks Harga Konsumen yang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1966 dirasakan sudah tidak memadai lagi, maka pada tahun 1977 dilaksanakan kembali survei biaya hidup. Apabila pada SBH 1966 sampelnya hanya mencakup kota Jakarta, maka SBH 1977 sampelnya meliputi 17 ibukota provinsi. Dengan metode yang telah disempurnakan serta cakupan yang lebih luas, diagram timbangan yang digunakan dalam penghitungan indeks dapat dikatakan lebih baik.

#### Periode 1979 - 1984

Penyempurnaan dan pengembangan statistik di berbagai sektor dan bidang terus dilanjutkan, di samping upaya menyediakan jenis-jenis statistik baru untuk memenuhi kebutuhan data yang semakin berkembang. Dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 1980, wilayah pencacahan dan blok sensus dipetakan, begitu pula dengan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Hasil sensus ini selanjutnya digunakan sebagai kerangka dalam kegiatan Sensus Pertanian 1983 maupun survei-survei lainnya, di samping datanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan analisis sosial dan kependudukan.

Sensus Penduduk 1980 dilaksanakan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode Sensus Penduduk 1971. Kuesioner mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan data yang terus berkembang. Blok sensus tetap digunakan sebagai unit pencacahan, sedangkan konsep klasifikasi kota dan desa lebih disempurnakan. Untuk pertama kalinya pada sensus penduduk ini diperkenalkan konsep wilayah pencacahan (wilcah).

Pada tahun 1983 dilaksanakan sensus pertanian. Dengan Sensus Pertanian 1983, maka kebutuhan data statistik pertanian yang lengkap dan menyeluruh dapat dipenuhi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 dan Sensus Pertanian 1983, para pengguna data mempunyai peluang lebih besar dalam menganalisis perkembangan dan karakteristik penduduk, serta kegiatan ekonomi pertanian di masa depan secara lebih luas dan rinci. Konsep dan definisi disempurnakan, namun tetap dijaga keterbandingannya dengan hasil sensus sebelumnya. Kuesioner dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan data yang semakin beragam.

Susenas lebih diperluas sehingga memungkinkan pengembangan serta aplikasi berbagai metode penghitungan distribusi pendapatan antar golongan rumah tangga dan daerah. Hal ini sejalan dengan masalah yang menonjol pada masa itu yaitu pemerataan pembangunan.

Guna mengantisipasi kebutuhan data yang semakin beragam, pada tahun 1979 dilaksanakan suatu survei yang bersifat *multipurpose survey* yang dikenal dengan sebutan Survei Ganda Sasaran (Surgasar). Survei ini merupakan pengintegrasian beberapa survei seperti Susenas dan berbagai survei kegiatan rumah tangga. Pada tahun 1980 dalam rangka pengembangan statistik pertanian, terutama Statistik Perusahaan Kehutanan dan Statistik Tanaman Padi dan Palawija, dilakukan kerja sama dengan Departemen Kehutanan maupun Badan Pengendali Bimas, Departemen Pertanian. Di bidang statistik sosial, pada tahun yang sama, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikembangkan statistik persekolahan, dan pada tahun



1981 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Pengadilan Negeri, Departemen Kehakiman, maupun dengan Kepolisian, dikembangkan statistik kriminal. Berkaitan dengan pengembangan statistik sosial ini, pada tahun 1982 dan 1983 bekerja sama dengan Departemen Sosial dilaksanakan Survei Penyandang Cacat dan Survei Anak. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan data di sektor pertambangan, pada periode tahun 1979-1983 bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) Departemen Pertambangan dilakukan Survei Penggalian Golongan C (penggalian rakyat).

Dengan semakin meningkatnya peranan industri dalam perekonomian, survei-survei industri lebih diintensifkan untuk menangkap perkembangan dan perubahan struktur usaha industri. Begitu pula dengan statistik sektoral lainnya seperti ekspor dan impor, angkutan dan komunikasi, jasa pariwisata, serta statistik penduduk dan tenaga kerja. Kesemuanya itu digunakan juga untuk menunjang penyempurnaan penghitungan pendapatan nasional dan tabel input-output. Berkaitan dengan statistik makro, untuk pertama kalinya dalam periode ini berhasil disusun Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau *Social Accounting Matrix* (SAM) 1975 yang lebih memperkaya lagi informasi mengenai struktur ekonomi dan distribusi pendapatan masyarakat.

#### **Periode 1984-1989**

Pengembangan dan penyempurnaan statistik merupakan kelanjutan dari kegiatan statistik sebelumnya, untuk menciptakan kerangka landasan bagi penyediaan data statistik yang lebih sempurna, berhasil guna, dan berdaya guna. Untuk pertama kalinya dalam periode ini dilaksanakan Sensus Ekonomi 1986 yang merupakan perluasan dari sensus industri dan sensus konstruksi. Dengan adanya sensus ekonomi ini, sensus industri dan sensus konstruksi tidak diadakan lagi.

Sensus ekonomi merupakan sensus yang lengkap dan menyeluruh yang mencakup seluruh sektor di luar sektor pertanian yaitu sektor pertambangan, industri,

listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, restoran, hotel, angkutan, lembaga keuangan, dan sektor jasa. Dalam pelaksanaannya, sensus ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan perusahaan/usaha dan rumah tangga. Hasil sensus ekonomi ini selain menyediakan kerangka sampel bagi kegiatan survei-survei di luar sektor pertanian juga menyediakan data dasar untuk perencanaan maupun evaluasi perkembangan kegiatan/usaha di luar sektor pertanian. Dalam periode ini untuk kedua kalinya dilaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) pada tahun 1985. Hasil Supas ini, selain untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan antara sensus penduduk tahun 1980 dan 1990, juga untuk memperbaiki proyeksi penduduk yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Sensus Penduduk 1980.

Di bidang perangkat statistik mikro, *Social Accounting Matrix* berhasil disusun untuk kedua kalinya, yaitu untuk tahun 1980. Penyusunan pendapatan nasional terus disempurnakan dengan lebih memanfaatkan data sektoral yang sudah semakin lengkap, demikian juga dengan penyusunan pendapatan regional. Di samping itu perangkat statistik lainnya yang terus dikembangkan adalah neraca bahan makanan, indikator kesejahteraan rakyat, dan indikator ekonomi yang diterbitkan secara berkala.

Perbaikan dan pengembangan data sektoral terus dilakukan seperti statistik sosial dan kependudukan melalui Susenas dan Sakernas, maupun statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, harga dan keuangan, ekspor, impor, perhubungan, dan pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan data statistik sosial, pada tahun 1985-1987 bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, UNICEF, dan Bank Dunia dilakukan pengumpulan data tentang status gizi balita yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Susenas.

#### **Periode 1989-1994**

Dengan semakin meningkatnya intensitas penggunaan data statistik, kegiatan statistik ditujukan pada penyempurnaan penyusunan berbagai statistik yang telah dihasilkan sebelumnya dan diarahkan untuk

mampu memenuhi kebutuhan permintaan data.

Pada tahun 1990 kembali dilaksanakan sensus penduduk dengan metode yang telah disempurnakan dari metode sensus sebelumnya. Dalam sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 1990 ini, blok sensus tidak lagi digunakan tetapi diganti dengan wilayah pencacahan (*wilcah*). Dalam rangka persiapan sensus penduduk ini, baik *wilcah* maupun wilayah administrasi kembali dibuat sketsa petanya.

Peranan sektor industri dalam PDB pada tahun 1991 untuk pertama kalinya melampaui peranan sektor pertanian. Oleh karenanya pengumpulan data statistik industri semakin disempurnakan, antara lain mengenai cakupannya (*coverage*) dengan melaksanakan pemutakhiran (*up dating*) Direktori Industri Besar dan Sedang setiap tahun.

Untuk keempat kalinya pada tahun 1993 dilaksanakan sensus pertanian dengan beberapa penyempurnaan metode dan kuesioner namun keterbandingan dengan data hasil Sensus Pertanian 1983 tetap dijaga. Pada tahun yang sama, Susenas yang dilaksanakan setiap tahun dengan modul bergantian diperbesar sampelnya, sehingga memungkinkan estimasi pada tingkat kabupaten/kota untuk data pokok tertentu. Hasil Susenas ini dimanfaatkan untuk penghitungan distribusi pendapatan dan data jumlah penduduk miskin yang tengah mendapat perhatian berbagai pihak. Berkaitan dengan jumlah penduduk miskin ini, data hasil Potensi Desa (*Podes*) yang pelaksanaan lapangannya bersamaan dengan sensus penduduk pada tahun 1990, juga dimanfaatkan untuk menentukan jumlah desa miskin di setiap daerah. Kegiatan lain yang berskala besar adalah Survei Biaya Hidup (*SBH*) yang dilaksanakan pada tahun 1989. Hasil *SBH* ini digunakan sebagai dasar penyusunan diagram timbangan yang baru untuk penghitungan indeks harga konsumen. Cakupan *SBH* pada periode ini lebih luas dibandingkan sebelumnya, yaitu mencakup seluruh ibukota provinsi. Dalam rangka mengembangkan dan melengkapi data statistik kependudukan pada tahun 1991 dan 1994 bekerjasama dengan BKKBN, Departemen Kesehatan, Bank Dunia, dan *Macro*

*International Incorporated (MII)*, dilaksanakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (*SDKI*).

Berkaitan dengan masalah kerangka sampel, dalam periode ini berhasil disusun Kerangka Contoh Induk (*KCI*) yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan sampel untuk berbagai kegiatan survei baik yang menggunakan pendekatan rumah tangga maupun perusahaan/usaha. Dengan adanya *KCI* yang terpadu, maka pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dan data yang dihasilkan oleh berbagai jenis kegiatan statistik menjadi terkait dan saling melengkapi.

Di bidang penyusunan perangkat statistik makro, Neraca Arus Dana (*NAD*) untuk pertama kalinya berhasil disusun, bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Hasilnya dimanfaatkan para pengamat dan praktisi ekonomi dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan moneter. Selain itu, Tabel Input-Output dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1985 juga selesai disusun, yang semakin memperkaya sistem data lintas sektoral yang telah ada selama ini. Survei-survei sektoral yang mencakup pertambangan, energi, industri, konstruksi, pariwisata, angkutan, lembaga keuangan, dan jasa juga terus disempurnakan dan diperluas. Hasilnya dipakai pula untuk menyempurnakan penghitungan pendapatan nasional dan penyusunan berbagai indikator perkembangan ekonomi makro. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tentang statistik energi, pada tahun 1990-1993 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi dilakukan survei-survei tentang kebutuhan energi sektor rumah tangga, sektor komersial, dan upaya penghematan energi sektor rumah tangga.

#### **Periode 1994-1997**

Dalam periode ini kegiatan Sensus Pertanian 1993 (*ST93*) masih berlanjut yaitu pencacahan usaha rumah tangga pertanian yang mencakup usaha tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, penangkapan ikan, budi daya ikan, dan kehutanan.

Selain usaha rumah tangga dicacah pula perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian seperti perusahaan perkebunan besar, peternakan, perikanan, kehutanan, tempat pelelangan ikan, dan rumah potong hewan.

Pada tahun 1995 kembali dilaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) guna menjembatani kebutuhan data kependudukan antara Sensus Penduduk 1990 dan Sensus Penduduk 2000, di samping untuk memperbaiki proyeksi penduduk yang dihitung berdasarkan Sensus Penduduk 1990. Dalam periode ini Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) diintegrasikan dengan Supas sehingga pada tahun anggaran yang sama tidak terjadi dua kegiatan pengumpulan data sejenis.

Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali, tenggang waktunya diperpendek menjadi lima tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun 1996. Mengawali kegiatan survei ini pada tahun 1995 dilaksanakan pilot studi yang dimaksudkan untuk uji coba baik metode maupun kuesioner.

Kegiatan Susenas, analisis desa tertinggal maupun kegiatan lain di bidang statistik makro seperti penghitungan pendapatan nasional, pendapatan regional, penyusunan tabel input-output, sistem neraca sosial ekonomi, dan neraca yang lain tetap dilaksanakan dengan berbagai pengembangan dan penyempurnaan. Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 (SE96), dilakukan pengembangan suatu Kerangka Contoh Induk (KCI) untuk berbagai survei dengan pendekatan perusahaan yang dihimpun melalui penyusunan direktori terpadu perusahaan. Direktori yang digunakan sebagai KCI perusahaan ini memuat berbagai informasi pokok perusahaan-perusahaan yang umumnya berskala besar. KCI perusahaan ini dimanfaatkan sebagai kerangka sampel dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 maupun untuk berbagai survei sektoral yang berskala lebih kecil. Sensus Ekonomi 1996 ini masih berlanjut pada tahun 1997, yaitu pencacahan secara lengkap perusahaan kelompok PD (perusahaan direktori), penyusunan direktori perusahaan PD, pascaevaluasi pencacahan usaha kelompok PND/URT

(perusahaan non direktori/usaha rumah tangga), dan finalisasi pengolahan hasil pencacahan PND/URT.

### Periode 1998–2005

Dengan semakin meningkatnya permintaan dan ragam data dari berbagai pihak, BPS terus melakukan kegiatan penyempurnaan dan pengembangan statistik. Intensitas BPS dan Perwakilan BPS terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan data. Data statistik pertanian, industri, harga dan keuangan, perdagangan dan jasa, demografi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan statistik lainnya semaksimal mungkin terpenuhi. Tujuan untuk menyediakan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di bidang sosial dan ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah terus ditingkatkan. Kegiatan penyelenggaraan statistik untuk menyediakan data statistik sosial antara lain Sensus Penduduk 2000, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Upah, Kompilasi Registrasi Penduduk, dan sebagainya. Di samping itu, dilaksanakan kegiatan baru seperti Survei Struktur Upah, Survei Anak yang Bekerja, dan Penyusunan Statistik Sektor Informal. Guna memenuhi kebutuhan pengguna data, dibuat analisis yang relevan dari setiap kegiatan atau berbagai kegiatan yang berhubungan.

Sensus Penduduk 2000 (SP2000) yang merupakan sensus penduduk kelima sejak Indonesia merdeka, merupakan kegiatan statistik yang ditujukan untuk memperoleh data statistik dasar di bidang kependudukan yang menyeluruh dan dapat disajikan pada wilayah administrasi terkecil yaitu pada tingkat desa/kelurahan. SP2000 ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data statistik dasar di bidang kependudukan baik pada skala nasional maupun daerah. Data kependudukan ini merupakan dasar perencanaan bagi berbagai bidang pembangunan. Pelaksanaan lapangan SP2000 ini dilakukan pada tahun 2000 dan pada tahun 2001 kegiatan dilanjutkan dengan pengolahan serta analisis data.

Untuk memenuhi kebutuhan data di bidang ekonomi, BPS menyelenggarakan berbagai sensus dan survei maupun kompilasi produk administrasi. Survei-survei yang berskala besar yang dilaksanakan antara lain Survei Pertanian, Survei Industri, Survei Biaya Hidup, Survei Harga-harga, Survei Usaha Terintegrasi, penyusunan Statistik Ekspor dan Impor, penyusunan Statistik Wisatawan Asing, penyusunan Produk Domestik Bruto dan Neraca Nasional lainnya, penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dan Neraca Regional lainnya, dan sebagainya.

Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat akan data statistik dasar di bidang pertanian diselenggarakan oleh BPS. Berdasarkan ST2003 ini diperoleh populasi jumlah usaha maupun populasi komoditas di sektor pertanian beserta karakteristiknya. ST2003 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2001 hingga 2005 dengan puncak kegiatan pelaksanaan lapangan pada tahun 2003.

Sehubungan dengan mulai berlakunya otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan sejak Januari 2001, maka pemerintah daerah harus lebih bertanggung jawab terhadap pembangunan wilayahnya masing-masing. Untuk perencanaan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah memerlukan dukungan data statistik ekonomi maupun statistik sosial yang rinci dan spesifik, karena kebutuhan data suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Suatu jenis data yang diperlukan oleh suatu daerah tertentu kemungkinan daerah lain tidak memerlukan. Demikian pula sebaliknya sehingga data tersebut sifatnya khusus untuk daerah yang bersangkutan saja. Untuk itu, perwakilan BPS di daerah harus siap mengantisipasi kebutuhan data yang sifatnya spesifik tersebut dengan meningkatkan kinerjanya guna mendukung ketersediaan data, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain.

Dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum pada tahun 2004 yang merupakan keharusan konstitusional dan bagian dari komitmen bangsa untuk mewujudkan masyarakat demokratis, membutuhkan

persiapan dan keterlibatan berbagai pihak dalam setiap tahap dan proses.

BPS melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemilihan umum yang bersifat independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab serta Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan untuk melakukan Pendaftaran Pemilih dan Pencatatan Penduduk Berkelanjutan (P4B).

Dalam tahun 2005 BPS menyelenggarakan kegiatan besar antara lain Potensi Desa, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) yang keempat kalinya. Supas 2005 dirancang khusus untuk mendapatkan data-data kependudukan yang meliputi bidang demografi, seperti migrasi, fertilitas dan mortalitas, riwayat kelahiran serta kematian anak; menyediakan data di bidang ketenagakerjaan yang mencakup angkatan kerja, jam kerja, lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Selain dari itu Supas menyediakan data mengenai sosial budaya mencakup partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, bahasa dan kondisi tempat tinggal.

## **KEGIATAN PENGOLAHAN DATA**

### **Periode 1945 - 1968**

Pada awal kemerdekaan hingga tahun 1959 berbagai pengolahan data yang dilakukan BPS masih secara manual menggunakan alat hitung sederhana yang disebut swipoa (*abacus*). Meskipun sederhana, namun alat tersebut sudah cukup memadai, mengingat beban pengolahan belum terlalu besar.

Pengolahan data pada masa itu terutama ditujukan untuk menyusun statistik ekspor dan impor, indeks harga, statistik perdagangan antarpulau, statistik perkebunan besar dengan upah buruhnya, serta berbagai statistik lainnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pengolahan data, di BPS juga mengalami perubahan. Alat hitung swipoa secara berangsur-angsur diganti dengan alat hitung mekanis "*Facit*". Kedua alat hitung



ini digunakan terutama untuk pengolahan data yang sederhana. Untuk data yang berskala besar seperti statistik ekspor dan impor pada tahun 1960 sudah mulai diolah dengan komputer generasi pertama yaitu “*Remington Rand*”. Komputer yang pertama kali dimiliki oleh BPS ini terdiri atas mesin pons (*punching machine*), mesin sortir (*sorting machine*), dan mesin tabulasi (*tabulating machine*).

Mesin pons digunakan untuk memindahkan data dari dokumen ke kartu pons, yang hasilnya dalam bentuk lubang-lubang pada kartu pons. Mesin sortir digunakan untuk memilah-milah kartu-kartu yang sudah berisi data sesuai dengan pengelompokan data yang diinginkan. Sedangkan mesin tabulasi digunakan untuk membuat tabel-tabel berdasarkan masukan data dari kartu pons sesuai dengan program yang dibuat. Pada awalnya, mesin tabulasi ini hanya bisa digunakan untuk menghasilkan jenis tabel tertentu saja. Secara bertahap mesin-mesin tabulasi ini diganti dengan jenis mesin tabulasi yang memungkinkan menghasilkan bermacam-macam tabel, meskipun pembuatan program masih harus dilakukan oleh perusahaan yang menjadi agen komputer tersebut.

Dalam rangka mempercepat pengolahan hasil Sensus Penduduk 1961, BPS memperoleh bantuan dari PBB berupa tenaga ahli pengolahan beserta seperangkat komputer UNIVAC 1004. Jenis komputer ini juga masih menggunakan kartu, namun program tabulasi sudah dapat dibuat sendiri di BPS.

Dalam periode ini untuk mengolah hasil Sensus Pertanian 1963, BPS menggunakan komputer UNIVAC 1050 yang juga masih menggunakan kartu. Jenis komputer ini mempunyai kapasitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer jenis UNIVAC 1004 dan sudah menggunakan *System Stored Program* dengan bahasa PAL (*Program Assembly Language*) meskipun masih *single processing system*.

#### Periode 1969–1979

Dengan perkembangan teknologi alat hitung sederhana baik manual maupun yang mekanis berangsur-angsur diganti dengan mesin hitung

elektronik. Meskipun pengolahan data yang berskala besar sudah menggunakan komputer, namun alat hitung elektronik yang biasa disebut sebagai kalkulator tetap digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan.

Dengan jenis komputer yang baru yaitu ICL 1900 yang diadakan dalam rangka Sensus Penduduk 1971, maka berbagai pengolahan data hasil berbagai sensus, survei, maupun hasil pengumpulan data statistik lainnya dapat diselesaikan lebih cepat. Selain dimanfaatkan untuk mengolah data hasil Sensus Penduduk 1971, komputer ICL 1900 ini juga digunakan untuk mengolah data hasil Sensus Pertanian 1973, Sensus Konstruksi 1977, Susenas, statistik ekspor dan impor, statistik industri, Tabel Input-Output 1971, dan sebagainya. Pada tahun 1975, komputer ICL 1900 mengalami pengembangan yaitu menjadi ICL 1903. Generasi ICL terbaru ini mempunyai kapasitas dan kecepatan proses yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

#### Periode 1979–1989

Perkembangan kegiatan pengumpulan data pada periode ini sudah sedemikian pesat, sehingga beban pengolahan di BPS menjadi semakin berat. Pada tahun 1980 komputer ICL 1903 diganti dengan generasi yang lebih baru yaitu ICL 2904. Komputer jenis ini tidak hanya dipasang di BPS melainkan juga di Kantor Statistik Provinsi Jawa Timur, dengan demikian sebagian pengolahan mulai dialihkan ke Surabaya, seperti pengolahan hasil pencacahan PODES 1980, guna mengurangi beban pengolahan di kantor pusat. Selain menggunakan komputer jenis ICL, pada akhir tahun 1979, BPS juga mempunyai komputer NEC ACOS-500, sehingga dapat dikatakan tahun 1980 di BPS merupakan era *multi system*. Kedua komputer ini dimanfaatkan untuk mengolah data hasil Survei Biaya Hidup 1978 Sensus Penduduk 1980, Sensus Pertanian 1983, Survei Penduduk Antar Sensus 1985, maupun hasil kegiatan statistik lainnya.

Pada tahun 1988, kembali BPS mengganti komputer NEC ACOS-500 dengan kapasitas yang lebih besar yaitu NEC ACOS-1520. Bersamaan dengan penggantian

ini, maka dalam rangka mengurangi beban pengolahan di kantor pusat dan mempercepat proses pengolahan, BPS mulai memasang komputer di Kantor Statistik Provinsi (KSP).

Komputer ICL 2904 di KSP Jawa Timur diganti dengan ICL-3930, sedangkan di KSP Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan dipasang komputer NEC ASTRA 370 VS. Untuk provinsi lainnya dipasang tiga set personal komputer (PC) APC IV *Powermate*, yang dimaksudkan untuk pengolahan sederhana bagi kepentingan daerah.

#### **Periode 1990-1997**

Untuk pertama kalinya pada periode ini pengolahan data dilakukan di daerah. Diawali dengan pengolahan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 1990, yang dilakukan di seluruh BPS Provinsi. Dalam kaitan ini maka hasil pencacahan sampel di olah di BPS dan BPS Provinsi tipe A.

Pada tahun 1991 di setiap BPS Kabupaten/Kota dilengkapi dengan personal komputer. Dengan adanya perangkat pengolahan data ini, maka sebagian pengolahan berskala kecil mulai dilimpahkan ke BPS Kabupaten/Kota sedangkan pengolahan berskala besar tetap dilaksanakan di BPS.

Penyusunan direktori terpadu perusahaan, dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 1996 pengolahannya sudah mulai dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Begitu pula pengolahan hasil pencacahan PODES-inti yang digunakan dalam penentuan desa tertinggal. BPS Provinsi melakukan pengolahan data inti Susenas, hasil Sensus Pertanian 1993, statistik hotel, penghitungan PDRB, maupun hasil kegiatan statistik lainnya.

#### **Periode 1998-2005**

Dengan berjalannya waktu BPS selalu mengikuti perkembangan teknologi komputer, sehingga pengolahan hasil kegiatan statistik semakin cepat begitupun dengan penyajiannya. Selain dari itu dengan kemajuan teknologi, untuk mempercepat proses pengolahan hasil kegiatan statistik, BPS telah menggunakan *scanner* untuk pengolahan data

khususnya untuk kegiatan-kegiatan besar, seperti Sensus Penduduk 2000, Pendaftaran Pemilih dan Pencatatan Penduduk Berkelanjutan (P4B) 2003, dan Sensus Pertanian 2003.

Dalam rangka mendukung program otonomisasi dan guna memenuhi kebutuhan data di daerah, maka secara bertahap pengolahan dialihkan ke daerah hingga tingkat kabupaten/kota. Sistem pengolahan data terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan kegiatan pengumpulan data dan teknologi komputer.

#### **KEGIATAN ANALISIS DAN DISEMINASI DATA**

Kegiatan analisis dan diseminasi data merupakan kegiatan statistik yang lebih dekat pada kebutuhan konsumen data. Kegiatan ini mulai dikembangkan setelah tahun 60-an sejalan dengan pengembangan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.

##### **Kegiatan Analisis Data Periode 1945-1968**

Pada periode ini, kegiatan analisis data belum dilakukan sepenuhnya. Kegiatan yang lebih banyak dilakukan adalah menerapkan metode dan teknik statistik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik, dan mengupayakan pengembangan ragam statistik. Beberapa publikasi telah dibuat yaitu Buku Saku Statistik (*Indonesia Statistical Pocket Book*) tahun 1956, Pendapatan Nasional tahun 1958, dan Statistik Angkutan tahun 1961. Upaya perbaikan kualitas data dan penganekaragaman data yang disajikan terus dilakukan secara bertahap dan mulai dilengkapi dengan analisis deskriptif.

##### **Periode 1969–1979**

Analisis dan pengembangan terus ditingkatkan dan lebih diarahkan untuk menyediakan data statistik yang dapat mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan. Pada periode ini telah diterbitkan ragam data yang baru seperti statistik pertanian, statistik industri, input-output, demografi, dan statistik sosial. Peningkatan dan perbaikan data statistik pertanian, industri, harga, dan statistik dasar lainnya. Kegiatan

analisis dan pengembangan dimaksudkan untuk mengevaluasi kelemahan dan mencari upaya dalam melengkapi kebutuhan statistik pada setiap sektor dalam pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini tampak dari bidang kegiatan statistik yang dihimpun dalam publikasi yang mencakup kegiatan ekonomi, sosial, dan penghitungan kemiskinan. Pada periode ini telah dilakukan analisis untuk pertama kali tentang penghitungan penduduk miskin dan pemerataan pendapatan.

### Periode 1979–1997

Kebutuhan akan data statistik dirasakan semakin meningkat, terutama mengenai keragaman jenis data yang diperlukan. Secara implisit, kegiatan pengembangan dan pembakuan konsep serta definisi mulai dikelola dengan baik. Kegiatan analisis dan pengembangan statistik diusahakan pula untuk menunjang dan menyediakan data yang dapat mendukung perencanaan pembangunan pemerintah. Beberapa hasil analisis, pembakuan konsep, metodologi, dan klasifikasi telah dapat disajikan. Analisis yang menonjol adalah penghitungan penduduk miskin tahun 1984 serta analisis investasi, pekerja sektor informal, dan analisis jabatan. Pembakuan klasifikasi yang dihasilkan adalah Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI), dan Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI).

### Periode 1998-2005

Era globalisasi menjadi tantangan baru yang menuntut agar keberadaan analisis statistik dan penyebaran informasi yang andal harus diciptakan untuk kebutuhan internal dan eksternal. Peningkatan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akan tercermin dari hasil kegiatan dan analisis statistiknya. Beberapa hasil kegiatan statistik telah disusun analisisnya antara lain analisis biaya pendidikan, analisis statistik kesehatan masyarakat, analisis statistik perumahan, analisis statistik pendapatan tenaga kerja, analisis indek pembangunan manusia, dan sebagainya.

### Kegiatan Diseminasi Data

Ada tiga bentuk diseminasi informasi yang digunakan oleh BPS, yaitu diseminasi melalui publikasi, diseminasi dalam media komputer, dan diseminasi dalam bentuk akses langsung melalui komputer. Diseminasi data dalam bentuk publikasi telah dilakukan sejak BPS berdiri dan pada umumnya berisi tabel-tabel statistik sebagai hasil pengolahan data sensus, survei, maupun pemanfaatan hasil administrasi. Teknik penyiapan publikasi ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Diseminasi data dalam media komputer mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 1970, sedangkan diseminasi data dalam bentuk layanan langsung melalui komputer baru mulai dilakukan pada tahun 1995.

Pada dekade 80-an BPS membentuk Dewan Publikasi (*Publishing Board*) yang bertugas untuk mengembangkan, membina, dan menilai naskah publikasi BPS sebelum diterbitkan, antara lain pembuatan format, tata letak, ukuran, dan perwajahan. Pada tahun 1984 BPS resmi menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Dengan masuknya BPS menjadi anggota IKAPI, banyak hal-hal diperoleh mengenai seluk-beluk penerbitan yang sangat bermanfaat bagi BPS. Di antara manfaat yang diperoleh BPS adalah keikutsertaan BPS dalam kursus grafika dan pameran buku. Selain itu, beberapa publikasi BPS dicantumkan dalam daftar buku yang diterbitkan oleh IKAPI.

Hal yang penting lainnya untuk dicatat ialah bahwa pada tahun 1985 penomoran buku secara internasional mulai digunakan pada publikasi BPS. Jenis penomoran tersebut ada dua, yaitu *International Standard Serial Number* (ISSN) untuk publikasi yang terbit berkala dan *International Standard Book Number* (ISBN) untuk publikasi yang terbit tidak berkala. Sejak itu publikasi BPS dikenal di dunia internasional.

Dari tahun ke tahun, jenis publikasi yang diterbitkan BPS menunjukkan peningkatan, meskipun dalam dekade 50 dan 60-an peningkatannya tidak begitu tinggi. Pada waktu itu publikasi yang diterbitkan pada umumnya adalah hasil pemanfaatan catatan

administrasi, yang meliputi statistik ekspor, statistik impor, statistik angkutan antar pulau, statistik angkutan kereta api, dan statistik *konjungtur* yang merupakan cikalbatal dari publikasi bulanan Indikator Ekonomi dan Buletin Ringkas. Publikasi pada periode ini umumnya masih dalam bentuk *stensilan*.

Pada permulaan tahun 1970-an, dan berlanjut terus sampai saat ini, jenis publikasi BPS menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan data statistik yang makin beragam jenisnya. BPS telah berusaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut. Sensus-sensus yang diselenggarakan dari dekade 70-an telah dapat menghasilkan puluhan publikasi. Kualitas publikasi meningkat dari jenis *stensilan* menjadi cetak tangan (*hand press*), *offset*, bahkan mampu menyajikan cetak warna penuh (*full color*). Kemudian, berbagai macam survei yang dilaksanakan semenjak tahun 1970 dan pemanfaatan catatan administrasi telah dapat menghasilkan beberapa publikasi yang diterbitkan secara berkala. Dalam dekade tahun 70-an pula, yaitu pada tahun 1976, BPS berhasil menerbitkan untuk pertama kalinya publikasi Statistik Tahunan yang sampai sekarang diterbitkan setiap tahun dengan judul Statistik Indonesia. Buku Statistik Indonesia tersebut melengkapi publikasi Buku Saku (*Pocket Book*) yang sudah diterbitkan semenjak jaman kolonial. Saat ini setiap satuan kerja teknis di BPS telah dapat menghasilkan publikasi statistik yang diterbitkan secara berkala baik tahunan, triwulanan, maupun bulanan.

Bagi para pengguna data yang akan mengadakan analisis lebih lanjut dari data yang dikumpulkan oleh BPS, informasi statistik yang disajikan dalam bentuk publikasi masih belum cukup. Mereka masih menghendaki data dasar berupa kumpulan (*file*) data individu yang sudah bebas dari kesalahan (*clean*) agar dapat diolah lagi sesuai dengan keinginan mereka.

*Clean file* data dasar ini dimungkinkan penyediaannya sejak awal tahun 70-an, ketika BPS mulai dilengkapi dengan peralatan komputer yang bekerja dengan media *magnetic tape*. Sejak saat itu *clean file* data dasar dari sensus dan survei yang dilaksanakan

pada dekade 70-an mulai dapat disediakan dalam bentuk media *magnetic tape*. Meskipun *clean file* data individu dapat diberikan kepada pihak luar, namun prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) individu tetap dijaga. Caranya ialah dengan mengganti identitas responden dengan nomor/kode responden. Permintaan data dalam bentuk *clean file* data dasar atau mikrodata umumnya datang dari universitas, lembaga penelitian, dan badan internasional.

Mulai tahun 1990 penyediaan *clean file* dapat dilayani dalam bentuk disket. Selain *magnetic tape*, BPS juga melayani permintaan naskah publikasi dan tabel-tabel statistik dalam disket. Tahun itu juga BPS memperkenalkan penggunaan *optical disc*, sehingga penyediaan *clean file* data dasar juga dapat dilayani dalam bentuk *optical disc*. *Optical disc* sebagai media tempat menyimpan file mempunyai beberapa keunggulan dibanding disket, yaitu dapat menyimpan jauh lebih banyak informasi dan lebih aman.

Usaha untuk membuat sistem diseminasi dengan akses langsung yang sudah dirintis semenjak tahun 1983, yaitu ketika BPS memasang komputer induk yang canggih pada waktu itu. Akses langsung ke komputer induk BPS dilakukan dalam bentuk *Remote Job Entry* (RJE). Instansi yang menggunakan pada waktu itu adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Kemudian pada tahun 1989 dengan adanya penggantian komputer induk yang ada di BPS, bentuk RJE dikembangkan menjadi *online access*. Dalam sistem ini para pengguna data yang mempunyai terminal dan dihubungkan ke komputer induk BPS oleh jaringan komunikasi umum, selain dapat menggunakan komputer induk, juga dapat mengakses secara langsung file-file data yang tersedia di komputeinduk.

Mulai tahun 1995 penyiapan informasi statistik untuk akses langsung dikembangkan pada peralatan teknologi informasi yang berbasis PC. Informasi statistik yang tersedia di BPS dikemas dalam bentuk *database* yang disimpan dalam *server* induk, disebut sebagai Sistem Informasi Statistik-BPS (SIS-BPS). Berkat adanya perangkat lunak komunikasi data yang ada saat ini dan kualitas jaringan telepon yang semakin baik,



SIS-BPS dapat diakses langsung oleh pengguna data melalui internet, yang selanjutnya disebut BPS-Net.

Sejak awal tahun 1994, BPS mulai dilengkapi dengan peralatan Sistem Informasi Geografis (SIG) berupa satu perangkat PC yang terjalin dalam suatu *Local Area Network* (LAN) yang terdiri atas satu *server* dengan lima buah *workstation*, satu buah *plotter*, dua buah peralatan digitasi dan satu buah *printer* PaintJet ukuran A3. Perangkat keras tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak SIG yaitu ArcInfo, AutoCAD, dan ArcView.

Perlengkapan SIG tersebut digunakan oleh BPS untuk memindahkan sketsa peta wilayah ke dalam media

komputer dengan jalan mendigitasi (*digitized*) batas-batas sketsa yang ada. Pemindahan sketsa peta dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di seluruh Indonesia ke dalam media komputer pun dilakukan.

Peta dasar yang sudah didigitasi (*digitized base map*) yang direkam dalam media komputer (*hard disc* atau disket) dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk penyajian data yang bersifat *spatial*. Peta dasar yang terekam di dalam media komputer digabung dengan atribut-atribut berupa informasi statistik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan, atau desa/kelurahan.



**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN**  
**1.1 PERKEMBANGAN WILAYAH**  
**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 1995

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Istimewa Aceh	55 392	2,89	8	2	142	5 638
Sumatera Utara	70 787	3,69	11	6	243	5 234
Sumatera Barat	49 778	2,59	8	6	103	2 180
Riau	94 561	4,93	5	2	78	1 280
Jambi	44 800	2,33	5	1	54	1 138
Sumatera Selatan	103 688	5,40	8	2	101	2 790
Bengkulu	21 168	1,10	3	1	31	1 137
Lampung	33 307	1,74	4	1	77	1 987
<b>Sumatera</b>	<b>473 481</b>	<b>24,67</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>829</b>	<b>21 384</b>
D.K.I. Jakarta	590	0,03		5	43	265
Jawa Barat	46 300	2,41	20	5	526	7 148
Jawa Tengah	34 206	1,78	29	6	532	8 513
D.I. Yogyakarta	3 169	0,16	4	1	73	438
Jawa Timur	47 921	2,50	29	8	609	8 427
<b>Jawa</b>	<b>132 186</b>	<b>6,88</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>1 783</b>	<b>24 791</b>
Bali	5 561	0,29	8	1	51	644
Nusa Tenggara Barat	20 177	1,05	6	1	59	597
Nusa Tenggara Timur	47 876	2,49	12		114	1 892
Timor Timur	14 874	0,77	13		62	442
<b>Bali, Nusa Tenggara &amp; TimTim</b>	<b>88 488</b>	<b>4,60</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>286</b>	<b>3 575</b>
Kalimantan Barat	146 760	7,65	6	1	108	1 395
Kalimantan Tengah	152 600	7,95	5	1	82	1 215
Kalimantan Selatan	37 660	1,96	9	1	109	2 169
Kalimantan Timur	202 440	10,55	4	2	73	1 118
<b>Kalimantan</b>	<b>539 460</b>	<b>28,11</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>372</b>	<b>5 897</b>
Sulawesi Utara	19 023	0,99	4	3	85	1 442
Sulawesi Tengah	69 726	3,63	4	1	64	1 395
Sulawesi Selatan	72 781	3,79	21	2	185	2 708
Sulawesi Tenggara	27 686	1,44	4	1	64	858
<b>Sulawesi</b>	<b>189 216</b>	<b>9,85</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>398</b>	<b>6 403</b>
Maluku	74 505	3,88	4	1	56	1 518
Irian Jaya	421 981	21,99	9	1	120	2 284
<b>Maluku &amp; Irian Jaya</b>	<b>496 486</b>	<b>25,87</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>176</b>	<b>3 802</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 919 317</b>	<b>100,00</b>	<b>243</b>	<b>62</b>	<b>3 844</b>	<b>65 852</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1993

<sup>2</sup> Berdasarkan laporan BPS propinsi sampai dengan Desember 1995

Sumber : Departemen Dalam Negeri



## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 1996

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Istimewa Aceh	55 390	2,86	8	2	142	5 559
Sumatera Utara	71 680	3,70	11	6	252	5 242
Sumatera Barat	42 898	2,21	8	6	114	2 180
Riau	94 561	4,88	5	2	91	1 316
Jambi	53 436	2,76	5	1	60	1 148
Sumatera Selatan	109 254	5,64	8	2	110	2 868
Bengkulu	19 789	1,02	3	1	31	1 140
Lampung	35 385	1,83	4	1	77	1 992
<b>Sumatera</b>	<b>482 393</b>	<b>24,90</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>877</b>	<b>21 445</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,03		5	43	265
Jawa Barat	43 177	2,23	20	5	529	7 166
Jawa Tengah	32 549	1,68	29	6	533	8 519
D.I. Yogyakarta	3 186	0,16	4	1	75	438
Jawa Timur	47 923	2,47	29	8	615	8 426
<b>Jawa</b>	<b>127 499</b>	<b>6,57</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>1 795</b>	<b>24 814</b>
Bali	5 633	0,29	8	1	51	649
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,04	6	1	61	632
Nusa Tenggara Timur	47 349	2,44	12	1	124	1 892
Timor Timur	14 609	0,75	13		62	442
<b>Bali, Nusa Tenggara &amp; TimTim</b>	<b>87 744</b>	<b>4,52</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>298</b>	<b>3 615</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,58	6	1	124	1 396
Kalimantan Tengah	153 564	7,93	5	1	85	1 207
Kalimantan Selatan	36 535	1,89	9	1	117	2 169
Kalimantan Timur	210 985	10,89	4	2	86	1 118
<b>Kalimantan</b>	<b>547 891</b>	<b>28,29</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>412</b>	<b>5 890</b>
Sulawesi Utara	27 488	1,42	4	3	93	1 443
Sulawesi Tengah	63 689	3,29	4	1	69	1 396
Sulawesi Selatan	62 483	3,23	21	2	185	2 878
Sulawesi Tenggara	38 140	1,97	4	1	64	878
<b>Sulawesi</b>	<b>191 800</b>	<b>9,91</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>411</b>	<b>6 595</b>
Maluku	77 871	4,02	4	1	56	1 518
Irian Jaya	421 981	21,79	9	1	173	2 281
<b>Maluku &amp; Irian Jaya</b>	<b>499 852</b>	<b>25,81</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>229</b>	<b>3 799</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 937 179</b>	<b>100,00</b>	<b>243</b>	<b>63</b>	<b>4 022</b>	<b>66 158</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 195 Tahun 1996 tanggal 28 November 1996

<sup>2</sup> Berdasarkan Persiapan Sensus Ekonomi 1996 (Juni 1996)

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 1997

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Istimewa Aceh	55 390	2,86	9	2	142	5 596
Sumatera Utara	71 680	3,70	11	6	252	5 269
Sumatera Barat	42 898	2,21	8	6	114	2 180
Riau	94 561	4,88	5	2	91	1 350
Jambi	53 436	2,76	5	1	60	1 148
Sumatera Selatan	109 254	5,64	8	2	110	2 881
Bengkulu	19 789	1,02	3	1	31	1 141
Lampung	35 385	1,83	6	1	82	1 995
<b>Sumatera</b>	<b>482 393</b>	<b>24,90</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>882</b>	<b>21 560</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,03		5	43	265
Jawa Barat	43 177	2,23	20	6	529	7 169
Jawa Tengah	32 549	1,68	29	6	533	8 530
D.I. Yogyakarta	3 186	0,16	4	1	75	438
Jawa Timur	47 923	2,47	29	8	615	8 426
<b>Jawa</b>	<b>127 499</b>	<b>6,57</b>	<b>82</b>	<b>26</b>	<b>1 795</b>	<b>24 828</b>
Bali	5 633	0,29	8	1	51	649
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,04	6	1	61	636
Nusa Tenggara Timur	47 349	2,44	12	1	124	1 892
Timor Timur	14 609	0,75	13		62	442
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>87 744</b>	<b>4,52</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>298</b>	<b>3 619</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,58	6	1	124	1 402
Kalimantan Tengah	153 564	7,93	5	1	85	1 234
Kalimantan Selatan	36 535	1,89	9	1	117	2 169
Kalimantan Timur	210 985	10,89	4	3	87	1 193
<b>Kalimantan</b>	<b>547 891</b>	<b>28,29</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>413</b>	<b>5 998</b>
Sulawesi Utara	27 488	1,42	4	3	93	1 481
Sulawesi Tengah	63 689	3,29	4	1	69	1 400
Sulawesi Selatan	62 483	3,23	21	2	185	2 914
Sulawesi Tenggara	38 140	1,97	4	1	64	891
<b>Sulawesi</b>	<b>191 800</b>	<b>9,91</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>411</b>	<b>6 686</b>
Maluku	77 871	4,02	4	1	56	1 559
Irian Jaya	421 981	21,78	12	1	173	2 295
<b>Maluku &amp; Irian Jaya</b>	<b>499 852</b>	<b>25,80</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>229</b>	<b>3 854</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 937 179</b>	<b>100,00</b>	<b>249</b>	<b>65</b>	<b>4 028</b>	<b>66 545</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998 tanggal 8 Januari 1998

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan Daerah sampai dengan Desember 1997

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 1998

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Istimewa Aceh	55 390	2,86	9	2	142	5 601
Sumatera Utara	71 680	3,70	11	6	252	5 274
Sumatera Barat	42 898	2,21	8	6	114	2 180
Riau	94 561	4,88	5	2	91	1 351
Jambi	53 436	2,76	5	1	60	1 149
Sumatera Selatan	109 254	5,64	8	2	110	2 882
Bengkulu	19 789	1,02	3	1	31	1 159
Lampung	35 385	1,83	6	1	82	1 995
<b>Sumatera</b>	<b>482 393</b>	<b>24,90</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>882</b>	<b>21 591</b>
D.K.I. Jakarta	0 664	0,03		5	43	265
Jawa Barat	43 177	2,23	20	6	529	7 193
Jawa Tengah	32 549	1,68	29	6	533	8 536
D.I. Yogyakarta	3 186	0,16	4	1	75	438
Jawa Timur	47 923	2,47	29	8	615	8 426
<b>Jawa</b>	<b>127 499</b>	<b>6,57</b>	<b>82</b>	<b>26</b>	<b>1.795</b>	<b>24 858</b>
Bali	5 633	0,29	8	1	51	658
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,04	6	1	61	660
Nusa Tenggara Timur	47 349	2,44	12	1	124	2 516
Timor Timur	14 609	0,75	13		62	442
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>87 744</b>	<b>4,52</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>298</b>	<b>4 276</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,58	6	1	124	1 403
Kalimantan Tengah	153 564	7,93	5	1	85	1 236
Kalimantan Selatan	36 535	1,89	9	1	117	2 169
Kalimantan Timur	210 985	10,89	4	3	87	1 247
<b>Kalimantan</b>	<b>547 891</b>	<b>28,29</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>413</b>	<b>6 055</b>
Sulawesi Utara	27 488	1,42	4	3	93	1 482
Sulawesi Tengah	63 689	3,29	4	1	69	1 412
Sulawesi Selatan	62 483	3,23	21	2	185	3 023
Sulawesi Tenggara	38 140	1,97	4	1	64	1 357
<b>Sulawesi</b>	<b>191 800</b>	<b>9,91</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>411</b>	<b>7 274</b>
Maluku	77 871	4,02	4	1	56	1 559
Irian Jaya	421 981	21,78	12	1	173	2 312
<b>Maluku &amp; Irian Jaya</b>	<b>499 852</b>	<b>25,80</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>229</b>	<b>3 871</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 937 179</b>	<b>100,00</b>	<b>249</b>	<b>65</b>	<b>4 028</b>	<b>67 925</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998 tanggal 8 Januari 1998

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan Daerah sampai dengan Juni 1998

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 1999

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Istimewa Aceh	55 390	2,88	11	2	147	5 596
Sumatera Utara	71 680	3,73	13	6	265	5 331
Sumatera Barat	42 898	2,23	9	6	120	2 176
Riau	94 561	4,92	12	3	96	1 465
Jambi	53 436	2,78	9	1	60	1 161
Sumatera Selatan	109 254	5,68	8	2	110	2 972
Bengkulu	19 789	1,03	3	1	32	1 162
Lampung	35 385	1,84	8	2	88	2 066
<b>Sumatera</b>	<b>482 393</b>	<b>25,09</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>918</b>	<b>21 929</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,03		5	43	0 265
Jawa Barat	43 177	2,25	20	8	543	7 223
Jawa Tengah	32 549	1,69	29	6	534	8 543
D.I. Yogyakarta	3 186	0,17	4	1	75	0 438
Jawa Timur	47 923	2,49	29	8	624	8 452
<b>Jawa</b>	<b>127 499</b>	<b>6,63</b>	<b>82</b>	<b>28</b>	<b>1 819</b>	<b>24 921</b>
Bali	5 633	0,29	8	1	53	0 678
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,05	6	1	62	0 703
Nusa Tenggara Timur	47 349	2,46	13	1	124	2 515
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>73 135</b>	<b>3,80</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>239</b>	<b>3 896</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,64	8	1	127	1 433
Kalimantan Tengah	153 564	7,99	5	1	85	1 330
Kalimantan Selatan	36 535	1,90	9	2	117	2 227
Kalimantan Timur	210 985	10,97	8	4	88	1 268
<b>Kalimantan</b>	<b>547 891</b>	<b>28,50</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>417</b>	<b>6 258</b>
Sulawesi Utara	27 488	1,43	5	3	93	1 526
Sulawesi Tengah	63 689	3,31	7	1	69	1 436
Sulawesi Selatan	62 483	3,25	22	1	194	3 124
Sulawesi Tenggara	38 140	1,98	4	2	66	1 547
<b>Sulawesi</b>	<b>191 800</b>	<b>9,97</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>422</b>	<b>7 633</b>
Maluku	77 871	4,05	6	2	56	1 569
Irian Jaya	421 981	21,95	12	2	173	2 859
<b>Maluku &amp; Irian Jaya</b>	<b>499 852</b>	<b>26,00</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>229</b>	<b>4 428</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 922 570</b>	<b>100,00</b>	<b>268</b>	<b>73</b>	<b>4 044</b>	<b>69 065</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998 tanggal 8 Januari 1998

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan Daerah sampai dengan Desember 1999

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri



## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2000

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Istimewa Aceh	55 390	2,88	11	2	146	5 596
Sumatera Utara	71 680	3,73	13	6	265	5 343
Sumatera Barat	42 898	2,23	9	6	120	2 176
Riau	94 561	4,92	12	3	96	1 468
Jambi	53 436	2,78	9	1	60	1 161
Sumatera Selatan	109 254	5,68	8	2	111	2 972
Bengkulu	19 789	1,03	3	1	32	1 162
Lampung	35 385	1,84	8	2	88	2 072
<b>Sumatera</b>	<b>482 393</b>	<b>25,09</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>918</b>	<b>21 950</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,03		5	43	265
Jawa Barat	43 177	2,25	20	8	543	7 224
Jawa Tengah	32 549	1,69	29	6	534	8 543
D.I. Yogyakarta	3 186	0,17	4	1	75	438
Jawa Timur	47 923	2,49	29	8	624	8 451
<b>Jawa</b>	<b>127 499</b>	<b>6,63</b>	<b>82</b>	<b>28</b>	<b>1 819</b>	<b>24 921</b>
Bali	5 633	0,29	8	1	53	678
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,05	6	1	62	703
Nusa Tenggara Timur	47 349	2,46	13	1	124	2 515
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>73 135</b>	<b>3,80</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>239</b>	<b>3 896</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,64	8	1	128	1 444
Kalimantan Tengah	153 564	7,99	5	1	85	1 328
Kalimantan Selatan	36 535	1,90	9	2	117	2 153
Kalimantan Timur	210 985	10,97	8	4	88	1 278
<b>Kalimantan</b>	<b>547 891</b>	<b>28,50</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>418</b>	<b>6 203</b>
Sulawesi Utara	27 488	1,43	5	3	93	1 526
Sulawesi Tengah	63 689	3,31	7	1	69	1 436
Sulawesi Selatan	62 483	3,25	22	2	197	3 130
Sulawesi Tenggara	38 140	1,98	4	1	67	1 551
<b>Sulawesi</b>	<b>191 800</b>	<b>9,97</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>426</b>	<b>7 643</b>
Maluku	77 871	4,05	6	2	56	1 569
Irian Jaya	421 981	21,95	12	2	173	2 868
<b>Maluku &amp; Irian Jaya</b>	<b>499 852</b>	<b>26,00</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>229</b>	<b>4 437</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 922 570</b>	<b>100,00</b>	<b>268</b>	<b>73</b>	<b>4 049</b>	<b>69 050</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1998 tanggal 8 Januari 1998

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan BPS propinsi sampai dengan Desember 2000

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2001

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	51 937	2,75	11	4	152	5 596
Sumatera Utara	73 587	3,89	13	7	277	5 337
Sumatera Barat	42 899	2,27	9	6	128	2 086
Riau	94 560	5,00	12	4	138	1 519
Jambi	53 437	2,83	9	1	64	1 161
Sumatera Selatan	93 083	4,92	6	4	93	2 644
Bengkulu	19 789	1,05	3	1	59	1 162
Lampung	35 384	1,87	8	2	155	2 072
Kep. Bangka Belitung	16 171	0,86	2	1	24	305
<b>Sumatera</b>	<b>480 847</b>	<b>25,44</b>	<b>73</b>	<b>30</b>	<b>1 090</b>	<b>21 882</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,04		5	43	265
Jawa Barat	34 597	1,83	16	8	523	5 750
Jawa Tengah	32 549	1,72	29	6	545	8 550
D.I. Yogyakarta	3 186	0,17	4	1	78	438
Jawa Timur	47 922	2,53	29	9	631	8 451
Banten	8 651	0,46	4	2	111	1 476
<b>Jawa</b>	<b>127 569</b>	<b>6,75</b>	<b>82</b>	<b>31</b>	<b>1 931</b>	<b>24 930</b>
Bali	5 633	0,30	8	1	53	682
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,07	6	1	62	703
Nusa Tenggara Timur	47 351	2,50	13	1	124	2 515
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>73 137</b>	<b>3,87</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>239</b>	<b>3 900</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,76	8	2	128	1 433
Kalimantan Tengah	153 564	8,12	5	1	85	1 328
Kalimantan Selatan	43 546	2,30	9	2	118	1 969
Kalimantan Timur	230 277	12,18	8	4	88	1 278
<b>Kalimantan</b>	<b>574 194</b>	<b>30,36</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>419</b>	<b>6 008</b>
Sulawesi Utara	15 273	0,81	3	2	78	1 173
Sulawesi Tengah	63 678	3,36	7	1	69	1 436
Sulawesi Selatan	62 365	3,30	22	2	275	3 130
Sulawesi Tenggara	38 140	2,02	4	2	73	1 551
Gorontalo	12 215	0,65	2	1	21	372
<b>Sulawesi</b>	<b>191 671</b>	<b>10,14</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>516</b>	<b>7 662</b>
Maluku	46 975	2,48	4	1	29	845
Maluku Utara	30 895	1,63	2	1	27	724
Papua	365 466	19,33	12	2	173	2 868
<b>Maluku &amp; Papua</b>	<b>443 336</b>	<b>23,44</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>229</b>	<b>4 437</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 890 754</b>	<b>100,00</b>	<b>268</b>	<b>85</b>	<b>4.424</b>	<b>68 819</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 13 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan BPS propinsi sampai dengan 31 Desember 2001

Sumber : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2002

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	51 937	2,75	16	4	204	5 771
Sumatera Utara	73 587	3,89	13	7	314	5 349
Sumatera Barat	42 899	2,27	9	7	144	2 086
Riau	94 560	5,00	12	4	150	1 622
Jambi	53 437	2,83	9	1	71	1 192
Sumatera Selatan	93 083	4,92	7	4	143	2 699
Bengkulu	19 789	1,05	3	1	60	1 161
Lampung	35 384	1,87	8	2	162	2 140
Kep. Bangka Belitung	16 171	0,86	2	1	36	317
<b>Sumatera</b>	<b>480 847</b>	<b>25,44</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>1 284</b>	<b>22 337</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,04	1	5	44	267
Jawa Barat	34 597	1,83	16	9	547	5 761
Jawa Tengah	32 549	1,72	29	6	560	8 556
D.I. Yogyakarta	3 186	0,17	4	1	78	438
Jawa Timur	47 922	2,53	29	9	641	8 497
Banten	8 651	0,46	4	2	122	1 479
<b>Jawa</b>	<b>127 569</b>	<b>6,75</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>1 992</b>	<b>24 998</b>
Bali	5 633	0,30	8	1	53	686
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,07	6	2	94	737
Nusa Tenggara Timur	47 351	2,50	14	1	171	2 550
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>73 137</b>	<b>3,87</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>318</b>	<b>3 973</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,76	8	2	129	1 751
Kalimantan Tengah	153 564	8,12	13	1	88	1 324
Kalimantan Selatan	43 546	2,30	9	2	119	1 946
Kalimantan Timur	230 277	12,18	9	4	110	1 300
<b>Kalimantan</b>	<b>574 194</b>	<b>30,36</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>446</b>	<b>6 321</b>
Sulawesi Utara	15 273	0,81	4	2	94	1 206
Sulawesi Tengah	63 678	3,36	8	1	76	1 440
Sulawesi Selatan	62 365	3,30	23	3	285	3 072
Sulawesi Tenggara	38 140	2,02	4	2	95	1 564
Gorontalo	12 215	0,65	2	1	32	377
<b>Sulawesi</b>	<b>191 671</b>	<b>10,14</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>582</b>	<b>7 659</b>
Maluku	46 975	2,48	4	1	52	851
Maluku Utara	30 895	1,63	2	1	45	743
Papua	365 466	19,33	26	2	199	3 578
<b>Maluku &amp; Papua</b>	<b>443 336</b>	<b>23,44</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>296</b>	<b>5 172</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1890 754</b>	<b>100,00</b>	<b>302</b>	<b>89</b>	<b>4 918</b>	<b>70 460</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 13 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan BPS propinsi sampai dengan 31 Desember 2002

Sumber : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2003

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	51 937	2,75	17	4	227	5 947
Sumatera Utara	73 587	3,89	18	7	314	5 349
Sumatera Barat	42 899	2,27	12	7	146	2 086
Riau	94 560	5,00	13	4	156	1 636
Jambi	53 437	2,83	9	1	71	1 192
Sumatera Selatan	93 083	4,92	10	4	147	2 674
Bengkulu	19 789	1,05	8	1	60	1 162
Lampung	35 384	1,87	8	2	162	2 413
Kep. Bangka Belitung	16 171	0,86	6	1	36	318
<b>Sumatera</b>	<b>480 847</b>	<b>25,44</b>	<b>101</b>	<b>31</b>	<b>1 319</b>	<b>22 777</b>
D.K.I. Jakarta	664	0,04	1	5	44	267
Jawa Barat	34 597	1,83	16	9	547	5 761
Jawa Tengah	32 549	1,72	29	6	560	8 556
D.I. Yogyakarta	3 186	0,17	4	1	78	438
Jawa Timur	47 922	2,53	29	9	645	8 464
Banten	8 651	0,46	4	2	122	1 479
<b>Jawa</b>	<b>127 569</b>	<b>6,75</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>1 996</b>	<b>24 965</b>
Bali	5 633	0,30	8	1	55	686
Nusa Tenggara Barat	20 153	1,07	7	2	94	773
Nusa Tenggara Timur	47 351	2,50	15	1	171	2 550
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>73 137</b>	<b>3,87</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>320</b>	<b>4 009</b>
Kalimantan Barat	146 807	7,76	10	2	137	1 751
Kalimantan Tengah	153 564	8,12	13	1	88	1 330
Kalimantan Selatan	43 546	2,30	11	2	119	1 946
Kalimantan Timur	230 277	12,18	9	4	110	1 299
<b>Kalimantan</b>	<b>574 194</b>	<b>30,36</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>454</b>	<b>6 326</b>
Sulawesi Utara	15 273	0,81	6	3	97	1 204
Sulawesi Tengah	63 678	3,36	9	1	83	1 440
Sulawesi Selatan	62 365	3,30	25	3	285	3 084
Sulawesi Tenggara	38 140	2,02	8	2	112	1 563
Gorontalo	12 215	0,65	4	1	32	377
<b>Sulawesi</b>	<b>191 671</b>	<b>10,14</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>609</b>	<b>7 668</b>
Maluku	46 975	2,48	7	1	52	851
Maluku Utara	30 895	1,63	6	2	45	747
Papua	365 466	19,33	27	2	199	3 578
<b>Maluku &amp; Papua</b>	<b>443 336</b>	<b>23,44</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>296</b>	<b>5 176</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 890 754</b>	<b>100,00</b>	<b>349</b>	<b>91</b>	<b>4 994</b>	<b>70 921</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 13 Tahun 2002 tanggal 27 Maret 2002

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan BPS propinsi sampai dengan 31 Desember 2003

Sumber : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah



## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2004

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	56 616	3,04	17	4	226	6 003
Sumatera Utara	72 067	3,89	18	7	318	5 386
Sumatera Barat	42 225	2,27	12	7	147	892
Riau	91 524	4,72	9	2	124	1 387
Jambi	45 348	2,44	9	1	87	1 230
Sumatera Selatan	60 236	3,24	10	4	153	2 746
Bengkulu	19 795	1,06	8	1	60	1 162
Lampung	37 735	2,03	8	2	162	2 140
Kep. Bangka Belitung	16 424	0,88	6	1	36	319
Kep. Riau	8 084	0,43	4	2	40	245
<b>Sumatera</b>	<b>450 053</b>	<b>24,01</b>	<b>101</b>	<b>31</b>	<b>1 353</b>	<b>21 510</b>
D.K.I. Jakarta	740	0,04	1	5	44	267
Jawa Barat	36 925	1,98	16	9	560	5 761
Jawa Tengah	32 800	1,76	29	6	564	8 562
D.I. Yogyakarta	3 133	0,17	4	1	78	438
Jawa Timur	46 690	2,51	29	9	650	8 472
Banten	9 019	0,48	4	2	132	1 483
<b>Jawa</b>	<b>129 306</b>	<b>6,95</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>2 028</b>	<b>24 983</b>
Bali	5 446	0,29	8	1	55	686
Nusa Tenggara Barat	19 709	1,06	7	2	94	759
Nusa Tenggara Timur	46 138	2,48	15	1	192	2 557
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>71 292</b>	<b>3,83</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>341</b>	<b>4 002</b>
Kalimantan Barat	120 114	6,46	10	2	141	1 438
Kalimantan Tengah	153 564	8,25	13	1	91	1 348
Kalimantan Selatan	38 884	2,09	11	2	123	1 946
Kalimantan Timur	194 849	10,47	9	4	116	1 332
<b>Kalimantan</b>	<b>507 412</b>	<b>27,27</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>471</b>	<b>6 064</b>
Sulawesi Utara	15 364	0,75	6	3	106	1 204
Sulawesi Tengah	68 090	3,66	9	1	97	1 440
Sulawesi Selatan	46 116	2,48	20	3	243	2 671
Sulawesi Tenggara	37 128	1,98	8	2	105	1 552
Gorontalo	12 165	0,65	4	1	40	450
Sulawesi Barat	16 787	0,90	5	0	44	425
<b>Sulawesi</b>	<b>195 651</b>	<b>10,42</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>635</b>	<b>7 742</b>
Maluku	47 465	2,55	7	1	57	851
Maluku Utara	164 370	2,15	6	2	45	748
Irian Jaya Barat	114 566	6,16	8	1	79	1 124
Papua	311 116	16,66	19	1	146	2 450
<b>Maluku &amp; Papua</b>	<b>637 517</b>	<b>27,51</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>327</b>	<b>5 173</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 991 232</b>	<b>100,00</b>	<b>349</b>	<b>91</b>	<b>5 155</b>	<b>69 474</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 13 Tahun 2002 tanggal 27 Maret 2002  
<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan BPS propinsi sampai dengan 31 Desember 2003

Sumber : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

## Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2005

Provinsi / Pulau	Luas <sup>1</sup> (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Indonesia	Banyaknya kabupaten <sup>2</sup>	Banyaknya kota <sup>2</sup>	Banyaknya kecamatan <sup>2</sup>	Banyaknya desa <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	56 501	3,04	17	4	241	5 965
Sumatera Utara	72 428	3,89	18	7	326	5 459
Sumatera Barat	42 225	2,27	12	7	158	892
Riau	87 844	4,72	9	2	124	1 426
Jambi	45 348	2,44	9	1	87	1 189
Sumatera Selatan	60 303	3,24	10	4	153	2 727
Bengkulu	19 795	1,06	8	1	73	1 194
Lampung	37 735	2,03	8	2	164	2 131
Kep. Bangka Belitung	16 424	0,88	6	1	36	320
Kep. Riau	8 084	0,43	4	2	41	249
<b>Sumatera</b>	<b>446 687</b>	<b>24,01</b>	<b>101</b>	<b>31</b>	<b>1 403</b>	<b>21 552</b>
D.K.I. Jakarta	740	0,04	1	5	44	267
Jawa Barat	36 925	1,98	16	9	560	5 778
Jawa Tengah	32 800	1,76	29	6	564	8 561
D.I. Yogyakarta	3 133	0,17	4	1	78	438
Jawa Timur	46 690	2,51	29	9	654	8 467
Banten	9 019	0,48	4	2	132	1 484
<b>Jawa</b>	<b>129 306</b>	<b>6,95</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>2 032</b>	<b>24 995</b>
Bali	5 449	0,29	8	1	56	691
Nusa Tenggara Barat	19 709	1,06	7	2	100	792
Nusa Tenggara Timur	46 138	2,48	15	1	194	2 599
<b>Bali, Nusa Tenggara</b>	<b>71 296</b>	<b>3,83</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>350</b>	<b>4 082</b>
Kalimantan Barat	120 114	6,46	10	2	149	1 489
Kalimantan Tengah	153 565	8,25	13	1	91	1 348
Kalimantan Selatan	38 884	2,09	11	2	123	1 956
Kalimantan Timur	194 849	10,47	9	4	122	1 378
<b>Kalimantan</b>	<b>507 412</b>	<b>27,27</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>485</b>	<b>6 171</b>
Sulawesi Utara	13 931	0,75	6	3	109	1 204
Sulawesi Tengah	68 090	3,66	9	1	99	1 440
Sulawesi Selatan	46 116	2,48	20	3	244	2 580
Sulawesi Tenggara	36 757	1,98	8	2	117	1 613
Gorontalo	12 165	0,65	4	1	40	450
Sulawesi Barat	16 787	0,90	5	0	44	359
<b>Sulawesi</b>	<b>193 847</b>	<b>10,42</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>653</b>	<b>7 646</b>
Maluku	47 350	2,55	7	1	57	874
Maluku Utara	39 960	2,15	6	2	45	756
Irian Jaya Barat	114 566	6,16	8	1	173	2 587
Papua	309 934	16,66	19	1	79	1 195
<b>Maluku &amp; Papua</b>	<b>511 811</b>	<b>27,51</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>354</b>	<b>5 412</b>
<b>Indonesia</b>	<b>1 860 360</b>	<b>100,00</b>	<b>349</b>	<b>91</b>	<b>5 277</b>	<b>69 858</b>

Catatan : <sup>1</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 18 Tahun 2005 tanggal 28 April 2005

<sup>2</sup> Berdasarkan Laporan BPS propinsi sampai dengan 31 Desember 2004

Sumber : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN**  
**3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI**

## Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	210,4	225,3	788,0	1 856,3	3 950,2	13 928,7	168,4
2. Pertambangan dan Penggalian	14,4	14,0	21,7	113,0	542,9	582,8	5,1
3. Industri Pengolahan	32,6	46,7	107,2	216,9	540,9	1 796,5	26,5
4. Listrik Gas dan Air Minum	1,1	1,2	1,3	3,7	4,8	5,4	0,1
5. B a n g u n a n	7,9	10,6	18,0	57,3	141,5	437,2	3,5
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	55,8	81,6	204,1	479,2	978,7	2 935,6	60,1
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14,5	17,2	34,7	65,8	120,0	518,7	5,6
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,6	15,3	36,6	85,5	193,3	660,8	7,8
9. Jasa-jasa	41,9	58,2	123,5	331,1	661,2	2 844,3	38,8
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>390,2</b>	<b>470,1</b>	<b>1 335,1</b>	<b>3 208,8</b>	<b>7 133,5</b>	<b>23 710,0</b>	<b>315,9</b>

Catatan: Tahun 1960 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960

Tahun 1973' - 1983 menggunakan tahun dasar 1973

Tahun 1983' - 1993 menggunakan tahun dasar 1983

Tahun 1993' - 2000 menggunakan tahun dasar 1993

Tahun 2000' - 2004 menggunakan tahun dasar 2000

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1	19	20	21	22	23	24	25
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4 812,0	5 905,7	6 706,0	8 995,7	11 290,3	13 642,5	15 398,3
2. Pertambangan dan Penggalian	2 930,0	3 599,7	3 869,2	6 979,8	11 672,5	12 970,6	11 707,8
3. Industri Pengolahan	1 453,3	1 816,9	2 184,7	3 310,6	5 287,9	5 821,7	7 680,7
4. Listrik Gas dan Air Minum	98,1	105,6	115,8	148,8	225,1	288,2	380,3
5. B a n g u n a n	812,6	1 023,3	1 242,1	1 789,7	2 523,8	3 117,8	3 507,2
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2 551,9	2 959,0	3 450,2	4 775,1	6 390,9	7 965,7	8 865,1
7. Pengangkutan dan Komunikasi	662,6	820,6	979,6	1 421,5	1 965,3	2 353,2	2 795,2
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	525,4	778,6	1 066,2	1 569,3	1 951,8	2 843,6	3 306,5
9. Jasa-jasa	1 620,8	2 001,3	2 353,6	3 034,9	4 138,1	5 023,7	5 721,5
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>15 466,7</b>	<b>19 010,7</b>	<b>21 967,4</b>	<b>32 025,4</b>	<b>45 445,7</b>	<b>54 027,0</b>	<b>59 362,6</b>



## Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004 (Miliar Rupiah)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>*)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
457,3	1 069,3	1 339,3	1 575,0	1 655,0	1 825,0	2 628,0	2 710,0	3 497,0	4 003,4
22,9	87,1	129,2	172,6	249,0	386,0	617,0	831,0	2 374,0	2 484,8
62,0	178,6	250,7	311,8	356,0	417,0	571,0	650,0	890,0	1 123,7
3,5	9,0	12,6	15,0	17,7	20,0	30,0	30,4	52,0	69,8
14,1	44,6	74,8	100,3	127,9	174,0	262,0	262,0	406,0	589,6
148,9	356,2	475,9	618,6	712,0	912,0	1 350,0	1 118,0	1 775,0	2 103,7
18,5	57,4	76,9	95,8	162,0	182,0	261,0	257,0	442,0	521,2
20,6	52,7	75,7	98,1	119,3	145,0	216,0	226,0	307,0	409,2
100,0	241,8	283,2	352,5	395,0	487,0	670,0	669,0	965,0	1 337,1
<b>847,8</b>	<b>2 096,7</b>	<b>2 718,3</b>	<b>3 339,7</b>	<b>3 793,9</b>	<b>4 548,0</b>	<b>6 605,0</b>	<b>6 753,4</b>	<b>10 708,0</b>	<b>12 642,5</b>

## Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004 (Miliar Rupiah)

1983	1983 <sup>*)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
18 771,5	17 764,7	20 419,7	22 512,9	24 870,9	29 116,0	34 277,9	39 163,9	42 148,7	44 720,8
13 823,6	16 107,4	16 937,6	13 570,8	11 502,8	17 266,8	17 161,8	21 822,5	26 119,0	31 402,6
8 918,0	9 896,4	13 112,9	15 503,4	17 184,7	21 150,4	26 252,4	30 323,3	38 910,2	47 665,5
503,2	313,9	354,2	395,9	647,1	746,9	869,0	1 008,3	1 258,1	1 750,2
4 433,7	4 597,2	4 756,8	5 301,8	5 313,8	6 087,4	7 169,2	8 884,2	10 748,5	12 902,1
10 874,6	11 418,7	13 434,5	15 416,9	17 121,8	21 048,3	24 379,2	28 855,5	32 999,7	36 953,8
3 325,0	4 098,1	5 050,8	6 100,3	6 406,9	7 442,6	8 139,7	9 305,5	10 999,6	13 908,0
3 802,7	4 714,1	5 630,8	6 271,2	7 012,7	8 144,2	9 058,4	10 817,8	13 177,9	16 082,3
6 762,4	8 712,3	10 187,8	11 923,7	12 621,9	13 814,3	14 797,2	17 003,7	19 235,5	22 064,9
<b>71 214,7</b>	<b>77 622,8</b>	<b>89 885,1</b>	<b>96 996,9</b>	<b>102 682,6</b>	<b>124 816,9</b>	<b>142 104,8</b>	<b>167 184,7</b>	<b>195 597,2</b>	<b>227 450,2</b>

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	1992	1993	1993*)	1994	1995	1996
1	36	37	38	39	40	41
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	50 733,1	55 745,5	58 963,4	66 071,5	77 896,2	88 791,8
2. Pertambangan dan Penggalian	29 907,2	30 749,5	31 497,3	33 507,1	40 194,7	46 088,1
3. Industri Pengolahan	56 541,6	67 441,4	73 556,3	89 240,7	109 688,7	136 425,9
4. Listrik Gas dan Air Minum	2 147,7	2 714,3	3 290,2	4 577,1	5 655,4	6 892,6
5. B a n g u n a n	15 305,2	18 139,9	22 512,9	28 016,9	34 451,9	42 024,8
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	42 731,5	49 789,4	55 297,6	63 858,7	75 639,8	87 137,2
7. Pengangkutan dan Komunikasi	17 099,3	20 728,2	23 248,9	27 352,7	30 795,1	34 926,3
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	19 095,6	22 867,2	28 047,8	34 505,6	39 510,4	43 981,9
9. Jasa-jasa	26 323,3	33 842,4	33 361,4	35 089,4	40 681,9	46 299,4
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>259 884,5</b>	<b>302 017,8</b>	<b>329 775,8</b>	<b>382 219,7</b>	<b>454 514,1</b>	<b>532 568,0</b>

## Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004 (Miliar Rupiah)

1997	1998	1999	2000	2000*)	2001	2002	2003*)	2004**)	Trw I 2005***)
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
101 009,4	172 827,6	215 686,7	217 897,9	216 831,4	263 327,9	298 876,8	325 653,7	354 435,3	97 297,1
55 561,7	120 328,6	109 925,4	175 262,5	167 692,2	182 007,8	161 023,8	169 535,6	196 892,4	59 589,7
168 178,0	238 897,0	285 873,9	314 918,4	385 597,9	506 319,6	553 746,6	590 051,3	652 729,5	179 634,0
7 832,4	11 283,1	13 429,0	16 519,3	8 393,8	10 854,8	15 392,0	19 540,9	22 855,4	6 118,8
46 678,8	61 761,6	67 616,2	76 573,4	76 573,4	89 298,9	101 573,5	112 571,3	134 388,1	38 463,5
99 581,9	146 740,1	175 835,4	199 110,4	224 452,5	267 656,1	314 646,7	337 840,5	372 340,0	102 732,6
38 530,9	51 937,2	55 189,6	62 305,6	65 012,2	77 187,6	97 970,3	118 267,3	140 604,2	39 111,3
54 360,3	69 891,7	71 220,2	80 459,9	115 463,1	135 369,8	154 442,2	174 323,6	194 542,2	52 576,1
55 962,0	82 086,8	104 955,3	121 871,4	129 753,8	152 258,0	165 602,8	198 069,3	234 244,4	64 224,8
<b>627 695,5</b>	<b>955 753,5</b>	<b>1 099 731,6</b>	<b>1 264 918,7</b>	<b>1 389 770,3</b>	<b>1 684 280,5</b>	<b>1 863 274,7</b>	<b>2 045 853,5</b>	<b>2 303 031,5</b>	<b>639 747,9</b>

## Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	210,4	213,9	220,9	212,7	223,6	225,3	236,1
2. Pertambangan dan Penggalian	14,4	14,6	15,4	14,9	15,6	16,0	15,4
3. Industri Pengolahan	32,6	36,6	37,1	36,4	35,9	35,6	36,3
4. Listrik Gas dan Air Minum	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7
5. B a n g u n a n	7,9	10,2	8,6	6,5	6,5	7,4	8,4
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	55,8	64,7	64,4	66,2	68,1	67,4	64,5
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14,5	14,5	14,9	15,3	14,8	15,1	15,2
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,6	13,0	12,4	11,6	12,6	12,7	12,1
9. Jasa-jasa	41,9	43,9	45,2	45,7	46,5	48,7	52,2
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>390,2</b>	<b>412,6</b>	<b>420,2</b>	<b>410,8</b>	<b>425,3</b>	<b>429,9</b>	<b>441,9</b>

Catatan: Tahun 1960 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960

Tahun 1973' - 1983 menggunakan tahun dasar 1973

Tahun 1983' - 1993 menggunakan tahun dasar 1983

Tahun 1993' - 2000 menggunakan tahun dasar 1993

Tahun 2000' - 2004 menggunakan tahun dasar 2000

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2 943,7	2 981,3	3 134,8	3 255,6	3 424,9	3 593,5
2. Pertambangan dan Penggalian	952,3	1 070,0	1 040,3	1 046,9	1 034,6	1 069,1
3. Industri Pengolahan	930,0	1 057,7	1 176,5	1 395,3	1 704,6	1 877,8
4. Listrik Gas dan Air Minum	46,3	49,0	53,3	68,6	77,9	89,9
5. B a n g u n a n	384,5	463,8	528,9	562,8	639,3	720,2
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1 350,7	1 438,2	1 530,3	1 681,1	1 851,9	2 042,6
7. Pengangkutan dan Komunikasi	342,6	427,6	490,1	559,8	609,4	676,9
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	326,5	403,4	452,2	485,7	543,6	590,1
9. Jasa-jasa	879,7	979,9	1 064,8	1 109,1	1 283,0	1 394,5
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>8 156,3</b>	<b>8 870,9</b>	<b>9 471,2</b>	<b>10 164,9</b>	<b>11 169,2</b>	<b>12 054,6</b>



## Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004 (Miliar Rupiah)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>a)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
232,1	255,2	260,1	270,7	281,0	287,0	303,0	2 710,0	2 811,0	2 811,2
16,7	22,8	27,7	32,2	34,0	41,0	50,0	831,0	859,0	828,1
37,5	40,8	46,6	51,1	58,0	61,0	63,0	650,0	755,0	847,9
2,2	2,3	2,6	3,0	3,0	4,0	4,0	30,4	37,0	41,2
7,3	9,2	12,1	15,2	18,0	22,0	27,0	262,0	320,0	364,8
70,8	78,8	88,8	100,2	108,0	124,0	138,0	1 118,0	1 224,0	1 293,8
15,6	15,9	16,5	17,4	22,0	25,0	27,0	257,0	288,0	302,7
12,3	13,7	17,0	19,8	23,0	25,0	28,0	226,0	262,0	300,0
53,5	58,2	59,4	61,3	64,0	65,0	67,0	669,0	713,0	841,1
448,0	496,9	530,8	570,9	611,0	654,0	707,0	6 753,4	7 269,0	7 630,8

## Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004 (Miliar Rupiah)

1982	1983	1983 <sup>a)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3 669,8	3 845,6	17 764,7	18 512,6	19 300,0	19 799,1	20 223,5	21 213,7	21 917,8	22 356,9	22 714,8
939,8	956,5	16 107,4	17 120,1	15 480,4	16 308,6	16 365,5	15 892,9	16 663,8	17 531,7	19 317,0
1 900,7	1 942,5	9 896,4	12 078,8	13 430,5	14 678,1	16 235,3	18 182,3	19 855,7	22 336,9	24 585,0
105,5	112,8	313,9	324,0	360,9	429,8	494,6	548,9	615,6	725,7	842,8
757,8	804,5	4 597,2	4 393,8	4 508,0	4 609,0	4 802,9	5 259,1	5 878,0	6 672,9	7 423,7
2 158,8	2 240,2	11 418,7	11 811,0	12 398,6	13 398,5	14 356,2	15 656,9	17 338,1	18 568,6	19 576,2
716,6	752,5	4 098,1	4 443,1	4 487,0	4 668,4	4 938,5	5 211,5	5 811,5	6 367,9	6 869,4
635,8	677,1	4 714,1	5 240,5	5 481,2	6 028,2	6 313,2	6 514,4	7 168,4	7 892,6	8 654,8
1 440,6	1 510,5	8 712,3	9 113,5	9 635,3	10 160,7	10 788,2	11 501,7	12 187,7	12 764,1	13 241,5
12 325,4	12 842,2	77 622,8	83 037,4	85 081,9	90 080,4	94 517,9	99 981,4	107 436,6	115 217,3	123 225,2

**Lanjutan****Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan**

Lapangan Usaha	1992	1993	1993*)	1994	1995	1996
1	36	37	38	39	40	41
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	24 225,5	24 569,3	58 963,4	59 291,2	61 885,2	63 827,8
2. Pertambangan dan Penggalian	18 957,7	19 370,3	31 497,3	33 261,6	35 502,2	37 739,4
3. Industri Pengolahan	26 963,6	29 484,4	73 556,4	82 649,0	91 637,1	102 259,7
4. Listrik Gas dan Air Minum	928,2	1 022,3	3 290,3	3 702,7	4 291,9	4 876,8
5. B a n g u n a n	8 223,6	9 222,5	22 512,9	25 857,5	29 197,8	32 923,7
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21 009,1	22 850,1	55 297,6	59 504,1	64 230,8	69 475,0
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7 554,9	8 302,2	23 248,9	25 188,6	27 328,6	29 701,1
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9 505,0	10 480,7	28 047,8	30 901,0	34 313,0	36 384,2
9. Jasa-jasa	13 817,2	14 405,3	33 361,4	34 285,1	35 405,8	36 610,2
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>131 184,8</b>	<b>139 707,1</b>	<b>329 775,8</b>	<b>354 640,8</b>	<b>383 792,3</b>	<b>413 797,9</b>

## Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004 (Miliar Rupiah)

1997	1998	1999	2000	2000*)	2001	2002	2003*)	2004**)	Trw I 2005***)
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
64 468,0	63 609,5	64 985,3	66 208,9	216 831,4	225 685,7	232 973,4	243 076,1	252 952,9	64 689,8
38 538,2	37 474,0	36 865,8	38 896,4	167 692,2	168 244,3	169 932,0	168 426,7	160 655,2	40 291,1
107 629,7	95 320,6	99 058,5	104 986,9	385 597,9	398 323,9	419 388,1	441 754,7	469 118,2	121 832,9
5 479,9	5 646,1	6 112,9	6 574,8	8 393,8	9 058,3	9 868,2	10 448,1	11 066,1	2 853,3
35 346,4	22 465,3	22 035,6	23 278,7	76 573,4	80 080,4	84 469,8	90 103,4	97 466,6	25 385,3
73 523,8	60 130,7	60 093,7	63 498,3	224 452,5	234 273,0	243 409,3	256 299,5	271 176,7	71 430,9
31 782,5	26 975,1	26 772,1	29 072,1	65 012,2	70 276,1	76 173,2	84 979,0	95 772,1	25 535,8
38 543,0	28 278,7	26 244,6	27 449,4	115 463,1	123 085,5	130 928,1	140 117,3	150 935,8	39 497,3
37 934,5	36 475,0	37 184,0	38 051,5	129 753,8	133 957,4	138 982,3	144 354,2	151 435,1	39 129,1
<b>433 245,9</b>	<b>376 374,9</b>	<b>379 352,5</b>	<b>398 016,9</b>	<b>1 389 770,3</b>	<b>1 442 984,6</b>	<b>1 506 124,4</b>	<b>1 579 559,0</b>	<b>1 660 578,7</b>	<b>430 645,4</b>

## Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas

Jenis Penggunaan	1960	1961	1962	1963	1964	1965
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	311,4	385,6	1 180,0	2 726,5	5 821,3	20 902,5
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	45,1	55,4	83,3	228,3	508,2	1 329,8
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	30,7	48,1	74,8	263,0	862,0	1 586,7
4. Perubahan Stok	-	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	52,0	45,0	69,0	291,0	874,0	1 251,0
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	49,0	64,0	72,0	300,0	932,0	1 360,0
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	390,2	470,1	1 335,1	3 208,8	7 133,5	23 710,0
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-3,2	-5,0	-9,0	-40,8	-120,0	-173,0
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	387,0	465,1	1 326,1	3 168,0	7 013,5	23 537,0
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	23,8	24,0	34,0	111,0	175,0	567,0
11. Dikurangi Penyusutan	23,0	31,0	88,0	190,0	476,0	1 408,0
12. PENDAPATAN NASIONAL	340,2	410,1	1 204,1	2 867,0	6 362,5	21 562,0

Catatan :

1) Penyempurnaan perhitungan bersamaan dengan perubahan tahun dasar 1973, 1983, dan 1993

2) Sampai dengan tahun 1982 termasuk perubahan stok

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas

Jenis Penggunaan	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	10 463,8	12 458,4	14 408,8	19 513,7	27 502,9	35 560,0
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 590,5	2 077,3	2 658,9	3 733,4	4 688,2	5 787,9
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	3 204,9	3 826,4	4 670,7	6 704,3	9 485,2	11 553,4
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	3 429,6	4 465,8	4 787,8	9 628,7	13 849,2	14 927,9
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3 222,1	3 817,2	4 558,8	7 554,7	10 079,8	13 802,2
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	15 466,7	19 010,7	21 967,4	32 025,4	45 445,7	54 027,0
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-432,2	-678,5	-852,1	-1 484,4	-2 010,7	-1 924,9
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	15 034,5	18 332,2	21 115,3	30 541,0	43 435,0	52 102,1
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	690,5	845,6	1 028,9	1 304,8	1 634,6	1 752,2
11. Dikurangi Penyusutan	1 006,3	1 235,7	1 427,9	2 089,4	2 962,1	3 511,8
12. PENDAPATAN NASIONAL	13 337,7	16 250,9	18 658,5	27 146,8	38 838,3	46 838,1



## Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>1)</sup>	1974	1975
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
303,3	786,0	1 854,4	2 359,9	2 692,8	2 973,0	3 314,0	4 732,0	4 790,7	7 258,6	8 744,5
27,8	62,5	156,4	198,5	293,0	341,0	414,0	716,0	716,0	841,0	1 253,7
14,3	67,9	184,6	317,3	454,6	580,0	857,0	1 208,0	1 208,0	1 797,0	2 571,7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40,3	74,4	227,9	245,2	428,8	507,0	729,0	1 189,0	1 354,3	3 105,1	2 850,6
69,8	143,0	326,6	402,6	529,0	607,0	766,0	1 240,0	1 315,6	2 293,7	2 778,0
315,9	847,8	2 096,7	2 718,3	3 340,2	3 794,0	4 548,0	6 605,0	6 753,4	10 708,0	12 642,5
-4,9	-9,6	-28,8	-34,9	-50,3	-68,0	-144,0	-227,0	-245,7	-507,1	-555,7
311,0	838,2	2 067,9	2 683,4	3 289,9	3 726,0	4 404,0	6 378,0	6 507,7	10 200,9	12 086,8
7,6	31,0	94,0	134,9	188,2	229,0	236,0	328,0	328,0	447,0	519,2
17,2	54,7	131,0	176,3	218,8	248,0	300,0	436,0	439,0	696,0	821,0
286,2	752,5	1 842,9	2 372,2	2 882,9	3 249,0	3 868,0	5 614,0	5 740,7	9 057,9	10 746,6

## Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

1982	1983	1983 <sup>*)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
41 670,3	49 231,0	47 063,0	54 066,5	57 201,4	63 355,3	71 988,9	81 045,3	88 752,3	106 312,3	125 035,8
6 831,7	7 791,3	8 077,3	9 121,5	10 893,1	11 328,7	11 763,5	12 755,8	15 697,6	17 572,6	20 784,6
13 467,1	17 187,7	19 467,9	20 136,1	22 366,9	24 781,9	30 980,2	36 802,6	45 659,8	55 633,4	63 893,9
--	--	2 793,5	3 406,4	4 836,8	4 243,0	8 165,8	8 006,9	13 171,0	15 071,5	16 847,8
13 345,2	17 732,9	19 847,0	22 999,3	21 533,9	20 009,9	29 874,3	34 665,6	42 505,0	51 953,1	62 263,8
15 681,7	20 728,2	19 625,9	19 844,7	19 835,2	21 036,2	27 955,8	31 171,4	38 601,0	50 945,7	61 375,7
59 632,6	71 214,7	77 622,8	89 885,1	96 996,9	102 682,6	124 816,9	142 104,8	167 184,7	195 597,2	227 450,2
-1 957,5	-3 035,9	-3 283,1	-4 182,7	-3 940,9	-4 192,5	-6 022,0	-6 921,7	-8 074,1	-9 615,5	-10 899,3
57 675,1	68 178,8	74 339,7	85 702,4	93 056,0	98 490,1	118 794,9	135 183,1	159 110,6	185 981,7	216 550,9
2 132,5	2 280,6	2 450,8	2 723,4	3 596,5	6 528,7	7 129,8	9 032,7	12 444,5	13 420,1	15 003,5
3 876,1	4 629,0	3 881,1	4 494,3	4 849,8	5 134,1	6 240,8	7 105,4	8 364,5	9 783,9	11 379,8
51 666,5	61 269,2	68 007,8	78 484,7	84 609,7	86 827,3	105 424,3	119 045,0	138 301,6	162 777,7	190 167,6

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas

Jenis Penggunaan	1992	1993	1993 <sup>1)</sup>	1994	1995
1	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	135 880,3	158 342,7	192 958,4	228 119,3	279 876,4
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24 731,3	29 756,7	29 756,7	31 014,0	35 584,2
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	70 820,2	78 243,2	86 667,3	105 380,6	129 217,5
4. Perubahan Stok	22 404,9	28 285,6	10 545,5	13 326,5	15 900,4
5. Ekspor Barang dan Jasa	76 384,4	85 454,3	88 230,9	101 331,9	119 592,5
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	70 336,6	78 064,7	78 383,0	96 952,6	125 656,9
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	259 884,5	302 017,8	329 775,8	382 219,7	454 514,1
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-12 446,8	-16 168,8	-12 552,6	-10 248,4	-13 366,1
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	247 437,7	285 849,0	317 223,2	371 971,3	441 148,0
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	17 794,6	20 543,8	21 128,1	23 898,9	27 486,5
11. Dikurangi Penyusutan	13 044,7	14 907,4	16 488,8	19 111,0	22 725,7
12. PENDAPATAN NASIONAL	216 598,4	250 397,8	279 606,3	328 961,4	390 935,8

## PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILIAR RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	856 798,3	1 039 655,0	1 231 964,5	1 372 078,0	1 532 388,3
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	90 779,7	113 416,1	132 218,8	163 701,4	187 774,1
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	275 881,2	323 875,3	353 967,0	386 219,1	483 440,7
4. a. Perubahan Inventori	34 282,8	47 193,6	35 979,5	-26 172,3	40 902,7
b. Diskrepansi Statistik	-14 144,2	23 972,2	-5 553,7	-6 039,8	-33 068,0
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	569 490,3	642 594,6	595 514,0	627 064,9	711 777,8
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	423 317,9	506 426,3	480 815,4	470 997,8	620 184,2
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	1 389 770,2	1 684 280,5	1 863 274,7	2 045 853,5	2 303 031,4
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-92 161,8	-61 051,2	-54 513,1	-79 628,6	-79 048,8
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	1 297 607,7	1 623 229,3	1 808 761,6	1 966 224,9	2 223 982,6
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	-37 820,3	31 425,7	71 186,3	85 272,2	62 534,0
11. Dikurangi Penyusutan	69 488,5	84 214,0	93 163,7	102 292,7	115 151,6
12. PENDAPATAN NASIONAL	1 265 939,5	1 507 589,6	1 644 411,6	1 778 660,0	2 046 297,0

**Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)**

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
332 094,4	387 170,7	647 823,6	838 097,2	850 818,7	972 938,3	1 121 317,2	1 246 112,8	1 389 661,2
40 299,2	42 952,0	54 415,9	72 631,3	90 779,7	113 416,1	132 218,7	163 701,3	187 774,1
157 652,7	177 686,1	243 043,4	226 015,8	275 881,3	314 065,8	332 010,8	362 225,6	439 879,8
5 800,4	21 615,1	-82 716,1	-113 852,6	-72 235,5	-53 623,9	-69 210,5	-89 792,9	-28 251,2
137 533,3	174 871,3	506 244,8	390 560,1	542 992,4	624 340,8	577 160,0	573 120,7	663 295,7
140 812,0	176 599,8	413 058,1	313 720,2	423 317,9	503 482,3	474 433,8	460 704,1	619 534,7
532 568,0	627 695,4	955 753,5	1 099 731,6	1 264 918,7	1 467 654,8	1 619 062,4	1 794 663,4	2 032 824,9
-14 272,2	-18 355,0	-53 893,7	-83 764,2	-92 161,8	-61 051,5	-54 513,0	-79 626,7	-79 048,9
518 295,8	609 340,4	901 859,8	1 015 967,4	1 172 756,9	1 406 603,3	1 564 549,4	1 715 036,7	1 953 776,0
28 918,9	37 828,7	6 480,5	17 950,1	-37820,3	31 425,7	71 186,3	85 272,2	85 885,7
26 628,4	31 384,8	47 787,7	54 986,6	63 245,9	73 382,7	80 953,1	89 733,2	101 641,2
462 748,5	540 126,9	847 591,6	943 030,7	1 147 331,3	1 301 794,9	1 412 410,0	1 540 031,3	1 766 249,1

## Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas

(Miliar)

Jenis Penggunaan	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	311,4	335,8	359,2	345,0	347,7	356,0	350,8
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	45,1	42,0	33,8	34,0	40,0	29,0	40,3
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	30,7	44,1	40,1	30,6	34,8	36,2	40,7
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	52,0	56,7	51,8	48,7	54,5	56,2	55,6
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	49,0	66,0	64,7	47,5	51,7	47,5	45,5
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	390,2	412,6	420,2	410,8	425,3	429,9	441,9
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-3,2	-3,4	-3,4	-3,3	-3,5	-3,5	-3,7
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	387,0	409,2	416,8	407,5	421,8	426,4	438,2
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	23,8	25,2	25,6	25,1	25,9	26,2	26,9
11. Dikurangi Penyusutan	23,0	24,4	24,8	24,2	25,1	25,3	26,2
12. PENDAPATAN NASIONAL	340,2	359,6	366,4	358,2	370,8	374,9	385,1

Catatan:

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Tahun 1960-1973 menggunakan tahun dasar 1960

1) Harga konstan berdasarkan perhitungan tahun dasar 1973, 1983, dan 1993

2) Sampai dengan tahun 1982 termasuk perubahan stok

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas

(Miliar)

Jenis Penggunaan	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6 031,6	6 433,2	6 955,1	7 865,8	8 867,7	10 349,5
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	896,7	1 044,4	1 156,1	1 345,0	1 489,6	1 641,0
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	1 749,2	2 027,5	2 332,9	2 436,0	2 896,0	3 218,5
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	1 425,2	1 744,0	1 776,3	1 822,0	1 719,3	1 678,2
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1 946,4	2 378,2	2 749,2	3 303,9	3 803,4	4 832,6
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 156,3	8 870,9	9 471,2	10 164,9	11 169,2	12 054,6
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-366,5	-422,7	-513,8	-649,2	-758,7	-673,7
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	7 789,8	8 448,2	8 957,4	9 515,7	10 410,5	11 380,9
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	399,1	430,8	460,0	495,7	544,3	587,4
11. Dikurangi Penyusutan	530,8	576,6	615,6	663,5	728,5	786,2
12. PENDAPATAN NASIONAL	6 859,9	7 440,8	7 881,8	8 356,5	9 137,7	10 007,3



Dasar Harga Konstan 1960, 1973, 1983 dan 1983  
(Miliar Rupiah)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>a)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
381,8	416,7	441,2	453,7	474,0	506,0	520,0	4 790,7	5 453,6	5 678,9
35,8	40,6	42,1	49,2	53,0	52,0	71,0	716,0	641,0	835,5
33,2	40,6	52,2	69,4	84,0	100,0	117,0	1 208,0	1 440,0	1 650,2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
55,5	61,3	69,9	82,3	92,0	113,0	141,0	1 354,3	1 403,4	1 266,8
58,3	62,3	74,6	83,7	92,0	117,0	142,0	1 315,6	1 669,0	1 800,6
448,0	496,9	530,8	570,9	611,0	654,0	707,0	6 753,4	7 269,0	7 630,8
-3,7	-4,2	-4,3	-4,7	-5,0	-5,0	-6,0	-245,7	-369,0	-360,3
444,3	492,7	526,5	566,2	606,0	649,0	701,0	6 507,7	6 900,0	7 270,5
27,3	30,3	32,4	34,8	37,0	40,0	43,0	328,0	351,7	370,6
26,4	29,3	31,3	33,7	36,0	39,0	42,0	439,0	472,5	496,0
390,6	433,1	462,8	497,7	533,0	570,0	616,0	5 740,7	6 075,8	6 403,9

Dasar Harga Konstan 1960, 1973, 1983 dan 1983  
(Miliar Rupiah)

1982	1983	1983 <sup>a)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
10 697,5	11 501,1	47 063,0	48 942,2	49 448,0	50 530,0	52 200,4	54 225,0	56 475,7	62 053,2	66 584,0
1 776,1	1 758,9	8 077,3	8 353,0	8 991,2	9 241,3	9 225,7	9 924,3	10 965,3	11 317,3	12 112,7
3 636,7	3 921,2	19 467,9	18 296,5	19 615,8	21 421,7	22 596,8	25 200,9	28 568,1	32 731,5	34 867,2
--	--	2 793,5	4 452,0	6 641,3	6 332,7	5 049,2	1 119,9	1 417,2	3 302,8	1 989,6
1 444,3	1 535,0	19 847,0	21 144,9	19 494,7	22 460,3	25 744,8	26 015,5	28 733,2	28 862,8	34 600,8
5 229,2	5 874,0	19 625,9	18 151,2	19 109,1	19 905,6	20 299,0	16 504,2	18 722,9	23 050,3	26 929,1
12 325,4	12 842,2	77 622,8	83 037,4	85 081,9	90 080,4	94 517,9	99 981,4	107 436,6	115 217,3	123 225,2
-652,7	-835,1	-3 283,1	-3 821,7	-3 846,1	-3 802,2	-4 247,7	-3 481,7	-3 710,6	-4 231,0	-4 435,6
11 672,7	12 007,1	74 339,7	79 215,7	81 235,8	86 278,2	90 270,2	96 499,7	103 726,0	110 986,3	118 789,6
600,6	625,8	2 450,8	2 515,9	3 154,7	5 727,4	5 399,0	6 356,1	7 997,1	8 112,5	8 123,6
803,9	837,6	3 881,1	4 151,9	4 254,1	4 504,0	4 725,9	4 996,2	5 362,6	5 642,9	6 161,6
10 268,2	10 543,7	68 007,8	72 547,9	73 827,0	76 046,8	80 145,3	85 147,4	90 366,3	97 230,9	104 504,4

## Lanjutan

## Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas

(Miliar

Jenis Penggunaan	1992	1993	1993 <sup>1)</sup>	1994	1995
1	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	68 484,5	72 476,2	192 958,4	208 062,1	234 245,4
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12 819,0	12 829,7	29 756,7	30 442,6	30 850,6
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	36 589,3	38 671,2	86 667,3	98 589,0	112 386,4
4. Perubahan Stok	2 314,2	3 403,7	10 545,5	14 836,0	15 852,7
5. Ekspor Barang dan Jasa	39 674,8	42 296,8	88 230,9	97 002,1	104 491,8
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	28 697,0	29 970,5	78 383,0	94 291,0	114 034,6
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	131 184,8	139 707,1	329 775,8	354 640,8	383 792,3
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-4 955,7	-6 154,1	-12 552,6	-9 729,8	-11 923,8
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	126 229,1	133 553,0	317 223,2	344 911,0	371 868,5
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	8 945,6	9 621,0	21 128,1	22 174,5	23 209,6
11. Dikurangi Penyusutan	6 557,8	6 981,4	16 488,8	17 732,0	19 189,6
12. PENDAPATAN NASIONAL	110 725,7	116 950,6	279 606,3	305 004,5	329 469,2

## Penggunaan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	856 798,3	886 736,0	920 749,6	956 593,4	1 003 809,0
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	90 779,7	97 646,0	110 333,6	121 404,1	123 768,1
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	275 881,2	293 792,7	307 584,6	310 776,9	359 604,4
4. a. Perubahan Inventori	34 282,8	41 846,8	13 085,0	-4 707,6	39 981,2
b. Diskrepansi Statistik	-14 144,2	-9 188,3	10 454,6	16 741,7	10 993,4
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	569 490,3	573 163,4	566 188,4	612 559,4	664 463,3
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	423 317,9	441 012,0	422 271,4	433 809,0	542 040,6
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	1 389 770,2	1 442 984,6	1 506 124,4	1 579 558,9	1 660 578,8
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-92 133,2	-66 210,6	-56 357,0	-81 230,8	-80 468,1
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	1 297 637,0	1 376 774,0	1 449 767,4	1 498 328,1	1 580 110,7
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	-37 741,1	27 283,2	57 684,8	65 876,5	46 040,6
11. Dikurangi Penyusutan	69 488,5	72 149,2	75 306,2	78 977,9	83 028,9
12. PENDAPATAN NASIONAL	1 265 889,6	1 277 341,6	1 316 776,4	1 353 473,6	1 451 041,1

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dasar Harga Konstan 1960, 1973, 1983 dan 1983  
(Miliar Rupiah)

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
257 016,2	277 116,1	260 022,7	267 989,1	276 377,2	285 674,7	296 559,3	308 477,4	323 269,4
31 681,4	31 700,8	26 827,9	27 014,3	28 767,8	31 351,5	35 362,4	38 842,8	39 593,0
128 698,6	139 725,5	93 604,7	78 284,7	89 389,1	95 197,1	95 499,4	96 215,6	107 157,3
5 873,1	3 341,7	-6 386,9	-4 110,9	-13 794,2	-13 042,3	-13 390,4	-12 897,5	-16 530,2
112 391,4	121 157,9	134 707,2	91 863,6	116 193,6	119 600,2	118 673,5	123 755,9	139 678,5
121 862,8	139 796,1	132 400,7	81 688,3	98 916,6	107 027,7	103 516,5	105 437,2	122 372,0
413 797,9	433 245,9	376 374,9	379 352,5	398 016,9	411 753,5	429 187,7	448 957,0	470 796,0
-12 486,8	-15 462,9	-27 965,4	-22 145,1	-25 391,1	-17 399,1	-22 217,8	-20 570,4	-20 457,4
401 311,1	417 783,0	348 409,5	357 207,4	372 625,8	394 354,4	406 969,9	428 386,6	450 338,6
22 469,6	26 100,2	1 858,9	6 181,9	-11 746,1	8 865,6	18 922,5	21 346,5	20 008,7
20 689,9	21 662,3	18 818,7	18 967,6	19 900,8	20 587,7	21 459,4	22 447,9	23 539,8
358 151,6	370 020,5	327 731,9	332 057,9	364 471,1	364 901,2	366 588,0	384 592,3	406 790,1

## Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto

Jenis Penggunaan	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	79,81	82,03	88,38	84,97	81,61	88,16	96,01
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,56	11,78	6,24	7,11	7,12	5,61	8,80
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	7,87	10,23	5,60	8,20	12,08	6,69	4,53
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	13,33	9,57	5,17	9,07	12,25	5,28	12,76
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	12,56	13,61	5,39	9,35	13,07	5,74	22,10
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan:

- 1) Penyempurnaan perhitungan bersamaan dengan perubahan tahun dasar 1973, 1983, dan 1993
- 2) Sampai dengan tahun 1982 termasuk perubahan stok

## Lanjutan

## Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto

Jenis Penggunaan	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	67,65	65,53	65,59	60,93	60,52	65,82
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,28	10,93	12,10	11,66	10,32	10,71
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	20,72	20,13	21,26	20,93	20,87	21,38
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	22,17	23,49	21,80	30,07	30,47	27,63
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	20,83	20,08	20,75	23,59	22,18	25,55
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>a)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92,71	88,44	86,82	80,62	78,36	72,87	71,64	70,94	67,79	69,17
7,37	7,46	7,30	8,77	8,99	9,10	10,84	10,60	7,85	9,92
8,01	8,80	11,67	13,61	15,29	18,84	18,29	17,89	16,78	20,34
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,78	10,87	9,02	12,84	13,36	16,03	18,00	20,05	29,00	22,55
16,87	15,58	14,81	15,84	16,00	16,84	18,77	19,48	21,42	21,97
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku

1982	1983	1983 <sup>a)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
69,88	69,13	60,63	60,15	58,97	61,70	57,68	57,03	53,09	54,35	54,97
11,46	10,94	10,41	10,15	11,23	11,03	9,42	8,98	9,39	8,98	9,14
22,58	24,14	25,08	22,40	23,06	24,13	24,82	25,90	27,31	28,44	28,09
--	--	3,6	3,8	5,0	4,1	6,5	5,6	7,9	7,7	7,4
22,38	24,90	25,57	25,59	22,20	19,49	23,93	24,39	25,42	26,56	27,37
26,30	29,11	25,28	22,08	20,45	20,49	22,40	21,94	23,09	26,05	26,98
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Lanjutan**

## Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto

Jenis Penggunaan	1992	1993	1993 <sup>1)</sup>	1994	1995
1	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	52,28	52,43	58,51	59,68	61,58
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,52	9,85	9,02	8,11	7,83
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	27,25	25,91	26,28	27,57	28,43
4. Perubahan Stok	8,6	9,4	3,2	3,5	3,5
5. Ekspor Barang dan Jasa	29,39	28,29	26,75	26,51	26,31
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	27,06	25,85	23,77	25,37	27,65
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Distribusi Persentase Penggunaan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	61,65	61,73	66,12	67,07	66,54
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,53	6,73	7,10	8,00	8,15
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	19,85	19,23	19,00	18,88	20,99
4. a. Perubahan Inventori	2,47	2,80	1,93	-1,28	1,78
b. Diskrepansi Statistik	-1,02	1,42	-0,30	-0,30	-1,44
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	40,98	38,15	31,96	30,65	30,91
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	30,46	30,07	25,80	23,02	26,93
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
62,36	61,68	67,78	76,21	67,26	66,29	69,26	69,43	68,36
7,57	6,84	5,69	6,60	7,18	7,73	8,17	9,12	9,24
29,60	28,31	25,43	20,55	21,81	21,40	20,51	20,18	21,64
1,1	3,4	-8,7	-10,4	-5,7	-3,7	-4,3	-5,0	-1,4
25,82	27,86	52,97	35,51	42,93	42,54	35,65	31,93	32,63
26,44	28,13	43,22	28,53	33,47	34,31	29,30	25,67	30,48
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<http://www.bps.go.id>

## Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut

Jenis Penggunaan	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga		7,84	6,97	-3,95	0,78	2,39	-1,46
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		-6,87	-19,52	0,59	17,65	-27,50	38,97
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>		43,65	-9,07	-23,69	13,73	4,02	12,43
4. Perubahan Stok		--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa		9,0	-8,6	-6,0	11,9	3,1	-1,1
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa		34,7	-2,0	-26,6	8,8	-8,1	-4,2
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO		5,7	1,8	-2,2	3,5	1,1	2,8

Catatan :

- 1) Penyempurnaan perhitungan bersamaan dengan perubahan tahun dasar 1973, 1983, dan 1993
- 2) Sampai dengan tahun 1982 termasuk perubahan stok

## Lanjutan

## Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut

Jenis Penggunaan	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6,21	6,66	8,11	13,09	12,74	16,71
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,32	16,47	10,70	16,34	10,75	10,16
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	6,00	15,91	15,06	4,42	18,88	11,14
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	12,5	22,4	1,9	2,6	-5,6	-2,4
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,1	22,2	15,6	20,2	15,1	27,1
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,9	8,8	6,8	7,3	9,9	7,9



## Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>*)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8,84	9,14	5,88	2,83	4,47	6,75	2,77		13,84	4,13
-11,17	13,41	3,69	16,86	7,72	-1,89	36,54		-10,47	30,34
-18,43	22,29	28,57	32,95	21,04	19,05	17,00		19,21	14,60
--	--	--	--	--	--	--		--	--
-0,2	10,5	14,0	17,7	11,8	22,8	24,8		3,6	-9,7
28,1	6,9	19,7	12,2	9,9	27,2	21,4		26,9	7,9
1,4	10,9	6,8	7,6	7,0	7,0	8,1		7,6	5,0

## Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

1982	1983	1983 <sup>*)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3,36	7,51		3,99	1,03	2,19	3,31	3,88	4,15	9,88	7,30
8,23	-0,97		3,41	7,64	2,78	-0,17	7,57	10,49	3,21	7,03
12,99	7,82		-6,02	7,21	9,21	5,49	11,52	13,36	14,57	6,52
--	--		59,4	49,2	-4,6	-20,3	-77,8	26,5	133,1	-39,8
-13,9	6,3		6,5	-7,8	15,2	14,6	1,1	10,4	0,5	19,9
8,2	12,3		-7,5	5,3	4,2	2,0	-18,7	13,4	23,1	16,8
2,2	4,2		7,0	2,5	5,9	4,9	5,8	7,5	7,2	7,0

**Lanjutan**

## Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut

Jenis Penggunaan	1992	1993	1993 <sup>1)</sup>	1994	1995
1	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,85	5,83		7,83	12,58
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,83	0,08		2,31	1,34
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	4,94	5,69		13,76	13,99
4. Perubahan Stok	16,3	47,1		40,7	6,9
5. Ekspor Barang dan Jasa	14,7	6,6		9,9	7,7
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	6,6	4,4		20,3	20,9
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,5	6,5		7,5	8,2

## Penggunaan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga		3,49	3,84	3,89	4,94
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		7,56	12,99	10,03	1,95
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto		6,49	4,69	1,04	15,71
4. a. Perubahan Inventori		22,06	-68,73	-135,98	-949,29
b. Diskrepansi Statistik		-35,04	-213,78	60,14	-34,34
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa		0,64	-1,22	8,19	8,47
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa		4,18	-4,25	2,73	24,95
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO		3,83	4,38	4,88	5,13

## Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
9,72	7,82	-6,17	3,06	3,13	3,36	3,81	4,02	4,80
2,69	0,06	-15,37	0,69	6,49	8,98	12,79	9,84	1,93
14,51	8,57	-33,01	-16,37	14,18	6,50	0,32	0,75	11,37
-63,0	-43,1	-291,1	-35,6	235,6	-5,5	2,7	-3,7	28,2
7,6	7,8	11,2	-31,8	26,5	2,9	-0,8	4,3	12,9
6,9	14,7	-5,3	-38,3	21,1	8,2	-3,3	1,9	16,1
7,8	4,7	-13,1	0,8	4,9	3,5	4,2	4,6	4,9

<http://www.bps.go.id>

## Indeks Harga Implisit Produk

Jenis Penggunaan	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,00	114,83	328,51	790,29	1 674,23	5 871,49	86,46
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	131,90	246,45	671,47	1 270,50	4 585,52	68,98
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	100,00	109,07	186,53	859,48	2 477,01	4 383,15	35,14
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	100,00	79,37	133,20	597,54	1 603,67	2 225,98	72,48
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	100,00	96,97	111,28	631,58	1 802,71	2 863,16	153,41
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	113,94	317,73	781,11	1 677,29	5 515,24	71,49

## Lanjutan

## Indeks Harga Implisit Produk

Jenis Penggunaan	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	173,48	193,66	207,17	248,08	310,15	343,59
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	177,37	198,90	229,99	277,58	314,73	352,71
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	183,22	188,73	200,21	275,22	327,53	358,97
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	240,64	256,07	269,54	528,47	805,51	889,52
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	165,54	160,51	165,82	228,66	265,02	285,61
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	189,63	214,30	231,94	315,06	406,88	448,19



## Domestik Bruto (Persen)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>*)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205,87	445,02	534,88	593,52	627,22	654,94	910,00	100,00	133,10	153,98
174,58	385,22	471,50	595,53	643,40	796,15	1 008,45	100,00	131,20	150,05
204,52	454,68	607,85	655,04	690,48	857,00	1 032,48	100,00	124,79	155,84
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
134,05	371,78	350,79	521,02	551,09	645,13	843,26	100,00	221,26	225,02
245,28	524,24	539,68	632,02	659,78	654,70	873,24	100,00	137,43	154,28
189,24	421,96	512,11	585,08	620,95	695,41	934,23	100,00	147,31	165,68

## Domestik Bruto (Persen)

1982	1983	1983 <sup>*)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
389,53	428,05	100,00	110,47	115,68	125,38	137,91	149,46	157,15	171,32	187,79
384,65	442,96	100,00	109,20	121,15	122,59	127,51	128,53	143,16	155,27	171,59
370,31	438,33	100,00	110,05	114,02	115,69	137,10	146,04	159,83	169,97	183,25
--	--	100,00	76,51	72,83	67,00	161,72	714,97	929,37	456,32	846,79
923,99	1 155,24	100,00	108,77	110,46	89,09	116,04	133,25	147,93	180,00	179,95
299,89	352,88	100,00	109,33	103,80	105,68	137,72	188,87	206,17	221,02	227,92
483,82	554,54	100,00	108,25	114,00	113,99	132,06	142,13	155,61	169,76	184,58

## Lanjutan

## Indeks Harga Implisit Produk

Jenis Penggunaan	1992	1993	1993 <sup>1)</sup>	1994	1995
1	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	198,41	218,48	100,00	109,64	119,48
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	192,93	231,94	100,00	101,88	115,34
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	193,55	202,33	100,00	106,89	114,98
4. Perubahan Stok	968,15	831,03	100,00	89,83	100,30
5. Ekspor Barang dan Jasa	192,53	202,03	100,00	104,46	114,45
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	245,10	260,47	100,00	102,82	110,19
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	198,11	216,18	100,00	107,78	118,43

## Indeks Harga Implisit Penggunaan Produk Domestik Bruto

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,0	117,25	133,80	143,43	152,66
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,0	116,15	119,84	134,84	151,71
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	100,0	110,24	115,08	124,28	134,44
4. a. Perubahan Inventori	100,0	112,78	274,97	555,96	102,30
b. Diskrepansi Statistik	100,0	-260,90	-53,12	-36,08	-300,80
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	100,0	112,11	105,18	102,37	107,12
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	100,0	114,83	113,86	108,57	114,42
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,0	116,72	123,71	129,52	138,69

## Domestik Bruto (Persen)

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
129,21	139,71	249,14	312,74	307,85	340,58	378,11	403,96	429,88
127,20	135,49	202,83	268,86	315,56	361,76	373,90	421,45	474,26
122,50	127,17	259,65	288,71	308,63	329,91	347,66	376,47	410,50
98,76	646,83	1 295,09	2 769,53	523,67	411,15	516,87	696,20	170,91
122,37	144,33	375,81	425,15	467,32	522,02	486,34	463,11	474,87
115,55	126,33	311,98	384,05	427,95	470,42	458,32	436,95	506,27
128,70	144,88	253,94	289,90	317,81	356,44	377,24	399,74	431,78

<http://www.bps.go.id>

## Perkembangan Indeks Harga Implisit Produk

Jenis Penggunaan	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga		14,83	186,08	140,57	111,85	250,70	-98,53
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		31,90	86,84	172,46	89,21	260,92	-98,50
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>		9,07	71,02	360,76	188,20	76,95	-99,20
4. Perubahan Stok		--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa		-20,63	67,84	348,58	168,38	38,81	-96,74
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa		-3,03	14,76	467,54	185,43	58,83	-94,64
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO		13,94	178,87	145,84	114,73	228,82	-98,70

## Lanjutan

## Perkembangan Indeks Harga Implisit Produk

Jenis Penggunaan	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	12,66	11,63	6,98	19,75	25,02	10,78
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,21	12,14	15,63	20,69	13,38	12,07
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	17,57	3,00	6,09	37,46	19,01	9,60
4. Perubahan Stok	--	--	--	--	--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	6,94	6,41	5,26	96,06	52,42	10,43
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,30	-3,04	3,31	37,89	15,90	7,77
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	14,46	13,01	8,23	35,84	29,15	10,15



## Domestik Bruto (Persen)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>*)</sup>	1974	1975
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
138,11	116,17	20,19	10,96	5,68	4,42	38,94		33,10	15,69
153,08	120,65	22,40	26,31	8,04	23,74	26,67		31,20	14,37
482,09	122,32	33,69	7,76	5,41	24,12	20,48		24,79	24,88
--	--	--	--	--	--	--		--	--
84,95	177,33	-5,65	48,53	5,77	17,07	30,71		121,26	1,70
59,89	113,73	2,95	17,11	4,39	-0,77	33,38		37,43	12,26
164,72	122,97	21,37	14,25	6,13	11,99	34,34		47,31	12,47

## Domestik Bruto (Persen)

1982	1983	1983 <sup>*)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
13,37	9,89		10,47	4,72	8,39	9,99	8,38	5,15	9,02	9,61
9,06	15,16		9,20	10,95	1,18	4,01	0,80	11,38	8,46	10,51
3,16	18,37		10,05	3,61	1,46	18,51	6,52	9,44	6,34	7,81
--	--		--	--	--	--	--	--	--	--
3,88	25,03		8,77	1,55	-19,35	30,25	14,83	11,02	21,68	-0,03
5,00	17,67		9,33	-5,06	1,81	30,32	37,14	9,16	7,20	3,12
7,95	14,62		8,25	5,32	-0,01	15,85	7,63	9,49	9,09	8,73

## Lanjutan

## Indeks Harga Implisit Produk

Jenis Penggunaan	1992	1993	1993 <sup>1)</sup>	1994	1995
1	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,66	10,11		9,64	8,97
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,43	20,22		1,88	13,22
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <sup>2)</sup>	5,62	4,53		6,89	7,57
4. Perubahan Stok	--	--		--	--
5. Ekspor Barang dan Jasa	6,99	4,94		4,46	9,56
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,54	6,27		2,82	7,17
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	7,33	9,12		7,78	9,88

## Indeks Harga Implisit Penggunaan Produk Domestik Bruto

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga		17,25	14,12	7,20	6,43
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		16,15	3,17	12,52	12,51
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto		10,24	4,39	7,99	8,18
4. a. Perubahan Inventori		12,78	143,82	102,19	-81,60
b. Diskrepansi Statistik		-360,90	-79,64	-32,09	733,78
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa		12,11	-6,18	-2,67	4,64
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa		14,83	-0,84	-4,65	5,38
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO		16,72	5,99	4,69	7,08

## Domestik Bruto (Persen)

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
8,14	8,13	78,32	25,53	-1,56	10,63	11,02	6,84	6,42
10,28	6,52	49,70	32,55	17,37	14,64	3,36	12,72	12,53
6,54	3,81	104,18	11,19	6,90	6,90	5,38	8,29	9,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--
6,92	17,95	160,38	13,13	9,92	11,71	-6,84	-4,78	2,54
4,86	9,33	146,96	23,10	11,43	9,92	-2,57	-4,66	15,87
8,68	12,57	75,27	14,16	9,63	12,16	5,84	5,96	8,02

## Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Bruto, Miliar Rp.	1 389 769,5	1 684 280,5	1 863 274,7	2 045 853,5	2 303 031,4
2. Produk Domestik Bruto Perkapita, Rp.	6 751 599,5	8 080 533,3	8 828 049,9	9 572 484,9	10 641 731,6
3. Produk Nasional Bruto, Miliar Rp.	1 297 607,7	1 623 229,3	1 808 761,6	1 966 224,9	2 223 982,6
4. Produk Nasional Bruto Perkapita, Rp.	6 303 870,9	7 787 633,0	8 569 771,1	9 199 905,2	10 276 466,8
5. Pendapatan Nasional, Miliar Rp.	1 265 939,5	1 507 589,6	1 644 411,6	1 778 660,0	2 046 297,0
6. Pendapatan Nasional Perkapita, Rp.	6 150 024,7	7 232 837,8	7 791 093,5	8 322 295,0	9 455 426,3
7. PDB tanpa Migas dan Hasil-hasilnya, Miliar Rp. <sup>1)</sup>	1 218 333,7	1 505 600,8	1 700 622,7	1 872 432,2	2 095 409,0
8. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, Ribu Orang	205 843	208 437	211 063	213 722	216 415

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

1) Migas dan hasil-hasilnya meliputi: minyak mentah, gas bumi, gas alam cair, dan hasil pengilangan minyak/

Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Perkapita  
Atas Dasar Harga Konstan 2000

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002	2003 *	2004 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Bruto, Miliar Rp.	1 389 770,2	1 442 984,6	1 506 124,4	1 579 558,9	1 660 578,8
2. Produk Domestik Bruto Perkapita, Rp.	6 751 602,9	6 922 887,9	7 135 899,7	7 390 707,0	7 673 118,9
3. Produk Nasional Bruto, Miliar Rp.	1 297 637,0	1 376 774,0	1 449 767,4	1 498 328,1	1 580 110,7
4. Produk Nasional Bruto Perkapita, Rp.	6 304 013,3	6 605 234,8	6 868 884,6	7 010 630,6	7 301 295,8
5. Pendapatan Nasional, Miliar Rp.	1 265 889,6	1 277 341,6	1 316 776,4	1 353 473,6	1 451 041,1
6. Pendapatan Nasional Perkapita, Rp.	6 149 782,1	6 128 196,0	6 238 783,7	6 332 861,0	6 704 897,6
7. PDB tanpa Migas dan Hasil-hasilnya, Miliar Rp. <sup>1)</sup>	1 218 334,4	1 280 638,8	1 345 814,2	1 423 866,0	1 511 756,8
8. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, Ribu Orang	205 843	208 437	211 063	213 722	216 415

Catatan :

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

1) Migas dan hasil-hasilnya meliputi: minyak mentah, gas bumi, **gas alam cair**, dan hasil pengilangan minyak/

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar

Lapangan Usaha	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	53,9	47,9	59,0	57,9	55,4	58,7	
2. Pertambangan dan Penggalian	3,7	3,0	1,6	3,5	7,6	2,5	
3. Industri Pengolahan	8,4	9,9	8,0	6,8	7,5	7,6	
4. Listrik Gas dan Air Minum	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	
5. B a n g u n a n	2,0	2,3	1,4	1,8	2,0	1,8	
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,3	17,4	15,3	14,9	13,7	12,4	
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,7	3,7	2,6	2,0	1,7	2,2	
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,0	3,2	2,7	2,7	2,7	2,8	
9. Jasa-jasa	10,7	12,4	9,3	10,3	9,3	12,0	
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Catatan: Tahun 1960 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960

Tahun 1973 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973

Tahun 1983 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983

Tahun 1993 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993

Tahun 2000 - 2004 menggunakan tahun dasar 2000



## Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>1)</sup>	1974	1975	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
53,3	53,9	51,0	49,3	47,2	43,6	40,1	39,8	40,1	32,7	31,7
1,6	2,7	4,2	4,7	5,2	6,5	8,5	9,3	12,3	22,2	19,6
8,4	7,3	8,5	9,2	9,3	9,4	9,2	8,6	9,6	8,3	8,9
0,0	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6
1,1	1,7	2,1	2,8	3,0	3,4	3,8	4,0	3,9	3,8	4,7
19,0	17,6	17,1	17,5	18,5	18,8	20,1	20,4	16,6	16,6	16,6
1,8	2,2	2,7	2,8	2,9	4,3	4,0	4,0	3,8	4,1	4,1
2,5	2,4	2,5	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3	2,9	3,2
12,3	11,8	11,5	10,4	10,6	10,4	10,7	10,1	9,9	9,0	10,6
<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Lanjutan**

## Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar

Lapangan Usaha	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	31,1	31,1	30,5	28,1	24,8	25,2
2. Pertambangan dan Penggalian	18,9	18,9	17,6	21,8	25,7	24,0
3. Industri Pengolahan	9,4	9,6	9,9	10,3	11,6	10,8
4. Listrik Gas dan Air Minum	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
5. B a n g u n a n	5,3	5,4	5,7	5,6	5,6	5,8
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,5	15,5	15,7	14,9	14,1	14,7
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,3	4,3	4,5	4,4	4,3	4,4
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,4	4,1	4,9	4,9	4,3	5,3
9. Jasa-jasa	10,5	10,5	10,7	9,5	9,1	9,3
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Lanjutan**

## Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar

Lapangan Usaha	1992	1993	1993*)	1994	1995	1996
1	36	37	38	39	40	41
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	19,5	18,5	17,9	17,3	17,1	16,7
2. Pertambangan dan Penggalian	11,5	10,2	9,6	8,8	8,8	8,6
3. Industri Pengolahan	21,8	22,3	22,3	23,3	24,1	25,6
4. Listrik Gas dan Air Minum	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3
5. B a n g u n a n	5,9	6,0	6,8	7,3	7,6	7,9
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,4	16,5	16,8	16,7	16,7	16,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,6	6,9	7,0	7,2	6,8	6,5
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,4	7,5	8,5	9,0	8,7	8,3
9. Jasa-jasa	10,1	11,2	10,1	9,2	9,0	8,7
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004

1982	1983	1983*)	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
25,9	26,4	22,9	22,7	23,2	24,2	23,3	24,1	23,4	21,6	19,7
19,7	19,4	20,8	18,8	14,0	11,2	13,8	12,1	13,0	13,4	13,8
12,9	12,5	12,7	14,6	16,0	16,7	16,9	18,5	18,1	19,9	20,9
0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
6,0	6,2	5,9	5,3	5,5	5,2	4,9	5,0	5,3	5,5	5,7
15,0	15,3	14,7	15,0	15,9	16,7	16,9	17,2	17,3	16,9	16,2
4,7	4,7	5,3	5,6	6,3	6,2	6,0	5,7	5,6	5,6	6,1
5,6	5,3	6,1	6,3	6,4	6,9	6,5	6,4	6,5	6,7	7,1
9,6	9,5	11,2	11,3	12,3	12,3	11,1	10,4	10,2	9,8	9,7
<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004

1997	1998	1999	2000	2000*)	2001	2002	2003*)	2004**)	Trw I 2005***)
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
16,1	18,1	19,6	17,2	15,6	15,6	16,0	15,9	15,4	15,2
8,9	12,6	10,0	13,9	12,1	10,8	8,6	8,3	8,5	9,3
26,8	25,0	26,0	24,9	27,7	30,1	29,7	28,8	28,3	28,1
1,2	1,2	1,2	1,3	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0
7,4	6,4	6,2	6,1	5,5	5,3	5,5	5,5	5,8	6,0
15,9	15,4	16,0	15,7	16,2	15,9	16,9	16,5	16,2	16,1
6,1	5,4	5,0	4,9	4,7	4,6	5,3	5,8	6,1	6,1
8,7	7,3	6,5	6,4	8,3	8,0	8,3	8,5	8,5	8,2
8,9	8,6	9,5	9,6	9,3	9,0	8,9	9,7	10,2	10,0
<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar  
(Persentase)

Lapangan Usaha	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-	1,7	3,3	-3,7	5,1	0,8	
2. Pertambangan dan Penggalian	-	1,4	5,5	-3,2	4,7	2,6	
3. Industri Pengolahan	-	12,3	1,4	-1,9	-1,4	-0,8	
4. Listrik Gas dan Air Minum	-	9,1	8,3	15,4	13,3	0,0	
5. B a n g u n a n	-	29,1	-15,7	-24,4	0,0	13,8	
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	15,9	-0,5	2,8	2,9	-1,0	
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-	0,0	2,8	2,7	-3,3	2,0	
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	12,1	-4,6	-6,5	8,6	0,8	
9. Jasa-jasa	-	4,8	3,0	1,1	1,8	4,7	
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>-</b>	<b>5,7</b>	<b>1,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>	

Catatan : Tahun 1960 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960

Tahun 1973\*) - 1983 menggunakan tahun dasar 1973

Tahun 1983\*) - 1993 menggunakan tahun dasar 1983

Tahun 1993\*) - 2000 menggunakan tahun dasar 1993

Tahun 2000\*) - 2004 menggunakan tahun dasar 2000

**Lanjutan**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar  
(Persentase)

Lapangan Usaha	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	19	20	21	22	23	24
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4,7	1,3	5,1	3,9	5,2	4,9
2. Pertambangan dan Penggalian	15,0	12,4	-2,8	0,6	-1,2	3,3
3. Industri Pengolahan	9,7	13,7	11,2	18,6	22,2	10,2
4. Listrik Gas dan Air Minum	12,4	5,8	8,8	28,7	13,6	15,4
5. B a n g u n a n	5,4	20,6	14,0	6,4	13,6	12,7
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,4	6,5	6,4	9,9	10,2	10,3
7. Pengangkutan dan Komunikasi	13,2	24,8	14,6	14,2	8,9	11,1
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,8	23,6	12,1	7,4	11,9	8,6
9. Jasa-jasa	4,6	11,4	8,7	4,2	15,7	8,7
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6,9</b>	<b>8,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>9,9</b>	<b>7,9</b>



## Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973 <sup>*)</sup>	1974	1975	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4,8	-1,7	10,0	1,9	4,1	3,8	2,1	5,6	-	3,7	0,0
-3,8	8,4	36,5	21,5	16,2	5,6	20,6	22,0	-	3,4	-3,6
2,0	3,3	8,8	14,2	9,7	13,5	5,2	3,3	-	16,2	12,3
0,0	29,4	4,5	13,0	15,4	0,0	33,3	0,0	-	21,7	11,4
13,5	-13,1	26,0	31,5	25,6	18,4	22,2	22,7	-	22,1	14,0
-4,3	9,8	11,3	12,7	12,8	7,8	14,8	11,3	-	9,5	5,7
0,7	2,6	1,9	3,8	5,5	26,4	13,6	8,0	-	12,1	5,1
-4,7	1,7	11,4	24,1	16,5	16,2	8,7	12,0	-	15,9	14,5
7,2	2,5	8,8	2,1	3,2	4,4	1,6	3,1	-	6,6	18,0
<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>10,9</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8,1</b>	-	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>

## Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004

1982	1983	1983 <sup>*)</sup>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2,1	4,8	-	4,2	4,3	2,6	2,1	4,9	3,3	2,0	1,6
-12,1	1,8	-	6,3	-9,6	5,3	0,3	-2,9	4,9	5,2	10,2
1,2	2,2	-	22,1	11,2	9,3	10,6	12,0	9,2	12,5	10,1
17,4	6,9	-	3,2	11,4	19,1	15,1	11,0	12,2	17,9	16,1
5,2	6,2	-	-4,4	2,6	2,2	4,2	9,5	11,8	13,5	11,3
5,7	3,8	-	3,4	5,0	8,1	7,1	9,1	10,7	7,1	5,4
5,9	5,0	-	8,4	1,0	4,0	5,8	5,5	11,5	9,6	7,9
7,7	6,5	-	11,2	4,6	10,0	4,7	3,2	10,0	10,1	9,7
3,3	4,9	-	4,6	5,7	5,5	6,2	6,6	6,0	4,7	3,7
<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	-	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>

**Lanjutan**

## Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar

Lapangan Usaha	1992	1993	1993*)	1994	1995	1996
1	36	37	38	39	40	41
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6,7	1,4	-	0,6	4,4	3,1
2. Pertambangan dan Penggalian	-1,9	2,2	-	5,6	6,7	6,3
3. Industri Pengolahan	9,7	9,3	-	12,4	10,9	11,6
4. Listrik Gas dan Air Minum	10,1	10,1	-	12,5	15,9	13,6
5. B a n g u n a n	10,8	12,1	-	14,9	12,9	12,8
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,3	8,8	-	7,6	7,9	8,2
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10,0	9,9	-	8,3	8,5	8,7
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,8	10,3	-	10,2	11,0	6,0
9. Jasa-jasa	4,3	4,3	-	2,8	3,3	3,4
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>-</b>	<b>7,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 1960 - 2004  
(Persentase)

1997	1998	1999	2000	2000*)	2001	2002	2003*)	2004**)	Trw I 2005***)
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1,0	-1,3	2,2	1,9	-	4,1	3,2	4,3	4,1	
2,1	-2,8	-1,6	5,5	-	0,3	1,0	-0,9	-4,6	
5,3	-11,4	3,9	6,0	-	3,3	5,3	5,3	6,2	
12,4	3,0	8,3	7,6	-	7,9	8,9	5,9	5,9	
7,4	-36,4	-1,9	5,6	-	4,6	5,5	6,7	8,2	
5,8	-18,2	-0,1	5,7	-	4,4	3,9	5,3	5,8	
7,0	-15,1	-0,8	8,6	-	8,1	8,4	11,6	12,7	
5,9	-26,6	-7,2	4,6	-	6,6	6,4	7,0	7,7	
3,6	-3,8	1,9	2,3	-	3,2	3,8	3,9	4,9	
<b>4,7</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	





**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN**  
**3.2 PERTANIAN, KEHUTANAN**  
**DAN PERIKANAN**

**Luas Lahan yang dikuasai Rumah Tangga Pertanian  
Hasil Sensus Pertanian Tahun 1963 dan 1973 menurut Provinsi  
(Ribu Hektar)**

Provinsi	1963			1973		
	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Total	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dista Aceh	109	158	267	168	206	374
Sumatera Utara	216	640	856	299	506	805
Sumatera Barat	98	179	277	145	200	345
Riau	45	470	515	47	460	507
Jambi	52	234	286	75	166	241
Sumatera Selatan	258 <sup>1)</sup>	1 450 <sup>1)</sup>	1 708 <sup>1)</sup>	169	534	703
Bengkulu	-	-	-	45	108	154
Lampung	-	-	-	89	584	673
DKI Jakarta	6	9	15	10	10	20
Jawa Barat	788	709	1 497	839	686	1 525
Jawa Tengah	786	1 036	1 822	809	945	1 753
DI. Yogyakarta	49	144	193	42	139	181
Jawa Timur	898	1 222	2 120	932	1 095	2 027
Bali	73	178	251	82	185	267
NTB	139	126	265	147	142	289
NTT	32	396	428	63	590	653
Timor Timur	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	109	599	708	178	804	982
Kalimantan Tengah	54	335	389	81	443	524
Kalimantan Selatan	107	109	216	146	124	270
Kalimantan Timur	9 <sup>2)</sup>	96	105	29	63	92
Sulawesi Utara	56	414 <sup>2)</sup>	470 <sup>2)</sup>	37	315	352
Sulawesi Tengah	-	-	-	46	237	283
Sulawesi Selatan	191 <sup>3)</sup>	305 <sup>3)</sup>	496 <sup>3)</sup>	330	407	737
Sulawesi Tenggara	-	-	-	32	120	152
Maluku	-	-	-	0	259	259
Irian Jaya	-	-	-	-	-	-
Indonesia	4 075	8 809	12 884	4 840	9 328	14 168

Catatan : <sup>1)</sup> Termasuk Bengkulu dan Lampung.

<sup>2)</sup> Termasuk Sulawesi Tengah.

<sup>3)</sup> Termasuk Sulawesi Tenggara.

**Luas Lahan yang dikuasai Rumah Tangga Pertanian  
Hasil Sensus Pertanian Tahun 1983 dan 1993 menurut Propinsi  
(Ribuan Hektar)**

Provinsi	1983			1993		
	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Total	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dista Aceh	155	282	437	174	377	551
Sumatera Utara	316	631	947	291	759	1 050
Sumatera Barat	168	240	408	163	263	426
Riau	65	644	709	86	678	764
Jambi	126	521	647	89	401	490
Sumatera Selatan	252	762	1 014	324	891	1 215
Bengkulu	52	162	214	49	230	279
Lampung	160	750	910	199	910	1 109
DKI Jakarta	3	3	6	1	2	3
Jawa Barat	965	979	1 944	828	835	1 663
Jawa Tengah	908	1 080	1 988	780	883	1 663
DI. Yogyakarta	52	185	237	41	150	191
Jawa Timur	1 018	1 203	2 221	871	1 070	1 941
Bali	78	197	275	62	185	247
NTB	176	156	332	163	171	334
NTT	72	616	688	69	500	569
Timor Timur	36	204	240	35	149	184
Kalimantan Barat	297	1 285	1 582	188	1 124	1 312
Kalimantan Tengah	93	387	480	93	322	415
Kalimantan Selatan	180	166	346	164	205	369
Kalimantan Timur	42	153	195	44	253	297
Sulawesi Utara	42	357	399	41	321	362
Sulawesi Tengah	62	368	430	78	319	397
Sulawesi Selatan	364	527	891	355	639	994
Sulawesi Tenggara	28	189	217	42	218	260
Maluku	1	433	434	6	397	403
Irian Jaya	6	153	159	12	165	177
Indonesia	5 717	12 633	18 350	5 248	12 417	17 665

**Luas Lahan Pertanian yang dikuasai Rumah Tangga Pertanian  
Hasil Sensus Pertanian 2003 menurut Provinsi  
(Ribuan Hektar)**

Provinsi	2003		Total
	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darusalam	-	-	-
Sumatera Utara	256	894	1.150
Sumatera Barat	157	350	507
R i a u	54	1.061	1.115
Jambi	63	710	773
Sumatera Selatan	313	1.176	1.489
Bengkulu	61	362	423
Lampung	237	961	1.198
Bangka Belitung	2	120	122
D.K.I. Jakarta	1	2	3
Jawa Barat	666	624	1.290
Jawa Tengah	758	925	1.683
D.I. Yogyakarta	37	116	153
Jawa Timur	879	1.129	2.008
Banten	155	216	371
B a l i	56	177	233
Nusa Tenggara Barat	170	215	385
Nusa Tenggara Timur	83	663	746
Kalimantan Barat	186	1.132	1.318
Kalimantan Tengah	94	467	561
Kalimantan Selatan	184	257	441
Kalimantan Timur	51	360	411
Sulawesi Utara	34	285	319
Sulawesi Tengah	71	494	566
Sulawesi Selatan	373	890	1.263
Sulawesi Tenggara	42	364	406
Gorontalo	17	95	112
Maluku	4	189	193
Maluku Utara	3	210	213
Papua	16	206	222
INDONESIA	5.023	14.651	19.674



**Rata-rata Pendapatan per Hektar dari Penanaman  
Padi dan Palawija, 1970–1998/99  
(Rupiah)**

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	U b i K a y u	U b i Jalar	Kacang Tanah	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1970	50 322	26 120	9 916	43 178	-	-	-
1971	38 949	18 914	10 050	35 357	27 622	30 340	25 799
1972	78 748	38 650	18 587	59 728	48 306	38 955	29 485
1973	106 217	54 424	20 225	65 834	63 218	35 969	47 536
Pelita I	68 559	34 527	14 695	51 024	46 382	35 088	34 273
1974	117 385	69 458	28 732	95 205	124 405	115 346	62 195
1975	133 818	70 720	41 305	133 469	138 770	134 242	80 172
1976	171 034	71 450	52 836	183 542	178 749	163 319	89 274
1977	187 714	90 118	48 078	149 959	137 926	152 467	92 477
1978	193 420	89 078	59 157	130 575	117 597	158 083	120 415
Pelita II	160 674	78 165	46 022	138 550	139 489	144 691	88 907
1979	237 281	121 758	88 472	272 323	244 560	256 253	183 107
1980	246 566	120 912	74 125	232 318	237 877	271 772	192 199
1981	274 238	144 783	73 712	209 977	274 451	280 150	180 748
1982	385 303	186 220	129 120	323 410	406 095	360 497	207 088
1983	433 656	196 154	146 820	349 225	386 930	397 109	218 628
Pelita III	315 409	153 965	102 450	277 451	309 983	313 156	196 354
1984	454 560	228 183	145 219	279 726	405 736	429 945	271 929
1985	399 541	204 367	165 590	287 276	349 915	383 153	261 211
1986	469 016	219 609	181 708	431 951	487 201	425 032	333 199
1987	651 070	245 067	229 446	552 549	624 754	545 573	439 967
1988	685 359	332 326	212 280	588 359	730 959	570 138	495 479
Pelita IV	531 909	245 910	186 849	427 972	519 713	470 768	360 357
1989	764 691	393 473	238 761	631 142	795 755	623 508	526 714
1990	901 609	494 123	334 944	758 614	809 207	801 365	671 852
1991	911 227	561 582	368 941	901 825	979 991	786 304	700 600
1992	883 220	527 608	454 607	766 841	955 315	792 432	603 339
1993	861 588	492 451	354 778	715 592	836 256	805 538	763 197
Pelita V	864 467	493 847	350 406	754 803	875 305	761 829	653 140
1994	1 073 940	574 868	435 965	921 376	1 248 103	835 499	764 584
1995	1 360 579	721 296	533 170	1 511 775	1 775 498	989 560	821 730
1996	1 440 261	824 947	707 950	1 813 313	2 011 383	1 128 041	924 790
1998/1999	3 963 665	2 360 777	1 586 964	2 371 463	3 443 792	1 888 168	1 953 855

## Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 1969-2004

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang		Padi (Sawah+Ladang)	
	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(000 Ha)	(000 Ton)	(000 Ha)	(000 Ton)	(000 Ha)	(000 Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1969	6 544	21 474	1 470	2 082	8 014	23 556
1970	6 679	23 149	1 456	2 121	8 135	25 270
1971	6 893	24 308	1 432	2 084	8 325	26 392
1972	6 602	23 402	1 296	1 949	7 898	25 351
1973	7 064	25 902	1 340	2 189	8 404	28 091
PELITA I	33 782	118 235	6 994	10 425	40 776	128 660
1974	7 340	27 531	1 168	1 846	8 508	29 377
1975	7 334	27 265	1 161	1 936	8 495	29 201
1976	7 229	21 852	1 139	1 449	8 368	23 301
1977	7 202	21 808	1 157	1 539	8 359	23 347
1978	7 698	24 172	1 231	1 599	8 929	25 771
PELITA II	36 803	122 628	5 856	8 369	42 659	130 997
1979	7 675	24 741	1 128	1 551	8 803	26 292
1980	7 824	27 993	1 181	1 659	9 005	29 652
1981	8 191	30 989	1 191	1 785	9 382	32 774
1982	7 873	31 776	1 116	1 808	8 989	33 584
1983	7 987	33 294	1 176	2 009	9 163	35 303
PELITA III	39 550	148 793	5 792	8 812	45 342	157 605
1984	8 547	36 017	1 216	2 119	9 763	38 136
1985	8 756	37 027	1 147	2 006	9 903	39 033
1986	8 888	37 740	1 100	1 987	9 988	39 727
1987	8 796	37 970	1 126	2 109	9 922	40 079
1988	8 925	39 316	1 213	2 360	10 138	41 676
PELITA IV	43 912	188 070	5 802	10 581	49 714	198 651
1989	9 375	42 371	1 156	2 354	10 531	44 725
1990	9 378	42 825	1 125	2 353	10 503	45 178
1991	9 169	42 331	1 113	2 357	10 282	44 688
1992	9 799	45 414	1 304	2 826	11 103	48 240
1993	9 807	45 559	1 206	2 622	11 013	48 181
PELITA V	47 528	218 500	5 904	12 512	53 432	231 012
1994	9 494	43 959	1 240	2 682	10 734	46 641
1995	10 081	46 806	1 358	2 938	11 439	49 744
1996	10 251	48 188	1 318	2 913	11 569	51 101
1997	9 882	46 592	1 259	2 785	11 141	49 377
1998	10 476	46 483	1 255	2 754	11 731	49 237
1999	10 794	48 201	1 169	2 665	11 963	50 866
2000	10 618	49 207	1 176	2 692	11 794	51 899
2001	10 419	47 896	1 081	2 565	11 500	50 461
2002	10 457	48 899	1 064	2 591	11 521	51 490
2003	10 395	49 378	1 094	2 759	11 489	52 137
2004	10 799	51 209	1 124	2 879	11 923	54 088

**Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah, 1961-2004  
(Hektar)**

Tahun	Jagung	Kedelai	Kacang tanah
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	2 462 485	625 117	365 055
1962	3 175 116	594 087	372 834
1963	2 559 166	539 306	351 870
1964	3 646 048	571 205	372 978
1965	2 507 071	583 346	350 698
1966	3 778 256	605 042	387 755
1967	2 547 148	589 167	350 988
1968	3 220 012	676 887	394 601
1969	2 434 823	553 783	372 279
1970	2 938 611	694 732	380 060
1971	2 626 595	679 625	375 752
1972	2 160 053	697 500	353 818
1973	3 288 602	750 506	407 185
1974	2 666 868	768 027	410 663
1975	2 444 866	751 689	474 519
1976	2 095 054	646 336	414 211
1977	2 566 509	646 121	507 249
1978	3 024 611	733 142	506 445
1979	2 593 621	784 489	473 246
1980	2 734 940	732 346	506 401
1981	2 955 039	809 978	507 958
1982	2 061 299	607 788	461 338
1983	3 002 227	639 876	480 514
1984	3 086 246	858 854	537 591
1985	2 439 966	896 220	510 037
1986	3 142 759	1 253 767	601 261
1987	2 626 033	1 100 565	550 754
1988	3 405 751	1 177 360	607 602
1989	2 944 199	1 198 096	620 817
1990	3 158 092	1 334 100	635 014
1991	2 909 100	1 368 199	628 256
1992	3 629 346	1 665 706	719 703
1993	2 939 534	1 470 206	624 289
1994	3 109 398	1 406 918	642 998
1995	3 651 838	1 477 432	739 305
1996	3 743 573	1 279 286	688 908
1997	3 355 224	1 119 079	628 142
1998	3 847 813	1 095 071	651 098
1999	3 456 357	1 151 079	624 098
2000	3 500 318	824 484	683 554
2001	3 285 866	678 848	654 838
2002	3 126 833	544 522	646 953
2003	3 358 511	526 796	683 537
2004	3 356 914	565 155	723 434

**Produksi Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah, 1961-2004  
(Ton)**

Tahun	Jagung	Kedelai	Kacang tanah
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	2 283 122	426 294	252 194
1962	3 242 940	396 839	260 688
1963	2 357 759	350 204	235 024
1964	3 768 629	391 693	261 371
1965	2 364 517	409 529	243 893
1966	3 717 438	416 932	263 482
1967	2 369 101	415 852	240 684
1968	3 166 046	419 932	286 698
1969	2 292 876	388 907	267 158
1970	2 825 215	497 883	281 309
1971	2 606 494	515 644	283 773
1972	2 254 382	518 229	282 205
1973	2 912 017	446 243	303 497
1974	3 010 781	589 239	307 166
1975	2 902 887	589 831	379 683
1976	2 572 139	521 777	341 088
1977	3 142 654	522 821	408 950
1978	4 029 201	616 599	445 812
1979	3 605 535	679 825	424 362
1980	3 990 939	652 762	469 808
1981	4 509 302	703 811	474 591
1982	3 234 825	521 394	436 822
1983	5 086 875	536 103	460 421
1984	5 287 825	769 384	534 815
1985	4 329 503	869 718	527 852
1986	5 920 374	1 226 727	641 878
1987	5 155 680	1 160 963	533 106
1988	6 651 917	1 270 418	589 265
1989	6 192 512	1 315 113	619 585
1990	6 734 028	1 487 433	650 560
1991	6 255 906	1 555 453	652 119
1992	7 995 459	1 869 713	739 050
1993	6 459 737	1 708 528	638 708
1994	6 868 885	1 564 847	631 971
1995	8 245 902	1 680 007	760 148
1996	9 307 423	1 517 181	737 815
1997	8 770 851	1 356 891	688 345
1998	10 169 488	1 305 640	692 357
1999	9 204 036	1 382 848	659 586
2000	9 676 899	1 017 634	736 517
2001	9 347 192	826 932	709 770
2002	9 654 105	673 056	718 071
2003	10 886 442	671 600	785 526
2004	11 225 243	723 483	837 495



**Luas Panen Ubi Kayu dan Ubi Jalar, 1961-2004  
(Hektar)**

Tahun	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)
1961	1 478 312	365 674
1962	1 449 154	544 433
1963	1 598 012	484 032
1964	1 578 736	620 180
1965	1 754 007	416 132
1966	1 513 190	401 590
1967	1 524 260	360 414
1968	1 503 410	403 866
1969	1 467 146	369 443
1970	1 398 070	357 568
1971	1 406 093	356 866
1972	1 468 412	337 811
1973	1 412 930	375 129
1974	1 509 440	330 250
1975	1 410 025	310 917
1976	1 353 328	301 055
1977	1 363 552	326 239
1978	1 382 902	300 540
1979	1 439 315	286 878
1980	1 412 481	276 048
1981	1 387 536	274 905
1982	1 323 709	219 655
1983	1 220 808	280 173
1984	1 350 448	263 854
1985	1 291 845	256 086
1986	1 169 886	253 067
1987	1 222 151	229 070
1988	1 302 581	247 822
1989	1 407 880	240 178
1990	1 311 564	208 732
1991	1 319 143	214 316
1992	1 351 324	229 786
1993	1 401 640	224 098
1994	1 356 580	197 170
1995	1 324 259	228 676
1996	1 415 101	211 681
1997	1 243 366	195 436
1998	1 205 353	202 093
1999	1 350 008	172 243
2000	1 284 040	194 262
2001	1 317 912	181 026
2002	1 276 533	177 276
2003	1 244 543	197 455
2004	1 255 805	184 546

## Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar , 1961-2004 (Ton)

Tahun	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)
1961	11 189 461	2 463 699
1962	11 385 973	3 679 880
1963	11 678 712	3 069 779
1964	12 261 742	3 958 081
1965	12 643 402	2 651 233
1966	11 232 494	2 475 584
1967	10 746 648	2 143 537
1968	11 355 634	2 364 297
1969	10 916 529	2 260 185
1970	10 478 308	2 175 317
1971	10 689 691	2 211 360
1972	10 384 952	2 066 329
1973	9 399 169	2 180 166
1974	13 030 674	2 469 208
1975	12 545 544	2 432 614
1976	12 190 728	2 381 213
1977	12 487 664	2 460 364
1978	12 902 011	2 082 801
1979	13 750 767	2 194 409
1980	13 726 336	2 078 767
1981	13 300 911	2 093 572
1982	12 987 891	1 675 657
1983	12 102 734	2 213 027
1984	14 167 090	2 156 529
1985	14 057 027	2 161 493
1986	13 312 119	2 090 568
1987	14 356 336	2 012 746
1988	15 471 111	2 158 629
1989	17 117 249	2 224 346
1990	15 829 935	1 971 466
1991	15 954 467	2 039 212
1992	16 515 855	2 171 036
1993	17 285 385	2 088 205
1994	15 729 232	1 845 178
1995	15 441 481	2 171 027
1996	17 002 455	2 017 516
1997	15 134 013	1 847 492
1998	14 696 203	1 935 044
1999	16 458 544	1 665 547
2000	16 089 020	1 827 687
2001	17 054 648	1 749 070
2002	16 913 104	1 771 642
2003	18 523 810	1 991 478
2004	19 424 707	1 901 802

## Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayur-sayuran Tahun 1981-2004

Tahun	Bawang Merah		Cabe		Kentang	
	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(Hektar)	(Ton)	(Hektar)	(Ton)	(Hektar)	(Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1981	51 468	176 031	-	-	30 278	216 713
1982	47 249	159 379	173 717	175 092	20 996	164 801
1983	61 143	283 819	120 388	295 760	30 305	249 986
1984	57 467	295 079	243 246	131 685	33 030	371 546
1985	68 263	361 058	264 321	341 564	32 350	372 825
1986	68 579	382 117	359 821	438 699	37 165	446 295
1987	65 164	412 522	230 429	436 189	32 019	368 961
1988	63 265	379 380	340 976	448 722	38 983	418 154
1989	60 399	399 488	438 398	747 973	39 229	559 396
1990	70 081	495 183	162 283	499 685	44 930	628 727
1991	70 989	509 013	168 061	571 178	39 620	525 839
1992	68 913	528 311	162 519	692 257	48 852	702 584
1993	74 656	561 267	157 499	762 345	51 122	809 457
1994	84 630	636 864	161 090	634 305	56 057	799 146
1995	77 210	592 544	182 263	1 588 403	62 388	1 035 259
1996	96 291	768 560	169 764	829 497	69 946	1 109 560
1997	84 540	605 737	161 602	759 592	50 190	813 367
1998	76 498	599 303	164 944	848 521	65 047	998 030
1999	104 289	938 292	183 347	1 007 727	62 776	924 058
2000	84 038	772 818	169 040	727 748	73 068	977 349
2001	82 147	861 115	142 556	580 172	55 971	831 140
2002	79 867	766 572	150 598	635 089	57 332	893 823
2003	88 029	762 796	176 264	1 066 720	65 923	1 009 979
2004 <sup>e</sup>	91 648	839 418	158 543	917 616	64 688	928 527

## Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 1981-2004 (Ton)

Tahun	Jeruk	Mangga	Nenas	Pepaya	Pisang	Salak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1981	465 729	308 601	214 373	322 952	2 058 311	56 858
1982	341 764	423 139	306 065	288 627	2 035 562	57 466
1983	493 047	447 900	322 954	240 502	1 781 469	52 014
1984	538 527	442 244	474 576	269 024	1 991 698	46 456
1985	485 236	416 444	308 762	255 423	1 908 627	94 889
1986	574 331	415 041	809 241	314 816	2 079 058	87 605
1987	557 345	515 949	347 888	321 499	2 193 332	159 868
1988	444 946	531 968	357 681	345 967	2 308 379	122 891
1989	268 591	445 042	215 414	323 041	2 183 802	96 498
1990	251 405	508 889	390 340	349 561	2 410 999	160 782
1991	353 011	640 457	375 039	297 803	2 471 925	186 394
1992	395 732	484 781	376 281	406 589	2 650 841	197 586
1993	260 130	458 586	458 895	417 951	2 642 210	348 728
1994	393 427	668 048	345 519	371 411	3 086 557	292 246
1995	1 004 631	888 959	703 300	586 080	3 805 430	662 547
1996	729 638	781 002	500 862	380 792	3 023 485	483 746
1997	696 422	1 087 692	385 779	360 503	3 057 081	525 461
1998	490 937	600 059	326 956	489 948	3 176 749	353 248
1999	348 641	659 274	300 234	421 851	3 172 839	457 353
2000	528 874	361 474	254 862	326 423	2 628 459	306 591
2001	691 433	923 294	494 968	500 571	4 300 422	681 255
2002	968 132	1 402 906	555 588	605 194	4 384 384	768 015
2003	1 529 824	1 526 474	677 089	626 745	4 177 155	928 613
2004 <sup>e</sup>	871 610	1 006 606	463 063	599 333	4 393 685	682 942



**Produksi dan Persentase Kenaikan/Penurunan Daging, Telur dan Susu  
Tahun 1969-2004**

Tahun	Daging (Ribuk Ton)	% Kenaikan Daging	Telur (Ribuk Ton)	% Kenaikan Telur	Susu (Ton)	% Kenaikan Susu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1969	309,3		57,7		28,9	
1970	314,0	1,5	58,6	1,6	29,3	1,4
1971	332,2	5,8	68,4	16,7	35,8	22,2
1972	366,2	10,2	67,5	-1,3	37,7	5,3
1973	379,4	3,6	81,4	20,6	35,0	-7,2
1974	403,1	6,2	98,1	20,5	56,9	62,6
1975	435,0	7,9	112,2	14,4	51,1	-10,2
1976	448,9	3,2	115,6	3,0	58,0	13,5
1977	467,7	4,2	131,4	13,7	60,7	4,7
1978	444,6	-4,9	151,0	14,9	62,3	2,6
1979	486,5	9,4	164,5	8,9	72,2	15,9
1980	570,8	17,3	262,6	59,6	78,4	8,6
1981	596,0	4,4	275,2	4,8	85,8	9,4
1982	628,6	5,5	297,0	7,9	117,6	37,1
1983	650,2	3,4	316,0	6,4	174,6	48,5
1984	742,2	14,1	355,3	12,4	179,0	2,5
1985	808,4	8,9	369,9	4,1	191,9	7,2
1986	879,0	8,7	437,2	18,2	220,2	14,7
1987	895,5	1,9	451,5	3,3	234,9	6,7
1988	937,0	4,6	443,1	-1,9	264,9	12,8
1989	971,1	3,6	456,2	3,0	338,2	27,7
1990	1 027,7	5,8	484,0	6,1	345,6	2,2
1991	1 099,2	7,0	510,4	5,5	360,2	4,2
1992	1 239,2	12,7	572,3	12,1	367,2	1,9
1993	1 378,3	11,2	572,9	0,1	387,5	5,5
1994	1 492,9	8,3	668,6	16,7	426,7	10,1
1995	1 508,2	1,0	736,0	10,1	433,4	1,6
1996	1 632,2	8,2	779,8	6,0	441,2	1,8
1997	1 555,1	-4,7	765,0	-1,9	423,7	-4,0
1998	1 228,5	-21,0	529,8	-30,7	375,4	-11,4
1999	1 195,9	-2,7	640,1	20,8	436,0	16,1
2000	1 445,2	20,8	783,3	22,4	495,6	13,7
2001	1 560,6	8,0	850,3	8,6	479,9	-3,2
2002	1 769,8	13,4	945,7	11,2	493,4	2,8
2003	1 871,4	5,7	973,6	3,0	553,4	12,2
2004*	1 931,4	3,2	1 051,4	8,0	596,3	7,8

**Luas Tanaman Perkebunan, 1968-2004  
(Hektar)**

Tahun	Jenis Tanaman						
	Karet	Teh	Kopi	Kakao	Kelapa sawit	Tebu	Kelapa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1968	2 208 727	119 535	339 418	12 855	119 660	105 463	1 595 494
1969	2 286 909	114 011	379 634	13 050	121 140	123 036	1 680 534
1970	2 317 287	116 082	394 873	12 110	124 193	121 715	1 805 714
1971	2 339 621	102 074	407 654	14 393	139 153	126 384	1 888 174
1972	2 343 769	98 986	405 133	17 130	141 409	148 710	1 908 224
1973	2 347 942	101 117	381 223	15 517	155 689	169 509	2 008 974
1974	2 329 081	101 506	386 571	17 563	164 339	176 775	2 130 564
1975	2 320 743	100 530	399 897	17 498	170 860	179 828	2 217 064
1976	2 305 698	101 260	440 011	15 341	179 887	208 902	2 328 834
1977	2 291 029	95 370	497 826	21 795	181 741	234 492	2 461 364
1978	2 312 455	102 002	520 574	25 759	206 577	248 101	2 505 564
1979	2 384 022	107 998	624 103	35 710	260 939	343 496	2 579 574
1980	2 383 805	112 700	707 464	37 082	294 560	316 063	2 680 424
1981	2 440 121	106 537	796 846	42 969	318 967	346 188	2 824 864
1982	2 483 922	111 355	803 028	48 429	329 901	363 320	2 852 164
1983	2 578 000	111 696	814 987	59 928	405 646	384 373	2 946 714
1984	2 711 218	118 046	894 211	78 519	512 021	342 008	3 011 484
1985	2 775 264	122 540	931 129	92 797	597 362	340 229	3 050 004
1986	2 873 584	126 293	935 199	98 115	606 780	325 703	3 112 524
1987	2 849 958	120 516	961 540	171 826	728 662	334 918	3 153 144
1988	2 944 324	125 245	1 025 947	253 104	862 859	365 529	3 225 484
1989	3 055 960	129 375	1 036 550	317 705	973 528	357 752	3 283 584
1990	3 141 609	129 080	1 069 848	357 490	1 126 677	363 968	3 393 924
1991	3 173 916	133 705	1 119 854	444 062	1 310 996	386 304	3 404 674
1992	3 220 462	133 899	1 143 666	455 116	1 467 470	394 543	3 413 794
1993	3 405 023	142 583	1 147 567	535 285	1 613 187	425 653	3 635 854
1994	3 472 379	145 524	1 140 385	597 011	1 804 149	428 736	3 681 384
1995	3 495 901	152 431	1 167 511	602 119	2 024 986	436 037	3 723 854
1996	3 518 441	142 482	1 159 079	655 331	2 249 514	446 533	3 736 054
1997	3 474 402	142 222	1 170 028	529 057	2 922 296	386 878	3 668 234
1998	3 607 295	157 039	1 153 369	572 553	3 560 196	377 089	3 705 974
1999	3 595 060	156 839	1 127 277	567 715	3 901 802	342 211	3 679 374
2000	3 372 421	153 675	1 260 687	749 917	4 158 077	340 660	3 691 414
2001	3 344 767	150 872	1 313 383	821 449	4 713 435	344 441	3 887 604
2002	3 318 359	150 707	1 372 184	914 051	5 067 058	350 722	3 884 954
2003*	3 290 426	152 217	1 381 730	917 634	5 239 171	336 257	3 882 554
2004 <sup>c</sup>	3 262 291	152 978	1 397 931	926 810	5 291 563	359 586	3 886 444

**Produksi Tanaman Perkebunan, 1968-2004  
(Ton)**

Tahun	Karet	T e h	K o p i	K a k a o	Kelapa Sawit	T e b u	K e l a p a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1968	755 640	75 774	157 347	1 204	181 444	752 100	1 132 749
1969	773 433	71 570	173 613	1 763	188 772	907 600	1 167 222
1970	802 146	64 166	185 091	1 738	216 491	872 446	1 202 902
1971	780 946	60 992	180 916	2 009	248 377	1 048 525	1 279 579
1972	800 090	59 924	178 735	1 801	269 391	1 100 577	1 255 951
1973	844 255	67 584	150 163	1 803	269 979	914 869	1 279 926
1974	816 482	65 017	149 811	3 191	351 143	1 234 726	1 343 411
1975	789 847	70 089	170 372	3 921	411 389	1 241 656	1 389 643
1976	856 548	73 765	193 377	3 909	433 880	1 318 374	1 534 641
1977	853 978	82 928	193 966	4 816	497 438	1 360 373	1 566 457
1978	884 982	92 110	222 689	5 495	524 956	1 496 968	1 578 242
1979	963 939	97 217	273 675	8 632	641 240	1 186 390	1 622 087
1980	1 020 000	106 175	294 973	10 284	721 172	1 259 950	1 666 073
1981	963 238	109 135	314 899	13 137	800 060	1 230 120	1 792 922
1982	899 214	92 732	261 251	17 260	886 820	1 626 802	1 603 045
1983	1 006 980	110 317	305 648	19 640	982 987	1 619 538	1 607 638
1984	1 032 598	126 443	315 489	26 502	1 147 190	1 810 373	1 750 488
1985	1 054 966	127 464	311 398	33 798	1 243 430	1 898 809	1 920 431
1986	1 113 133	129 481	356 822	34 327	1 350 729	2 014 574	1 974 642
1987	1 130 351	126 096	388 669	50 199	1 506 055	2 175 874	2 098 544
1988	1 173 298	133 800	391 095	79 335	1 713 335	2 004 051	2 143 987
1989	1 209 037	141 374	401 048	110 509	1 964 654	2 108 348	2 221 357
1990	1 275 295	155 919	412 767	142 347	2 412 612	2 119 585	2 331 570
1991	1 328 172	139 520	428 305	179 899	2 657 600	2 252 667	2 337 203
1992	1 371 787	141 570	440 316	183 327	3 266 250	2 258 332	2 342 167
1993	1 475 438	164 994	438 868	258 059	3 421 449	2 329 811	2 605 903
1994	1 499 424	139 222	450 191	269 981	4 008 062	2 453 881	2 649 034
1995	1 573 303	154 013	457 801	304 866	4 479 670	2 059 576	2 704 286
1996	1 574 026	169 417	459 206	373 999	4 898 658	2 094 195	2 760 886
1997	1 552 585	153 648	428 418	330 219	5 448 508	2 191 986	2 703 938
1998	1 661 898	166 825	514 451	448 927	5 930 415	1 488 269	2 778 127
1999	1 604 359	161 003	531 687	367 475	6 455 590	1 493 933	2 994 622
2000	1 501 428	162 587	554 574	421 142	7 000 508	1 690 004	3 044 528
2001	1 607 461	166 867	569 234	536 804	8 396 472	1 725 467	3 157 240
2002	1 630 359	165 194	682 019	571 155	9 622 345	1 755 354	3 098 496
2003*	1 792 294	168 053	686 319	572 640	9 817 214	1 634 560	3 229 251
2004 <sup>e</sup>	1 851 192	175 682	700 045	601 272	10 308 075	2 020 000	3 261 544

## Jumlah Perusahaan, Pekerja dan Produksi Karet Remah, 1980-2004

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pekerja	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1980	75	16 852	545 803
1981	78	18 659	571 833
1982	106	22.531	595 546
1983	101	19 993	714 354
1984	87	17 925	777 609
1985	91	18 403	365 262
1986	90	18 482	733 411
1987	87	18 268	834 895
1988	92	23 622	900 871
1989	96	21 352	946 691
1990	100	21 293	970 649
1991	99	21 019	960 558
1992	100	21 733	1 073 260
1993	100	22 153	1 121 998
1994	104	22 004	1 144 106
1995	101	20 450	1 160 782
1996	99	20 668	1 206 573
1997	97	20 565	1 204 462
1998	96	21 830	1 315 870
1999	92	22 763	1 234 258
2000	91	21 560	1 260 487
2001	88	22 632	1 396 492
2002 <sup>1)</sup>	89	22 791	1 491 465
2003 <sup>1)</sup>	87	25 474	1 608 166
2004 <sup>1)e)</sup>	88	28 472	1 733 998

Keterangan: <sup>1)</sup> Tidak Termasuk NAD



**Produksi Kayu Hutan menurut Jenis Produksi  
1978-2004 (m<sup>3</sup>)**

<b>Tahun</b> <b>(1)</b>	<b>Kayu Bulat</b> <b>(2)</b>	<b>Kayu Gergajian</b> <b>(3)</b>	<b>Kayu Lapis</b> <b>(4)</b>
1978	24 742 900	1 512 743	168 080
1979	25 313 638	1 636 950	385 614
1980	25 190 434	1 793 948	945 500
1981	15 954 426	2 659 300	1 253 400
1982 / 1983	13 376 513	3 686 400	2 309 000
1983 / 1984	15 208 568	2 710 682	2 605 141
1984 / 1985	15 957 641	2 119 074	2 400 110
1985 / 1986	14 551 451	2 643 403	4 322 443
1986 / 1987	19 758 294	7 442 000	5 312 842
1987 / 1988	27 565 919	9 750 080	6 385 350
1988 / 1989	28 485 000	10 237 500	6 026 678
1989 / 1990	24 409 000	3 919 249	8 843 000
1990 / 1991	25 312 000	3 117 000	9 415 000
1991 / 1992	23 892 000	3 006 046	9 123 500
1992 / 1993	28 267 000	3 534 356	9 874 000
1993 / 1994	26 848 011	2 244 000	9 924 000
1994 / 1995	24 027 277	1 729 732	8 066 352
1995 / 1996	24 850 061	2 014 193	9 122 401
1996 / 1997	26 069 282	3 565 475	10 270 230
1997 / 1998	29 520 332	2 613 452	6 709 836
1998 / 1999	19 026 944	2 707 221	7 154 729
1999 / 2000	20 619 942	2 060 163	4 611 878
2000	13 798 240	2 789 543	4 442 735
2001	10 051 481	674 868	2 101 485
2002	8 659 968	623 495	1 694 405
2003	10 086 217	1 134 532	3 295 490
2004	18 050 617	2 176 462	7 523 261

Sumber: Departemen Kehutanan

## Produksi Perikanan, Tahun 1968-2002 (Ribu Ton)

Tahun	Perikanan Laut	Perikanan Darat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1968	723	437	1 160
1969	785	429	1 214
1970	807	421	1 228
1971	820	424	1 244
1972	836	433	1 269
1973	889	389	1 278
1974	949	388	1 337
1975	997	393	1 390
1976	1 081	401	1 482
1977	1 158	414	1 572
1978	1 227	420	1 647
1979	1 318	431	1 749
1980	1 395	455	1 850
1981	1 408	506	1 914
1982	1 491	507	1 998
1983	1 682	532	2 214
1984	1 712	548	2 260
1985	1 822	574	2 396
1986	1 922	607	2 529
1987	2 017	653	2 670
1988	2 170	712	2 882
1989	2 272	763	3 035
1990	2 370	792	3 162
1991	2 538	812	3 350
1992	2 692	851	3 543
1993	2 886	909	3 795
1994	3 080	934	4 014
1995	3 293	971	4 264
1996	3 383	1 069	4 452
1997	3 613	967	4 580
1998	4 654	930	5 584
1999	4 728	1 046	5 774
2000	4 888	1 081	5 969
2001	5 091	1 125	6 216
2002	5 233	1 160	6 393

**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN**  
**3.11 KEUANGAN DAN HARGA**

### Nilai Tukar Petani di 14 Provinsi di Indonesia (1993=100)

Tahun	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Nanggroe Aceh Darussalam	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Lampung	Bali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1987	103,7	107,5	106,5	111,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1988	106,0	111,6	109,1	113,3	101,6	105,3	112,1	100,4	101,6	104,3
1989	103,9	106,3	102,3	104,6	101,7	102,1	106,1	100,8	100,9	115,1
1990	105,7	106,0	104,0	104,3	101,5	99,8	104,8	102,6	103,2	119,9
1991	106,2	104,6	105,0	103,6	104,4	95,6	113,0	103,3	103,1	110,9
1992	101,9	98,5	99,5	99,1	99,1	94,0	112,3	103,1	95,0	106,9
1993	94,8	95,0	96,9	94,3	96,2	85,2	107,0	97,6	87,0	103,8
1994	101,8	99,8	108,1	102,3	102,3	88,5	107,6	104,1	87,6	110,3
1995	105,5	104,7	109,3	106,4	98,2	90,9	115,3	120,4	89,1	111,8
1996	101,0	109,0	111,6	107,0	98,5	86,7	108,6	99,6	78,7	118,3
1997	104,1	104,2	114,5	112,8	95,0	85,9	121,6	105,1	75,9	119,9
1998	101,4	94,0	131,1	105,1	85,3	81,4	116,4	121,5	73,1	129,1
1999	112,1	91,5	121,5	97,6	92,1	88,9	95,3	102,4	81,4	146,3
2000	105,5	91,9	115,6	103,7	92,2	88,5	95,2	92,9	79,6	128,4
2001	109,0	101,9	125,9	114,5	90,4	93,1	86,4	76,3	79,9	144,5
2002	125,3	113,3	128,0	110,7	98,2	98,1	88,6	72,5	76,2	158,5
2003	132,6	124,1	133,3	121,2	122,1	100,8	91,1	73,3	73,6	147,1
2004	149,4	154,3	130,5	151,0	188,3	104,9	95,4	73,3	78,9	149,9

Tahun	Sulut	Suselj
(1)	(14)	(15)
1987	100,0	100,0
1988	100,3	106,9
1989	104,5	110,0
1990	112,5	112,5
1991	104,1	106,4
1992	101,8	104,7

Tahun	Sulut	Suselj
(1)	(14)	(15)
1993	96,9	99,5
1994	95,4	105,3
1995	95,6	108,1
1996	98,1	113,2
1997	101,6	115,9
1998	93,8	125,7

Tahun	Sulut	Suselj
(1)	(14)	(15)
1999	143,4	134,7
2000	143,7	110,8
2001	192,1	109,0
2002	152,2	117,1
2003	91,9	117,8
2004	105,6	118,7



**Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa, 1976-2004 (1983 = 100)**

Tahun	Jawa Barat			Jawa Tengah			D.I. Yogyakarta			Jawa Timur		
	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1976	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1977	114,0	107,0	107,0	109,0	107,0	102,0	114,0	108,0	105,0	109,0	108,0	101,0
1978	122,0	113,0	108,0	115,0	114,0	101,0	116,0	115,0	101,0	116,0	116,0	100,0
1979	143,0	131,0	109,0	140,0	133,0	105,0	142,0	137,0	104,0	143,0	139,0	103,0
1980	164,0	155,0	106,0	171,0	160,0	107,0	162,0	159,0	102,0	172,0	167,0	103,0
1981	178,0	176,0	101,0	197,0	189,0	104,0	186,0	181,0	102,0	193,0	197,0	98,0
1982	201,0	195,0	103,0	238,0	211,0	112,0	226,0	204,0	110,0	234,0	228,0	102,0
1983	255,0	238,0	107,0	335,0	259,0	130,0	323,0	256,0	126,0	339,0	287,0	118,0
1984	107,7	107,2	100,5	116,8	112,3	104,1	111,9	111,7	100,2	110,8	109,3	101,3
1985	109,3	108,4	100,8	123,1	116,5	105,6	110,6	114,3	96,7	109,7	108,9	100,6
1986	123,4	119,5	103,3	134,8	128,6	105,1	130,5	124,7	104,6	127,7	118,0	108,2
1987	138,7	133,6	103,7	156,4	145,0	107,5	148,1	138,8	106,5	147,5	132,2	111,3
1988	161,8	152,6	106,0	179,2	160,6	111,6	169,9	155,7	109,1	165,9	146,6	113,3
1989	170,5	164,1	103,9	186,2	175,1	106,3	172,2	168,2	102,3	166,6	159,2	104,6
1990	189,9	179,6	105,7	201,0	189,5	106,0	189,1	181,8	104,0	180,8	173,4	104,3
1991	215,4	202,9	106,2	224,0	214,1	104,6	212,8	202,6	105,0	200,4	193,5	103,6
1992	223,7	219,6	101,9	227,2	230,7	98,5	214,9	215,9	99,5	204,7	206,7	99,1
1993	225,2	237,4	94,8	236,2	248,7	95,0	222,8	229,6	96,9	214,1	227,1	94,3
1994	273,5	268,1	101,8	277,8	278,1	99,8	278,2	257,1	108,1	263,2	256,7	102,3
1995	316,4	299,9	105,5	333,6	318,4	104,7	321,7	294,3	109,3	313,1	294,1	106,4
1996	329,1	325,8	101,0	376,8	345,5	109,0	348,6	312,3	111,6	347,5	324,8	107,0
1997	368,8	353,7	104,1	388,6	372,8	104,2	384,0	335,1	114,5	398,3	352,9	112,8
1998	642,4	634,3	101,4	592,5	628,4	94,0	759,7	575,5	131,1	665,1	629,0	105,1
1999	346,2	308,8	112,1	290,9	318,0	91,5	371,4	305,6	121,5	342,3	350,7	97,6
2000	337,3	319,8	105,5	302,8	329,4	91,9	357,1	308,9	115,6	377,3	363,3	103,7
2001	393,4	360,4	109,0	388,8	380,8	101,9	441,4	350,3	125,9	489,9	427,4	114,5
2002	527,9	421,1	125,3	513,4	452,2	113,3	519,2	405,6	128,0	583,9	527,0	110,7
2003	603,1	454,7	132,6	623,1	502,1	124,1	592,3	444,4	133,3	714,3	589,3	121,2
2004	720,3	482,0	149,4	902,5	584,2	154,3	650,2	498,3	130,5	992,6	656,8	151,0



**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN**  
**3.13 NERACA NASIONAL**

**Tabungan Domestik, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan  
Tabungan Luar Negeri Triwulanan (triliun rupiah), 1998-2004:1**

Uraian	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>a. Tabungan domestik</b>																	
I	7,2	8,7	9,7	12,8	13,8	15,5	17,0	23,7	28,6	34,1	61,7	57,9	85,0	80,7	107,0	102,3	100,2
II	7,8	9,2	9,0	12,6	15,0	16,6	20,9	24,4	29,1	38,7	59,9	52,9	82,3	87,2	102,8	112,6	
III	9,9	12,1	11,6	13,5	15,7	17,4	19,7	29,1	38,5	40,3	83,6	65,5	87,8	102,7	103,6	109,2	
IV	8,5	11,5	16,6	15,0	19,9	20,0	29,5	32,7	43,8	37,8	55,3	75,0	70,9	103,9	91,8	106,9	
<b>b. Pembentukan modal tetap bruto</b>																	
I	7,8	9,8	11,6	16,0	16,2	18,1	19,4	29,2	32,8	41,0	52,9	56,5	72,0	77,8	82,4	89,9	102,0
II	8,8	10,3	11,2	15,1	17,4	17,8	21,8	30,3	35,6	44,4	51,8	56,6	76,5	78,9	83,9	91,5	
III	10,4	13,1	14,4	15,7	18,0	19,9	22,7	34,2	43,5	46,5	61,6	58,3	80,8	73,8	87,4	93,7	
IV	9,8	12,4	18,4	17,1	19,2	22,4	31,4	35,6	45,8	45,8	55,1	68,8	84,6	75,4	91,0	95,8	
<b>c. Tabungan luar negeri</b>																	
I	0,6	1,1	1,9	3,2	2,4	2,6	2,4	5,5	4,2	6,9	-8,9	-1,4	-13,0	-2,9	-24,6	-12,5	1,8
II	1,0	1,1	2,2	2,5	2,4	1,2	0,9	5,9	6,5	5,7	-8,2	3,7	-5,8	-8,3	-18,8	-21,1	
III	0,5	1,0	2,8	2,2	2,3	2,5	3,0	5,1	5,0	6,2	-22,0	-7,2	-7,0	-28,9	-16,2	-15,5	
IV	1,3	0,9	1,8	2,1	-0,7	2,4	1,9	2,9	1,9	8,0	-0,1	-6,2	13,7	-28,5	-0,8	-11,1	



**Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pinjaman Neto**  
**Triwulanan Sektor Pemerintah Umum (triliun rupiah), 1998-2004:1**

Uraian	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004x)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>a. Tabungan bruto</b>																	
I	1,0	2,2	3,2	7,9	6,1	7,2	8,7	7,6	8,0	15,3	3,6	1,2	8,8	10,3	11,0	24,9	15,9
II	1,8	2,1	2,3	4,4	4,1	3,4	5,7	5,8	7,7	9,6	10,3	8,7	8,5	14,2	19,7	15,5	
III	1,4	2,4	3,4	3,7	3,9	4,5	6,1	6,9	7,1	10,8	9,9	16,7	20,5	6,3	18,6	20,5	
IV	1,1	2,1	2,6	4,0	4,0	5,2	8,5	7,2	8,6	12,3	11,8	16,2	3,6	8,7	27,7	44,1	
<b>b. Pembentukan modal tetap bruto</b>																	
I	2,2	3,5	4,7	4,2	5,7	5,8	6,8	5,9	6,1	9,5	8,8	14,7	11,0	3,2	11,1	11,8	13,5
II	1,5	2,1	1,6	2,0	2,5	2,5	2,4	1,6	2,0	2,7	4,1	4,9	3,6	4,2	12,2	16,4	
III	1,3	1,9	2,0	3,7	4,0	4,1	4,4	3,1	4,6	4,5	8,1	5,8	5,1	5,5	16,4	20,9	
IV	1,4	2,6	3,1	4,4	6,5	5,6	4,8	4,8	5,2	6,0	8,2	7,1	9,5	12,2	22,2	33,3	
<b>c. Pinjaman neto</b>																	
I	1,2	1,3	1,5	-3,7	-0,4	-1,4	-1,9	1,7	1,9	5,8	-5,1	-13,6	-2,2	7,1	-0,1	13,0	2,5
II	-0,3	0,0	-0,7	-2,4	-1,6	-0,9	-3,3	4,2	5,7	6,9	6,2	3,8	4,9	9,9	7,5	-0,8	
III	-0,1	-0,5	-1,4	0,0	0,1	-0,4	-1,7	3,8	2,5	6,3	1,8	10,9	15,4	0,8	2,2	-0,4	
IV	0,3	0,5	0,5	0,4	2,5	0,4	-3,7	2,4	3,4	6,3	3,6	9,1	-5,9	-3,5	5,5	10,8	

**Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pinjaman Neto**  
**Triwulanan Sektor Domestik Lainnya (triliun rupiah), 1998-2004:1**

Uraian	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004x)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>a. Tabungan bruto</b>																	
I	6,2	6,5	6,5	4,9	7,7	8,3	8,3	15,4	19,8	17,9	85,8	64,9	74,9	71,5	89,4	69,9	73,1
II	6	7,1	6,7	8,2	10,9	13,2	15,2	17,8	20,5	28,1	87,7	51,8	72,5	6,4	103,2	117,1	
III	8,5	9,7	8,2	9,8	11,8	12,9	13,6	21,4	30,5	28,5	106,8	59,3	65,9	152,8	72,4	78,8	
IV	7,4	9,4	14	11	15,9	14,8	21	24,6	34,2	24,3	72,0	70,0	65,9	85,9	59,5	-32,2	
<b>b. Pembentukan modal tetap bruto</b>																	
I	5,6	6,3	6,9	11,8	10,5	12,3	12,6	23,1	26,4	31,3	43,4	43,5	61,1	74,3	71,1	77,6	88,7
II	7,3	8,2	9,6	13,1	14,9	15,3	19,4	28,5	33,3	41,5	47,3	50,6	68,6	72,7	70,8	74,3	
III	9,1	11,2	12,4	12	14	15,8	18,3	30,9	38,6	41,5	53,1	52,4	75,7	68,2	71,1	68,8	
IV	8,4	9,8	15,3	12,7	12,7	16,8	26,6	30,5	39,9	39,2	45,7	60,6	74,7	61,4	67,4	59,4	
<b>c. Pinjaman neto</b>																	
I	-0,6	-0,2	0,4	6,9	2,8	4	4,3	-7,7	-6,6	-13,4	42,4	21,4	13,8	-2,8	18,2	-7,7	-15,6
II	1,3	1,1	2,9	4,9	4	2,1	4,2	-10,7	-12,8	-13,4	40,4	1,2	3,9	-66,3	32,4	42,7	
III	0,6	1,5	4,2	2,2	2,2	2,9	4,7	-9,5	-8,1	-13,1	53,7	6,9	-9,8	84,6	1,3	9,9	
IV	1	0,4	1,3	1,7	-3,2	2	5,6	-5,9	-5,7	-14,9	26,3	9,4	-8,8	24,5	-7,9	-91,6	

STATISTIK  
60<sup>Tahun</sup> INDONESIA  
MERDEKA

<http://www.bps.go.id>

***GLOSSARY***

## KONSEP DAN DEFINISI

**Air Leding** adalah air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum (PAM/PDAM/BPAM).

**Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)** diperoleh dari hasil bagi antara penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah dengan penduduk berumur 7-12 tahun.

**Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR)** menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.

**Angka Harapan Hidup pada waktu lahir** adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

**Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR)** menunjukkan banyaknya kematian anak berumur kurang dari satu tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu satu tahun.

**Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)** diperoleh dari hasil bagi antara penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah dengan penduduk berumur 13-15 tahun.

**Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)** diperoleh dari hasil bagi antara penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah dengan penduduk berumur 16-18 tahun.

**Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

**Bandar udara** yang selanjutnya disingkat bandara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara,

naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan atau pos serta dilengkapi fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

**Bekerja**, kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

**Buta huruf** adalah keadaan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis meliputi:

1. Membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dengan suatu huruf;
2. Membaca dan menulis huruf Braille bagi orang buta.

Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacat tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan sebagai orang yang tidak buta huruf.

Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap buta huruf.

**Cagar Alam** adalah kawasan suaka yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami

**Data Satuan Sambungan Telepon Induk** diperoleh dari kantor PT Telkom Bandung yang merupakan jumlah telepon yang telah bersambung sampai ke pelanggan.

**Deflasi** adalah penurunan harga secara umum dari



barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pada suatu periode.

**Indeks Gini** merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila indeks Gini sama dengan nol menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks Gini sama dengan satu menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan.

**Effisiensi Usaha** adalah rasio biaya input terhadap nilai output.

**Ekspor** adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri melalui pelabuhan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Energi Final** adalah energi yang dapat dikonsumsi langsung oleh pemakai/konsumen.

**Energi Primer** adalah energi yang dalam bentuk asli yang diperoleh melalui proses penambangan, pembuatan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan atau energi yang belum mengalami pengolahan teknologi.

**Gizi** adalah suatu proses dari organisme dalam menggunakan makanan melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pembuangan zat-zat yang tidak digunakan untuk pemeliharaan hidup, pertumbuhan, fungsi organ tubuh dan produksi energi.

**Harga Perdagangan Besar (HPB)** adalah harga yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang. Pengumpulan data HPB dilaksanakan di 144 kota besar (ibukota provinsi dan kota lainnya yang potensial) di 32 provinsi.

**Hutan Suaka Alam** adalah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat-manfaat lainnya.

**Hutan Wisata** adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khas untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata baru.

**Hutan** adalah suatu lapangan tempat tumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (UU Ketentuan Pokok Kehutanan, Pasal 1).

**Impor** adalah pengiriman barang dagangan dari luar negeri ke pelabuhan di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali wilayah bebas dan Kawasan Berikat yang dianggap luar negeri. Sejak tahun 1987 wilayah bebas adalah Batam, sedangkan sebelumnya adalah Sabang.

**Indeks Harga Konsumen (IHK)** adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga tertimbang dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat khususnya di daerah perkotaan pada suatu waktu.

**Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)** adalah suatu indeks yang dapat mencerminkan perkembangan harga komoditas yang diperdagangkan di suatu negara dari waktu ke waktu pada tingkat perdagangan besar.

**Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga** adalah usaha industri yang mempunyai pekerja antara 1 - 19 orang.

**Industri Pengolahan** adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih

tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).

**Inflasi** adalah kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pada suatu periode.

**Jasa konsultan** adalah jasa yang diberikan oleh suatu usaha berbadan hukum, yang merupakan kerja sama dari sekumpulan tenaga yang memiliki kemampuan dalam bentuk pelayanan konstruksi secara profesional di dalam disiplin profesi konsultasi yang diakui dan untuk usaha tersebut mendapatkan imbalan atau balas jasa. Lingkup kerja perusahaan jasa konsultan meliputi: perencanaan umum, studi kelayakan, survei, penelitian, perencanaan, manajemen konstruksi dan pengawasan proyek.

**Jasa kontraktor** adalah jasa yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana atau sarana fisik yang berada di bawah maupun di atas permukaan bumi dengan menggunakan bahan-bahan konstruksi dan keteknik sipil, mesin dan listrik dilakukan terpisah satu sama lain atau bersama-sama dalam satu kesatuan.

**Jenis Pekerjaan/Jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

**Jumlah Jam Kerja** adalah lama waktu yang digunakan untuk bekerja selama hari masuk kerja dalam seminggu, termasuk jam kerja lembur.

**Kantor Pos** adalah suatu unit usaha yang menyelenggarakan pengiriman barang, surat, uang, dan sebagainya.

**Kawasan kumuh** adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh yang ditandai oleh banyak rumah tidak layak huni, banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, banyak penduduk

buang air besar tidak di jamban, dan biasanya berada di areal marginal, seperti tepi sungai, atau pinggir rel kereta api.

**Kepadatan Penduduk** adalah rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

**Kesehatan** menurut U.U No. 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

**Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)** didasarkan kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities* (ISIC) Revisi 3 tahun 1990 yang sudah disesuaikan.

**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati** adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

**Konstruksi** adalah suatu struktur dari hasil karya manusia yang mempunyai pondasi pada tanah yang dirancang, dipasang dan dibangun dari bahan bangunan, seperti: tanah, pasir, batu bata, kayu, besi beton, semen, kapur dan bahan-bahan lainnya, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, sarana dan prasarana fisik lainnya.

**Konsumsi rumah tangga** dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan, tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Konsumsi makanan dibedakan atas makanan pokok, makanan lainnya dan makanan jadi. Makanan pokok mencakup padi-padian dan umbi-umbian, yang disiapkan rumah tangga. Makanan lainnya

adalah makanan selain padi-padian dan umbi-umbian, yang disiapkan rumah tangga. Makanan jadi adalah semua makanan yang dikonsumsi, tetapi tidak disiapkan rumah tangga.

**Kriteria Batas Miskin** merupakan besarnya rupiah per kapita per bulan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan 2.100 kkal ditambah dengan beberapa komoditi bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transport sebagai kebutuhan penting. Tingkat kecukupan 2.100 kkal per kapita per hari didasarkan pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978.

**Lahan Kritis** adalah lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami.

**Lapangan Pekerjaan**, Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

**Lingkungan Alam:** Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan alam murni yang keberadaannya bukan disebabkan oleh usaha manusia. Lingkungan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Unit lingkungan alam adalah alam itu sendiri, sedangkan komponen atau media lingkungan alam mencakup hutan, lahan, air, flora-fauna, mineral dan udara/iklim.

**Lingkungan Buatan:** Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk atas upaya manusia mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya untuk memfasilitasi aktivitasnya baik di bidang sosial maupun ekonomi.

**Lingkungan Sosial:** Lingkungan sosial didefinisikan sebagai lingkungan nonfisik yang merupakan tumpuan manusia guna membina

kehidupan sebagai makhluk sosial. Lingkungan hidup sosial mencakup aspek kehidupan sosial di mana terjadi hubungan timbal balik antara manusia, masyarakat dan lingkungannya. Perilaku, tindakan, aktivitas, kreativitas dan rekayasa manusia dalam lingkungan non fisiknya merupakan komponen pembentuk variabel lingkungan sosial.

**Luas Lantai** adalah area di dalam bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan, seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung.

**Metode Kontrasepsi** adalah cara/alat kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

**Metode pengolahan data ekspor dan impor** menggunakan metode *'cut off date'* dan *'carry over'*. Dengan metode ini dokumen-dokumen dari pelabuhan ditunggu selama satu bulan setelah bulan berjalan, dokumen-dokumen yang datang terlambat akan dimasukkan dalam pengolahan bulan berikutnya.

**Mobil Bis** adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

**Mobil Penumpang** adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

**Negara asal utama** adalah negara tempat barang tersebut dihasilkan, dan impor dari negara tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Jika negara penghasil barang tidak diketahui maka negara asal barang adalah negara pengapalan.

**Negara tujuan utama** adalah negara tempat barang

ekspor akan dikonsumsi/diperdagangkan dan ekspor ke negara tersebut mempunyai nilai yang tinggi.

**Neraca Arus Dana (NAD)** merupakan suatu sistem data finansial yang secara lengkap menggambarkan penggunaan tabungan dan sumber dana lainnya di masing-masing institusi untuk membiayai investasi riil maupun finansial melalui berbagai jenis instrumen finansial. Institusi yang dicakup dalam sistem ini terdiri dari Otoritas Moneter, Bank Pencipta Uang Giral, Pemerintah, Luar Negeri dan Sektor Domestik lainnya.

**Neraca Pembayaran Indonesia** adalah statistik mengenai transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain dalam satu periode tertentu.

Transaksi ekonomi tersebut merupakan pertukaran nilai ekonomi oleh suatu unit kepada unit ekonomi lainnya yang meliputi:

- a. pertukaran barang atau jasa *financial items*,
- b. barter,
- c. pertukaran antara *financial items* tanpa ada imbalan.

Yang dimaksud dengan penduduk Indonesia menurut pencatatan neraca pembayaran terdiri dari individu-individu, lembaga pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan konsumsi, produksi dan transaksi ekonomi lainnya; dan yang berdomisili lebih dari satu tahun.

**Nilai Ekspor** adalah nilai transaksi barang ekspor sampai di atas kapal pelabuhan muat dalam keadaan *free on board* (f.o.b). Nilai f.o.b ini adalah nilai barang di pasar wilayah pabean negara eksportir, termasuk biaya angkutan barang ke wilayah pabean, pajak ekspor, dan biaya muat barang ke kapal.

**Nilai Impor** adalah nilai transaksi barang dagangan

yang diimpor dari luar negeri dalam keadaan *cost, insurance, and freight* (c.i.f). Nilai c.i.f ini adalah nilai barang di wilayah pabean negara importir termasuk seluruh biaya angkutan dan asuransi, tetapi tidak termasuk biaya bongkar dari kapal.

**Nilai konstruksi** adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau surat perintah kerja antara pemilik dengan kontraktor.

**Nilai Tukar Petani (NTP)** adalah rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib).

**Indeks harga yang diterima oleh petani** adalah perkembangan rata-rata harga komoditas hasil pertanian yang diterima oleh petani.

**Indeks harga yang dibayar oleh petani** adalah perkembangan rata-rata harga barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga petani dan untuk kebutuhan proses produksi pertanian.

Angka NTP < 100, berarti tingkat kesejahteraan relatif atau daya beli masyarakat petani mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan tingkat kesejahteraan petani pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan untuk penghitungan It dan Ib adalah tahun 1993 dan 1983.

Angka NTP = 100, berarti tingkat kesejahteraan relatif petani tidak mengalami perubahan sejak tahun dasar.

Angka NTP > 100, berarti tingkat kesejahteraan relatif petani mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar.

**Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Partisipasi sekolah** adalah persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut.

**PDB, PNB dan PN per kapita** masing-masing diperoleh dari PDB, PNB dan PN dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

**Pencatatan data ekspor** menganut sistem perdagangan umum, yaitu pencatatan didasarkan pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah bebas dan kawasan berikat.

**Pencatatan data impor** menganut sistem perdagangan khusus, yaitu pencatatan dilakukan berdasarkan pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, tidak termasuk wilayah bebas Batam dan kawasan berikat.

**Pencatatan data perdagangan luar negeri** didasarkan pada realisasi arus barang, yakni setelah barang mendapat persetujuan muat atau bongkar (clearance) dari petugas Bea dan Cukai.

**Pendapatan Nasional (PN)** adalah PNB dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung - subsidi).

**Penduduk Usia Kerja**, definisi penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk usia 15 tahun keatas.

**Penerimaan dalam negeri** merupakan sumber utama pendapatan negara yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

**Penerimaan negara bukan pajak** terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penerimaan negara bukan pajak lainnya yang merupakan penerimaan negara

yang bersumber dari departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND) dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Misalnya penerimaan rutin luar negeri, penerimaan pendidikan, penerimaan kejaksaan dan peradilan, penerimaan penjualan, penerimaan sewa dan jasa, penerimaan swadana, dan penerimaan kembali pinjaman, serta penerimaan lain-lain.

**Penerimaan perpajakan** terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional.

**Pengangguran** adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Pengeluaran rata-rata perkapita** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

**Pertambangan** adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair, dan gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan bumi (tambang terbuka) maupun di bawah tanah (tambang dalam). Termasuk kegiatan pertambangan adalah penggalian, pengerukan, dan penyedotan dengan tujuan mengambil benda padat, cair, atau gas yang ada di dalamnya. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak dan bijih mangan. Kegiatan pemecahan, peleburan, pemurnian dan proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan

pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri. Kegiatan persiapan tempat penambangan penggalian seperti pembuatan jalan, jembatan dari dan ke arah lokasi penambangan, pengerukan, pemasangan pipa penyaluran, dan sebagainya termasuk ke dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan penelitian mengenai prospek barang tambang dan mineral termasuk ke dalam jasa pertambangan.

Kegiatan pengambilan, pembersihan, dan pemurnian air untuk dijadikan air bersih termasuk sektor air minum.

**Perusahaan Air Minum** adalah perusahaan yang kegiatannya mengumpulkan, membersihkan dan menjual/menyalurkan air ke rumah tangga, Perusahaan, Lembaga Sosial dan sebagainya.

**Perusahaan atau usaha industri** adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha tersebut.

**Perusahaan industri digolongkan sebagai berikut:**

**Industri Besar**, apabila suatu perusahaan industri mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.

**Industri Sedang**, apabila suatu perusahaan industri mempunyai tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

**Industri Kecil**, apabila suatu perusahaan industri mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

**Industri Kerajinan Rumah Tangga**, apabila suatu perusahaan industri mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Penggolongan perusahaan industri pengolahan

ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja di perusahaan industri tersebut, tanpa memperhatikan apakah perusahaan ini menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

**Perusahaan jasa konstruksi** dibedakan menjadi dua bagian menurut jenis kegiatan usahanya, yang terdiri dari atas (1) jasa kontraktor dan (2) jasa konsultan.

**Perusahaan/Usaha Air Bersih** adalah suatu unit (kesatuan) produksi yang terletak di suatu tempat tertentu yang mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan penjernihan air permukaan dari sumber air seperti : sungai, danau, dan lain-lain. Usaha penampungan dan penyaluran air secara langsung dari terminal air, mobil tangki (mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administrative dari perusahaan air bersih tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. Termasuk juga didalamnya usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti: jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.

**Perusahaan/Usaha Gas** adalah suatu unit (kesatuan) produksi yang terletak di suatu tempat tertentu yang mencakup usaha penyediaan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar dengan cara pembelian gas bumi (termasuk LPG) dan atau pembuatannya yang disertai usaha peningkatan mutu gas yang dihasilkan dari gas bumi, bahan bakar minyak, batubara, biogas atau bahan hidrokarbon lain. Termasuk usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi; yang bertekanan tinggi; dan yang bertekanan menengah ke bawah baik berasal dari produksi sendiri

maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Termasuk juga didalamnya usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran gas, seperti : jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan

**Perusahaan/Usaha Ketenagalistrikan** adalah suatu unit (kesatuan) produksi yang terletak di suatu tempat tertentu yang mencakup usaha membangkitkan tenaga listrik yang berasal dari sumber energi seperti: dari tenaga air, batubara, gas, bahan bakar minyak, tenaga surya, panas bumi, tenaga nuklir dan lain-lain. Termasuk usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi dan atau bertegangan ekstra tinggi juga melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain. Termasuk didalamnya usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.

**Produk Domestik Bruto (PDB)** adalah hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu negara pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun atau tiga bulanan).

**Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan** adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, (2) pengeluaran konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto

barang dan jasa merupakan ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa.

**Produk Nasional Bruto (PNB)** merupakan PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, sedangkan pendapatan neto merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi pendapatan milik penduduk asing yang diperoleh dari Indonesia.

**Produktivitas Tenaga Kerja** adalah nilai output dibagi dengan jumlah tenaga kerja.

**Rata-rata tamu per hari** adalah rata-rata tamu yang datang dan menginap di hotel/akomodasi per hari, dihitung berdasarkan tamu yang datang dan menginap.

**Rumah Tangga Pertanian** adalah rumah tangga yang paling tidak satu orang anggota rumah tangganya melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko sendiri.

**Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan** adalah rumah tangga pertanian yang melakukan kegiatan bertani tanaman padi/palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, tanaman kayu-kayu kehutanan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, dan budidaya ikan/biota lain di tambak air payau.

**Rumah Tangga Petani Gurem** adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar.

**Sepeda Motor** adalah kendaraan bermotor beroda dua.

**Setengah penganggur** adalah penduduk usia kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Lihat **Penduduk Usia**

**Kerja.**

**Setengah penganggur sukarela** adalah setengah penganggur tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pekerja paruh waktu). Lihat **Setengah penganggur**.

**Setengah penganggur terpaksa** adalah setengah penganggur yang masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Lihat **Setengah penganggur**.

**Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)** merupakan suatu kerangka data yang disusun dalam bentuk matriks yang merangkum berbagai variabel sosial ekonomi secara konsisten dan terintegrasi sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai perekonomian suatu negara dan keterkaitan antar variabel ekonomi dan sosial pada suatu waktu tertentu. Salah satu manfaat dari penyusunan SNSE adalah untuk melihat masalah kesenjangan pendapatan rumah tangga.

**Status gizi balita** adalah keadaan tubuh anak balita yang ditentukan berdasarkan berat badan menurut umur. Kategori status gizi mengikuti rujukan WHO-NCHS yaitu menggunakan tabel status gizi.

**Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya.

**Suaka Margasatwa** adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

**Suku bunga deposito** adalah rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka pada akhir periode menurut jangka waktu. Penimbangannya adalah posisi deposito pada akhir periode.

**Survei Biaya Hidup (SBH)** adalah survei pengeluaran konsumsi rumahtangga yang

dimaksudkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat khususnya di daerah perkotaan sebagai bahan penyusunan IHK.

**Tabel Input-Output (I-O)** merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Isian sepanjang baris dalam matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor ekonomialokasikan ke sektor sektor lainnya untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan isian dalam kolom menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya.

**Taman Laut** adalah kawasan lepas pantai atau laut yang masih dalam batas laut Indonesia, yang didalamnya mengandung batu-batuan kosong dan biota di mana terdapat ekosistem dan atau keindahan khusus yang keadaan alamnya secara fisik tidak mengalami perubahan oleh manusia dengan tujuan pemanfaatannya

**Taman Wisata** adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan

**Tamat pada suatu jenjang pendidikan** adalah selesai mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu sekolah sampai akhir dengan mendapatkan sertifikat tanda tamat belajar atau ijazah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi ia mengikuti ujian dan lulus, dianggap “tamam”.

**Tamu asing** adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya didorong oleh satu atau beberapa



keperluan.

**Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, atau berita melalui kawat, radio, telepon, dan telegraf secara visual atau sistem elektronik.

**Tenaga kerja harian lepas/mandays** adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan konstruksi hanya pada saat mengerjakan proyek saja.

**Tenaga kerja tetap** adalah pekerja yang bekerja tetap pada perusahaan konstruksi dan tidak tergantung dengan ada tidak adanya proyek.

**Tingkat buta huruf** adalah persentase penduduk buta huruf pada kelompok umur tertentu terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur tersebut.

**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

**Tingkat penghunian kamar hotel** adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

**Transportasi laut** menampilkan data tentang pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau luar negeri yang kemudian disebut **Barang yang dimuat**. Disamping itu juga ditampilkan data tentang pembongkaran barang dari kapal yang diangkut

dari pelabuhan asal di Indonesia atau luar negeri yang disebut **Barang dibongkar**.

**Truk** adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

**Uang Beredar dalam arti luas (M2)** adalah kewajiban moneter dari sistem moneter yang terdiri atas uang kartal, uang giral ditambah dengan uang kuasi.

**Uang Beredar dalam arti sempit (M1)** adalah kewajiban moneter dari sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang giral.

**Uang Giral** terdiri atas rekening giro, kiriman uang, serta deposito berjangka simpanan (milik penduduk pada BPUG). Dalam uang giral tidak termasuk saldo rekening Giro BPUG pada Bank Indonesia.

**Uang Kartal** terdiri atas uang kertas dan uang logam yang masih berlaku, tidak termasuk uang pada kas negara dan Bank-bank Pencipta Uang Giral (BPUG).

**Uang Kuasi** terdiri atas deposito berjangka yang belum jatuh waktu, tabungan dan simpanan dalam valutas asing milik penduduk pada BPUG.

**Urbanisasi** adalah persentase penduduk daerah perkotaan.

**Usaha akomodasi** adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

**Usaha Kecil menurut Undang-Undang Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih kecil atau sama dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih kecil atau sama dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Usaha konstruksi** adalah kegiatan yang melaksanakan pembongkaran, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan/perbaikan bangunan konstruksi atas dasar kontrak, subkontrak atau untuk keperluan sendiri, atau untuk dijual/ditukar. Usaha ini untuk menunjang kehidupan dan menanggung resiko.

**Usaha Menengah dan Usaha Besar menurut Undang-Undang Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995** adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil yaitu lebih besar dari Rp200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Usaha Menengah menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1999** adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Wisatawan (*tourist*)** adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari satu tahun dengan maksud kunjungan antara lain berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, mengunjungi teman/famili, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kesehatan, studi, dan keagamaan, dan bukan untuk memperoleh penghasilan/pekerjaan di tempat yang dikunjungi.

**STATISTIK**  
**60**<sup>Tahun</sup> **INDONESIA**  
**MERDEKA**

<http://www.bps.go.id>

**INDEKS**

# INDEKS

## A

Air 12, 19, 40, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 89, 95, 97, 99, 150, 151, 152, 153, 176, 181, 188, 221, 246, 259, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 350, 352, 353, 356, 357

Air Bersih 19, 69, 74, 77, 78, 150, 151, 152, 246, 356

Air Leding 12, 68, 69, 78, 350

Air Tanah 78

Daur Hidrologi 77

Hidrologi 77, 83

Konservasi Air 77

PDAM 78, 350

Perusahaan Air Minum 78, 350, 356

Perusahaan/Usaha Air Bersih 78, 350, 356

Resapan Air 76

Akomodasi 22, 194, 199, 200, 201, 226, 228, 229, 230, 357, 359

Rata-rata tamu per hari 357

Tingkat Penghunian Kamar Hotel 20

TPK 20, 200. *Lihat* Akomodasi: Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Usaha Akomodasi 199, 201, 359

Angka Fertilitas Total 350

TFR 26, 28, 29, 30, 350. *Lihat* Angka Fertilitas Total

*Total Fertility Rate* 26, 350. *Lihat* Angka Fertilitas Total

Angka Harapan Hidup 26, 31, 350

Angka Kematian Bayi 26, 28, 31, 350

Angkatan Kerja 10, 11, 36, 37, 38, 40, 240, 258, 261, 262, 350, 359

Bekerja 36, 37, 39, 40, 131, 229, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 350, 352, 353, 355, 358, 359

Jam Kerja 36, 262, 352, 358

Jabatan. *Lihat* Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan 7, 160, 262, 265, 352

Pengangguran 19, 36, 37, 38, 39, 40, 350, 355, 359

Setengah Pengangguran 39, 357, 358

Status Pekerjaan 262, 358

TKK 11, 38, 359. *Lihat* Angkatan Kerja: Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja 11, 38, 359

TPAK 38, 359. *Lihat* Angkatan Kerja: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 11, 38, 359

TPT 38, 359. *Lihat* Angkatan Kerja: Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka 38, 359

## B

Bandar Udara 182, 183, 350

Bencana 5, 86

Banjir 76, 77

Erosi 76

Longsor 76, 77

Bukan Angkatan Kerja 37, 38

Buta Huruf 10, 11, 50, 51, 350, 359

Tingkat Buta Huruf 51, 359

## D

Desa 4, 5, 6, 7, 11, 29, 69, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 178, 240, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 264, 267

Kelurahan 4, 5, 7, 86, 87, 88, 89, 255, 256, 258, 261, 267

Perdesaan 11, 29, 44, 46, 50, 52, 53, 64, 65, 76, 77, 86, 87

Perkotaan 7, 10, 11, 26, 28, 29, 44, 46, 50, 52, 53, 64, 65, 74, 76, 77, 81, 86, 87, 88, 351, 358, 359

Distribusi Pendapatan 11, 12, 61, 62, 63, 64, 258, 259, 260

Indeks Gini 62, 64, 65, 351

Pemerataan Pendapatan 63, 64, 238, 241, 265, 351

## E

Ekosistem 83, 350, 358

Ekspor 16, 20, 21, 22, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 181, 195, 206, 218, 221, 245, 254, 255, 257, 259, 262, 263, 266, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 351, 353, 354, 355, 357

Barang yang Dimuat 359

Muat Barang 181

Negara Tujuan Utama 166, 168, 354

Nilai Ekspor 16, 21, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 195, 354

Pencatatan data ekspor 355

Energi Final 19, 150, 151, 153, 154, 351

Energi Primer 19, 150, 151, 153, 351

## F

Fasilitas 12, 27, 29, 44, 45, 69, 74, 77, 86, 88, 89, 172, 181, 188, 189, 252, 350, 359

Fasilitas Ekonomi 86, 89

Fasilitas Infrastruktur 89

Fasilitas Sosial 86, 88, 89

Infrastruktur 89, 159

## G

Gas 16, 18, 19, 40, 79, 80, 82, 85, 86, 95, 97, 98, 99, 130, 131, 132, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 208, 210, 221, 246, 259, 282, 284, 286, 288, 313, 314, 316, 318, 320, 355, 356, 357



Gas Kota 19, 150, 151, 152  
 Perusahaan/Usaha Gas 356  
 Gizi 11, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 259, 351, 353, 358  
 Status Gizi Balita 44, 45, 46, 259, 358

I  
 Impor 16, 21, 22, 77, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 181, 206, 218, 221, 244, 245, 254, 255, 257, 259, 262, 263, 266, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 351, 353, 354, 355, 357  
 Barang Dibongkar 359  
 Negara Asal Utama 173, 353  
 Nilai Impor 21, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 354  
 Pencatatan data impor 355  
 Industri 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 58, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 97, 98, 99, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 154, 165, 168, 169, 170, 171, 195, 200, 218, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 246, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 351, 352, 356  
 Efisiensi 96, 145, 146, 188, 195, 226, 233, 234  
 IKKR. *Lihat* Industri: Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga  
 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 140, 226, 231, 232, 233, 234

## K

Kantor Pos 86, 89, 90, 352  
 Keanekaragaman Hayati 83  
 Kehutanan 17, 40, 125, 126, 210, 246, 247, 258, 260, 261, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 323, 351, 357  
 Hutan 18, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 85, 168, 351, 353, 358  
*Illegal Logging* 76  
 Kayu Bulat 18, 125  
 Produksi Kayu Bulat 18, 125  
 Kayu Gergajian 18, 125  
 Produksi Kayu Gergajian 18  
 Kayu Lapis 18, 125, 169  
 Produksi Kayu Lapis 18  
 Kayu Olahan 169  
 Populasi Pohon 126  
 Kemiskinan 11, 12, 61, 62, 63, 64, 265  
 Kriteria Batas Miskin 353  
 Penduduk Miskin 12, 62, 63, 260, 265  
 Kendaraan 20, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 91, 176, 177, 178, 179, 255, 353, 357, 359  
 Mobil Bis 353  
 Mobil Penumpang 80, 82, 83, 178, 353  
 Sepeda Motor 20, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 178, 228, 357  
 Truk 80, 82, 83, 178, 359  
 Kesehatan 11, 27, 29, 30, 32, 43, 44, 45, 46, 69, 78, 79, 87, 88, 216, 259, 260, 265, 352, 353, 360  
 Konservasi 77, 83, 84, 85, 352  
 Cagar Alam 83, 84, 85, 350

Hutan Suaka Alam 351  
 Hutan Wisata 351, 358  
 Kawasan Konservasi 83, 84, 85  
 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 83, 352  
 Pelestarian Alam 84  
 Suaka Alam 358  
 Suaka Margasatwa 83, 84, 85, 358  
 Sumber Daya Alam Hayati 352  
 Taman Laut 83, 84, 358  
 Taman Nasional 83, 84, 85  
 Taman Wisata 83, 84, 85, 358  
 Konstruksi 18, 19, 22, 97, 99, 130, 157, 158, 159, 160, 218, 220, 221, 228, 229, 230, 257, 258, 259, 260, 263, 352, 354, 356, 359, 360  
 Jasa Konsultan 352, 356  
 Jasa Kontraktor 352, 356  
 Nilai Konstruksi 158, 159, 160, 354  
 Perusahaan Jasa Konstruksi 159, 356  
 Usaha Konstruksi 160, 229, 230, 360  
 Konsumsi 11, 21, 55, 56, 57, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 170, 171, 195, 214, 222, 245, 256, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 352, 354, 355, 357, 358  
 Konsumsi Makanan 57, 352  
 Konsumsi Rumah Tangga 57, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 222, 245, 352, 354, 357  
 Makanan Jadi 57, 352, 353  
 Makanan Lainnya 352, 353  
 Makanan Pokok 57, 352  
 Pengeluaran rata-rata perkapita 355  
 Kriminalitas 74, 255  
*Crime Clock* 74, 90  
*Crime Rate* 74, 90  
*Crime Total* 74, 90  
 Tindak Pidana 74, 90, 91  
 Kumuh 88, 352  
 Kawasan Kumuh 352  
 Permukiman Kumuh 88  
*Slum Area* 88

## L

Lahan 17, 18, 38, 74, 75, 76, 77, 79, 97, 99, 109, 110, 130, 195, 240, 353, 357  
 Lahan Bukan Sawah 74, 75  
 Lahan Kritis 77, 353  
 Lahan Sawah 74, 75, 76, 77  
 Penggunaan Lahan 74, 75, 76, 109  
 Lapangan Pekerjaan. *Lihat* Lapangan Usaha  
 Lapangan Usaha 22, 95, 97, 99, 227, 228, 229, 230, 238, 246, 247, 262, 265, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 352, 353  
 Lingkungan 11, 45, 68, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 195, 251, 352, 353  
 Lingkungan Alam 77, 353  
 Lingkungan Buatan 353

Lingkungan Sosial 353  
 Listrik 12, 19, 39, 40, 68, 69, 74, 77, 86, 89, 90, 95, 97, 99, 141, 150, 151, 153, 154, 159, 221, 228, 229, 230, 246, 259, 260, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 352, 357  
 Perusahaan/Usaha Ketenagalistrikan 357  
 Luas Lantai 69, 70, 353

## M

Masa Kemerdekaan 6, 253, 255  
 Masa Penjajahan 5  
 Metode Kontrasepsi 353  
 Mineral 74, 85, 86, 130, 131, 132, 134, 151, 259, 353, 356

## N

Neraca Arus Dana 95, 241, 260, 354

## O

Otonomi Daerah 7, 262, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 354

## P

Partisipasi Sekolah 50, 52, 53, 262, 350, 355  
 Angka Partisipasi Sekolah 50, 52, 53, 350  
 Pelita 17, 20, 21, 29, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 111, 112, 169, 170, 172, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 188, 189, 206, 207, 208, 215  
 Pendapatan Nasional 239, 264, 313, 314, 355  
 PN 355. *Lihat* Pendapatan Nasional  
 Perdagangan  
 Bongkar Muat Barang 181  
 Metode pengolahan data ekspor dan impor 353  
 Pencatatan data perdagangan luar negeri 355  
 Perikanan 17, 18, 40, 77, 125, 256, 257, 261, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 323  
 Perkebunan 18, 75, 122, 167, 254, 255, 257, 260, 261, 262, 357  
 Luas Tanaman Perkebunan 122  
 Pertambangan 16, 18, 39, 40, 85, 95, 97, 98, 99, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 168, 169, 210, 218, 221, 228, 229, 230, 246, 257, 259, 260, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 355, 356  
 Batubara 18, 19, 85, 86, 130, 131, 132, 133, 150, 153, 154, 355, 357  
 Emas 18, 21, 32, 85, 95, 98, 130, 131, 133, 134, 168, 171, 172, 355  
 Gas Bumi 16, 18, 19, 98, 130, 131, 132, 150, 151, 153, 154, 313, 314, 355, 356  
 Kondensat 18, 130, 131, 132

Minyak Mentah 18, 98, 130, 131, 132, 168, 313, 314  
 Perak 18, 21, 85, 86, 130, 133, 134, 168, 171, 172, 355  
 Tembaga 18, 130, 134, 355  
 Pertanian 16, 17, 22, 36, 39, 40, 74, 76, 77, 78, 82, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 140, 159, 168, 169, 218, 221, 222, 228, 240, 241, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 323, 353, 354, 357  
 Perusahaan Pertanian 256  
 Petani 17, 22, 110, 206, 222, 223, 240, 241, 342, 343, 354, 357  
 Petani Gurem 17, 110, 241, 357  
 Peternakan 121, 256, 257, 260, 261, 282, 284, 286, 288, 314, 316, 318, 320, 357  
 Babi 18  
 Kambing/Domba 18  
 Populasi Ternak 18  
 Produksi Daging 18, 121  
 Produk Domestik Bruto 16, 17, 95, 97, 100, 101, 102, 140, 165, 239, 245, 262, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 308, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 357  
 PDB 16, 17, 18, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 130, 140, 165, 239, 245, 260, 313, 314, 355, 357. *Lihat* Produk Domestik Bruto  
 PDB Menurut Lapangan Usaha 95  
 Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan 357  
 Produk Nasional Bruto 313, 314, 357  
 PNB 239, 355, 357. *Lihat* Produk Nasional Bruto  
 Produktivitas 19, 140, 144, 145, 150, 152, 153, 226, 233, 234, 357

## R

Rumah Tangga 12, 17, 18, 19, 22, 29, 38, 56, 57, 68, 69, 70, 74, 78, 81, 87, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 120, 126, 140, 150, 154, 159, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 238, 239, 240, 241, 245, 247, 250, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358  
 Rumah Tangga Pertanian 17, 109, 110, 256, 260, 357  
 Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan 357  
 Rumah Tangga Petani Gurem 357

## S

Sejarah Indonesia 5  
 ST 17, 89. *Lihat* Sensus Pertanian  
 Sensus Pertanian 17, 253, 256, 258, 260, 262, 263, 264  
 Sistem Neraca Sosial Ekonomi 95, 259, 358  
 SNSE 95, 239, 259, 358. *Lihat* Sistem Neraca Sosial Ekonomi  
 Spesies 83  
 SDA 210, 355. *Lihat* Sumber Daya Alam  
 Sumber Daya Alam 75, 83, 85, 86, 210, 352, 355

## T

- Tabel I-O 244, 246. *Lihat* Tabel Input-Output
- Tabel Input-Output 95, 238, 244, 258, 260, 263
- Tamat pada suatu jenjang pendidikan 358
- Tanaman Biofarmaka 18, 119, 120
- Jahe 18
  - Kunyit 18
  - Laos/Lengkuas 18
- Tanaman Obat 18. *Lihat* Tanaman Biofarmaka
- Tanaman Buah-buahan 18
- Jeruk 18
  - Mangga 18
  - Nenas 18, 116
  - Pepaya 18, 116
  - Pisang 18
  - Salak 18
- Tanaman Hias 18, 118, 119
- Anggrek 18
  - Mawar 18
  - Sedap Malam 18
- Tanaman Pangan 257
- Jagung 111, 115
    - Luas Panen Jagung 115
    - Produksi Jagung 115
  - Kacang Tanah 111, 115
  - Kedelai 111, 115
  - Padi 111, 112, 258
    - Luas Panen Padi 112
    - Produksi Padi 16, 17, 112, 255, 256
  - Padi Ladang 111
  - Padi Sawah 17, 111, 112
  - Ubi Jalar 112, 114, 115, 116
  - Ubi Kayu 112, 114, 115, 116
- Tanaman Perkebunan 18, 122, 257
- Kakao 123
  - Karet 21, 123, 125, 144, 167, 168
  - Karet Remah 125
  - Kelapa 6, 18, 123, 168
  - Kopi 18, 21, 123, 168
  - Tebu 123
  - Teh 21, 123, 168
- Tanaman Sayuran 18
- Bawang Merah 116
  - Cabe 18, 116
  - Kentang 18, 116
- Telekomunikasi 185, 186, 187, 188, 228, 359
- Telepon 20, 186, 187, 188, 189, 190, 266, 350, 359
    - Data Satuan Sambungan Telepon Induk 350
    - Satuan Sambungan Telepon Induk 187, 188, 350
- Tenaga Kerja 11, 18, 19, 22, 35, 36, 38, 39, 130, 134, 135, 136, 140, 143, 144, 145, 152, 158, 159, 160, 165, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 259, 265, 356, 357, 359
- mandays* 359. *Lihat* Tenaga Kerja: Tenaga kerja harian lepas
  - Tenaga kerja harian lepas 359
  - Tenaga Kerja Tetap 135

## U

- Udara 20, 74, 79, 80, 85, 176, 177, 182, 183, 196, 350, 353
- Emisi 74, 79, 80, 81, 82, 83
  - Fotosintesis 83
  - HC. *Lihat* Udara: Hidrokarbon
  - Hidrokarbon 74, 79, 80, 82, 83, 356
  - CO. *Lihat* Udara: Karbon Monoksida
  - Karbon Monoksida 74, 79, 80, 81, 82, 83
  - Kualitas Udara 79
  - Nitrogen Oksida 81
  - NO<sub>x</sub> 79, 81, 82, 83. *Lihat* Nitrogen Oksida
  - Pollutant Materials* 79
  - Polusi Udara 74, 79, 80
  - SO<sub>x</sub> 79, 82, 83. *Lihat* Udara: Sulfur Oksida
  - Sulfur Oksida 82
- Urbanisasi 11, 28, 29, 359
- Usaha 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
- Usaha Besar 360
  - Usaha Kecil 22, 227, 359, 360
  - Usaha Menengah 22, 360
  - Usaha Menengah dan Usaha Besar 360
- Usia Kerja 31, 36, 37, 38, 350, 355, 357, 358, 359
- Penduduk Usia Kerja 36, 37, 38, 355, 358

## W

- Wilayah Administrasi 3, 4, 6, 7, 86, 260, 261
- Wisatawan 19, 194, 195, 198, 200, 262, 360
- Tamu Asing 201, 202, 358

*Kepala Badan Pusat Statistik  
Mempersembahkan*

STATISTIK  
60<sup>Tahun</sup> INDONESIA  
MERDEKA